



**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI  
TAHUN 2025-2029**

**20  
25**



**20  
29**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**



GUBERNUR JAMBI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI  
dan  
GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN  
2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi Jambi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Provinsi, rencana struktur ruang wilayah Provinsi, rencana pola ruang wilayah Provinsi, penetapan kawasan strategis Provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai tujuan.



## Pasal 2

- (1) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Jambi dan RPJMN Tahun 2025-2029.
- (4) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota.

## BAB II SISTEMATIKA RPJMD

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
- (2) Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

BAB III : VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (3) Dokumen RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; dan
  - b. pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebijakan perencanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029;
  - b. pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; dan
  - c. hasil RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV PERUBAHAN RPJMD PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

##### Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tahapan penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 6

RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 tetap digunakan sampai dengan berlakunya RKPD yang disusun berdasarkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029

#### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2024), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

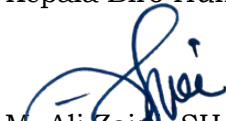
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 27 Agustus 2025  
GUBERNUR JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zein, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

**ttd**

H. AL HARIS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 27 Agustus 2025  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

**ttd**

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 4  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (6-104/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah untuk:

- a. menetapkan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/kota;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



## DAFTAR ISI

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR TABEL

|               |                                                                                       |            |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB I</b>  | <b>PENDAHULUAN .....</b>                                                              | <b>1-1</b> |
| 1.1           | Latar Belakang .....                                                                  | 1-1        |
| 1.2           | Dasar Hukum Penyusunan .....                                                          | 1-2        |
| 1.3           | Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen<br>Perencanaan Pembangunan Lainnya ..... | 1-7        |
| 1.4           | Maksud Dan Tujuan.....                                                                | 1-11       |
| 1.4.1         | Maksud .....                                                                          | 1-11       |
| 1.4.2         | Tujuan .....                                                                          | 1-12       |
| 1.5           | Sistematika Penulisan .....                                                           | 1-13       |
| <b>BAB II</b> | <b>GAMBARAN UMUM DAERAH.....</b>                                                      | <b>2-1</b> |
| 2.1.          | Aspek Geografi dan Demografi.....                                                     | 2-1        |
| 2.1.1         | Posisi dan Peran Strategis Daerah .....                                               | 2-1        |
| 2.1.2         | Potensi Sumber Daya Alam .....                                                        | 2-5        |
| 2.1.3         | Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup .....                                   | 2-24       |
| 2.1.4         | Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan .                                     | 2-34       |
| 2.1.5         | Lingkungan Hidup Berkualitas .....                                                    | 2-40       |
| 2.1.6         | Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim .....                                 | 2-44       |
| 2.1.7         | Demografi .....                                                                       | 2-50       |
| 2.2.          | Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....                                                   | 2-55       |
| 2.2.1         | Kesejahteraan Ekonomi .....                                                           | 2-55       |
| 2.2.2         | Kesehatan untuk Semua .....                                                           | 2-73       |
| 2.2.3         | Pendidikan Berkualitas yang Merata .....                                              | 2-78       |
| 2.2.4         | Perlindungan Sosial yang Adaptif .....                                                | 2-91       |
| 2.2.5         | Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju .....                                        | 2-92       |
| 2.2.6         | Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat<br>Inklusif.....              | 2-97       |
| 2.3.          | Aspek Daya Saing Daerah .....                                                         | 2-103      |
| 2.3.1         | Daya Saing Sumber Daya Manusia.....                                                   | 2-103      |
| 2.3.2         | Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi.....                                        | 2-104      |

|                |                                                                                      |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3.3          | Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru .....                                               | 2-114      |
| 2.3.4          | Transformasi Digital .....                                                           | 2-114      |
| 2.3.5          | Integrasi Ekonomi Domestik dan Global .....                                          | 2-117      |
| 2.3.6          | Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi .<br>.....                 | 2-119      |
| 2.3.7          | Stabilitas Ekonomi Makro .....                                                       | 2-128      |
| 2.4.           | Aspek Pelayanan Umum.....                                                            | 2-131      |
| 2.4.1          | Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif.....                         | 2-131      |
| 2.4.2          | Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan<br>Demokrasi Substansial..... | 2-133      |
| 2.4.3          | Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar<br>Kawasan .....                 | 2-136      |
| 2.4.4          | Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah.....                                       | 2-137      |
| 2.5.           | Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan .....                                    | 2-174      |
| 2.6.           | Gambaran Keuangan Daerah .....                                                       | 2-177      |
| 2.6.1          | Kinerja Keuangan Masa lalu.....                                                      | 2-178      |
| 2.6.2          | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu .....                                       | 2-204      |
| 2.6.3          | Kerangka Pendanaan.....                                                              | 2-207      |
| 2.7.           | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah .....                                      | 2-220      |
| 2.7.1          | Permasalahan Pembangunan Daerah .....                                                | 2-221      |
| 2.7.2          | Penyelerasan terhadap RTRW .....                                                     | 2-246      |
| 2.7.3          | Isu Strategis .....                                                                  | 2-248      |
| <b>BAB III</b> | <b>VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN<br/>DAERAH.....</b>                 | <b>3-1</b> |
| 3.1            | Visi .....                                                                           | 3-1        |
| 3.2            | Misi .....                                                                           | 3-2        |
| 3.3            | Tujuan dan Sasaran.....                                                              | 3-3        |
| 3.3.1          | Tujuan Pembangunan Daerah .....                                                      | 3-3        |
| 3.3.2          | Sasaran Pembangunan Daerah .....                                                     | 3-5        |
| 3.4            | Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....                                         | 3-18       |
| 3.4.1          | Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi.....                                            | 3-27       |

**BAB IV            PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA**  
**PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....4-1**

**BAB V            PENUTUP .....5-1**

5.1            Kaidah Pelaksanaan ..... 5-1

                 5.1.1. Manajemen Resiko pembangunan ..... 5-3

                 5.1.2. Kerangka Regulasi..... 5-4

5.2            Pedoman Transisi ..... 5-4

DAFTAR GAMBAR

|             |                                                                                                                                          |      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gambar 1-1  | Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....                                                                            | 1-11 |
| Gambar 2-1  | Peta Administrasi Provinsi Jambi.....                                                                                                    | 2-4  |
| Gambar 2-2  | Orientasi Wilayah Provinsi Jambi .....                                                                                                   | 2-5  |
| Gambar 2-3  | Sebaran DAS di Provinsi Jambi.....                                                                                                       | 2-11 |
| Gambar 2-4  | Produktivitas Air Tanah Provinsi Jambi .....                                                                                             | 2-16 |
| Gambar 2-5  | Peta Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi .....                                                                                        | 2-17 |
| Gambar 2-6  | Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Menurut Kemampuan Pengaturan Iklim Tahun 2020-2049 .....                    | 2-19 |
| Gambar 2-7  | Peta Proyeksi Perubahan Suhu Rata-rata Tahunan di Indonesia 2020-2049 .....                                                              | 2-20 |
| Gambar 2-8  | Peta Proyeksi Perubahan Hari Kering Di Indonesia 2020-2049 .....                                                                         | 2-21 |
| Gambar 2-9  | Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049 .....                                                                 | 2-21 |
| Gambar 2-10 | Peta Jasa Penyedia Pangan Provinsi Jambi .....                                                                                           | 2-26 |
| Gambar 2-11 | Neraca Air Wilayah Proivinsi Jambi 2021 .....                                                                                            | 2-28 |
| Gambar 2-12 | Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi.....                                                                                        | 2-32 |
| Gambar 2-13 | Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi.....                                                                                       | 2-33 |
| Gambar 2-14 | Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                             | 2-35 |
| Gambar 2-15 | Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                    | 2-36 |
| Gambar 2-16 | Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (kWh) .....                                                                   | 2-38 |
| Gambar 2-17 | Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024 ..... | 2-39 |
| Gambar 2-18 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 .....                                                                    | 2-41 |
| Gambar 2-19 | Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Provinsi Jambi Tahun 2002-2024 .....                                                  | 2-42 |

|             |                                                                                                                    |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gambar 2-20 | Timbulan Sampah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....                                                                | 2-43 |
| Gambar 2-21 | Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030.                                                                | 2-48 |
| Gambar 2-22 | Indeks Resiko Bencana Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .                                                             | 2-50 |
| Gambar 2-23 | Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                     | 2-52 |
| Gambar 2-24 | Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024.....                                                                   | 2-53 |
| Gambar 2-25 | Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 (Ribu Jiwa) .....                                                 | 2-54 |
| Gambar 2-26 | Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020- 2024                                                                | 2-56 |
| Gambar 2-27 | Pertumbuhan PDRB Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024.....                                      | 2-58 |
| Gambar 2-28 | Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 (Dalam Milyar Rupiah).....                     | 2-59 |
| Gambar 2-29 | Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 .....                        | 2-61 |
| Gambar 2-30 | Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 ..... | 2-62 |
| Gambar 2-31 | Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (P0) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                     | 2-63 |
| Gambar 2-32 | Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribu Jiwa) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....                                  | 2-65 |
| Gambar 2-33 | PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020 -2024 (Dalam Juta Rupiah) .....                             | 2-66 |
| Gambar 2-34 | Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi Tahun 2019-2024 .....                                                  | 2-67 |
| Gambar 2-35 | Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                   | 2-68 |
| Gambar 2-36 | Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 .....                                                 | 2-69 |
| Gambar 2-37 | IPM Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                           | 2-71 |
| Gambar 2-38 | IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.                                                              | 2-72 |
| Gambar 2-39 | Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .                                                                | 2-74 |
| Gambar 2-40 | Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023.....                                                               | 2-75 |
| Gambar 2-41 | Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 ...                                                          | 2-76 |

|             |                                                                                                        |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2-42 | Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024<br>.....                                         | 2-79  |
| Gambar 2-43 | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun<br>2020-2024 .....                              | 2-80  |
| Gambar 2-44 | Rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin di Provinsi<br>Jambi Tahun 2020-2024.....                 | 2-81  |
| Gambar 2-45 | Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .2-<br>83                                          |       |
| Gambar 2-46 | Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun<br>2020-2024 .....                                | 2-84  |
| Gambar 2-47 | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat.....                                                            | 2-86  |
| Gambar 2-48 | Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi<br>Tahun 2020-2024 .....                        | 2-88  |
| Gambar 2-49 | Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA<br>Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....          | 2-89  |
| Gambar 2-50 | Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024                                                     | 2-91  |
| Gambar 2-51 | Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi Tahun<br>2021-2024 .....                                 | 2-93  |
| Gambar 2-52 | Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi Tahun<br>2020-2023 .....                                  | 2-94  |
| Gambar 2-53 | Indeks Perlindungan Khusus Anak Provinsi Jambi Tahun<br>2019-2023 .....                                | 2-98  |
| Gambar 2-54 | Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2020-2023<br>.....                                       | 2-99  |
| Gambar 2-55 | Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020-<br>2024 .....                                     | 2-100 |
| Gambar 2-56 | Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020-<br>2024 .....                                     | 2-101 |
| Gambar 2-57 | Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2019-<br>2023 .....                                     | 2-102 |
| Gambar 2-58 | Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi<br>Tahun 2020-2024 .....                        | 2-104 |
| Gambar 2-59 | Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi<br>Jambi Tahun 2020-2024.....                  | 2-105 |
| Gambar 2-60 | Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum<br>terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024..... | 2-106 |
| Gambar 2-61 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun<br>2020-2024 .....                             | 2-107 |

|             |                                                                                                                                |       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gambar 2-62 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....                            | 2-108 |
| Gambar 2-63 | Pola Konsumsi Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                  | 2-112 |
| Gambar 2-64 | Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2020- 2024 ..                                                                          | 2-113 |
| Gambar 2-65 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 .....                                     | 2-116 |
| Gambar 2-66 | Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                    | 2-117 |
| Gambar 2-67 | Distribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....                                            | 2-118 |
| Gambar 2-68 | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                               | 2-120 |
| Gambar 2-69 | Status Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 .....                                                           | 2-121 |
| Gambar 2-70 | Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                             | 2-123 |
| Gambar 2-71 | Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi .....                                                                                        | 2-124 |
| Gambar 2-72 | Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi .....                                                                                     | 2-125 |
| Gambar 2-73 | Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .2-126                                                                    |       |
| Gambar 2-74 | Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 ...                                                                         | 2-127 |
| Gambar 2-75 | Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                           | 2-129 |
| Gambar 2-76 | Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                                  | 2-130 |
| Gambar 2-77 | Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi Tahun 2021-20242-133                                                                    |       |
| Gambar 2-78 | Jumlah Kejahatan dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                  | 2-135 |
| Gambar 2-79 | Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Utama Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025..... | 2-222 |
| Gambar 2-80 | Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Pertambangan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025 .....                                     | 2-224 |
| Gambar 2-81 | Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Provinsi Jambi terhadap Nasional, Tahun 2019 - 2024 ..                  | 227   |
| Gambar 2-82 | Perbandingan IPM Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 .....                                     | 2-228 |

|             |                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gambar 2-83 | Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... 2-229                 |
| Gambar 2-84 | Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... 2-231                                             |
| Gambar 2-85 | Panjang Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024 ..... 2-232                                                                  |
| Gambar 2-86 | Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Air Minum Layak Dan Sanitasi Layak Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 ..... 2-235                    |
| Gambar 2-87 | Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ..... 2-236                                      |
| Gambar 2-88 | Produksi Padi dan Jagung Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2023 ..... 2-238                                                                          |
| Gambar 2-89 | Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 ..... 2-238                                                                       |
| Gambar 2-90 | Perkembangan Aset, Omset Usaha dan Serapan Tenaga Kerja UMKM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023 ..... 2-239                                        |
| Gambar 2-91 | Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Jambi Tahun 2019-2022 ..... 2-240                                                             |
| Gambar 2-92 | Indeks Gini Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... 2-241                                                    |
| Gambar 2-93 | Capaian Indikator-Indikator Penerapan Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi Tahun 2024 ..... 2-243                                                |
| Gambar 2-94 | Deforestasi Dan Degradasi Hutan Yang Terjadi Tahun 1990 – 2018..... 2-246                                                                      |
| Gambar 2-95 | Risiko Global Jangka Menengah..... 2-249                                                                                                       |
| Gambar 2-96 | Isu Strategis Jangka Menengah Nasional ..... 2-251                                                                                             |
| Gambar 3-1  | Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Sumatera ..... 3-27                                                                   |
| Gambar 3-2  | Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Jambi pada RPJMN 2025-2029 ..... 3-28                                                                       |
| Gambar 3-3  | Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan 2024 ..... 3-29 |
| Gambar 3-4  | Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024 ..... 3-31        |



|            |                                                                                                                                            |      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Gambar 3-5 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-<br>Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional<br>Tahun 2020 dan Tahun 2024..... | 3-32 |
| Gambar 3-6 | Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding<br>Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024<br>.....                   | 3-33 |
| Gambar 3-7 | IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi<br>Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024 .....                             | 3-34 |
| Gambar 3-8 | Penahapan Pembangunan .....                                                                                                                | 3-36 |
| Gambar 3-9 | Pengembangan Kawasan Sentusa (Sengeti – Tungkal –<br>Sabak) .....                                                                          | 3-72 |

DAFTAR TABEL

|            |                                                                                                                                          |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2-1  | Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi.....                                                          | 2-2   |
| Tabel 2-2  | Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari .....                                                                          | 2-11  |
| Tabel 2.3  | Nama Sungai yang Melintasi Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota .....                                                                   | 2-13  |
| Tabel 2.4  | Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi .....                                                                                           | 2-13  |
| Tabel 2.5  | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi .....                                    | 2-18  |
| Tabel 2.6  | Tutupan Lahan Provinsi Jambi .....                                                                                                       | 2-23  |
| Tabel 2.7  | Pola Penggunaan Lahan tahun 2022 di Wilayah Provinsi Jambi .....                                                                         | 2-23  |
| Tabel 2.8  | Luas dan Status Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi ..                                                                                  | 2-26  |
| Tabel 2.9  | Kebutuhan dan Ketersediaan Ruang Hidup Layak (Tidak Rawan Bencana) Bagi Penduduk Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota Pada Tahun 2020. .... | 2-29  |
| Tabel 2.10 | Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Menurut Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi .....        | 2-46  |
| Tabel 2.11 | Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) Provinsi Jambi .....                                                                    | 2-47  |
| Tabel 2.12 | Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024.....                                                      | 2-52  |
| Tabel 2.13 | Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024 .....                                                             | 2-52  |
| Tabel 2.14 | Tingkat Kegemaran Membaca Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024 .....                                                      | 2-85  |
| Tabel 2.15 | Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jambi.....                                                                                            | 2-95  |
| Tabel 2.16 | Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024 .....                                             | 2-96  |
| Tabel 2.17 | Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024...                                                                                  | 2-108 |

|            |                                                                                                                      |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2.18 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jambi Tahun 2021-2024.....                                   | 2-130 |
| Tabel 2.19 | Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2021-2023 .....                                                      | 2-132 |
| Tabel 2.20 | Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                                        | 2-134 |
| Tabel 2.21 | Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Jambi Tahun 2022-2024 .....                                                 | 136   |
| Tabel 2-22 | Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2024 .....                                             | 2-174 |
| Tabel 2-23 | Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi berdasarkan kelompok pilar TPB Tahun 2024.....               | 2-176 |
| Tabel 2.24 | Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .2-                          | 178   |
| Tabel 2.25 | Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                               | 2-184 |
| Tabel 2.26 | Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (Rp).....                                         | 2-185 |
| Tabel 2.27 | Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                               | 2-188 |
| Tabel 2.28 | Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                        | 2-189 |
| Tabel 2.29 | Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024 ...2- | 191   |
| Tabel 2.30 | Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 - 31 Desember 2024 .....                      | 2-196 |
| Tabel 2.31 | Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....                                     | 2-199 |
| Tabel 2.32 | Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.....                                    | 2-200 |
| Tabel 2.33 | Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                      | 2-202 |
| Tabel 2.34 | Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....                                    | 2-204 |
| Tabel 2.35 | Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024                                                                 | 2-206 |

|            |                                                                                                                  |       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tabel 2.36 | Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                                     | 2-207 |
| Tabel 2.37 | Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2026-2030 .....                      | 2-210 |
| Tabel 2.38 | Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Jambi Tahun 2026-2030.....                                  | 2-216 |
| Tabel 2.39 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030..... | 2-217 |
| Tabel 2.40 | Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030.....                | 2-218 |
| Tabel 2.41 | Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2019 dan 2024 .....            | 2-229 |
| Tabel 2.42 | Deviasi capaian Aspek sistem Merit dibanding Target Ideal 2-243                                                  |       |
| Tabel 2.43 | Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jambi .....                                               | 2-254 |
| Tabel 2.44 | Matriks Penelaahan Integrasi KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 ke RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029.....          | 264   |
| Tabel 2.45 | Matriks Penelaahan Isu Strategis.....                                                                            | 2-269 |
| Tabel 3-1  | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi .....                                              | 3-10  |
| Tabel 3-2  | Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 .....                             | 3-15  |
| Tabel 3-3  | Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 .3-17                                                         |       |
| Tabel 3-4  | Arah Kebijakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 .....                                                            | 3-18  |
| Tabel 3-5  | Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024 .....                                           | 3-28  |
| Tabel 3-6  | Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                        | 3-29  |
| Tabel 3-7  | Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                  | 3-30  |
| Tabel 3-8  | Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....                | 3-31  |
| Tabel 3-9  | Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024.....                                    | 3-32  |

|            |                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3-10 | Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 .....3-33                      |
| Tabel 3-11 | Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa 3-67                                                                  |
| Tabel 3-12 | Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin...3- ..... 68                                                        |
| Tabel 3-13 | Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/ UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial .....3-69                       |
| Tabel 3-14 | Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se- Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 .....3-71                                |
| Tabel 3-15 | Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 .....3-72                                  |
| Tabel 3-16 | Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029.....3-73                         |
| Tabel 3-17 | Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 .....3-73                                          |
| Tabel 3-18 | Program Prioritas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 .....3-74                                                       |
| Tabel 4-1  | Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jambi.....4-1                                        |
| Tabel 4-2  | Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi ...4-85                                                                |
| Tabel 4-3  | Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi .....4-85                                                               |
| Tabel 4-4  | Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi .....4-87 |

# BAB I

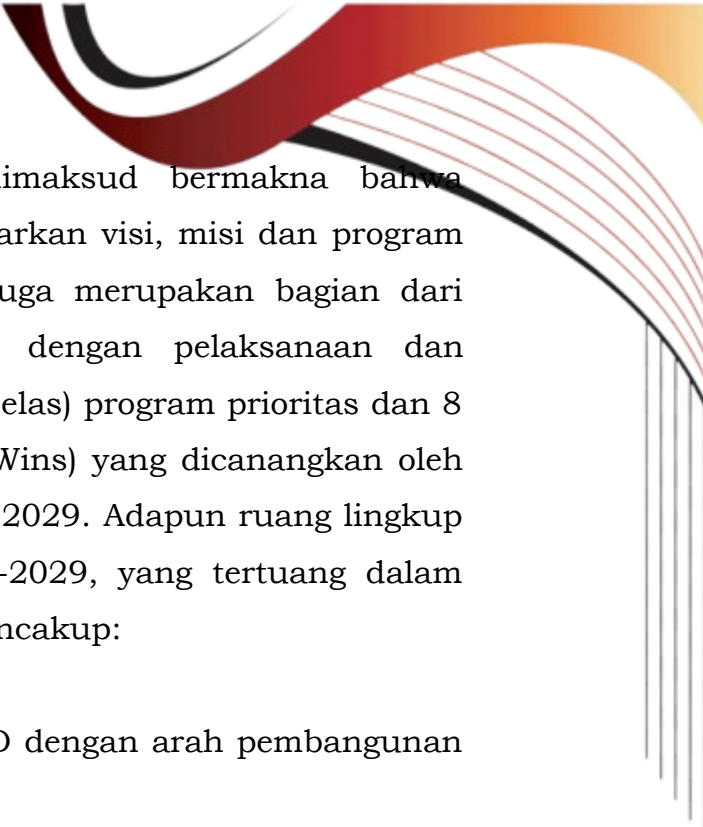
## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Sebagai upaya untuk menciptakan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel, proses perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan akuntabel. Selain itu, secara substantif, perencanaan pembangunan daerah juga harus menggunakan pendekatan yang holistik, tematik, integratif, dan spasial.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bapak Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H dan Bapak Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I yang dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa jabatan 2025-2030. Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, maka dilakukan penyelarasan terhadap kinerja dan periodisasi antara RPJMD dan RPJMN



Tahun 2025-2029. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) program prioritas dan 8 (delapan) Proyek Hasil terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2025-2029. Adapun ruang lingkup penyelarasan terhadap RPJMN Tahun 2025-2029, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mencakup:

1. Periodisasi;
2. Strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029;
3. Indikator Utama Pembangunan dalam RPJPD dan RPJMN Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam RPJMD;
4. Indikator makro RPJMD Tahun 2025-2029 dengan indikator makro sebagai sasaran utama pembangunan per provinsi dalam arah pembangunan kewilayahan (Lampiran IV) RPJMN Tahun 2025-2029
5. Program Perangkat Daerah mendukung pelaksanaan daftar 83 kegiatan prioritas utama (Lampiran I) RPJMN Tahun 2025-2029.

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan tahapan lima (5) tahun pertama dalam rangka mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, yaitu JAMBI YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN. Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dilakukan secara terpadu, menyeluruh, dan komprehensif serta mengedepankan partisipasi masyarakat dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi pemangku kepentingan dan stakeholder pembangunan lainnya serta implementasi pertumbuhan ekonomi hijau Jambi. Dokumen ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

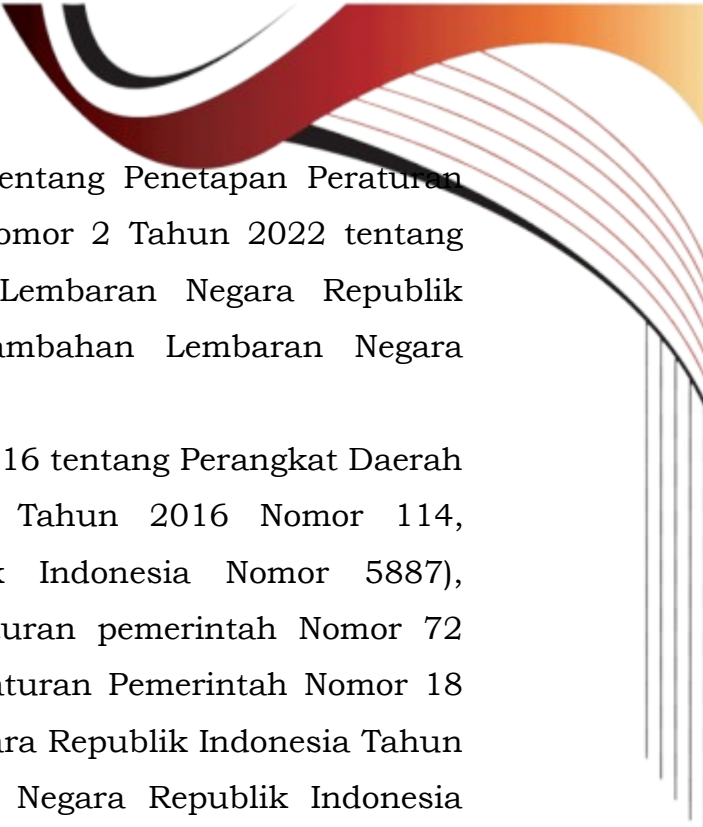
Landasan idiil dalam penyusunan RPJMD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan, landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang

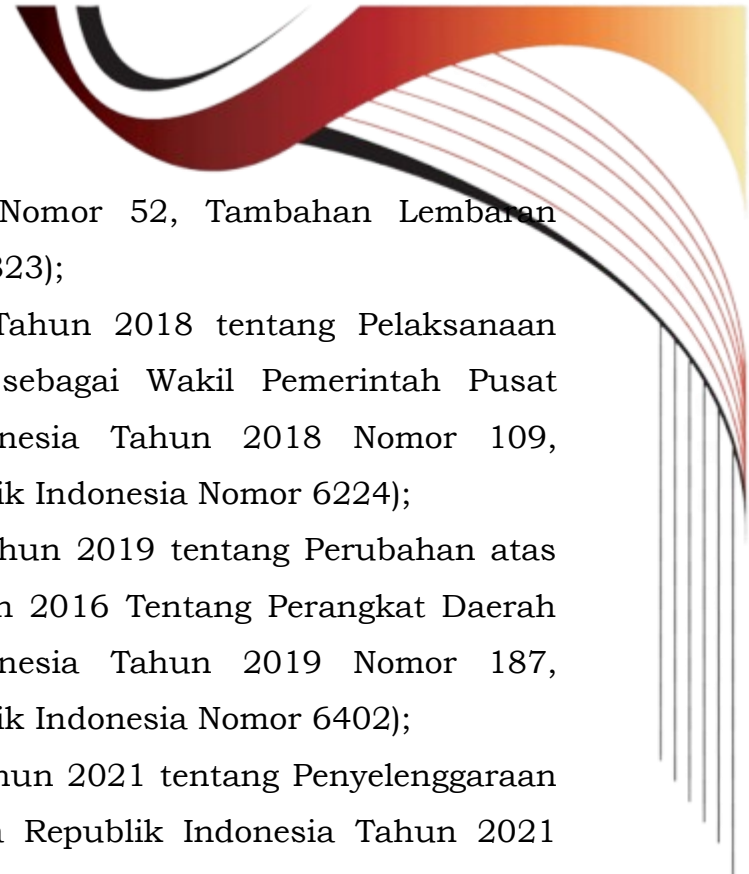


berkaitan langsung dengan pembangunan daerah. Sedangkan dasar hukum penyusunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);



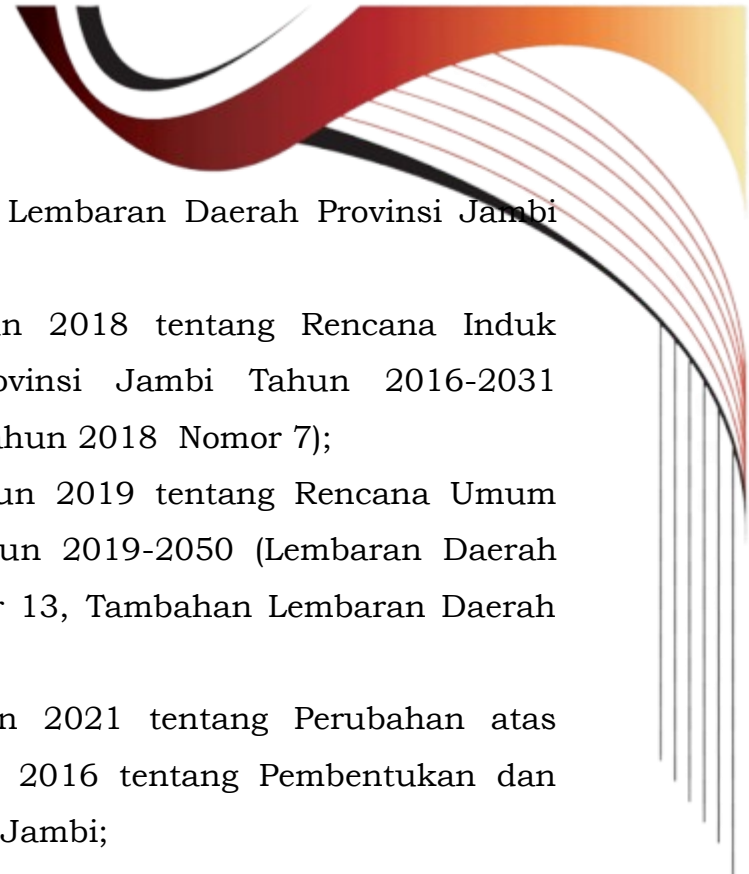
- 
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
22. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Bidang ESDM Subbidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 20);
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) ;
  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  33. Instruksi menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan renstra PD Tahun 2025-2029;
  34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jambi

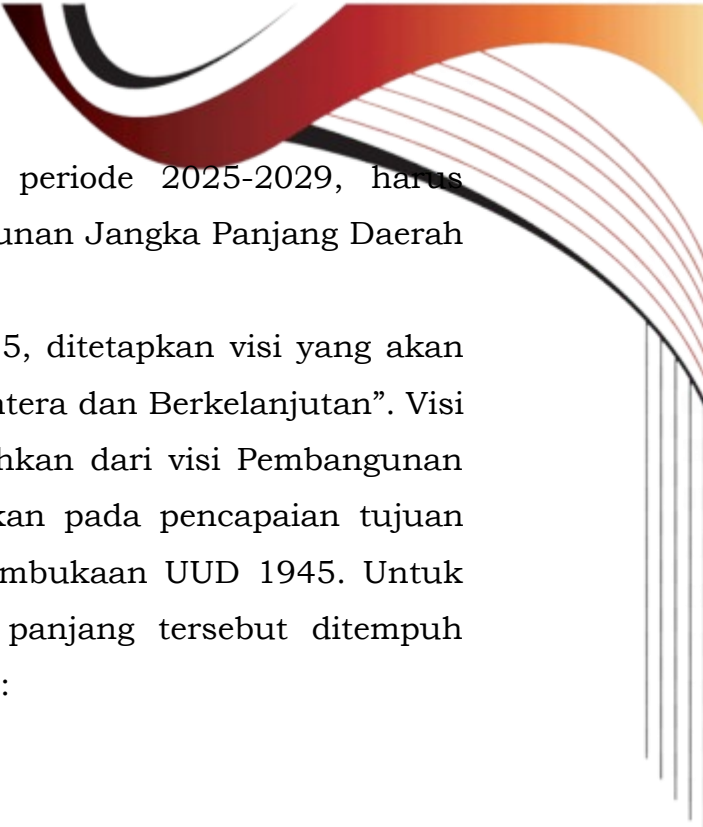
- 
- Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6);
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jambi Tahun 2016-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 7);
  36. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 13);
  37. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
  38. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jambi Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 7);
  39. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
  40. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 12).

### **1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya**

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

#### **1. RPJMD dan RPJPD Provinsi Jambi**

RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 merupakan rencana pembangunan tahap pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Karena itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas



Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2029, harus berpedoman pula pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi.

Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2025 – 2045, ditetapkan visi yang akan diwujudkan, yaitu “Jambi yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Visi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun 2025-2045 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 8 (enam) misi pembangunan yaitu :

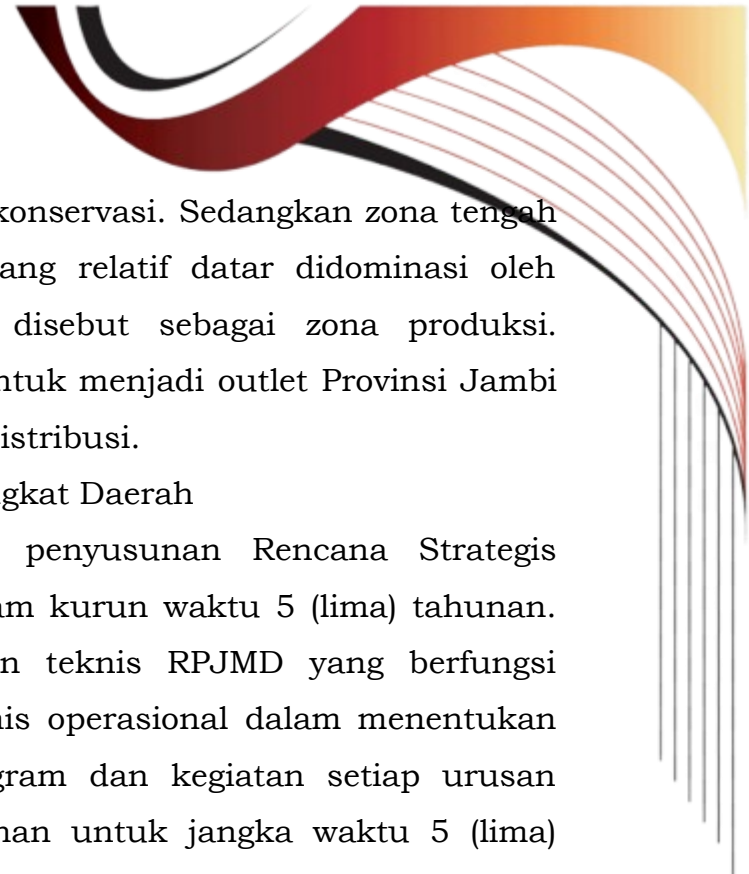
- 1) Mewujudkan transformasi sosial;
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi;
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintah;
- 4) Memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah;
- 5) Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
- 6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
- 7) Mewujudkan transformasi penyediaan sarana prasarana daerah yang berkualitas dan ramah lingkungan
- 8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan

## 2. RPJMD dan RTRW Provinsi Jambi

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, harus berpedoman pula pada RTRW Provinsi Jambi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023, sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Jambi. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam yang berasaskan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Dari pembagian kawasan lindung dan budi daya yang juga berkaitan dengan topografi dan rona wilayah, Provinsi Jambi bisa dibagi dalam tiga zona yaitu barat, tengah dan timur. Zona Barat Provinsi Jambi yang merupakan dataran tinggi didominasi oleh kegiatan konservasi





sehingga bisa disebut sebagai zona konservasi. Sedangkan zona tengah Provinsi Jambi dengan topografi yang relatif datar didominasi oleh kegiatan produksi sehingga bisa disebut sebagai zona produksi. Sedangkan zona timur diarahkan untuk menjadi outlet Provinsi Jambi sehingga bisa disebut sebagai zona distribusi.

3. RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Sehingga Renstra PD merupakan bagian integral dari RPJMD.

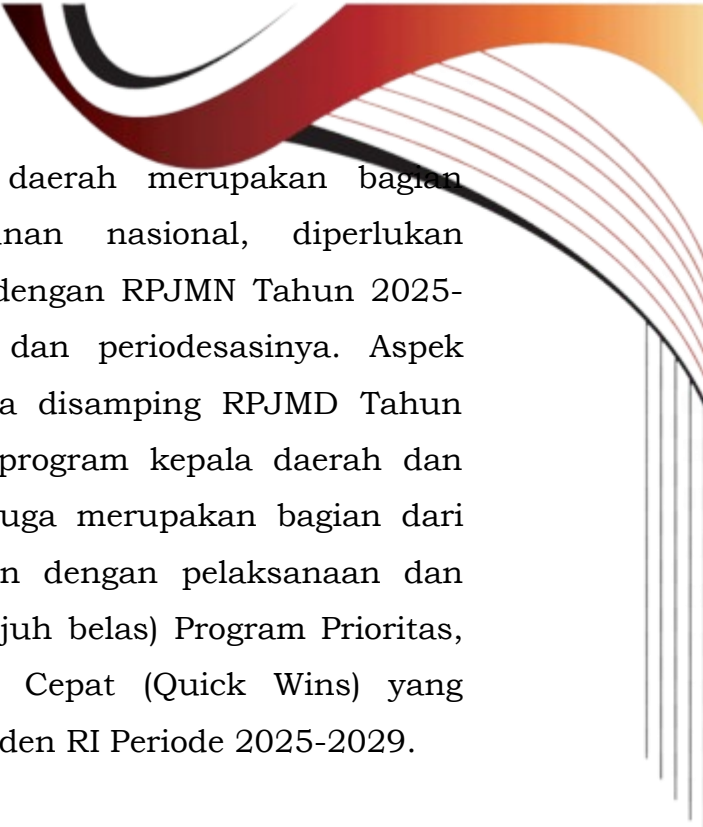
4. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, pada setiap tahunnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Provinsi Jambi yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi.

5. RPJMN dan RPJMD Provinsi Jambi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan.

Visi, Misi dan Program yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi pedoman bagi pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dan pembangunan nasional.



Mengingat perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029, mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (Delapan) Asta Cita, 17 (Tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (Delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) yang dicanangkan oleh Presiden dan wakil Presiden RI Periode 2025-2029.

6. RTRWN dan RPJMD Provinsi Jambi

Sesuai dengan RTRWN, Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan strategis nasional tersebut adalah:

- Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan).
- Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi).
- Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau).
- Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi).

Dalam RPJMD Provinsi Jambi keempat kawasan strategis tersebut difungsikan sesuai dengan arahan ruangnya dalam RTRWN dengan penguatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

7. RPJMD dan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi Daerah (RIPJPID)

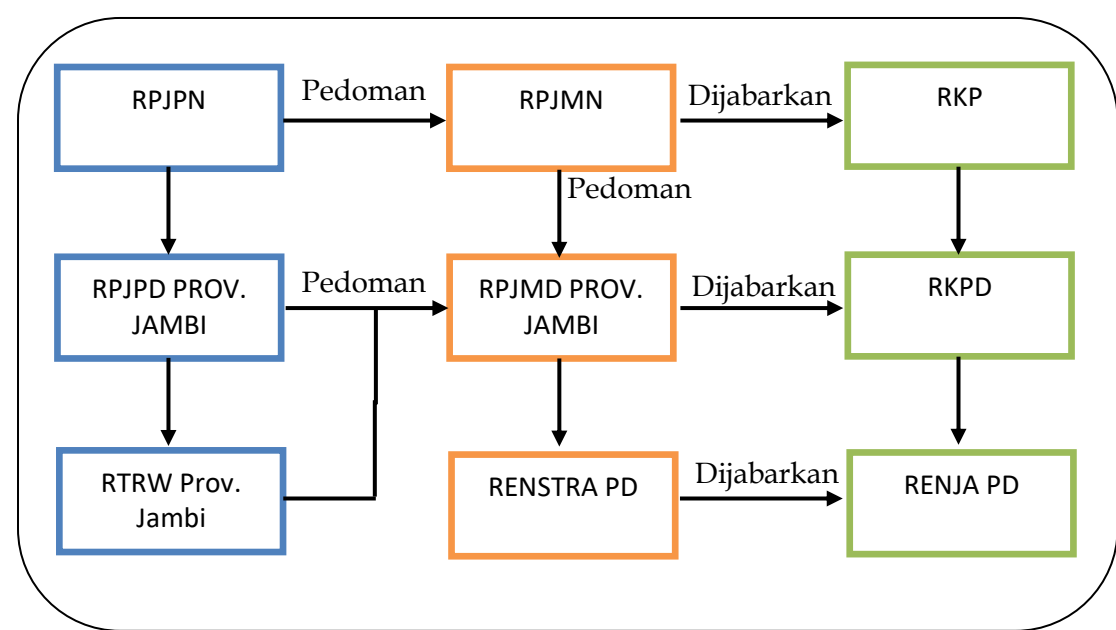
RIPJPID adalah dokumen tematik yang menjabarkan arah kebijakan pembangunan IPTEK dan inovasi secara terstruktur, berjangka menengah – panjang, dan berbasis potensi daerah. RPJMD menjadi wadah utama untuk mengintegrasikan arah kebijakan dan program RIPJPID, terutama pada sasaran terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi.

8. RPJMD dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

KLHS merupakan instrumen analisis yang digunakan untuk menjamin bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah terintegrasi dalam

kebijakan, rencana dan program RPJMD. KLHS memberikan landasan analitis terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga program pembangunan yang dirumuskan dalam RPJMD tidak melampaui kapasitas ekologi wilayah. Integrasi KLHS dalam RPJMD akan menjamin arah pembangunan RPJMD dapat menjawab tantangan lingkungan, sosial dan ekonomi secara simultan dan bertanggung jawab terhadap generasi mendatang.

9. RPJMD dan RTRW Provinsi Berbatasan dengan RPJMD Provinsi Jambi
- Arah pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 tetap memperhatikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi dan kebijakan keruangan provinsi yang berbatasan yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau dan Bengkulu. Hal ini dilakukan agar tercipta sinergisitas pembangunan antar daerah berbatasan dan meminimalisir konflik pada wilayah perbatasan.
- Hubungan antara RPJMD Provinsi Jambi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat digambarkan berikut ini.



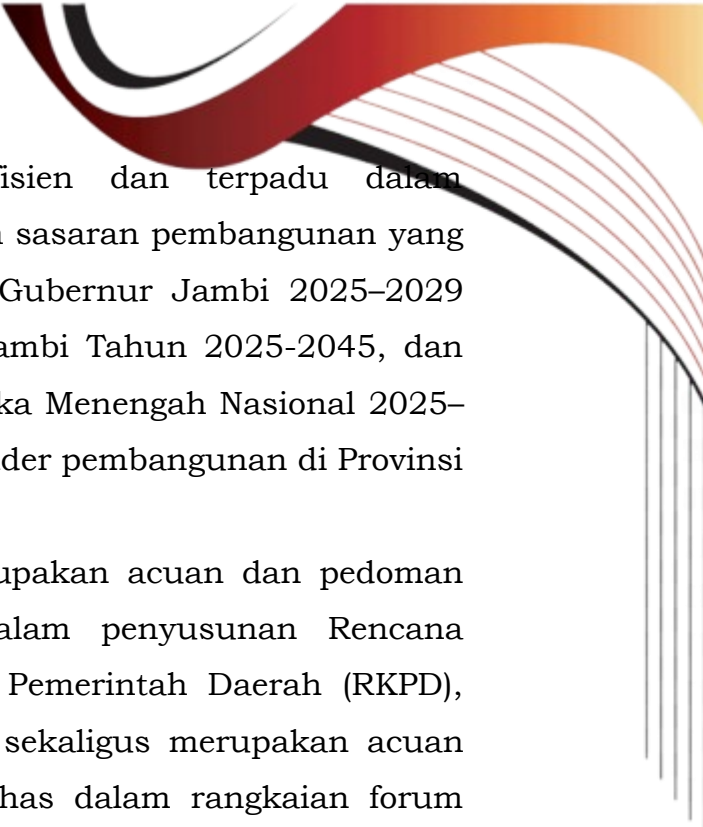
Gambar 1-1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program





pembangunan secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2025–2029 dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, serta berbagai aspirasi seluruh stakeholder pembangunan di Provinsi Jambi.

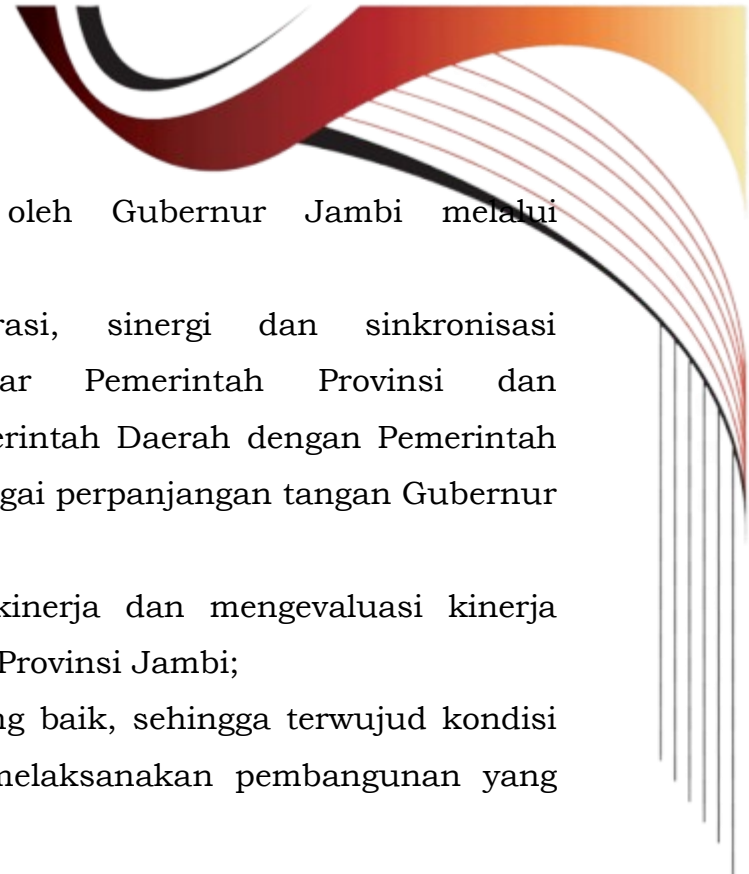
Dokumen RPJMD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Provinsi Jambi secara berjenjang, sehingga konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah dapat terjaga sehingga akan mempermudah dalam mengevaluasi kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan itu, Dokumen RPJMD Provinsi Jambi, akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta program pembangunan secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan.

#### 1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dilakukan dengan tujuan:

1. Menyempurnakan arah kebijakan dalam menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi ke dalam dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah dan terukur;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jambi, dan *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Provinsi Jambi dan APBN serta sumber dana lainnya yang dalam



pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Gubernur Jambi melalui Bappeda Provinsi Jambi;

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antar PD, antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui Bappeda Provinsi sebagai perpanjangan tangan Gubernur dalam pelaksanaannya.
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
6. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan antar tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta pengelolaannya.
8. Sebagai acuan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam upaya pemanfaatan sumber daya alam daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah



|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| 2.5     | Kinerja Keuangan Masa Lalu                                             |
| 2.6     | Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu                               |
| 2.7     | Kerangka Pendanaan                                                     |
| 2.8     | Permasalahan Pembangunan                                               |
| 2.9     | Isu Strategis                                                          |
| BAB III | VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH                   |
| 3.1     | Visi                                                                   |
| 3.2     | Misi                                                                   |
| 3.3     | Tujuan dan Sasaran                                                     |
| 3.4     | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah      |
| BAB IV  | PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH |
| 4.1     | Program Perangkat Daerah                                               |
| 4.2     | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah                              |
| BAB V   | PENUTUP                                                                |

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **2.1. Aspek Geografi dan Demografi**

Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatra dan memiliki posisi strategis dalam konteks pembangunan regional maupun nasional. Secara geografis, Provinsi Jambi memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan keberagaman kondisi alam yang mencakup dataran rendah, perbukitan, serta kawasan hutan yang luas. Keanekaragaman geografis ini memberikan potensi yang besar bagi pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Dari aspek demografi, Provinsi Jambi memiliki komposisi penduduk yang beragam secara etnis, dengan mayoritas penduduk berasal dari Suku Melayu, disusul oleh kelompok etnis lain seperti Minangkabau, Bugis, serta suku-suku pendatang lainnya. Struktur kependudukan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika pertumbuhan yang beragam, di mana terdapat perbedaan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dalam hal kepadatan penduduk serta akses terhadap fasilitas umum. Keberagaman ini berpengaruh pada perencanaan pembangunan yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Pembahasan pada subbab ini akan menguraikan kondisi geografis dan demografis Provinsi Jambi yang menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan daerah.

##### **2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah**

Provinsi Jambi memiliki posisi geografis yang sangat strategis, terletak di bagian tengah Pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau di sebelah utara, Provinsi Sumatra Selatan di sebelah selatan, Provinsi Bengkulu di sebelah barat, serta Laut China Selatan di sebelah timur. Letaknya yang berada di jalur utama perdagangan antara Pulau Sumatra dan wilayah Indonesia lainnya menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah dengan potensi besar dalam pengembangan sektor transportasi dan logistik. Selain itu, Provinsi Jambi memiliki akses ke pelabuhan laut yang mendukung peranannya sebagai pintu gerbang perdagangan antarwilayah dan internasional. Salah satu pelabuhan utamanya adalah Pelabuhan Talang Duku, yang mendukung peranannya sebagai

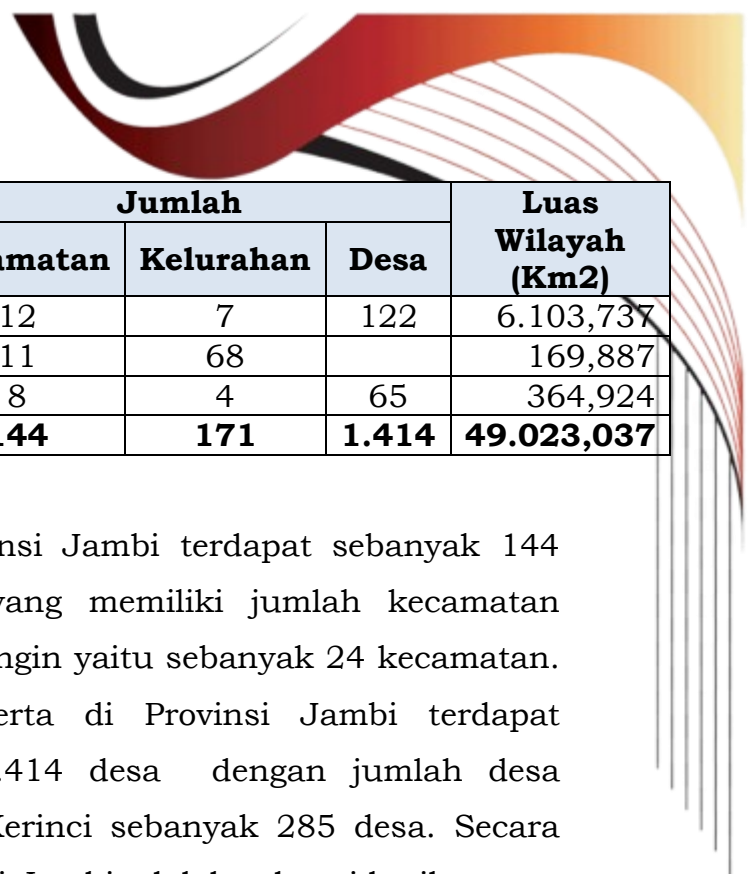
pintu gerbang perdagangan internasional. Pelabuhan lain yang berperan strategis dalam mendukung konektivitas maritim dan pertumbuhan ekonomi diantaranya Pelabuhan Kuala Tungkal, Pelabuhan Muara Sabak, Pelabuhan Nipah Panjang dan Pelabuhan Ujung Jabung yang saat ini dalam proses pembangunan infrastruktur. Keberadaan jaringan transportasi yang terhubung dengan daerah lainnya memberikan kemudahan dalam distribusi barang dan mempercepat arus perdagangan, baik untuk sektor pertanian, perkebunan dan industri lainnya. Peran strategis ini juga didorong oleh keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki, yang menjadikan Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah penting dalam pengembangan ekonomi di Pulau Sumatra. Dalam perencanaan pembangunan, posisi dan peran strategis ini akan menjadi faktor utama dalam pengembangan infrastruktur, perekonomian, serta peningkatan konektivitas antar daerah.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 sebesar 49.023,037 km2. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.540,118 km2 atau sebesar 15,38% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.103,737 km2 dan 5.935,894 km2, sedangkan rincian luas perkabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi**

| No | Kabupaten/Kota                 | Jumlah    |           |      | Luas Wilayah (Km2) |
|----|--------------------------------|-----------|-----------|------|--------------------|
|    |                                | Kecamatan | Kelurahan | Desa |                    |
| 1  | Kabupaten Kerinci              | 18        | 2         | 285  | 3.445,196          |
| 2  | Kabupaten Merangin             | 24        | 10        | 205  | 7.540,118          |
| 3  | Kabupaten Sarolangun           | 11        | 9         | 149  | 5.935,894          |
| 4  | Kabupaten Batanghari           | 8         | 14        | 110  | 5.453,689          |
| 5  | Kabupaten Muaro Jambi          | 11        | 5         | 150  | 5.159,623          |
| 6  | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 13        | 20        | 114  | 5.544,567          |
| 7  | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 11        | 20        | 73   | 4.544,575          |
| 8  | Kabupaten Bungo                | 17        | 12        | 141  | 4.760,827          |



| No             | Kabupaten/Kota    | Jumlah    |           |       | Luas Wilayah (Km2) |
|----------------|-------------------|-----------|-----------|-------|--------------------|
|                |                   | Kecamatan | Kelurahan | Desa  |                    |
| 9              | Kabupaten Tebo    | 12        | 7         | 122   | 6.103,737          |
| 10             | Kota Jambi        | 11        | 68        |       | 169,887            |
| 11             | Kota Sungai Penuh | 8         | 4         | 65    | 364,924            |
| Provinsi Jambi |                   | 144       | 171       | 1.414 | 49.023,037         |

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

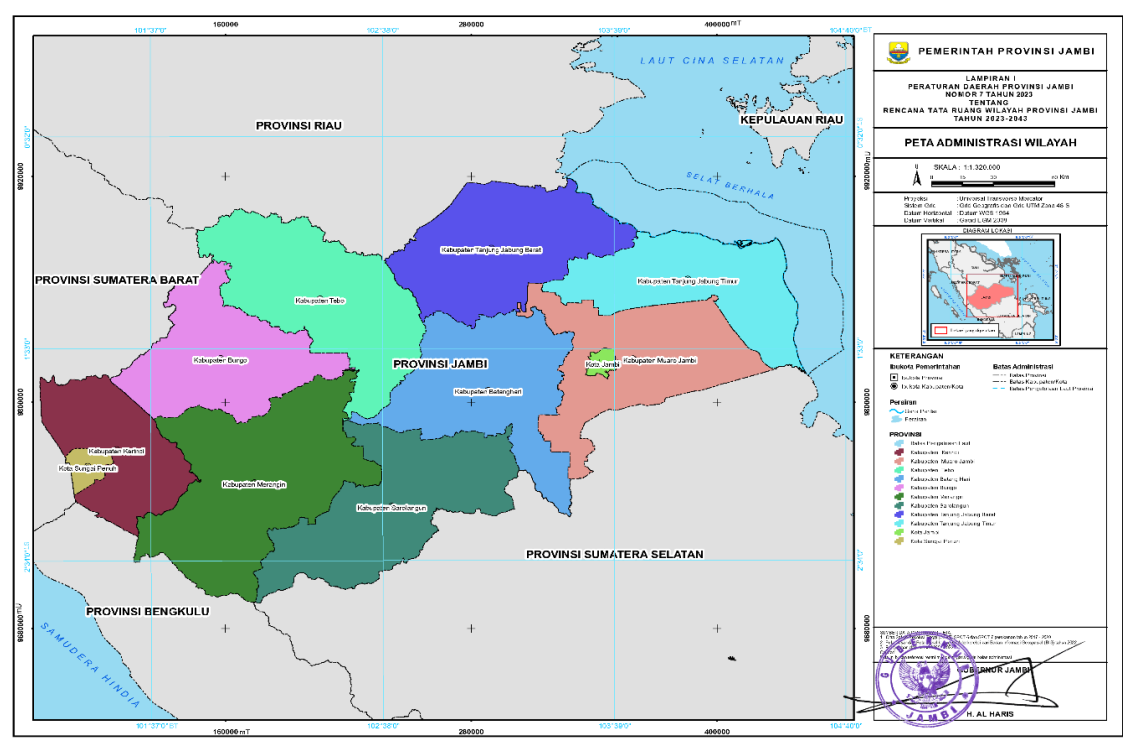
Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 144 kecamatan, dengan kabupaten yang memiliki jumlah kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan. Sementara jumlah kelurahan serta di Provinsi Jambi terdapat sebanyak 171 kelurahan dan 1.414 desa dengan jumlah desa terbanyak berada di Kabupaten Kerinci sebanyak 285 desa. Secara administratif batas wilayah Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu.
- Sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 dibawah ini menggambarkan kawasan administratif Provinsi Jambi dan sekitarnya. Provinsi Jambi terletak di bagian tengah Pulau Sumatera dengan batas wilayah administratif di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu, serta di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau. Peta ini juga menampilkan batas administratif wilayah di Provinsi Jambi yang terbagi menjadi beberapa kabupaten dan kota, dengan masing-masing wilayah diberi warna yang berbeda untuk memudahkan identifikasi. Peta ini memberikan gambaran mengenai posisi geografis Provinsi Jambi dalam hubungan dengan provinsi lainnya, serta menunjukkan keterkaitan wilayah yang berpotensi mendukung perkembangan ekonomi dan konektivitas antar daerah. Letak geografis tersebut menjadikan Provinsi Jambi memiliki posisi yang strategis di Pulau Sumatera, karena wilayahnya terhubung



langsung dengan beberapa provinsi lain yang berpotensi mendukung pengembangan ekonomi, memperkuat konektivitas, dan mendorong pembangunan antar daerah. Keberadaan peta ini sangat penting dalam merencanakan pengembangan infrastruktur dan kebijakan tata ruang yang dapat memperkuat posisi Provinsi Jambi sebagai daerah strategis di Pulau Sumatra.



Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Gambar 2-1      Peta Administrasi Provinsi Jambi

2.1.1.2      **Letak dan Kondisi Geografis**

Peta orientasi Provinsi Jambi memperlihatkan posisi geografis provinsi ini di Pulau Sumatra serta batas-batas administratif dengan provinsi-provinsi tetangga, yaitu Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Peta ini juga menampilkan variasi topografi wilayah, dengan ketinggian yang ditandai melalui gradasi warna, yang dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan tata ruang, pengelolaan sumber daya alam, serta perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Informasi spasial yang ditampilkan menjadi penting dalam mendukung evaluasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan yang memperhatikan kondisi geografis, keterkaitan

antarwilayah, serta potensi dan kendala fisik yang ada di Provinsi Jambi.



Sumber: BAPPEDA Provinsi Jambi, 2025

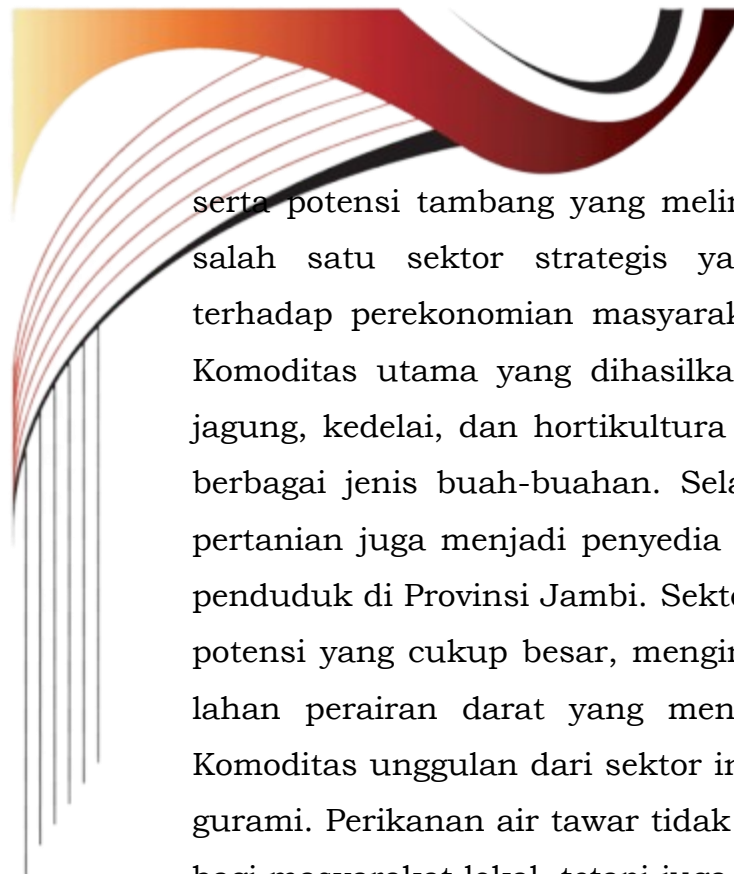
**Gambar 2-2 Orientasi Wilayah Provinsi Jambi**

Secara geografis Provinsi Jambi terletak di antara 0°45’ sampai 2°45’ Lintang Selatan dan 101°10’ sampai 104°55’ Bujur Timur (BPS Provinsi Jambi, 2025). Provinsi ini berada di bagian tengah Pulau Sumatera serta memiliki wilayah perairan yang menghadap ke Selat Berhala, yang terhubung dengan jalur pelayaran internasional melalui Selat Karimata. Posisi tersebut menjadikan Provinsi Jambi termasuk dalam kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I yang strategis bagi lalu lintas perdagangan internasional. Dengan letak ini, Provinsi Jambi juga masuk dalam rencana pembangunan tol laut nasional dan memiliki potensi pengembangan ekonomi yang terhubung dengan kawasan pertumbuhan ekonomi sub-regional Indonesia–Malaysia–Singapura atau *Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle* (IMS-GT).

### **2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam**

Provinsi Jambi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan beragam. Hal ini menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Keberagaman sumber daya alam ini mencakup sektor pertanian, perkebunan, kehutanan,

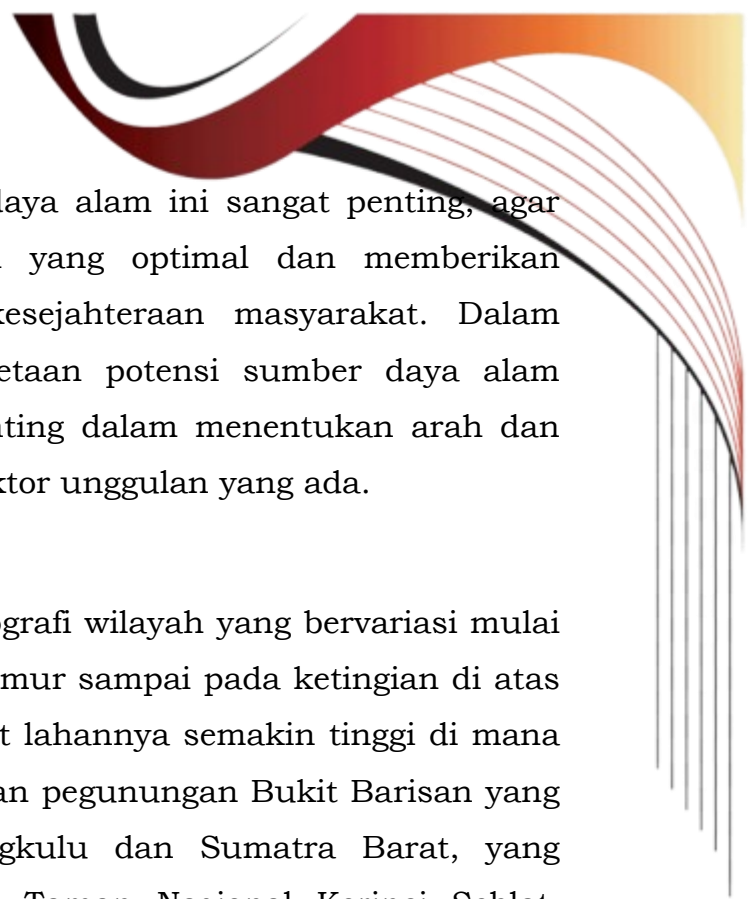




serta potensi tambang yang melimpah. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Komoditas utama yang dihasilkan dari sektor ini antara lain padi, jagung, kedelai, dan hortikultura seperti cabai, bawang merah, serta berbagai jenis buah-buahan. Selain sebagai sumber pangan, sektor pertanian juga menjadi penyedia lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk di Provinsi Jambi. Sektor perikanan air tawar juga memiliki potensi yang cukup besar, mengingat banyaknya sungai, danau, dan lahan perairan darat yang mendukung budidaya ikan air tawar. Komoditas unggulan dari sektor ini meliputi ikan patin, lele, nila, dan gurami. Perikanan air tawar tidak hanya menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lokal, tetapi juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan dan menyediakan bahan baku bagi industri pengolahan hasil perikanan.

Provinsi Jambi juga dikenal sebagai salah satu penghasil utama komoditas perkebunan, seperti pinang, karet, kelapa sawit, kelapa kopra, dan cokelat, yang berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah dan nasional. Komoditas pinang di Provinsi Jambi menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dan berperan penting dalam sektor pertanian dan perdagangan internasional. Produksi pinang di Jambi terus menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan permintaan global terhadap pinang terus meningkat, baik dalam bentuk biji utuh, pinang iris kering, maupun produk olahan. Dengan potensi yang besar dan pengembangan komoditas pinang di Provinsi Jambi diharapkan dapat terus meningkat, memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat setempat.

Selain itu, sektor kehutanan juga memiliki peran signifikan terhadap perekonomian Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan luasnya kawasan hutan yang ada di Provinsi Jambi yang menjadi sumber bahan baku industri serta mendukung keberagaman hayati. Potensi tambang, terutama batu bara dan mineral, juga memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan daerah. Pemanfaatan dan pengelolaan



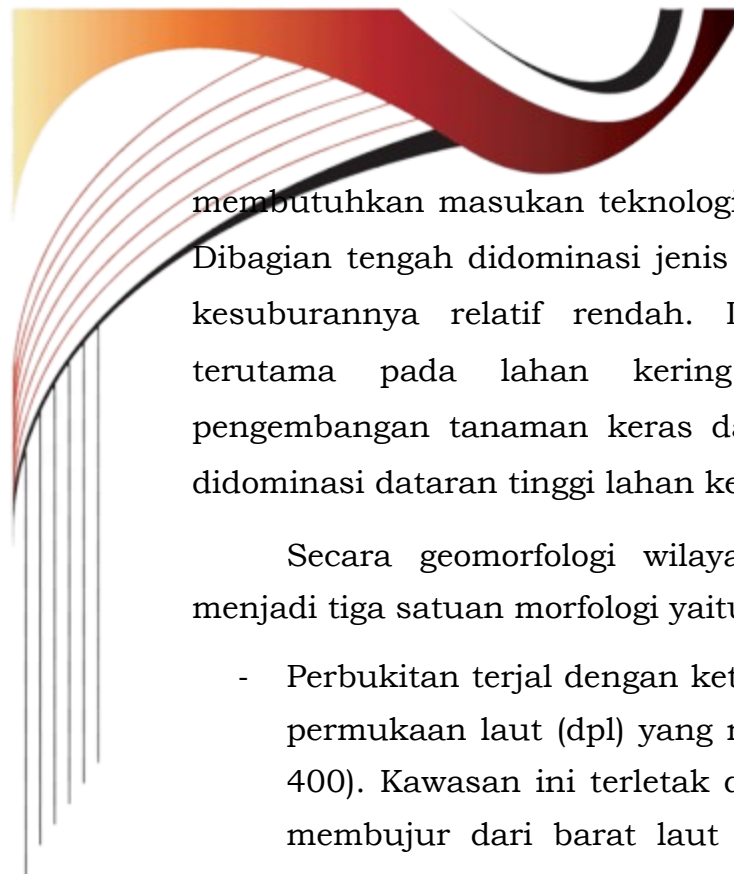
yang berkelanjutan dari sumber daya alam ini sangat penting, agar dapat mendukung pembangunan yang optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan, pemetaan potensi sumber daya alam Provinsi Jambi menjadi dasar penting dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan sektor-sektor unggulan yang ada.

#### **2.1.2.1 Topografi**

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 mdpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 mdpl. Morfologi kearah barat lahannya semakin tinggi di mana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatra Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, secara topografis Provinsi Jambi terbagi atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yaitu:

- a. Daerah dataran rendah 0-100 m (67%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin;
- b. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (17%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, sebagian Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan sebagian Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. Daerah dataran tinggi >500 m (16%) pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Kabupaten Merangin, sebagian Kabupaten Sarolangun dan sebagian Kabupaten Bungo.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga



membutuhkan masukan teknologi tertentu dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit.

Secara geomorfologi wilayah Provinsi Jambi dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi yaitu:

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang mempunyai kelerengan antara (200-400). Kawasan ini terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang membujur dari barat laut tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil Kabupaten Sarolangun dan Merangin.
- Perbukitan bergelombang dengan ketinggian antara 50-500 meter dan kemiringan lereng 100 - 200. Wilayah ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten Batang Hari.
- Dataran dengan ketinggian antara 0-50 meter, kelerengan antara 00-100. Wilayah ini terletak di bagian timur Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan wilayah pantai.

#### 2.1.2.2 Geologi

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari:

- a. Endapan permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan.
- b. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan alluvium, endapan rawa dan endapan undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang menandung sisa tumbuhan, berumur kuarter, resen.

c. Batuan sedimen, berumur permo-karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari umur tua ke muda adalah sebagai berikut:

- Formasi Mentulu (Permo-Karbon)
- Formasi Mengkarang (Perem)
- Formasi Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura)
- Formasi Telangakar (Oligo Miosen)
- Formasi Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen)
- Formasi Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen)
- Formasi Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen)
- Formasi Bintunan, Pengasih (Pliosen)

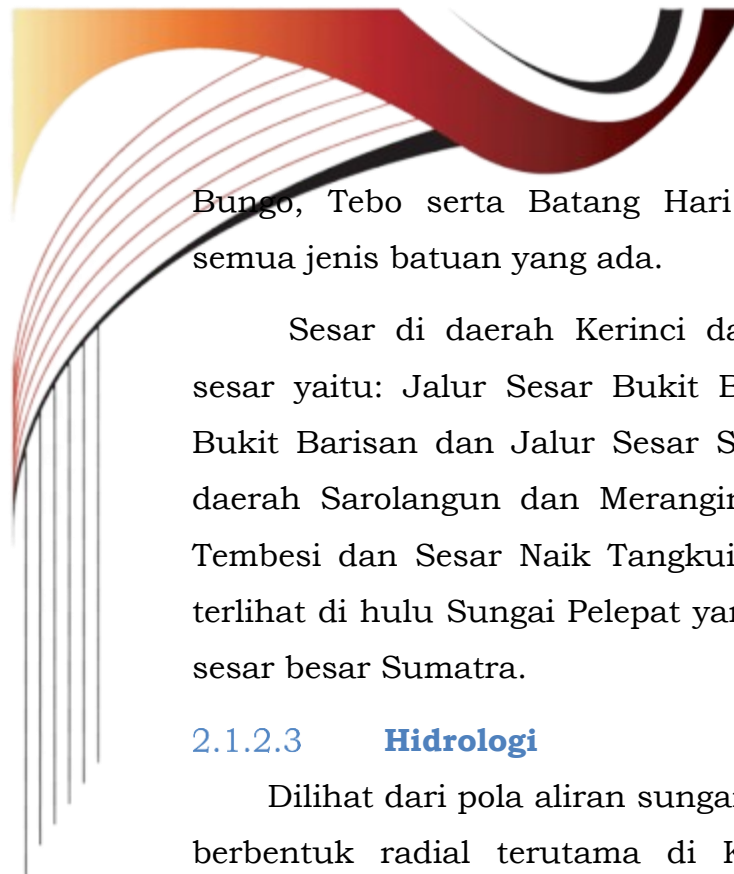
Formasi ini terdiri dari batupasir, batu lempung, dengan sisipan batu bara, batu lanau, serpih, tuf, tuf pasiran, batu pasir tufan, batu pasir gampingan, batu gamping, konglomerat polemik dan breksi.

d. Batuan malihan, terbagi atas formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong. Formasi Mentulu, dan formasi Gangsal, berumur Permo-Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir meta.

e. Batuan gunung api, berumur Perem hingga Kuartir. Satuan batuan ini terdiri dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal.

f. Batuan terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horeblendita dan sienit.

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Provinsi Jambi merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatra berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar-pun banyak dijumpai. Struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin,



Bungo, Tebo serta Batang Hari. Sedangkan kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada.

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu: Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari sesar besar Sumatra.

#### 2.1.2.3 Hidrologi

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

Pada musim hujan kecenderungan air sungai meluap, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai tujuh meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang Wilayah Sungai Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha. Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari yang mencakup enam sub DAS di dalamnya yaitu:

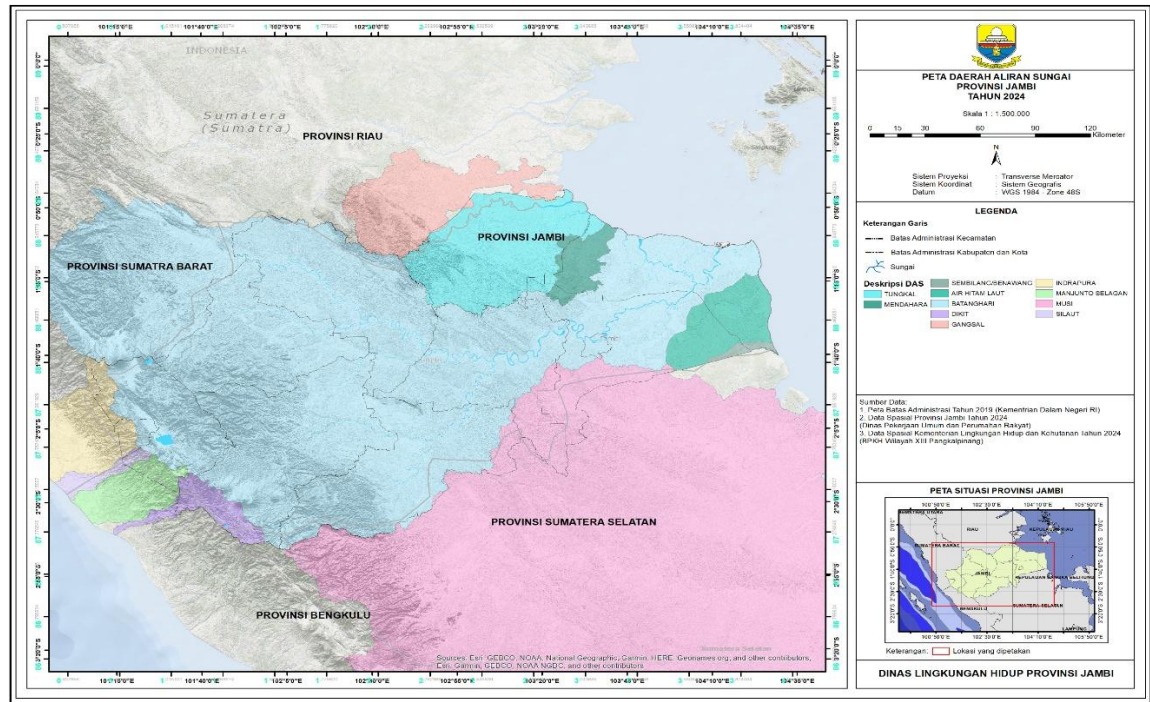
- Sub DAS Batanghari Hulu
- Sub DAS Batang Merangin Tembesi
- Sub DAS Batang Tabir
- Sub DAS Batang Bungo
- Sub DAS Batang Tebo
- Sub DAS Batanghari Hilir



Tabel 2-2 Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari

| No.            | Provinsi      | Kabupaten/Kota                  | Luas (Ha) | Persentase (%) |
|----------------|---------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 1.             | Jambi         | Batanghari                      | 450,295   | 10.27          |
|                |               | Bungo                           | 463,749   | 10.58          |
|                |               | Kerinci                         | 260,024   | 5.93           |
|                |               | Merangin                        | 658,230   | 15.02          |
|                |               | Muaro Jambi                     | 277,845   | 6.34           |
|                |               | Sarolangun                      | 558,475   | 12.74          |
|                |               | Tanjung Jabung Timur            | 286,656   | 6.54           |
|                |               | Tebo                            | 616,617   | 14.07          |
|                |               | Kota Jambi                      | 16,895    | 0.39           |
|                |               | Kota Sungai Penuh               | 14,939    | 0.34           |
|                |               | Luas DAS di Provinsi Jambi      | 3,603,725 | 82.23          |
| 2.             | Sumatra Barat | Dharmasraya                     | 304,274   | 6.94           |
|                |               | Solok                           | 117,741   | 2.69           |
|                |               | Solok Selatan                   | 356,973   | 8.15           |
|                |               | Luas DAS di Prov. Sumatra Barat | 778,988   | 17.77          |
| Luas DAS Total |               |                                 | 4,382,713 | 100.00         |

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025

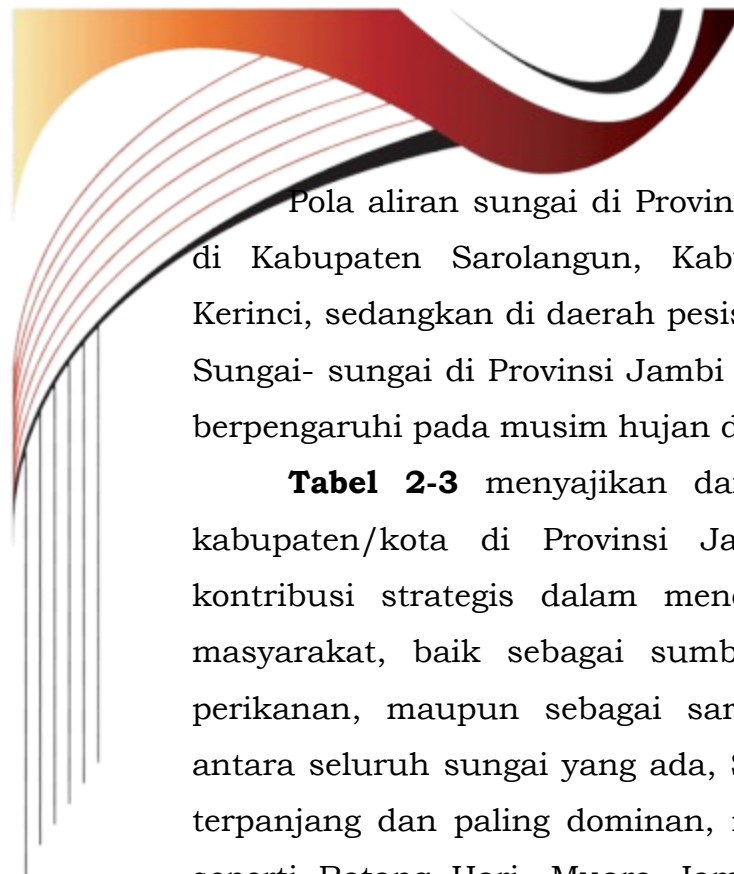


Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025

Gambar 2-3 Sebaran DAS di Provinsi Jambi

Di samping itu terdapat DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya tidak terlalu besar yaitu:

- a. DAS Betara Pengabuan mencakup tujuh Sub DAS didalamnya.
- b. DAS Mendahara mencakup sembilan Sub DAS didalamnya.
- c. DAS Air Hitam Laut mencakup empat Sub DAS didalamnya.



Pola aliran sungai di Provinsi Jambi berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai- sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

**Tabel 2-3** menyajikan daftar sungai yang melintasi setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Sungai-sungai ini memiliki kontribusi strategis dalam mendukung kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, baik sebagai sumber air untuk kegiatan pertanian, perikanan, maupun sebagai sarana transportasi antarwilayah. Di antara seluruh sungai yang ada, Sungai Batanghari merupakan yang terpanjang dan paling dominan, melintasi beberapa kabupaten/kota seperti Batang Hari, Muaro Jambi, Tebo, Bungo, Tanjung Jabung Timur, hingga Kota Jambi. Keberadaan Sungai Batanghari tidak hanya menentukan arah perkembangan wilayah, tetapi juga menjadi tulang punggung aktivitas perikanan air tawar yang berkembang secara tradisional maupun semi-intensif di sepanjang alirannya.

Sektor perikanan sungai di Provinsi Jambi, khususnya di daerah hilir dan tengah Sungai Batanghari, memiliki potensi yang besar namun belum tergarap secara optimal. Komoditas perikanan seperti ikan patin, baung, toman, dan nila merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak komunitas lokal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang terarah dalam pengelolaan sumber daya perairan darat ini, termasuk penguatan kelembagaan nelayan, peningkatan teknologi budidaya, pengendalian pencemaran sungai, serta penyusunan zonasi konservasi perikanan yang mendukung keberlanjutan ekosistem perairan. Selain Sungai Batanghari, sungai-sungai lain seperti Batang Merangin, Batang Tebo, Batang Bungo, Batang Asai, dan Batang Tembesi juga memegang peranan penting di wilayah hulu dan pedalaman. Sungai-sungai ini menjadi sumber air irigasi, penggerak perekonomian lokal, serta penentu pola permukiman masyarakat. Mengingat pentingnya fungsi ekologis dan ekonomi dari sistem sungai di Provinsi Jambi, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) perlu menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan wilayah, dengan pendekatan berbasis ekosistem yang inklusif dan partisipatif.

Tabel 2-3 Nama Sungai yang Melintasi Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota

| Kabupaten/<br>Kota      | Nama Sungai                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Kerinci                 | Batang Merangin, Sungai Siulak Deras                                           |
| Merangin                | Batang Merangin, Batang Tabir                                                  |
| Sarolangun              | Batang Limun, Batang Tembesi, Batang Asai                                      |
| Batang Hari             | Batanghari, Batang Tembesi, Batang Asai                                        |
| Muaro Jambi             | Batanghari, Sungai Kumpeh                                                      |
| Tanjung<br>Jabung Timur | Batanghari, Batang Berbak, Batang Mendahara,<br>Batang Lagan, Batang Air Hitam |
| Tanjung<br>Jabung Barat | Sungai Pengabuhan, Sungai Betara, Sungai<br>Tungkal                            |
| Tebo                    | Batang Tebo, Batanghari                                                        |
| Bungo                   | Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Pelepat                                      |
| Kota Jambi              | Batang Hari                                                                    |

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Provinsi Jambi memiliki sumber daya air yang melimpah, beberapa potensi kondisi yang mendukung untuk dibangun sarana prasarana sumber daya air. Berikut merupakan beberapa potensi danau yang ada di Provinsi Jambi yang dapat dikembangkan.

Tabel 2-4 Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi

| No | Nama Danau         | Lokasi                                 |                | Luas (Ha) |
|----|--------------------|----------------------------------------|----------------|-----------|
|    |                    | Desa/Kelurahan                         | Kecamatan      |           |
| A. | Kota Jambi         |                                        |                |           |
| 1  | Danau Sipin        | Sungai Putri,<br>Legok dan Danau Sipin | Telanaipura    | 40        |
| 2  | Danau Teluk Kenali | Teluk Kenali                           | Telanaipura    | 15        |
| 3  | Danau Teluk        | Teluk                                  | Telanaipura    | 50        |
| B. | Kabupaten Merangin |                                        |                |           |
| 1  | Danau Depati Empat | Rantau Kermas                          | Jangkat        | 35        |
| 2  | Danau Pauh         | Pulau Tengah                           | Jangkat        | 250       |
| 3  | Danau Kecil        | Pulau Tengah                           | Jangkat        | 18        |
| 4  | Sikumbang          | Pulau Tengah                           | Jangkat        | 20        |
| C. | Kabupaten Kerinci  |                                        |                |           |
| 1  | Danau Kerinci      | Jujun                                  | Keliling Danau | 4.200     |
| 2  | Danau Air Lingkat  | Lempur Tengah                          | Gunung Raya    | 48        |
| 3  | Danau Dua          | Lempur Tengah                          | Gunung Raya    | 12        |
| 4  | Danau Gunung Tujuh | Pelompek, Lubuk Pauh                   | Kayu Aro       | 1.200     |
| 5  | Danau Belibis      | Sido Mulyo                             | Kayu Aro       | 25        |
| D. | Kabupaten          |                                        |                |           |



| No            | Nama Danau  | Lokasi         |            | Luas (Ha)    |
|---------------|-------------|----------------|------------|--------------|
|               |             | Desa/Kelurahan | Kecamatan  |              |
|               | Sarolangun  |                |            |              |
| 1             | Danau Biaro | Lidung         | Sarolangun | 10           |
| 2             | Danau Baru  | Pulau Pinang   | Sarolangun | 10           |
| <b>Jumlah</b> |             |                |            | <b>5.933</b> |

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Secara hidrogeologi, produktivitas air tanah daerah Povinsi Jambi yang didasarkan atas sifat fisik batuan penyusun (akuifernya) dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Produktivitas air tanah tinggi

Meliputi sepanjang Sungai Batanghari dan Sungai Tembesi. Litologi akuifaer terutama berupa pasir dan kerikil yang merupakan endapan alluvium sungai. Debit sumur berkisar 5 hingga 25 l/detik dan jika ditinjau dari sifat fisik batuan penyusun akuifernya yang merupakan batuan lepas maka aliran air tanah yang terjadi merupakan aliran air tanah melalui ruang antar butir. Muka air tanah bebas mempunyai kedalaman berkisar dari 0.5 – 2.5 m di bawah muka tanah setempat dengan buaian (perbedaan) muka air tanah kecil antara musim hujan dan kemarau. Muka air tanah dalam atau tertekan diperkirakan dapat ditemukan pada kedalaman lebih dari 30 m dari muka tanah setempat.

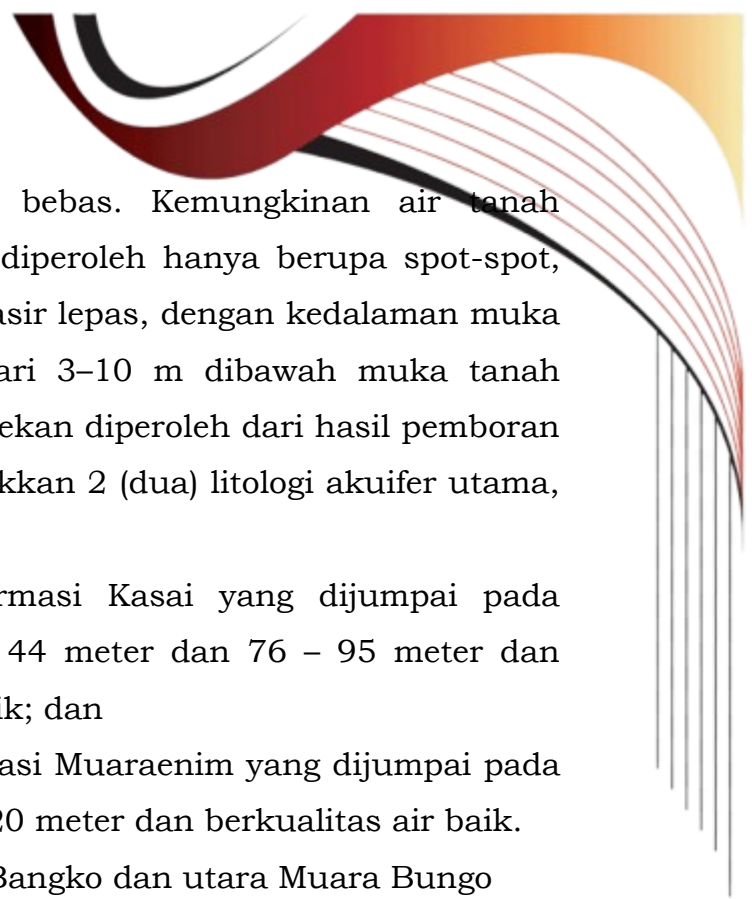
Pasokan air dari daerah resapan umumnya kecil akan tetapi pasokan air terutama berasal dari Sungai Batang Hari dan Batang Tembesi. Sungai yang bertindak sebagai pemasok air tanah disebut juga sebagai sungai influen (*influent stream*). Ciri-ciri air tanah seperti ini umumnya potensi air tanahnya tinggi. Pengukuran harga keterusan air (*trasmissivity*) yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan di berbagai tempat di Indonesia yang mempunyai kondisi serupa menunjukkan bahwa harga keterusannya lebih dari 500 m/hari.

b. Produktivitas air tanah sedang

Produktivitas air tanah sedang di daerah Provinsi Jambi terdapat di 3 (tiga) tempat, yaitu:

a) Di bagian timur, meliputi daerah daratan pantai timur

Walaupun produktivitas tanahnya sedang akan tetapi kendalanya adalah kualitas air tanahnya yang kurang baik,



terutama untuk air tanah bebas. Kemungkinan air tanah dengan kualitas baik dapat diperoleh hanya berupa spot-spot, terutama pada lensa-lensa pasir lepas, dengan kedalaman muka air tanah bebas berkisar dari 3–10 m dibawah muka tanah setempat. Data air tanah tertekan diperoleh dari hasil pemboran di beberapa tempat menunjukkan 2 (dua) litologi akuifer utama, yaitu:

1. Litologi akuifer dari Formasi Kasai yang dijumpai pada interval kedalaman 18 – 44 meter dan 76 – 95 meter dan berkualitas air kurang baik; dan
2. Litologi akuifer dari Formasi Muaraenim yang dijumpai pada kedalaman antara 90 – 120 meter dan berkualitas air baik.

b) Di bagian tengah, di sekitar Bangko dan utara Muara Bungo

Debit sumur berkisar antara 1 – 5 l/detik dengan akuifer utama berupa batu pasir kurang padu, tufa dan tufa pasiran. Muka air tanah bebas diperkirakan kurang dari 20 m dari muka tanah setempat, sedangkan air tanah dalam diperkirakan dari 50 m dari muka tanah setempat. Data pemboran air tanah dalam di sekitar Bangko enunjukkan bahwa kedalaman sumur bor mencapai 100 meter dengan debit sekitar 8.5 l/detik.

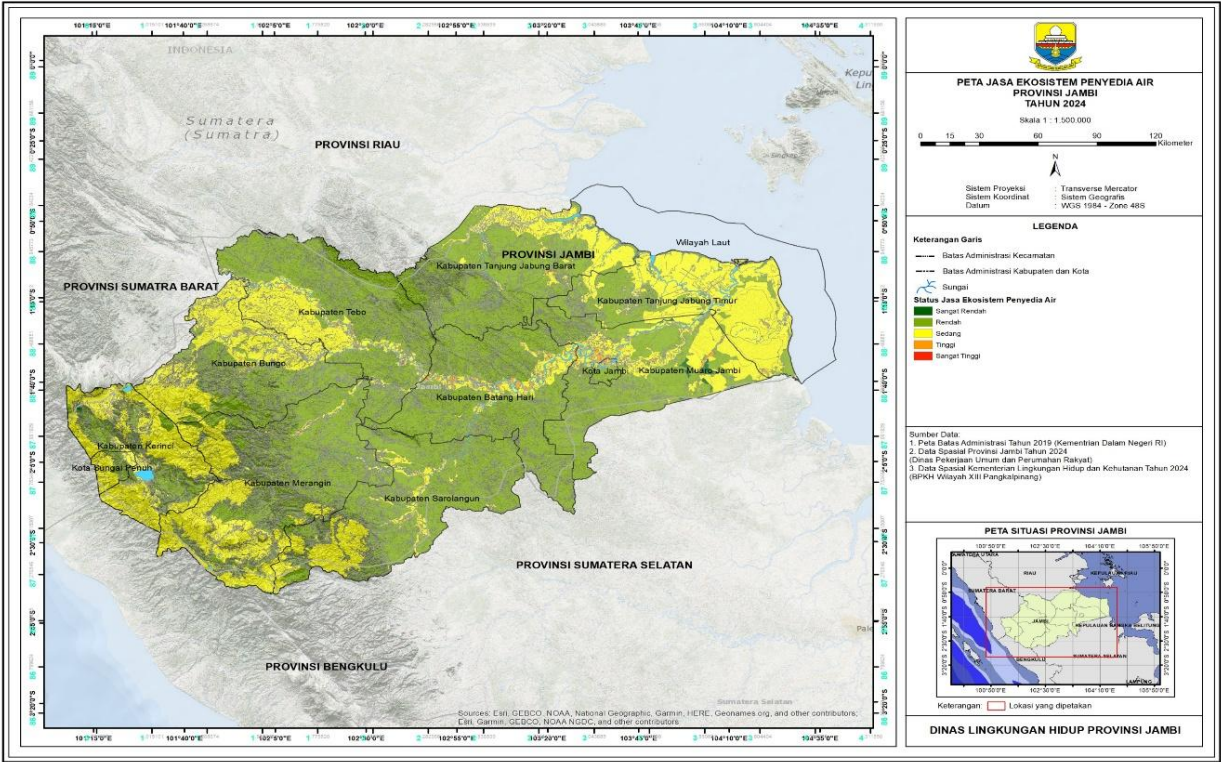
c) Di bagian barat, di selatan Gunung Kerinci meliputi Sungai Penuh dan Padang Panjang (kaki Gunung Masurai)

Debit sumur diperkirakan sampai 5 l.detik dengan akuifer utama berupa tufa atau breksi volkanik dari endapan volkanik muda. Pada akuifer batuan lepas sistem airan air tanah dapat melalui ruang antar butir, sedangkan pada akuifer pada batuan padu aliran air tanah dapat melalui celahan dan rekahan. Muka air tanah bebas maupun muka air tanah dalam umumnya dalam. Untuk air tanah bebas, pada daerah tertentu dapat mencapai kurang dari 20 m di bawah muka tanah setempat.

c. Produktivitas air tanah rendah

Umumnya terdapat di bagian utara, baratdaya, dan barat wilayah Provinsi Jambi. Batuan penyusunnya adalah berupa batuan sedimen padu, batuan malihan dan batuan beku terobosan. Pada batuan malihan dan sedimen masih dapat diharapkan dijumpai air tanah walaupun secara terbatas, terutama pada zona pelapukan

yang tebal atau daerah lembah. Sifat air tanah di daerah pelapukan dan lembah merupakan air tanah bebas yang dipengaruhi oleh musim, pada musim hujan air tanah dapat diperoleh sedangkan pada musim kamarau umumnya sulit diperoleh.



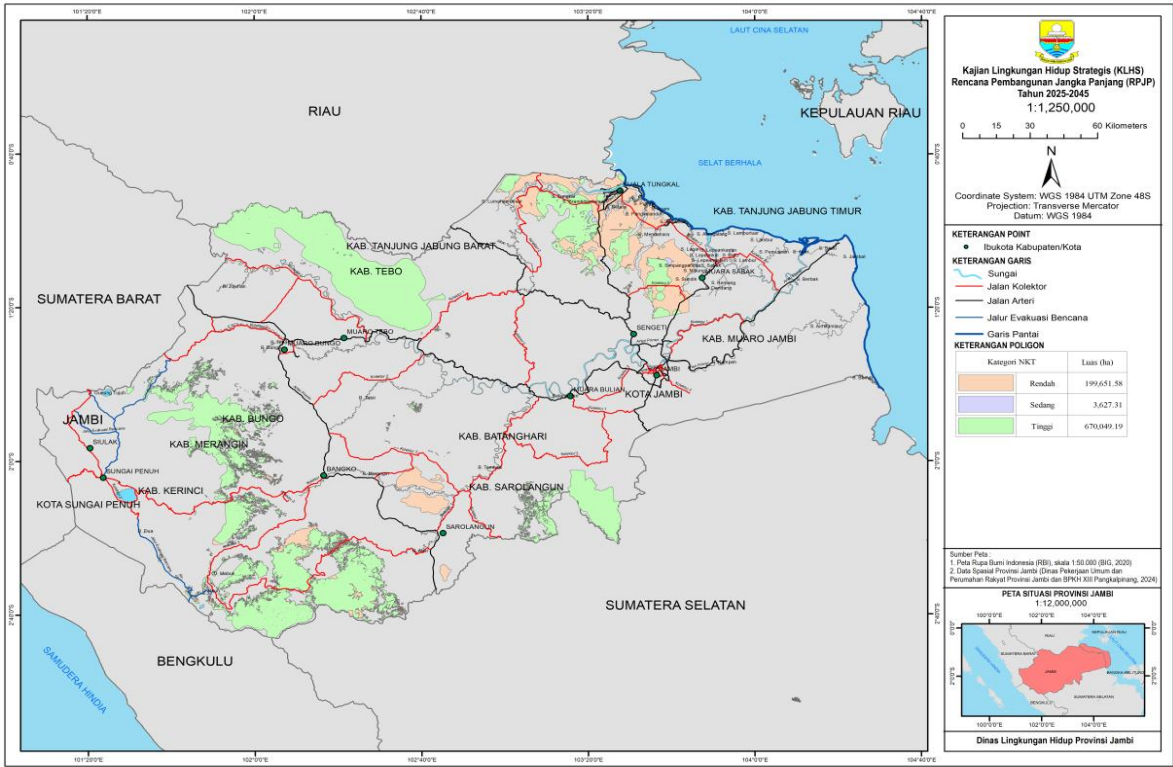
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025  
Gambar 2-4 Produktivitas Air Tanah Provinsi Jambi

2.1.2.4 **Klimatologi**

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan. Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim yang mengacu pada nilai konservasi. Kawasan konservasi tinggi tersebar pada wilayah dengan penetapan Taman Nasional. Taman Nasional Berbak (TNB) yang kemudian dikenal dengan Taman Nasional Berbak Sembilang (TNBS) berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) yang berada di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Taman Nasional Bukit 12 (TNBD) yang berada di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari dan



Kabupaten Tebo, serta Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berada di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Sarolangun. Sedangkan persentase luas masing masing kabupaten berdasarkan tingkat daya tampung lingkungan dalam pengaturan iklim adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini. Pada sebagian kabupaten di dominasi oleh kemampuan sangat rendah yaitu di Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sebaliknya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh didominasi kemampuan pengaturan iklim yang sangat tinggi.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025  
Gambar 2-5 Peta Nilai Konservasi Tinggi Provinsi Jambi

**Tabel 2-5** menyajikan informasi mengenai luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang dikelompokkan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim. Pengelompokan ini mencerminkan sejauh mana daerah-daerah di Provinsi Jambi mampu mengelola dan mengatur kondisi iklim yang ada di wilayahnya, yang berpengaruh pada berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, dan ketahanan pangan. Setiap kabupaten/kota memiliki distribusi luas wilayah yang berbeda, dengan variasi dalam tingkat kemampuan pengaturan iklim yang dikategorikan mulai dari Sangat Rendah hingga Sangat Tinggi.

Kabupaten Kerinci yang tercatat dengan kemampuan pengaturan iklim yang sangat tinggi pada sektor tertentu memiliki luas wilayah yang signifikan dengan potensi alam yang melimpah sedangkan daerah lainnya seperti Kota Jambi memiliki karakteristik berbeda dengan pengaturan iklim yang lebih terfokus pada area terbatas. Data ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan dan potensi yang ada di masing-masing wilayah Provinsi Jambi dalam merencanakan pembangunan berkelanjutan yang mempertimbangkan aspek iklim.

Tabel 2-5 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jambi

| Kabupaten/<br>Kota             | Sangat Rendah |      | Rendah    |      | Sedang       |       | Tinggi       |       |
|--------------------------------|---------------|------|-----------|------|--------------|-------|--------------|-------|
|                                | ha            | %    | ha        | %    | ha           | %     | ha           | %     |
| Kabupaten Batanghari           | 9.542,33      | 0,20 | 7.073,09  | 0,14 | 408.308,01   | 8,32  | 112.394,28   | 2,29  |
| Kabupaten Bungo                | 17.734,50     | 0,36 | 1.094,36  | 0,02 | 158.127,23   | 3,22  | 283.647,00   | 5,78  |
| Kabupaten Kerinci              | 3.002,88      | 0,06 | NA        | NA   | 123.762,91   | 2,52  | 218.797,39   | 4,46  |
| Kabupaten Merangin             | 19.906,51     | 0,41 | 708,38    | 0,01 | 423.640,97   | 8,64  | 311.151,52   | 6,34  |
| Kabupaten Muaro jambi          | 23.077,40     | 0,47 | 4.458,59  | 0,09 | 416.395,15   | 8,49  | 106.959,09   | 2,18  |
| Kabupaten Sarolangun           | 13.487,51     | 0,28 | 1.740,85  | 0,04 | 378.599,62   | 7,72  | 200.297,61   | 4,08  |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 3.945,27      | 0,08 | 4.113,69  | 0,08 | 390.880,26   | 7,97  | 95.134,44    | 1,94  |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 4.350,43      | 0,09 | 5.193,41  | 0,11 | 310.815,32   | 6,34  | 165.782,45   | 3,38  |
| Kabupaten Tebo                 | 19.484,63     | 0,40 | 5.133,67  | 0,11 | 358.886,46   | 7,32  | 244.022,61   | 4,98  |
| Kota Jambi                     | 14.218,19     | 0,29 | 730,30    | 0,02 | 2.036,87     | 0,04  | NA           | NA    |
| Kota Sungai Penuh              | 1.212,35      | 0,03 | NA        | NA   | 10.772,83    | 0,22  | 24.628,14    | 0,50  |
| Total                          | 129.962,0     | 2,65 | 30.246,33 | 1,00 | 2.982.225,62 | 60,80 | 1.762.814,50 | 35,94 |

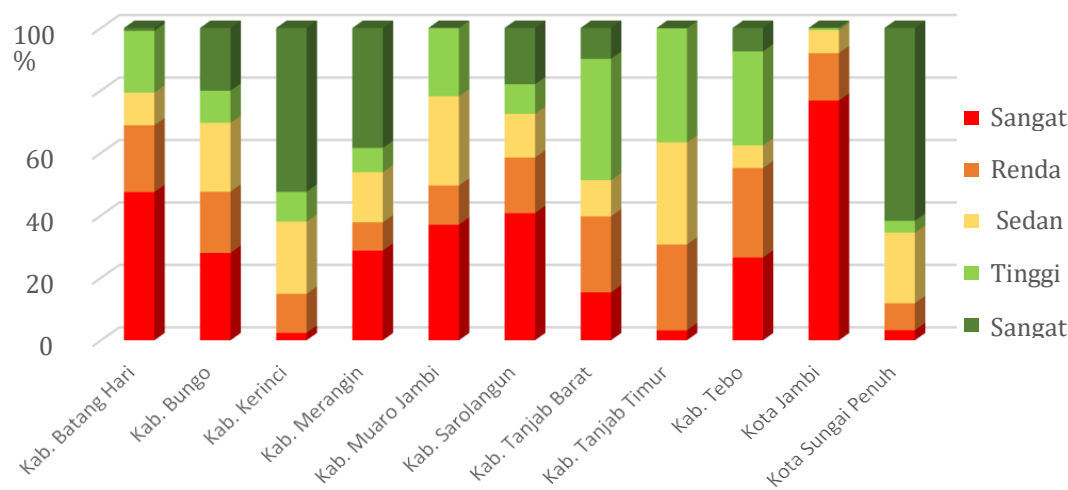
Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Berdasarkan Tabel 2-5, total luas wilayah dengan fungsi jasa ekosistem pengaturan iklim di Provinsi Jambi mencapai 4.902.884,00 hektare, yang terbagi ke dalam empat kategori tingkat peran: sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Secara keseluruhan, kategori sedang mendominasi dengan luas sebesar 2.982.225,62 hektare atau sekitar 60,80% dari total wilayah, diikuti oleh kategori tinggi sebesar

1.762.814,50 hektare (35,94%), kategori rendah seluas 130.246,33 hektare (2,70%), dan kategori sangat rendah seluas 129.962,00 hektare (2,65%).

Kabupaten yang memiliki kontribusi terbesar dalam kategori peran tinggi adalah Kabupaten Tebo dengan luas 244.022,41 hektare (4,98%), diikuti oleh Kabupaten Bungo sebesar 283.647,00 hektare (5,78%), serta Kabupaten Merangin dengan luas 311.151,52 hektare (6,34%). Sementara itu, Kabupaten Sarolangun mencatat luas tertinggi pada kategori sedang sebesar 378.599,52 hektare (7,72%), menunjukkan peran signifikan dalam stabilisasi iklim regional.

Kabupaten/Kota dengan kontribusi relatif kecil dalam peran jasa ekosistem pengaturan iklim, baik dalam kategori tinggi maupun sedang, adalah Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh. Kota Jambi hanya memiliki 2.036,87 hektare pada kategori sedang (0,04%) dan tidak tercatat memiliki wilayah pada kategori tinggi. Kota Sungai Penuh memiliki 24.628,14 hektare pada kategori tinggi (0,50%) dan 10.772,83 hektare pada kategori sedang (0,22%).

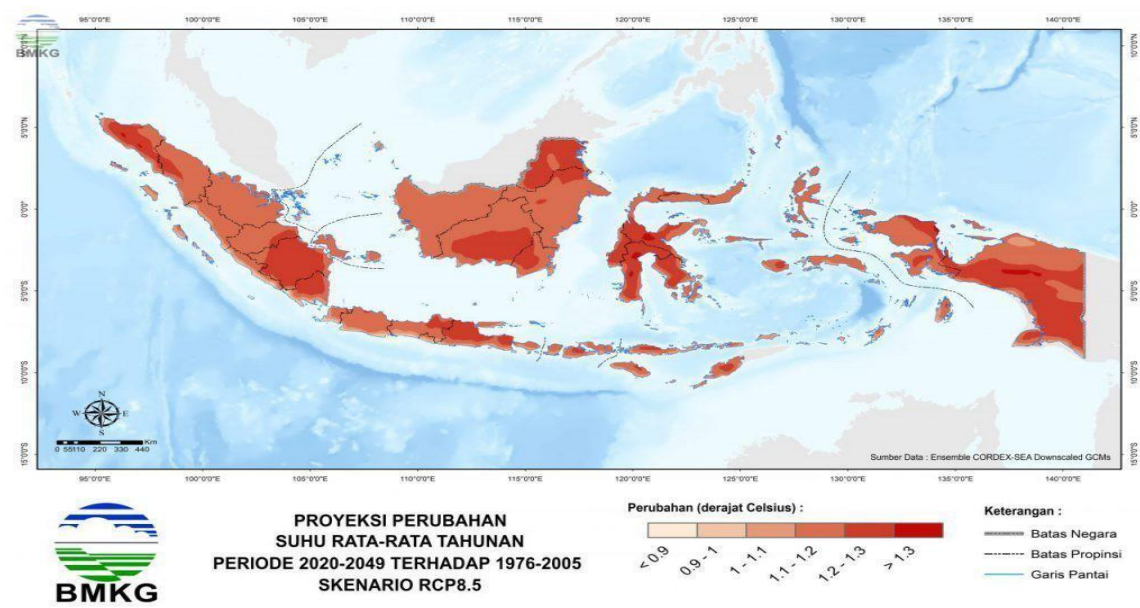


Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-6 Proporsi Luas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun Menurut Kemampuan Pengaturan Iklim Tahun 2020-2049

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan bagaimana setiap daerah di Provinsi Jambi memiliki kekuatan dan tantangan terkait dengan pengelolaan iklim yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memajukan sektor pertanian, perkebunan, dan lainnya. Daerah dengan kemampuan pengaturan iklim yang tinggi harus memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan ketahanan

ekonomi dan ekosistemnya, sementara daerah dengan pengelolaan iklim yang rendah perlu fokus pada peningkatan sistem pengelolaan lingkungan agar dapat menghadapi perubahan iklim dengan lebih baik.

Gambar-gambar berikut menunjukkan hasil proyeksi perubahan iklim di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk periode tahun 2020 hingga 2049 berdasarkan data pengamatan dari tahun 1976 hingga tahun 2005. Hasil proyeksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:



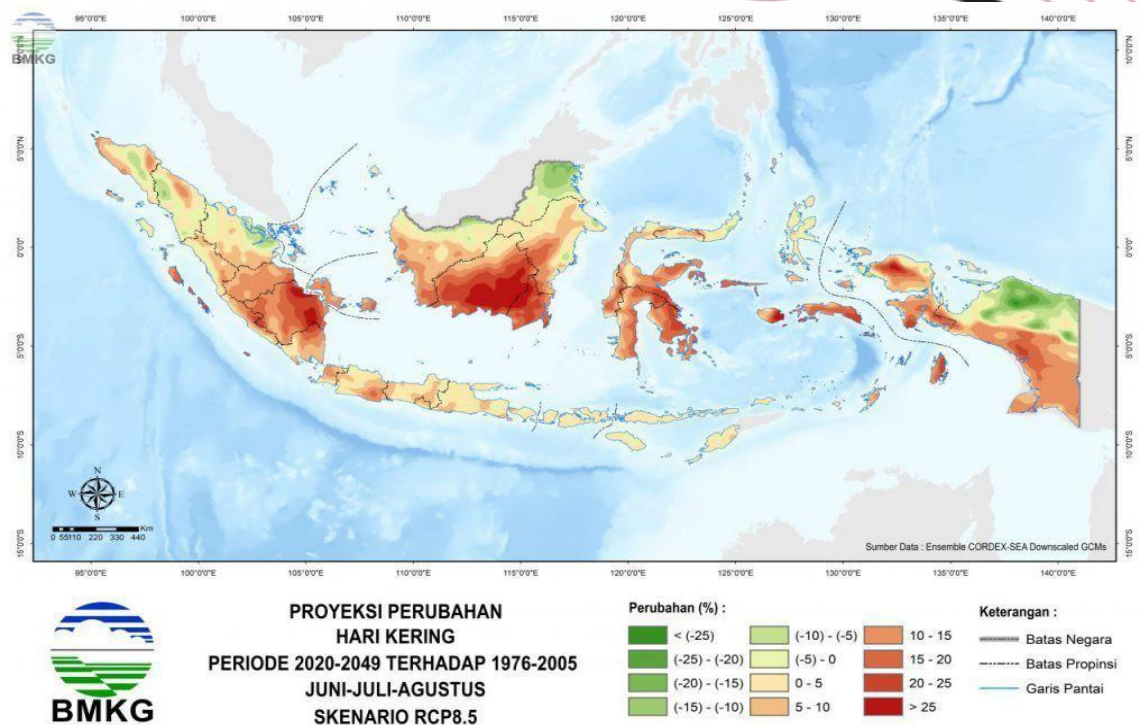
Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-7 Peta Proyeksi Perubahan Suhu Rata-rata Tahunan di Indonesia 2020-2049

Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

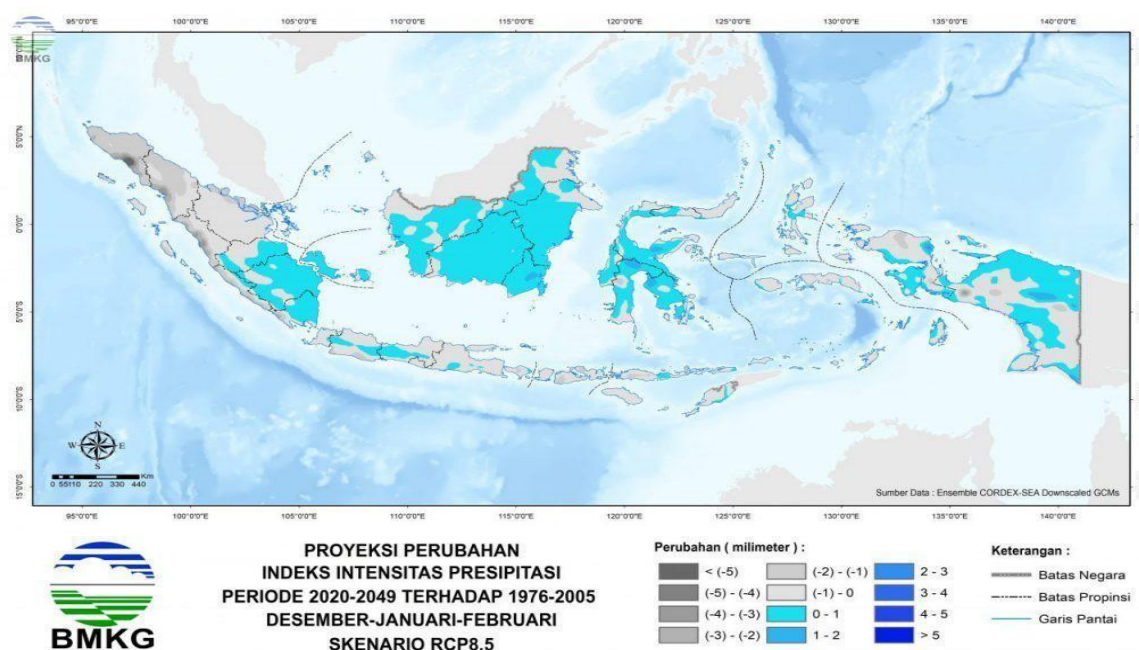
Gambar 2-7 menampilkan bahwa sebagian besar wilayah Jambi akan mengalami peningkatan suhu rata-rata tahun sebesar 10C hingga 1.10C, dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan mengalami peningkatan sekitar 1.10C hingga 1.20C dibandingkan saat ini. Sementara Gambar 2-8 menampilkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Jambi akan mengalami penambahan hari kering sekitar 10 hingga 15%, bahkan ada wilayah di Pantai Timur Sumatra yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan (sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) akan mengalami penambahan hari kering sekitar 15 hingga 20% dibandingkan saat ini.





Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-8 Peta Proyeksi Perubahan Hari Kering Di Indonesia 2020-2049



Sumber: BMKG Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-9 Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049

Gambar di atas menjelaskan bahwa sebagian wilayah Provinsi Jambi (wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan Pantai Timur Sumatra) akan mengalami peningkatan intensitas curah hujan pada musim hujan hingga 1 mm, namun sebagian lainnya (wilayah tengah

hingga perbatasan dengan Provinsi Riau) akan mengalami penurunan hingga 1 mm.

2.1.2.5 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jambi menjadi 2 fungsi yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan permukiman. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2-6 dan Tabel 2-7 Pola Penggunaan Lahan tahun 2022 di Wilayah Provinsi Jambi.

Tabel 2-6 Tutupan Lahan Provinsi Jambi

| Tutupan Lahan                  | Eksisting (Ha) | Persentase (%) |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| Air Danau/Situ                 | 10.340,01      | 0,21           |
| Air Tawar Sungai               | 33.921,02      | 0,69           |
| Hutan Rimba                    | 1.327.992,55   | 27,07          |
| Perkebunan/Kebun               | 856.202,64     | 17,45          |
| Permukiman dan Tempat Kegiatan | 151.542,42     | 3,09           |
| Sawah                          | 115.215,79     | 2,35           |
| Semak Belukar/Alang-Alang      | 1.102.391,46   | 22,47          |
| Tegalan/Ladang                 | 1.308.103,11   | 26,66          |
| Jumlah                         | 4.905.709,00   | 100            |

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025

Luas lahan hutan mencapai 1.327.992,55 Ha atau 27,07% dari luas keseluruhan tutupan lahan di Provinsi Jambi. Penggunaan lahan kawasan permukiman mencapai 151.542,42 Ha atau sebesar 3,09% dari luas keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar tutupan lahan di Provinsi Jambi masih didominasi oleh lahan alami dan semi-alami seperti hutan rimba, semak belukar/alang-alang, dan tegalan/ladang, sementara penggunaan lahan untuk untuk perairan seperti danau atau situ hanya mencakup 10.340,01 Ha atau sekitar 0,21% dari total luas tutupan lahan.

Tabel 2-7 Pola Penggunaan Lahan tahun 2022 di Wilayah Provinsi Jambi

| Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Penggunaan Lahan | Luas (Ha)  |
|------------------|-----------|------------------|------------|
| Badan Air        | 45.687.30 | Hutan Tanaman    | 309.562.07 |

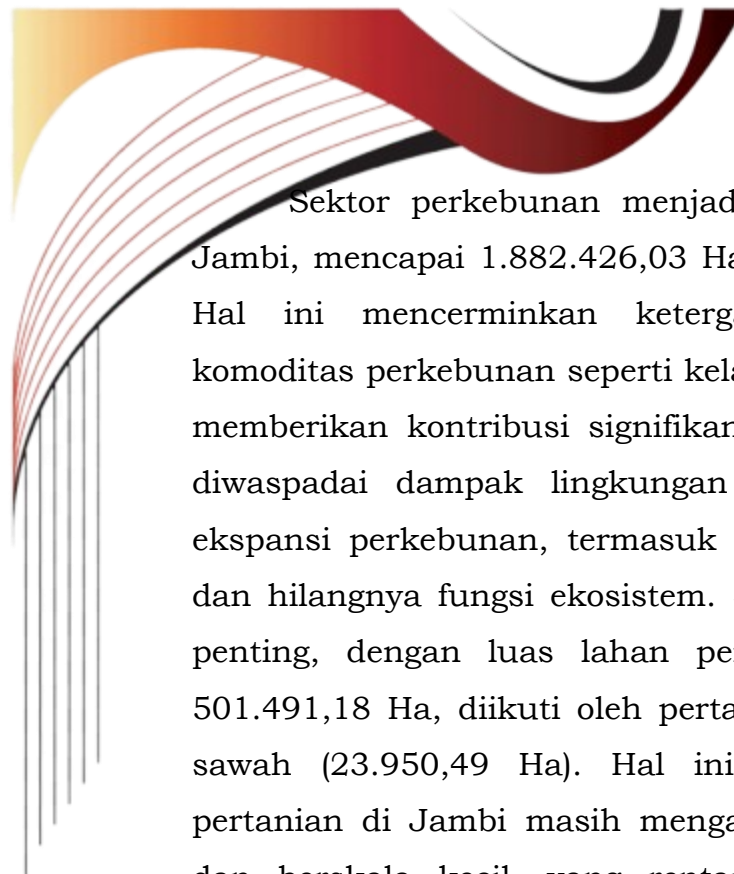


| Penggunaan Lahan            | Luas (Ha)  | Penggunaan Lahan              | Luas (Ha)        |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------------|
| Bandara / Pelabuhan         | 94.64      | Pemukiman                     | 119.108.13       |
| Belukar                     | 489.410.28 | Perkebunan                    | 1.882.426.03     |
| Belukar Rawa                | 295.271.84 | Pertambangan                  | 19.437.16        |
| Hutan Lahan Kering Primer   | 563.229.08 | Pertanian Lahan Kering        | 138.251.86       |
| Hutan Lahan Kering Sekunder | 272.717.94 | Pertanian Lahan Kering Campur | 501.491.18       |
| Hutan Mangrove Primer       | 1.323.95   | Rawa                          | 16.590.34        |
| Hutan Mangrove Sekunder     | 9.131.94   | Sawah                         | 23.950.49        |
| Hutan Rawa Primer           | 104.502.43 | Tanah Terbuka                 | 34.117.13        |
| Hutan Rawa Sekunder         | 64.604.10  | Transimigrasi                 | 11.616.66        |
| <b>Total</b>                |            |                               | <b>4.902.525</b> |

*Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025*

Di Provinsi Jambi, pemanfaatan ruang menunjukkan karakteristik wilayah yang sangat dipengaruhi oleh fungsi ekologis hutan, dominasi sektor perkebunan, serta keberadaan kawasan budidaya dan non-budidaya yang terus berkembang. Berdasarkan data terbaru, total luas lahan yang telah teridentifikasi penggunaannya mencapai 4.902.525 hektar.

Komposisi penggunaan lahan memperlihatkan dominasi kawasan kehutanan dan perkebunan. Lahan hutan yang terdiri dari hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan rawa, serta hutan mangrove, mencerminkan peran penting ekosistem alami dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung keanekaragaman hayati. Hutan Lahan Kering Primer memiliki cakupan yang paling luas, yaitu 563.229,08 Ha, yang menunjukkan masih cukup besarnya tutupan hutan alam yang relatif belum terganggu. Sementara itu, keberadaan Hutan Sekunder dan belukar mengindikasikan adanya tekanan terhadap kawasan hutan primer, baik karena aktivitas budidaya maupun alih fungsi lahan.



Sektor perkebunan menjadi pengguna lahan terbesar di Provinsi Jambi, mencapai 1.882.426,03 Ha atau lebih dari sepertiga total wilayah. Hal ini mencerminkan ketergantungan ekonomi daerah terhadap komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, perlu diwaspadai dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan akibat ekspansi perkebunan, termasuk potensi konflik lahan, degradasi tanah, dan hilangnya fungsi ekosistem. Sektor pertanian juga menempati peran penting, dengan luas lahan pertanian lahan kering campur sebesar 501.491,18 Ha, diikuti oleh pertanian lahan kering (138.251,86 Ha) dan sawah (23.950,49 Ha). Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pertanian di Jambi masih mengandalkan sistem pertanian tadah hujan dan berskala kecil, yang rentan terhadap perubahan iklim. Adapun kawasan non-agraris seperti pemukiman, pertambangan, transmigrasi, serta tanah terbuka menunjukkan dinamika pembangunan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Luasan lahan permukiman sebesar 119.108,13 Ha mengindikasikan adanya pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan hunian. Keberadaan lahan untuk pertambangan (19.437,16 Ha) serta transmigrasi (11.616,66 Ha) menunjukkan intervensi pembangunan yang bersifat sektoral dan terarah. Sementara itu, lahan badan air seluas 45.687,30 Ha dan keberadaan bandara/pelabuhan (94,64 Ha) menandakan pentingnya jaringan transportasi dan sumber daya air sebagai bagian dari sistem pendukung pembangunan wilayah.

Secara keseluruhan, struktur penggunaan lahan di Provinsi Jambi memperlihatkan potensi besar yang perlu dikelola secara arif dan berkelanjutan. Penataan ruang ke depan harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi ekologis wilayah. Strategi pembangunan jangka menengah perlu memprioritaskan pemanfaatan ruang yang berkeadilan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan selaras dengan daya dukung serta daya tampung lingkungan.

### **2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Bagian ini memaparkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi berdasarkan beberapa jasa ekosistem yang disediakan.



### 2.1.3.1 Ketersediaan Pangan

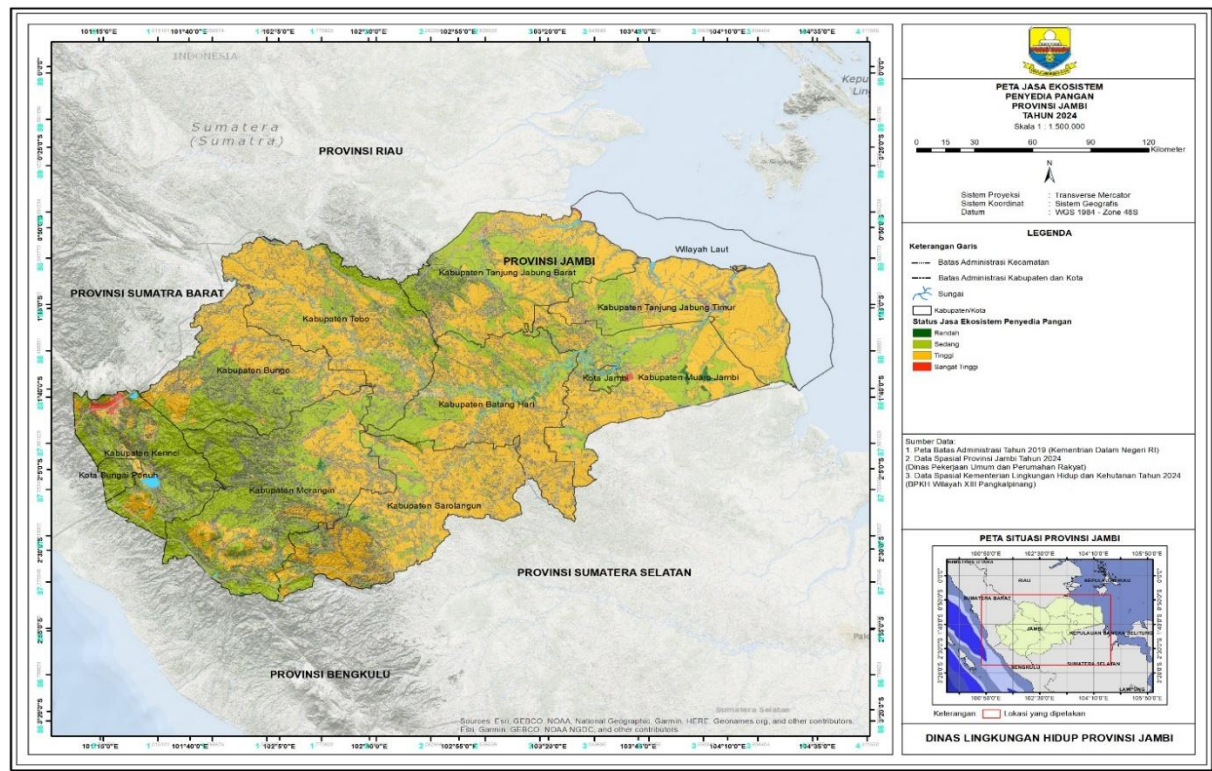
Provinsi Jambi memiliki struktur wilayah yang ditandai oleh beragam karakteristik penggunaan lahan yang mencerminkan potensi dan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, termasuk ketersediaan pangan. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, diperoleh gambaran mengenai kondisi daya dukung dan daya tampung (DDDT) lahan terhadap penyediaan pangan di wilayah ini.

Dari total luas wilayah Provinsi Jambi, yaitu sebesar 4.907.395,72 hektar, sebagian besar lahan termasuk dalam kategori daya dukung seimbang, yaitu seluas 2.814.699,40 hektar. Artinya, lahan pada kawasan tersebut secara umum mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayahnya secara relatif seimbang antara kapasitas produksi dengan konsumsi. Namun demikian, tantangan nyata terlihat dari masih luasnya kawasan yang berada dalam status defisit, yaitu sebesar 2.041.136,22 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada area tersebut, kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan pangan, terutama jika tidak didukung oleh distribusi pangan yang baik atau intervensi produksi yang memadai. Sementara itu, hanya sebagian kecil wilayah yang tergolong dalam status surplus, yakni 51.560,1 hektar, yang mencerminkan adanya kelebihan kapasitas produksi pangan dibandingkan kebutuhan di wilayah tersebut. Lahan-lahan ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai lumbung pangan lokal maupun penyangga distribusi antarwilayah. Kondisi daya dukung lahan ini menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Distribusi status daya dukung lahan terhadap pangan menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi ke depan perlu berfokus pada peningkatan produktivitas lahan, penguatan sistem distribusi pangan, serta pengelolaan ruang yang mendukung keberlanjutan sektor pertanian dan kemandirian pangan daerah.

Tabel 2-8 Luas dan Status Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi

| No    | Status   | Luas (Ha)    |
|-------|----------|--------------|
| 1     | Surplus  | 51.560,1     |
| 2     | Seimbang | 2.814.699,40 |
| 3     | Defisit  | 2.041.136,22 |
| TOTAL |          | 4.907.395,72 |

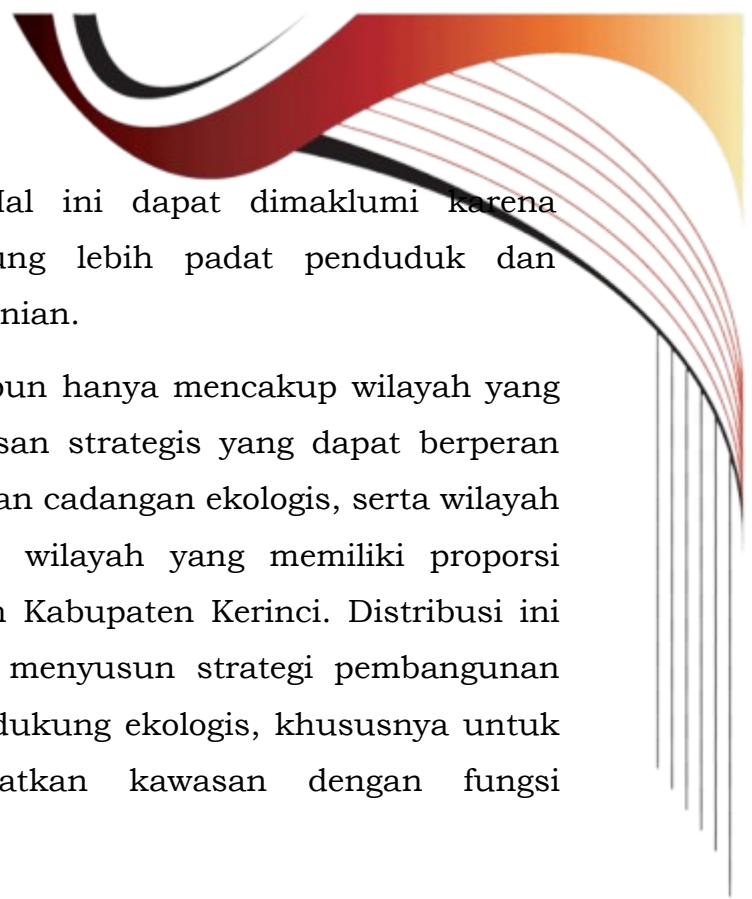
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025  
Gambar 2-10 Peta Jasa Penyedia Pangan Provinsi Jambi

Gambar di atas menunjukkan sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada pada kategori tinggi dan sedang dalam hal kapasitas ekosistem untuk menyediakan pangan. Secara keseluruhan, wilayah Jambi masih memiliki kemampuan ekosistem yang cukup untuk menopang penyediaan pangan secara berkelanjutan. Beberapa kabupaten dengan kontribusi ekosistem tertinggi terhadap penyediaan pangan yaitu Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Muaro Jambi. Wilayah-wilayah tersebut mencerminkan adanya potensi besar dari segi sumber daya alam dan tata guna lahan yang mendukung sistem pangan lokal dan regional. Di sisi lain, beberapa kota seperti Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh menunjukkan keterbatasan luasan lahan dengan peran ekosistem





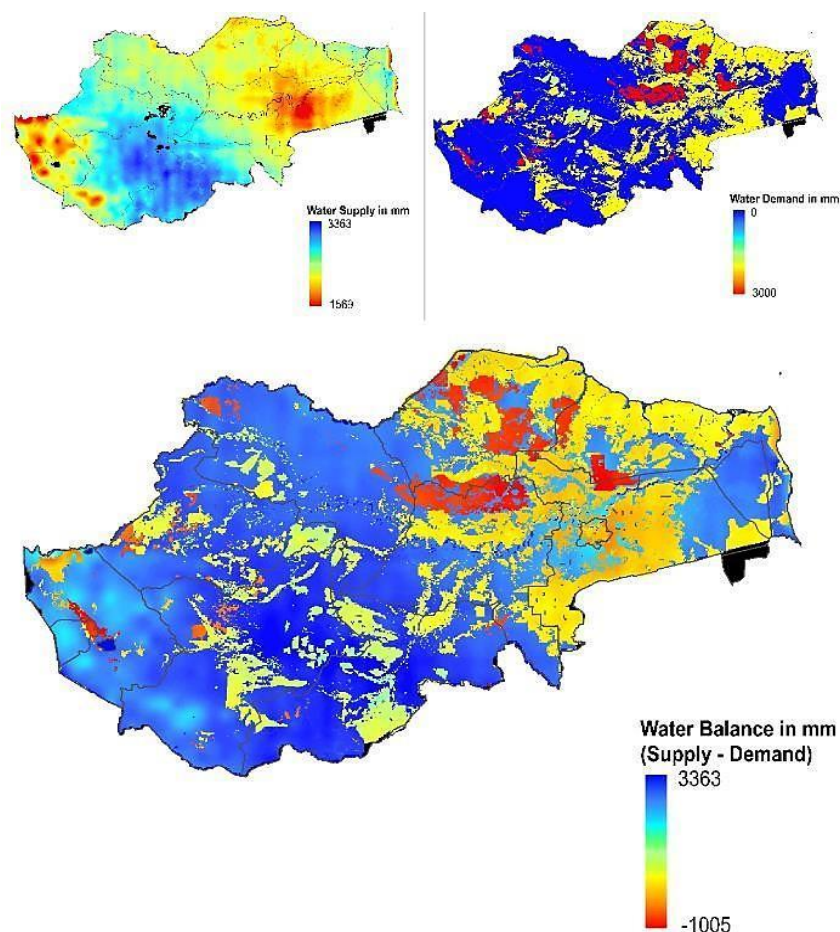
tinggi maupun sangat tinggi. Hal ini dapat dimaklumi karena karakteristik kota yang cenderung lebih padat penduduk dan didominasi oleh aktivitas non-pertanian.

Kategori sangat tinggi, meskipun hanya mencakup wilayah yang kecil, tetap penting sebagai kawasan strategis yang dapat berperan sebagai lumbung pangan, penyimpan cadangan ekologis, serta wilayah konservasi produktif. Salah satu wilayah yang memiliki proporsi tertinggi dalam kategori ini adalah Kabupaten Kerinci. Distribusi ini menjadi landasan penting dalam menyusun strategi pembangunan wilayah yang berbasis pada daya dukung ekologis, khususnya untuk mempertahankan dan meningkatkan kawasan dengan fungsi ekosistem tinggi.

#### **2.1.3.2 Ketersediaan Air**

Hasil olahan terhadap data curah hujan dan geohidrologi dikatehui bahwa hingga kini ketersediaan air untuk penduduk di wilayah bagian barat dan sebagian besar wilayah bagian tengah Provinsi Jambi masih melimpah. Wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait potensi ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhannya adalah terutama beberapa daerah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan perbatasan antar kedua kabupaten tersebut dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada daerah-daerah ini neraca air sudah cukup membutuhkan perhatian karena mulai terjadi defisit (kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan).

Pada daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan perbatasan antar kedua kabupaten tersebut dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi neraca air sudah cukup membutuhkan perhatian karena mulai terjadi defisit (kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan). Kondisi defisit ini menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan, khususnya untuk mendukung kebutuhan pertanian, domestik, dan industri. Oleh karena itu, intervensi kebijakan melalui konservasi daerah tangkapan air, pembangunan infrastruktur air, serta pengendalian pemanfaatan air tanah menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan neraca air di wilayah tersebut.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025  
Gambar 2-11 Neraca Air Wilayah Proivinsi Jambi 2021

### 2.1.3.3 Ketersediaan Lahan Tempat Tinggal/Berusaha Rendah Risiko Bencana

Dengan menggunakan indeks rawan bencana yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (rawan bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan dan lahan) serta standar luas ruang hidup layak yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR (11 m<sup>2</sup>/orang) dan Koefisien Dasar Hijau wilayah perkotaan dan perdesaan, maka dapat diketahui masih cukup ruang yang layak untuk penduduk di wilayah Provinsi Jambi tinggal dan berusaha, kecuali di wilayah perkotaan yaitu Kota Jambi dan terutama Kota Sungai Penuh yang mulai terbatas. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (provinsi maupun Kabupaten/kota) dengan penataan ruang untuk kawasan pemukiman atau desa tangguh bencana serta bangunan layak ramah lingkungan di kawasan-kawasan pemukiman yang teridentifikasi berada di daerah rawan bencana untuk memitigasi dan mengantisipasi terjadinya kejadian bencana.

Tabel 2-9 Kebutuhan dan Ketersediaan Ruang Hidup Layak (Tidak Rawan Bencana) Bagi Penduduk Provinsi Jambi per Kabupaten/Kota Pada Tahun 2020.

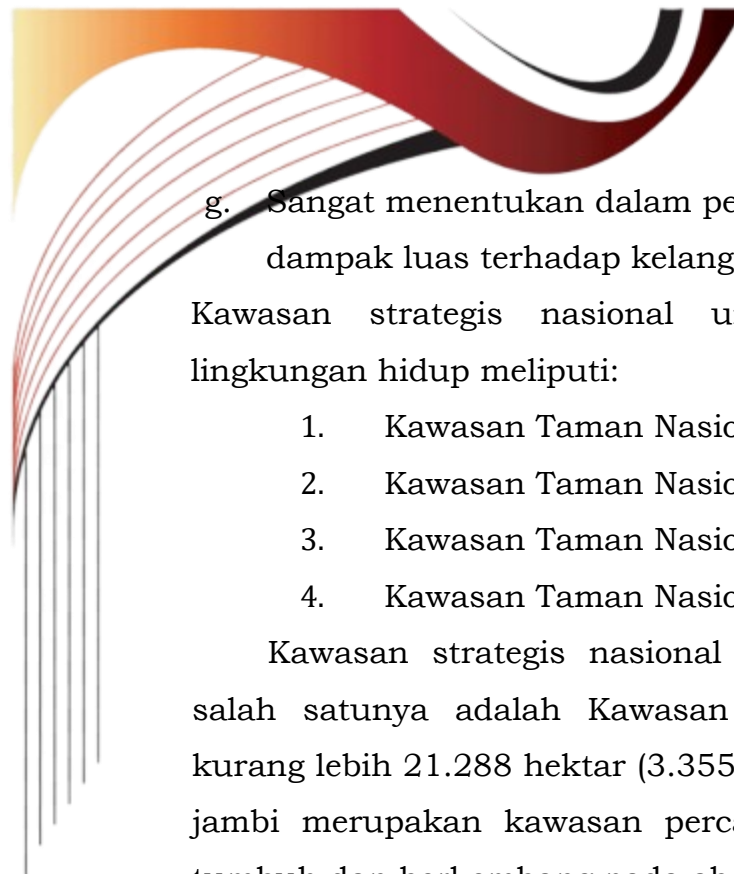
| Kabupaten/Kota                 | Kebutuhan Ruang Layak (Ha)* | Ruang Layak** (Ha) | Surplus/ (Defisit) (Ha) |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| Kabupaten Kerinci              | 826                         | 3.304              | 2.478                   |
| Kabupaten Merangin             | 1.169                       | 4.674              | 3.506                   |
| Kabupaten Sarolangun           | 957                         | 3.829              | 2.872                   |
| Kabupaten Bungo                | 1.595                       | 6.378              | 4.784                   |
| Kabupaten Batang Hari          | 1.327                       | 5.310              | 3.982                   |
| Kabupaten Tebo                 | 1.486                       | 5.944              | 4.458                   |
| Kabupaten Muaro Jambi          | 1.327                       | 5.306              | 3.980                   |
| Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 1.397                       | 5.588              | 4.191                   |
| Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 1.011                       | 4.044              | 3.033                   |
| Kota Jambi                     | 1.000                       | 1.500              | 500                     |
| Kota Sungai Penuh              | 159                         | 239                | 80                      |
| <b>Total</b>                   | <b>6.380</b>                | <b>22.622</b>      | <b>16.242</b>           |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Data diolah (2021), Data termutakhir

### 2.1.3.4 Potensi Pengembangan Wilayah

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebaga warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
- Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- Menurut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- Rawan bencana alam nasional;

- 
- g. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

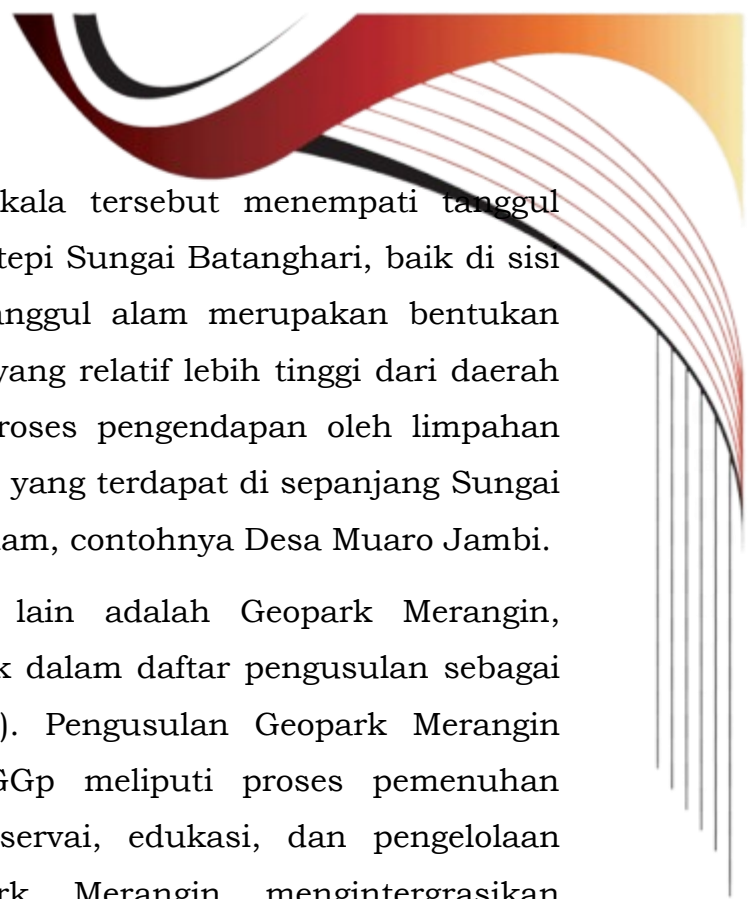
1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. Kawasan Taman Nasioanl Berbak Sembilang
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh; dan
4. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan sosial budaya salah satunya adalah Kawasan Percandian Muara Jambi seluas kurang lebih 21.288 hektar (3.355 Ha). Kawasan Cagar Budaya Muara jambi merupakan kawasan percandian agama Buddha yang telah tumbuh dan berkembang pada abad ke 7-13 M. Kawasan ini berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang menempati 8 (Delapan) Desa dalam 2 (Dua) Kecamatan, yaitu Desa Danau Lamo, Desa Muaro Jambi, Desa Baru, dan Desa Kemingking Luar di Kecamatan Maro Sebo, serta Desa Tebat Patah, Desa Kemingking Dalam, Desa Dusun Mudo, dan Desa Teluk Jambu di Kecamatan Taman Rajo.

Kawasan Cagar Budaya Muara jambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.259/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muara Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan luas 3.981 hektar. Bahkan telah masuk dalam daftar tentatif (*Tentative List*) UNESCO untuk nominasi warisan dunia dengan No. 5465 Tahun 2009. Berdasarkan letak astronomis, kawasan ini berada pada zona 48 M 346839 mT- 356779 mT dan 9833468 mU-9840765 mU. Batas-batas kawasan ini adalah:

- Sebelah Utara: Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo
- Sebelah Selatan: Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah
- Sebelah Barat: Desa Danau Lamo dan Desa Baru
- Sebelah Timur: Desa Teluk Jambu dan Desa Dusun Mudo

Kawasan ini dibelah oleh sebuah sungai besar, yakni Sungai Batanghari yang membagi 2 kawasan ini menjadi sisi utara dan sisi

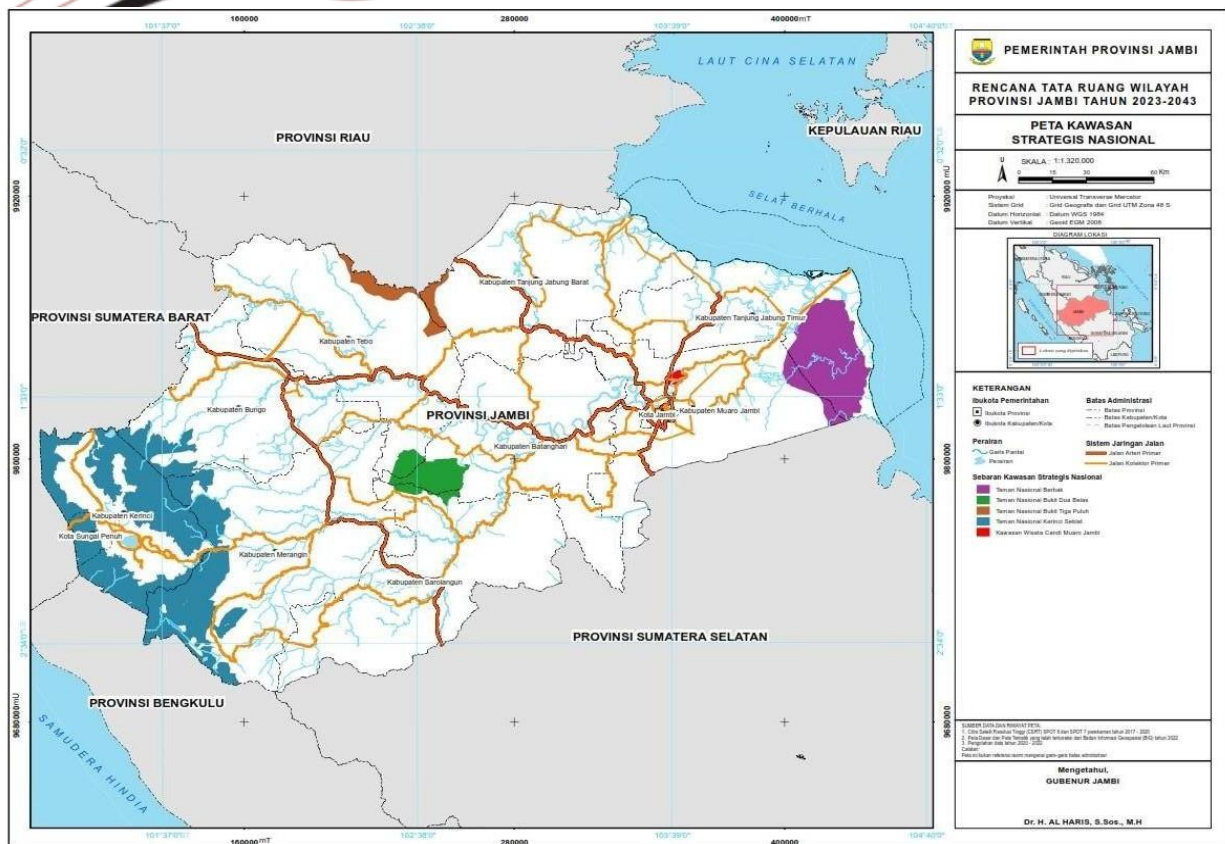


selatan. Adapun tinggalan purbakala tersebut menempati tanggul alam kuno yang ada di sepanjang tepi Sungai Batanghari, baik di sisi utara maupun di sisi selatan. Tanggul alam merupakan bentukan lahan di sepanjang tebing sungai yang relatif lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang terbentuk dari proses pengendapan oleh limpahan banjir. Umumnya daerah pedesaan yang terdapat di sepanjang Sungai Batanghari terletak pada tanggul alam, contohnya Desa Muaro Jambi.

Kawasan strategis nasional lain adalah Geopark Merangin, kawasan Geopark Merangin masuk dalam daftar pengusulan sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp). Pengusulan Geopark Merangin sebagai bagian dari jejaring UGGp meliputi proses pemenuhan standar internasional aspek konservasi, edukasi, dan pengelolaan partisipatif masyarakat. Geopark Merangin mengintegrasikan kekayaan geologi, keanekaragaman hayati, dan budaya dalam satu kawasan strategis. Kawasan ini terkenal dengan fosil flora tertua di dunia dari zaman Karbon-Permian. Fosil-fosil terekam dalam batuan sedimen di sepanjang aliran Sungai Mengkarang, yang merupakan situs geologi utama. Geopark Merangin mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis konservasi, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

Sistem sungai di satuan ruang geografis Muara Jambi terdiri dari Sungai Batanghari sebagai sungai induk dan beberapa anak sungainya, seperti Sungai Amburan Jalo, Sungai Terusan, Sungai Jambi, Parit Sekapung, Parit Johor, Sungai Melayu, Sungai Selat, dan Sungai Berembang. Berdasarkan analisis arah aliran, pola aliran, dan morfometri saluran diketahui bahwa sistem sungai di daerah ini dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal tersebut diketahui dari adanya dugaan bahwa beberapa sungai di daerah ini merupakan sungai buatan, seperti Sungai Terusan, Parit Sekapung, Parit Johor, dan lain-lain.





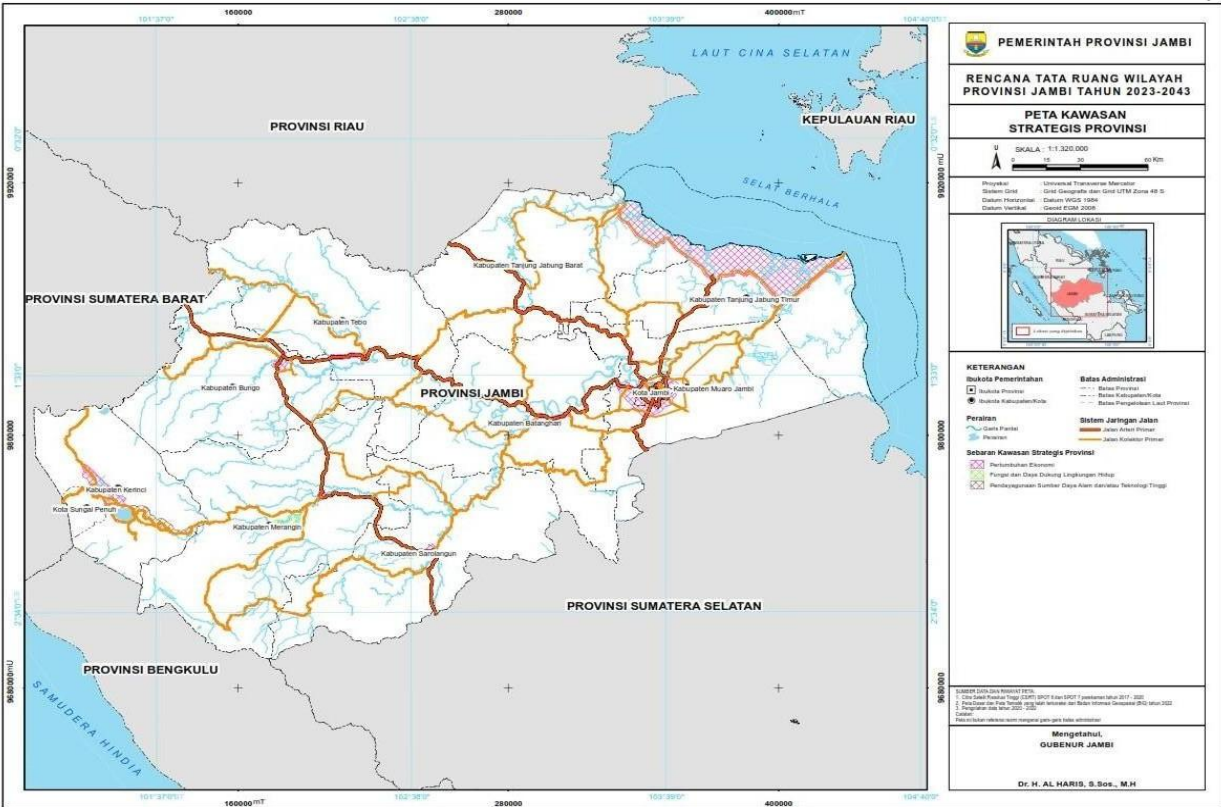
Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025  
 Gambar 2-12 Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Provinsi Jambi meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jambi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dirumuskan dengan pertimbangan tipologi kawasan yang berbentuk kawasan perkotaan, kawasan berkarakter koridor, kawasan perdesaan, dan kawasan cepat tumbuh karena ada trigger ekonomi yang sedang dan akan dikembangkan. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

- Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi;
- Perkotaan Muara Bulian-Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
- Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;

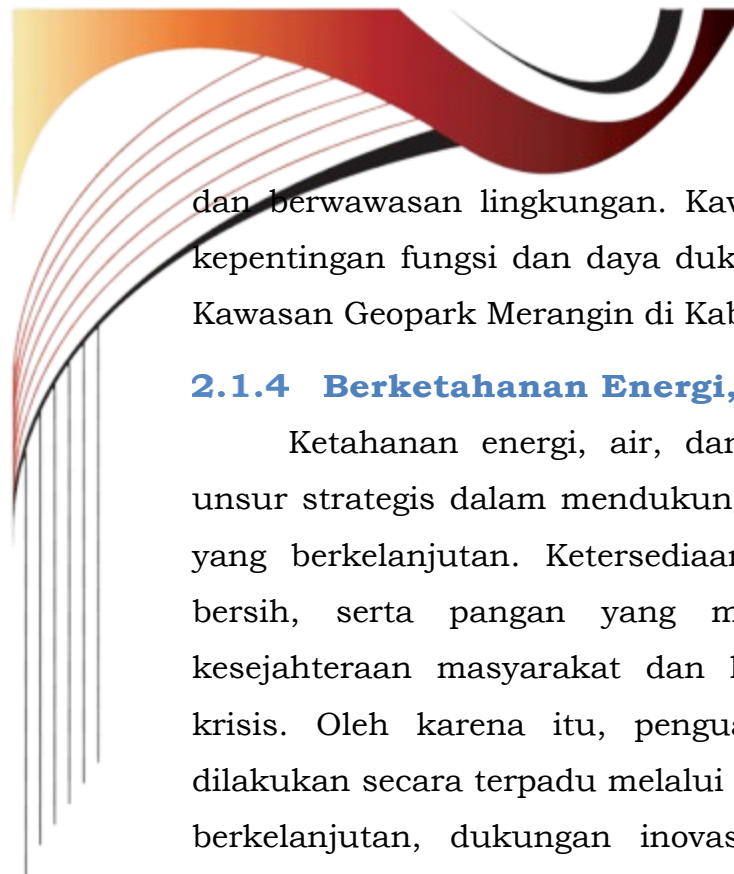


- Perkotaan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
- Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin;
- Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
- Perkotaan Sungai Penuh-Kerinci di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
- Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi; dan
- Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.



Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025  
 Gambar 2-13 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi

Arah pengembangannya yaitu penyediaan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan strategis provinsi teknologi tinggi di Kabupaten Kerinci. Dengan arah pengembangan pengembangan pemanfaatan sumber energi non fosil dan pengembangan teknologi pemanfaatan sumber energi berbasis hitech



dan berwawasan lingkungan. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berada pada Kawasan Geopark Merangin di Kabupaten Merangin.

#### **2.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**

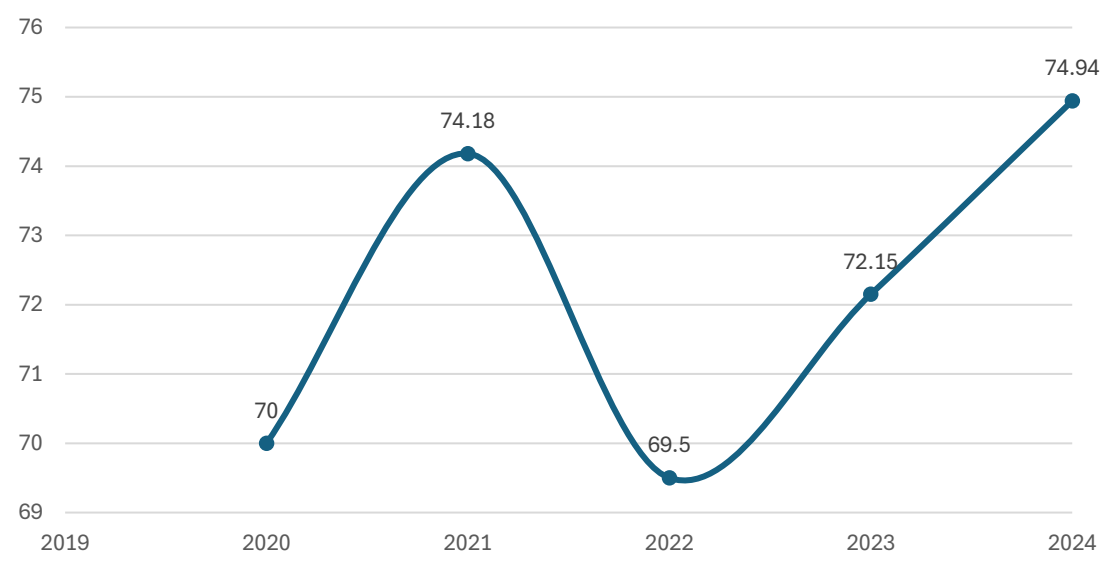
Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan merupakan unsur strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketersediaan dan akses terhadap energi, air bersih, serta pangan yang memadai menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat dan ketahanan daerah terhadap risiko krisis. Oleh karena itu, penguatan ketiga aspek tersebut perlu dilakukan secara terpadu melalui pengelolaan sumber daya lokal yang berkelanjutan, dukungan inovasi, serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan.

##### **2.1.4.1 Indeks Ketahanan Pangan**

Indeks Ketahanan Pangan merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan secara berkelanjutan. Tingginya rendahnya indeks ini menunjukkan sistem pangan yang tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi, perubahan iklim, dan gangguan distribusi. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pangan daerah perlu dilakukan melalui peningkatan produksi lokal, efisiensi rantai pasok, pengembangan cadangan pangan strategis, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. cadangan pangan strategis, serta sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika perkembangan yang variatif sepanjang periode 2020 hingga 2023. Meskipun data tahun 2019 belum tersedia, pada tahun 2020 indeks tercatat sebesar 70,00. Angka ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021 menjadi 74,18, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek akses, ketersediaan, dan kualitas pangan masyarakat. Namun, pada tahun 2022 indeks mengalami penurunan menjadi 69,50. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain gangguan distribusi pangan, kenaikan harga bahan pokok akibat inflasi, serta dampak perubahan iklim terhadap

produktivitas pertanian. Meskipun demikian, pada tahun 2023 indeks kembali menunjukkan peningkatan menjadi 72,15, menandakan adanya perbaikan dalam sistem ketahanan pangan daerah. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan, arah pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Jambi tetap menunjukkan kecenderungan yang positif dan progresif.

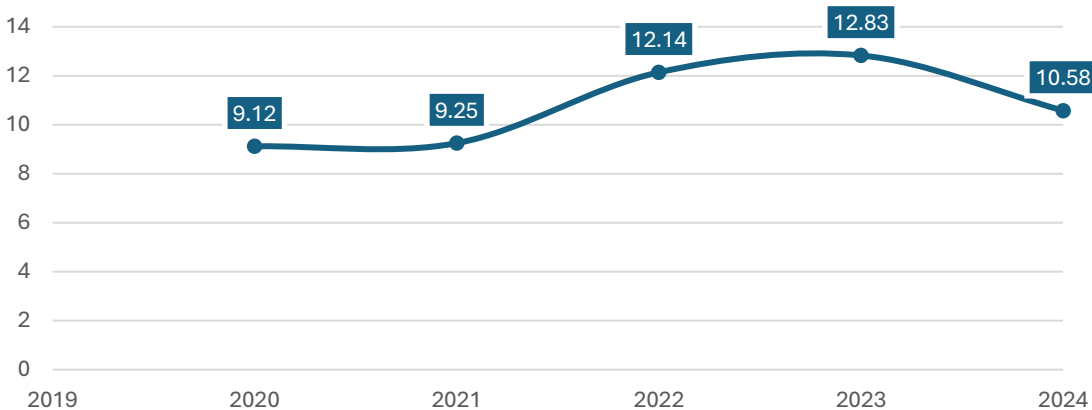


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Gambar 2-14 Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

2.1.4.2      **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**

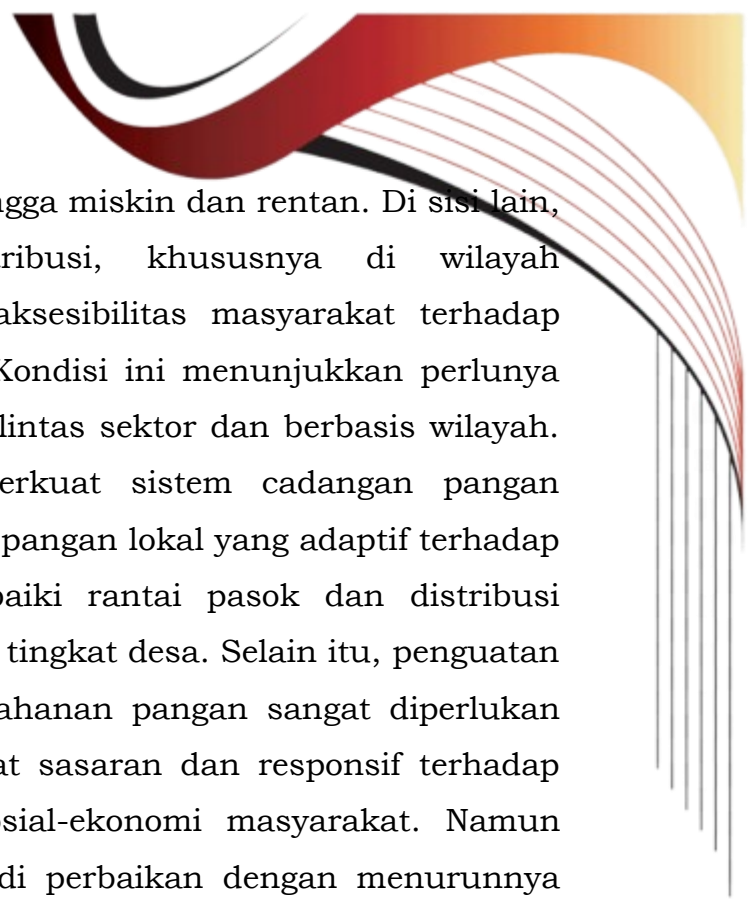
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan menggambarkan persentase penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan pangan harian secara layak, angka ini mencerminkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap risiko rawan pangan dan gizi buruk. Penurunan prevalensi ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di suatu daerah. Oleh karena itu, upaya perbaikan pola konsumsi masyarakat, peningkatan akses pangan bergizi, serta penguatan program perlindungan sosial menjadi langkah penting yang perlu terus diperkuat oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-15 Prevalensi Ketidacukupan Pangan Provinsi Jambi  
Tahun 2020-2024

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PKKP) Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang mencerminkan dinamika kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Pada tahun 2020, angka PKKP tercatat sebesar 9,12%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,25% pada tahun 2021. Kenaikan ini dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi COVID-19 yang masih memengaruhi daya beli masyarakat serta distribusi pangan di sejumlah wilayah. Pada tahun 2022, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PKKP) di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 12,14 persen. Kondisi ini mengindikasikan memburuknya pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, di mana semakin banyak penduduk yang belum memperoleh asupan energi minimum yang dianjurkan. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan angka PKKP kembali meningkat menjadi 12,83 persen. Lonjakan selama dua tahun berturut-turut ini mencerminkan tekanan serius terhadap sistem ketahanan pangan, khususnya dalam aspek ketersediaan dan keterjangkauan pangan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa peningkatan PKKP ini tidak terlepas dari beberapa faktor utama, antara lain tingginya volatilitas harga pangan pokok, ketimpangan distribusi logistik antarwilayah, serta masih kuatnya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah. Harga beras, telur, dan minyak goreng yang mengalami kenaikan selama periode tersebut memberikan tekanan

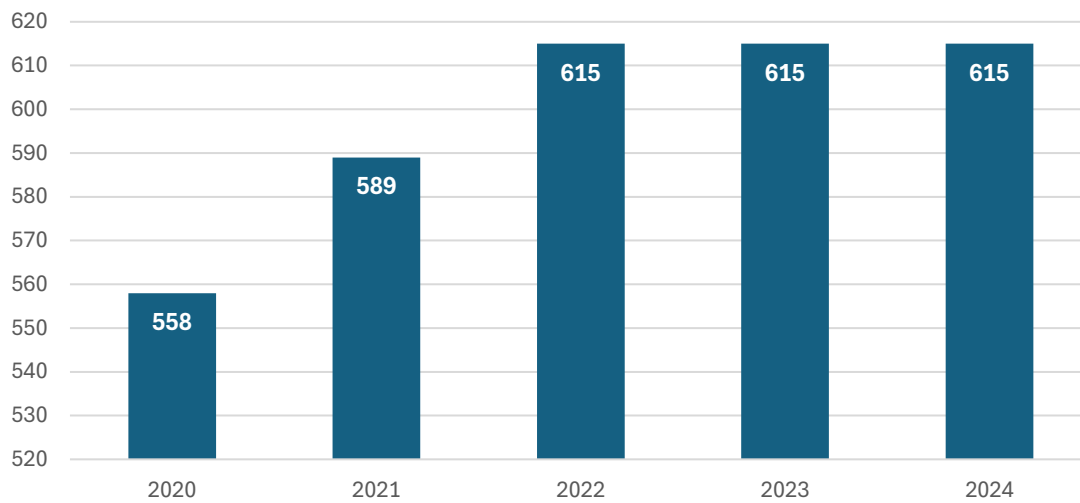


langsung pada daya beli rumah tangga miskin dan rentan. Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur distribusi, khususnya di wilayah perdesaan, turut memperburuk aksesibilitas masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Kondisi ini menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang bersifat lintas sektor dan berbasis wilayah. Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem cadangan pangan daerah, mengembangkan produksi pangan lokal yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta memperbaiki rantai pasok dan distribusi pangan yang terintegrasi hingga ke tingkat desa. Selain itu, penguatan data dan sistem pemantauan ketahanan pangan sangat diperlukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika pasar serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi perbaikan dengan menurunnya angka PKKP menjadi 10,58%. Penurunan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas dalam sistem distribusi pangan, peningkatan kapasitas produksi lokal, serta penguatan intervensi pemerintah melalui berbagai program ketahanan pangan.

#### **2.1.4.3 Konsumsi Listrik Per Kapita**

Dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, ketahanan energi menjadi salah satu aspek strategis yang harus diperhatikan oleh setiap daerah. Ketahanan energi tidak hanya diukur dari ketersediaan pasokan energi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkannya secara optimal untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pelayanan publik. Salah satu indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat ketahanan energi di suatu wilayah adalah konsumsi listrik per kapita. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat pemenuhan kebutuhan energi listrik masyarakat, sekaligus mencerminkan kualitas hidup, produktivitas ekonomi, dan kemajuan infrastruktur energi di suatu daerah.





Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025.

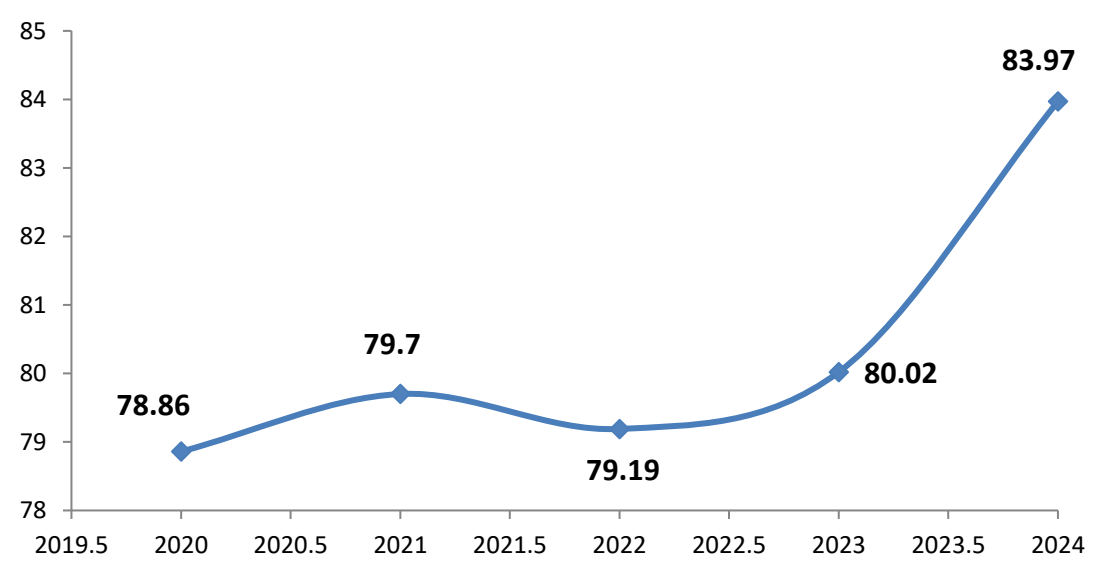
Gambar 2-16 Konsumsi Listrik Per Kapita Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (kWh)

Konsumsi Listrik per kapita Provinsi Jambi tahun 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam dua tahun pertama, dari 558 kWh di tahun 2020 menjadi 589 kWh di tahun 2021, kemudian naik kembali ke angka 615 kWh di tahun 2022. Capaian konsumsi listrik per kapita tersebut kemudian bertahan stabil sebesar 615 kWh hingga tahun 2024. Peningkatan awal tersebut menunjukkan adanya perkembangan aktivitas ekonomi, peningkatan aksesibilitas listrik masyarakat, serta pertumbuhan konsumsi listrik di sektor rumah tangga dan usaha kecil. Namun, stagnasi angka konsumsi sejak tahun 2022 menunjukkan bahwa perlu upaya mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif masyarakat yang lebih luas, termasuk di sektor industri kecil, jasa, dan digitalisasi layanan publik. Apabila konsumsi listrik per kapita stagnan sementara jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi meningkat, maka dapat terindikasi bahwa terdapat keterbatasan optimalisasi pemanfaatan listrik untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jambi perlu melakukan upaya pemenuhan kebutuhan akan konsumsi listrik dengan melakukan perluasan akses listrik di wilayah pedesaan, mendorong penggunaan listrik untuk usaha produktif, digitalisasi layanan publik, serta kampanye efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan untuk menopang kebutuhan listrik berkelanjutan di masa mendatang.



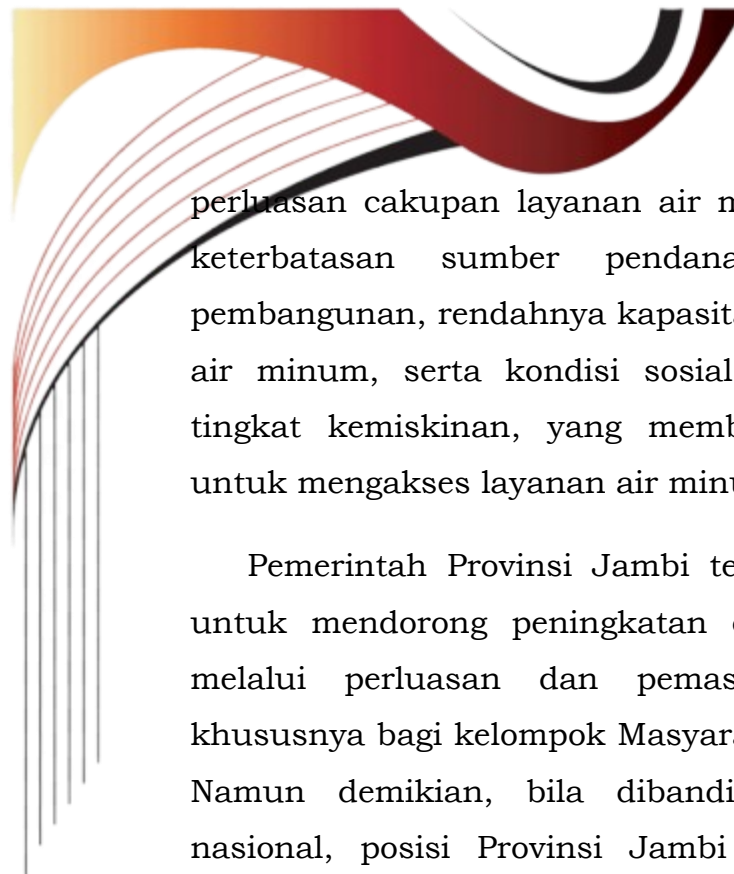
2.1.4.4 **Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Minum Layak**

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup, khussunya bagi manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.



Sumber: BPS Indonesia, 2025.  
Gambar 2-17 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2023 proporsi rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, mencapai 80,02 persen. Perkembangan capaian indikator ini dalam kurun waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan, meskipun laju pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam



perluasan cakupan layanan air minum layak antara lain mencakup keterbatasan sumber pendanaan, luasnya wilayah cakupan pembangunan, rendahnya kapasitas pelayanan dari operator penyedia air minum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat kemiskinan, yang membatasi kemampuan rumah tangga untuk mengakses layanan air minum yang layak.

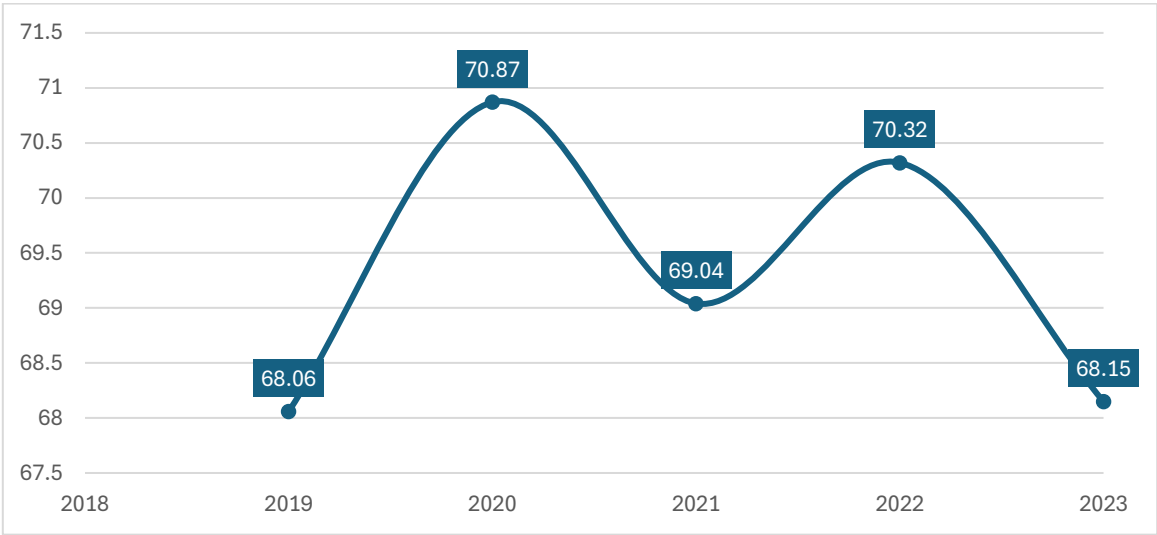
Pemerintah Provinsi Jambi telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendorong peningkatan capaian indikator ini, antara lain melalui perluasan dan pemasangan jaringan pipa distribusi, khususnya bagi kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun demikian, bila dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional, posisi Provinsi Jambi masih berada di bawah tingkat nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa percepatan pembangunan di sektor penyediaan air minum di Provinsi Jambi masih memerlukan penguatan agar mampu mengimbangi kebutuhan nasional akan akses air bersih yang aman dan layak.

#### **2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas**

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan fondasi penting bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah. Kualitas lingkungan tidak hanya memengaruhi kesehatan fisik dan mental penduduk, tetapi juga menentukan daya dukung serta daya tampung wilayah dalam menghadapi tekanan aktivitas manusia dan perubahan iklim. Oleh karena itu, upaya menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, serta partisipasi aktif masyarakat.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi Tahun 2019–2023 menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi belum sepenuhnya stabil, serta masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, dinamika kebijakan, dan intensitas aktivitas pembangunan. Pada tahun 2019, IKLH tercatat sebesar 68,06 dan mengalami peningkatan tajam menjadi 70,87 pada tahun 2020. Kenaikan ini diduga erat kaitannya

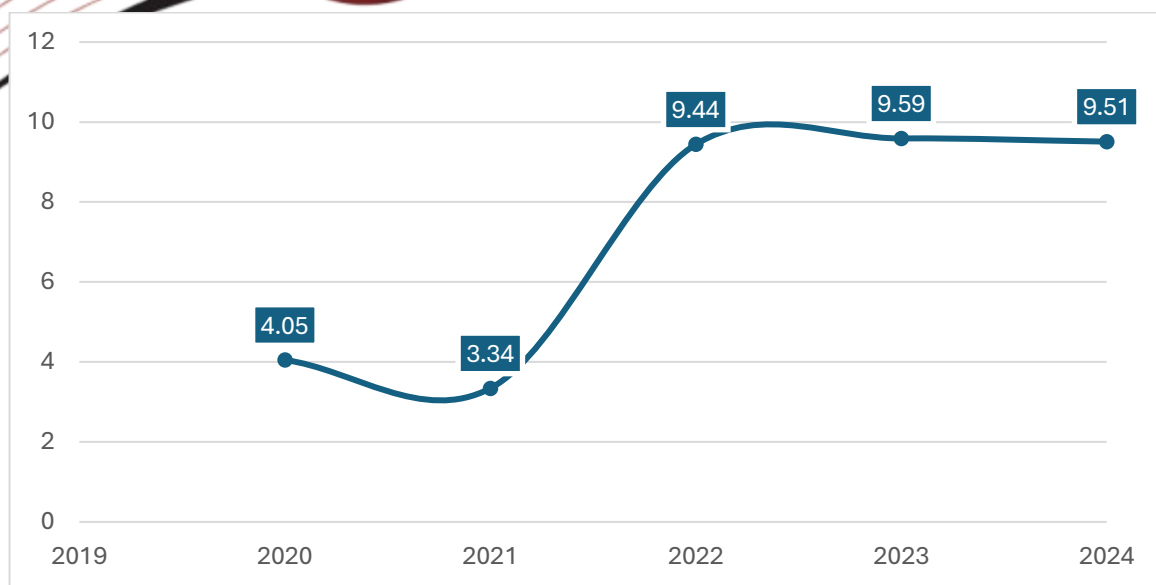
dengan menurunnya aktivitas industri dan transportasi selama pandemi COVID-19, yang berdampak positif terhadap kualitas udara dan lingkungan secara umum. Namun demikian, pada tahun 2021 terjadi penurunan indeks menjadi 69,04, meskipun kemudian kembali naik menjadi 70,32 pada tahun 2022. Tren positif ini tidak berlanjut pada tahun 2023, di mana IKLH kembali menurun menjadi 68,15. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dan terarah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi, terutama dalam menghadapi tekanan dari kegiatan ekonomi dan pembangunan.



Sumber: KLHK, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir).  
Gambar 2-18 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

2.1.5.1 **Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**

Akses sanitasi yang aman merupakan elemen penting dalam mewujudkan lingkungan sehat bagi masyarakat. Ketersediaan fasilitas sanitasi yang layak tidak hanya berdampak pada kesehatan individu dan keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah pencemaran lingkungan serta penyebaran penyakit. Oleh karena itu, perlu upaya bersama dalam memperluas akses sanitasi aman melalui pembangunan infrastruktur dasar yang merata, peningkatan edukasi perilaku hidup bersih dan sehat, serta penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sanitasi yang berkelanjutan.



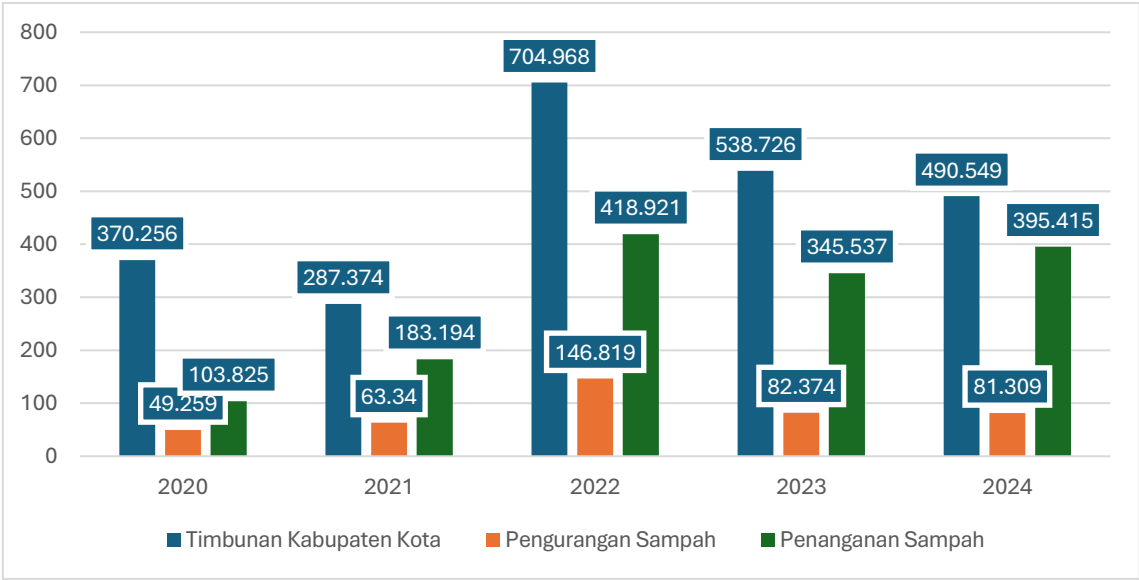
Sumber: BPS Nasional, 2025

Gambar 2-19 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Akses Sanitasi Aman di Provinsi Jambi mengalami dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman tercatat sebesar 4,05%. Namun, capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3,34%. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan program pembangunan infrastruktur sanitasi, yang dapat disebabkan oleh kendala teknis, keterbatasan anggaran, atau rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas yang tersedia. Mulai tahun 2022, tren capaian akses sanitasi aman kembali menunjukkan perbaikan dengan peningkatan signifikan menjadi 9,44%, dan sedikit meningkat lagi menjadi 9,59% pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 9,51%, angka ini tetap menunjukkan kemajuan dibandingkan awal periode evaluasi. Berdasarkan hal tersebut, perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan efektivitas program sanitasi serta bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang layak dan aman sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

2.1.5.2 **Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi Jambi**

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Kinerja pengelolaan sampah yang baik mencerminkan efektivitas sistem pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, serta pemanfaatan kembali sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, capaian pengelolaan sampah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana kebijakan dan program pengurangan sampah dari sumbernya, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyediaan sarana dan prasarana telah berjalan efektif.



Sumber: SIPSN, Kementerian Lingkungan Hidup, 2025  
Gambar 2-20 Timbulan Sampah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Selama tahun 2020 hingga 2024, jumlah timbunan sampah dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2022 sebesar 704,97 ribu ton. Upaya pengurangan dan penanganan sampah juga menunjukkan tren yang bervariasi. Pengurangan sampah tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 146,82 ribu ton, sementara penanganan sampah tertinggi tercapai pada tahun 2022 dengan total 418,921 ribu ton. Data ini mencerminkan adanya peningkatan komitmen dan kapasitas daerah dalam mengelola sampah, meskipun tantangan dalam menjaga konsistensi pengurangan sampah masih perlu mendapat perhatian lebih.

### 2.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan elemen krusial dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah serta melindungi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Tingginya risiko bencana alam serta dampak perubahan iklim yang semakin kompleks memerlukan pendekatan adaptif dan mitigatif yang terencana, terukur, dan berbasis data. Oleh karena itu, penguatan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, serta integrasi aspek perubahan iklim dalam perencanaan pembangunan menjadi langkah strategis yang harus terus dioptimalkan. Pendekatan ini perlu dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta didukung oleh teknologi, inovasi, dan kerangka regulasi yang adaptif terhadap dinamika risiko di masa depan.

#### 2.1.6.1 Wilayah Rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana:

##### 1. Bencana Geologi

Bencana geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsor, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang berasal dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

##### a. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah di sekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom vulkanik yang membara. Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari enam kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

##### b. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi



letusan) akan tertimpa lapili (kerikil vulkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari sembilan kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

**c. Bencana Banjir**

Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir sangat erat kaitannya dengan tutupan lahan, kondisi kelerengan daerah dan ekoregionnya. Semakin baik fungsi tutupan lahannya maka semakin tinggi jasa pengaturan aliran air dan banjir wilayah tersebut. Ekoregion yang mempengaruhi jasa ini adalah pegunungan patahan, sedangkan tutupan lahannya adalah hutan kerapatan tinggi.

Tabel 2-10 Distribusi Luas dan Peran Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Menurut Kabupaten dan kota di Provinsi Jambi

| No             | Nama Kecamatan       | Sangat Rendah |      | Rendah   |      | Sedang      |      | Tinggi      |      | Sangat Tinggi |      |
|----------------|----------------------|---------------|------|----------|------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|
|                |                      | Ha            | %    | Ha       | %    | Ha          | %    | Ha          | %    | Ha            | %    |
| 1              | Batanghari           | 12,4          | 0,1  | 11.690,8 | 5,8  | 393.848,9   | 15,9 | 123.730,6   | 6,3  | 8.345,4       | 3,3  |
| 2              | Bungo                | 1.503,9       | 16,4 | 21.257,2 | 10,6 | 169.366,6   | 6,8  | 238.321,1   | 12,1 | 28.987,7      | 11,6 |
| 3              | Kerinci              | 1.809,0       | 19,7 | 25.228,4 | 12,6 | 89.142,8    | 3,6  | 183.239,5   | 9,3  | 45.534,6      | 18,2 |
| 4              | Kota Jambi           | 0,0           | 0,0  | 12.286,7 | 6,1  | 1.321,0     | 0,1  | 2.502,3     | 0,1  | 892,2         | 0,4  |
| 5              | Kota Sungai Penuh    | 661,0         | 7,2  | 1.531,7  | 0,8  | 9.492,1     | 0,4  | 24.857,0    | 1,3  | 0,0           | 0,0  |
| 6              | Merangin             | 3.563,8       | 38,8 | 19.634,1 | 9,8  | 338.863,9   | 13,7 | 342.024,3   | 17,3 | 51.038,9      | 20,4 |
| 7              | Muaro Jambi          | 0,0           | 0,0  | 29.524,3 | 14,7 | 244.810,0   | 9,9  | 263.256,2   | 13,4 | 8.763,1       | 3,5  |
| 8              | Sarolangun           | 202,0         | 2,2  | 24.760,6 | 12,3 | 336.291,2   | 13,6 | 151.362,0   | 7,7  | 81.938,1      | 32,8 |
| 9              | Tanjung Jabung Barat | 1.304,1       | 14,2 | 17.732,2 | 8,8  | 326.571,6   | 13,2 | 202.241,3   | 10,3 | 6.952,5       | 2,8  |
| 10             | Tanjung Jabung Timur | 0,0           | 0,0  | 8.094,3  | 4,0  | 191.824,7   | 7,8  | 222.272,2   | 11,3 | 9.266,3       | 3,7  |
| 11             | Tebo                 | 139,4         | 1,5  | 28.942,7 | 14,4 | 371.683,6   | 15,0 | 218.048,6   | 11,1 | 8.192,7       | 3,3  |
| Provinsi Jambi |                      | 9.195,5       | 100  | 200.683  | 100  | 2.473.216,5 | 100  | 1.971.855,1 | 100  | 249.911,5     | 100  |
| Persentase     |                      | 0,19          |      | 4,09     |      | 50,42       |      | 40,20       |      | 5,10          |      |

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025.

Berdasarkan data distribusi luas dan peran jasa ekosistem dalam pengaturan tata aliran air dan banjir di Provinsi Jambi, terlihat bahwa sebagian besar wilayah masih berada pada kategori rendah hingga sedang. Dari total luas ekosistem pengaturan tata air sebesar 4.923.446,6 hektare, sekitar 40,20% tergolong dalam kategori sedang, 50,42% kategori rendah, dan hanya 5,10% yang masuk dalam kategori sangat tinggi. Kabupaten Merangin, Sarolangun, dan Kerinci memiliki

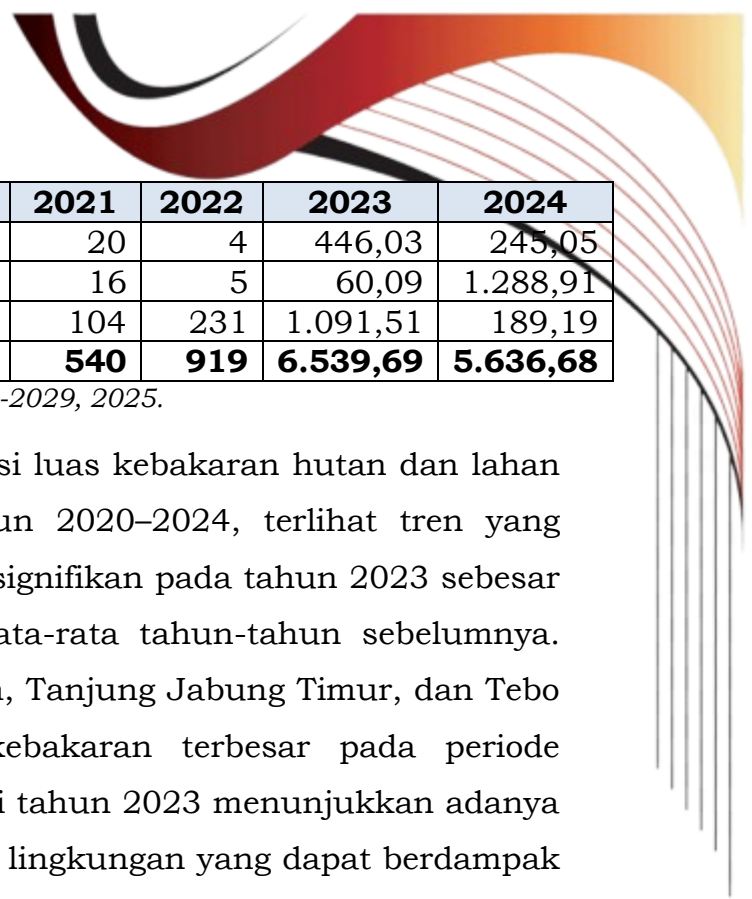
kontribusi signifikan pada ekosistem dengan peran tinggi hingga sangat tinggi, masing-masing mencapai 20,4%, 32,8%, dan 18,2% dari total luas kawasan di daerahnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Provinsi Jambi masih memiliki fungsi ekosistem tata air yang terbatas, yang berdampak pada tingginya potensi risiko banjir, sedimentasi, dan penurunan kualitas sumber daya air. Dampak dari kondisi ini antara lain meningkatnya kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi, penurunan ketersediaan air bersih saat musim kemarau, serta gangguan produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Selain itu, lemahnya fungsi tata air juga berpotensi mengganggu stabilitas ekosistem DAS Batanghari sebagai tulang punggung hidrologis wilayah. Provinsi Jambi perlu melakukan upaya untuk meminimalisir risiko banjir yang terjadi dengan melakukan peningkatan rehabilitasi kawasan hulu, konservasi sempadan sungai, dan penguatan kawasan lindung berbasis tata ruang. Selain itu, Provinsi Jambi juga perlu mendorong penerapan kebijakan pengelolaan lahan berbasis daya dukung lingkungan, restorasi lahan gambut, serta penguatan sistem informasi spasial dan pemantauan kualitas tata air secara berkala. Kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga penting dalam menjaga keberlanjutan jasa ekosistem pengendali tata air di Provinsi Jambi.

**d. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan**

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

Tabel 2-11 Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)  
Provinsi Jambi

| Kabupaten/Kota    | 2020 | 2021 | 2022 | 2023     | 2024     |
|-------------------|------|------|------|----------|----------|
| Batanghari        | 50   | 113  | 54   | 3.282,93 | 397,25   |
| Bungo             | 4    | 0    | 43   | 27,08    | 123,9    |
| Kota Jambi        | 0    | 0    | 0    | 0        | 0        |
| Kerinci           | 134  | 0    | 1    | 51,31    | 2,46     |
| Merangin          | 278  | 1    | 68   | 149,13   | 249,25   |
| Muaro Jambi       | 17   | 22   | 114  | 15,68    | 1.907,32 |
| Sarolangun        | 169  | 264  | 399  | 1.324,78 | 1.224,68 |
| Kota Sungai Penuh | 0    | 0    | 0    | 91,15    | 8,67     |



| Kabupaten/Kota       | 2020            | 2021       | 2022       | 2023            | 2024            |
|----------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| Tanjung Jabung Barat | 134             | 20         | 4          | 446,03          | 245,05          |
| Tanjung Jabung Timur | 114             | 16         | 5          | 60,09           | 1.288,91        |
| Tebo                 | 102             | 104        | 231        | 1.091,51        | 189,19          |
| <b>Total</b>         | <b>1.002,00</b> | <b>540</b> | <b>919</b> | <b>6.539,69</b> | <b>5.636,68</b> |

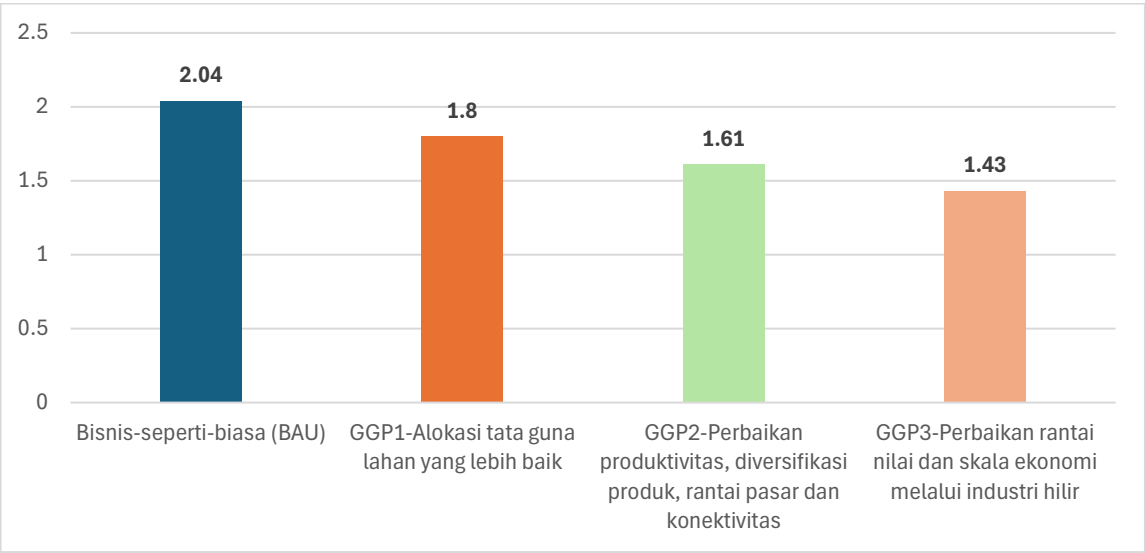
Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025.

Berdasarkan data rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi tahun 2020–2024, terlihat tren yang sangat fluktuatif dengan lonjakan signifikan pada tahun 2023 sebesar 6.539,69 hektare, jauh di atas rata-rata tahun-tahun sebelumnya. Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo menjadi wilayah dengan luas kebakaran terbesar pada periode tersebut. Lonjakan luas karhutla di tahun 2023 menunjukkan adanya tekanan serius terhadap ekosistem lingkungan yang dapat berdampak luas, antara lain menurunnya kualitas udara, kerusakan ekosistem gambut, gangguan kesehatan masyarakat, serta ancaman terhadap produktivitas sektor pertanian dan perikanan akibat kerusakan lahan. Selain itu, tingginya angka karhutla juga dapat menghambat capaian target pengurangan emisi gas rumah kaca dan memperbesar risiko bencana ekologis di Provinsi Jambi. Kondisi ini menandakan masih lemahnya sistem pencegahan dini, pengendalian kebakaran, serta pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan tanpa izin. Provinsi jambi perlu melakukan upaya pencegahan agar potensi kebakaran dapat berkurang dengan melakukan penguatan patroli terpadu karhutla, optimalisasi sistem peringatan dini berbasis spasial, rehabilitasi kawasan gambut dan lahan kritis, serta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Selain itu, penting mendorong sinergi antara pemerintah daerah, TNI/Polri, masyarakat peduli api, serta pelaku usaha perkebunan dan kehutanan dalam strategi pencegahan dan pengendalian karhutla yang berkelanjutan. Edukasi dan kampanye bahaya karhutla kepada masyarakat juga harus diperluas untuk menekan kejadian serupa di tahun-tahun mendatang.

2.1.6.1.1 Penurunan Intensitas Emisi GRK

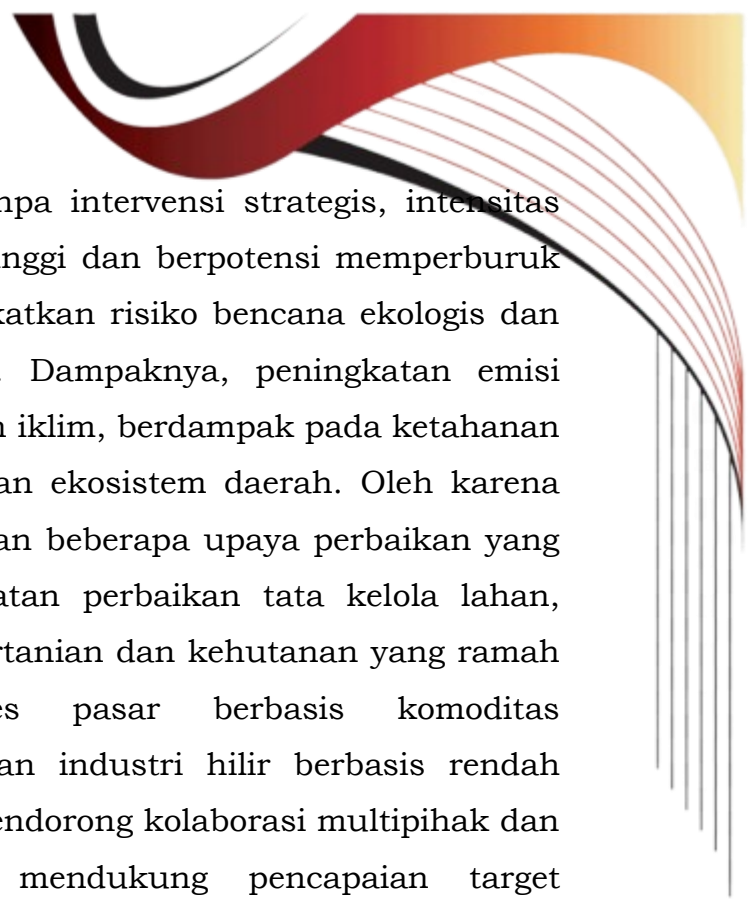
Penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim yang bertujuan untuk menurunkan laju pemanasan global dan dampaknya terhadap

sistem kehidupan. Dalam konteks pembangunan daerah, pengurangan emisi GRK menjadi indikator penting bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang mendorong efisiensi energi, transisi menuju energi terbarukan, serta praktik pembangunan ramah lingkungan perlu diperkuat secara konsisten. Pendekatan multisektor dan kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target penurunan emisi, sejalan dengan komitmen nasional dan global terhadap pengendalian perubahan iklim.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025.  
Gambar 2-21 Skenario Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca 2018-2030

Berdasarkan data skenario intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) Provinsi Jambi tahun 2018–2030, terlihat bahwa skenario bisnis-seperti-biasa (BAU) mencatatkan nilai intensitas emisi tertinggi sebesar 2,04. Sementara itu, penerapan berbagai skenario intervensi pembangunan hijau (*Green Growth Pathway*/GGP) menunjukkan potensi signifikan dalam menurunkan intensitas emisi. Pada skenario GGP1, yaitu perbaikan tata guna lahan, intensitas emisi turun menjadi 1,80; sedangkan melalui GGP2, yang mencakup perbaikan produktivitas, diversifikasi produk, peningkatan konektivitas dan pasar, turun menjadi 1,61. Penurunan terbesar diperoleh pada skenario GGP3 yang fokus pada perbaikan rantai nilai dan skala ekonomi melalui pengembangan industri hilir, yaitu sebesar 1,43.



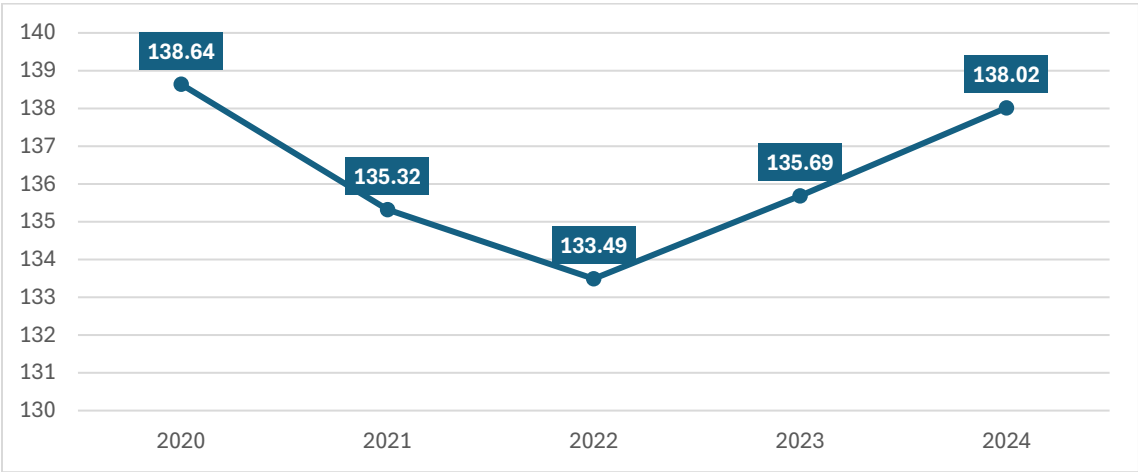
Hasil ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi strategis, intensitas emisi Provinsi Jambi akan tetap tinggi dan berpotensi memperburuk kualitas lingkungan serta meningkatkan risiko bencana ekologis dan gangguan kesehatan masyarakat. Dampaknya, peningkatan emisi GRK akan mempercepat perubahan iklim, berdampak pada ketahanan pangan, produktivitas ekonomi, dan ekosistem daerah. Oleh karena itu, Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan meliputi percepatan perbaikan tata kelola lahan, penguatan produktivitas sektor pertanian dan kehutanan yang ramah lingkungan, peningkatan akses pasar berbasis komoditas berkelanjutan, serta pengembangan industri hilir berbasis rendah karbon. Selain itu, penting pula mendorong kolaborasi multipihak dan kebijakan fiskal hijau untuk mendukung pencapaian target penurunan emisi secara berkelanjutan di Provinsi Jambi.

#### 2.1.6.1.2 Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana alam maupun non-alam. Tingginya risiko bencana dapat menghambat proses pembangunan dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Risiko ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik seperti infrastruktur dan lingkungan, tetapi juga memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat terdampak. Oleh karena itu, upaya penurunan risiko bencana menjadi tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang tangguh terhadap bencana, penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peringatan dini dan mitigasi.

Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan secara bertahap dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2022, nilai indeks mengalami penurunan dari 138,64 menjadi 133,49. Namun pada tahun 2023 hingga 2024 nilai IRB mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai sebesar 138,02. Nilai IRB Provinsi Jambi yang kembali meningkat dalam dua tahun terakhir mengindikasikan adanya peningkatan kerentanan atau berkurangnya kapasitas wilayah dalam menghadapi potensi bencana. Hal ini dapat

berdampak pada meningkatnya potensi kerugian sosial, ekonomi, maupun lingkungan apabila terjadi bencana, serta dapat menghambat keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, Provinsi Jambi perlu melakukan beberapa hal antisipasi seperti penguatan sistem peringatan dini dan pemetaan risiko berbasis data spasial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, serta integrasi strategi pengurangan risiko bencana ke dalam rencana tata ruang dan pembangunan daerah.



Sumber: Inarisk, 2025  
Gambar 2-22 Indeks Risiko Bencana Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

2.1.7 Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024 adalah sebanyak 3.724.300 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 76 jiwa/km2 dengan kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.738 jiwa/km2 dan Kota Sungai Penuh sebesar 276 jiwa/km2, kepadatan terendah berada di Kabupaten Merangin sebesar 50 jiwa/km2.

Tabel 2-12 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020 - 2024

| No | Kabupaten/ Kota | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    |
|----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1  | Kerinci         | 250.300 | 251.900 | 250.300 | 251.120 | 256.700 |
| 2  | Merangin        | 354.100 | 355.700 | 354.100 | 366.390 | 373.400 |



| No             | Kabupaten/<br>Kota   | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      |
|----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3              | Sarolangun           | 290.100   | 293.600   | 290.000   | 302.240   | 306.500   |
| 4              | Batang Hari          | 301.700   | 306.700   | 301.700   | 312.730   | 316.600   |
| 5              | Muaro Jambi          | 402.000   | 406.800   | 402.000   | 418.800   | 424.600   |
| 6              | Tanjung Jabung Timur | 229.800   | 231.800   | 229.800   | 236.730   | 239.000   |
| 7              | Tanjung Jabung Barat | 317.500   | 320.600   | 317.500   | 330.470   | 335.100   |
| 8              | Tebo                 | 337.700   | 340.900   | 337.700   | 350.760   | 355.300   |
| 9              | Bungo                | 362.400   | 367.200   | 362.400   | 376.380   | 381.300   |
| 10             | Kota Jambi           | 606.200   | 612.200   | 606.200   | 627.770   | 635100    |
| 11             | Kota Sungai Penuh    | 96.600    | 97.800    | 96.600    | 99.770    | 100.800   |
| Provinsi Jambi |                      | 3.548.200 | 3.585.100 | 3.631.136 | 3.679.170 | 3.724.300 |

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52,37 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 47,63 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo). Bila dilihat dari komposisi penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio 103,42.

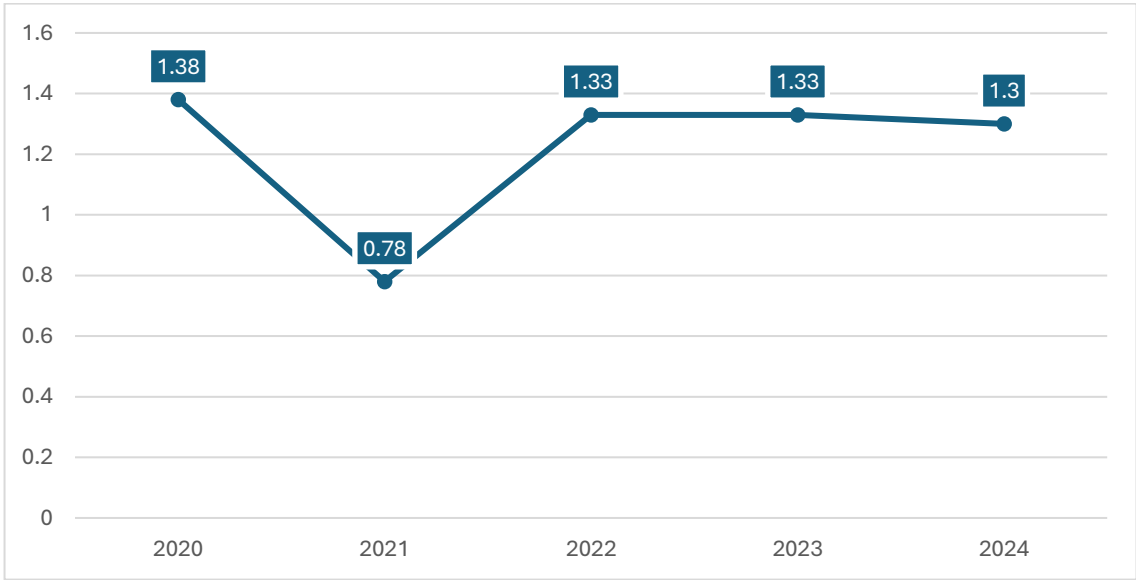
Tabel 2-13 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2024

| No | Kabupaten/Kota | Kepadatan Penduduk(jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|----|----------------|-------------------------------------------|
| 1  | Kerinci        | 75                                        |
| 2  | Merangin       | 50                                        |
| 3  | Sarolangun     | 52                                        |
| 4  | Batang Hari    | 59                                        |
| 5  | Muaro Jambi    | 81                                        |
| 6  | Tanjab Timur   | 53                                        |
| 7  | Tanjab Barat   | 60                                        |
| 8  | Tebo           | 58                                        |
| 9  | Bungo          | 80                                        |
| 10 | Kota Jambi     | 3.738                                     |

| No            | Kabupaten/Kota | Kepadatan Penduduk(jiwa/km <sup>2</sup> ) |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|
| 11            | Sungai Penuh   | 276                                       |
| <b>Jumlah</b> |                | <b>76</b>                                 |

Sumber: Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun menjadi cerminan penting bagi dinamika sosial dan ekonomi suatu daerah. Laju pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan akan berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di Provinsi Jambi, tren pertumbuhan penduduk selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang patut diperhatikan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan ke depan. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2020-2024 adalah sebesar 1,30 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sarolangun sebesar 1,48 persen dan terendah di Kabupaten Kerinci sebesar 0,68 persen.

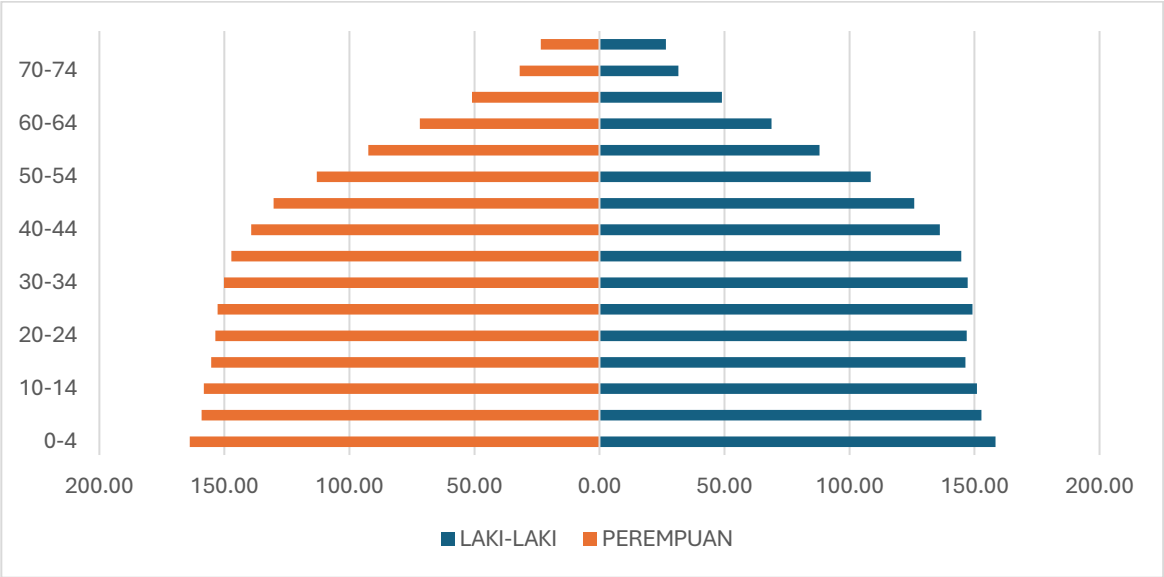


Sumber: Jambi Dalam Angka 2025, 2025  
 Gambar 2-23 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Kondisi demografi Provinsi Jambi Kondisi demografi Provinsi Jambi dapat dianalisis lebih lanjut melalui piramida penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2024. Piramida ini menunjukkan bahwa struktur penduduk Provinsi Jambi masih didominasi oleh kelompok usia muda, terutama pada rentang usia 0–19 tahun. Kelompok usia 0–4 tahun mencatat jumlah tertinggi, dengan 158,4

ribu jiwa perempuan dan 163,82 ribu jiwa laki-laki, menandakan angka kelahiran yang masih relatif tinggi.

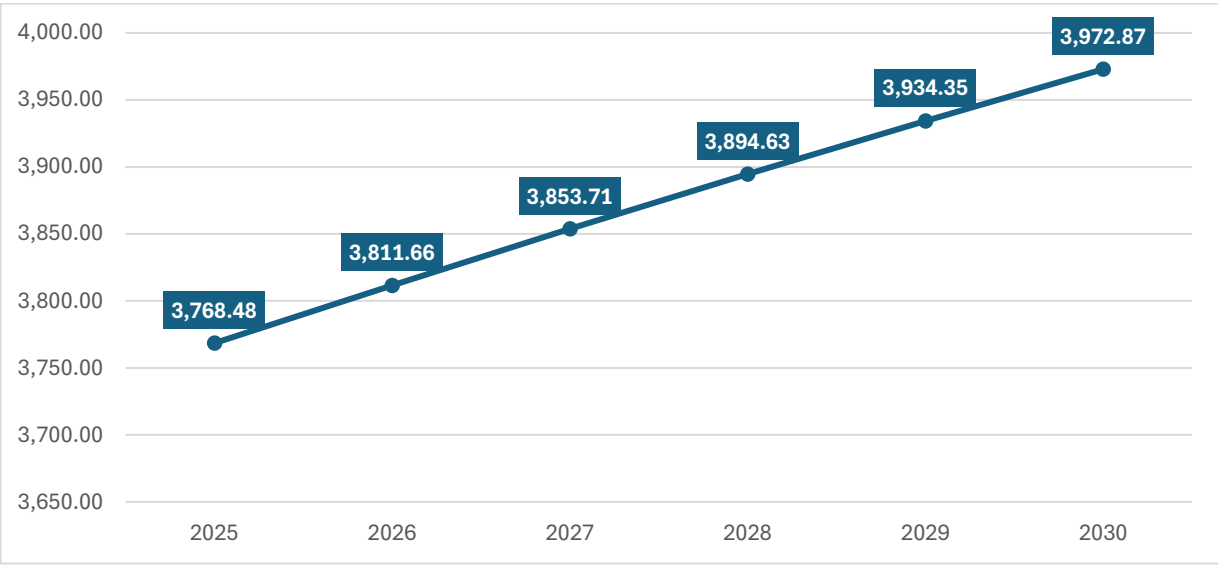
Kelompok usia sekolah dasar hingga menengah (5–19 tahun) juga cukup besar, yang mengindikasikan perlunya perhatian terhadap penyediaan layanan pendidikan yang memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, kelompok usia produktif (20–59 tahun) mendominasi struktur penduduk, mencerminkan potensi besar bagi pembangunan ekonomi dan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Namun, pada kelompok usia 15–24 tahun, terlihat adanya penurunan jumlah penduduk dibandingkan kelompok usia sebelumnya, terutama pada usia 15–19 tahun dan 20–24 tahun. Hal ini dapat mengindikasikan migrasi keluar daerah untuk keperluan pendidikan atau pekerjaan, yang sejalan dengan fenomena sebelumnya di mana usia tersebut cenderung meninggalkan daerah asal. Sementara itu, kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas) menunjukkan jumlah yang lebih kecil, tetapi tetap perlu diperhatikan terutama dalam penyediaan layanan kesehatan dan jaminan sosial. Secara keseluruhan, pola ini mengindikasikan bahwa Provinsi Jambi berada pada fase bonus demografi, yang jika dimanfaatkan secara optimal, dapat mendorong percepatan pembangunan daerah.



Sumber: Jambi Dalam Angka 2025  
Gambar 2-24 Piramida Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2024

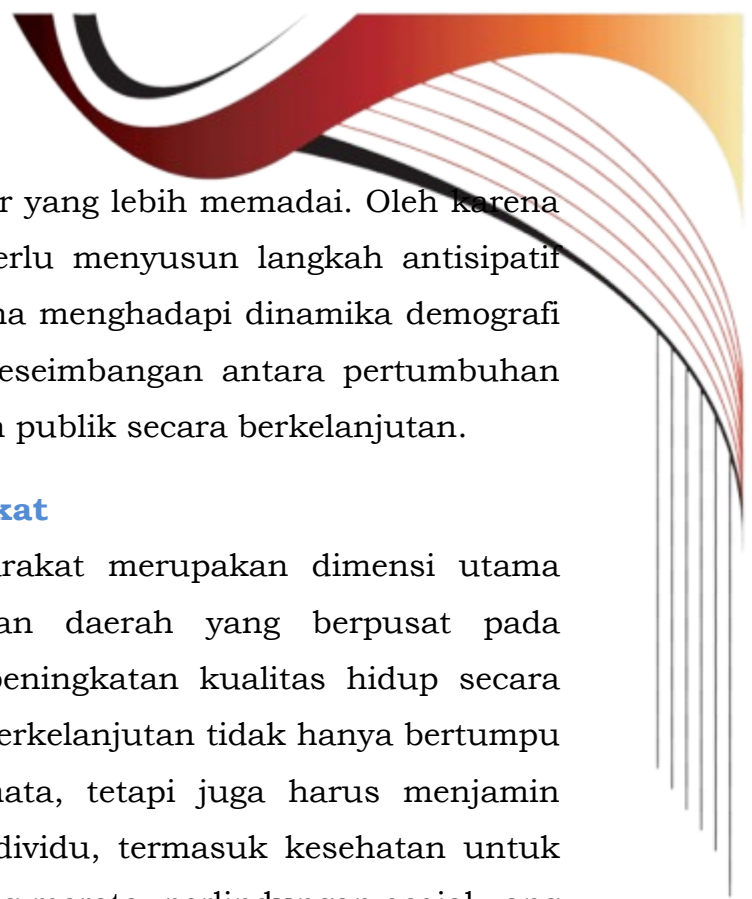
Hal menarik lainnya dapat dilihat pada piramida penduduk tahun 2024, di mana dalam kurun waktu sembilan tahun, telah

terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok penduduk usia sekolah yang hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan usia lanjut yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif. Terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, apabila tidak diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat. Peningkatan jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan, namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025.  
Gambar 2-25 Proyeksi Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025-2030  
(Ribu Jiwa)

Proyeksi penduduk Provinsi Jambi menunjukkan adanya tren peningkatan nilai secara konsisten dari tahun 2025 hingga 2030. Pada tahun 2025, diperkirakan jumlah penduduk Provinsi Jambi akan mencapai sebesar 3.768,48 ribu jiwa dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai sebesar 3.972,87 ribu jiwa di tahun 2030. Secara keseluruhan, selama periode lima tahun ke depan, jumlah penduduk Provinsi Jambi diperkirakan bertambah sekitar 204,39 ribu jiwa atau meningkat sebesar 5,42 persen dari jumlah penduduk tahun 2025. Adanya kecenderungan peningkatan penduduk Provinsi Jambi perlu menjadi faktor strategis yang harus diperhatikan karena akan ada penambahan kebutuhan fasilitas



pelayanan dasar serta infrastruktur yang lebih memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu menyusun langkah antisipatif dan perencanaan yang terarah guna menghadapi dinamika demografi tersebut, sekaligus memastikan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

## **2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan dimensi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berpusat pada manusia dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Pembangunan yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada kesejahteraan ekonomi semata, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya hak dasar setiap individu, termasuk kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, perlindungan sosial yang adaptif, beragama maslahat dan berkebudayaan maju, serta keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Oleh karena itu, penguatan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan masyarakat perlu diarahkan untuk menciptakan keadilan sosial, mempersempit kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pendekatan intersektoral berbasis data dan responsif terhadap dinamika sosial menjadi landasan penting dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan agenda kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan merata.

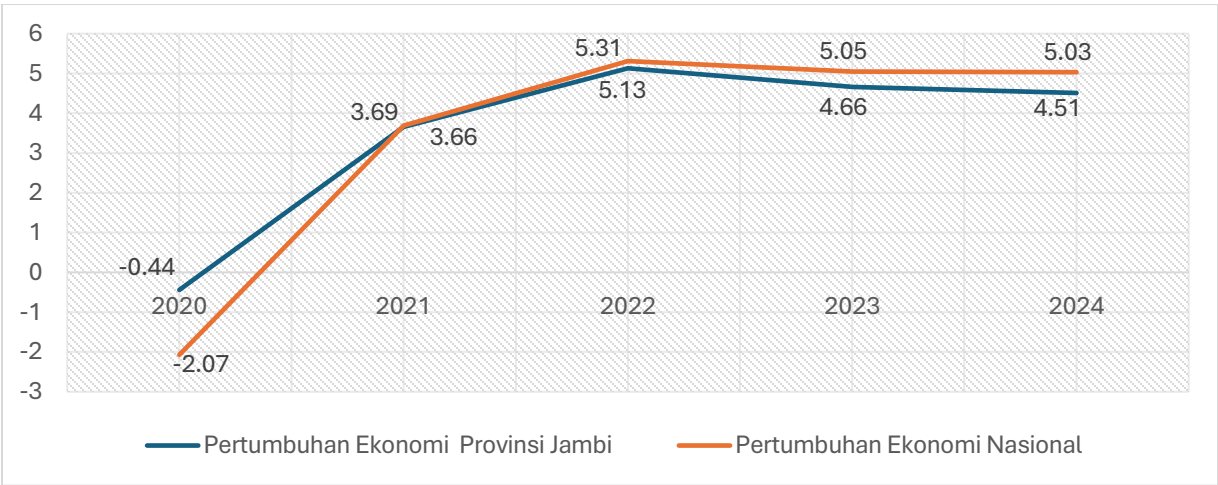
### **2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi**

Kesejahteraan ekonomi merupakan pilar fundamental dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkuat daya saing daerah secara berkelanjutan. Pencapaian kesejahteraan ekonomi ditandai oleh peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja yang layak, pengurangan kemiskinan, serta pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Oleh karena itu, penguatan struktur ekonomi lokal, pengembangan sektor produktif unggulan, serta pemberdayaan pelaku ekonomi, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menjadi langkah strategis dalam memperluas peluang ekonomi masyarakat. Dukungan terhadap inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan pemanfaatan potensi ekonomi digital juga perlu terus didorong agar pertumbuhan ekonomi

yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud di seluruh lapisan masyarakat.

2.2.1.1 **Pertumbuhan PDRB**

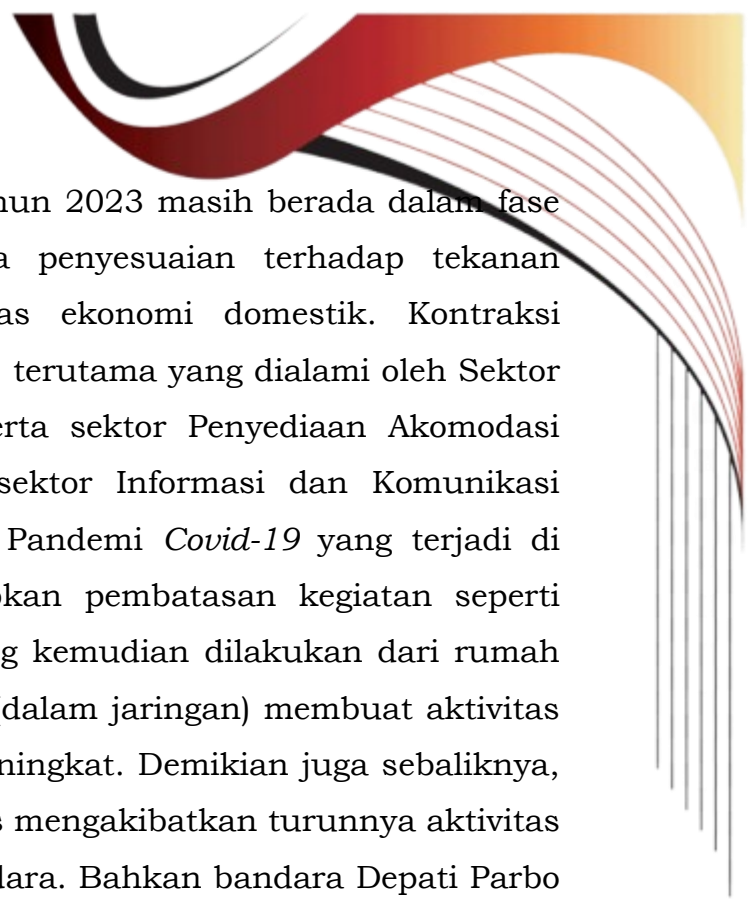
Pembangunan Provinsi Jambi merupakan suatu proses yang tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonomi, di mana keduanya saling bersinergi dan saling bergantung dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada Tahun 2024 mengalami perlambatan dari 4,66 persen (*yoy*) di tahun 2023 menjadi 4,51 persen, serta lebih rendah dibandingkan dengan Nasional yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Perlambatan tersebut terutama disebabkan karena terjadinya kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian akibat dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batu bara. Di sisi lain, angkutan komoditas batu bara via darat masih belum optimal pasca dibuka kembali pada Mei 2024. Selanjutnya, menurunnya produksi CPO akibat adanya penutupan dua pabrik pengolahan kelapa sawit serta menurunnya produksi TBS kelapa sawit juga mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024.



Sumber: BPS Indonesia, 2025  
Gambar 2-26 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi sempat mengalami kontraksi sebesar 0,44 persen pada tahun 2020 akibat dampak pandemi *Covid-19* yang melanda seluruh dunia. Perkembangan

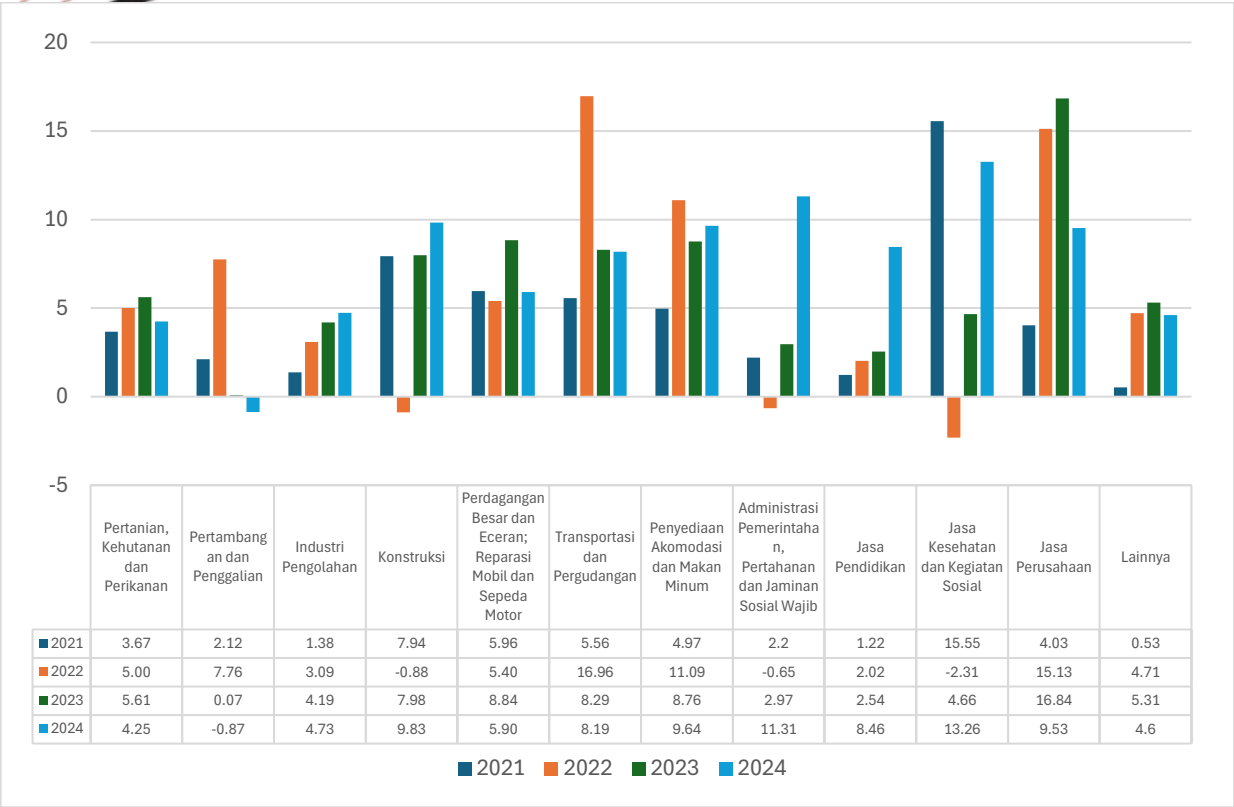




ekonomi Provinsi Jambi hingga tahun 2023 masih berada dalam fase pemulihan seiring dengan upaya penyesuaian terhadap tekanan eksternal dan perbaikan aktivitas ekonomi domestik. Kontraksi dialami oleh sebagian besar sektor, terutama yang dialami oleh Sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara sektor Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi. Pandemi *Covid-19* yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang kemudian dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring (dalam jaringan) membuat aktivitas Informasi dan Komunikasi jadi meningkat. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersil sama sekali.

Namun pada tahun 2021 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pemulihan dengan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,66 persen. Seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif, terutama sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 15,55 persen. Tingginya pertumbuhan sektor tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*. Selanjutnya, diikuti oleh sektor Konstruksi yang tumbuh tinggi sebesar 7,94 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,96 persen.

Selanjutnya, pada tahun 2022 seiring dengan makin pulihnya aktivitas masyarakat, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,96 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara.



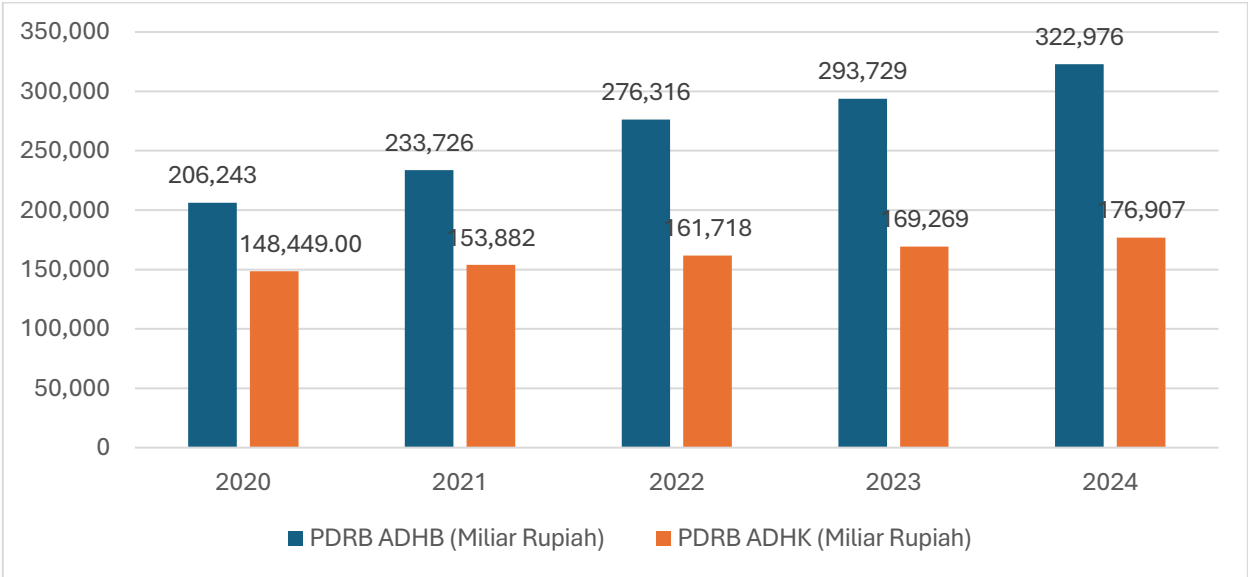
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-27 Pertumbuhan PDRB Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

Pada tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi melambat menjadi 4,66 persen (*yoy*), lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 5,05 persen. Perlambatan ini utamanya disebabkan oleh kinerja sektor Pertambangan dan Penggalian yakni sektor dengan kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB yang hanya tumbuh sebesar 0,07 persen, jauh menurun dibandingkan tahun 2022. Meski demikian, penurunan ini bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi perlambatan ekonomi. Di sisi lain, terdapat kontribusi positif dari sektor lain yang mampu menahan tekanan perlambatan lebih lanjut.

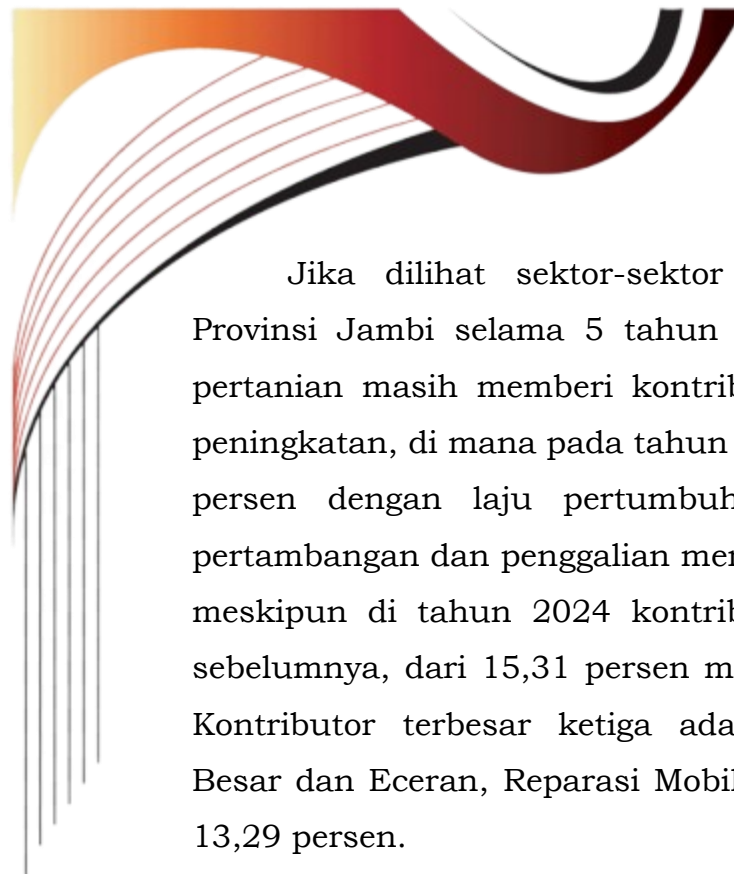
Sektor Konstruksi, misalnya, menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 9,83 persen. Kinerja sektor ini terdorong oleh pelaksanaan sejumlah proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan jalan tol Trans Sumatra (JTTS) Bayung Lencir–Tempino, proyek *multi-years Islamic Center*, Stadion Swarnabhumi, serta pembangunan fasilitas umum seperti PLTA Batang Merangin, Stadion Pijoan, Islamic Center, dan drainase utama di Kota Jambi. Peningkatan aktivitas konstruksi tersebut memberikan dampak

multiplier yang cukup besar terhadap sektor-sektor terkait, seperti industri pengolahan bahan bangunan dan jasa transportasi.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi kembali mengalami perlambatan dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,51 persen (*yoy*). Penurunan ini tetap dipengaruhi oleh kontraksi pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sebagai akibat dari penurunan harga batu bara acuan di pasar global pada yang telah terjadi sejak pertengahan 2023. Namun demikian, sektor-sektor lain mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, di antaranya sektor Jasa Kesehatan dan kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 13,26 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang meningkat sebesar 11,31 persen, didorong oleh aktivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024. Salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah peran belanja pemerintah, khususnya dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan layanan publik. Meskipun belanja pemerintah menunjukkan kontribusi terhadap pertumbuhan, efektivitas dan keberlanjutan belanja tersebut masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Khususnya, perlu ditinjau apakah alokasi dan realisasi anggaran sudah cukup optimal untuk mendorong sektor-sektor produktif secara merata, serta memastikan kesinambungan proyek agar dapat memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-28 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 (Dalam Milyar Rupiah)



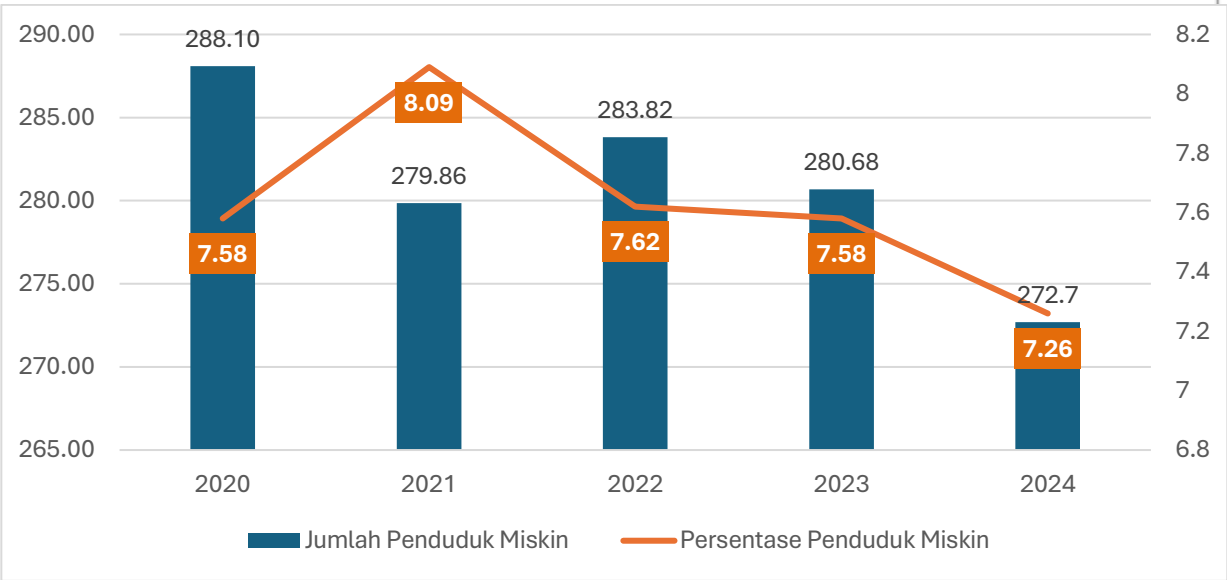
Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir (2020-2024), maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2024 kontribusinya mencapai 33,93 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 4,25 persen. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar kedua, meskipun di tahun 2024 kontribusinya menurun dibanding tahun sebelumnya, dari 15,31 persen menjadi 13,41 persen di tahun 2024. Kontributor terbesar ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mencapai 13,29 persen.

#### 2.2.1.2 **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang mencerminkan ketidakmampuan individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hak dasar lainnya. Tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pendapatan, kemiskinan juga mencerminkan ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta perlakuan yang adil dan bermartabat. Dalam upaya pembangunan, penanganan kemiskinan secara menyeluruh menjadi langkah strategis yang dapat mendorong terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan setara bagi seluruh lapisan masyarakat.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi. Peningkatan terjadi terutama pada tahun 2021 akibat pandemi *Covid-19* yang menyebabkan banyak aktivitas perekonomian mengalami stagnasi dan berdampak pada meningkatnya persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2022 mulai terjadi penurunan persentase penduduk miskin seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid-19*, dan di tahun 2023 hingga 2024 terus mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami sedikit penurunan dari 7,58 persen di tahun 2020 menjadi 7,26 persen di tahun 2024, walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan dari

Rp485.920 per kapita perbulan pada 2020 menjadi Rp658.100 perkapita perbulan pada 2024. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 288,10 ribu orang, mengalami penurunan menjadi 272,70 ribu orang pada tahun 2024.

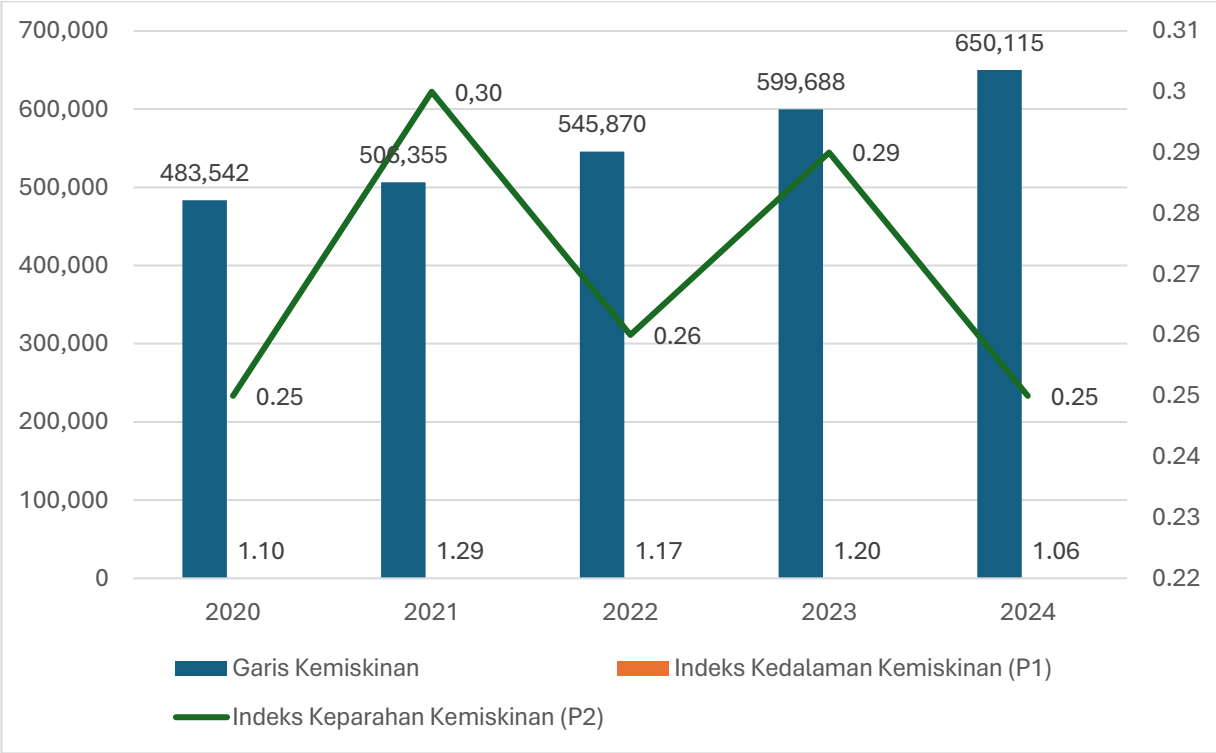


Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-29 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Permasalahan kemiskinan tidak hanya mencakup jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga mencakup dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbecke* (FGT). P1 mengukur rata-rata selisih pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan; semakin mendekati angka nol, semakin kecil kesenjangan pengeluaran tersebut.

Selama periode Maret 2020 hingga 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Jambi menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada Mar 2020, P1 tercatat sebesar 1,10 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19,

terutama akibat terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun sejak tahun 2023 ke 2024, nilai P1 menurun, yang mengindikasikan adanya perbaikan pada daya beli penduduk miskin. Fenomena grafik yang tampak berlawanan pada tahun 2021 dapat dijelaskan melalui dinamika demografis, khususnya peningkatan angka mortalitas dan migrasi. Pandemi *Covid-19* pada tahun tersebut menyebabkan lonjakan kematian, terutama di kelompok usia rentan, yang turut memengaruhi jumlah penduduk miskin secara statistik. Selain itu, terjadi mobilitas penduduk yang cukup besar, baik perpindahan antardaerah karena tekanan ekonomi maupun kembalinya penduduk ke daerah asal. Migrasi ini berpotensi mengubah distribusi geografis dan karakteristik penduduk miskin karena meskipun jumlah penduduk miskin dapat menurun secara absolut akibat faktor mortalitas dan migrasi, kondisi ekonomi dari kelompok miskin yang tersisa justru memburuk, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai persentase penduduk miskin dan P1 pada tahun 2021.

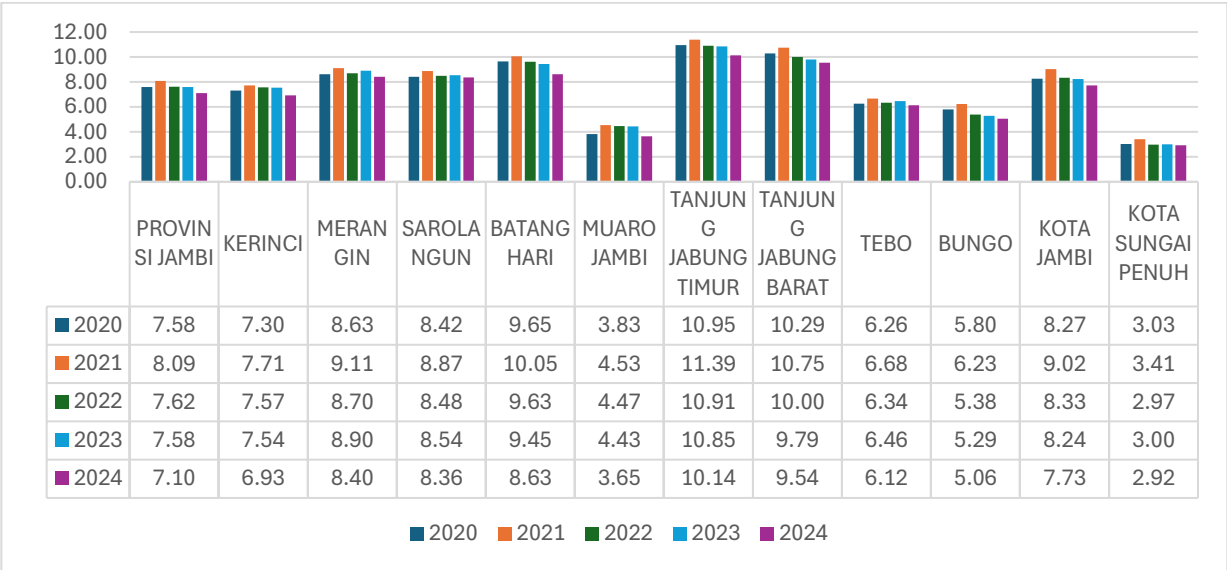


Sumber: BPS Provinsi Jambi, data diolah, 2025  
Gambar 2-30 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Indikator lainnya yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahan Kemiskinan atau

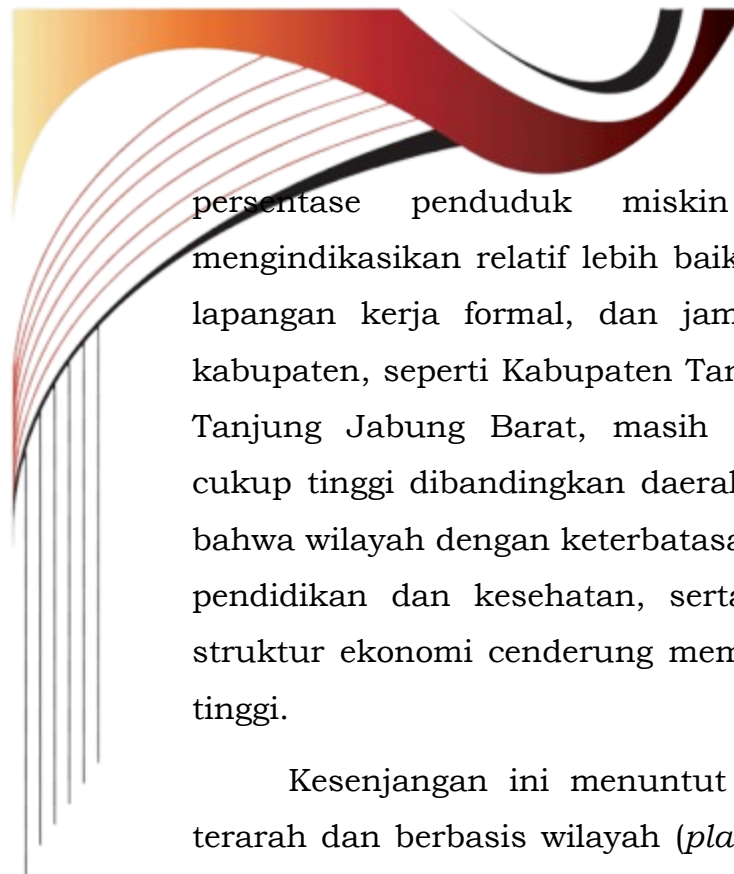


*Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), juga mengalami fluktuasi, namun di tahun 2024 menjadi 0,25. Capaian ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.



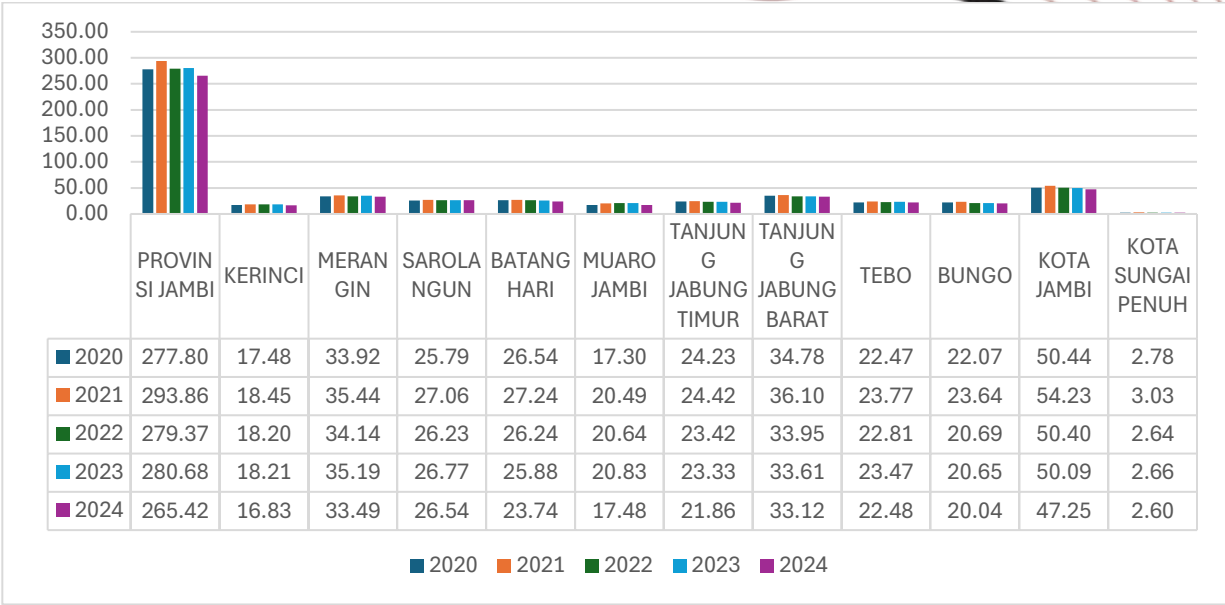
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-31 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (P0) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024  
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-31 atas menunjukkan distribusi persentase penduduk miskin (P0) menurut kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024. Data ini merefleksikan tingkat ketimpangan kesejahteraan antarwilayah yang masih cukup signifikan dan perlu mendapat perhatian dalam perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah. Secara umum, Kota Sungai Penuh mencatat



persentase penduduk miskin terendah di provinsi, yang mengindikasikan relatif lebih baiknya akses terhadap layanan dasar, lapangan kerja formal, dan jaminan sosial. Sebaliknya, beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih mencatat angka kemiskinan yang cukup tinggi dibandingkan daerah lain. Hal ini memperkuat temuan bahwa wilayah dengan keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan, serta dominasi sektor informal dalam struktur ekonomi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Kesenjangan ini menuntut intervensi kebijakan yang bersifat terarah dan berbasis wilayah (*place-based policy*). Pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi lintas sektor, terutama dalam penyediaan layanan dasar yang inklusif dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat miskin yang bersifat kontekstual, pelatihan berbasis potensi lokal, serta perluasan akses terhadap perlindungan sosial yang responsif menjadi langkah penting untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam jangka pendek, penguatan sistem pendataan kemiskinan berbasis desa dan pengawasan pelaksanaan program perlindungan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran. Sementara dalam jangka menengah-panjang, upaya penurunan kemiskinan harus dikaitkan dengan pembangunan ekonomi lokal dan transformasi struktural di sektor pertanian, UMKM, dan industri kecil-menengah yang menjadi tulang punggung ekonomi di wilayah dengan kemiskinan tinggi.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

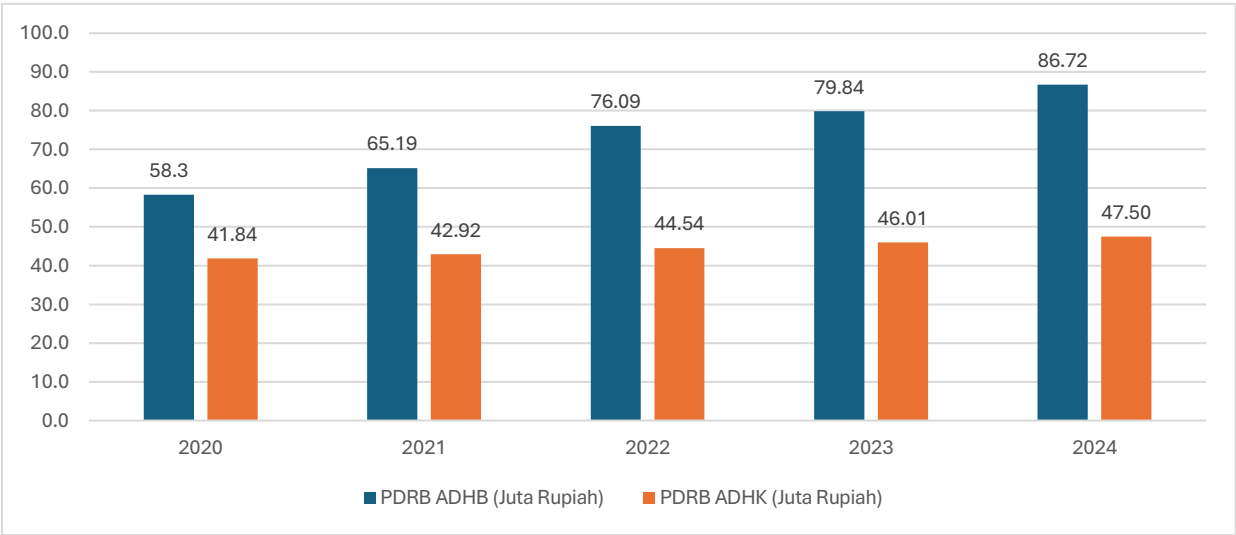
Gambar 2-32 Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kot (Ribu Jiwa) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas menyajikan data jumlah penduduk miskin dalam satuan ribu jiwa berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Informasi ini penting untuk melengkapi analisis kemiskinan, tidak hanya dari sisi persentase (proporsi terhadap total penduduk) tetapi juga dari sisi kuantitas absolut penduduk miskin yang menjadi sasaran utama kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dari gambar terlihat bahwa Kota Jambi dan Kabupaten Merangin mencatat jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jambi, meskipun secara persentase P0 bukan yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah dengan jumlah penduduk besar cenderung menyumbang angka absolut kemiskinan yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan tidak bisa semata didasarkan pada persentase kemiskinan (P0), tetapi juga harus mempertimbangkan jumlah absolut penduduk miskin sebagai dasar prioritas intervensi. Daerah dengan jumlah penduduk miskin tinggi harus mendapat alokasi anggaran yang proporsional dalam program pengentasan kemiskinan, termasuk untuk program perlindungan sosial, bantuan sosial, dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Lebih lanjut, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang sasaran program secara lebih detail, termasuk melalui pemutakhiran data berbasis rumah tangga miskin, agar intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak langsung terhadap

penurunan jumlah penduduk miskin secara signifikan. Upaya peningkatan produktivitas ekonomi rumah tangga miskin di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM harus menjadi prioritas utama, disertai dengan penguatan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Nilai ini mencerminkan rata-rata kontribusi ekonomi yang dihasilkan per individu, sehingga dapat digunakan untuk menilai kemampuan daya beli, kualitas hidup, serta efektivitas pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Peningkatan PDRB per kapita yang berkelanjutan menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Oleh karena itu, strategi peningkatan PDRB per kapita perlu diarahkan pada penguatan sektor-sektor ekonomi produktif, peningkatan nilai tambah lokal, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan tetap memperhatikan pemerataan hasil pembangunan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat.



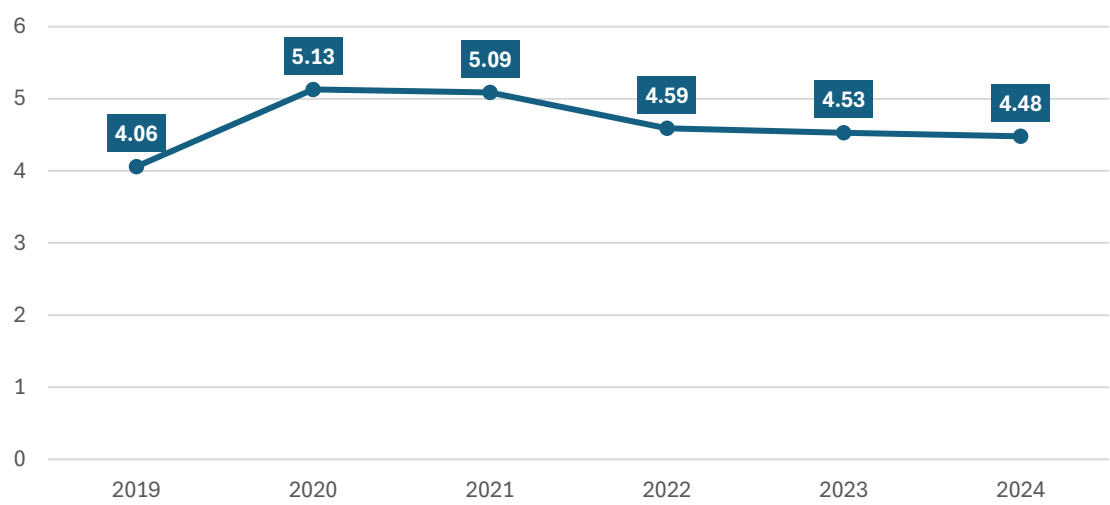
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-33 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2020 -2024 (Dalam Juta Rupiah)

PDRB perkapita Provinsi Jambi ADHK selama periode 2020-2024 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 3,17 persen per tahun. Sedangkan PDRB

perkapita ADHB juga mengalami peningkatan dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun sebesar 9,93 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi meningkat namun masih dikategorikan pendapatan rendah-menengah (*lower-middle income*). Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.2.1.4 **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2024. Pada tahun 2019, TPT tercatat sebesar 4,06 persen. Kemudian pada tahun 2020, TPT meningkat tajam menjadi 5,13 persen. Peningkatan ini erat kaitannya dengan dampak pandemi *Covid-19* yang melanda sejak awal tahun tersebut. Pembatasan aktivitas masyarakat dan melambatnya pertumbuhan ekonomi berpengaruh besar terhadap dinamika ketenagakerjaan di Provinsi Jambi.



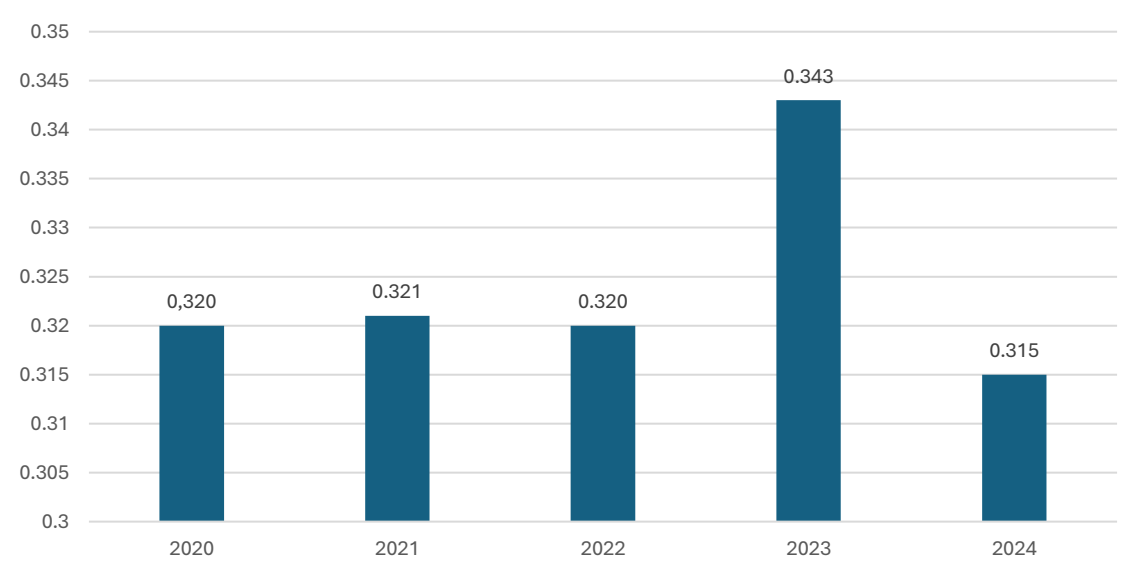
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-34 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jambi Tahun 2019-2024

Meskipun pandemi masih berlangsung, pada tahun 2021 TPT sedikit menurun menjadi 5,09 persen. Penurunan ini menunjukkan adanya upaya pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja meskipun belum sepenuhnya pulih. Tren penurunan berlanjut di tahun 2022, di mana TPT menurun lebih signifikan menjadi 4,59 persen. Hal ini menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan seiring pelonggaran pembatasan dan pemulihan ekonomi yang terus

berjalan. Pada tahun 2023 hingga 2024, angka TPT kembali mengalami penurunan hingga mencapai sebesar 4,48 persen. Penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun pemulihan terus berlanjut, masih dibutuhkan upaya yang lebih intensif untuk menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan merata, terutama di tengah perubahan struktur ekonomi pasca-pandemi.

2.2.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran di suatu wilayah. Semakin mendekati angka 0 (nol), Indeks Gini mencerminkan distribusi pendapatan yang semakin merata, sedangkan angka yang mendekati 1 (satu) menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Oleh karena itu, pemantauan dan pengendalian Indeks Gini menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Upaya penurunan ketimpangan perlu ditempuh melalui perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi, peningkatan kesempatan kerja yang layak, serta penguatan program perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Pendekatan pembangunan yang merata dan partisipatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.



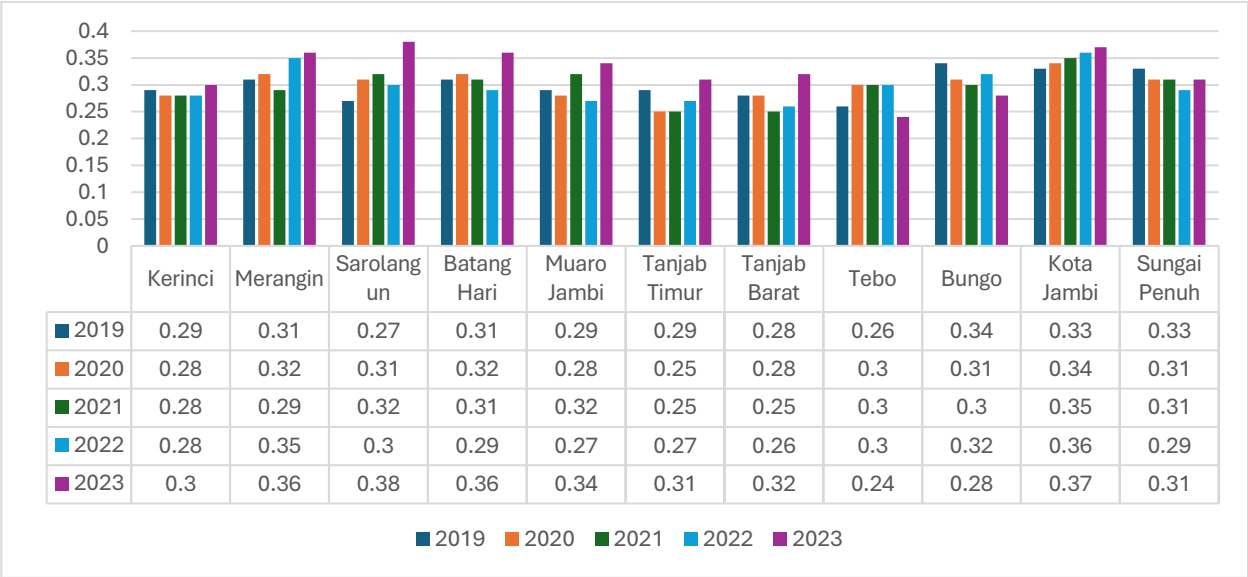
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-35 Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2020-2024



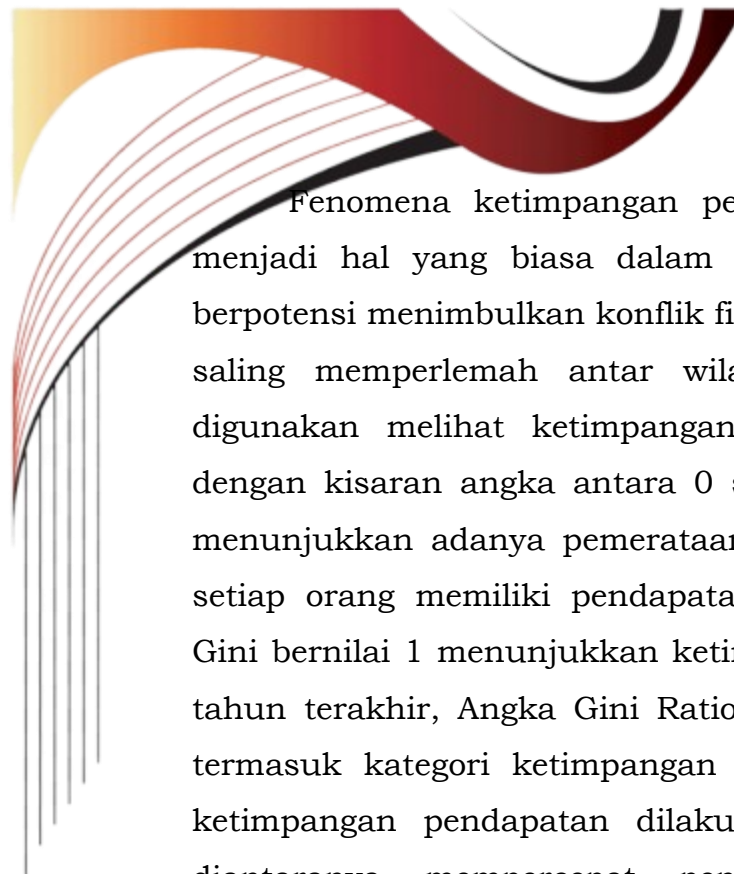
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-35 menampilkan selama tiga tahun pertama (2020–2022), nilai Indeks Gini relatif stabil pada kisaran 0,320, mencerminkan ketimpangan yang cukup moderat. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan menjadi 0,343, yang menandakan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakmerataan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 atau perbedaan akses terhadap peluang ekonomi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi.

Pada tahun 2024, nilai Indeks Gini kembali menurun menjadi 0,315. Penurunan ini patut diapresiasi sebagai indikasi perbaikan dalam distribusi pendapatan yang merupakan hasil dari intervensi pemerintah melalui program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Namun demikian, fluktuasi ini menunjukkan bahwa ketimpangan masih menjadi tantangan struktural yang perlu ditangani secara konsisten. Pemerintah Provinsi Jambi perlu terus memperkuat kebijakan inklusif dan memperluas cakupan program berbasis pemerataan agar tren positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, data diolah, 2025 (data termurakhir)  
Gambar 2-36 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2019-2023



Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah Indeks Gini dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Selama 5 tahun terakhir, Angka Gini Ratio Provinsi Jambi relatif rendah dan termasuk kategori ketimpangan sedang. Upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dilakukan melalui serangkaian strategi, diantaranya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dengan melibatkan beberapa perangkat daerah, terutama melalui program DUMISAKE. Jika dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan indeks yang berfluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit.

#### **2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru**

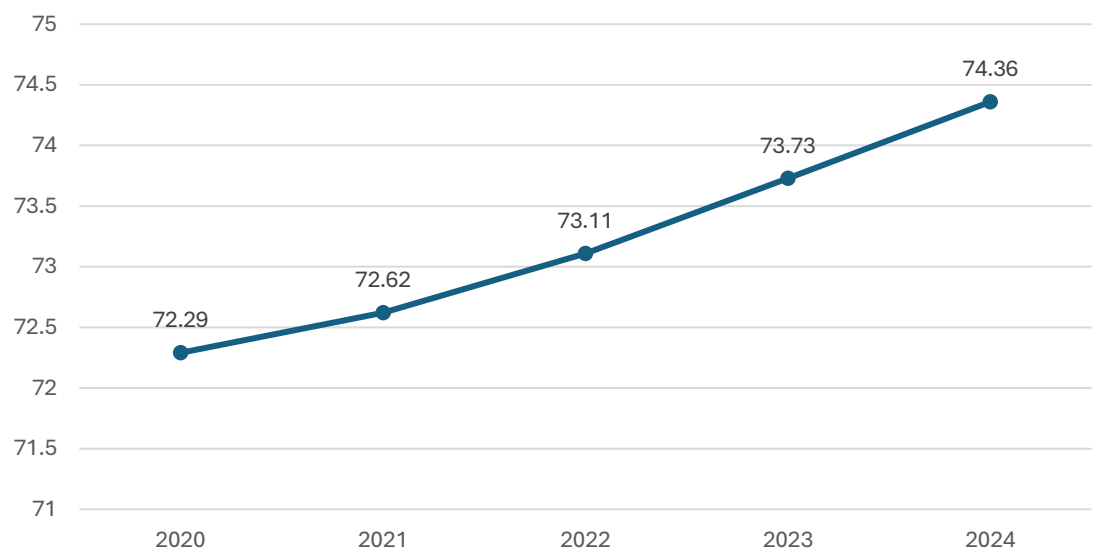
*United Nation Development Programme* (UNDP) menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah:

- 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah;
- 2) Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif):

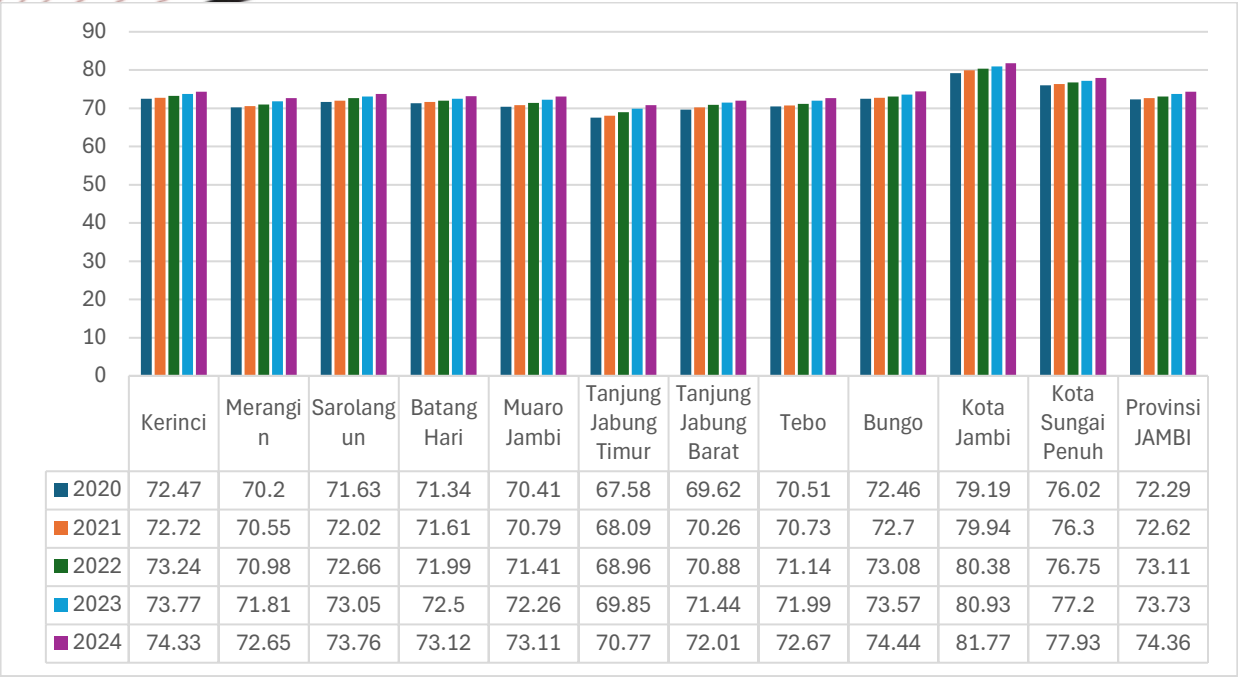
- a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi;
- b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain.

Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-37 IPM Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

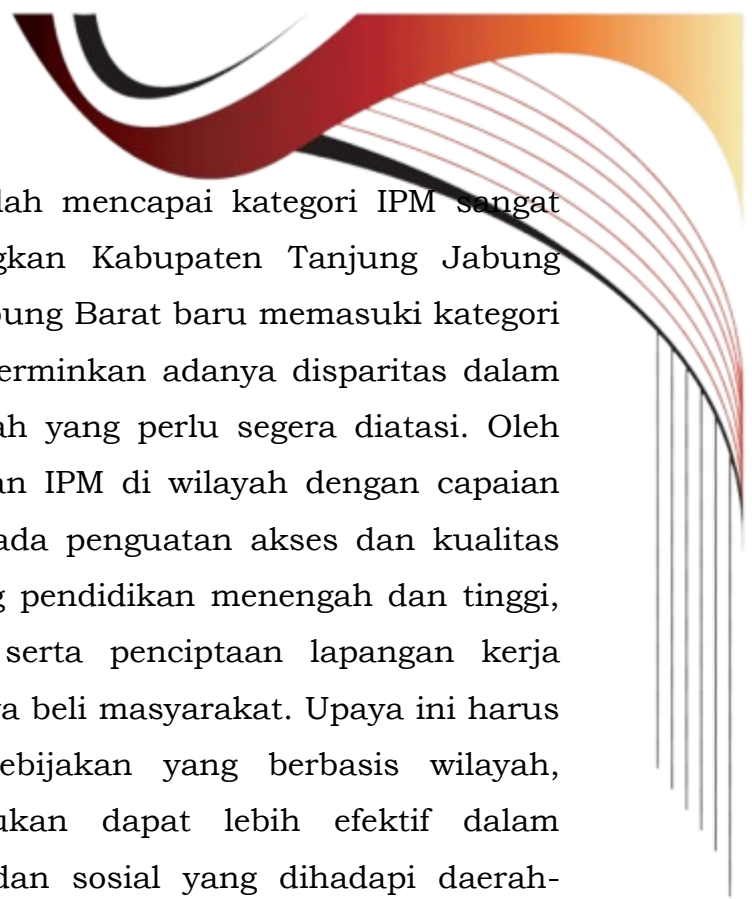
Capaian IPM Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan setiap tahun, bahkan mulai tahun 2018 sudah masuk dalam kategori tinggi. Seluruh komponen menunjukkan tren peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2020 di mana Pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir seluruh komponen tetap menunjukkan perbaikan, kecuali komponen pengeluaran perkapita. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi, sebagai akibat kontraksi perekonomian secara global maupun nasional dan regional. Namun hingga tahun 2024, capaian IPM mengalami peningkatan menjadi 74,36 di tahun 2024 (Hasil Long Form SP 2020).



Sumber: BPS Indonesia, 2025  
Gambar 2-38 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur capaian pembangunan manusia berbasis tiga dimensi dasar: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. IPM dibentuk oleh tiga komponen utama, yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta Pendapatan Per Kapita yang disesuaikan. Selama periode 2020–2024, UHH dan RLS di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil, mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan dasar. Namun demikian, HLS mengalami pertumbuhan yang cenderung lambat, menandakan perlunya percepatan akses pendidikan lanjutan yang merata. Sementara itu, meskipun pendapatan per kapita mengalami pertumbuhan positif, status Provinsi Jambi masih berada pada kategori pendapatan menengah bawah (*lower-middle income*), yang menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan ekonomi memerlukan intervensi kebijakan yang lebih strategis.

Berdasarkan data antarwilayah, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan nilai IPM dari tahun 2020 hingga 2024, dengan tren mendekati kategori IPM tinggi. Namun demikian, ketimpangan capaian antarwilayah masih cukup nyata, di



mana hanya Kota Jambi yang telah mencapai kategori IPM sangat tinggi sejak tahun 2022, sedangkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat baru memasuki kategori IPM tinggi. Ketimpangan ini mencerminkan adanya disparitas dalam kualitas layanan dasar antardaerah yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, percepatan peningkatan IPM di wilayah dengan capaian relatif rendah perlu difokuskan pada penguatan akses dan kualitas layanan dasar, terutama di bidang pendidikan menengah dan tinggi, pemerataan layanan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja produktif untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Upaya ini harus dibarengi dengan pendekatan kebijakan yang berbasis wilayah, sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif dalam mengatasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi daerah-daerah tertinggal.

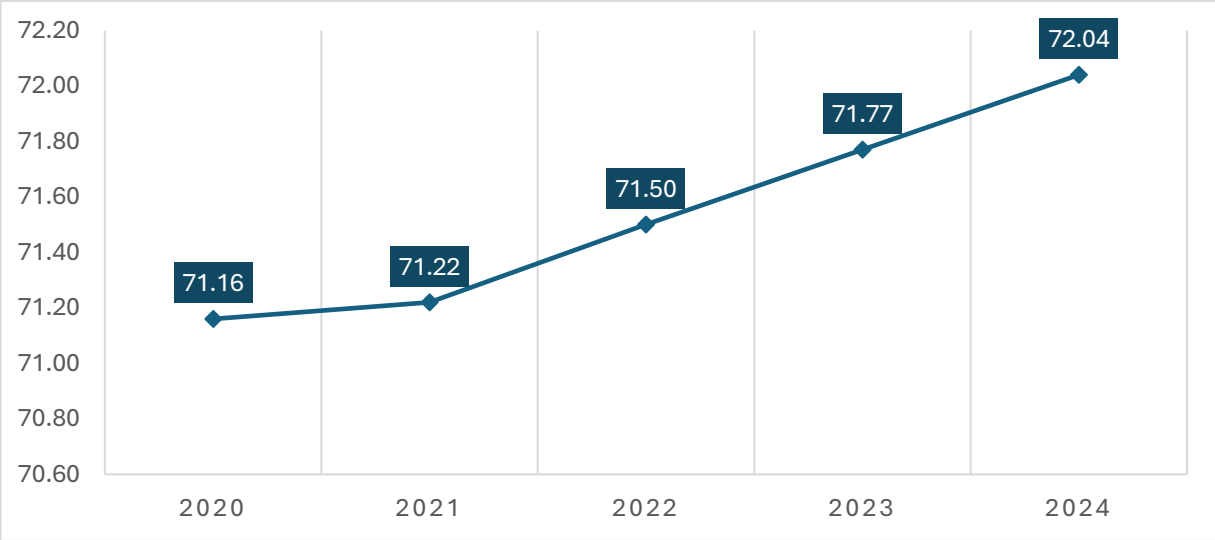
### **2.2.2 Kesehatan untuk Semua**

Kesehatan untuk semua merupakan landasan utama dalam pembangunan manusia yang berkualitas dan produktif. Akses yang merata terhadap layanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berdaya. Oleh karena itu, penguatan sistem pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup peningkatan ketersediaan fasilitas, tenaga medis, serta pembiayaan kesehatan yang berkeadilan. Upaya promotif dan preventif juga harus diutamakan untuk menurunkan beban penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam hal ini, kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

#### **2.2.2.1 Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator demografis yang mencerminkan rata-rata perkiraan umur hidup seseorang sejak lahir, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan, akses terhadap layanan medis, serta kualitas lingkungan hidup. Peningkatan UHH menunjukkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan dan

kesejahteraan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan UHH perlu difokuskan pada penguatan sistem kesehatan masyarakat, perbaikan gizi, peningkatan kesadaran akan pola hidup sehat, serta pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke daerah terpencil. Upaya ini harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan, melibatkan peran aktif pemerintah, tenaga kesehatan, dan partisipasi masyarakat luas untuk menciptakan kondisi hidup yang lebih sehat dan sejahtera bagi seluruh penduduk.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-39 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

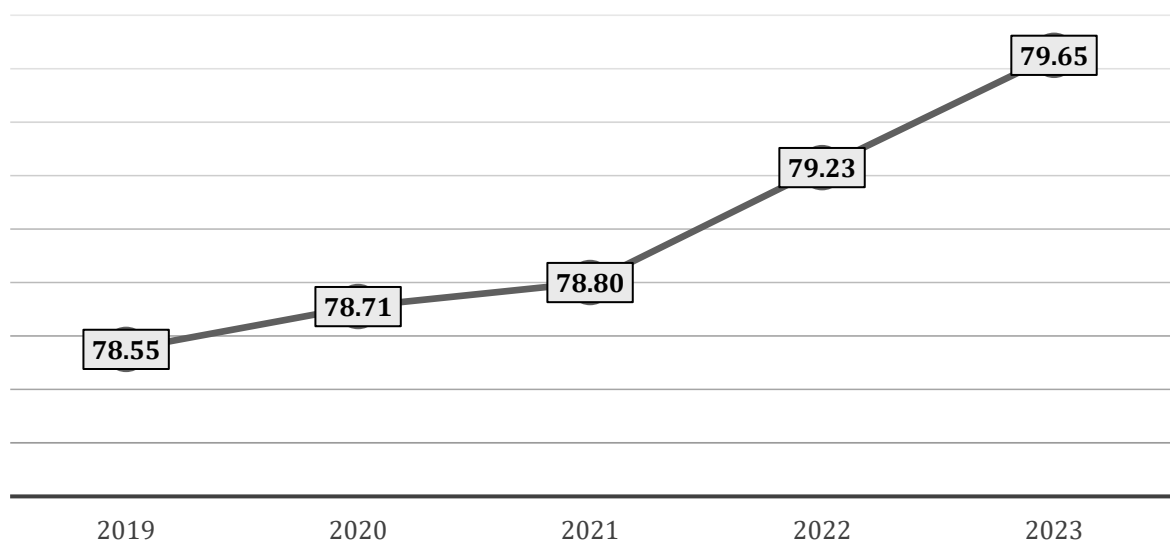
Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, UHH tercatat sebesar 71,16 tahun dan meningkat berturut-turut menjadi 71,22 tahun pada 2021, 71,50 tahun pada 2022, 71,77 tahun pada 2023, dan mencapai 72,04 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan di sektor kesehatan, khususnya dalam perbaikan akses layanan kesehatan, peningkatan status gizi masyarakat, dan efektivitas intervensi program pemerintah. Capaian tersebut sekaligus mengindikasikan ketahanan sistem kesehatan Provinsi Jambi dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19 serta upaya keberlanjutan dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

2.2.2.2 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan di bidang kesehatan suatu daerah atau negara. Indeks



Kesehatan berperan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana masyarakat mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang layak, serta mencerminkan keberhasilan program-program kesehatan pemerintah, seperti pelayanan ibu dan anak, imunisasi, pencegahan penyakit, dan gizi masyarakat. Peningkatan nilai Indeks Kesehatan menunjukkan perbaikan dalam taraf kesehatan penduduk, sedangkan stagnasi atau penurunan bisa menjadi sinyal perlunya intervensi kebijakan kesehatan yang lebih efektif.

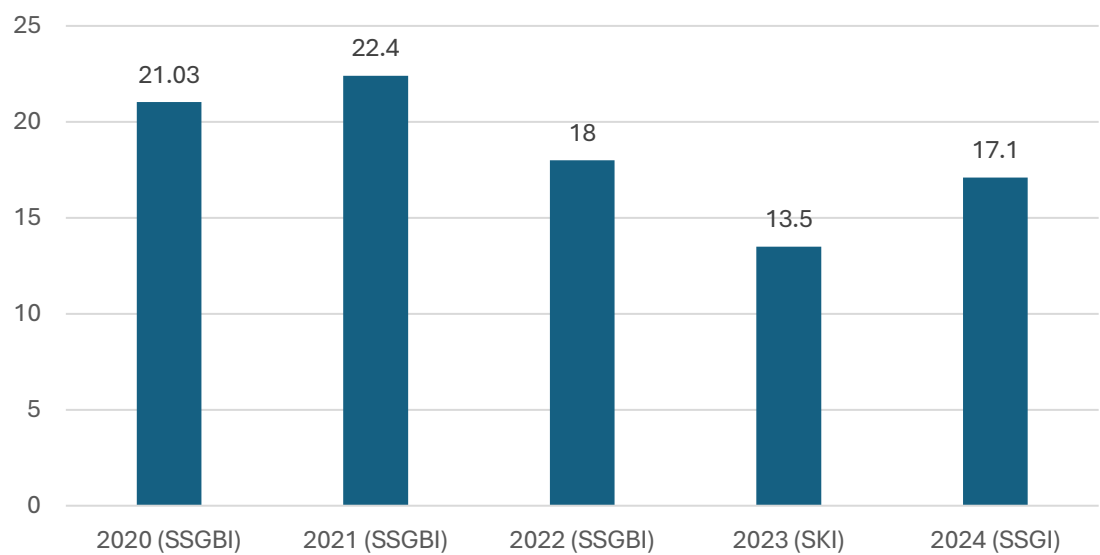


Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir)  
Gambar 2-40 Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Pada Indeks Kesehatan Provinsi Jambi Tahun 2019–2023 terdapat tren peningkatan secara konsisten dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, indeks ini berada pada angka 78,55 dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hingga mencapai 79,65 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek kesehatan masyarakat di Provinsi Jambi baik dari sisi aksesibilitas layanan kesehatan, status gizi, penanganan penyakit menular maupun tidak menular, dan lain-lain. Kenaikan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2021 dan 2022, dari 78,80 menjadi 79,23, yang merupakan hasil dari peningkatan program kesehatan pasca pandemi *Covid-19*, seperti program optimalisasi pelayanan primer, peningkatan cakupan imunisasi, serta promosi kesehatan masyarakat yang lebih masif.

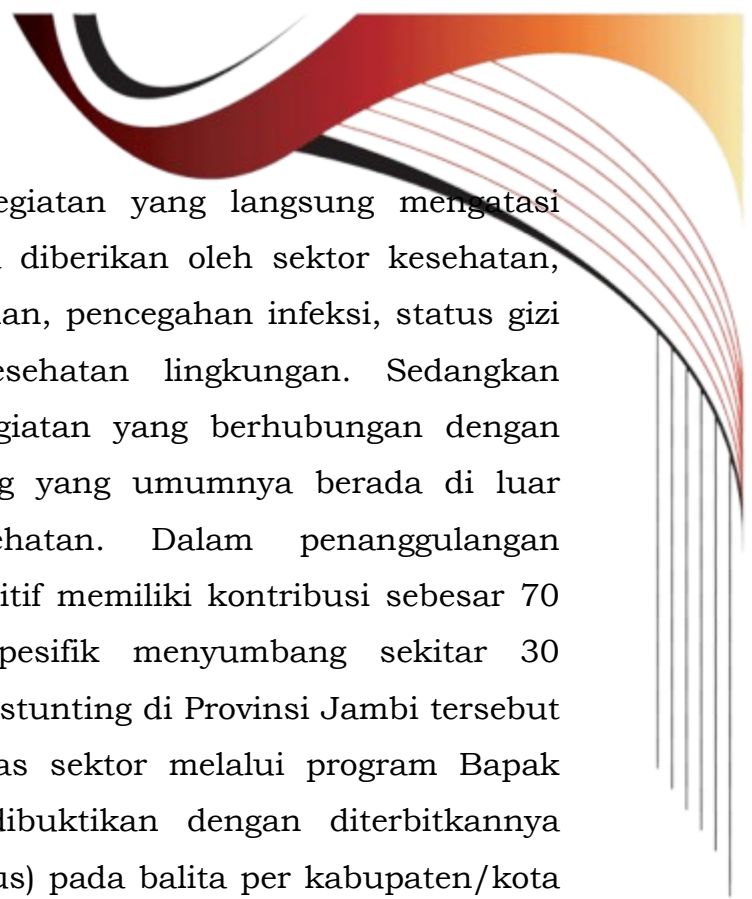
2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat gangguan pertumbuhan kronis pada anak balita akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Stunting tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting memerlukan pendekatan multisektor yang terintegrasi, mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan pola asuh dan konsumsi gizi keluarga, serta penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran aktif masyarakat, sangat diperlukan untuk mempercepat penurunan stunting secara berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024 (data diolah)  
Gambar 2-41 Prevalensi Stunting di Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Prevalensi stunting di Provinsi Jambi setiap tahun mengalami penurunan hingga tahun 2023, di mana pada tahun 2020 berdasarkan data SSGBI, prevalensi stunting di Provinsi Jambi sebesar 21,03 persen, dan pada tahun 2023 telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 13,5 persen (Survei Kesehatan Indonesia, 2024). Upaya penurunan stunting dilakukan melalui dua intervensi gizi yaitu intervensi spesifik dan intervensi sensitif.



Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan, antara lain melalui asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan. Sedangkan intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar kewenangan Kementerian Kesehatan. Dalam penanggulangan permasalahan gizi, intervensi sensitif memiliki kontribusi sebesar 70 persen, sedangkan intervensi spesifik menyumbang sekitar 30 persennya. Percepatan penurunan stunting di Provinsi Jambi tersebut tidak terlepas dari pelibatan lintas sektor melalui program Bapak Asuh Anak Stunting. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya kebijakan Prevalensi Wasting (kurus) pada balita per kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan optimalisasi program tersebut diantaranya melalui SE Gubernur Nomor 1813/SE/BAPPEDA-3/VII/2022 tentang Dukungan Dunia Usaha Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi, Instruksi Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Dukungan Lintas Sektor Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Jambi Melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting, dan SK Gubernur Jambi Nomor 432/KEP.GUB/DISKES-2.1/2023 Tentang Penetapan Bapak Asuh Anak Stunting Pemerintah Provinsi Jambi. Hingga 31 Desember 2023 telah diterima sebanyak 3.759 paket manfaat dalam bentuk makanan tambahan, paket antropometri kit, paket bantuan usaha, bibit, KIE, fasilitasi jamban, dan air bersih dari sebanyak 301 pemberi manfaat yang terdiri dari pemangku kepentingan, dunia usaha, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan individu dengan total nilai rupiah mencapai Rp2.221.337.300,00.

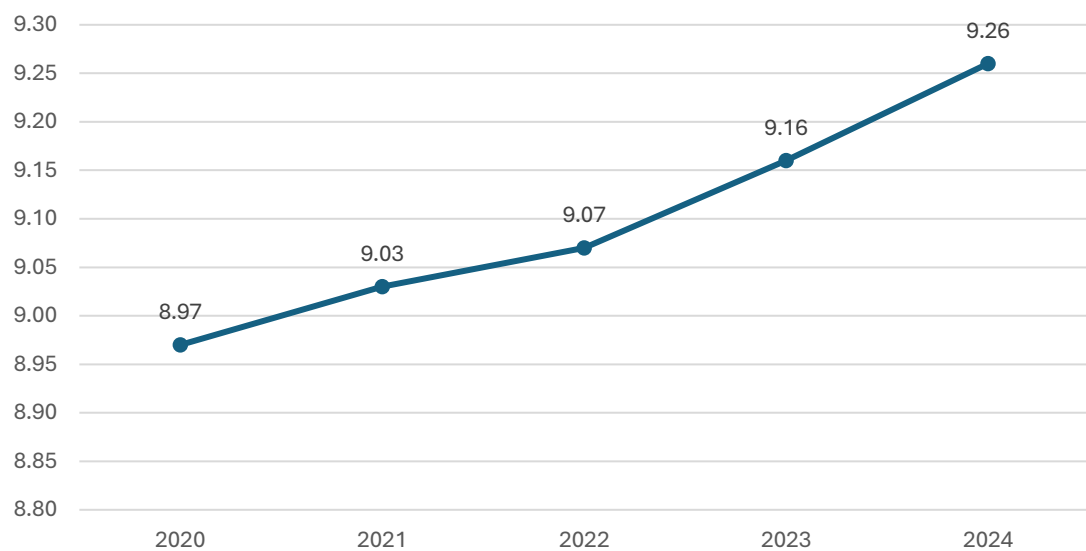
Namun prevalensi stunting ini mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2024 berdasarkan data SSGI, yang menandakan bahwa upaya yang dilakukan saat ini belum cukup untuk terus menurunkan stunting. Perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih inovatif dan tepat sasaran agar prevalensi stunting ini turun terus tanpa lonjakan peningkatan.

### 2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata merupakan kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan adaptif terhadap perubahan. Akses yang setara terhadap layanan pendidikan yang bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi, menjadi landasan dalam menciptakan keadilan sosial dan mobilitas ekonomi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus diarahkan pada penguatan kompetensi guru, pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai, serta penyusunan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, perluasan akses pendidikan bagi kelompok rentan, termasuk masyarakat di daerah tertinggal, juga menjadi prioritas agar kesenjangan pendidikan dapat dikurangi secara signifikan. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data, pembangunan sektor pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi yang cerdas, produktif, dan siap menghadapi tantangan global.

#### 2.2.3.1 Rata-Rata Lama Sekolah

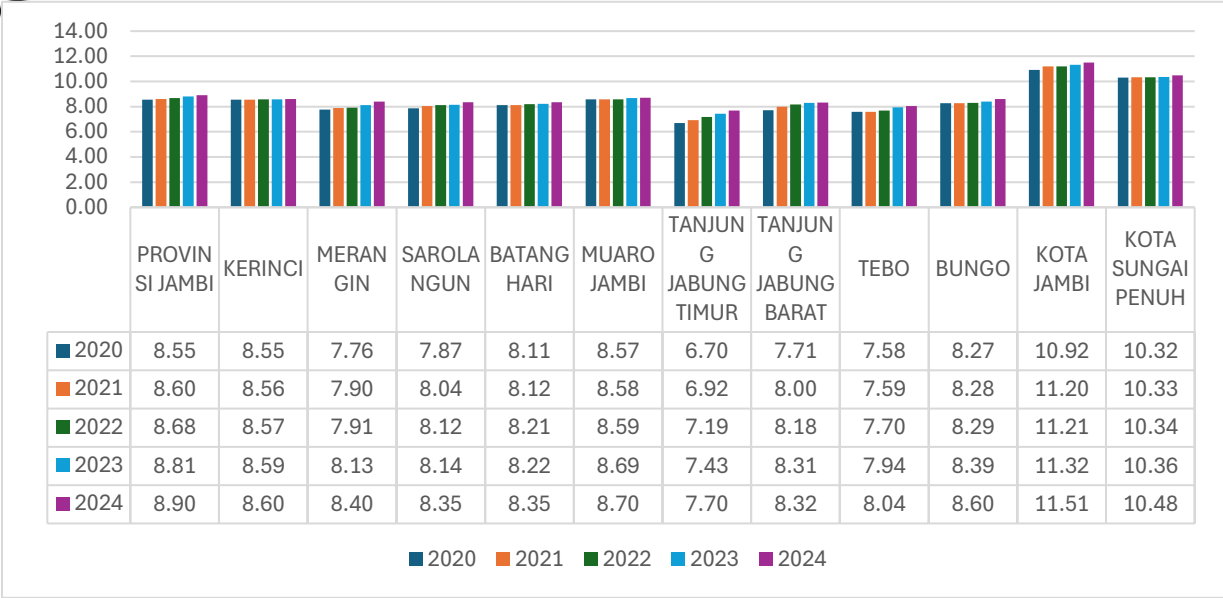
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah indikator yang menunjukkan jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal, baik yang telah diselesaikan maupun yang masih berlangsung. Peningkatan nilai RLS mengindikasikan adanya perbaikan dalam aksesibilitas dan keberlanjutan pendidikan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja dan daya saing daerah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memperluas kesempatan pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses pendidikan.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-42 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, RLS tercatat sebesar 8,97 tahun dan mengalami peningkatan berturut-turut menjadi 9,03 tahun pada 2021, 9,07 tahun pada 2022, 9,16 tahun pada 2023, dan mencapai 9,26 tahun pada 2024. Peningkatan RLS ini kemungkinan didorong oleh beberapa faktor yaitu adanya program pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang dijalankan pemerintah melalui kebijakan Wajib Belajar 12 Tahun serta dukungan Program Indonesia Pintar (PIP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memberikan bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Lalu kemungkinan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai modal sosial dan ekonomi mendorong partisipasi anak-anak untuk melanjutkan sekolah. Meskipun peningkatannya bersifat bertahap, tren positif ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pendidikan serta perluasan layanan pendidikan yang inklusif dan

merata di wilayah Provinsi Jambi.



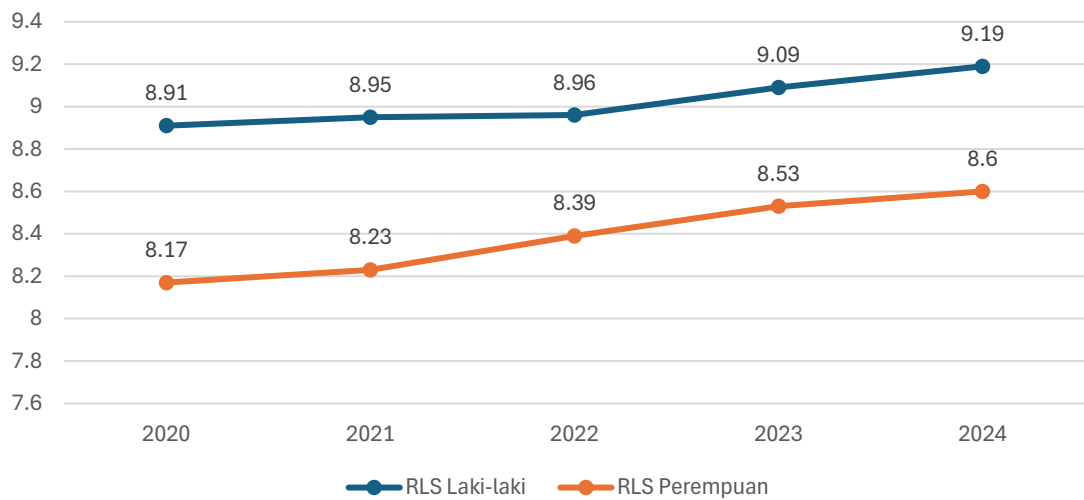
Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-43 Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-43 menggambarkan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024. Secara umum, RLS menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dari 8,97 tahun pada 2020 menjadi 9,26 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan akses terhadap pendidikan formal dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menempuh jenjang pendidikan dasar dan menengah. Kota Jambi secara konsisten mencatat RLS tertinggi, mencerminkan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik di wilayah perkotaan. Sementara itu, beberapa kabupaten seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tebo masih mencatat RLS relatif rendah, yang mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan pendidikan yang lebih terfokus pada wilayah perdesaan dan tertinggal.



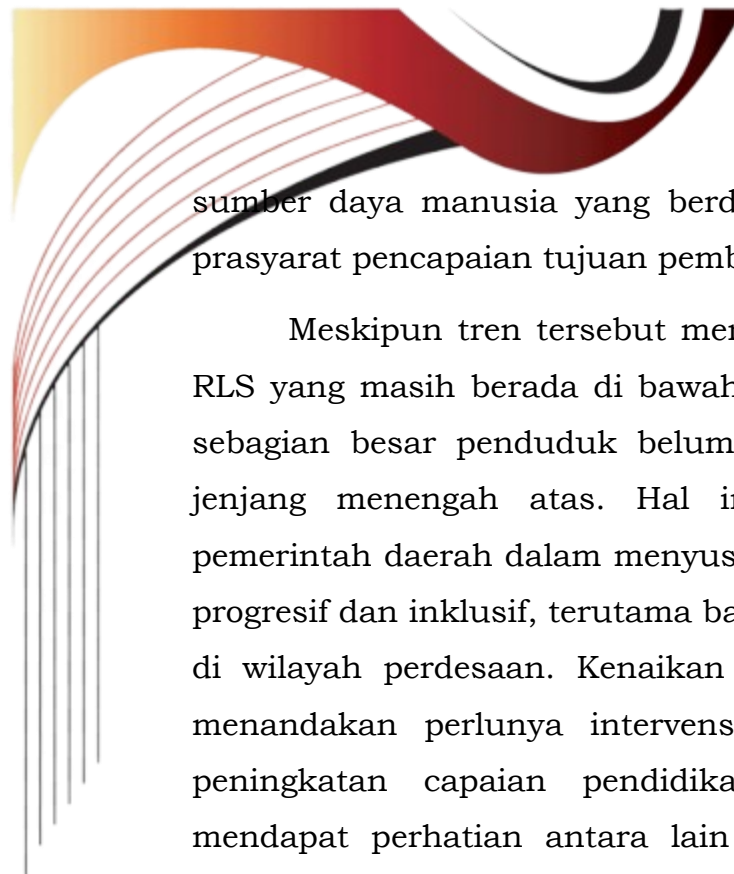


Sumber: BPS Indonesia, 2025

Gambar 2-44 Rata-rata lama sekolah menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Data rata-rata lama sekolah (RLS) menurut jenis kelamin di Provinsi Jambi pada periode 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan pada kelompok laki-laki maupun perempuan. RLS laki-laki meningkat dari 8,91 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,19 tahun pada tahun 2024 atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,28 tahun. Sementara itu, RLS perempuan mengalami peningkatan dari 8,17 tahun pada tahun 2020 menjadi 8,60 tahun pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 0,43 tahun. Meskipun capaian RLS laki-laki secara konsisten masih lebih tinggi dibandingkan perempuan, laju pertumbuhan RLS perempuan relatif lebih cepat, sehingga mencerminkan adanya perbaikan secara gradual dalam mengurangi kesenjangan gender di bidang pendidikan.

Kesenjangan yang masih terjadi disebabkan oleh berbagai faktor struktural maupun kultural, antara lain masih kuatnya norma sosial yang membatasi partisipasi pendidikan perempuan, terutama di wilayah pedesaan, serta kondisi ekonomi keluarga yang berimplikasi pada tingginya risiko putus sekolah bagi anak perempuan. Dengan demikian, meskipun terdapat tren positif, masih diperlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi gender, penguatan program perlindungan sosial bagi keluarga miskin, serta perluasan fasilitas pendidikan di wilayah pedesaan. Pemerintah Provinsi Jambi perlu melakukan berbagai upaya untuk dilakukan guna mendukung peningkatan kualitas



sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkeadilan sebagai prasyarat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

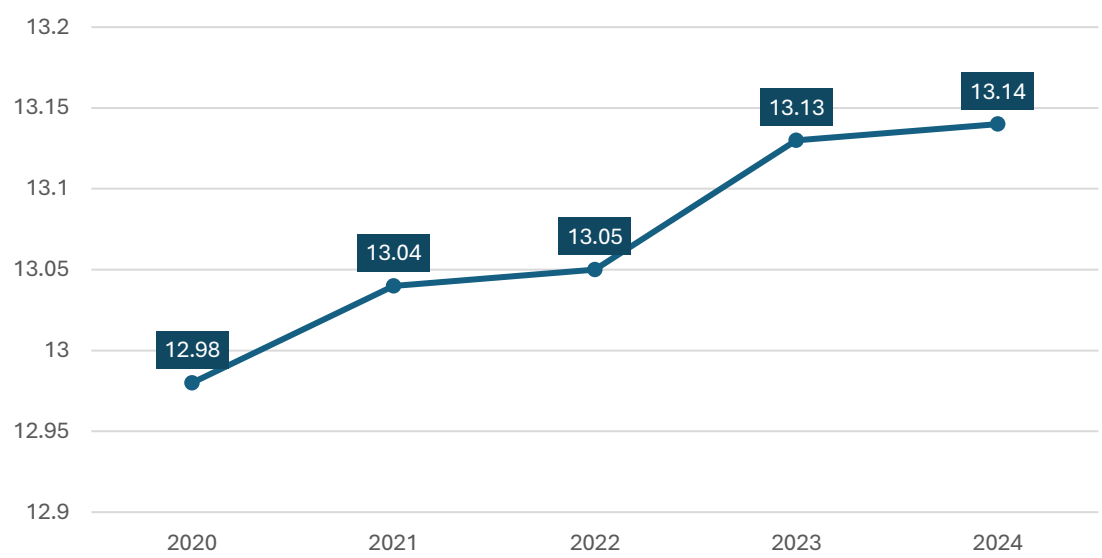
Meskipun tren tersebut menunjukkan arah yang positif, angka RLS yang masih berada di bawah 10 tahun mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah atas. Hal ini menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih progresif dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat di wilayah perdesaan. Kenaikan RLS yang cenderung lambat juga menandakan perlunya intervensi lebih kuat untuk mempercepat peningkatan capaian pendidikan. Beberapa faktor yang perlu mendapat perhatian antara lain ketersediaan dan kualitas tenaga pendidik, aksesibilitas sarana pendidikan di daerah terpencil, serta hambatan sosial-ekonomi yang menyebabkan anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Dalam konteks pembangunan manusia, peningkatan RLS berperan penting dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. Oleh karena itu, strategi kebijakan ke depan perlu diarahkan pada penguatan program wajib belajar 12 tahun, penyediaan beasiswa atau bantuan pendidikan untuk keluarga miskin, serta pengembangan pendidikan nonformal dan vokasional sebagai alternatif peningkatan keterampilan remaja yang tidak lagi bersekolah. Dengan upaya yang lebih terfokus dan berbasis data spasial, diharapkan peningkatan RLS di Provinsi Jambi tidak hanya terus berlanjut, tetapi juga lebih merata di seluruh kabupaten/kota sehingga kesenjangan pendidikan antardaerah dapat ditekan.

#### **2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah**

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah indikator yang menunjukkan perkiraan lama waktu (dalam tahun) yang akan ditempuh oleh anak usia sekolah dalam mengikuti pendidikan formal. Indikator ini memberikan gambaran mengenai potensi aksesibilitas dan kontinuitas pendidikan dalam jangka panjang serta mencerminkan sejauh mana sistem pendidikan mampu menjangkau seluruh kelompok usia sekolah. Oleh karena itu, peningkatan nilai HLS perlu didukung melalui kebijakan yang menjamin ketersediaan

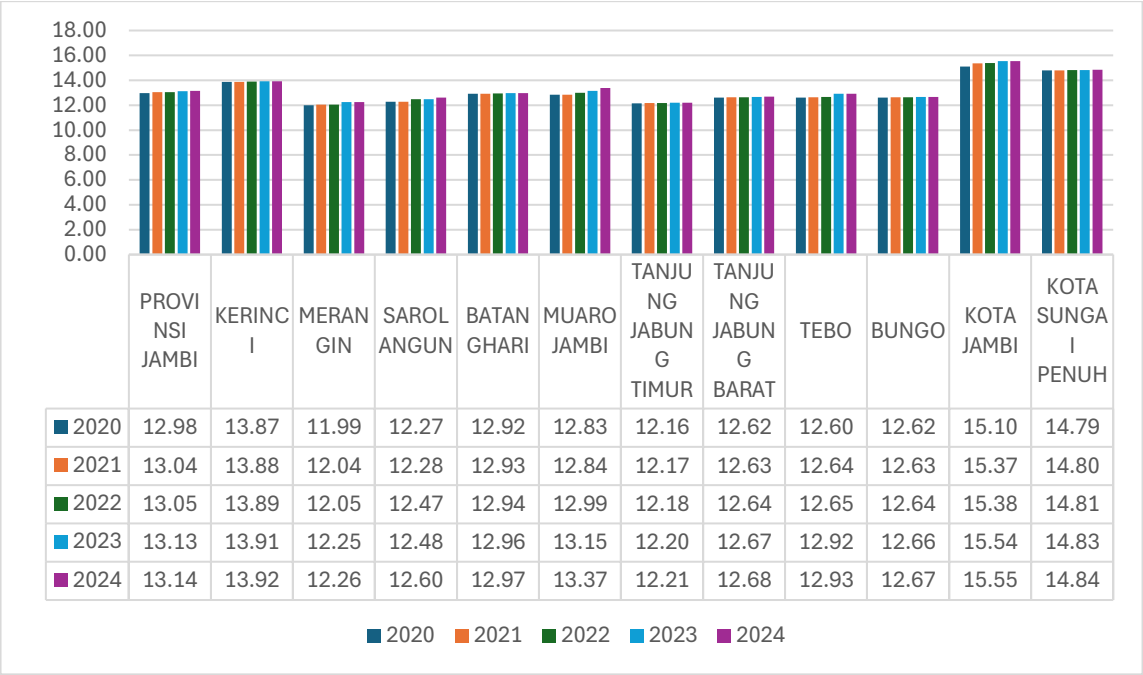
layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah, termasuk di daerah tertinggal dan terpencil.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-45 Harapan Lama Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Dalam lima tahun terakhir, Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang terus berlangsung, meskipun kenaikannya masih tergolong lambat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, HLS tercatat sebesar 12,98 tahun, lalu meningkat menjadi 13,04 tahun pada 2021. Angka ini naik sedikit menjadi 13,05 tahun pada 2022, kemudian mengalami peningkatan lebih nyata menjadi 13,13 tahun pada 2023, dan mencapai 13,14 tahun pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses dan kesempatan masyarakat untuk menempuh pendidikan formal di Provinsi Jambi terus membaik. Masyarakat semakin berpeluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga tingkat menengah atas, bahkan sebagian hingga perguruan tinggi. Namun demikian, mengingat pertumbuhannya masih cukup lambat, diperlukan langkah nyata dari pemerintah daerah untuk mempercepat peningkatan HLS. Upaya yang dapat dilakukan antara lain memperluas akses pendidikan ke seluruh wilayah, meningkatkan kualitas layanan pendidikan, dan memberikan dukungan bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar mereka dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan

pelaksanaan program yang merata, diharapkan peningkatan HLS di Provinsi Jambi dapat berjalan lebih cepat dan merata pada tahun-tahun mendatang.



Sumber: BPS Indonesia, 2025  
Gambar 2-46 Harapan Lama Sekolah (Tahun) di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi pada periode 2020 hingga 2024. Secara umum, HLS mengalami tren peningkatan di seluruh wilayah, namun terdapat ketimpangan antar daerah yang cukup mencolok. Kota Jambi secara konsisten mencatat HLS tertinggi, mengindikasikan bahwa anak-anak di wilayah ini memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, bahkan hingga perguruan tinggi.

Sebaliknya, beberapa kabupaten seperti Merangin dan Tanjung Jabung Timur mencatatkan HLS yang lebih rendah, mencerminkan keterbatasan akses pendidikan lanjutan di wilayah-wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut intervensi kebijakan yang lebih terfokus untuk memperluas kesempatan pendidikan di daerah dengan capaian HLS rendah, melalui pembangunan sarana pendidikan menengah dan tinggi, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan program beasiswa bagi kelompok rentan.

2.2.3.3      **Tingkat Kegemaran Membaca**

Tingkat kegemaran membaca masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pembangunan sumber daya manusia, khususnya di bidang literasi dan pendidikan nonformal. Peningkatan budaya membaca tidak hanya mencerminkan akses yang lebih baik terhadap informasi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkontribusi terhadap tumbuhnya masyarakat yang kritis, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, penguatan minat baca menjadi bagian strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah, khususnya dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) dan memperkuat daya saing Provinsi Jambi. Hasil capaian tingkat kegemaran membaca ini sebagai cerminan angka literasi/numerasi di Provinsi Jambi yang terdapat pada juga penting sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih terarah dan responsif dalam pengembangan literasi masyarakat ke depan.

**Tabel 2-14 Tingkat Kegemaran Membaca Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2024**

| Kabupaten / Kota     | Kegemaran Membaca |
|----------------------|-------------------|
| Kerinci              | 78,75             |
| Merangin             | 56,96             |
| Sarolangun           | 81,7              |
| Batang Hari          | 65,79             |
| Muaro Jambi          | 60,66             |
| Tanjung Jabung Timur | 68,86             |
| Tanjung Jabung Barat | 71,23             |
| Tebo                 | 57,87             |
| Bungo                | 61,28             |
| Kota Jambi           | 77,85             |
| Kota Sungai Penuh    | 61,07             |
| <b>Jambi</b>         | <b>68,05</b>      |

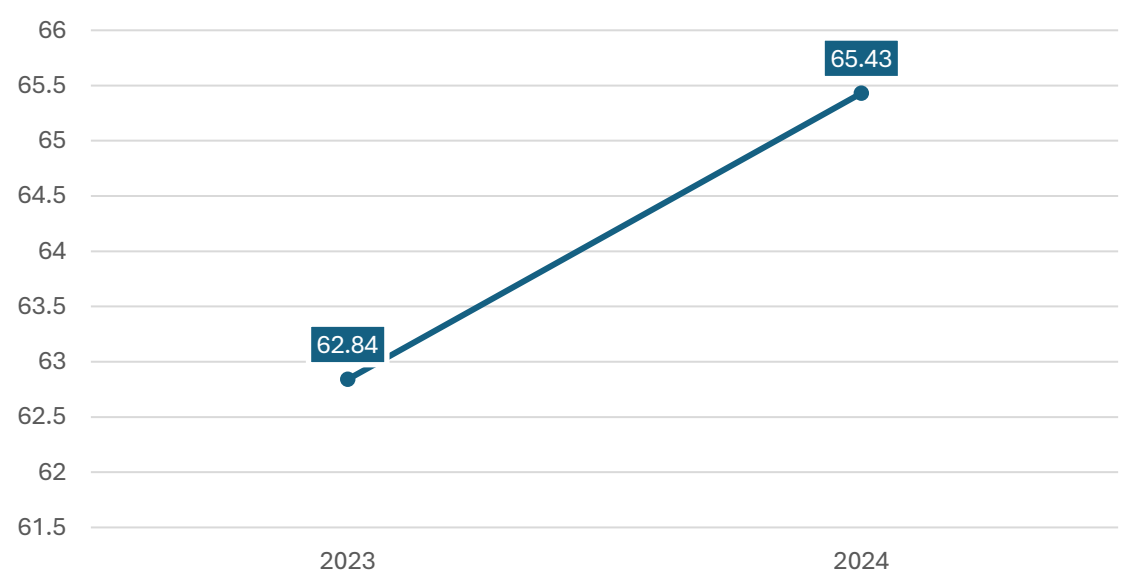
*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, 2025*

Tingkat Kegemaran Membaca di Provinsi Jambi menunjukkan variasi yang cukup beragam antar kabupaten/kota. Daerah dengan

tingkat kegemaran membaca tertinggi adalah Kabupaten Sarolangun sebesar 81,7, diikuti oleh Kabupaten Kerinci sebesar 78,75, dan Kota Jambi sebesar 77,85. Sementara itu, daerah dengan tingkat kegemaran membaca terendah adalah Kabupaten Merangin dan Tebo, masing-masing sebesar 56,96 dan 57,87. Rata-rata tingkat kegemaran membaca di Provinsi Jambi berada pada angka 68,05. Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian wilayah telah menunjukkan minat baca yang tinggi, masih terdapat kabupaten yang perlu didorong untuk meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat.

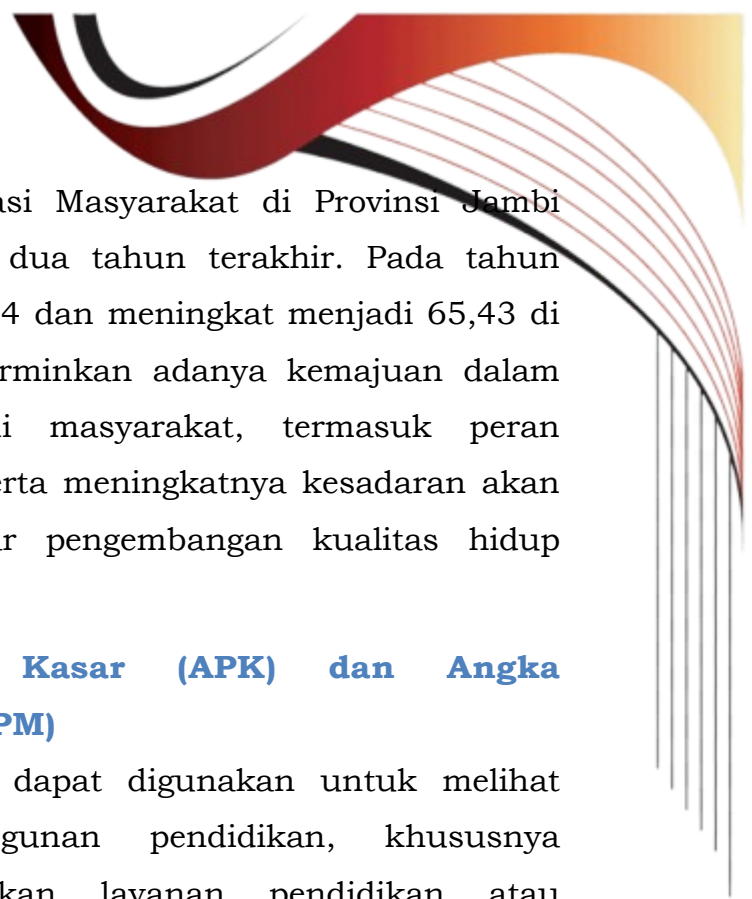
2.2.3.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Salah satu indikator yang penting dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas adalah angka literasi Masyarakat. Indikator ini menggambarkan kemampuan dasar penduduk dalam membaca dan menulis, yang menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemampuan literasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi, memahami hak dan kewajibannya, serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan tingkat literasi perlu didukung melalui penguatan ekosistem literasi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan perpustakaan, peningkatan kualitas bahan bacaan, serta pelibatan aktif keluarga dan komunitas dalam budaya membaca.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-47 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat





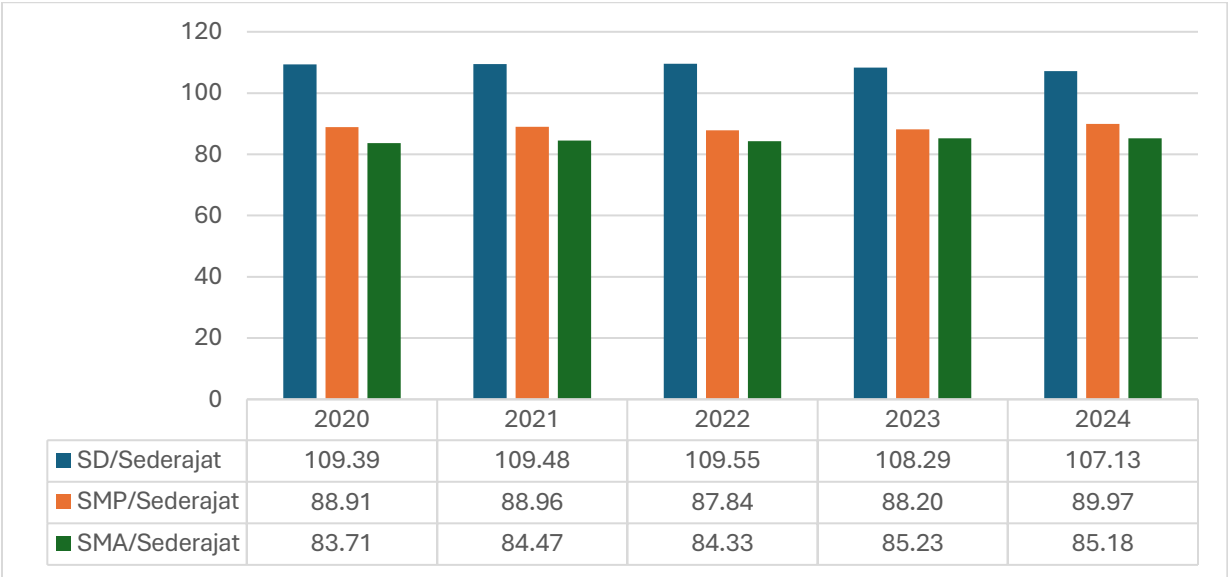
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Jambi menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, indeks tercatat sebesar 62,84 dan meningkat menjadi 65,43 di tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan aktivitas literasi di masyarakat, termasuk peran perpustakaan, komunitas baca, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi sebagai dasar pengembangan kualitas hidup masyarakat.

#### **2.2.3.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)**

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/ sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

Pada tahun 2024, APK pada tingkat SD mencapai 107,13, atau mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 108,29. Hal ini berarti terdapat 107,13 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan APK pada kelompok

usia lain. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020, APK SMP sederajat mencapai sebesar 88,91 persen dan terus meningkat menjadi 89,97 persen pada tahun 2024. Sementara, APK SMA Provinsi Jambi mengalami peningkatan pada periode tahun 2020-2024, di mana pada tahun 2020, APK SMA sebesar 83,71 persen, meningkat menjadi 85,18 persen pada tahun 2024.

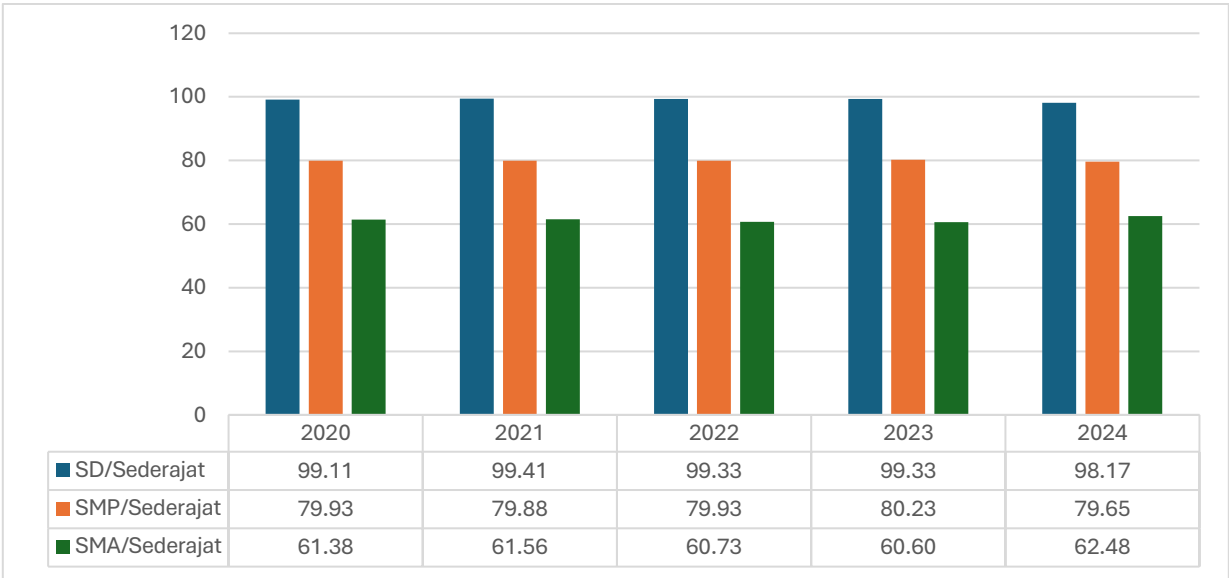


Sumber: BPS, Tahun 2025  
Gambar 2-48 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk, khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100

atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

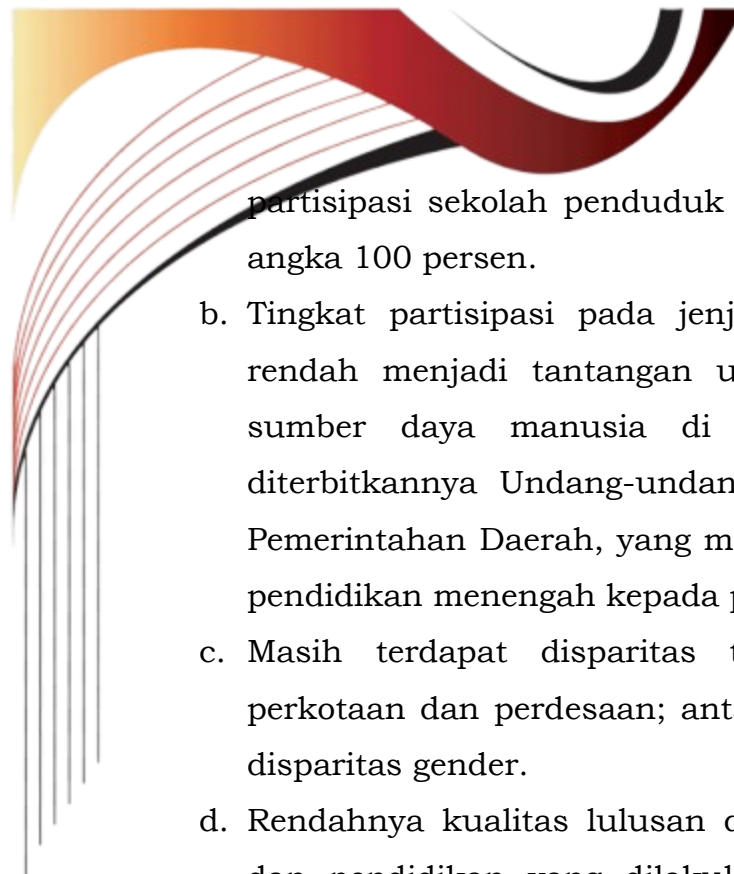
Untuk Angka Partisipasi Murni SD terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun, yaitu dari 99,11 persen pada tahun 2020 menjadi 98,17 persen pada tahun 2024. Demikian juga APM SMP yang mengalami penurunan dari 79,93 persen di tahun 2020 menjadi 79,65 persen di tahun 2024. Namun untuk APM SMA, pada tahun 2020-2024 justru mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2020, APM SMA sebesar 61,38 persen, meningkat menjadi 62,48 persen pada tahun 2024. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.



Sumber: BPS Indonesia, 2025  
Gambar 2-49 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Meskipun Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni sudah cukup baik, namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan antara lain:

- a. Program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2022 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka

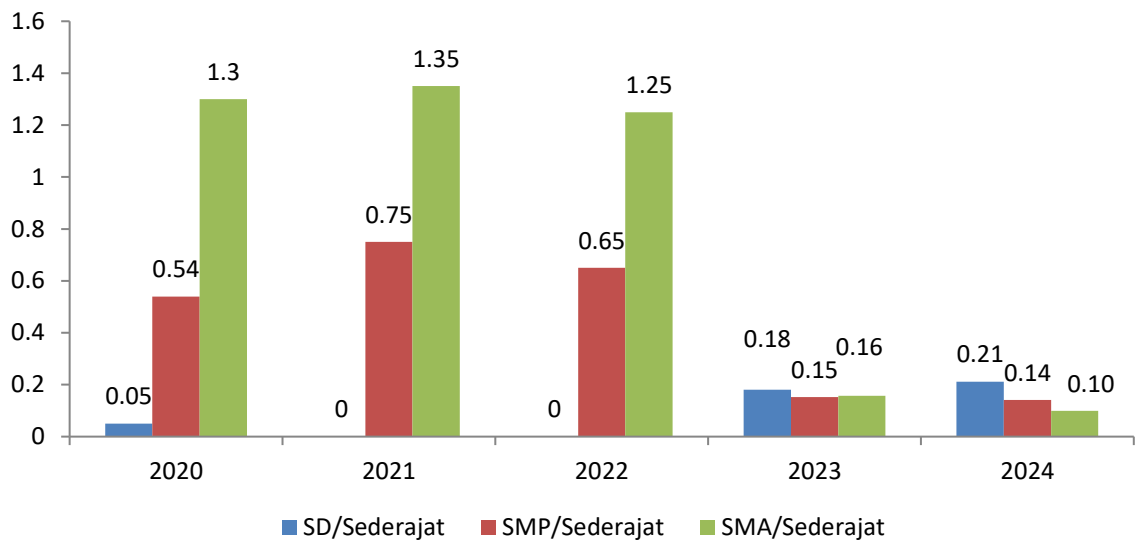


partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen.

- b. Tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan SLTA yang relatif rendah menjadi tantangan utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi, terutama sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah kepada pemerintah provinsi.
- c. Masih terdapat disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender.
- d. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komparatif daerah.

#### **2.2.3.6 Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan antara jumlah siswa yang putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sama pada tahun ajaran sebelumnya, yang dinyatakan dalam persentase. Perkembangan Angka Putus Sekolah di Provinsi Jambi pada periode 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif, namun secara umum cenderung menurun. Meski demikian, tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani secara menyeluruh.

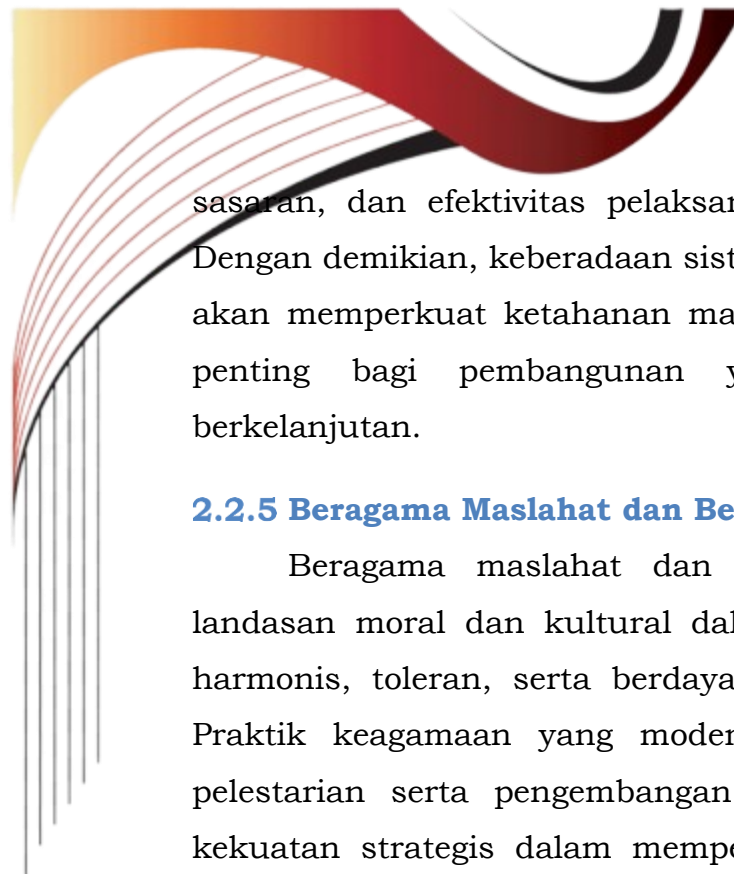


Sumber: Kemendikdasmen, 2025  
 Gambar 2-50 Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas menunjukkan pola bahwa sampai dengan tahun 2022 semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Namun hal berbeda terjadi pada tahun-tahun setelahnya, dimana terjadi sebaliknya. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah cukup baik. Namun ke depan, juga diperlukan upaya-upaya inovatif terutama dalam menghadapi kondisi pasca pandemi *Covid-19*, serta menghadapi era Revolusi 4.0.

### 2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif merupakan instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan, terhadap berbagai guncangan sosial, ekonomi, maupun bencana alam. Dalam menghadapi dinamika risiko yang semakin kompleks, seperti dampak perubahan iklim, disrupsi ekonomi, dan ketidakpastian global, dibutuhkan sistem perlindungan sosial yang responsif, fleksibel, dan tanggap terhadap perubahan. Oleh karena itu, penguatan sistem ini perlu diarahkan pada integrasi yang menyeluruh antara program bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan ekonomi, dengan dukungan pendekatan berbasis data dan pemanfaatan teknologi digital. Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah daerah serta kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci untuk menjamin cakupan yang luas, ketepatan



sasaran, dan efektivitas pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan demikian, keberadaan sistem perlindungan sosial yang adaptif akan memperkuat ketahanan masyarakat sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

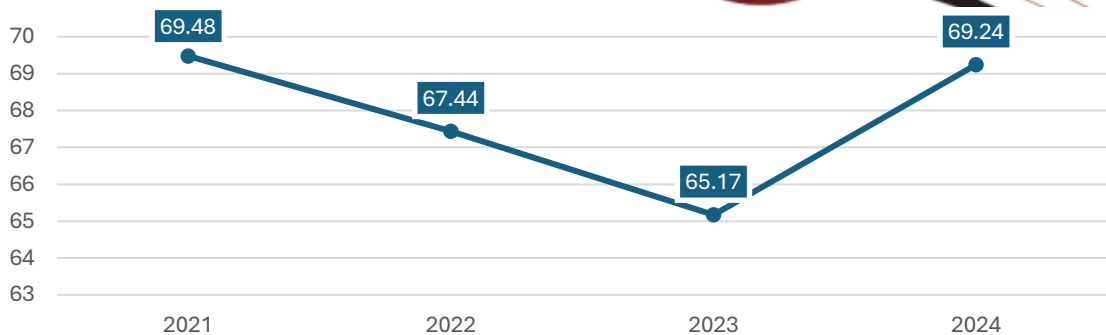
#### **2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

Beragama maslahat dan berkebudayaan maju merupakan landasan moral dan kultural dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis, toleran, serta berdaya saing di tengah dinamika global. Praktik keagamaan yang moderat dan inklusif, berpadu dengan pelestarian serta pengembangan nilai-nilai budaya lokal, menjadi kekuatan strategis dalam memperkuat identitas nasional sekaligus membangun kohesi sosial. Di sisi lain, pengembangan kebudayaan harus mendorong pelestarian warisan budaya, inovasi seni dan tradisi lokal, serta peningkatan kontribusi sektor budaya terhadap perekonomian. Sinergi kebijakan di bidang agama dan kebudayaan secara berkelanjutan akan menciptakan tatanan masyarakat yang damai, berkarakter, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

##### **2.2.5.1 Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) mencerminkan tingkat harmoni, toleransi, dan kerja sama antarumat beragama di suatu wilayah. Peningkatan IKUB di Provinsi Jambi perlu terus didorong melalui dialog antaragama, pendidikan nilai toleransi sejak dini, serta dukungan terhadap kegiatan yang mempererat hubungan antar komunitas keagamaan. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, damai, dan saling menghargai perbedaan.





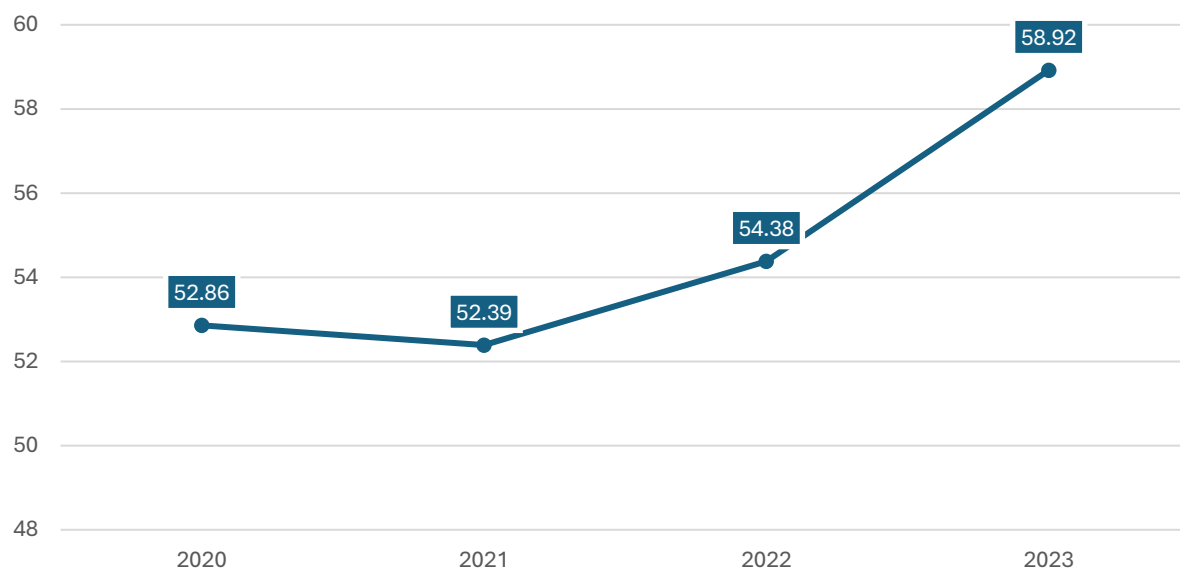
Sumber: Kementerian Agama, 2025

Gambar 2-51 Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) di Provinsi Jambi menunjukkan tren fluktuatif, dari 69,48 pada tahun 2021 menjadi 67,44 di 2022 dan terus turun menjadi 65,17 pada tahun 2023. Penurunan ini dipengaruhi oleh meningkatnya persepsi masyarakat terhadap politisasi agama dan rendahnya tingkat toleransi, yang berdampak negatif pada kerukunan antarumat beragama. Namun, pada tahun 2024, IKUB Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 69,24. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan, kemungkinan berkat upaya pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mendorong dialog lintas agama, pendidikan toleransi, serta kerja sama antarumat.

#### 2.2.5.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan kebudayaan berperan penting dalam memperkuat jati diri, membangun karakter, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) mencerminkan sejauh mana nilai-nilai budaya tumbuh dan terjaga dalam kehidupan masyarakat. Peningkatan IPK di Provinsi Jambi perlu didorong melalui pelestarian warisan budaya, penguatan pendidikan berbasis budaya, serta partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan kebudayaan.



Sumber: Portal Satu Data Indonesia, 2025 (data termutakhir)  
Gambar 2-52 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Jambi  
Tahun 2020-2023

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2020, IPK tercatat sebesar 52,86 dan sedikit menurun menjadi 52,39 pada tahun 2021. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pelestarian dan pengembangan budaya, termasuk keterbatasan aktivitas budaya akibat pandemi. Namun, pada tahun 2022, IPK kembali mengalami peningkatan menjadi 54,38, dan melonjak cukup signifikan menjadi 58,92 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya kegiatan kebudayaan serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Peningkatan IPK ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

### 2.2.5.3 Seni Budaya

Sektor seni dan budaya memegang peranan strategis dalam memperkuat identitas daerah, memperkaya kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan seni budaya tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai luhur dan kearifan lokal, tetapi juga sebagai wahana ekspresi kreatif yang dapat meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun global.

Dalam konteks pembangunan daerah, upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya perlu dilakukan secara terpadu melalui kebijakan yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, pelaku seni, serta institusi pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan tersedianya dukungan anggaran, fasilitas, serta ruang kreatif yang memadai guna menjamin kesinambungan ekosistem seni budaya yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Tabel 2-15 Objek Pemajuan Kebudayaan Provinsi Jambi

| No | Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah |
|----|---------------------------|--------|
| 1  | Manuskrip                 | 106    |
| 2  | Tradisi Lisan             | 355    |
| 3  | Adat Istiadat             | 213    |
| 4  | Ritus                     | 208    |
| 5  | Pengetahuan tradisional   | 587    |
| 6  | Teknologi tradisional     | 251    |
| 7  | Seni                      | 607    |
| 8  | Bahasa                    | 80     |
| 9  | Permainan rakyat          | 254    |
| 10 | Olahraga tradisional      | 87     |
| 11 | Cagar budaya              | 389    |

Sumber: PPKD Provinsi Jambi, 2025

Dalam rangka memajukan Objek Pemajuan Kebudayaan, maka Pemerintah Provinsi Jambi terus menggali objek-objek tersebut serta memfasilitasi agar karya seni dan budaya Jambi mendapatkan pengakuan. Hasil penggalian objek-objek pemajuan kebudayaan tersebut tiap kabupaten/kota berbeda-beda jumlahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh faktor sejarah, kebijakan pelestarian yang diterapkan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga warisan budaya mereka. Guna memajukan seni budaya di Provinsi Jambi, maka ke depan program-program terkait internalisasi seni budaya dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada generasi muda

harus dilaksanakan agar budaya khususnya melayu Jambi dapat lestari di Provinsi Jambi.

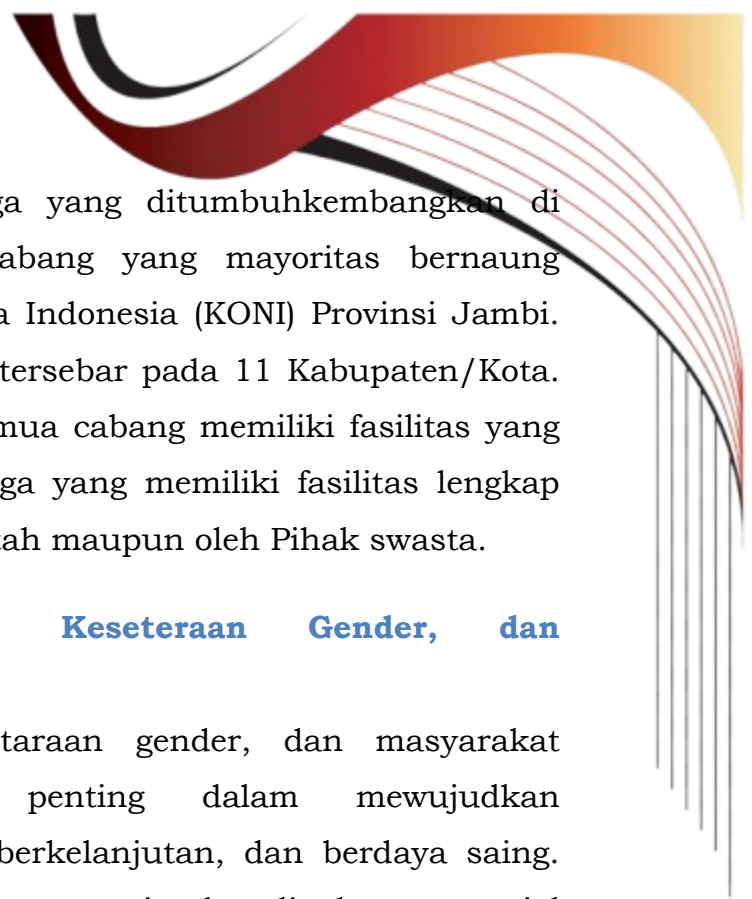
2.2.5.4 Olah Raga

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, olahraga merupakan salah satu faktor penunjang yang perlu mendapat perhatian. Berdasarkan data tahun 2020–2022, fasilitas olahraga di Provinsi Jambi telah tersedia untuk berbagai cabang olahraga, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta. Ketersediaan sarana ini menjadi potensi yang dapat dimaksimalkan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga serta mendukung pembinaan prestasi di tingkat daerah.

Tabel 2-16 Pemilikan Fasilitas Olahraga Menurut Cabang Olahraga di Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

| No | Cabang Olahraga | 2022  |       | 2023* |        | 2024* |        |
|----|-----------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
|    |                 | Pemda | Pemda | Pemda | Swasta | Pemda | Swasta |
| 1  | Sepak Bola      | 19    | 230   | 19    | 230    | 19    | 230    |
| 2  | Tenis           | 17    | 21    | 17    | 21     | 17    | 21     |
| 3  | Bulu Tangkis    | 20    | 250   | 20    | 250    | 20    | 250    |
| 4  | Bola Voli       | 122   | 326   | 122   | 326    | 122   | 326    |
| 5  | Basket          | 11    | 44    | 11    | 44     | 11    | 44     |
| 6  | Tenis Meja      | 15    | 57    | 15    | 57     | 15    | 57     |
| 7  | Pencak Silat    | 10    | 16    | 10    | 16     | 10    | 16     |
| 8  | Lap. Menembak   | -     | 1     | -     | 1      | -     | 1      |
| 9  | Angkat Besi     | 3     | 6     | 3     | 6      | 3     | 6      |
| 10 | Senam           | 1     | -     | 1     | -      | 1     | -      |
| 11 | Kolam Renang    | 3     | 15    | 3     | 15     | 3     | 15     |
| 12 | Taekwondo       | 1     | 3     | 1     | 3      | 1     | 3      |
| 13 | Judo            | 1     | 2     | 1     | 2      | 1     | 2      |
| 14 | Kempo           | 1     | 3     | 1     | 3      | 1     | 3      |
| 15 | Gulat           | 2     | 2     | 2     | 2      | 2     | 2      |
| 16 | Panjat Tebing   | 13    | 1     | 13    | 1      | 13    | 1      |
| 17 | Golf            | 1     | 1     | 1     | 1      | 1     | 1      |
| 18 | GOR             | 15    | 16    | 15    | 16     | 15    | 16     |
| 19 | Dayung          | 8     | 3     | 8     | 3      | 8     | 3      |
| 20 | Tinju           | 1     | 5     | 1     | 5      | 1     | 5      |
| 21 | Sepak Takraw    | 3     | 31    | 3     | 31     | 3     | 31     |
| 22 | Karate          | 3     | 5     | 3     | 5      | 3     | 5      |
| 23 | Catur           | 2     | 3     | 2     | 3      | 2     | 3      |

Sumber: Dispora Provinsi Jambi, 2025



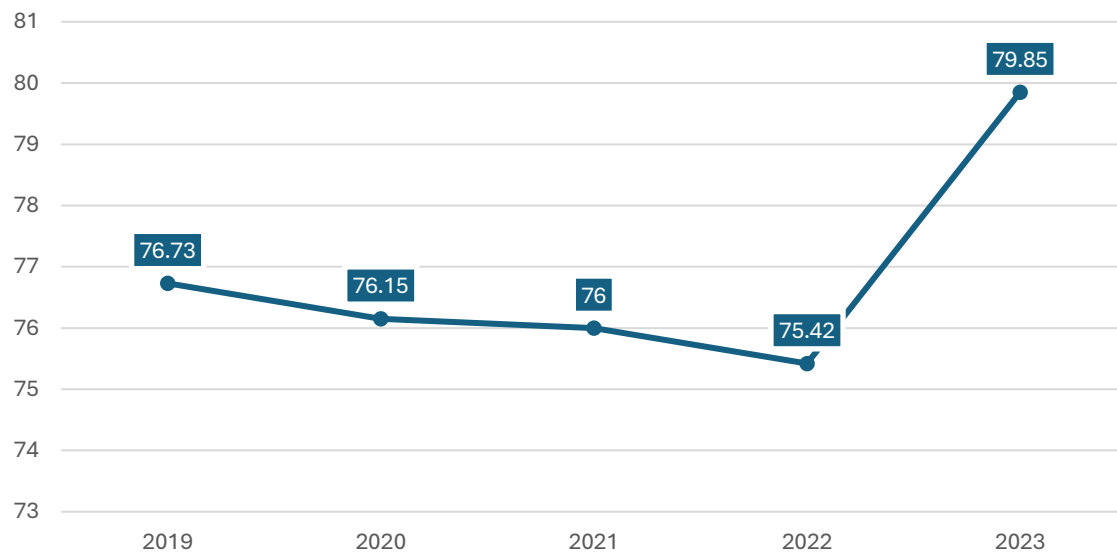
Selama ini cabang olah raga yang ditumbuhkembangkan di Provinsi Jambi berjumlah 44 cabang yang mayoritas bernaung dibawah Komite Nasional Olahraga Indonesia (KONI) Provinsi Jambi. Jumlah cabang olahraga tersebut tersebar pada 11 Kabupaten/Kota. Namun dari segi fasilitas tidak semua cabang memiliki fasilitas yang lengkap. Hanya 23 cabang olahraga yang memiliki fasilitas lengkap baik yang disediakan oleh Pemerintah maupun oleh Pihak swasta.

#### **2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang adil, berkelanjutan, dan berdaya saing. Ketiga aspek ini saling terkait dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung kesejahteraan individu dan komunitas, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat secara menyeluruh. Penguatan institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur sosial, perlu disertai dengan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya, guna memastikan terciptanya ruang yang setara dan inklusif bagi seluruh warga. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas keluarga, pengarusutamaan gender, serta pengembangan masyarakat yang inklusif perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, melalui kebijakan yang responsif, dukungan lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat.

##### **2.2.6.1 Indeks Perlindungan Khusus Anak**

Perlindungan khusus terhadap anak merupakan bagian penting dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Indeks Perlindungan Khusus Anak mencerminkan sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Peningkatan indeks ini menunjukkan efektivitas intervensi kebijakan yang menjamin hak-hak anak serta perlunya penguatan kelembagaan dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan terpenuhinya standar perlindungan anak secara menyeluruh.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir)  
Gambar 2-53 Indeks Perlindungan Khusus Anak Provinsi Jambi  
Tahun 2019-2023

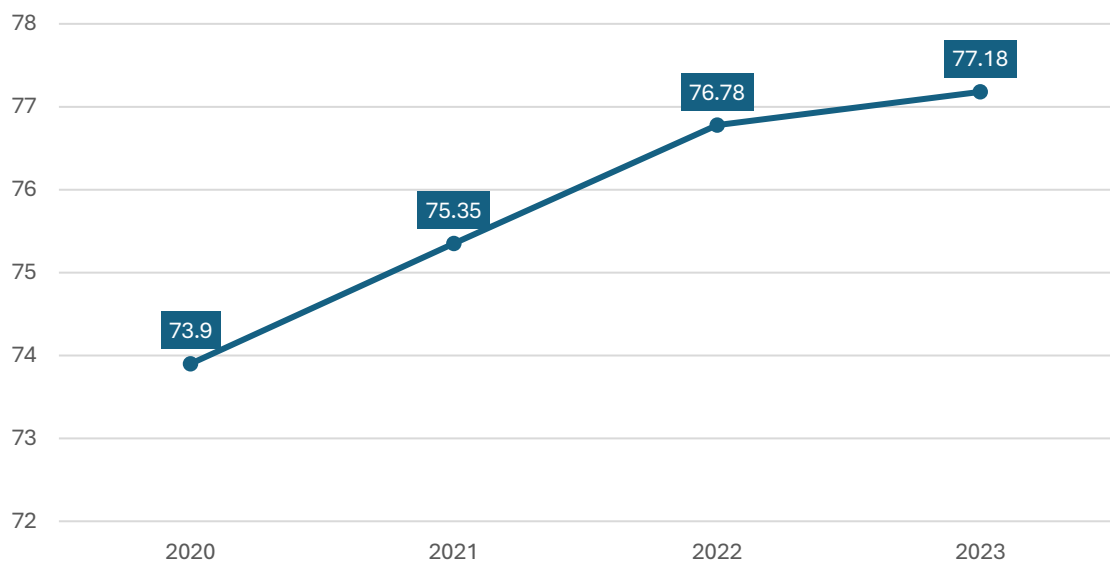
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) di Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai IPKA tercatat sebesar 76,73 dan mengalami sedikit penurunan berturut-turut hingga mencapai angka 75,42 di tahun 2022. Penurunan ini dapat mencerminkan adanya tantangan dalam pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak, baik dari sisi kebijakan, pelayanan, maupun lingkungan sosial. Namun pada tahun 2023, terjadi lonjakan signifikan dengan nilai IPKA meningkat menjadi 79,85. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan dan upaya nyata dalam memperkuat sistem perlindungan anak, seperti peningkatan layanan perlindungan, edukasi publik, dan kolaborasi lintas sektor.

2.2.6.2 Indeks Kualitas Keluarga

Pembangunan keluarga merupakan upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya secara lahir dan batin, sekaligus berperan aktif dalam proses pembangunan masyarakat dan daerah. Tujuan dari pembangunan keluarga adalah mewujudkan keluarga yang berkualitas, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, harmonis, mandiri, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan berbagai fungsi sosialnya, seperti fungsi agama, sosial budaya, perlindungan, pendidikan, ekonomi, serta pelestarian lingkungan. Dalam rangka



mengukur keberhasilan pembangunan keluarga, digunakan Indeks Kualitas Keluarga yang merupakan indikator komposit untuk menilai kondisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga dari berbagai aspek. Indeks ini mencerminkan kemampuan keluarga dalam menjalankan perannya secara optimal, baik dari segi ketahanan ekonomi, keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, fungsi perlindungan dan pendidikan, hingga partisipasi aktif dalam lingkungan sosial.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

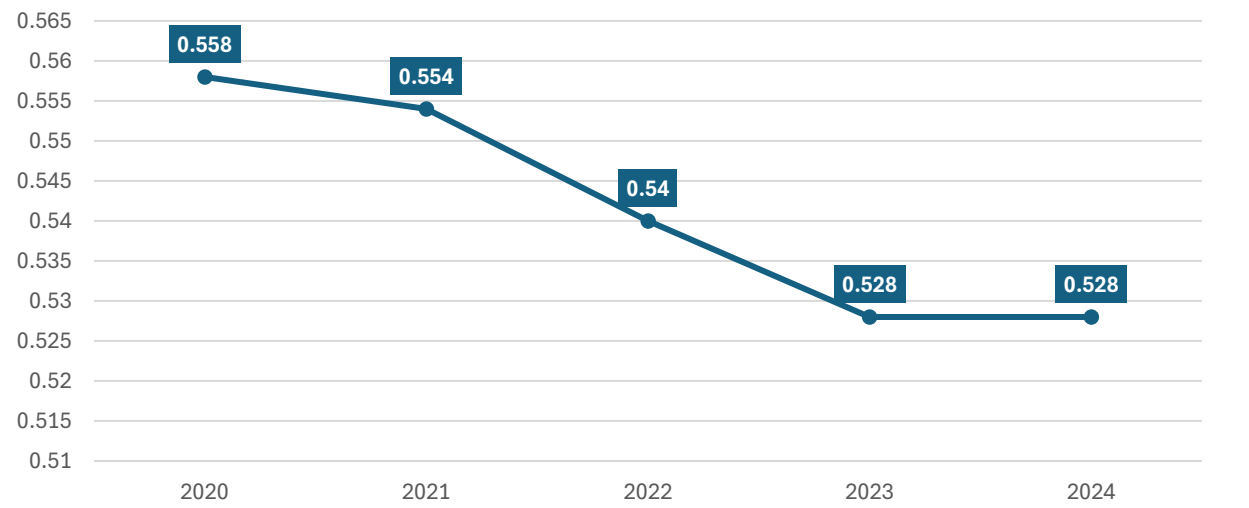
Gambar 2-54 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Jambi Tahun 2020-2023

Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang tahun 2020–2023. Pada tahun 2020, indeks kualitas keluarga tercatat sebesar 73,9, kemudian mengalami peningkatan menjadi 75,35 pada tahun 2021. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2022 dengan capaian indeks sebesar 76,78, dan kembali meningkat menjadi 77,18 pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek kesejahteraan keluarga, termasuk kesehatan, pendidikan, ketahanan ekonomi, serta keharmonisan relasi antaranggota keluarga. Peningkatan Indeks Kualitas Keluarga juga menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program pemberdayaan keluarga, peningkatan layanan dasar, dan penguatan fungsi keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung upaya pembangunan sumber daya

manusia yang berkualitas, sekaligus memperkuat ketahanan sosial di tingkat keluarga sebagai basis ketangguhan daerah menghadapi berbagai tantangan pembangunan ke depan.

2.2.6.3 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kehidupan antara laki-laki dan perempuan di suatu daerah. IKG mencerminkan keberhasilan pembangunan yang memperhatikan kesetaraan akses dan kesempatan antara kedua gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Upaya penurunan nilai IKG perlu diakselerasi melalui penguatan kebijakan responsif gender yang terintegrasi dalam seluruh tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan daerah.

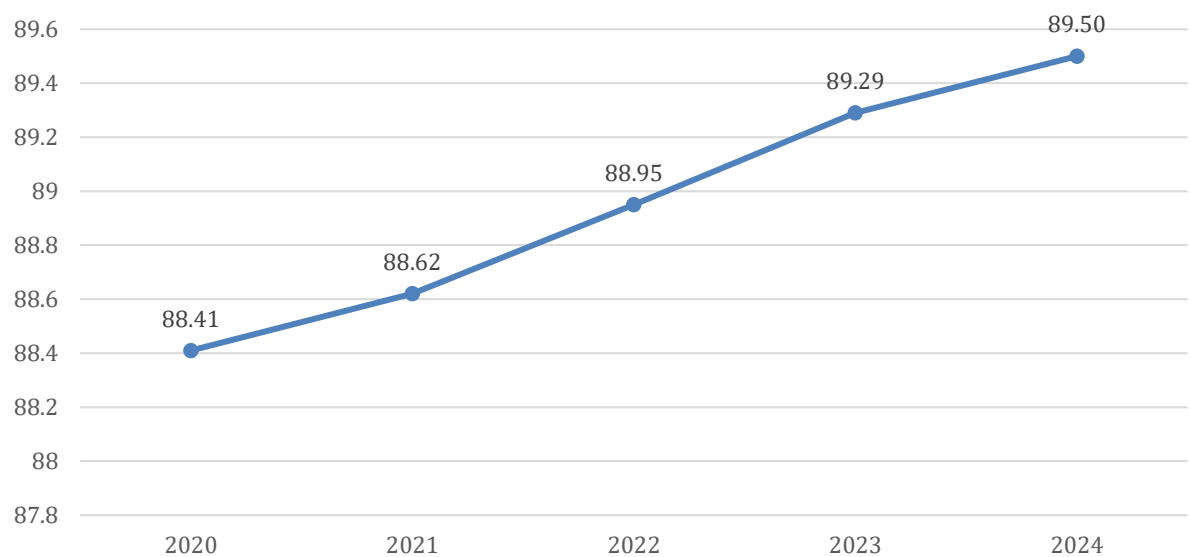


Sumber: BPS Provinsi Jambi, Tahun 2025  
Gambar 2-55 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Jambi menunjukkan penurunan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan gender di berbagai sektor pembangunan. Pada tahun 2020, IKG tercatat sebesar 0,558 dan mengalami penurunan menjadi 0,554 pada tahun 2021. Penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan nilai 0,54, kemudian kembali menurun menjadi 0,528 pada tahun 2023 hingga stagnan di tahun 2024. Tren penurunan IKG ini mengindikasikan adanya upaya yang lebih baik dalam mengurangi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun partisipasi sosial.

2.2.6.4 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang memperhatikan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. IPG menunjukkan sejauh mana perempuan dapat menikmati hasil pembangunan yang setara dengan laki-laki. Nilai IPG dinyatakan dalam persentase dengan nilai semakin mendekati 100% menunjukkan tingkat kesetaraan gender yang semakin tinggi. Sebaliknya nilai yang rendah menunjukkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati hasil pembangunan.



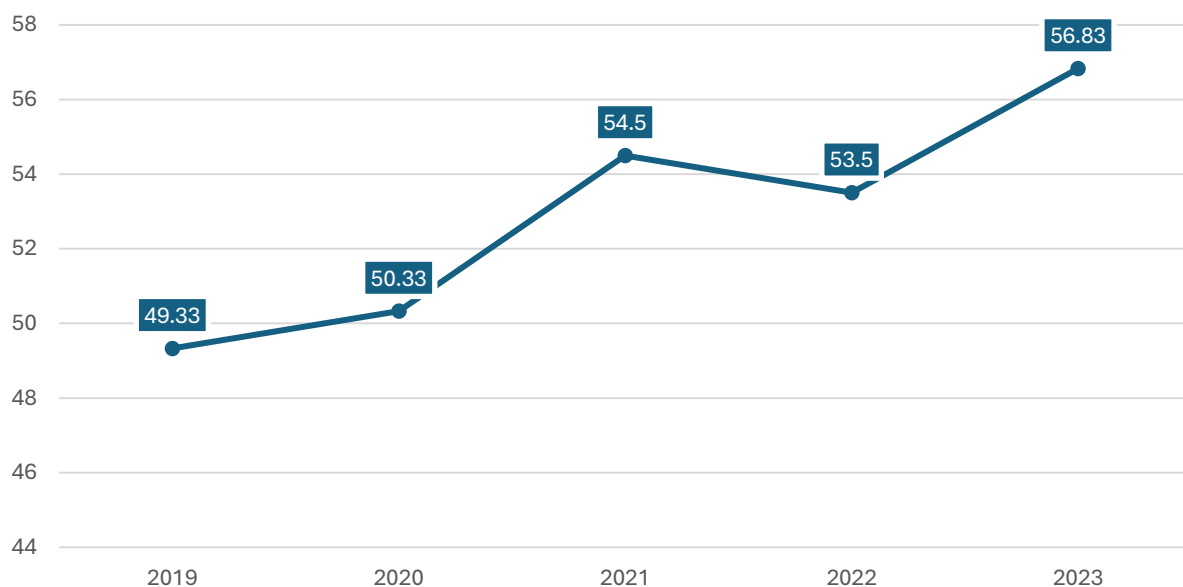
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-56 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jambi Tahun 2020–2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan selama periode tahun 2020 hingga 2024. Nilai IPG mengalami kenaikan dari 88,41 persen pada tahun 2020 menjadi 89,50 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kenaikan IPG secara bertahap menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan yang responsif gender telah memberikan hasil yang positif. Nilai IPG yang mendekati angka 90 persen menunjukkan bahwa perempuan di Provinsi Jambi semakin memperoleh akses dan kesempatan yang setara dalam menikmati hasil pembangunan.

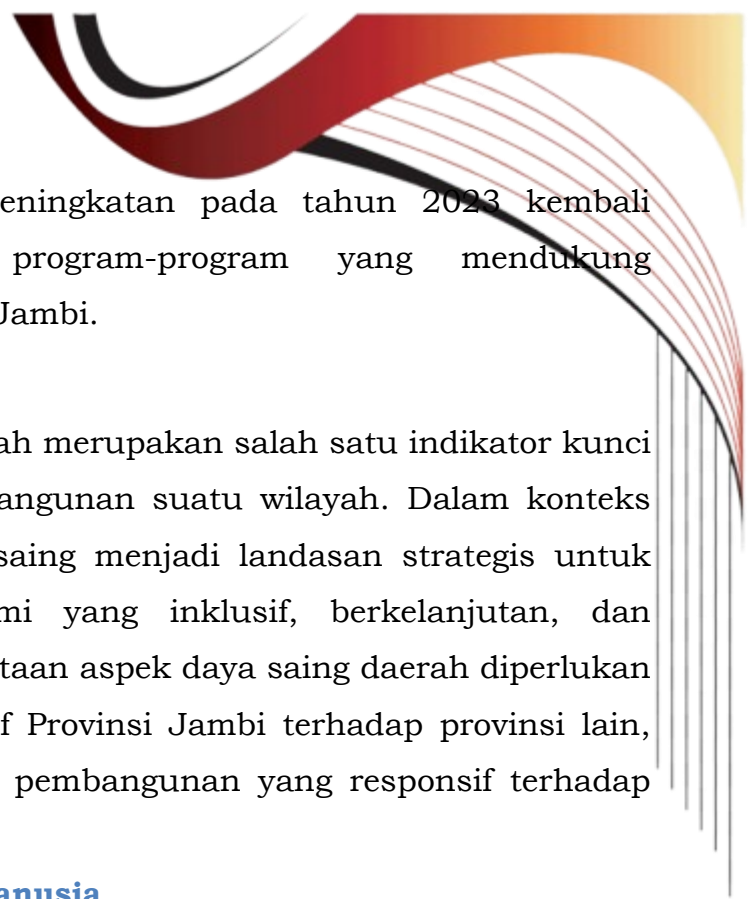
#### 2.2.6.5 Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan alat ukur yang menggambarkan seberapa baik kualitas hidup pemuda di suatu daerah, dengan menilai seberapa besar mereka dapat mengakses pendidikan, kesempatan ekonomi, serta berperan aktif dalam kehidupan sosial dan politik. IPP mengukur keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan serta sejauh mana mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan pemuda. Peningkatan IPP memerlukan komitmen kebijakan yang konsisten untuk memperluas ruang partisipasi, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi generasi muda secara berkelanjutan.



Sumber: Kementerian Olahraga dan Pemuda, 2025 (data termutakhir)  
Gambar 2-57 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, IPP tercatat sebesar 49,33, dan terus meningkat menjadi 56,83 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan pemuda, seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan partisipasi sosial. Kenaikan yang terjadi secara bertahap ini menunjukkan adanya upaya yang lebih baik dalam memberdayakan pemuda dan memberikan mereka akses yang lebih luas terhadap peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Meskipun terdapat sedikit



penurunan pada tahun 2022, peningkatan pada tahun 2023 kembali mengindikasikan keberhasilan program-program yang mendukung pembangunan pemuda di Provinsi Jambi.

### **2.3. Aspek Daya Saing Daerah**

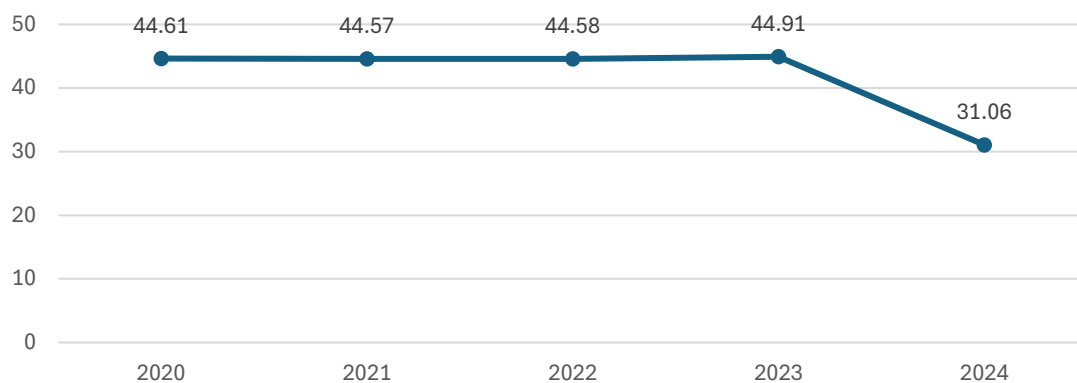
Peningkatan daya saing daerah merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur kemajuan pembangunan suatu wilayah. Dalam konteks Provinsi Jambi, penguatan daya saing menjadi landasan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Oleh karena itu, pemetaan aspek daya saing daerah diperlukan guna mengidentifikasi posisi relatif Provinsi Jambi terhadap provinsi lain, serta untuk merumuskan strategi pembangunan yang responsif terhadap tantangan dan peluang yang ada.

#### **2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Peningkatan daya saing sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam konteks Provinsi Jambi, pengembangan kualitas SDM menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, serta kesiapan menghadapi dinamika perubahan global. Oleh karena itu, pemetaan daya saing SDM diperlukan guna mengidentifikasi kondisi aktual, tantangan struktural, serta potensi yang dapat dioptimalkan dalam rangka merumuskan kebijakan pembangunan SDM yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan kebutuhan daerah.

##### **2.3.1.1 Rasio Ketergantungan**

Rasio ketergantungan merupakan indikator demografi yang menggambarkan besarnya beban penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15–64 tahun). Semakin rendah nilai rasio ini, maka semakin ringan beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Rasio ini menjadi salah satu pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan sumber daya manusia, karena mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam mengelola potensi produktif sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok usia yang belum atau tidak lagi bekerja.



Sumber: JDA 2025, 2025 dan Data diolah

Gambar 2-58 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Selama periode 2020 hingga 2023, rasio ketergantungan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, dengan nilai berturut-turut sebesar 44,61 pada tahun 2020, 44,57 pada tahun 2021, 44,58 pada tahun 2022, dan sedikit meningkat menjadi 44,91 pada tahun 2023. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yakni menjadi 31,06. Penurunan tajam ini mengindikasikan perbaikan struktur penduduk, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dibandingkan dengan kelompok usia tidak produktif. Perubahan ini dapat mencerminkan hasil dari kebijakan pembangunan yang berhasil mendorong pertumbuhan penduduk usia kerja atau menurunkan angka ketergantungan, dan sekaligus membuka peluang bagi pemanfaatan bonus demografi secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah.

### 2.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

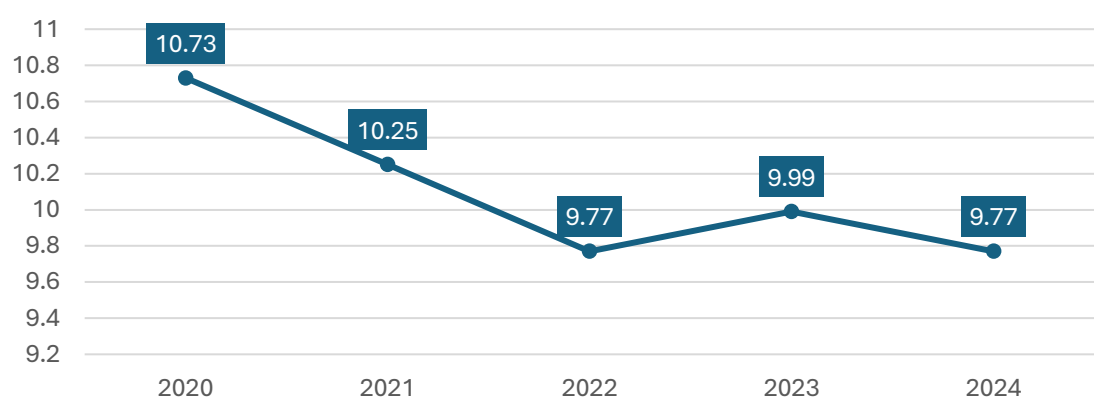
Penguatan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi merupakan faktor krusial dalam mendorong daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Jambi, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan ekosistem inovasi menjadi pendorong utama untuk meningkatkan efisiensi produksi, diversifikasi ekonomi, dan nilai tambah sektor-sektor strategis. Oleh karena itu, pengukuran terhadap tingkat inovasi, kemampuan adaptasi teknologi, dan produktivitas tenaga kerja perlu dilakukan secara menyeluruh guna mengidentifikasi



hambatan struktural serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan dan berorientasi pada peningkatan daya saing regional.

2.3.2.1 **Industri Pengolahan**

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah komoditas, serta menciptakan lapangan kerja. Rasio kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana sektor ini berkembang dan memberikan dampak terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.



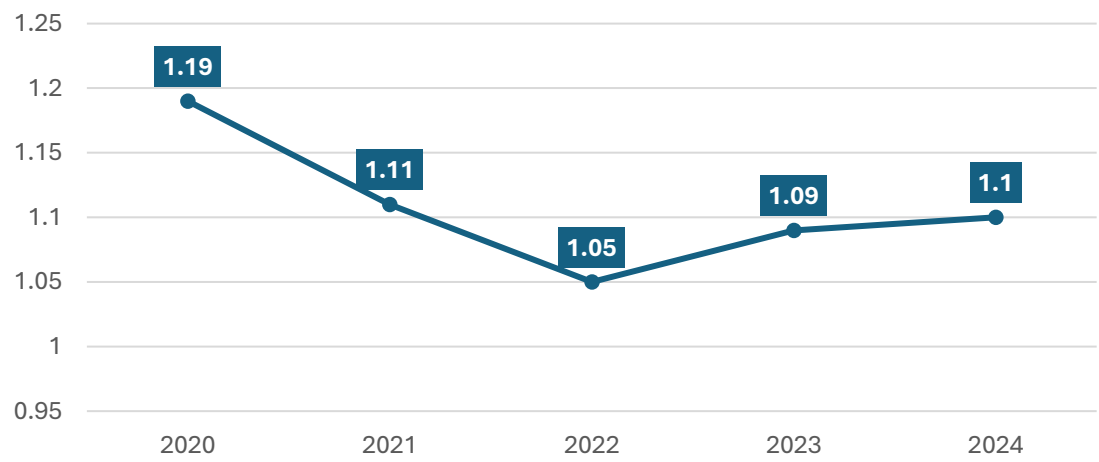
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-59 Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Rasio Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 menunjukkan hasil capaian yang menurun. Pada tahun 2020, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 10,73% terhadap PDRB, namun mengalami penurunan berturut-turut menjadi 10,25% pada 2021 dan 9,77% pada 2022. Meskipun sempat mengalami peningkatan menjadi 9,99% di tahun 2023, angka ini kembali turun ke 9,77% di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam pengembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Jambi, baik dari sisi produktivitas, investasi, maupun daya saing. Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi revitalisasi sektor industri pengolahan, termasuk penguatan kemitraan industri dengan UMKM, insentif investasi, dan peningkatan kapasitas SDM agar sektor

ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.3.2.2 **Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum**

Penyediaan akomodasi dan makan minum adalah salah satu subsektor dalam lapangan usaha jasa yang mencakup kegiatan ekonomi yang menyediakan layanan penginapan (seperti hotel, motel, losmen, wisma, dan sejenisnya) serta penyediaan makanan dan minuman (seperti restoran, rumah makan, kafe, warung, katering, dan usaha sejenis lainnya) kepada masyarakat umum, baik untuk keperluan konsumsi pribadi maupun kegiatan pariwisata dan bisnis. Secara umum, sektor ini berperan penting dalam mendukung industri pariwisata, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya mobilitas penduduk dan perkembangan destinasi wisata di Provinsi Jambi, subsektor ini memiliki potensi strategis untuk terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan kelembagaan usaha, serta integrasi dengan sektor-sektor pendukung lainnya dalam rangka memperluas kontribusinya terhadap perekonomian daerah.



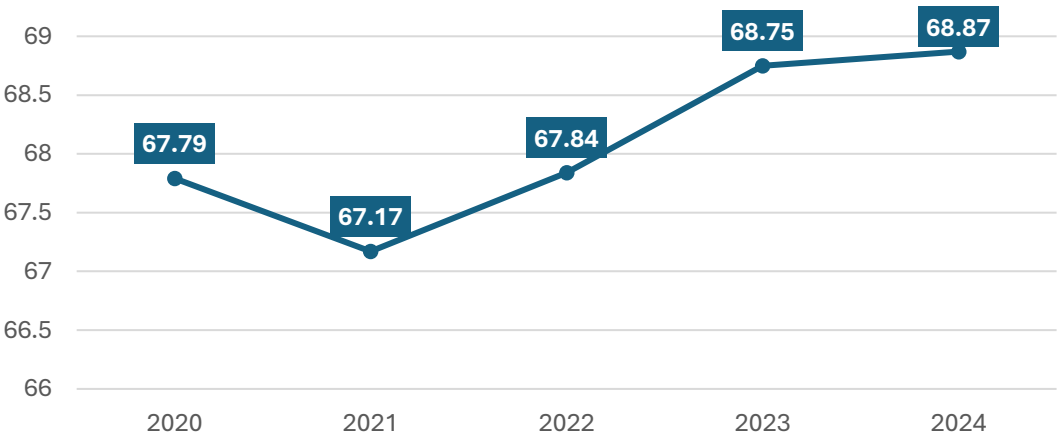
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025.  
Gambar 2-60 Rasio Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Rasio sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, rasio sektor ini tercatat sebesar 1,19

persen, kemudian mengalami penurunan berturut-turut menjadi 1,11 persen pada tahun 2021 dan 1,05 persen pada tahun 2022. Penurunan ini diduga kuat merupakan dampak dari pembatasan aktivitas masyarakat dan pariwisata akibat pandemi *Covid-19*, yang secara langsung mempengaruhi permintaan terhadap jasa akomodasi dan makanan-minuman. Namun demikian, mulai tahun 2023 terjadi pemulihan dengan peningkatan rasio menjadi 1,09 persen dan kembali naik menjadi 1,10 persen pada tahun 2024. Tren kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya sektor pariwisata dan konsumsi masyarakat, serta menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kembali memperoleh peran dalam kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

2.3.2.3 **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

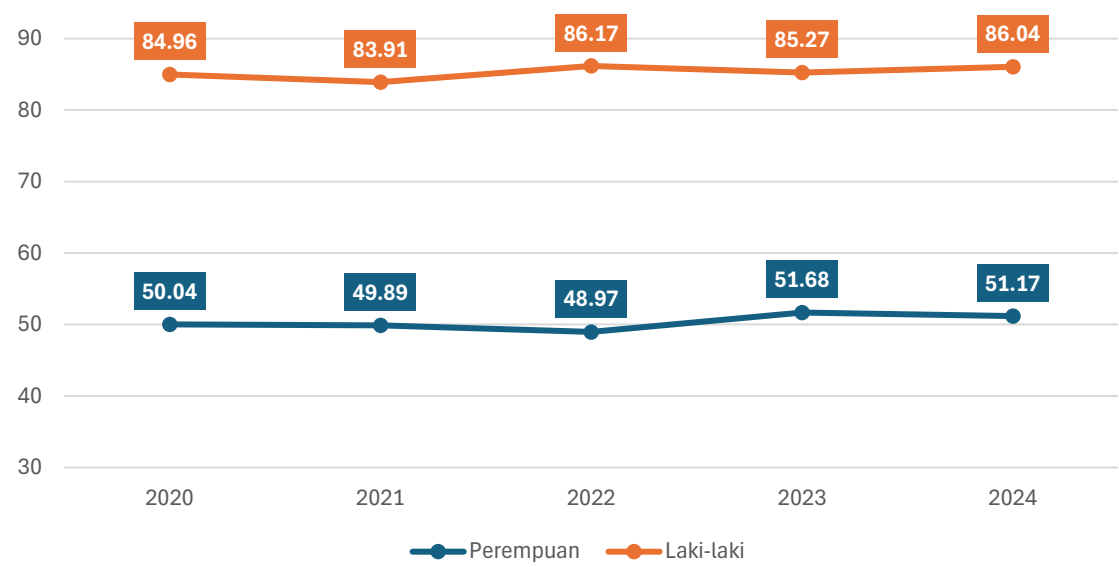
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (biasanya usia 15 tahun ke atas) dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Angkatan kerja mencakup penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran terbuka). TPAK memberikan gambaran sejauh mana penduduk usia kerja terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi Tahun 2020–2024 terlihat adanya fluktuasi namun secara umum menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2020, TPAK tercatat

sebesar 67,79 persen dan mengalami penurunan di tahun 2021 menjadi 67,17 persen. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan gangguan ekonomi dan pasar tenaga kerja. Namun, mulai tahun 2022 nilai TPAK kembali meningkat menjadi 67,84 persen dan terus meningkat hingga mencapai 68,87 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dan keberhasilan kebijakan daerah dalam mendorong keterlibatan penduduk usia kerja ke dalam pasar tenaga kerja.



Sumber: BPS Prov. Jambi, 2025  
Gambar 2-62 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Jambi tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pasar kerja. Selama lima tahun terakhir, TPAK laki-laki berada pada kisaran 83,91 persen hingga 86,17 persen dengan tren yang relatif stabil, sedangkan TPAK perempuan jauh lebih rendah, yaitu di kisaran 48,97 persen hingga 51,68 persen. Meskipun TPAK perempuan sempat mengalami kenaikan pada tahun 2023, kesenjangan TPAK antara laki-laki dan perempuan terpaut jauh. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi perempuan dalam aktivitas ekonomi formal dan informal masih terbatas, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor sosial-budaya, beban kerja

domestik, dan akses yang belum merata terhadap peluang kerja produktif. Ketimpangan ini berpotensi menghambat optimalisasi bonus demografi di Provinsi Jambi, karena sebagian besar potensi tenaga kerja perempuan belum sepenuhnya diberdayakan.

Tabel 2-17 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| Status Pekerjaan Utama                                 | 2020      |           | 2021      |           | 2022      |           | 2023      |           | 2024      |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                                        | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Berusaha Sendiri                                       | 283.943   | 134.319   | 254.974   | 125.462   | 293.383   | 147.164   | 293.481   | 161.604   | 282.247   | 153.762   |
| Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 172.023   | 67.563    | 187.214   | 67.307    | 177.824   | 56.491    | 165.287   | 63.888    | 175.792   | 65.960    |
| Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar             | 61.480    | 11.339    | 64.657    | 11.137    | 77.785    | 12.747    | 75.953    | 14.190    | 85.504    | 15.613    |
| Buruh/Karyawan/Pegawai                                 | 389.569   | 185.646   | 390.725   | 197.045   | 431.814   | 197.097   | 423.089   | 212.559   | 453.669   | 208.712   |
| Pekerja bebas                                          | 136.502   | 39.712    | 87.107    | 31.420    | 116.184   | 29.644    | 78.114    | 22.457    | 123.549   | 25.978    |
| Pekerja keluarga/tidak dibayar                         | 72.364    | 184.543   | 63.072    | 8.281     | 64.327    | 193.159   | 46.686    | 6.006     | 63.635    | 178.846   |
| Total                                                  | 1.115.881 | 623.122   | 1.047.749 | 440.652   | 1.161.317 | 636.502   | 1.082.610 | 480.704   | 1.184.396 | 648.871   |

Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025.

Partisipasi perempuan yang rendah dapat terlihat pada tabel di atas yang menunjukkan jumlah penduduk 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan utama. Selama tahun 2020 hingga 2024, struktur ketenagakerjaan Provinsi Jambi didominasi oleh kategori buruh/karyawan/pegawai, diikuti berusaha sendiri, dengan komposisi pekerjaan keluarga/tidak dibayar yang secara signifikan lebih tinggi di kalangan perempuan. Pekerja laki-laki mendominasi hampir semua kategori berbayar—khususnya buruh/karyawan/pegawai (453.669 orang di 2024) dan wirausaha sendiri (282.247 orang)—sementara perempuan mendominasi kategori pekerja keluarga/tidak dibayar (178.846 orang di 2024),

mencerminkan ketimpangan akses terhadap pekerjaan formal berubah. Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa meskipun pekerja perempuan terus meningkat dalam sektor formal, dominasi mereka dalam pekerjaan tanpa upah dan informal masih tinggi yang kemungkinan disebabkan rendahnya akses terhadap pelatihan dan modal, serta nilai sosial-budaya yang menempatkan perempuan di ranah domestik. Dengan demikian, penguatan kebijakan seperti pelatihan vokasi gender, akses terhadap modal usaha, dan pembagian peran domestik dalam keluarga sangat diperlukan untuk mendorong kesetaraan dan pemberdayaan ekonomi perempuan di Jambi.

2.3.2.4 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi menjadi salah satu pilar strategis yang tidak dapat diabaikan. Salah satu indikator utama yang mencerminkan kapasitas inovatif suatu pemerintah daerah adalah Indeks Inovasi Daerah. Indeks ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan maupun program yang inovatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Melalui pengukuran ini, dapat diidentifikasi tingkat kinerja daerah dalam menerapkan inovasi yang berdampak langsung terhadap efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

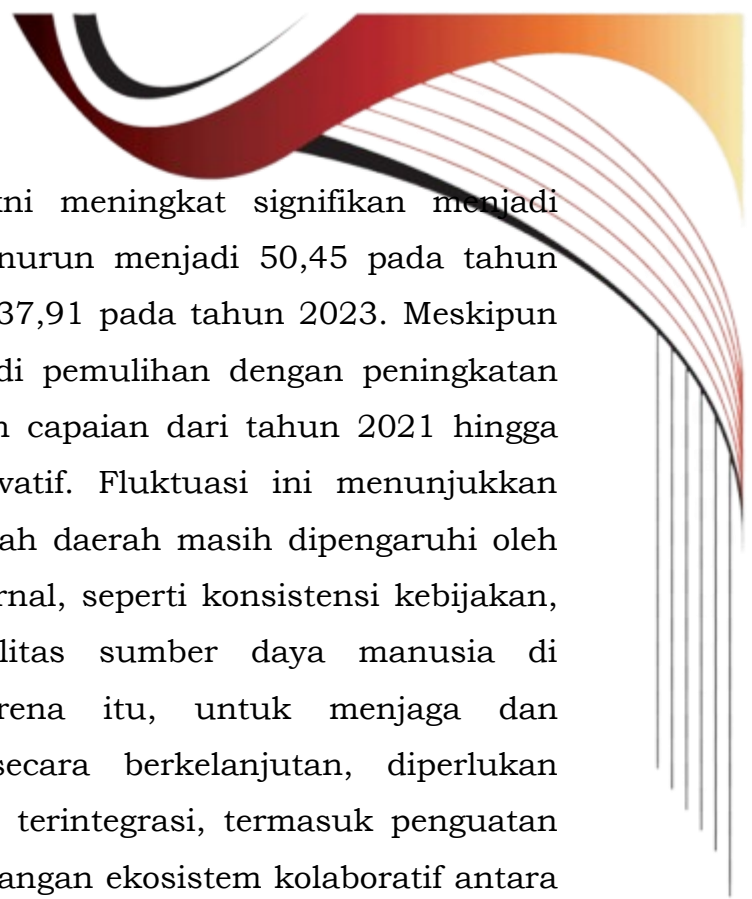
Tabel 2-18 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| Keterangan            | Tahun             |            |            |            |            |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|
|                       | 2020              | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       |
| Indeks Inovasi Daerah | 5.244             | 61,03      | 50,45      | 37,91      | 58,59      |
|                       | (Sangat inovatif) | (Inovatif) | (Inovatif) | (Inovatif) | (Inovatif) |

Sumber: SK Kepmendagri Tahun 2021-2025.

Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi selama tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, indeks inovasi daerah Provinsi Jambi tercatat sebesar 5,244 yang dikategorikan sebagai "Sangat Inovatif". Namun, pada tahun-tahun berikutnya, nilai





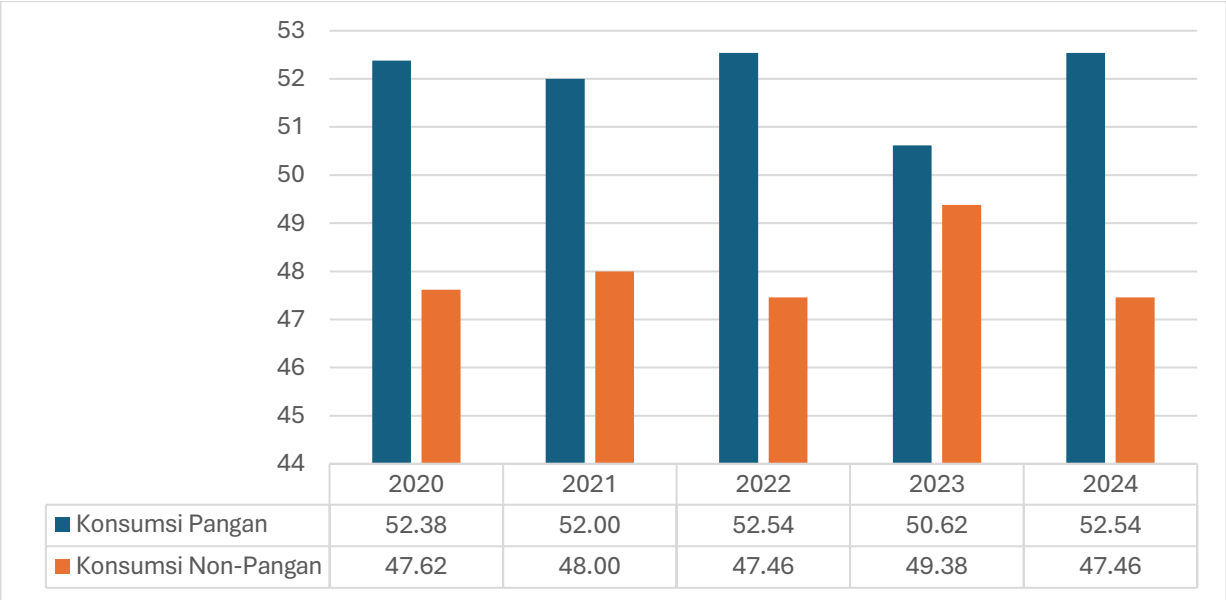
indeks mengalami fluktuasi, yakni meningkat signifikan menjadi 61,03 pada tahun 2021, lalu menurun menjadi 50,45 pada tahun 2022, dan terus menurun hingga 37,91 pada tahun 2023. Meskipun demikian, pada tahun 2024 terjadi pemulihan dengan peningkatan indeks menjadi 58,59 dan seluruh capaian dari tahun 2021 hingga 2024 berada dalam kategori Inovatif. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa kapasitas inovatif pemerintah daerah masih dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta kualitas sumber daya manusia di lingkungan birokrasi. Oleh karena itu, untuk menjaga dan meningkatkan kinerja inovasi secara berkelanjutan, diperlukan strategi yang lebih sistematis dan terintegrasi, termasuk penguatan kelembagaan inovasi dan pengembangan ekosistem kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

#### 2.3.2.5 **Pengeluaran Per Kapita**

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2020-2024 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy* pendapatan, baik secara nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rata-rata proporsi pengeluaran per kapita sebulan di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa pengeluaran untuk konsumsi pangan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi non-pangan sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Proporsi konsumsi pangan berada pada kisaran 50–53 persen, dengan angka tertinggi tercatat pada tahun 2022 dan 2024 sebesar 52,54 persen. Sementara itu, konsumsi non-pangan berkisar antara 47–49 persen, dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 49,38 persen. Pola ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pendapatan masyarakat masih dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, sehingga

kelompok makanan tetap menjadi komponen pengeluaran utama di Provinsi Jambi selama periode tersebut.



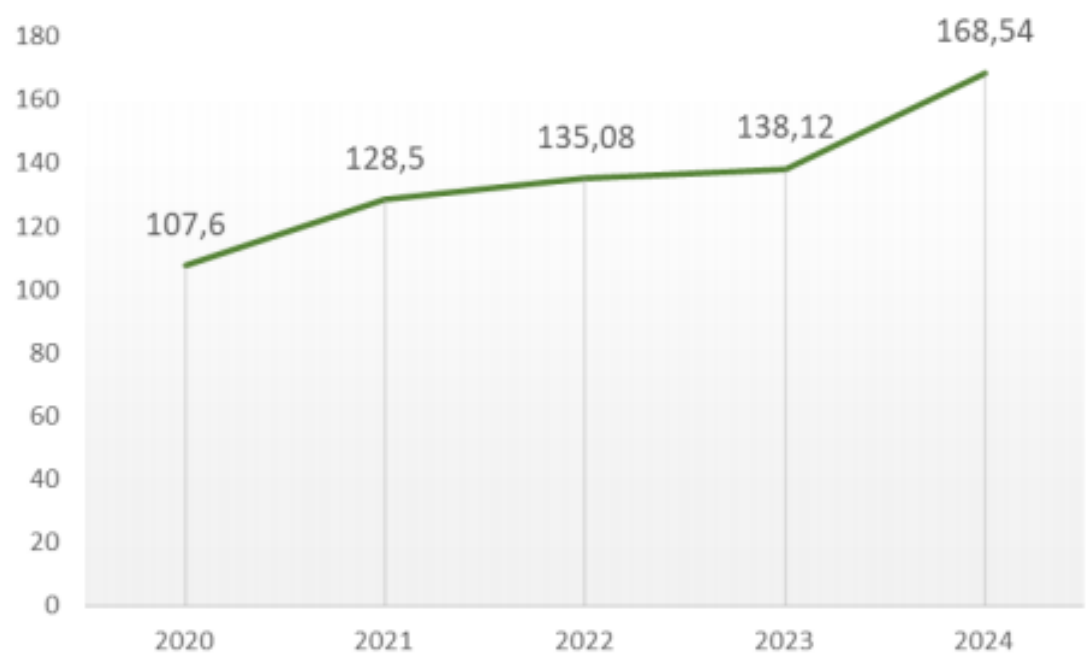
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-63 Pola Konsumsi Masyarakat Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Perubahan pola konsumsi ini dapat mencerminkan dinamika daya beli dan perubahan prioritas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat kebutuhan dasar maupun kebutuhan penunjang. Stabilitasnya proporsi konsumsi pangan mengindikasikan bahwa masyarakat masih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pokok, sementara peningkatan konsumsi non-pangan pada tahun-tahun tertentu dapat dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap layanan dan barang sekunder, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Hal ini tercermin dari data tahun 2020 hingga 2024, di mana proporsi konsumsi pangan cenderung stabil di kisaran 52 persen, sementara konsumsi non-pangan menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan respon masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi dan ketersediaan layanan penunjang.

2.3.2.6 Nilai Tukar Petani.

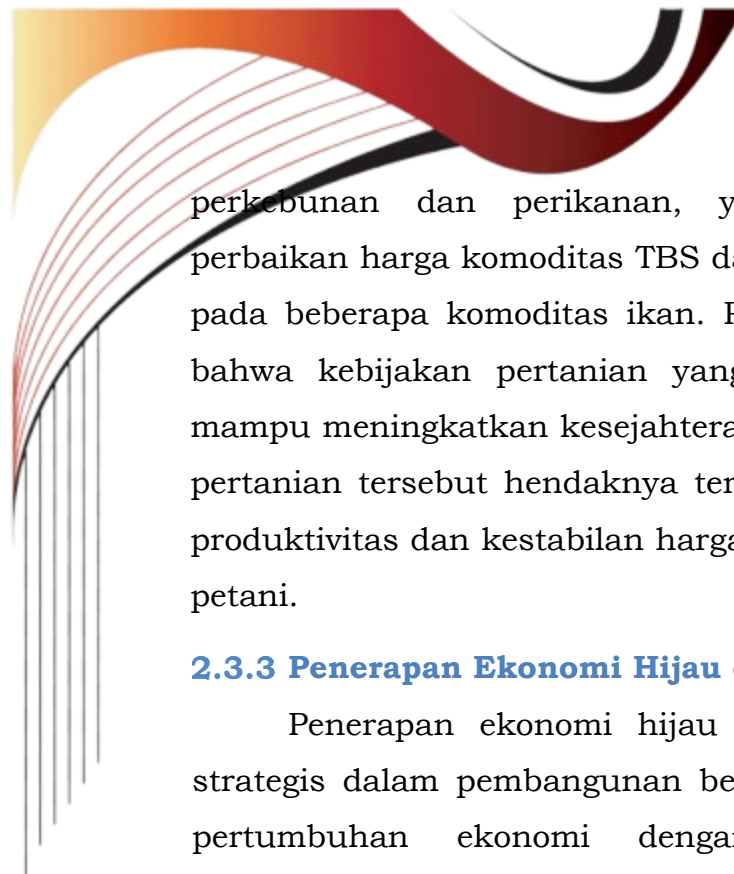
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan tukar petani melalui perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib). NTP secara langsung mencerminkan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen, mengingat Indeks Harga yang Diterima Petani (It) menempati posisi

pembilang dalam rumus perhitungan. Apabila terjadi kenaikan harga komoditas pertanian, dengan asumsi volume produksi tetap, maka pendapatan petani dari hasil panen akan meningkat. Dengan demikian, perkembangan nilai It menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesejahteraan petani dari sisi pendapatan. Petani juga berperan sebagai konsumen dan produsen yang dihadapkan pada pilihan alokasi pendapatan untuk dua kebutuhan utama. Pertama, pengeluaran untuk konsumsi guna memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga petani. Kedua, pengeluaran untuk kegiatan produksi atau budidaya pertanian, yang mencakup biaya operasional serta investasi dalam bentuk pembentukan barang modal. Pemenuhan kebutuhan konsumsi menjadi prioritas utama; oleh karena itu, kemampuan untuk melakukan investasi hanya dapat dicapai apabila kebutuhan dasar telah terpenuhi. Dengan demikian, investasi dalam kegiatan produksi menjadi salah satu faktor penentu penting dalam peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-64 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2020- 2024

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2018-2024 memperlihatkan kecenderungan meningkat. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh subsektor, terutama pada subsektor tanaman



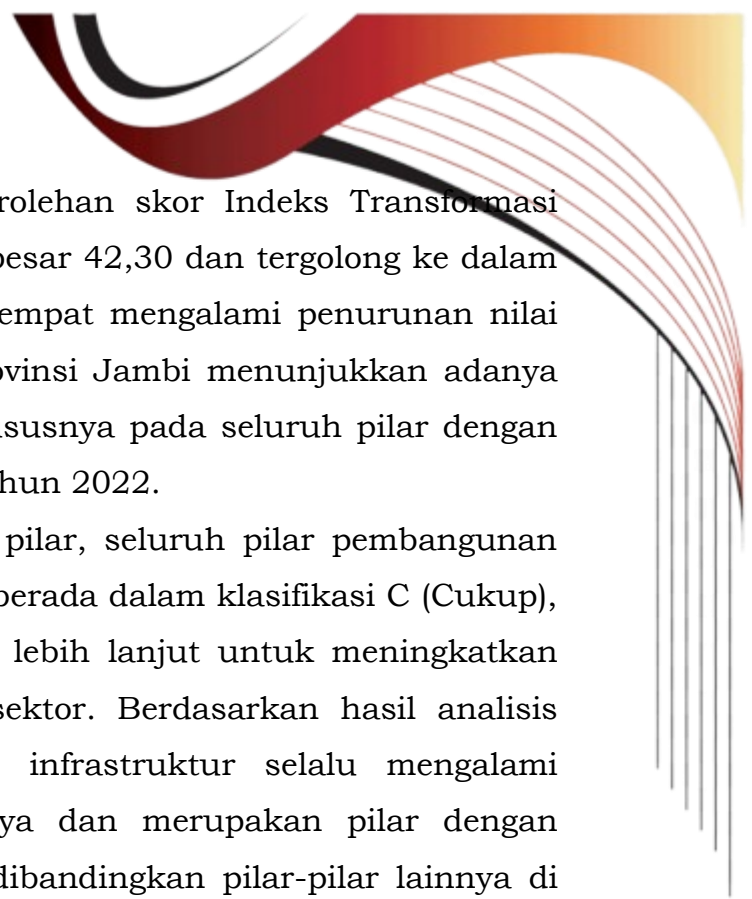
perkebunan dan perikanan, yang disebabkan karena adanya perbaikan harga komoditas TBS dan harga bokar, serta adanya inflasi pada beberapa komoditas ikan. Perbaikan NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut hendaknya terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga dan diiringi dengan pemberdayaan petani.

### **2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**

Penerapan ekonomi hijau dan biru merupakan pendekatan strategis dalam pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab. Dalam konteks Provinsi Jambi, implementasi konsep ini menjadi penting untuk menjawab tantangan degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan ketimpangan akses terhadap sumber daya alam, khususnya di sektor kehutanan, pertanian, kelautan, dan perairan darat. Oleh karena itu, pengarusutamaan prinsip-prinsip ekonomi hijau dan biru dalam perencanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mendorong transformasi ekonomi yang rendah emisi, efisien dalam penggunaan sumber daya, inklusif, serta berorientasi pada keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.4 Transformasi Digital**

Transformasi digital adalah proses perubahan mendalam dari cara organisasi atau wilayah menggunakan teknologi digital untuk menggantikan atau memperbaiki metode tradisional dalam beroperasi, berinteraksi, dan memberikan layanan. Transformasi digital melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendigitalisasi berbagai aspek kehidupan, seperti layanan publik, sektor bisnis, pendidikan, dan sektor kesehatan. Dalam konteks pembangunan daerah, transformasi digital memiliki peran strategis dalam meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, memperluas akses terhadap layanan dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan data.



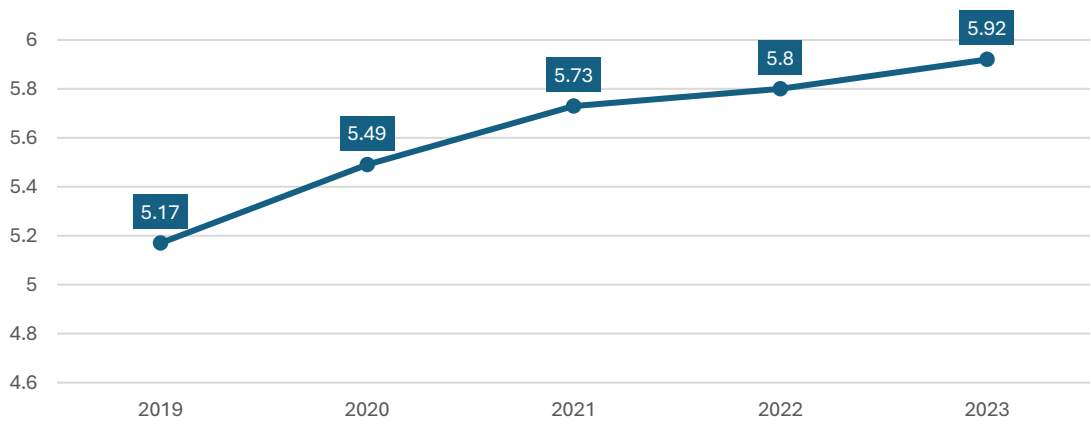
Provinsi Jambi memiliki perolehan skor Indeks Transformasi Digital Nasional Nasional (TDN) sebesar 42,30 dan tergolong ke dalam klasifikasi C (Cukup). Meskipun sempat mengalami penurunan nilai indeks di tahun 2019, namun Provinsi Jambi menunjukkan adanya perbaikan transformasi digital khususnya pada seluruh pilar dengan peningkatan nilai Indeks sampai tahun 2022.

Jika dianalisis berdasarkan pilar, seluruh pilar pembangunan digital pada Provinsi Jambi masih berada dalam klasifikasi C (Cukup), sehingga masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan transformasi digital di berbagai sektor. Berdasarkan hasil analisis lebih lanjut, pilar jaringan dan infrastruktur selalu mengalami perbaikan kondisi setiap tahunnya dan merupakan pilar dengan perolehan skor yang paling baik dibandingkan pilar-pilar lainnya di Provinsi Jambi pada tahun 2022, yaitu sebesar 48,18. Hasil pada pilar ini didorong oleh penetrasi jaringan 4G yang sudah menjangkau 75% area Jambi serta adanya inklusivitas antar gender dalam mengakses internet dan smartphone. Namun di sisi lain, untuk dapat mengoptimalkan penggunaan internet, Provinsi Jambi masih perlu untuk mendorong peningkatan rata-rata kecepatan unduh atau download speed guna memfasilitasi akses yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 telah mencatat sekitar 63,09% (1000 dari 1585) Desa/Kelurahan di wilayah Jambi masih termasuk dalam daerah sinyal lemah/blankspot. Pada sektor layanan kesehatan, berdasarkan data dari Kemenkes, 95,17% (197 dari 207) puskesmas di wilayah Jambi sudah terfasilitasi akses internet. Kemudian di sektor layanan pendidikan, berdasarkan data dari Kemendikdasmen sebanyak 77,42% (2787 dari 3600) telah memiliki fasilitas akses internet.

Selanjutnya, pilar masyarakat juga menunjukkan pertumbuhan yang positif sejak tahun 2018, dimana pada tahun 2022 skornya mencapai 47,21. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan dalam hal literasi digital dan kemampuan digital masyarakat di Provinsi Jambi. Meskipun demikian, masih terdapat banyak ruang untuk dapat lebih mendorong penciptaan talenta digital yang unggul melalui pelatihan intensif untuk meningkatkan keterampilan digital

tingkat dasar dan menengah serta memperluas akses pendidikan yang berorientasi pada teknologi digital bagi seluruh kelompok masyarakat.

Digitalisasi pada sektor bisnis dan pemerintah juga perlu didorong lebih lanjut. Pada pilar bisnis, masih ditemukan pelaku usaha yang belum melakukan shifting model bisnis dengan mengadopsi teknologi digital, dapat dilihat melalui skor indikator adopsi pembayaran digital dan pemanfaatan teknologi digital di dalam bisnis yang masih rendah. Selain itu, pertumbuhan kemampuan riset dan inovasi Provinsi Jambi juga perlu terus ditingkatkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi digital di wilayahnya. Selanjutnya, pada pilar pemerintah, indikator e-government index, online service index, dan e-participation index masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan pada tata kelola pemerintahan digital dan penerapan kebijakan yang adaptif untuk mendukung pertumbuhan inovasi dan pembangunan digital yang berkelanjutan.



Sumber: BPS Indonesia, 2025 (data termutakhir)  
Gambar 2-65 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

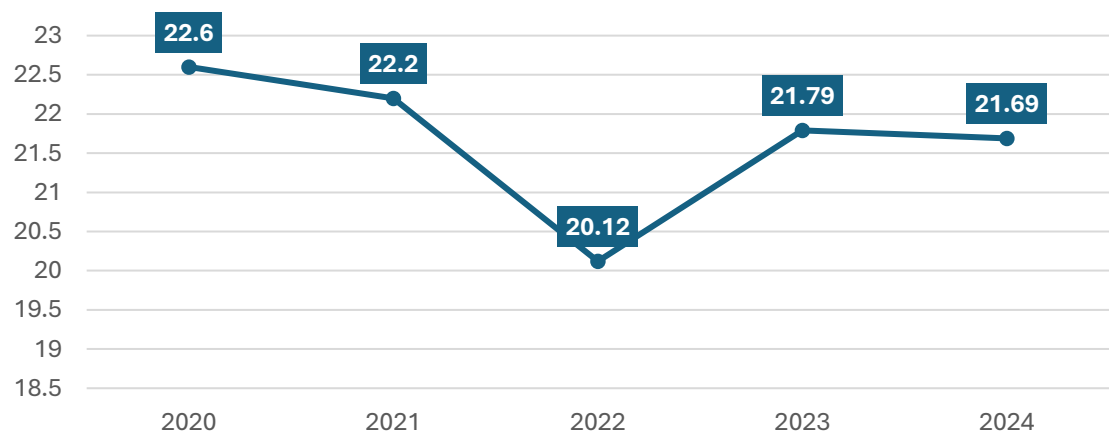
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama tahun 2019–2023. Pada tahun 2019, IP-TIK Provinsi Jambi tercatat sebesar 5,17 dan mengalami peningkatan menjadi 5,49 pada tahun 2020. Pada tahun 2021, IP-TIK Provinsi Jambi kembali meningkat menjadi 5,73 dan terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 mencapai 5,92. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam pengembangan infrastruktur TIK,



peningkatan kapasitas digital masyarakat, serta perluasan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi di berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Capaian ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi digital daerah yang berkelanjutan serta penguatan daya saing ekonomi berbasis teknologi. Dalam konteks pembangunan daerah, kemajuan TIK juga berperan sebagai enabler dalam peningkatan efisiensi layanan publik, tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, serta integrasi ekonomi digital secara lebih luas.

### 2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global menjadi hal yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Dengan semakin terbukanya pasar internasional, daerah perlu mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada untuk dapat bersaing secara global. Integrasi ini memungkinkan daerah untuk mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada di luar negeri. Selain itu, perkembangan ekonomi global yang semakin terhubung memerlukan adaptasi dari daerah agar mampu berkompetisi dengan wilayah lain di dunia. Daya saing daerah tidak hanya diukur dari potensi ekonomi lokal, tetapi juga kemampuannya untuk beradaptasi dan berkolaborasi dengan ekonomi global.

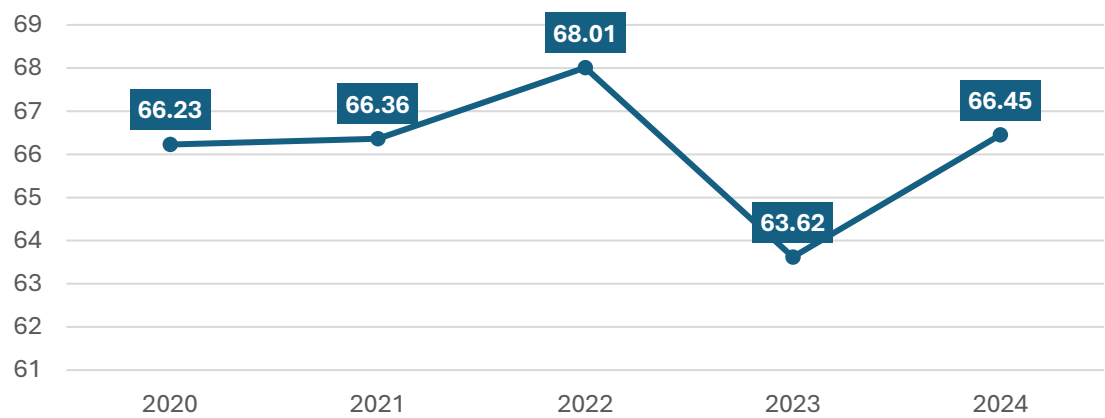


Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-66 Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Gambar di atas memperlihatkan Distribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi Tahun 2020-2024, terlihat adanya fluktuasi dalam

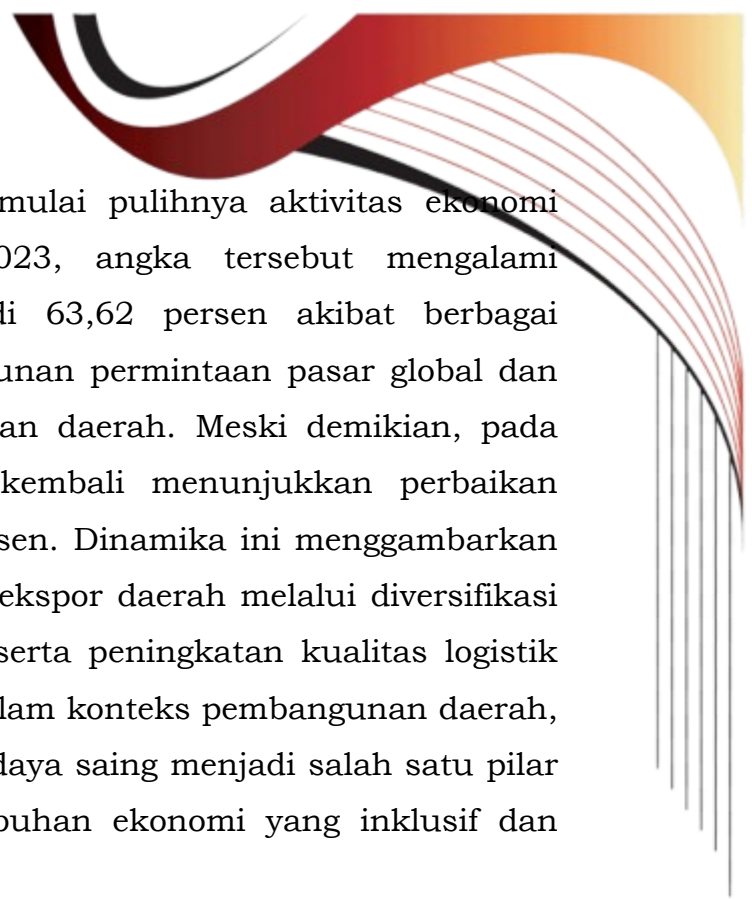
kontribusi PMTB terhadap perekonomian daerah. Pada tahun 2020, kontribusi PMTB tercatat sebesar 22,6 persen, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 22,2 persen pada tahun 2021. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2022 menjadi 20,12 persen, yang diduga sebagai dampak dari ketidakpastian ekonomi global serta penyesuaian aktivitas investasi di tingkat daerah. Namun demikian, pada tahun 2023 terdapat tren pemulihan dengan peningkatan kontribusi menjadi 21,79 persen, meskipun kembali mengalami sedikit penurunan di tahun 2024 menjadi 21,69 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan iklim investasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur, masih diperlukan kebijakan yang lebih strategis dan terpadu untuk mendorong peningkatan investasi produktif secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu terus mengoptimalkan peran sektor prioritas serta memperkuat integrasi antara ekonomi domestik dan global guna meningkatkan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika perekonomian nasional maupun internasional.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

Gambar 2-67 Distribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Distribusi ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Provinsi Jambi menunjukkan tren yang fluktuatif selama tahun 2020–2024. Pada tahun 2020, distribusi ekspor tercatat sebesar 66,23 persen dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 66,36 persen pada tahun 2021. Pada tahun 2022, kontribusi ekspor terhadap PDRB mencapai sebesar 68,01 persen, yang mencerminkan optimalisasi kinerja



perdagangan luar negeri seiring mulai pulihnya aktivitas ekonomi global. Namun, pada tahun 2023, angka tersebut mengalami penurunan cukup tajam menjadi 63,62 persen akibat berbagai tantangan eksternal seperti penurunan permintaan pasar global dan fluktuasi harga komoditas unggulan daerah. Meski demikian, pada tahun 2024, kontribusi ekspor kembali menunjukkan perbaikan dengan capaian sebesar 66,45 persen. Dinamika ini menggambarkan pentingnya penguatan daya saing ekspor daerah melalui diversifikasi produk, perluasan pasar ekspor, serta peningkatan kualitas logistik dan infrastruktur perdagangan. Dalam konteks pembangunan daerah, kinerja ekspor yang stabil dan berdaya saing menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

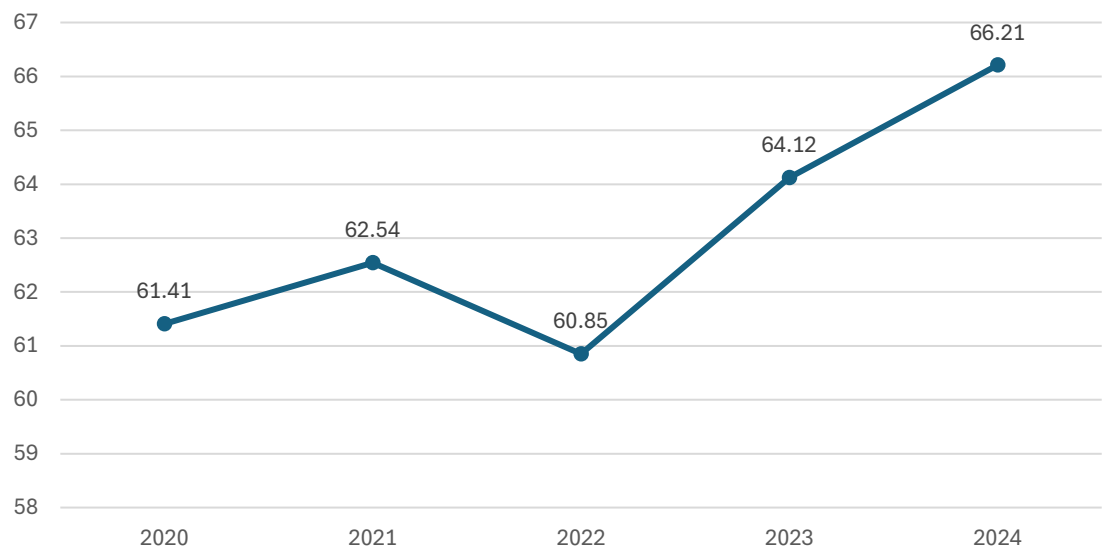
### **2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

Penguatan peran kawasan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berimbang, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam konteks Provinsi Jambi, kawasan perkotaan memiliki potensi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, dan industri, sementara kawasan perdesaan berperan sebagai basis produksi pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya. Oleh karena itu, pembangunan kedua kawasan ini perlu diarahkan secara terpadu dan saling melengkapi, melalui peningkatan konektivitas, penguatan infrastruktur dasar, pengembangan ekonomi lokal, serta pemerataan akses terhadap layanan publik guna mendorong produktivitas wilayah dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

#### **2.3.6.1 Kondisi Hunian Layak**

Definisi hunian layak adalah hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim dan sanitasi yang layak dan aman, gambar di bawah ini menunjukkan persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Provinsi Jambi. Capaian akses terhadap hunian layak mencerminkan kualitas hidup masyarakat dan

keberhasilan intervensi pemerintah dalam sektor perumahan dan permukiman. Oleh karena itu, pemantauan indikator ini secara berkala menjadi penting untuk memastikan efektivitas program pembangunan perumahan serta mendorong perumusan kebijakan yang adaptif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.



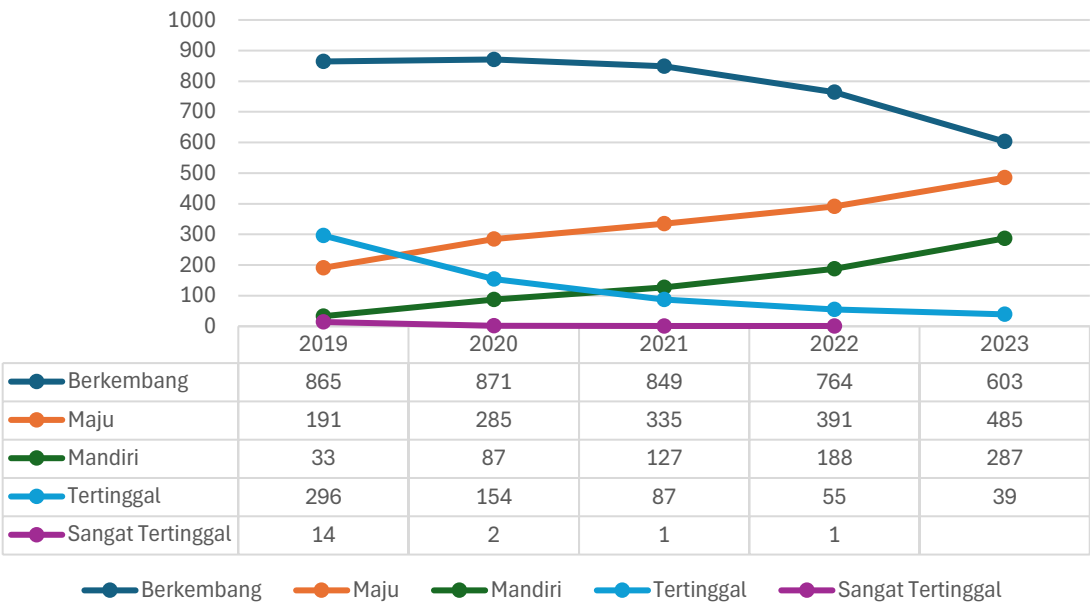
Sumber: BPS Indonesia, 2025  
Gambar 2-68 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Hunian Layak di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Pada tahun 2018, rumah tangga di Provinsi Jambi yang memiliki akses terhadap hunian layak mencapai 95,99 persen, menunjukkan capaian yang sangat baik karena hampir seluruh rumah tangga telah mendapatkan akses tersebut. Namun, pada tahun 2019 terjadi penurunan signifikan menjadi 54,78 persen, dan hingga tahun 2022 angkanya hanya meningkat sedikit menjadi 60,85 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kepadatan penduduk, terbatasnya penyediaan sumber air yang aman, serta rendahnya keterjangkauan masyarakat untuk memiliki rumah, sehingga ke depan pemerintah daerah perlu mengambil langkah strategis melalui kebijakan pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan akses air bersih, dan penguatan ekonomi masyarakat.

2.3.6.2      **Desa Mandiri**

Desa mandiri merupakan desa yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.

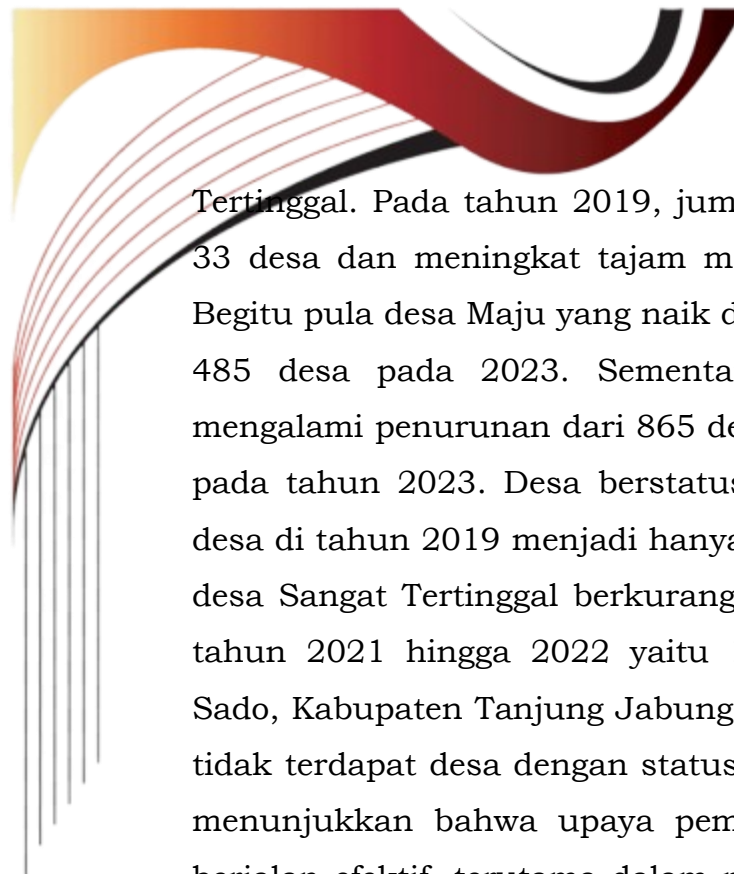
Status ini menunjukkan bahwa desa tersebut telah memiliki kemandirian dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, mampu menyediakan pelayanan dasar yang optimal, serta memiliki tata kelola pemerintahan desa yang baik dan akuntabel. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian desa yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. IDM diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Desa Mandiri merupakan desa dengan tingkat kemandirian dan ketahanan sangat tinggi, sedangkan Desa Maju memiliki ketahanan baik dengan pelayanan dasar yang memadai. Desa Berkembang berada pada tahap transisi dengan ketahanan cukup, sementara Desa Tertinggal memiliki keterbatasan akses layanan dasar. Adapun Desa Sangat Tertinggal adalah desa dengan ketahanan sangat rendah dan memerlukan intervensi pembangunan yang lebih intensif.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi, 2025 (data termutakhir)

Gambar 2-69 Status Indeks Desa Membangun di Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Jambi selama tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan tren positif dan terlihat adanya peningkatan jumlah desa berstatus Mandiri dan Maju, disertai dengan penurunan signifikan desa berstatus Tertinggal dan Sangat

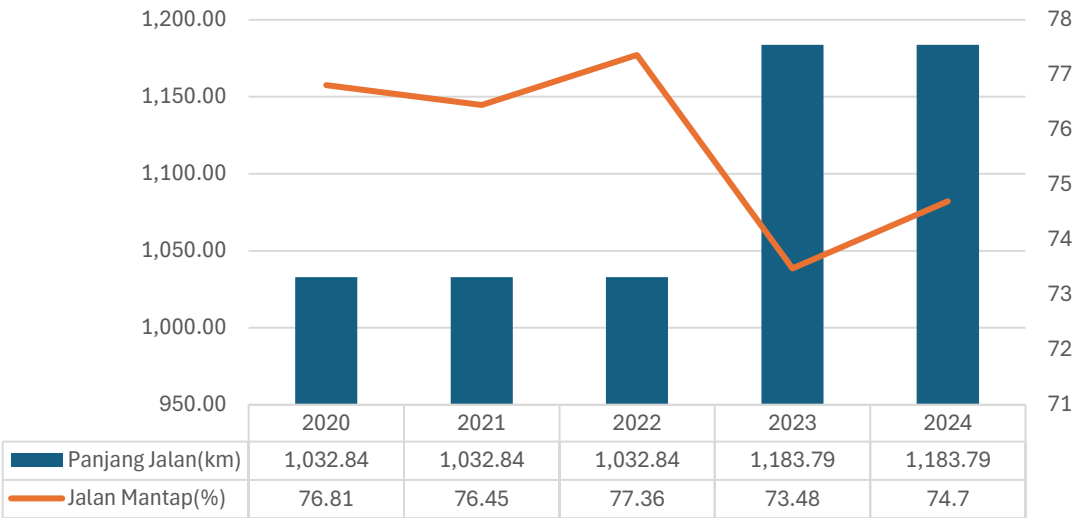


Tertinggal. Pada tahun 2019, jumlah desa Mandiri tercatat sebanyak 33 desa dan meningkat tajam menjadi 287 desa pada tahun 2023. Begitu pula desa Maju yang naik dari 191 desa di tahun 2019 menjadi 485 desa pada 2023. Sementara itu, jumlah desa Berkembang mengalami penurunan dari 865 desa di tahun 2019 menjadi 603 desa pada tahun 2023. Desa berstatus Tertinggal turun drastis dari 296 desa di tahun 2019 menjadi hanya 39 desa di tahun 2023, sedangkan desa Sangat Tertinggal berkurang dari 14 desa menjadi 1 desa pada tahun 2021 hingga 2022 yaitu 1 desa yang berada di Kecamatan Sado, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan pada tahun 2023 sudah tidak terdapat desa dengan status Desa Tertinggal. Perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan desa di Provinsi Jambi berjalan efektif, terutama dalam mengurangi ketertinggalan desa dan mendorong peningkatan status desa ke kategori yang lebih maju dan mandiri. Selain itu, capaian ini mencerminkan keberhasilan program pemerintah daerah dalam memperluas akses layanan dasar, penguatan ekonomi desa, dan peningkatan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan.

#### **2.3.6.3 Proporsi Jalan Kondisi baik**

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mendukung konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, total panjang jalan di Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2020 hingga 2022, panjang jalan tercatat stabil sebesar 1.032,84 kilometer. Kemudian, pada tahun 2023 dan 2024, terjadi peningkatan panjang jalan yang cukup mencolok menjadi 1.183,79 kilometer.





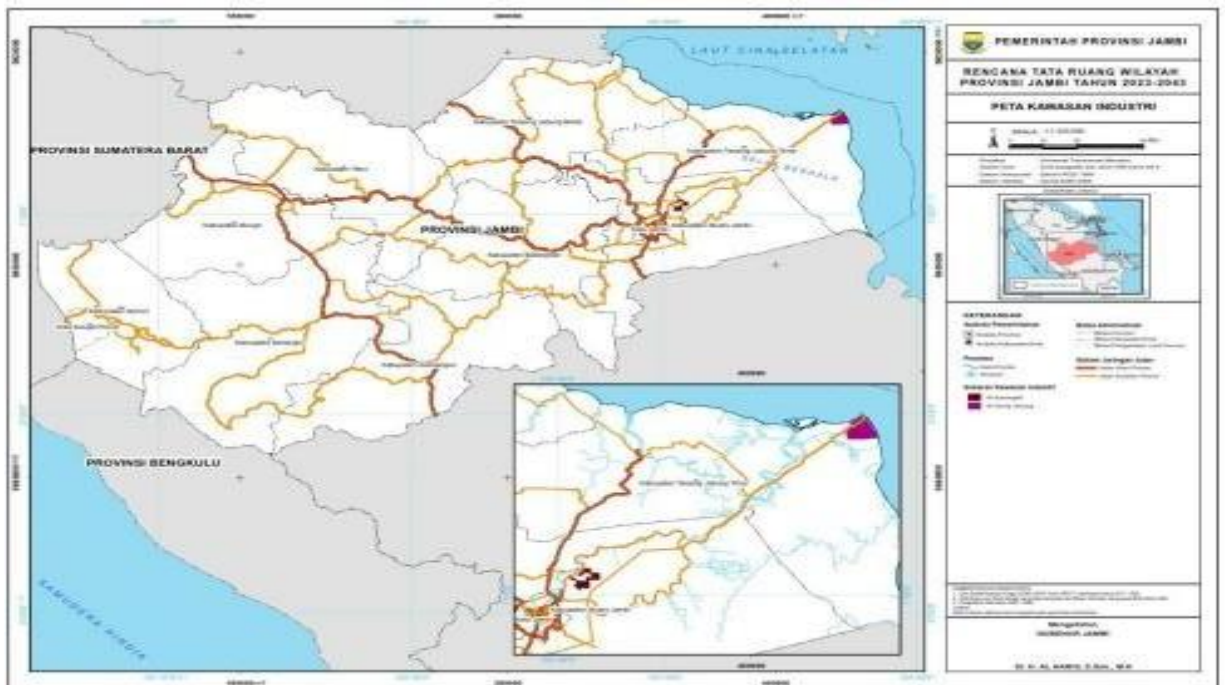
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-70 Kondisi Jalan Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Namun demikian, meskipun terjadi penambahan panjang jalan pada tahun 2023, persentase jalan dalam kondisi mantap justru mengalami penurunan, dari 77,36 persen pada tahun 2022 menjadi 72,04 persen pada tahun 2023. Pada tahun 2024, persentase jalan mantap kembali meningkat menjadi 74,7 persen, menunjukkan adanya upaya perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Penurunan tersebut disebabkan adanya penambahan panjang jalan kewenangan provinsi yang berasal dari pengalihan jalan kabupaten/kota dengan kondisi rusak, sehingga menambah panjang jalan dalam kondisi rusak.

2.3.6.4 **Penataan Ruang**

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043 telah mengatur pola ruang Provinsi Jambi baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.





Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2025.  
 Gambar 2-72 Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi

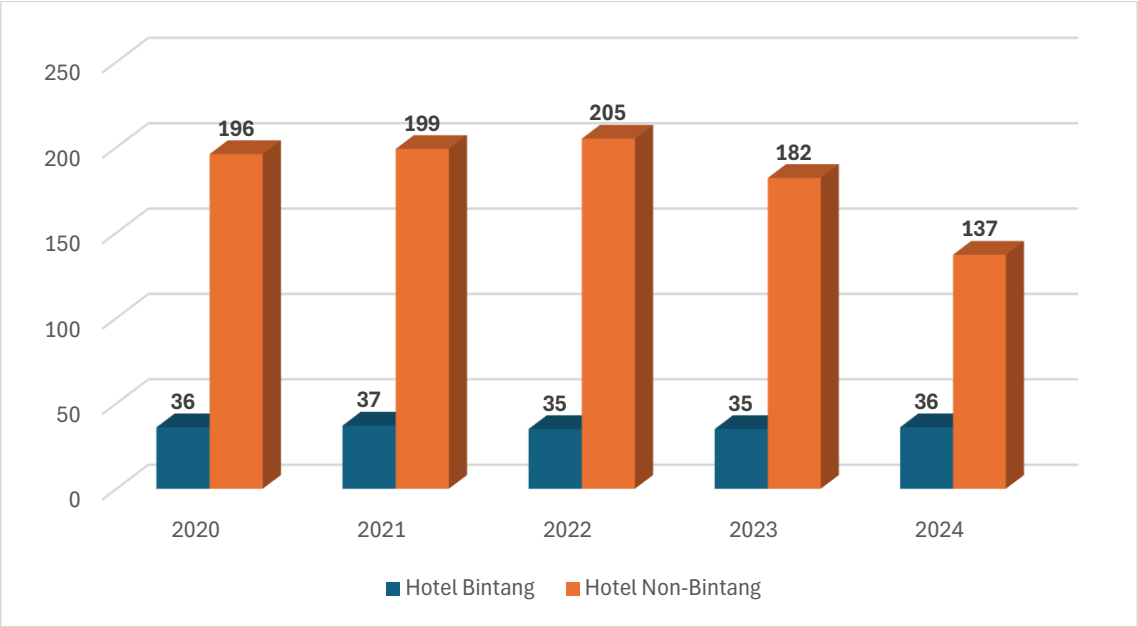
Penetapan Kawasan industri di Provinsi Jambi dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi industri, mendorong kegiatan industri agar berlokasi di kawasan industri, serta menyediakan fasilitas lahan industri yang berwawasan lingkungan. Luas rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Jambi berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan industri seluas kurang lebih 7.139 hektar yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Kawasan peruntukan industri tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota.

**2.3.6.5 Akomodasi Penginapan**

Sektor akomodasi merupakan salah satu indikator penting dalam mendukung pertumbuhan pariwisata dan perekonomian daerah. Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah hotel di Provinsi Jambi menunjukkan dinamika yang fluktuatif, terutama pada kategori hotel non-bintang. Fluktuasi ini mencerminkan sensitivitas sektor akomodasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, mobilitas wisatawan, serta kebijakan tata ruang dan investasi, sehingga

diperlukan pendekatan perencanaan yang adaptif untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing sektor ini di tingkat regional.



Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka 2025, 2025  
Gambar 2-73 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

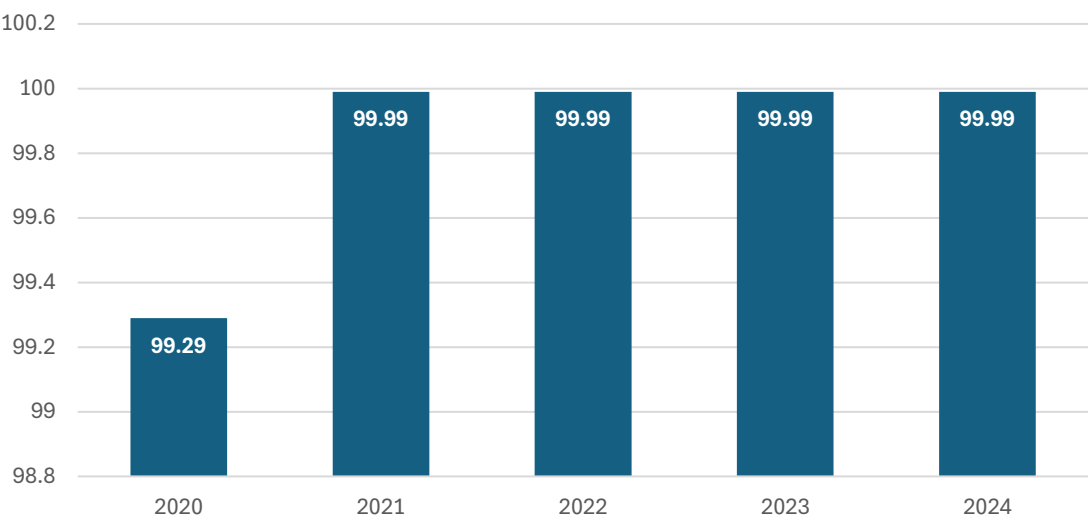
Jumlah hotel bintang cenderung stabil dalam lima tahun terakhir, dengan angka berkisar antara 35 hingga 37 unit. Pada tahun 2020, terdapat 36 hotel bintang, meningkat menjadi 37 unit pada tahun 2021, kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 35 unit pada tahun 2022 dan 2023, sebelum kembali naik ke angka 36 unit pada tahun 2024. Sementara itu, jumlah hotel non-bintang mengalami fluktuasi yang lebih signifikan. Pada tahun 2020 terdapat 196 unit hotel non-bintang, meningkat menjadi 199 unit pada 2021, dan kembali naik menjadi 205 unit pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 jumlahnya menurun drastis menjadi 182 unit dan kembali turun menjadi 137 unit pada tahun 2024.

Penurunan jumlah hotel non-bintang dalam dua tahun terakhir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak pasca pandemi terhadap usaha skala kecil dan menengah, pergeseran preferensi wisatawan, serta proses penyesuaian dan standarisasi usaha akomodasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan yang mendorong pemulihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha akomodasi skala kecil. Di sisi lain, keberadaan hotel bintang yang

relatif stabil mencerminkan konsistensi dalam penyediaan fasilitas yang sesuai standar dan menjadi potensi untuk terus dikembangkan guna meningkatkan daya saing sektor pariwisata daerah.

2.3.6.6 Rasio Ketersediaan Daya Listrik

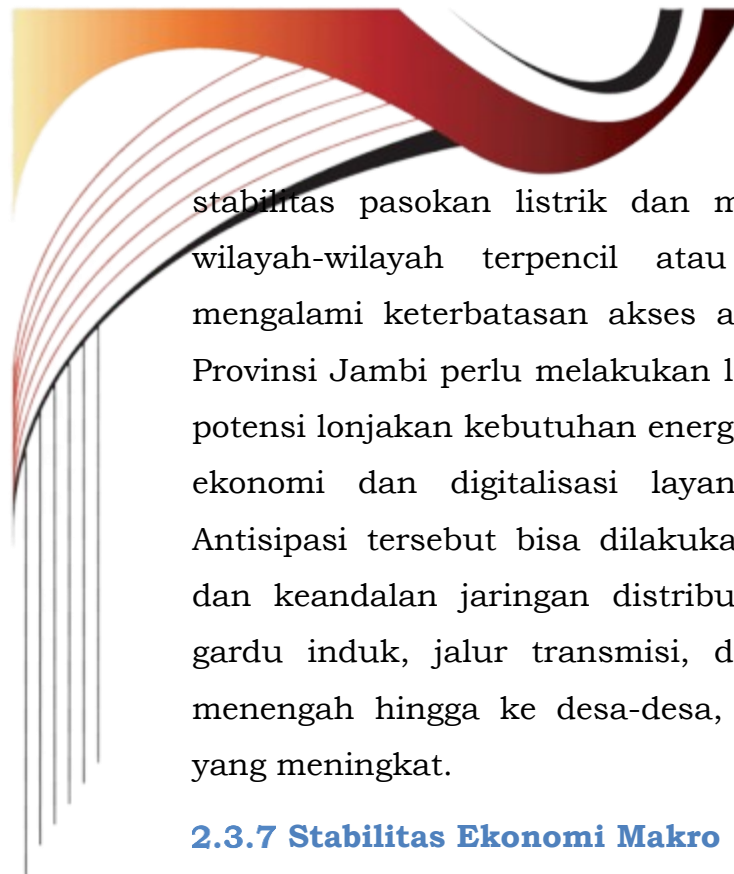
Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.



Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029, 2025  
Gambar 2-74 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki listrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Provinsi Jambi berhasil mencapai rasio elektrifikasi sebesar 99,99 persen dari tahun 2021 dan mempertahankannya hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh wilayah di Provinsi Jambi telah menikmati akses terhadap energi listrik. Peningkatan akses terhadap energi listrik ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Provinsi Jambi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendorong produktivitas ekonomi, serta memperluas akses layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial masyarakat berbasis digital. Namun, Provinsi Jambi perlu untuk menjaga





stabilitas pasokan listrik dan memperluas jangkauan layanan ke wilayah-wilayah terpencil atau pelosok yang mungkin masih mengalami keterbatasan akses atau gangguan keandalan pasokan. Provinsi Jambi perlu melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan kebutuhan energi listrik akibat peningkatan aktivitas ekonomi dan digitalisasi layanan publik di masa mendatang. Antisipasi tersebut bisa dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan keandalan jaringan distribusi listrik, termasuk pembangunan gardu induk, jalur transmisi, dan optimalisasi jaringan tegangan menengah hingga ke desa-desa, guna mengantisipasi beban listrik yang meningkat.

### **2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro**

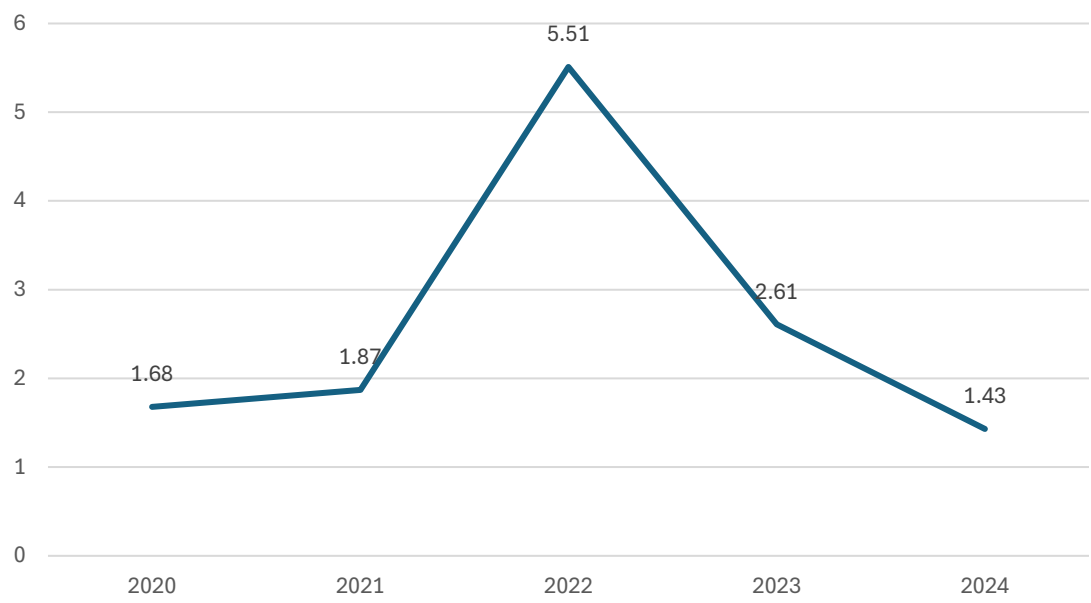
Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkualitas. Dalam konteks Provinsi Jambi, pengelolaan indikator utama seperti inflasi menjadi landasan penting dalam menjaga daya beli masyarakat, mendorong investasi, serta meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi ekonomi makro daerah perlu dilakukan secara berkala dan komprehensif guna memastikan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter di tingkat daerah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi Provinsi Jambi terhadap tekanan global maupun domestik.

#### **2.3.7.1 Inflasi**

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak ke atas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator



lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-75 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

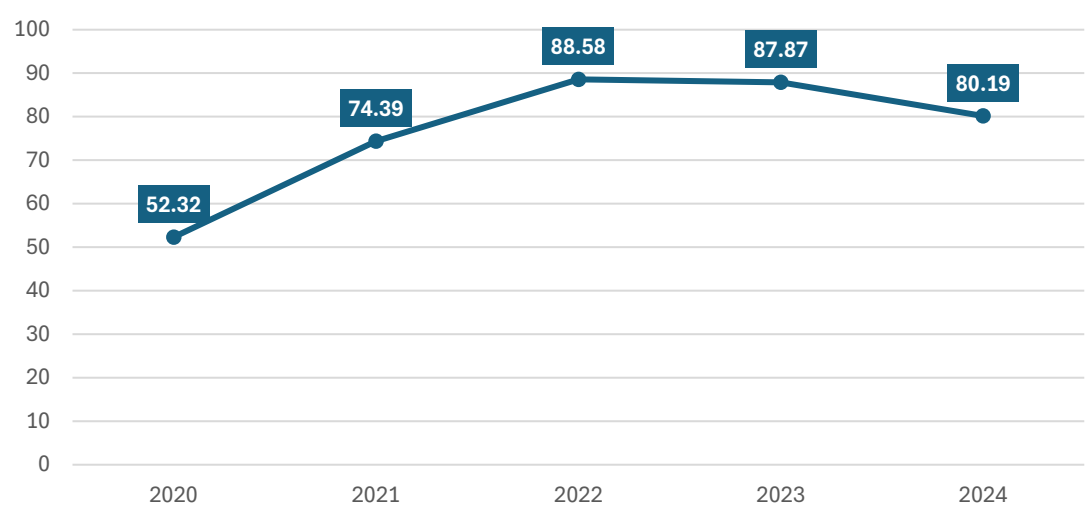
Laju inflasi gabungan kabupaten/kota di provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, yang masing- masing pada tahun 2023 (*yoy*) tercatat sebesar 3,27 persen dan 2,85 persen. Tingginya inflasi di Provinsi Jambi pada tahun 2022 utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi, yaitu pada komoditas bensin, angkutan udara solar, dan cuci kendaraan. Kenaikan harga tarif angkutan udara tersebut diakibatkan kenaikan harga avtur serta kenaikan harga bensin dan solar yang ditetapkan sejak September 2022, di mana harga pertalite pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.000/liter.

Di samping itu, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau juga memberikan andil besar dalam meningkatnya inflasi di tahun 2022, terutama yang didorong oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras dan cabai merah, komoditas beras, rokok kretek filter, rokok kretek, rokok putih, telur ayam ras, dan ikan nila. Kenaikan inflasi dari sub-kelompok Rokok dan Tembakau dikarenakan dampak keberlanjutan dari transmisi kenaikan cukai hasil tembakau di tahun 2022 yang mendorong peningkatan harga komoditas rokok. Kenaikan harga komoditas telur ayam didorong oleh peningkatan biaya produksi

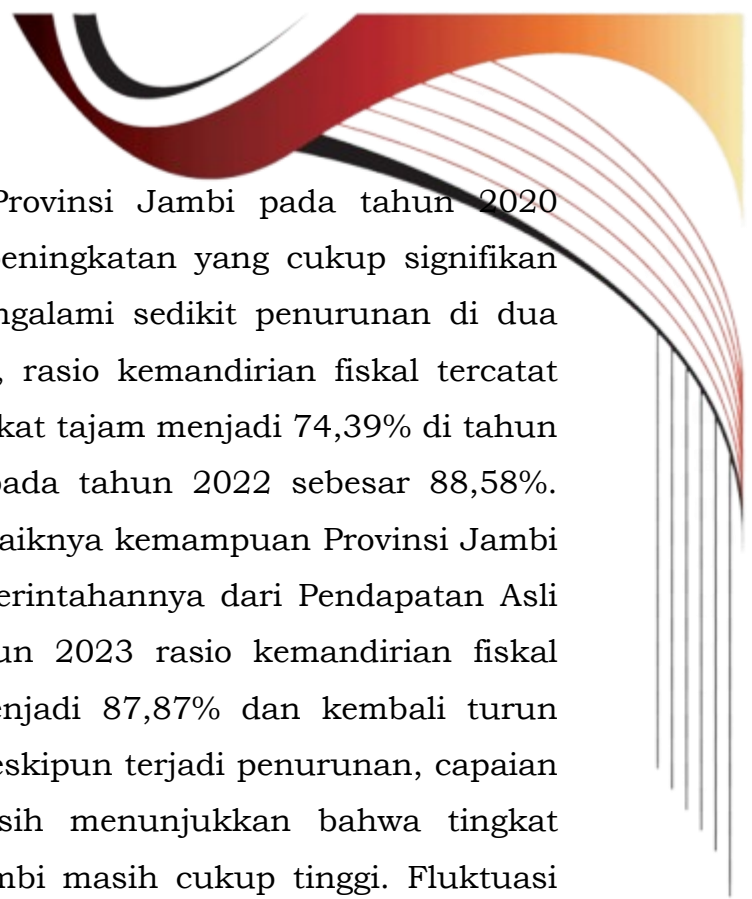
yang mencakup biaya pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA, serta adanya gangguan produksi di beberapa sentra produksi seiring dengan perubahan cuaca.

2.3.7.2 **Kemandirian Fiskal**

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, salah satu indikator penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana dari pemerintah pusat, tetapi juga oleh kapasitas daerah dalam menggali dan memanfaatkan potensi sumber pendapatan asli daerah. Kemampuan kapasitas tersebut dapat dilihat dari kemandirian fiskal yang menjadi instrumen strategis untuk menilai sejauh mana suatu daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer. Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas makroekonomi di tingkat daerah, karena daerah yang mandiri secara fiskal cenderung lebih adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi nasional maupun global. Selain itu, kemampuan daerah dalam menjaga keseimbangan fiskal dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara optimal akan mendukung terciptanya ketahanan ekonomi daerah yang berkontribusi terhadap stabilitas makroekonomi nasional secara keseluruhan.



Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025  
Gambar 2-76 Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi Tahun 2020-2024



Rasio Kemandirian Fiskal Provinsi Jambi pada tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan pada awal periode, meskipun mengalami sedikit penurunan di dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, rasio kemandirian fiskal tercatat sebesar 52,32%, kemudian meningkat tajam menjadi 74,39% di tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 88,58%. Kenaikan ini mencerminkan membaiknya kemampuan Provinsi Jambi dalam membiayai kebutuhan pemerintahannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, pada tahun 2023 rasio kemandirian fiskal sedikit mengalami penurunan menjadi 87,87% dan kembali turun menjadi 80,19% di tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, capaian rasio kemandirian fiskal ini masih menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal di Provinsi Jambi masih cukup tinggi. Fluktuasi yang terjadi mengindikasikan perlunya konsistensi dalam optimalisasi PAD dan penguatan strategi pengelolaan keuangan daerah agar ketahanan fiskal dapat terjaga serta mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

## **2.4. Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum merupakan bagian penting dalam pembangunan daerah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui layanan publik yang berkualitas dan merata. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen memperbaiki akses dan kualitas layanan melalui reformasi birokrasi, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kapasitas aparatur. Inovasi pelayanan publik juga diarahkan untuk menjangkau wilayah terpencil dan tertinggal agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan. Dengan penguatan aspek pelayanan umum, diharapkan tercipta pembangunan Provinsi Jambi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

### **2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

Regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif merupakan faktor strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang, pemerintah daerah dituntut untuk mengembangkan sistem regulasi yang fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus

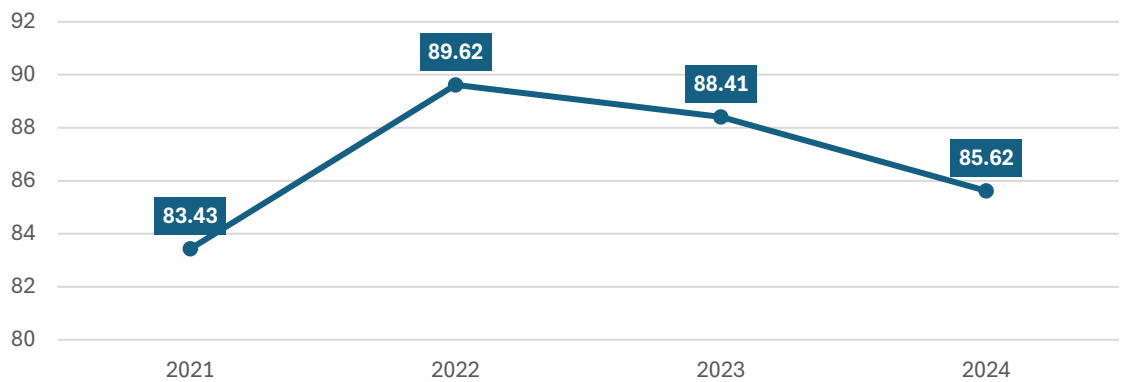
menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Regulasi yang adaptif memberikan kapasitas bagi pemerintah daerah untuk merespons tantangan serta memanfaatkan peluang pembangunan secara tepat waktu, termasuk dalam konteks percepatan digitalisasi layanan publik. Sementara itu, integritas dalam tata kelola pemerintahan menjadi fondasi utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

**Tabel 2-19 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Jambi Tahun 2021-2024**

| Keterangan  | Tahun   |         |        |        |
|-------------|---------|---------|--------|--------|
|             | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   |
| Indeks SPBE | 2,21    | 2,19    | 3,31   | 3,05   |
|             | (Cukup) | (Cukup) | (Baik) | (Baik) |

*Sumber: SK Kemenpan RB, 2025.*

Kinerja tata kelola dan pelayanan publik dapat tercermin melalui capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Jambi menunjukkan tren fluktuatif selama periode tahun 2021–2023. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 2,21 dan mengalami sedikit penurunan menjadi 2,19 pada tahun 2022. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis digital, baik dari segi infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, maupun integrasi layanan elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Namun demikian, pada tahun 2023, capaian indeks SPBE Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai angka 3,31. Namun, Indeks SPBE Provinsi Jambi tahun 2024 sedikit mengalami penurunan menjadi 3,05 dengan predikat "Baik" yang masih sama seperti tahun sebelumnya. Meskipun sedikit mengalami penurunan, nilai indeks SPBE yang meningkat signifikan pada tahun 2023 menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola layanan digital pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kebijakan layanan elektronik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.



Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2021-2024, 2025  
Gambar 2-77 Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi Tahun 2021-2024

Selain indeks SPBE, tata kelola yang baik dapat dilihat melalui indeks pelayanan publik. Indeks Pelayanan Publik adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi menunjukkan dinamika capaian selama periode tahun 2021–2024. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 83,43 dan mengalami peningkatan signifikan menjadi 89,62 pada tahun 2022. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat, baik dari aspek kecepatan, kejelasan prosedur, hingga kenyamanan pelayanan. Namun, pada tahun 2023 nilai indeks sedikit menurun menjadi 88,41 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 85,62. Fluktuasi ini mengindikasikan perlunya konsistensi dan penguatan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik yang adaptif, berintegritas, serta berbasis kebutuhan masyarakat.

**2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial**

Hukum berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan demokrasi substansial merupakan elemen strategis dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan umum yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi tersebut terwujud di tingkat daerah, dapat dilihat capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada masing-masing daerah. IDI mengukur perkembangan demokrasi melalui tiga

aspek pokok diantaranya kebebasan sipil, hak-hak politik, dan efektivitas lembaga demokrasi dengan rentang skor 0–100, di mana semakin tinggi nilai menunjukkan semakin kuatnya praktik demokrasi.

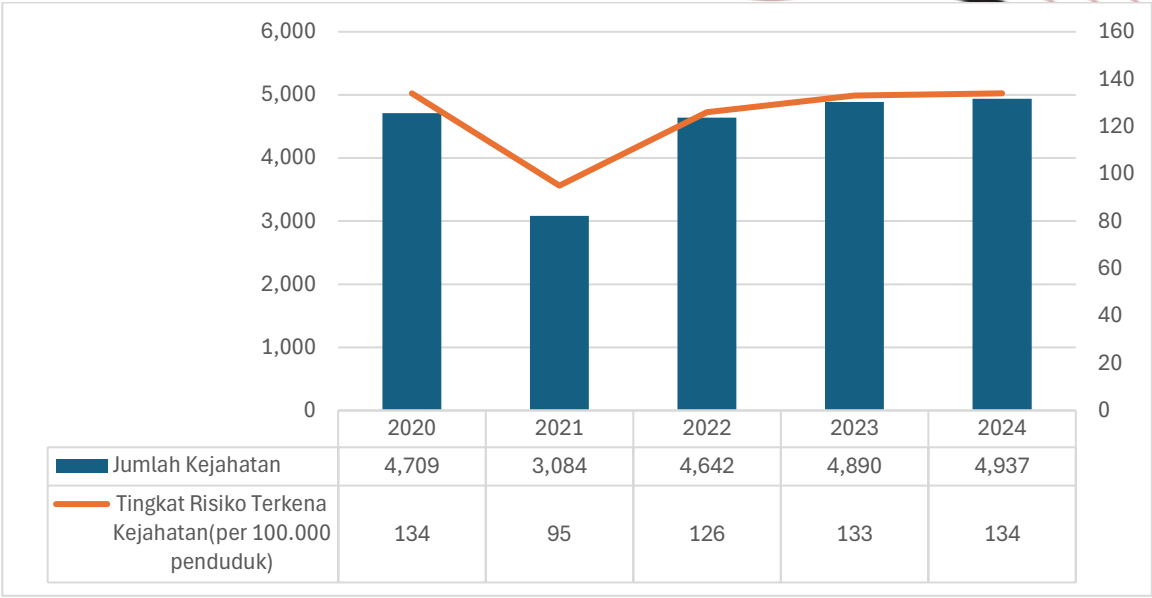
**Tabel 2-20 Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jambi Tahun 2021-2023**

| Keterangan       | Tahun |       |       |
|------------------|-------|-------|-------|
|                  | 2021  | 2022  | 2023  |
| Indeks Demokrasi | 72,91 | 77,19 | 74,47 |

*Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025*

Indeks Demokrasi Indonesia untuk Provinsi Jambi selama tahun 2021–2023 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Pada tahun 2021, IDI Provinsi Jambi tercatat sebesar 72,91 dan mengalami peningkatan menjadi 77,19 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi di daerah, yang ditunjukkan melalui peningkatan partisipasi politik masyarakat, kebebasan sipil, serta kualitas lembaga demokrasi di tingkat lokal. Namun demikian, pada tahun 2023, nilai IDI Provinsi Jambi mengalami penurunan menjadi 74,47. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi kualitas demokrasi di daerah, khususnya dalam aspek-aspek tertentu seperti perlindungan hak-hak politik warga negara, efektivitas pengawasan terhadap lembaga pemerintahan, serta ruang partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang partisipatif, inklusif, dan akuntabel perlu terus ditingkatkan guna memastikan keberlanjutan praktik demokrasi yang sehat dan berdaya saing di Provinsi Jambi.





Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

**Gambar 2-78 Jumlah Kejahatan dan Tingkat Resiko Terkena Kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

Aspek keamanan sebagai bagian dari pelayanan publik juga menjadi perhatian penting, khususnya dalam upaya mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat. Selama periode tahun 2020 hingga 2024, jumlah tindak kejahatan di Provinsi Jambi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.709 kasus kejahatan dengan tingkat risiko terkena kejahatan sebesar 134 per 100.000 penduduk. Jumlah ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 3.084 kasus dengan tingkat risiko sebesar 95 per 100.000 penduduk, yang merupakan angka terendah selama periode pengamatan. Namun demikian, tren tersebut kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, jumlah kejahatan meningkat menjadi 4.642 kasus dengan tingkat risiko sebesar 126 per 100.000 penduduk. Kenaikan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan tercatat sebanyak 4.890 kasus dan tingkat risiko sebesar 133 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2024, jumlah kejahatan kembali meningkat menjadi 4.937 kasus dengan tingkat risiko sebesar 134 per 100.000 penduduk, yang mencerminkan angka yang sama dengan tahun 2020. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan pada awal periode, upaya pengendalian kriminalitas masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan tren penurunan secara konsisten.

Data ini menunjukkan perlunya penguatan strategi keamanan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Provinsi Jambi.

**2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan**

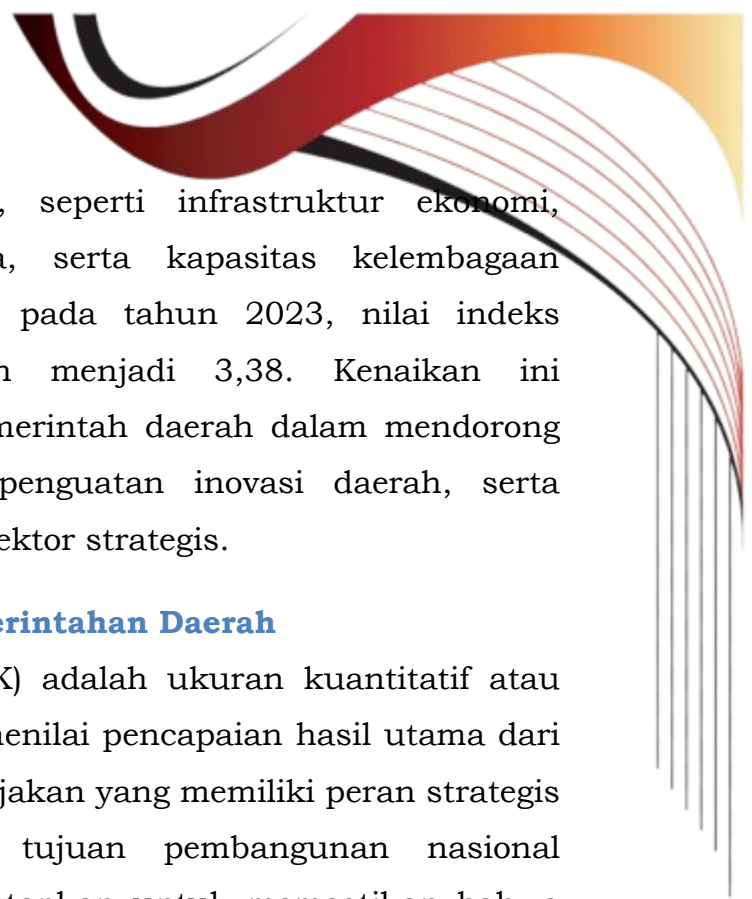
Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar di kawasan merupakan komponen strategis dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus memperkuat posisi daerah. Ketangguhan diplomasi dan pertahanan yang berdaya gentar di kawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik pertahanan maupun strategi hubungan antarwilayah, tetapi juga tercermin dari kondisi daya saing suatu daerah. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjadi salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana ketangguhan tersebut terbentuk. Nilai IDSD mencerminkan kapasitas daerah dalam membangun stabilitas ekonomi, kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta efektivitas tata kelola pemerintahan yang berdaya saing tinggi. Semakin tinggi nilai indeks ini, semakin kuat pula posisi daerah dalam menghadapi tantangan eksternal, menjaga kedaulatan ekonomi, dan memperluas jejaring kerjasama antarwilayah maupun antarnegara di kawasan. Dengan demikian, IDSD tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kinerja pembangunan daerah, tetapi juga sebagai cerminan ketahanan diplomasi dan pertahanan daerah yang adaptif dan responsif terhadap dinamika geopolitik dan ekonomi regional.

Tabel 2-21 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| Keterangan               | Tahun  |      |      |      |      |
|--------------------------|--------|------|------|------|------|
|                          | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Indesk Daya Saing Daerah | 3,0615 | NA   | 2,99 | 3,25 | 3,38 |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

IDSD Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2021–2023. Pada tahun 2021, nilai indeks tercatat sebesar 2,99 dan mengalami kenaikan menjadi 3,25 pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang



mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Selanjutnya, pada tahun 2023, nilai indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 3,38. Kenaikan ini mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong iklim investasi yang kondusif, penguatan inovasi daerah, serta peningkatan produktivitas sektor-sektor strategis.

#### **2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah**

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian hasil utama dari suatu program, kegiatan, atau kebijakan yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah. Indikator ini ditetapkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat terukur capaian kinerjanya secara objektif, sistematis, dan berkesinambungan. Melalui IKK, pemerintah dapat memantau efektivitas pelaksanaan program, mengevaluasi keberhasilan kebijakan, serta menentukan arah perbaikan dalam siklus perencanaan dan penganggaran berikutnya. Selain itu, IKK juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pencapaian hasil pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Tabel 2-22 Capaian Indikator Kinerja Kunci Provinsi Jambi Tahun 2022-2024

| No                           | Indikator Kinerja Daerah                                                                                           | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |      |      | Persentase Capaian |         |         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------------------|---------|---------|
|                              |                                                                                                                    |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023 | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
| ASPEK PELAYANAN UMUM         |                                                                                                                    |        |                             |      |      |      |      |           |      |      |                    |         |         |
| Fokus Pelayanan Urusan Wajib |                                                                                                                    |        |                             |      |      |      |      |           |      |      |                    |         |         |
| 1                            | Kesehatan                                                                                                          |        |                             |      |      |      |      |           |      |      | 100,00%            | 75,55%  | 100,00% |
| 1.1                          | Persentase RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi                                                                  | %      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 1.2                          | Persentase FKTP yang terakreditasi                                                                                 | %      | -                           | -    | 100  | 100  | 100  | -         | 100  | 100  |                    | 100%    | 100,00% |
| 1.3                          | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | %      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 1.4                          | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)       | %      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                           | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |       |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|-------|------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                                    |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025  | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 1.5 | Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar                | %      | 40                          | 43   | 46   | 48    | 50   | 50,24     | 50,24 | 68,75 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 1.6 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan                                             | Rasio  | 0,2                         | 0,24 | 1,24 | 1,28  | 1,32 | 1,38      | 1,33  | 1,27  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 1.7 | Rasio Puskesmas per Kecamatan                                                      | Rasio  | -                           | -    | 0,95 | 0,97  | 1    | -         | -     | 0,99  |                    |         | 100,00% |
| 1.8 | Persentase cakupan universal health coverage Provinsi Jambi                        | %      | 80                          | 83   | 93   | 94    | 95   | 80,24     | 87,15 | 93,88 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 1.9 | Jumlah Kabupaten/Kota Sehat                                                        | Jumlah | -                           | -    | 7    | 7     | 8    | -         | -     | 8     |                    |         | 100,00% |
| 2   | Pendidikan                                                                         |        |                             |      |      |       |      |           |       |       | 82,70%             | 77,46%  | 86,04%  |
| 2.1 | Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum | %      | 59,2                        | 60,2 | -    | -     | -    | 41,43     | 41,42 | -     | 69,98%             | 68,80%  | -       |
| 2.2 | Rata-rata Kompetensi Literasi SMA Berdasarkan                                      | %      | -                           | -    | 66,2 | 66,35 | 66,5 | 60,51     | 67,16 | 70,1  | -                  | -       | 100,00% |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                           | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                                    |        | 2022                        | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
|     | Asesmen Nasional                                                                   |        |                             |      |       |       |       |           |       |       |                    |         |         |
| 2.3 | Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum | %      | 28,3                        | 29,2 | -     | -     | -     | 36,35     | 35,83 | -     | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 2.4 | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMA Berdasarkan Asesmen Nasional                     | %      | -                           | -    | 55,53 | 55,68 | 55,83 | 51,62     | 56,69 | 60,05 | -                  | -       | 100,00% |
| 2.5 | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional                     | %      | -                           | -    | 62,87 | 63,02 | 63,17 | 57,01     | 63,17 | 64,73 | -                  | -       | 100,00% |
| 2.6 | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK Berdasarkan Asesmen Nasional                     | %      | -                           | -    | 53,13 | 53,28 | 53,43 | 49,39     | 53,87 | 56,19 | -                  | -       | 100,00% |
| 2.7 | Rata-rata Kompetensi Literasi SDLB, Berdasarkan Asesmen Nasional                   | %      | -                           | -    | 56,75 | 56,9  | 57,05 | 50,84     | 52,73 | 60,42 | -                  | -       | 100,00% |



| No   | Indikator Kinerja Daerah                                          | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |      |         |
|------|-------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|------|---------|
|      |                                                                   |        | 2022                        | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023 | 2024    |
| 2.8  | Rata-rata Kompetensi Numerasi SDLB Berdasarkan Asesmen Nasional   | %      | -                           | -    | 45,2  | 45,35 | 45,5  | 41,47     | 45,58 | 54,07 | -                  | -    | 100,00% |
| 2.9  | Rata-rata Kompetensi Literasi SMPLB, Berdasarkan Asesmen Nasional | %      | -                           | -    | 62,82 | 62,97 | 63,12 | 56,66     | 50,75 | 55,53 | -                  | -    | 88,40%  |
| 2.10 | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMPLB Berdasarkan Asesmen Nasional  | %      | -                           | -    | 54,24 | 54,39 | 54,54 | 49,98     | 52,39 | 53,55 | -                  | -    | 98,73%  |
| 2.11 | Rata-rata Kompetensi Literasi SMALB, Berdasarkan Asesmen Nasional | %      | -                           | -    | 51,47 | 51,62 | 51,77 | 45,88     | 47,77 | 57,69 | -                  | -    | 100,00% |
| 2.12 | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMALB Berdasarkan Asesmen Nasional  | %      | -                           | -    | 52,2  | 52,35 | 52,5  | 48,31     | 49,55 | 57,91 | -                  | -    | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                        | Satuan  | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |        |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--------|
|      |                                                                                                 |         | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023   | 2024   |
| 2.13 | Persentase sekolah menengah negeri yang terakreditasi                                           | %       | 99,63                       | 100  | 100  | 100  | 100  | 98,87     | 97,8  | 98,9  | 99,24%             | 97,80% | 98,90% |
| 2.14 | Persentase satuan pendidikan khusus yang terakreditasi                                          | %       | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 90        | 79,17 | 83,33 | 90,00%             | 79,17% | 83,33% |
| 2.15 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun dalam pendidikan menengah                     | %       | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 72,51     | 72,46 | 72,46 | 72,51%             | 72,46% | 72,46% |
| 2.16 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-20 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus | %       | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 29,84     | 59,78 | -     | 29,84%             | 59,78% | -      |
| 2.17 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus | %       | -                           | -    | 100% | 100% | 100% | -         | -     | 59,78 | -                  | -      | 59,78% |
| 2.18 | Jumlah SMK                                                                                      | sekolah | 25                          | 28   | 28   | 28   | 28   | 26        | 21    | 27    | 100,00%            | 75,00% | 96,43% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah              | Satuan  | Target Capaian Setiap Tahun |      |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |        |        |
|------|---------------------------------------|---------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|--------|
|      |                                       |         | 2022                        | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023   | 2024   |
|      | Negeri yang terevitalisasi            |         |                             |      |       |       |       |           |       |       |                    |        |        |
| 2.19 | Jumlah SLB Negeri yang terevitalisasi | sekolah | 3                           | 3    | 5     | 5     | 5     | 11        | 2     | 2     | 100,00%            | 66,67% | 40,00% |
| 2.20 | Indeks Iklim Keamanan SMA             |         | -                           | -    | 87,35 | 87,5  | 87,65 | -         | 71,43 | 70,95 | -                  | -      | 81,22% |
| 2.21 | Indeks Iklim Kebinekaan SMA           |         | -                           | -    | 89,52 | 89,67 | 89,82 | -         | 72,42 | 71,08 | -                  | -      | 79,40% |
| 2.22 | Indeks Inklusivitas SMA               |         | -                           | -    | 83,93 | 84,08 | 84,23 | -         | 57,49 | 58,85 | -                  | -      | 70,12% |
| 2.23 | Indeks Iklim Keamanan SMK             |         | -                           | -    | 84,32 | 84,47 | 84,62 | -         | 67,72 | 67,46 | -                  | -      | 80,00% |
| 2.24 | Indeks Iklim Kebinekaan SMK           |         | -                           | -    | 87,06 | 87,21 | 87,36 | -         | 69,07 | 68,65 | -                  | -      | 78,85% |
| 2.25 | Indeks Inklusivitas SMK               |         | -                           | -    | 79,69 | 79,84 | 79,99 | -         | 54,74 | 55,33 | -                  | -      | 69,43% |
| 2.26 | Indeks Iklim Keamanan SDLB            |         | -                           | -    | 85,32 | 85,47 | 85,62 | -         | 72,41 | 74,38 | -                  | -      | 87,18% |
| 2.27 | Indeks Iklim Kebinekaan SDLB          |         | -                           | -    | 92,02 | 92,17 | 92,32 | -         | 65,16 | 65,23 | -                  | -      | 70,89% |
| 2.28 | Indeks Inklusivitas SDLB              |         | -                           | -    | 84,82 | 84,97 | 85,12 | -         | 58,71 | 64,31 | -                  | -      | 75,82% |
| 2.29 | Indeks Iklim Keamanan SMPLB           |         | -                           | -    | 79,04 | 79,19 | 79,34 | -         | 63,46 | 65,28 | -                  | -      | 82,59% |
| 2.30 | Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB         |         | -                           | -    | 70,89 | 71,04 | 71,19 | -         | 63,43 | 66,62 | -                  | -      | 93,98% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                   | Satuan               | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                            |                      | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 2.31 | Indeks Inklusivitas SMPLB                                                                  |                      | -                           | -     | 76,76 | 76,91 | 77,06 | -         | 55,78 | 62,62 | -                  | -       | 81,58%  |
| 2.32 | Indeks Iklim Keamanan SMALB                                                                |                      | -                           | -     | 74,01 | 74,16 | 74,31 | -         | 59,63 | 69,18 | -                  | -       | 93,47%  |
| 2.33 | Indeks Iklim Kebinekaan SMALB                                                              |                      | -                           | -     | 70,43 | 70,58 | 70,73 | -         | 61,79 | 68,82 | -                  | -       | 97,71%  |
| 2.34 | Indeks Inklusivitas SMALB                                                                  |                      | -                           | -     | 72,59 | 72,74 | 72,89 | -         | 58,48 | 63,18 | -                  | -       | 87,04%  |
| 3    | Sosial                                                                                     | 83,60% 83,32% 71,42% |                             |       |       |       |       |           |       |       |                    |         |         |
| 3.1  | Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan | %                    | 72,72                       | 81,81 | 100   | 100   | 100   | 72,72     | 81,81 | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 3.2  | Peningkatan kapasitas bagi pekerja sosial masyarakat (PSM)                                 | orang                | 40                          | 40    | 40    | 50    | 50    | 35        | 35    | 50    | 87,50%             | 87,50%  | 100,00% |
| 3.3  | peningkatan kapasitas bagi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)                    | orang                | 40                          | 40    | 40    | 50    | 50    | 141       | 142   | 141   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 3.4  | layanan data dan pengaduan                                                                 | %                    | 72,72                       | 81,81 | 90,9  | 100   | 100   | 72,72     | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                              | Satuan  | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Realisasi |        |         | Persentase Capaian |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|--------|---------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                       |         | 2022                        | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2022      | 2023   | 2024    | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | yang dimiliki                                                         |         |                             |         |         |         |         |           |        |         |                    |         |         |
| 3.5  | Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan                      | badan   | 28                          | 33      | 40      | 40      | 40      | 28        | 33     | 33      | 100,00%            | 100,00% | 82,50%  |
| 3.6  | bantuan Sosial Ekonomi Produktif bagi fakir miskin                    | KPM     | 110                         | 220     | 60      | 120     | 120     | 412       | 460    | 50      | 100,00%            | 100,00% | 83,33%  |
| 3.7  | keluarga yang mendapat bantuan sosial bersyarat                       | KPM     | 102.103                     | 102.103 | 102.103 | 102.103 | 102.103 | 102,785   | 93.018 | 102.925 | 0,10%              | 91,10%  | 100,00% |
| 3.8  | Peningkatan kapasitas pendamping PKH                                  | orang   | 44                          | 44      | 44      | 44      | 44      | 569       | 512    | 512     | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 3.9  | Peningkatan kualitas pelayanan lembaga di bidang kesos                | lembaga | 5                           | 5       | 5       | 5       | 5       | 12        | 5      | 5       | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 3.10 | Jumlah Korban Bencana alam yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar | jiwa    | 3.332                       | 3.332   | 3.332   | 3.332   | 3.332   | 6.630     | 106390 | 1487    | 100,00%            | 100,00% | 44,63%  |
| 3.11 | Jumlah warga masyarakat rawan bencana alam yang                       | jiwa    | 550                         | 550     | 150     | 150     | 150     | 1573      | 315    | 150     | 100,00%            | 57,27%  | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                      | Satuan   | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |      |      | Persentase Capaian |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                               |          | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023 | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | mendapatkan kesiapsiagaan dan mitigasi                                                        |          |                             |      |      |      |      |           |      |      |                    |         |         |
| 3.12 | jumlah kelompok masyarakat di lokasi rawan bencana yang mendapatkan pencegahan konflik sosial | kelompok | 10                          | 10   | 3    | 3    | 3    | 3         | 2    | 3    | 30,00%             | 20,00%  | 100,00% |
| 3.13 | Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang siap ditugaskan                                         | Orang    | 20                          | 20   | 20   | 20   | 20   | 20        | 20   | 20   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 3.14 | persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti  | %        | 1,8                         | 0,92 | 100  | 100  | 100  | 1,44      | 1,8  | 2,03 | 100,00%            | 51,11%  | 2,03%   |
| 3.15 | Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti                    | %        | 0,11                        | 0,22 | 100  | 100  | 100  | 0,28      | 0,38 | 0,17 | 100,00%            | 100,00% | 0,17%   |
| 3.16 | persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan                                     | %        | 0,35                        | 0,36 | 100  | 100  | 100  | 0,7       | 0,44 | 0,38 | 100,00%            | 100,00% | 0,38%   |



| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                             | Satuan                 | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |      |      | Persentase Capaian |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                      |                        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023 | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | dasarnya di dalam panti                                                              |                        |                             |      |      |      |      |           |      |      |                    |         |         |
| 3.17 | Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti | %                      | 15,6                        | 15,6 | 100  | 100  | 100  | 0,55      | 1,47 | 1,1  | 3,53%              | 9,42%   | 1,10%   |
| 4    | Trantibum dan Perlindungan Masyarakat                                                | 88,70% 100,00% 100,00% |                             |      |      |      |      |           |      |      |                    |         |         |
| 4.1  | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan                                | %                      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 4.2  | Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan                                         | %                      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 43,48     | 100  | 100  | 43,48%             | 100,00% | 100,00% |
| 4.3  | Persentase penanganan pra bencana                                                    | %                      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | -    | 100,00%            | -       | -       |
| 4.4  | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana                           | %                      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | -    | 100,00%            | -       | -       |
| 4.5  | Persentase pendampingan penanganan                                                   | %                      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | -    | 100,00%            | -       | -       |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                  | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |       |        | Realisasi |        |        | Persentase Capaian |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|-------|--------|-----------|--------|--------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                           |        | 2022                        | 2023   | 2024   | 2025  | 2026   | 2022      | 2023   | 2024   | 2022               | 2023    | 2024    |
|     | pasca bencana                                                             |        |                             |        |        |       |        |           |        |        |                    |         |         |
| 5   | PU dan Penataan Ruang                                                     |        |                             |        |        |       |        |           |        |        | 99,30%             | 93,97%  | 90,93%  |
| 5.1 | Persentase luas sawah beririgasi                                          | %      | 78                          | 79,5   | 81     | 82,5  | 84     | 79,65     | NA     | 62,80  | 100,00%            |         | 77,53%  |
| 5.2 | Persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap                            | %      | 79,6                        | 83,231 | 82,243 | 83,87 | 85,245 | 77,36     | 72,036 | 74,70  | 97,19%             | 86,55%  | 90,83%  |
| 5.3 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | %      | 79,08                       | 83,92  | 83,92  | 85    | 87     | 80        | 80,02  | 80,02  | 100,00%            | 95,35%  | 95,35%  |
| 5.4 | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak  | %      | 78,45                       | 81,44  | 81,44  | 82,08 | 82,94  | 79,54     | 83,04  | 83,04  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 6   | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                   |        |                             |        |        |       |        |           |        |        | 100,00%            | 100,00% | 50,00%  |
| 6.1 | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni   | %      | 100                         | 100    | 100    | 100   | 100    | 100       | 100    | 224,49 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                           | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |      |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|------|------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                                    |        | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 6.2 | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | %      | 100                         | 100   | 100   | 100  | 100  | 100       | 100   | 0     | 100,00%            | 100,00% | 0,00%   |
| 7   | Tenaga Kerja                                                                                                                                       |        |                             |       |       |      |      |           |       |       | 75,37%             | 90,93%  | 91,05%  |
| 7.1 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                                                                                                                 | %      | 69,18                       | 69,49 | 69,85 | 70   | 71   | 67,84     | 68,75 | 68,87 | 98,06%             | 98,94%  | 98,60%  |
| 7.2 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                                                                       | %      | 5,11                        | 4,61  | 4,56  | 4,39 | 4,2  | 4,59      | 4,53  | 4,48  | 89,82%             | 98,26%  | 98,25%  |
| 7.3 | Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker                                                                                                      | %      | 58,45                       | 12,2  | 12,4  | 12,6 | 12,8 | 16,32     | 43    | 41    | 27,92%             | 100,00% | 100,00% |
| 7.4 | Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan                                                                                                 | %      | 24,5                        | 9,7   | 9,8   | 9,9  | 10   | 15,13     | 15,13 | 15,76 | 61,76%             | 100,00% | 100,00% |
| 7.5 | Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya                                                                                                     | orang  | 985                         | 1200  | 1300  | 1400 | 1600 | 900       | 1100  | 1350  | 91,37%             | 91,67%  | 100,00% |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                    | Satuan             | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |      |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------|-------|------|------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                                                                                                             |                    | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 7.6 | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri                                                                                                        | orang              | 5000                        | 5000  | 5000  | 5000 | 5000 | 1702      | 1930  | 2027  | 34,04%             | 38,60%  | 40,54%  |
| 7.7 | Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online                                                                                 | %                  | 62                          | 65    | 67    | 71   | 75   | 64        | 67    | 68    | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 7.8 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | %                  | 87,88                       | 88    | 88,5  | 88,7 | 90   | 88,35     | 97,68 | NA    | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 8   | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                                                                                                                | 99,04%97,86%97,93% |                             |       |       |      |      |           |       |       |                    |         |         |
| 8.1 | Persentase ARG pada belanja APBD                                                                                                                            | %                  | 75                          | 75    | 75    | 75   | 75   | 75        | 71,36 | 75    | 100,00%            | 95,15%  | 100,00% |
| 8.2 | Indeks Pemberdayaan Gender                                                                                                                                  | Indeks             | 67,78                       | 69,02 | 70,05 | 71,5 | 73   | 65,93     | 67,86 | 67,86 | 97,27%             | 98,32%  | 96,87%  |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                                 | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |      |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|------|------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                                          |        | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 8.3 | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif     | %      | 100                         | 100   | 100   | 100  | 100  | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 8.4 | Indeks perlindungan anak (IPA)                                                           | %      | 67                          | 67,62 | 69,87 | 70   | 70   | 66,26     | 66,26 | 66,26 | 98,90%             | 97,99%  | 94,83%  |
| 9   | Pangan                                                                                   |        |                             |       |       |      |      |           |       |       |                    | 93,63%  | 91,76%  |
| 9.1 | Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan:                                                      |        |                             |       |       |      |      |           |       |       |                    |         |         |
|     | Skor PPH                                                                                 | -      | 92,5                        | 93,2  | 95,2  | 95,2 | 95,5 | 93,4      | 93,1  |       | 100,00%            | 99,89%  |         |
|     | Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | %      | 2,5                         | 2,5   | 2,5   | 2,5  | 2,5  | 88,24     | -     | -     | 100,00%            | -       | -       |
|     | Persentase pangan segar asal hewan yang memenuhi syarat mutu dan keamanan pangan         | %      | 85                          | 85    | 85    | 85   | 85   | -         | -     | -     | -                  | -       | -       |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                 | Satuan    | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        | Realisasi |          |      | Persentase Capaian |         |        |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|----------|------|--------------------|---------|--------|
|     |                                                          |           | 2022                        | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2022      | 2023     | 2024 | 2022               | 2023    | 2024   |
| 9.2 | Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan:                 |           |                             |        |        |        |        |           |          |      |                    |         |        |
|     | Persentase penduduk beresiko rawan pangan                | %         | 7,5                         | 6,5    | 5,5    | 4,5    | 3,5    | 12,14     | 12,83    | -    | 61,78%             | 50,66%  | -      |
|     | Desa Mandiri Pangan                                      | Desa      | 31                          | 41     | 51     | 61     | 71     | 31        | 41       | -    | 100,00%            | 100,00% | -      |
|     | Persentase peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah | %         | 19,61                       | 19,61  | 19,61  | 20,42  | 20,4   | 70,07     | 233,1    | -    | 100,00%            | 100,00% | -      |
|     | Persentase daerah rentan rawan pangan                    | %         | 7,5                         | 6,5    | 5,5    | 4,5    | 3,5    |           | 2,99     | -    | -                  | 100,00% | -      |
| 9.3 | Aspek Distribusi dan stabilitas Harga pangan:            |           |                             |        |        |        |        |           |          |      |                    |         |        |
|     | Pengembangan Distribusi Pangan                           | Kab/ko ta | 11                          | 11     | 11     | 11     | 11     | 11        | 11       | -    | 100,00%            | 100,00% | -      |
| 9.4 | Stabilitas Harga Pangan:                                 |           |                             |        |        |        |        |           |          |      |                    |         |        |
|     | Pangan Pokok                                             | CV %      | CV<10 %                     | CV<10% | CV<10% | CV<10% | CV<10% | -         | CV<6,6   | -    | -                  | -       | -      |
|     | Pangan Strategis                                         | CV %      | CV<30 %                     | CV<30% | CV<30% | CV<30% | CV<30% | -         | CV< 18,1 | -    | -                  | -       | -      |
| 10  | Lingkungan Hidup                                         |           |                             |        |        |        |        |           |          |      | 99,19%             | 98,03%  | 95,45% |



| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                          | Satuan                 | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                   |                        | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 10.1 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                                                                                  | poin                   | 72,07                       | 72,43 | 72,8  | 73,17 | 73,53 | 70,32     | 68,15 | 73,97 | 97,57%             | 94,09%  | 100,00% |
| 10.2 | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berbasis lahan (GRK)                                                                               | Juta Ton CO2 eq        | 3,283                       | 3,348 | 3,412 | 3,476 | 3,541 | 4         | 4     | -     | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 10.3 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, perizinan berusaha dan PUU LH yang diterbitkan | %                      | 70                          | 76    | 77    | 79    | 86    | 89,47     | 88,57 | 70    | 100,00%            | 100,00% | 90,91%  |
| 11   | Administrasi Kependudukan dan Capil                                                                                               | 93,09% 100,00% 100,00% |                             |       |       |       |       |           |       |       |                    |         |         |
| 11.1 | Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam 1 tahun                                                                          | %                      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 11.2 | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17                                                                 | %                      | 97                          | 98    | 99    | 100   | 100   | 95        | 100   | 99    | 97,94%             | 100,00% | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                                    | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|--------|
|      |                                                                                                             |        | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |        |
|      | tahun                                                                                                       |        |                             |       |       |       |       |           |       |       |                    |         |         |        |
| 11.3 | Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan                        | %      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |        |
| 11.4 | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | %      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |        |
| 11.5 | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan             | %      | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |        |
| 11.6 | Pemanfaatan data kependudukan                                                                               | %      | 34,48                       | 46,51 | 46,51 | 58,14 | 58,14 | 20,9      | 46,51 | 46,51 | 60,61%             | 100,00% | 100,00% |        |
| 12   | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                                                                            |        |                             |       |       |       |       |           |       |       |                    | 100,00% | 100,00% | 85,54% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                                          | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |      |      | Persentase Capaian |         |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                                                   |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023 | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
| 12.1 | Persentase aparaturnya/pengurus kelembagaan yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes                      | %      | 90                          | 90   | 90   | 90   | 90   | 90        | 90   | 90   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 12.2 | Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar                            | %      | 90                          | 90   | 90   | 90   | 90   | 90        | 90   | 90   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 12.3 | Persentase kabupaten/kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar | %      | 90                          | 90   | 90   | 90   | 90   | 90        | 90   | 90   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 12.4 | Jumlah desa mandiri                                                                                               | Desa   | 127                         | 134  | 141  | 148  | 155  | 188       | 287  | 287  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 12.5 | Jumlah desa berkembang                                                                                            | Desa   | 849                         | 807  | 767  | 731  | 694  | 764       | 603  | 603  | 100,00%            | 100,00% | 78,62%  |
| 12.6 | Jumlah desa tertinggal                                                                                            | Desa   | 87                          | 84   | 80   | 76   | 72   | 55        | 39   | 39   | 100,00%            | 100,00% | 48,75%  |
| 12.7 | Status Perkembangan                                                                                               | Indeks | 30                          | 40   | 50   | 50   | 50   | 30        | 40   | 40   | 100,00%            | 100,00% | 80,00%  |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                         | Satuan                             | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                  |                                    | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | KPPN                                                                             |                                    |                             |       |       |       |       |           |       |       |                    |         |         |
| 12.8 | Jumlah Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) berkembang                                | Desa                               | 100                         | 115   | 120   | 130   | 130   | 127       | 115   | 115   | 100,00%            | 100,00% | 95,83%  |
| 12.9 | Jumlah BUMDesa/BUM Desa Maju                                                     | Desa                               | 0                           | 4     | 6     | 10    | 12    | 5         | 4     | 4     |                    | 100,00% | 66,67%  |
| 13   | Pengendalian Penduduk dan KB                                                     |                                    |                             |       |       |       |       |           |       |       | 97,75%             | 98,40%  | 99,99%  |
| 13.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                            | indeks                             | 60,32                       | 60,35 | 60,39 | 60,45 | 60,5  | 55,01     | 62,58 | 62,58 | 91,20%             | 100,00% | 100,00% |
| 13.2 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000W US 15-19 tahun | 35                          | 30    | 25    | 25    | 21    | 20        | 26,8  | 26,8  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 13.3 | Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)                                          | Rata-rata anak per wanita          | 2,31                        | 2,28  | 2,26  | 2,24  | 2,21  | 2,21      | 2,28  | 2,28  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 13.4 | Angka prevalensi kontrasepsi modern (mCPR)                                       | %                                  | 65,44                       | 65,48 | 65,5  | 65,52 | 65,57 | 63,85     | 65,48 | 65,48 | 97,57%             | 100,00% | 99,97%  |
| 13.5 | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak                                           | %                                  | 10                          | 10    | 10    | 10    | 10    | 12        | 9,2   | 12    | 100,00%            | 92,00%  | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                               | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                        |        | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | terenuhi (unmet need)                                                                  |        |                             |       |       |       |       |           |       |       |                    |         |         |
| 14   | Perhubungan                                                                            |        | 100,00%                     |       |       |       |       |           |       |       |                    | 95,07%  | 98,09%  |
| 14.1 | On time Performance Layanan transportasi                                               | %      | 85                          | 85,2  | 88,06 | 89,2  | 90,1  | 85,7      | 85,1  | 85,3  | 100,00%            | 99,88%  | 96,87%  |
| 14.2 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi               | nilai  | 75                          | 77,62 | 79,1  | 80,2  | 81,6  | 77,26     | 71,43 | 84,19 | 100,00%            | 92,03%  | 100,00% |
| 14.3 | Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan *                      | Rasio  | 15,31                       | 15,22 | 15,09 | 15,01 | 14,95 | 2,84      | 14,2  | 14,7  | 100,00%            | 93,30%  | 97,42%  |
| 15   | Komunikasi dan Informasi                                                               |        | 94,30%                      |       |       |       |       |           |       |       |                    | 99,38%  | 99,47%  |
| 15.1 | Persentase perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan intra pemerintah daerah | %      | 63                          | 75    | 85    | 92    | 100   | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 15.2 | Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan                                   | %      | 53                          | 70    | 81    | 86    | 93    | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                           | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |      |      | Persentase Capaian |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                    |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023 | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | infrastruktur pusat data pemerintah daerah (NOC,ruang server) dan/atau pusat data pemerintah pusat (pusat data nasional sementara) |        |                             |      |      |      |      |           |      |      |                    |         |         |
| 15.3 | Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online                                                                       | %      | 75                          | 80   | 85   | 90   | 95   | 85        | 90   | 90   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 15.4 | Persentase layanan publik yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah                                     | %      | 75                          | 80   | 85   | 90   | 95   | 28        | 80   | 80   | 37,33%             | 100,00% | 94,12%  |
| 15.5 | Persentase layanan administrasi pemerintahan yang diselenggarakan secara online                                                    | %      | 65                          | 70   | 75   | 80   | 90   | 70        | 100  | 100  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 15.6 | Persentase layanan                                                                                                                 | %      | 40                          | 50   | 55   | 60   | 70   | 70        | 90   | 90   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |



| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                                                             | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |       |      | Persentase Capaian |         |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                                                                                                                                      |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah daerah                                                                                                       |        |                             |      |      |      |      |           |       |      |                    |         |         |
| 15.7 | Persentase ASN pengelola infrastruktur TIK Pemerintah Daerah yang mengikuti pelatihan dan pembinaan                                                                                                  | %      | 55                          | 60   | 65   | 70   | 75   | 60        | 90    | 90   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 15.8 | daerah, termasuk program nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah yang didesiminasikan sesuai strategi komunikasi Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah | %      | 60                          | 65   | 70   | 75   | 80   | 60        | 60,55 | 100  | 100,00%            | 93,15%  | 100,00% |

| No    | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                          | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|       |                                                                                                                                                                   |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 15.9  | Persentase narasi negatif, hoax, dan informasi misleading yang beredar di wilayah pemerintah daerah                                                               | %      | 5                           | 5    | 5    | 5    | 5    | 5         | 5     | 5     | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 15.10 | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik pemerintah daerah                                                      | %      | 60                          | 72   | 76   | 85   | 94   | 87,43     | 79,26 | 91,12 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 15.11 | Persentase informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Provinsi dan Kab/kota sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik | %      | 72                          | 76   | 80   | 84   | 92   | 86        | 86    | 86    | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 16    | Koperasi dan UKM                                                                                                                                                  |        |                             |      |      |      |      |           |       |       | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                  | Satuan      | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Realisasi |         |        | Persentase Capaian |         |         |
|------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|---------|--------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                           |             | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023    | 2024   | 2022               | 2023    | 2024    |
| 16.1 | Persentase koperasi yang berkualitas                      | %           | 5,4                         | 5,6   | 6     | 6,7   | 6,7   | 7,34      | 14,92   | 19,49  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 16.2 | Persentase Usaha kecil menjadi wirausaha                  | %           | 3,38                        | 6     | 95    | 100   | 100   | 91,61     | 98,53   | 98,53  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 17   | Penanaman Modal                                           |             |                             |       |       |       |       |           |         |        | 100,00%            | 100,00% | 60,02%  |
| 17.1 | Realisasi PMDN                                            |             | 4,24                        | 4,7   | 5,1   | 5,64  | 6,2   | 8,88      | 10,4    | 9,94   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 17.2 | Realisasi PMA                                             | US \$. juta | 480                         | 528   | 580   | 638   | 702   | 562       | 667,196 | 116,25 | 100,00%            | 100,00% | 20,04%  |
| 18   | Kepemudaan dan Olahraga                                   |             |                             |       |       |       |       |           |         |        | 90,44%             | 72,84%  | 75,20%  |
| 18.1 | Prestasi olahraga                                         | Medali emas | 14                          | 15    | 16    | 17    | 18    | 13        | 11      | 18     | 92,86%             | 73,33%  | 100,00% |
| 18.2 | Peringkat POPNAS                                          | Peringkat   | 9                           | 8     | 8     | 7     | 7     | 10        | 15      | 15     | 90,00%             | 53,33%  | 53,33%  |
| 18.3 | Peringkat PEPARPENAS                                      | Peringkat   | 12                          | 11    | 11    | 10    | 10    | 13        | 20      | 20     | 92,31%             | 55,00%  | 55,00%  |
| 18.4 | Persentase kegiatan kepramukaan yang terfasilitasi        | Persentase  | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100       | 100     | 100    | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 18.5 | Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri | %           | 0,033                       | 0,041 | 0,052 | 0,063 | 0,074 | 0,029     | 0,088   | 0,092  | 87,88%             | 100,00% | 100,00% |
| 18.6 | Tingkat partisipasi pemuda dalam                          | %           | 0,049                       | 0,065 | 0,084 | 0,103 | 0,124 | 0,039     | 0,036   | 0,036  | 79,59%             | 55,38%  | 42,86%  |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                   | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |      |      | Persentase Capaian |         |         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|------|------|--------------------|---------|---------|
|      |                                                                                            |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023 | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
|      | organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                                 |        |                             |      |      |      |      |           |      |      |                    |         |         |
| 19   | Statistik                                                                                  |        | 100,00%                     |      |      |      |      |           |      |      |                    | 100,00% | 100,00% |
| 19.1 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan                  | %      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 19.2 | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah | %      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100  | 100  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 20   | Persandian                                                                                 |        | 66,67%                      |      |      |      |      |           |      |      |                    | 100,00% | 100,00% |
| 20.1 | Jumlah lulusan peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan siber untuk K/L/D             | Orang  | 3                           | 5    | 7    | 9    | 11   | 1         | 7    | 12   | 33,33%             | 100,00% | 100,00% |
| 20.2 | Jumlah lulusan sertifikasi yang mengikuti                                                  | Orang  | 2                           | 4    | 4    | 4    | 4    | 2         | 4    | 4    | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                             | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |      |       | Realisasi |      |      | Persentase Capaian |         |      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|------|-------|-----------|------|------|--------------------|---------|------|
|      |                                                                                                      |        | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025 | 2026  | 2022      | 2023 | 2024 | 2022               | 2023    | 2024 |
|      | peningkatan kompetensi SDM pengelola keamanan sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dan CSIRT |        |                             |       |       |      |       |           |      |      |                    |         |      |
| 21   | Kebudayaan                                                                                           |        | 67,79%                      |       |       |      |       |           |      |      |                    | 100,00% |      |
| 21.1 | Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang menonton secara langsung pertunjukan seni              | %      | 0,22                        | 0,25  | 0,28  | 0,31 | 0,34  | 0,19      | 25   | -    | 86,36%             | 100,00% | -    |
| 21.2 | Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah                        | %      | 17                          | 18    | 19    | 20   | 21    | 8,57      | 18   | -    | 50,41%             | 100,00% | -    |
| 21.3 | Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan   | %      | 0,36                        | 0,024 | 0,027 | 0,03 | 0,033 | 0,037     | 0,27 | -    | 10,28%             | 100,00% | -    |

| No   | Indikator Kinerja Daerah                                                                               | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |       |       |       | Realisasi |       |      | Persentase Capaian |         |      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-----------|-------|------|--------------------|---------|------|
|      |                                                                                                        |        | 2022                        | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024 | 2022               | 2023    | 2024 |
|      | keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun keatas)                       |        |                             |      |       |       |       |           |       |      |                    |         |      |
| 21.4 | Persentase penduduk usa 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | %      | 1,65                        | 0,04 | 0,046 | 0,049 | 0,052 | 0,037     | 0,046 | -    | 2,24%              | 100,00% | -    |
| 21.5 | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat                                             | %      | 17                          | 18   | 19    | 20    | 21    | 17        | 18    | -    | 100,00%            | 100,00% | -    |
| 21.6 | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya yang dilindungi                                                 | unit   | 2                           | 3    | 4     | 5     | 6     | 10        | 7     | -    | 100,00%            | 100,00% | -    |
| 21.7 | Jumlah cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan                                       | unit   | 7                           | 8    | 9     | 10    | 11    | 2         | 13    | -    | 28,57%             | 100,00% | -    |
| 21.8 | Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan,                                              | unit   | 15                          | 16   | 17    | 18    | 19    | 91        | 88    | -    | 100,00%            | 100,00% | -    |



| No    | Indikator Kinerja Daerah                                                       | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|       |                                                                                |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
|       | pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)                                        |        |                             |      |      |      |      |           |       |       |                    |         |         |
| 21.9  | Jumlah museum yang dikelola                                                    | unit   | 3                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3         | 3     | -     | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 21.10 | Jumlah cagarbudaya dan warisan budaya yang dilindungi                          | unit   | 2                           | 3    | 4    | 5    | 6    | 2         | 3     | -     | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 22    | Perpustakaan                                                                   |        |                             |      |      |      |      |           |       |       | 100,00%            | 100,00% | 97,72%  |
| 22.1  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                                     | Nilai  | 63,3                        | 67,3 | 71,3 | 75,3 | 79,3 | 63,75     | 68,1  | 68,05 | 100,00%            | 100,00% | 95,44%  |
| 22.2  | Indeks pembangunan literasi masyarakat                                         | Indeks | 21,5                        | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 21,58     | 62,84 | 65,43 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 23    | Kearsipan                                                                      |        |                             |      |      |      |      |           |       |       | 77,77%             | 100,00% | 100,00% |
| 23.1  | Jumlah pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa   | orang  | 350                         | 350  | 350  | 350  | 350  | 312       | 419   | 423   | 89,14%             | 100,00% | 100,00% |
| 23.2  | Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi | Arsip  | 250                         | 275  | 300  | 325  | 350  | 166       | 4566  | 6514  | 66,40%             | 100,00% | 100,00% |

| No                             | Indikator Kinerja Daerah                                          | Satuan       | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           | Realisasi |           |           | Persentase Capaian |         |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------|
|                                |                                                                   |              | 2022                        | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2022      | 2023      | 2024      | 2022               | 2023    | 2024    |
| Fokus Pelayanan Urusan Pilihan |                                                                   |              |                             |           |           |           |           |           |           |           |                    |         |         |
| 1                              | Kelautan dan Perikanan                                            |              |                             |           |           |           |           |           |           |           | 77,38%             | 77,13%  | 72,34%  |
| 1.1                            | kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) | Ha           | 10.687,49                   | 16.400,53 | -         | -         | -         | 0         | 0         | 0,00      | 0,00%              | 0,00%   | 0,00%   |
| 1.2                            | Jumlah kawasan konservasi perairan yang ditetapkan                | Kawasa<br>n  | -                           | -         | 1         | 3         | 3         | -         | -         | NA        | -                  | -       | -       |
| 1.3                            | Produksi perikanan budidaya                                       | Ton          | 57.168,00                   | 58.997,00 | 60.885,00 | 62.833,00 | 64.843,60 | 49.666,00 | 50.807,14 | 49.595,00 | 86,88%             | 86,12%  | 81,46%  |
| 1.4                            | Produksi perikanan tangkap                                        | Ton          | 54.480,90                   | 54.807,80 | 55.136,70 | 55.467,50 | 55.800,30 | 55.347,50 | 54.807,50 | 45.187,80 | 100,00%            | 100,00% | 81,96%  |
| 1.5                            | Konsumsi ikan                                                     | kg/kap / thn | 40,6                        | 41        | 41,5      | 42        | 42,5      | 40,8      | 40,8      | 40,79     | 100,00%            | 99,51%  | 98,29%  |
| 1.6                            | Penanganan kasus pelanggaran bidang kelautan dan perikanan        | %            | 50                          | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50        | 50,00     | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 2                              | Pariwisata                                                        |              |                             |           |           |           |           |           |           |           | 96,08%             | 96,42%  |         |
| 2.1                            | Nilai tambah ekonomi kreatif                                      | Rp. juta     | 350                         | 450       | 550       | 650       | 750       | 378,45    | 452,32    | -         | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 2.2                            | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB                        | %            | 1,19                        | 1,21      | 1,25      | 1,29      | 1,3       | 1,05      | 1,08      | -         | 88,24%             | 89,26%  | -       |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                           | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |           |         |         |         | Realisasi |           |      | Persentase Capaian |         |         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|-----------|------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                                    |        | 2022                        | 2023      | 2024    | 2025    | 2026    | 2022      | 2023      | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
| 2.3 | Jumlah pergerakan wisatawan nusantara                                              | orang  | 950.000                     | 1.500.000 | 5.400   | 6.480   | 7.776   | 2.309.503 | 1.842.162 | -    | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 3   | Pertanian                                                                          | 40,95% |                             |           |         |         |         |           |           |      | 64,39%             | 100,00% |         |
| 3.1 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung)              | %      | 1,8                         | 2         | 3       | 4       | 4,2     | -3,35     | -         | -    | -<br>186,11%       | -       | -       |
| 3.2 | Persentase peningkatan produktivitas tanaman hortikultura (cabai dan bawang merah) | %      | 2                           | 2,23      | 2,45    | 2,68    | 2,9     | 11,73     | -         | -    | 100,00%            | -       | -       |
| 3.3 | Persentase peningkatan produktivitas perkebunan                                    | %      | 9,22                        | 4,82      | 5,04    | 5,28    | 5,49    | 3,18      | 2,9       | 8,6  | 65,98%             | -       | 100,00% |
| 3.4 | Populai ternak:                                                                    |        |                             |           |         |         |         |           |           |      |                    |         |         |
|     | - Populasi Sapi                                                                    | Ekor   | 162.002                     | 165.242   | 168.546 | 171.917 | 175.536 | 429,393   | 408.644   | -    | 0,27%              | 100,00% | -       |
|     | - Populasi Kambing                                                                 | Ekor   | 412.473                     | 420.722   | 429.137 | 437.719 | 446.474 | 23,35     | 24,51     | -    | 0,01%              | 0,01%   | -       |
| 3.5 | Persentase luas areal pengendalian dan                                             | %      | 25,74                       | 29,24     | 32,34   | 35,34   | 37,34   |           | 273.276   | -    |                    | 100,00% | -       |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                  | Satuan                | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           | Realisasi |           |           | Persentase Capaian |         |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                           |                       | 2022                        | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2022      | 2023      | 2024      | 2022               | 2023    | 2024    |
|     | penanggulangan bencana OPT                                                |                       |                             |           |           |           |           |           |           |           |                    |         |         |
| 3.6 | Produksi Padi                                                             | Ton GKG               | 416.223                     | 435.708   | 463.472   | 497.937   | 533.504   | 289,277   | 20.754    | -         | 0,07%              | 4,76%   | -       |
| 3.7 | Produksi Jagung                                                           | Ton pipil kering (PK) | 67.826                      | 69.178    | 71.249    | 74.099    | 77.205    | 33,208    | 20.753,80 | -         | 0,05%              | 30,00%  | -       |
| 3.8 | Produksi Daging:                                                          |                       |                             |           |           |           |           |           |           |           |                    |         |         |
|     | - sapi                                                                    | Ribu ton              | 5,76                        | 5,88      | 5,99      | 6,11      | 6,24      | 5,76      | 4,92      | -         | 100,00%            | 83,67%  | -       |
|     | - kambing                                                                 | Ribu ton              | 1                           | 1,02      | 1,04      | 1,06      | 1,08      | 0,71      | 0,57      | -         | 71,00%             | 55,88%  | -       |
|     | - Ayam Buras                                                              | Ribu ton              | 6,61                        | 7,21      | 7,86      | 8,56      | 9,34      | 10,18     | 4,61      | -         | 100,00%            | 63,94%  | -       |
|     | - Ayam Ras Petelur                                                        | Ribu ton              | 1,39                        | 1,41      | 1,45      | 1,49      | 1,54      | 2,26      | 1,17      | -         | 100,00%            | 82,98%  | -       |
|     | - Ayam Ras Pedaging                                                       | Ribu ton              | 61,65                       | 72,64     | 85,71     | 101,14    | 119,35    | 53,48     | 63,23     | -         | 86,75%             | 87,05%  | -       |
|     | - Itik                                                                    | Ribu ton              | 0,53                        | 0,54      | 0,56      | 0,58      | 0,6       | 0,5       | 0,64      | -         | 94,34%             | 100,00% | -       |
| 4   | Kehutanan                                                                 | 100,00%               |                             |           |           |           |           |           |           |           |                    | 100,00% | 100,00% |
| 4.1 | Luas lahan kritis yang direhabilitasi                                     | Ha                    | 260                         | 225       | 250       | 260       | 270       | 534,5     | 433       | 372,5     | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 4.2 | Pemanfaatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui | Ha                    | 30.070,55                   | 39.951,55 | 53.588,55 | 77.174,55 | 89.642,55 | 31940,79  | 44.095,79 | 55.608,12 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                          | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                                   |        | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
|     | Perhutanan Sosial                                                                 |        |                             |       |       |       |       |           |       |       |                    |         |         |
| 5   | ESDM                                                                              |        |                             |       |       |       |       |           |       |       | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 5.1 | Rasio Elektrifikasi                                                               | %      | 99,92                       | 99,93 | 99,94 | 99,95 | 99,96 | 99,99     | 99,99 | 99,99 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 5.2 | Porsi EBT dalam bauran energi                                                     | %      | 12,32                       | 16,65 | 20,21 | 24    | 24,85 | 15        | 17,03 | 22,03 | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 5.3 | Persentase desa teraliri listrik (rasio desa berlistrik)                          | %      | 99,92                       | 99,93 | 99,94 | 99,95 | 99,96 | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 6   | Perdagangan                                                                       |        |                             |       |       |       |       |           |       |       | 98,36%             | 100,00% |         |
| 6.1 | Pertumbuhan nilai ekspor non migas                                                | %      | 6                           | 6     | 6     | 6     | 6     | 5,41      | -     | -     | 90,17%             | -       | -       |
| 6.2 | Persentase penanganan pengaduan konsumen                                          | %      | 90                          | 93    | 95    | 97    | 97    | 100       | 100   | -     | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 6.3 | Persentase barang beredar yang diawasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | %      | 40                          | 41,8  | 43,25 | 46,6  | 51,1  | 40        | -     | -     | 100,00%            | -       | -       |
| 6.4 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan                        | %      | 60                          | 62    | 66    | 67    | 70    | 98,28     | -     | -     | 100,00%            | -       | -       |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                 | Satuan     | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         | Realisasi |       |      | Persentase Capaian |         |      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------|------|--------------------|---------|------|
|     |                                                                          |            | 2022                        | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2022      | 2023  | 2024 | 2022               | 2023    | 2024 |
|     | berlaku                                                                  |            |                             |         |         |         |         |           |       |      |                    |         |      |
| 6.5 | Persentase kinerja realisasi pupuk                                       | %          | 90                          | 91      | 92      | 92      | 94      | 91        | -     | -    | 100,00%            | -       | -    |
| 6.6 | Tertib usaha                                                             | %          | 60                          | 60      | 60      | 62      | 62      | 60        | -     | -    | 100,00%            | -       | -    |
| 7   | Perindustrian                                                            |            | 73,67% 69,05%               |         |         |         |         |           |       |      |                    |         |      |
| 7.1 | Persentase pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan non migas         | %          | 0,39                        | 0,41    | 0,43    | 0,45    | 0,48    | 0,31      | 0,42  | -    | 79,49%             | 100,00% | -    |
| 7.2 | Persentase kontribusi sektor industri pengolahan non migas terhadap PDRB | %          | 7,86                        | 7,97    | 8,08    | 8,19    | 8,3     | 9,77      | 9,98  | -    | 100,00%            | 100,00% | -    |
| 7.3 | Nilai ekspor produk industri pengolahan non migas                        | USD Miliar | 0,966                       | 0,983   | 1       | 1,017   | 1,034   | 0,821     | 0,749 | -    | 84,99%             | 76,20%  | -    |
| 7.4 | Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan                           | orang      | 250.977                     | 257.866 | 264.755 | 271.644 | 278.533 | 75.802    | -     | -    | 30,20%             | 0,00%   | -    |
| 8   | Transmigrasi                                                             |            | 92,82% 100,00%              |         |         |         |         |           |       |      |                    |         |      |
| 8.1 | Nilai rata-rata Indeks perkembangan kawasan                              | indeks     | 33,82                       | 35,18   | 45,44   | 36,09   | 36,33   | 48,09     | 35,18 | -    | 100,00%            | 100,00% | -    |

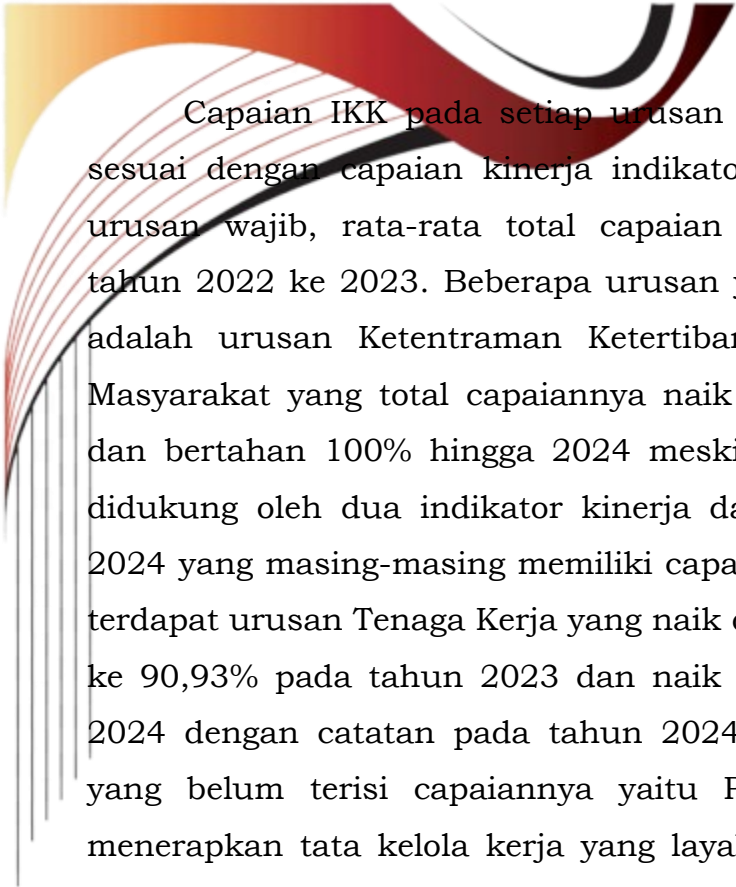


| No                                                | Indikator Kinerja Daerah                                     | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |       |      |       |       | Realisasi |        |      | Persentase Capaian |         |         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------|------|-------|-------|-----------|--------|------|--------------------|---------|---------|
|                                                   |                                                              |        | 2022                        | 2023  | 2024 | 2025  | 2026  | 2022      | 2023   | 2024 | 2022               | 2023    | 2024    |
|                                                   | transmigrasi yang direvitalisasi                             |        |                             |       |      |       |       |           |        |      |                    |         |         |
| 8.2                                               | Indeks perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi | indeks | 40,89                       | 41,47 | 41,8 | 42,22 | 43,11 | 35,02     | 41,47  | -    | 85,64%             | 100,00% | -       |
| <b>Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b> |                                                              |        |                             |       |      |       |       |           |        |      |                    |         |         |
| 1                                                 | Perencanaan                                                  |        |                             |       |      |       |       |           |        |      |                    | 100,00% | 100,00% |
| 1.1                                               | Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD                       | %      | 100                         | 100   | 100  | 100   | 100   | 100       | 100    | -    | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 1.2                                               | Konsistensi program RKPD dalam APBD                          | %      | 100                         | 100   | 100  | 100   | 100   | 100       | 100    | -    | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 2                                                 | Keuangan                                                     |        |                             |       |      |       |       |           |        |      |                    | 100,00% | 100,00% |
| 2.2                                               | Opini BPK                                                    | -      | WTP                         | WTP   | WTP  | WTP   | WTP   | WTP       | WTP    | WTP  | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 2.3                                               | Persentase SilPA terhadap LRA                                | %      | 6                           | 5,5   | 5    | 6,7   | 6,7   | 13,22     | 24,48  | -    | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 2.4                                               | Persentase SilPA terhadap APBD                               | %      | 6,5                         | 6,5   | 6,5  | 6,5   | 6,5   | 12,5      | 20,21  | -    | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 2.5                                               | Persentase belanja pendidikan                                | %      | 20                          | 20    | 20   | 20    | 20    | 25,54     | 119,75 | -    | 100,00%            | 100,00% | -       |

| No  | Indikator Kinerja Daerah                                                   | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |       |       | Persentase Capaian |         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|---------|
|     |                                                                            |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024  | 2022               | 2023    | 2024    |
| 2.6 | Persentase belanja kesehatan                                               | %      | 10                          | 10   | 10   | 10   | 10   | 14,49     | 153   | -     | 100,00%            | 100,00% | -       |
| 3   | Kepegawaian dan Diklat                                                     |        |                             |      |      |      |      |           |       |       | 97,51%             | 100,00% | 100,00% |
| 3.1 | Persentase tingkat pendidikan aparatur Pemprov yang berpendidikan S1-S2-S3 | %      | 78                          | 79   | 80   | 81   | 82   | 76,06     | 83,03 | 83,36 | 97,51%             | 100,00% | 100,00% |
| 4   | Penelitian dan Pengembangan                                                |        |                             |      |      |      |      |           |       |       | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 4.1 | Persentase implementasi rencana kelitbangan                                | %      | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 4.2 | Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan                                   | %      | 60                          | 65   | 70   | 75   | 80   | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 4.3 | Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi      | %      | 80                          | 80   | 85   | 85   | 85   | 100       | 100   | 100   | 100,00%            | 100,00% | 100,00% |
| 5   | Pengawasan                                                                 |        |                             |      |      |      |      |           |       |       | 89,79%             | 51,62%  |         |
| 5.1 | Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat                                | %      | 60                          | 65   | 70   | 75   | 80   | 49,82     | 49,16 | -     | 83,03%             | 75,63%  | -       |

| No  | Indikator Kinerja Daerah            | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      | Realisasi |       |      | Persentase Capaian |        |      |
|-----|-------------------------------------|--------|-----------------------------|------|------|------|------|-----------|-------|------|--------------------|--------|------|
|     |                                     |        | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2022      | 2023  | 2024 | 2022               | 2023   | 2024 |
| 5.2 | Persentase Tindak Lanjut temuan BPK | %      | 67                          | 69   | 71   | 73   | 75   | 64,68     | 19,05 | -    | 96,54%             | 27,61% | -    |

Sumber: Evaluasi RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026



Capaian IKK pada setiap urusan memiliki hasil yang berbeda sesuai dengan capaian kinerja indikatornya. Pada fokus pelayanan urusan wajib, rata-rata total capaian mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Beberapa urusan yang mengalami peningkatan adalah urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang total capaiannya naik dari 88,70% menjadi 100%, dan bertahan 100% hingga 2024 meskipun total capaian ini hanya didukung oleh dua indikator kinerja daerah pada tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing memiliki capaian sebesar 100%. Kemudian terdapat urusan Tenaga Kerja yang naik dari 75,37% pada tahun 2022 ke 90,93% pada tahun 2023 dan naik menjadi 91,05% pada tahun 2024 dengan catatan pada tahun 2024 hanya terdapat 1 indikator yang belum terisi capaiannya yaitu Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak. Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Capil yang total capaiannya naik dari 93,09% menjadi 100%, dan bertahan 100% hingga 2024.

Masih pada fokus pelayanan urusan wajib, urusan Pengendalian Penduduk dan KB total capaiannya naik dari 97,75% menjadi 98,40%, dan naik 99,99% pada 2024. Urusan Komunikasi dan Informasi total capaiannya naik dari 94,30% menjadi 99,38%, dan naik 99,47% pada 2024. Urusan Persandian yang total capaiannya naik dari 66,67% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023 dan bertahan 100% pada tahun 2024. Urusan Kebudayaan yang total capaiannya naik dari 67,79% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023. Urusan Kearsipan yang total capaiannya naik dari 77,77% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2023 dan bertahan 100% pada tahun 2024.

Pada fokus pelayanan urusan pilihan, terdapat beberapa urusan yang tetap konsisten mencapai 100% selama tiga tahun berturut-turut, yakni urusan Kehutanan dan ESDM. Selain itu terdapat beberapa urusan yang mengalami peningkatan capaian, seperti urusan Pariwisata yang naik dari 96,08% pada tahun 2022 menjadi 96,42% pada tahun 2023. Pada fokus fungsi penunjang urusan pemerintahan, data capaian indikator kinerja daerah yang sudah tersedia hingga tahun 2024 terdapat pada urusan Kepegawaian dan

Diklat serta Penelitian dan Pengembangan. Urusan Penelitian dan Pengembangan berhasil mempertahankan capaian sebesar 100% dari tahun 2022 hingga 2024.

**2.5. Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan**

Seluruh uraian tentang kondisi umum daerah, kinerja pemerintah daerah serta potensi perekonomian dan daya saing daerah saat ini pada akhirnya membangun pencapaian target pembangunan berkelanjutan (TPB) di Provinsi Jambi. Adapun pelaksanaan pembangunan yang mengacu pada TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Data dalam Tabel di bawah ini menyajikan pencapaian TPB Provinsi Jambi. Dari 224 target pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan karakter yang dimiliki oleh Provinsi Jambi. Dari target PB tersebut, 51 target (22,76%) dapat dicapai, 121 target (54,01%) belum dapat dicapai, dan belum dapat diidentifikasi karena keterbatasan data yang tersedia adalah sebanyak 57 target (25,44% dari total target PB).

**Tabel 2-23 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi Tahun 2024**

| TPB |                                              | Jumlah Indikator | Status Capaian Indikator |                                  |                    |                       |
|-----|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                              |                  | Tercapai                 | Dilaksanakan tapi Belum Tercapai | Belum Dilaksanakan | Belum teridentifikasi |
| 1   | Tanpa kemiskinan                             | 24               | 7                        | 12                               | -                  | 5                     |
| 2   | Tanpa kelaparan                              | 11               | 4                        | 6                                | -                  | 1                     |
| 3   | Kehidupan sehat dan sejahtera                | 34               | 9                        | 19                               | 1                  | 5                     |
| 4   | Pendidikan berkualitas                       | 10               | 6                        | 4                                | -                  | -                     |
| 5   | Kesetaraan gender                            | 15               | 4                        | 7                                | -                  | 4                     |
| 7   | Energi bersih dan terjangkau                 | 6                | -                        | 6                                | -                  | -                     |
| 8   | Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi      | 19               | 8                        | 6                                | -                  | 5                     |
| 9   | Industri, inovasi dan infrastruktur          | 15               | -                        | 7                                | 4                  | 4                     |
| 10  | Berkurangnya kesenjangan                     | 9                | 4                        | 2                                | -                  | 3                     |
| 17  | Kemitraan untuk mencapai tujuan              | 16               | 2                        | 10                               | -                  | 4                     |
| 6   | Air bersih dan sanitasi layak                | 10               | 1                        | 9                                | -                  | 7                     |
| 11  | Kota dan pemukiman yang berkelanjutan        | 18               | 1                        | 2                                | 6                  | 7                     |
| 12  | Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab | 5                | -                        | 2                                | -                  | 3                     |





| TPB |                                                   | Jumlah Indikator | Status Capaian Indikator |                                  |                    |                       |
|-----|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                                   |                  | Tercapai                 | Dilaksanakan tapi Belum Tercapai | Belum Dilaksanakan | Belum teridentifikasi |
| 13  | Penanganan perubahan iklim                        | 3                | -                        | 2                                | 1                  | -                     |
| 14  | Ekosistem lautan                                  | 4                | -                        | 2                                | 2                  | -                     |
| 15  | Ekosistem daratan                                 | 7                | 1                        | 3                                | 3                  | -                     |
| 16  | Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh | 18               | 4                        | 5                                | -                  | 9                     |
|     | Total                                             | 224              | 51                       | 104                              | 17                 | 57                    |
|     |                                                   |                  | 22,76%                   | 46,43%                           | 7,58%              | 25,44%                |

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, 2025.

Keterangan:

Tujuan 1 – 5 termasuk Pilar Sosial

Tujuan 7-10 dan Tujuan 17 termasuk Pilar Ekonomi

Tujuan 6, dan Tujuan 11-15 termasuk Pilar Lingkungan

Tujuan 16 adalah Pilar Hukum dan Tata Kelola

Sementara tabel di bawah ini menunjukkan capaian indikator berdasarkan pengelompokkan TPB, dimana Pilar Sosial merupakan pilar yang paling banyak mencapai target (31,91% dari total target TPB) dan Pilar Lingkungan yang paling sedikit mencapai target (4,34% dari total target TPB).

Tabel 2-24 Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Jambi berdasarkan kelompok pilar TPB Tahun 2024.

| Pilar               | Sudah tercapai | Belum tercapai | Belum dilaksanakan | Tidak teridentifikasi |
|---------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------------|
| Sosial              | 31,91%         | 51,06%         | 1,06%              | 15,96%                |
| Ekonomi             | 23,37%         | 38,96%         | 5,19%              | 3,25%                 |
| Lingkungan          | 4,34%          | 50,00%         | 19,56%             | 36,95%                |
| Hukum & Tata Kelola | 14,28%         | 42,85%         | 42,85%             | 0%                    |

Data pada Tabel di atas menunjukkan bahwa indikator TPB yang belum mencapai target TPB sebagian besar merupakan urusan wajib pemerintahan daerah. Hal-hal ini selayaknya menjadi permasalahan dan menjadi isu penting pembangunan pada periode tahun 2025-2029. Adapun target yang belum teridentifikasi menjadi perhatian bagi pihak yang berwenang dalam penyediaannya untuk segera melengkapi sistem pendataannya, sehingga informasi mengenai kondisi pencapaian TPB dapat diperoleh dengan baik.

2.6. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran umum keuangan daerah merupakan deskripsi mengenai kondisi dan kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Jambi kurang lebih dari tahun 2020 hingga 2024. Uraian ini mencakup berbagai komponen keuangan, seperti sumber-sumber pendapatan daerah, alokasi belanja, pembiayaan, serta posisi keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Penyajian informasi ini bertujuan untuk memberikan dasar yang jelas dalam proses perencanaan, penganggaran, dan penyusunan kebijakan keuangan di Provinsi Jambi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

### **2.6.1 Kinerja Keuangan Masa lalu**

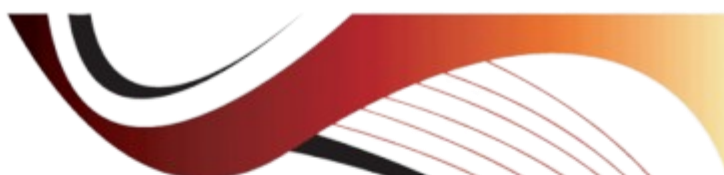
Kinerja keuangan masa lalu merupakan gambaran atas efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama kurang lebih lima tahun. Melalui analisis terhadap capaian kinerja keuangan tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jambi dapat mengidentifikasi tren, peluang, serta tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.6.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah selama tahun 2020-2024 cukup efektivitas dan efisiensi. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Ada tiga sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi Jambi; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui Peraturan Daerah setiap tahunnya. Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang didalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi, serta hibah dan dana pinjaman luar negeri. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi selama 5 (lima) tahun, yaitu dari Tahun Anggaran 2020 – 2024.

**Tabel 2-25 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

| No.    | Uraian                                            | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024*             | Rata-rata<br>Pertumbuhan(%) |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|        |                                                   | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              |                             |
| 1      | PENDAPATAN                                        | 4.176.315.760.183 | 4.401.754.558.279 | 4.335.678.330.489 | 4.623.218.413.285 | 4.732.466.084.399 | 2,53                        |
| 1.1.   | Pendapatan Asli Daerah                            | 1.360.986.764.132 | 1.601.141.999.879 | 1.934.773.577.429 | 2.095.649.226.538 | 2.095.941.407.210 | 9,02                        |
| 1.1.1. | Pajak daerah                                      | 1.157.871.072.637 | 1.383.781.959.390 | 1.669.702.987.193 | 1.845.711.834.788 | 1.839.108.467.508 | 9,7                         |
| 1.1.2. | Retribusi daerah                                  | 8.605.407.970     | 11.384.921.000    | 18.257.083.000    | 18.039.428.824    | 14.250.945.752    | 10,62                       |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 31.212.590.404    | 28.028.487.059    | 30.422.308.662    | 30.978.710.988    | 35.478.131.502    | 2,59                        |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah                            | 163.297.693.121   | 177.946.632.430   | 216.391.198.574   | 200.919.251.938   | 207.103.862.448   | 4,87                        |
| 1.2    | Pendapatan Transfer                               | 2.813.320.996.051 | 2.757.317.396.862 | 2.366.533.561.680 | 2.494.901.768.726 | 2.613.755.920.792 | -1,46                       |



| No.        | Uraian                                                                    | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                     | 2024*                    | Rata-rata<br>Pertumbuhan(%) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
|            |                                                                           | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                     |                             |
| <b>1.3</b> | <b>Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>                               | <b>2.008.000.000</b>     | <b>43.295.161.538</b>    | <b>34.371.191.380</b>    | <b>32.667.418.021</b>    | <b>22.768.756.398</b>    | <b>62,52</b>                |
| 1.3.1      | Hibah                                                                     | 2.008.000.000            | 43.295.161.538           | 34.371.191.380           | 31.955.195.312           | 21.121.700.781           | 60,1                        |
| 1.3.2      | Sumbangan pihak ketiga/sejenis                                            | -                        | -                        | -                        | -                        | 44.353.468               | -                           |
| 1.3.3      | Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |                          |                          |                          | 712.222.709              |                          |                             |
| <b>2</b>   | <b>Belanja</b>                                                            | <b>4.585.971.756.628</b> | <b>4.804.809.609.170</b> | <b>5.048.952.520.090</b> | <b>5.175.212.402.247</b> | <b>4.597.652.753.214</b> | <b>0,05</b>                 |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>                                                    | <b>3.037.710.623.112</b> | <b>3.384.013.148.749</b> | <b>3.116.987.609.331</b> | <b>3.061.858.926.453</b> | <b>2.833.572.488.663</b> | <b>-1,38</b>                |



| No.          | Uraian                       | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                     | 2024*                  | Rata-rata<br>Pertumbuhan(%) |
|--------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|
|              |                              | (Rp)                   | (Rp)                   | (Rp)                   | (Rp)                     | (Rp)                   |                             |
| 2.1.1        | Belanja Pegawai              | 1.443.168.934.492      | 1.605.159.526.709      | 1.576.302.175.953      | 1.485.016.143.305        | 1.605.144.672.135      | 2,15                        |
| 2.1.2        | Belanja Barang dan Jasa      | 906.312.604.839        | 920.945.581.591        | 1.315.437.389.050      | 1.412.126.405.370        | 1.017.010.009.757      | 2,33                        |
| 2.1.3        | Belanja Subsidi              | 550.000.000            | 550.000.000            | 8.182.500.000          | 5.739.553.750            | 3.296.278.000          | -16,63                      |
| 2.1.4        | Belanja Hibah                | 687.350.583.781        | 805.198.505.268        | 198.559.518.524        | 155.214.824.028          | 207.371.528.771        | -21,31                      |
| 2.1.5        | Belanja Bantuan Sosial       | 328.500.000            | 52.159.535.180         | 18.506.025.803         | 3.762.000.000            | 750.000.000            | -57,19                      |
| <b>2.2</b>   | <b>Belanja Modal</b>         | <b>628.761.734.830</b> | <b>485.312.936.606</b> | <b>975.361.703.155</b> | <b>1.039.534.897.828</b> | <b>969.771.429.676</b> | <b>9,05</b>                 |
| <b>2.3</b>   | <b>Belanja Tidak Terduga</b> | <b>185.286.968.857</b> | <b>124.224.875.356</b> | <b>28.884.765.344</b>  | <b>1.728.565.845</b>     | <b>-</b>               | <b>-100</b>                 |
| <b>2.4</b>   | <b>Belanja Transfer</b>      | <b>734.212.429.830</b> | <b>811.258.648.459</b> | <b>927.718.442.260</b> | <b>1.072.090.012.121</b> | <b>794.308.834.875</b> |                             |
| <b>2.4.1</b> | <b>Belanja Bagi Hasil</b>    | <b>634.365.509.830</b> | <b>717.538.648.459</b> | <b>768.618.442.260</b> | <b>899.987.022.121</b>   | <b>739.643.062.875</b> | <b>3,12</b>                 |

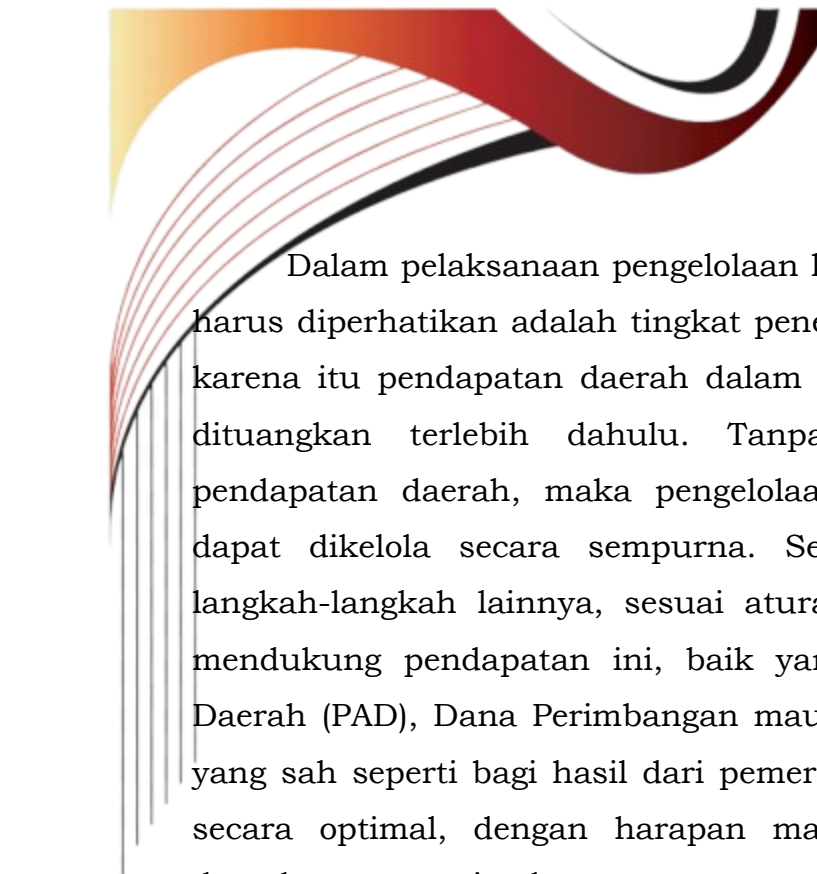




| No.     | Uraian                             | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   | 2024*                 | Rata-rata<br>Pertumbuhan(%) |
|---------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|
|         |                                    | (Rp)                   | (Rp)                   | (Rp)                   | (Rp)                   | (Rp)                  |                             |
| 2.4.2   | <b>Belanja Bantuan Keuangan</b>    | <b>99.846.920.000</b>  | <b>93.720.000.000</b>  | <b>159.100.000.000</b> | <b>172.102.990.000</b> | <b>54.665.772.000</b> | <b>-11,35</b>               |
| 2.4.1.2 | Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota | 99.846.920.000         | 93.720.000.000         | 159.100.000.000        | 172.102.990.000        | 54.665.772.000        | -11,35                      |
| 3.1     | <b>Pembiayaan</b>                  | <b>409.655.996.445</b> | <b>403.055.050.891</b> | <b>664.554.605.133</b> | <b>621.327.501.413</b> | <b>53.522.386.751</b> | <b>-33,44</b>               |
| 3.2     | Penerimaan Pembiayaan              | 422.155.996.445        | 403.055.050.891        | 691.761.136.315        | 631.461.501.413        | 83.682.590.909        | -27,65                      |
| 3.3     | Pengeluaran Pembiayaan             | 12.500.000.000         | -                      | 27.206.531.182         | 10.134.000.000         | 30.160.204.158        | 19,26                       |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.

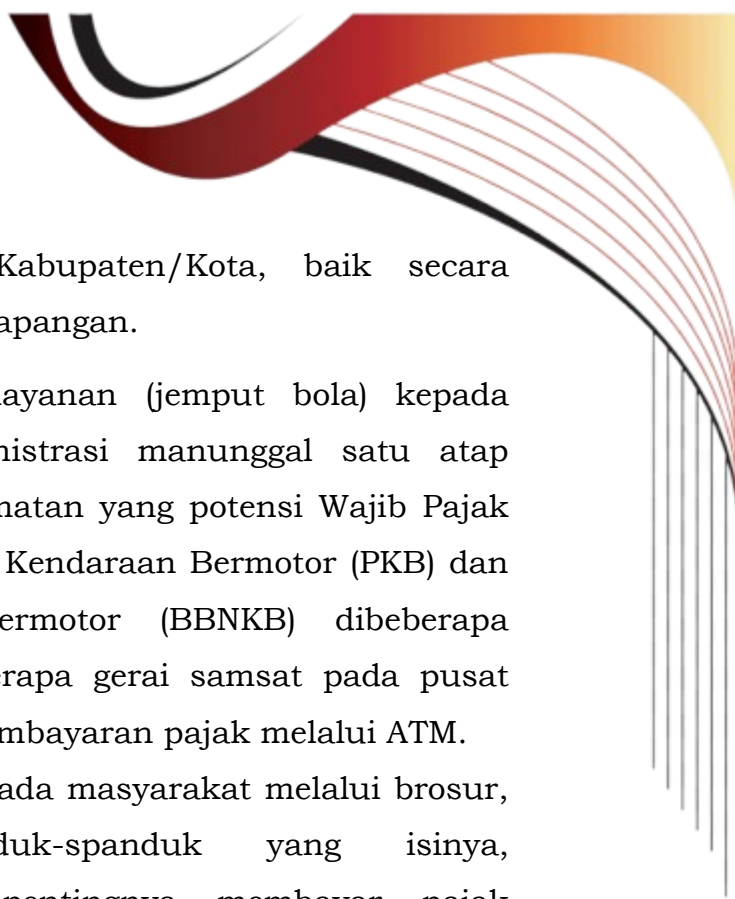
Ket: \* unaudited



Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, hal utama yang harus diperhatikan adalah tingkat penerimaan pendapatan daerah. Oleh karena itu pendapatan daerah dalam proses pengelolaan daerah harus dituangkan terlebih dahulu. Tanpa diketahuinya sumber-sumber pendapatan daerah, maka pengelolaan keuangan daerah tidak akan dapat dikelola secara sempurna. Setelah itu, baru diikuti dengan langkah-langkah lainnya, sesuai aturan yang berlaku. Adapun dalam mendukung pendapatan ini, baik yang menyangkut Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti bagi hasil dari pemerintah lain, tetap harus dilakukan secara optimal, dengan harapan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.

Upaya-upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, khususnya PAD, ditempuh melalui berbagai bentuk terobosan dan strategi agar penerimaan PAD dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Salah satu terobosan paling penting dalam meningkatkan PAD adalah melakukan program intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap wajib pajak dan retribusi daerah. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah Provinsi sangat dipengaruhi oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan PAD, Dana Perimbangan serta Lain-lain pendapatan daerah. Sedangkan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah yang merupakan komponen dari PAD, telah ditentukan baik jumlah maupun jenisnya sehingga sulit untuk melakukan ekstensifikasi sumber penerimaan yang baru, apalagi di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa untuk penerimaan pendapatan yang baru agar tidak memberatkan masyarakat serta menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi untuk tahun anggaran 2020-2024 tidak menerbitkan kebijakan untuk sumber penerimaan baru akan tetapi mengintensifkan terhadap sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan Retribusi Daerah ini dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut: Melakukan pemantauan dan meneliti serta mengevaluasi jenis Pajak dan



Retribusi Daerah yang berada di Kabupaten/Kota, baik secara administrasi maupun turun langsung kelapangan.

1. Melakukan upaya pendekatan pelayanan (jemput bola) kepada masyarakat melalui satuan administrasi manunggal satu atap (Samsat) Keliling ke beberapa kecamatan yang potensi Wajib Pajak yang cukup besar khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di beberapa Kabupaten, dan menyediakan beberapa gerai samsat pada pusat perbelanjaan di Kota Jambi, serta pembayaran pajak melalui ATM.
2. Melakukan Sosialisasi langsung kepada masyarakat melalui brosur, pamflet, baliho serta spanduk-spanduk yang isinya, menginformasikan tentang arti pentingnya membayar pajak terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Melaksanakan pendataan ulang objek pajak dan retribusi daerah, untuk meningkatkan akurasi sekaligus pemutakhiran data dalam menggali sumber penerimaan yang pelaksanaannya belum optimal.
4. Mengadakan pertemuan dengan Dealer Kendaraan Bermotor, Alat Berat dan perusahaan perkreditan serta pengusaha Show Room kendaraan bekas se-Provinsi Jambi, dalam rangka menjaring wajib pajak baru.
5. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait pada Kantor Samsat, terutama dengan pihak Kepolisian dan PT. Jasa Raharja dengan melakukan Razia terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang belum membayar pajak.
6. Melakukan pemutihan terhadap denda pajak kendaraan bermotor.

Secara umum langkah-langkah kebijakan yang telah diambil tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pendapatan daerah ini, hal ini tercermin dari meningkatnya penerimaan dari target pendapatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun sumber

pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan transfer pusat. Hal ini menunjukkan, bahwa Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama untuk belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari Pemerintah Pusat. Bila dilihat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), dengan membandingkan Total PAD dengan Pendapatan Transfer, maka terlihat bahwa kemandirian keuangan daerah berfluktuatif. Kondisi ini disebabkan berfluktuatifnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik pajak daerah maupun retribusi.

Tabel 2-26 Rasio kemandirian keuangan daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| Tahun | Nilai RKKD (%) |
|-------|----------------|
| 2020  | 52,32          |
| 2021  | 74,39          |
| 2022  | 88,58          |
| 2023  | 87,87          |
| 2024  | 80,19          |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah

Selain itu, jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan, terlihat bahwa pada periode tahun 2020-2024 rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan adalah sebesar (0,03)% dengan predikat capaian pada tahun 2024 yaitu *Under Target*. Pada komponen pendapatan, rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai sebsar (0,07)% dan Pendapatan Asli Daerah mencapai sebesar (0,06)%, sementara Pendapatan transfer terus terkoreksi dengan rata-rata tumbuh (0,00)%

Tabel 2-27 Kinerja Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024 (Rp)

| No.    | Uraian                                            | 2020   |     | 2021   |     | 2022   |     | 2023   |     | 2024*  |     | Rata-rata<br>Pertumbu<br>han(%) |
|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|---------------------------------|
|        |                                                   | %      | Ket | %      | Ket | %      | Ket | %      | Ket | %      | Ket |                                 |
| 1      | PENDAPATAN                                        | 105,37 | OT  | 107,36 | OT  | 106,75 | OT  | 98,75  | UT  | 91,95  | UT  | -0,03                           |
| 1.1.   | Pendapatan Asli Daerah                            | 112,8  | OT  | 115,13 | OT  | 112,01 | OT  | 100,34 | OT  | 83,59  | UT  | -0,06                           |
| 1.1.1. | Pajak daerah                                      | 111,65 | OT  | 112,6  | OT  | 112,11 | OT  | 100,13 | OT  | 102,26 | OT  | -0,02                           |
| 1.1.2. | Retribusi daerah                                  | 216,07 | OT  | 110,82 | OT  | 92,54  | UT  | 95,05  | UT  | 102,94 | OT  | -0,14                           |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 89,46  | UT  | 100    | E   | 100,63 | OT  | 100,1  | OT  | 8,66   | UT  | -0,37                           |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah                            | 119,99 | OT  | 137,5  | OT  | 114,48 | OT  | 102,94 | OT  | 72,64  | UT  | -0,1                            |
| 1.2.   | Pendapatan Transfer                               | 101,77 | OT  | 104,45 | OT  | 103,38 | OT  | 97,47  | UT  | 99,98  | UT  | 0                               |
| 1.3    | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah              | 127,11 | OT  | 5,34   | UT  | 42,83  | UT  | 97,47  | UT  | 89,98  | UT  | -0,07                           |
| 1.3.1  | Hibah                                             | 127,11 | OT  | 5,34   | UT  | 42,83  | UT  | 97,47  | UT  | 89,98  | UT  | -0,07                           |
| 1.3.2  | Dana darurat                                      | -      | E   | -      | E   | -      | E   | -      | E   | -      | E   | 0                               |
|        | Dana bagi hasil pajak dari provinsi               |        |     |        |     |        |     |        |     |        |     |                                 |

| No.        | Uraian                                                        | 2020          |           | 2021         |           | 2022         |           | 2023         |           | 2024*        |           | Rata-rata<br>Pertumbu<br>han(%) |
|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------|
|            |                                                               | %             | Ket       | %            | Ket       | %            | Ket       | %            | Ket       | %            | Ket       |                                 |
| 1.3.3      | dan Pemerintah Daerah lainnya                                 | -             | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | 0                               |
| 1.3.4      | Dana penyesuaian dan otonomi khusus                           | -             | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | 0                               |
| 1.3.5      | Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya | -             | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | 0                               |
| 1.3.6      | Pendapatan luar biasa                                         | -             | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | -            | E         | 0                               |
| <b>2</b>   | <b>Belanja</b>                                                | <b>96,61</b>  | <b>UT</b> | <b>91,33</b> | <b>UT</b> | <b>92,34</b> | <b>UT</b> | <b>97,59</b> | <b>UT</b> | <b>88,43</b> | <b>UT</b> | <b>-0,02</b>                    |
| <b>2.1</b> | <b>Belanja Operasi</b>                                        | <b>95,54</b>  | <b>UT</b> | <b>90,88</b> | <b>UT</b> | <b>90,5</b>  | <b>UT</b> | <b>97,34</b> | <b>UT</b> | <b>91,86</b> | <b>UT</b> | <b>-0,01</b>                    |
| 2.1.1      | Belanja Pegawai                                               | 96,41         | UT        | 93,46        | UT        | 95,8         | UT        | 97,8         | UT        | 96,52        | UT        | 0                               |
| 2.1.2      | Belanja Barang dan Jasa                                       | 82,01         | UT        | 83,68        | UT        | 84,64        | UT        | 96,95        | UT        | 85,85        | UT        | 0,01                            |
| 2.1.3      | Belanja Subsidi                                               | 100           | E         | 100          | OT        | 14,92        | UT        | 86,77        | UT        | 87,29        | UT        | 0,79                            |
| 2.1.4      | Belanja Hibah                                                 | 111,53        | OT        | 96,59        | UT        | 90,05        | UT        | 97,15        | UT        | 89,24        | UT        | -0,04                           |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial                                        | 100           | E         | 50,48        | UT        | 93,02        | UT        | 85,6         | UT        | -            | UT        | -1                              |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Modal</b>                                          | <b>102,22</b> | <b>OT</b> | <b>92,66</b> | <b>UT</b> | <b>93,02</b> | <b>UT</b> | <b>96,4</b>  | <b>UT</b> | <b>91,9</b>  | <b>UT</b> | <b>-0,02</b>                    |
| <b>2.3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>                                  | <b>82,41</b>  | <b>UT</b> | <b>41,79</b> | <b>UT</b> | <b>31,47</b> | <b>UT</b> | <b>52,18</b> | <b>UT</b> | <b>-</b>     | <b>UT</b> | <b>-1</b>                       |



| No.          | Uraian                             | 2020          |           | 2021        |           | 2022          |           | 2023         |           | 2024*        |           | Rata-rata<br>Pertumbu<br>han(%) |
|--------------|------------------------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------------------------------|
|              |                                    | %             | Ket       | %           | Ket       | %             | Ket       | %            | Ket       | %            | Ket       |                                 |
| <b>2.4</b>   | <b>Belanja Transfer</b>            | <b>100,71</b> | <b>OT</b> | <b>100</b>  | <b>E</b>  | <b>99,73</b>  | <b>UT</b> | <b>99,67</b> | <b>UT</b> | <b>75,61</b> | <b>UT</b> |                                 |
| <b>2.4.1</b> | <b>Belanja Bagi Hasil</b>          | <b>99,49</b>  | <b>UT</b> | <b>100</b>  | <b>E</b>  | <b>100</b>    | <b>E</b>  | <b>100</b>   | <b>E</b>  | <b>83,83</b> | <b>UT</b> | <b>-0,03</b>                    |
| <b>2.4.2</b> | <b>Belanja Bantuan Keuangan</b>    | <b>101,93</b> | <b>OT</b> | <b>100</b>  | <b>E</b>  | <b>98,43</b>  | <b>UT</b> | <b>97,95</b> | <b>UT</b> | <b>32,5</b>  | <b>UT</b> | <b>-0,2</b>                     |
| 2.4.2.1      | Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota | 99,95         | UT        | 100         | E         | 98,43         | UT        | 97,95        | UT        | 32,5         | UT        | -0,24                           |
| <b>3</b>     | <b>Pembiayaan</b>                  | <b>102,6</b>  | <b>OT</b> | <b>96,9</b> | <b>UT</b> | <b>105,45</b> | <b>OT</b> | <b>100</b>   | <b>UT</b> | <b>75,09</b> | <b>UT</b> | <b>-0,06</b>                    |
| 3.1          | Penerimaan Pembiayaan              | 99,57         | UT        | 96,9        | UT        | 105,24        | OT        | 100          | UT        | 84,21        | UT        | -0,03                           |
| 3.2          | Pengeluaran Pembiayaan             | -             | UT        | -           | E         | 100           | E         | 100          | E         | 100          | E         | 0                               |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah.

Keterangan: \*unaudited

E = Equal (realisasi sama dengan target/anggaran)

UT = Under Target (realisasi lebih kecil dari target/anggaran)

OT = Over Target (realisasi lebih besar dari target/anggaran)



Kinerja realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 dapat dilihat dengan membandingkan antara anggaran pada perubahan APBD dengan realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran berkenaan. Secara umum pendapatan daerah pada periode ini cukup efisien dan terus memperlihatkan perbaikan, yang ditandai dengan selalu terlampauinya target pendapatan. Komponen PAD yang kinerjanya kurang baik dalam periode 2020-2024 adalah hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, karena hanya dua tahun terealisasi melampaui target yaitu tahun 2022 dan 2023, sedangkan tahun lalinnya tidak mencapai target atau sama dengan target. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya-upaya inovatif dalam pemanfaatan aset daerah untuk menjadi sumber pendapatan yang potensial.

Tabel 2-28 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| NO     | Uraian                                            | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                                                   | (Rp)  | (Rp)  | (Rp)  | (Rp)  | (Rp)  |
| 1.1.   | Pendapatan Asli Daerah                            | 34,89 | 39,01 | 46,82 | 46,56 | 44,29 |
| 1.1.1. | Pajak daerah                                      | 29,38 | 32,97 | 40,44 | 41,16 | 38,86 |
| 1.1.2. | Retribusi daerah                                  | 0,42  | 0,27  | 0,37  | 0,4   | 0,3   |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 0,63  | 0,59  | 0,66  | 0,69  | 0,74  |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah                            | 4,45  | 5,18  | 5,35  | 4,31  | 4,38  |
| 1.2.   | Pendapatan transfer                               | 65,05 | 60,94 | 52,86 | 52,98 | 55,23 |
| 1.3    | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah              | 0,06  | 0,05  | 0,32  | 0,46  | 0,48  |
| 1.3.1  | Hibah                                             | 0,06  | 0,04  | 0,06  | 0,46  | 0,44  |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah.

Proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dari sisi pendapatan daerah menunjukkan adanya fluktuasi. Kontribusi PAD terhadap Pendapatan daerah Provinsi Jambi pada tahun 2020- 2024 menunjukkan tren peningkatan hingga 2023 dan turun kembali pada tahun 2024, khususnya pada tahun 2022 yang naik signifikan, di mana

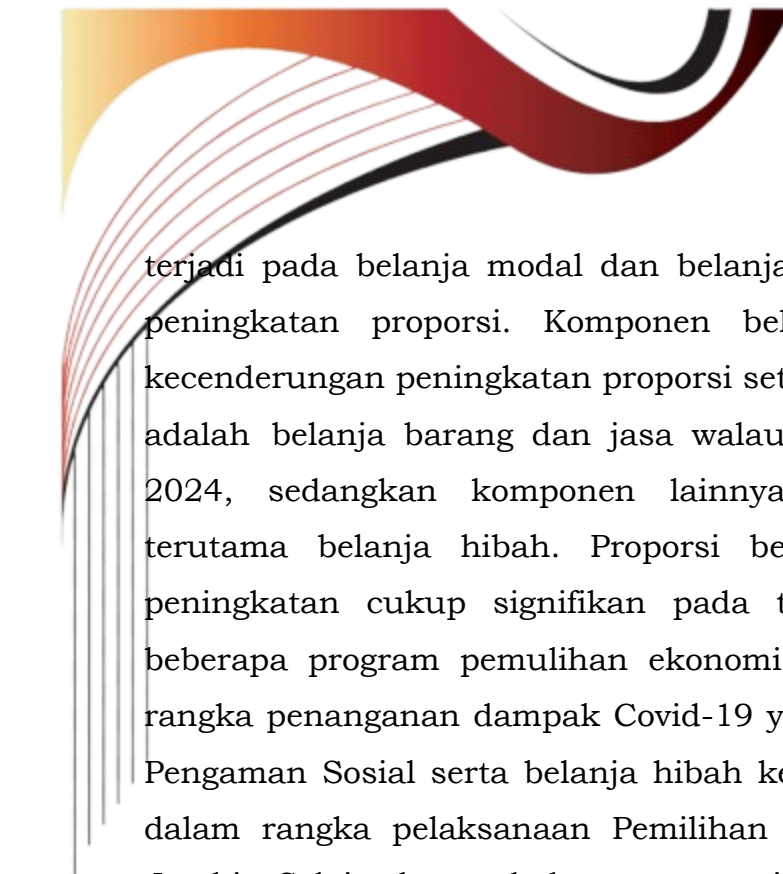
PAD berkontribusi sebesar 46,82% terhadap pendapatan. Hal sebaliknya terjadi pada pendapatan transfer yang proporsinya berfluktuatif dengan kecenderungan menurun, hingga terakhir pada tahun 2024 adalah sebesar 55,23% dari sebelumnya sebesar 65,05% pada tahun 2020. Gambaran ini telah sejalan dengan semangat otonomi daerah, di mana sumber pembiayaan pembangunan diharapkan dapat digali daerah dari sumber pendapatan daerah dan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

Tabel 2-29 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap APBD Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| No           | Uraian                                | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|              |                                       | (Rp)  | (Rp)  | (Rp)  | (Rp)  | (Rp)  |
| <b>2.1</b>   | <b>Belanja Operasi</b>                | 65,5  | 70,08 | 60,5  | 59,3  | 61,63 |
| 2.1.1        | Belanja Pegawai                       | 31,4  | 34,19 | 32,39 | 28,62 | 34,91 |
| 2.1.2        | Belanja Barang dan Jasa               | 16,78 | 17,56 | 23,88 | 26,55 | 22,12 |
| 2.1.3        | Belanja Subsidi                       | 0,01  | 0,01  | 0,03  | 0,11  | 0,07  |
| 2.1.4        | Belanja Hibah                         | 17,3  | 17,72 | 3,84  | 3,64  | 4,51  |
| 2.1.5        | Belanja Bantuan Sosial                | 0,01  | 0,6   | 0,37  | 0,07  | 0,01  |
| <b>2.2</b>   | <b>Belanja Modal</b>                  | 14,51 | 10,25 | 19,46 | 20,01 | 21,09 |
| <b>2.3</b>   | <b>Belanja Tidak Terduga</b>          | 3,45  | 1,18  | 0,19  | 0,03  | 0     |
| <b>2.4</b>   | <b>Belanja Transfer</b>               | 16,54 | 18,49 | 19,84 | 20,65 | 17,27 |
| <b>2.4.1</b> | Belanja Bagi Hasil                    | 14,24 | 16,35 | 16,49 | 17,34 | 16,09 |
| 2.4.2        | Belanja Bantuan Keuangan              | 2,3   | 2,14  | 3,36  | 3,32  | 1,19  |
| 2.4.2.1      | Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota    | 2,25  | 2,14  | 3,36  | 3,32  | 1,19  |
| 2.4.2.2      | Belanja Bantuan kepada Partai Politik | 0,04  | -     | -     | -     | -     |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025, data diolah.

Sementara untuk proporsi APBD Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 dari sisi belanja daerah memperlihatkan bahwa proporsi belanja operasi masih mendominasi belanja Pemerintah Provinsi Jambi namun dengan tren penurunan proporsi setiap tahunnya. Hal sebaliknya



terjadi pada belanja modal dan belanja transfer yang terus mengalami peningkatan proporsi. Komponen belanja operasi yang mengalami kecenderungan peningkatan proporsi setiap tahunnya hingga tahun 2023 adalah belanja barang dan jasa walaupun turun kembali pada tahun 2024, sedangkan komponen lainnya mengalami tren penurunan, terutama belanja hibah. Proporsi belanja hibah hanya mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021, seiring beberapa program pemulihan ekonomi nasional (Program PEN) dalam rangka penanganan dampak Covid-19 yang salah satunya adalah Jaring Pengaman Sosial serta belanja hibah kepada penyelenggara Pemilu pada dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. Selain bertambahnya proporsi belanja hibah, kenaikan juga terjadi pada proporsi belanja tidak terduga pada tahun 2020 sebagai antisipasi bila anggaran yang disediakan untuk penanganan dampak Covid-19 dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kurang, juga menjadi penyebab berkurangnya proporsi belanja modal pada tahun 2020 secara cukup signifikan.

#### **2.6.1.2 Neraca Daerah**

Neraca Daerah merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah daerah pada akhir periode pelaporan, yang terdiri atas informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penyusunan Neraca Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai kondisi keuangan daerah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah.

**Tabel 2-30 Neraca Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 – 31 Desember 2024**

| KD. REK  |                           | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                        | 2024*                        | GR(%)          |
|----------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|
| 1        | <b>ASET</b>               | <b>9.058.798.239.794</b> | <b>9.529.828.339.383</b> | <b>9.966.114.108.839</b> | <b>9.749.435.634.858,49</b> | <b>11.355.284.302.595,30</b> | <b>4,62</b>    |
| 01.01    | ASET LANCAR               | 765.755.995.537          | 1.145.898.246.997        | 1.126.523.999.016        | 759.129.617.876,05          | 947.405.768.770,92           | <b>4,35</b>    |
| 01.01.01 | Kas                       | 432.451.382.483          | 770.762.428.594          | 675.149.288.355          | 114.644.547.795,34          | 249.839.508.827,26           | <b>-10,39</b>  |
| 01.01.02 | Investasi Jangka Pendek   | -                        | -                        | -                        | -                           | -                            | 0              |
| 01.01.03 | Piutang                   | 56.138.206.655           | 49.782.877.651           | 38.482.007.587           | 135.272.575.841,87          | 38.482.007.586,92            | <b>-7,27</b>   |
| 01.01.04 | Belanja dibayar dimuka    | 661.979.657              | 718.057.442              | 952.947.118              | <b>900.197.421,48</b>       | <b>952.947.117,00</b>        | 7,56           |
| 01.01.05 | Piutang Lain-lain         | -                        | -                        | -                        | -                           | -                            | 0              |
| 01.01.06 | Persediaan                | 276.504.426.742          | 324.634.883.310          | 411.939.755.957          | <b>512.993.852.965,13</b>   | <b>411.939.755.956,54</b>    | 8,3            |
|          | <b>JUMLAH ASET LANCAR</b> | <b>765.755.995.537</b>   | <b>1.145.898.246.997</b> | <b>1.126.523.999.016</b> | <b>763.517.024.786,82</b>   | <b>1.126.523.999.015,63</b>  | <b>8,03</b>    |
|          | PERT.ASET LANCAR (%)      | -22,81                   | 49,64                    | -1,69                    | -32,22                      | 47,54                        | <b>-215,82</b> |
| 01.02    | INVESTASI JANGKA PANJANG  | 413.360.381.437          | 450.607.618.003          | 553.022.330.023          | 574.608.774.753,55          | 574.608.926.336,57           | <b>6,81</b>    |

| KD. REK  |                                        | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                      | 2024*                     | GR(%)         |
|----------|----------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 01.02.01 | Investasi Non Permanen                 | 12.533.929.154         | 12.730.368.321         | 12.825.541.995         | 17.645.716.537,87         | 17.645.716.537,87         | 7,08          |
| 01.02.02 | Investasi Permanen                     | 400.826.452.283        | 437.877.249.682        | 540.196.788.028        | 556.963.058.215,68        | 556.963.209.798,70        | 6,8           |
|          | <b>JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG</b> | <b>413.360.381.437</b> | <b>450.607.618.003</b> | <b>553.022.330.023</b> | <b>574.608.774.753,55</b> | <b>574.608.926.336,57</b> | <b>6,81</b>   |
|          | PERT.INVESTASI JANGKA PANJANG (%)      | -6,29                  | 9,01                   | 19,88                  | 0,71                      | -3,07                     | <b>-13,35</b> |
| 01.03    | ASET TETAP                             | 6.711.472.204.139      | 6.784.809.194.787      | 7.211.579.477.356      | 7.713.073.093.786,33      | 9.126.098.065.143,14      | <b>6,34</b>   |
| 01.03.01 | Tanah                                  | 746.820.630.097        | 798.880.080.685        | 817.996.871.480        | 824.881.110.245,76        | 1.164.939.474.828,32      | 9,3           |
| 01.03.02 | Peralatan dan Mesin                    | 1.667.913.033.379      | 1.849.155.112.542      | 2.040.524.282.940      | 2.291.355.256.162,31      | 2.439.937.443.824,91      | 7,9           |
| 01.03.03 | Gedung dan Bangunan                    | 1.720.231.317.702      | 1.912.539.362.543      | 2.274.287.391.241      | 2.412.190.447.479,19      | 2.690.023.257.472,03      | 9,35          |
| 01.03.04 | Jalan, Jaringan dan                    | 7.727.796.254.785      | 7.859.184.496.597      | 8.138.216.722.214      | 8.313.008.425.085,06      | 8.542.841.604.098,25      | 2,03          |
| 01.03.05 | Aset Tetap Lainnya                     | 466.335.510.863        | 454.067.721.432        | 446.175.353.278        | 526.367.675.032,49        | 519.982.747.867,36        | 2,2           |
| 01.03.06 | Konstruksi dalam                       | 94.622.912.487         | 86.723.699.079         | 88.983.181.957         | 490.592.194.363,32        | 823.573.585.022,98        | 54,15         |

| KD. REK  |                                        | 2020                     | 2021                     | 2022                     | 2023                        | 2024*                       | GR(%)        |
|----------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
|          | Pengerjaan                             |                          |                          |                          |                             |                             |              |
| 01.03.07 | Akumulasi Penyusutan                   | -5.712.247.455.174       | -6.175.741.278.092       | -6.594.604.325.754       | -7.145.322.014.581,81       | -7.055.200.047.970,72       | 4,31         |
|          | <b>JUMLAH ASET TETAP</b>               | <b>6.711.472.204.139</b> | <b>6.784.809.194.787</b> | <b>7.211.579.477.356</b> | <b>7.713.073.093.786,33</b> | <b>9.126.098.065.143,14</b> | <b>6,34</b>  |
|          | PERT.ASET TETAP (%)                    | 2,87                     | 1,09                     | 6,29                     | 6,95                        | 18,32                       | <b>44,85</b> |
| 01.04    | DANA CADANGAN                          | -                        | -                        | -                        | -                           | -                           | <b>0</b>     |
| 01.04.01 | Dana Cadangan                          | -                        | -                        | -                        | -                           | -                           | 0            |
|          | <b>JUMLAH DANA CADANGAN</b>            | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>0</b>     |
|          | PERT.DANA CADANGAN (%)                 | -                        | -                        | -                        | -                           | -                           | 0            |
| 01.05    | ASET LAINNYA                           | 1.168.209.658.681        | 1.148.513.279.597        | 1.074.988.302.445        | 534.707.292.029             | 540.029.172.846             | <b>-14,3</b> |
| 01.05.01 | Tagihan Piutang Penjualan Angsuran     | -                        | -                        | -                        | 702.624.148.442,58          | 707.171.542.344,79          | 0            |
| 01.05.02 | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 120.562.000              | 120.562.000              | 2.257.582.116            | 1.882.582.116,00            | 1.882.582.116,00            | 73,26        |

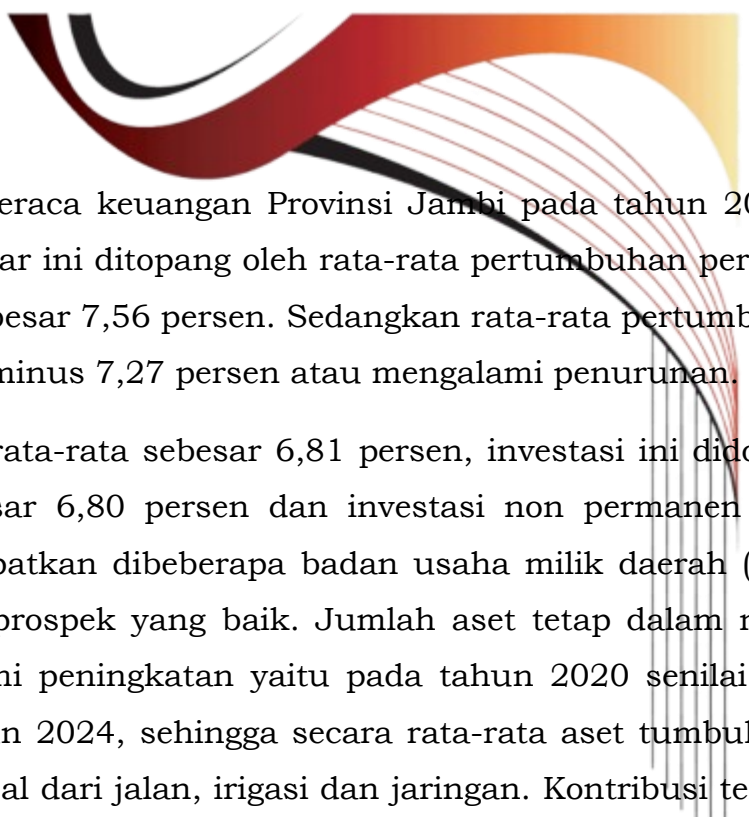


| KD. REK  |                                                    | 2020                     | 2021                        | 2022                     | 2023                        | 2024*                        | GR(%)        |
|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|
| 01.05.03 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga                      | 397.742.089.055          | 397.742.089.055             | 399.339.429.055          | 1.882.582.116,00            | 1.882.582.116,00             | -65,72       |
| 01.05.04 | Aset Tidak Berwujud                                | 10.221.497.949           | 10.500.155.449              | 14.992.603.724           | 10.861.406.090,86           | 16.709.547.424,09            | 10,33        |
| 01.05.05 | Aset Lain-lain                                     | 915.157.760.271          | 905.346.198.451             | 968.921.927.060          | 20.133.823.258,46           | 20.470.557.306,46            | -53,23       |
|          | Akumulasi Amortisasi                               | -7.515.137.483           | -7.785.942.478,66           | -8.112.020.854           | 807.171.515.753,40          | 806.420.396.753,40           | -<br>354,76  |
|          | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya- Aset Lain- lain | -147.517.113.112         | -157.409.782.879,88         | -302.411.218.657         | -307.224.617.305,47         | -307.336.492.870,03          | 15,81        |
|          | <b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>                         | <b>1.168.209.658.681</b> | <b>1.148.513.279.597,10</b> | <b>1.074.988.302.445</b> | <b>702.624.148.442,58</b>   | <b>707.171.542.344,79</b>    | <b>-9,55</b> |
|          | PERT.ASET LAINNYA (%)                              | 17,06                    | -1,69                       | -6,4                     | -34,64                      | 0,65                         | -48,02       |
|          | <b>JUMLAH ASET</b>                                 | <b>9.058.798.239.794</b> | <b>9.529.828.339.383</b>    | <b>9.966.114.108.839</b> | <b>9.749.435.634.858,49</b> | <b>11.355.284.302.595,30</b> | <b>4,62</b>  |
|          | PERT.ASET (%)                                      | 1,31                     | 5,2                         | 4,58                     | -2,17                       | 16,47                        | 65,93        |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.

Keterangan: \*unaudit





Pertumbuhan aset lancar dalam neraca keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2020-2024 rata-rata sebesar 4,62 persen. Rata-rata pertumbuhan aset lancar ini ditopang oleh rata-rata pertumbuhan persediaan sebesar 8,30 persen dan pertumbuhan belanja dibayar dimuka sebesar 7,56 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan kas dan piutang melambat masing-masing minus 10,39 persen dan minus 7,27 persen atau mengalami penurunan.

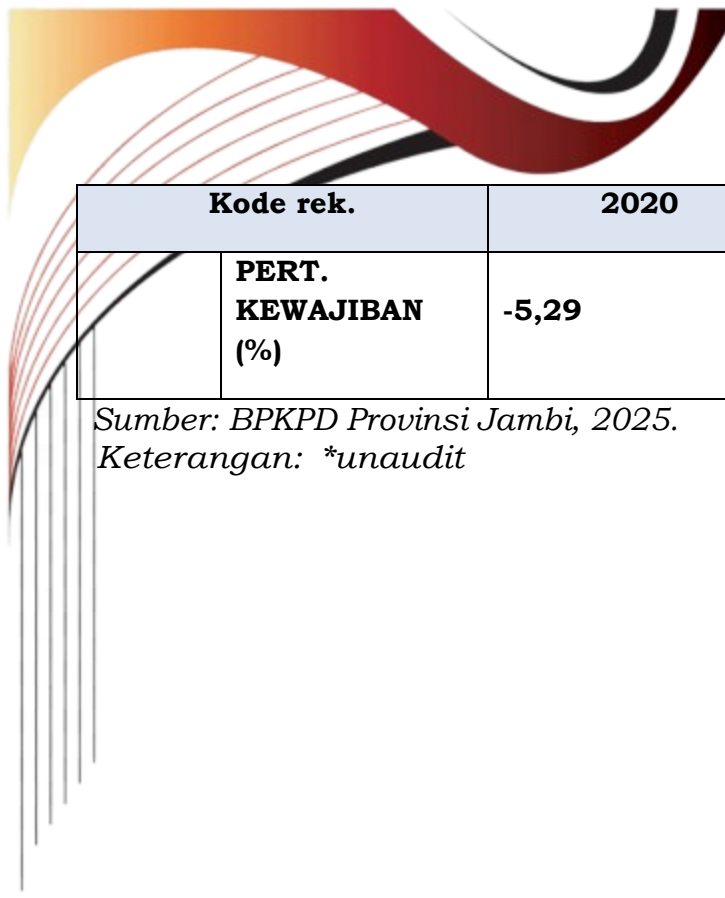
Investasi jangka panjang tumbuh rata-rata sebesar 6,81 persen, investasi ini didorong oleh peningkatan investasi permanen yang tumbuh rata-rata sebesar 6,80 persen dan investasi non permanen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 7,08 persen. Investasi ini ditempatkan di beberapa badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Jambi dan usaha lainnya yang dinilai mempunyai prospek yang baik. Jumlah aset tetap dalam neraca keuangan Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 juga mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2020 senilai Rp6.711.472.204.139,- menjadi senilai Rp9.126.098.065.143,- pada tahun 2024, sehingga secara rata-rata aset tumbuh sebesar 6,34 persen pertahun. Kontribusi terbesar dari aset tetap berasal dari jalan, irigasi dan jaringan. Kontribusi terbesar kedua adalah gedung dan bangunan, diikuti aset tetap peralatan dan mesin. Peningkatan kontribusi jalan, jaringan dan instalasi serta gedung dan bangunan ini disebabkan alokasi biaya infrastruktur kurun waktu 2020-2024 yang meningkat sehingga beberapa asset Pemerintah Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan.

**Tabel 2-31 Neraca Keuangan Kewajiban Pemerintah Provinsi Jambi Per 1 Januari 2020 - 31 Desember 2024**

| Kode rek. |                                      | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023               | 2024*              | GR (%)      |
|-----------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>2</b>  | <b>KEWAJIBAN</b>                     | <b>389.279.172.270</b> | <b>381.763.642.325</b> | <b>484.743.302.036</b> | 408.544.086.633,06 | 403.322.869.516,19 | <b>0,71</b> |
| 2 . 1     | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK              | 389.279.172.270        | 381.763.642.325        | 484.743.302.036        | 406.631.759.608,55 | 401.410.542.491,68 | <b>0,62</b> |
| 2 . 1 . 1 | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | -                      | -                      | -                      | 148.939.727,00     | 0                  |             |
| 2 . 1 . 2 | Utang Bunga                          | -                      | -                      | -                      | -                  | -                  |             |
| 2 . 1 . 3 | Utang Pajak                          | -                      | -                      | -                      | -                  | -                  |             |
| 2 . 1 . 4 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang   | -                      | -                      | -                      | 160.204.157,60     | 160.204.157,60     |             |
| 3 . 1 . 5 | Pendapatan Diterima Dimuka           | -                      | -                      | 21.037.500             | 6.187.500,00       | 21.037.500,00      |             |
| 4 . 1 . 6 | Utang Belanja                        | 244.663.792.362        | 229.780.093.222        | 331.833.591.188        | 359.421.782.041,08 | 354.334.654.651,21 | <b>7,69</b> |
| 5 . 1 . 7 | Utang Jangka Pendek Lainnya          | 144.615.379.908        | 151.983.549.104        | 152.888.673.348        | 151.983.549.104    | 152.888.673.348    | <b>1,12</b> |



| Kode rek. |                                           | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                      | 2024*                     | GR (%)        |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 6 . 1 . 8 | Utang Kepada Pihak Ketiga                 | -                      | -                      | -                      | 46.894.646.182,87         | 46.894.646.182,87         |               |
|           | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>     | <b>389.279.172.270</b> | <b>381.763.642.325</b> | <b>484.743.302.036</b> | <b>406.631.759.608,55</b> | <b>401.410.542.491,68</b> | <b>0,62</b>   |
|           | <b>PERT. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (%)</b>  | <b>-5,29</b>           | <b>-1,93</b>           | <b>26,97</b>           | <b>-16,11</b>             | <b>-1,28</b>              | <b>-24,67</b> |
| 2 . 2     | KEWAJIBAN JANGKA PANJANG                  | -                      | -                      | -                      | 1.912.327.024,51          | 1.912.327.024,51          |               |
|           | <b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>    | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>1.912.327.024,51</b>   | <b>1.912.327.024,51</b>   |               |
|           | <b>PERT. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (%)</b> | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>                  |               |
|           | <b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>                   | <b>389.279.172.270</b> | <b>381.763.642.325</b> | <b>484.743.302.036</b> | <b>408.544.086.633</b>    | <b>403.322.869.516</b>    | <b>0,71</b>   |



| Kode rek. |                                    | 2020         | 2021         | 2022         | 2023          | 2024*        | GR (%)        |
|-----------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|           | <b>PERT.<br/>KEWAJIBAN<br/>(%)</b> | <b>-5,29</b> | <b>-1,93</b> | <b>26,97</b> | <b>-15,72</b> | <b>-1,28</b> | <b>-24,74</b> |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.  
 Keterangan: \*unaudit

Pada sisi kewajiban terdapat utang jangka pendek dalam neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat dari Rp144.615.379.908,- pada tahun 2020 menjadi Rp152.888.673.348,- pada tahun 2024 atau tumbuh rata-rata sebesar 1,12 persen. Pertumbuhan utang jangka pendek ini berdampak pada kewajiban jangka pendek Pemerintah Provinsi Jambi dari Rp Rp389.279.172.270,- pada tahun 2020 menjadi Rp406.631.759.608,- pada tahun 2024 atau tumbuh rata-rata sebesar 0,62 persen. Perbedaan antara utang jangka pendek dengan kewajiban jangka pendek disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi masih mempunyai utang belanja dan utang pada pihak ketiga. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi memiliki kewajiban jangka panjang sebesar Rp1.912.327.024,- sampai tahun 2024.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar (current ratio) dan Quick Ratio. Rasio lancar adalah asset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek, sedang Quick Ratio adalah asset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio likuiditas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-32 Rasio Llikuiditas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

| Uraian           | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| Rasio Likuiditas |      |      |      |      |      |
| 1. Rasio Lancar  | 1,97 | 3,00 | 2,32 | 1,88 | 2,81 |
| 2. Quick Ratio   | 1,26 | 2,15 | 1,47 | 0,61 | 1,33 |

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025.

Rasio Lancar (Current ratio), digunakan untuk mengetahui sampai seberapa jauh Pemerintah Provinsi Jambi dapat melunasi hutang jangka pendeknya. Semakin besar rasio yang diperoleh, semakin lancar hutang pembayaran jangka pendeknya. Jika yang digunakan adalah rasio yang dibuat oleh Dun & Bradstreet (D&B), angka rasio ini mengindikasikan kemampuan Pemerintah Provinsi Jambi untuk memenuhi hutang jangka

pendeknya. Jika rasio ini lebih kecil dari 1,5, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya. Tetapi jika rasio ini cukup besar misalnya diatas 4,0, maka Pemerintah daerah dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh tagihan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Berdasarkan perhitungan, nilai rasio lancar Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 selalu lebih besar dari 1,5 namun menunjukkan tren peningkatan hingga 2,81 pada tahun 2024 dari 1,97 pada tahun 2020. Nilai yang diperoleh ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi dapat dengan mudah mencairkan asset lancarnya untuk membayar seluruh hutang atau kewajiban jangka pendeknya.

Jika dibandingkan dengan rasio lancar dengan rasio dari Dun & Bradstreet (D&B), maka quick ratio yang nilainya lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa asset lancar (setelah dikurangi persediaan) dapat menutup kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya quick ratio yang lebih kecil dari 0,75 menunjukkan bahwa Pemerintah daerah tidak mampu untuk menutup kewajiban jangka pendeknya dengan segera. Rasio keuangan ini lebih akurat dibandingkan rasio lancar (current ratio) karena Quick ratio telah mempertimbangkan persediaan dalam perhitungannya. Sebaiknya ratio ini tidak kurang dari 1 atau 100%. Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai quick ratio neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 masih lebih besar dari 1 kecuali tahun 2023. Nilai dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan asset lancar Pemerintah Provinsi Jambi setelah dikurangi persediaan, mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya. Namun nilai dari quick ratio yang berfluktuatif ini kedepan perlu pengelolaan asset lancar pemerintah daerah lebih hati-hati.

**Tabel 2-33 Rasio Solvabilitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2018-2022**

| Uraian             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|------|------|
| Rasio Solvabilitas |      |      |      |      |      |



| Uraian                              | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 1. Rasio Kewajiban Terhadap Asset   | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| 2. Rasio Kewajiban Terhadap Ekuitas | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025.

Untuk neraca keuangan daerah, rasio solvabilitas yang digunakan adalah rasio kewajiban terhadap asset dan rasio kewajiban terhadap ekuitas. Rasio kewajiban terhadap asset adalah kewajiban dibagi dengan asset, sedang rasio kewajiban terhadap equitas adalah kewajiban dibagi dengan ekuitas. Rasio kewajiban terhadap aset diperoleh dengan membandingkan kewajiban jangka panjang ditambah dengan kewajiban jangka pendek dibagi dengan asset dikurangi kewajiban (hutang jangka panjang dan jangka pendek). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2020-2024 berada pada rentang 0,04 – 0,05. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap asset, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 cukup kuat jika untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Sementara rasio kewajiban terhadap ekuitas didapat dengan membandingkan kewajiban jangka pendek dibagi dengan ekuitas. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2020-2024 berada pada rentang 0,04-0,05. Nilai rasio ini sama dengan Rasio Kewajiban Terhadap Asset, hal ini disebabkan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 tidak mempunyai kewajiban jangka panjang. Sehingga total asset dikurangi dengan kewajiban nilainya sama dengan ekuitas. Semakin kecil nilai rasio ini, maka semakin baik rasio kewajiban terhadap ekuitas, namun jika nilai rasio cukup besar atau berada diatas 0,75 maka, pihak kreditor harus berhati-hati meminjamkan memberikan kredit kepada Pemerintah daerah tersebut. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi



selama tahun 2020- 2024 cukup kuat untuk membayar jika Pemerintah Provinsi Jambi melakukan pinjaman ke kreditor.

Rasio aktivitas untuk mengukur sampai seberapa jauh aktivitas Pemerintah daerah dalam menggunakan dana-dananya secara efektif dan efisien. Rasio ini dapat mengukur efesiensi kegiatan operasional birokrasi pemerintah daerah, karena rasio ini didasarkan pada perbandingan antara pendapatan dengan pengeluaran pada waktu periode tertentu. Untuk neraca keuangan daerah, rasio aktivitas yang digunakan adalah rasio rata-rata umur piutang dan rasio rata-rata umur persediaan. Rasio rata-rata umur piutang adalah 365 hari dibagi dengan perputaran piutang, sedang rasio rata-rata umur persediaan adalah 365 hari dibagi dengan perputaran persediaan. Berdasarkan formula tersebut, maka rasio aktivitas neraca keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

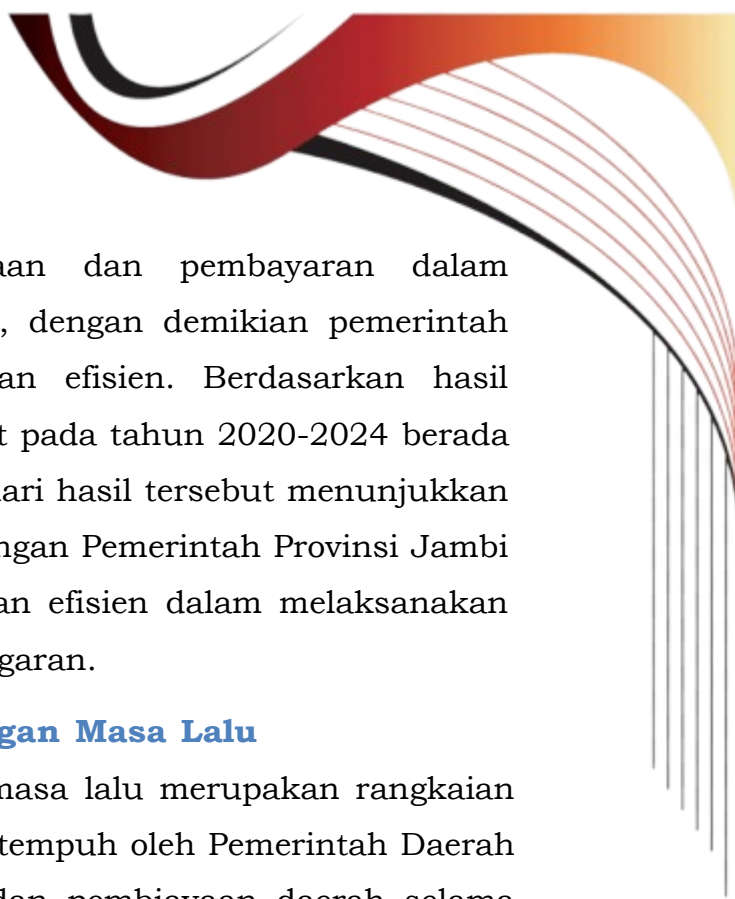
**Tabel 2-34 Rasio Aktivitas Neraca Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

| Keterangan                         | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------|-------|------|------|------|------|
| Rasio Aktivitas                    |       |      |      |      |      |
| 1. Rasio Rata-Rata Umur Piutang    | 13,46 | 2,33 | 2,10 | 1,52 | 5,22 |
| 2. Rasio Rata-Rata Umur Persediaan | 11,03 | 5,30 | 5,94 | 7,71 | 8,24 |

Sumber: Hasil Pengolahan, 2025.

Rasio rata-rata umur piutang menunjukkan berapa lama umur rata-rata piutang atau berapa lama waktu yang diperlukan dalam proses sampai dengan pembayaran tunai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tahun 2020-2024 berada pada rentang 2,10 – 13,46. Tabel di atas menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Piutang Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 relatif berfluktuasi, namun cenderung turun.

Nilai Rasio rata-rata umur persediaan menunjukan jumlah perputaran persediaan dalam satu tahun. Jika nilai rasio perputaran persediaan tinggi, berarti Pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat persediaan yang relatif rendah dan dapat mengganggu pelaksanaan proyek-proyek yang sedang berjalan. Sebaliknya jika persediaan anggaran yang relatif besar, maka Pemerintah daerah tidak mengalami



kesulitan dalam memenuhi permintaan dan pembayaran dalam pekerjaan proyek sesuai dengan jadwal, dengan demikian pemerintah daerah dapat bekerja dengan baik dan efisien. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai rasio tersebut pada tahun 2020-2024 berada pada rentang 5,94 – 11,03. Jika dilihat dari hasil tersebut menunjukkan bahwa Rata-Rata Umur Persediaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 cukup baik dan efisien dalam melaksanakan proses pembayaran dan ketersediaan anggaran.

### **2.6.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu**

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu merupakan rangkaian keputusan dan langkah strategis yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam mengatur pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode sebelumnya. Pada pemerintah Provinsi Jambi, kebijakan tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi fiskal daerah, prioritas pembangunan, serta dinamika ekonomi dan sosial yang berkembang.

#### **2.6.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran**

Kebijakan umum keuangan daerah yang tergambar dalam pelaksanaan APBD yang merupakan instrumen dalam menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah mengacu pada aturan yang melandasinya baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah. Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana.

Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur pada tahun 2020-2024 menunjukan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, sehingga proporsi belanja program selama tahun 2020-2024 sedikit terganggu. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus di periode yang akan datang agar proporsi belanja terus fokus pada belanja program untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan kesempatan kerja dan pengurangan tingkat kemiskinan. Kondisi alokasi

anggaran tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi selama periode 2020–2024 belum sepenuhnya berhasil mengarahkan prioritas belanja daerah pada sektor-sektor publik yang strategis, khususnya dalam rangka mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang mengalami kerusakan.

**Tabel 2-35 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

| No | Uraian | Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp) | Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Prosentase      |
|----|--------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
|    |        | (a)                                                   | (b)                                                       | (a)/ (b) x 100% |
| 1  | 2020   | 1.443.168.934.492                                     | 4.995.627.753.073                                         | 28,89           |
| 2  | 2021   | 1.605.159.526.709                                     | 5.207.864.660.061                                         | 30,82           |
| 3  | 2022   | 1.576.302.175.953                                     | 5.713.507.125.223                                         | 27,59           |
| 4  | 2023   | 1.485.016.143.305                                     | 5.796.539.903.660                                         | 25,62           |
| 5  | 2024   | 1.605.144.672.135                                     | 4.651.175.139.966                                         | 34,51           |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.

2.6.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah yang termuat dalam APBD Provinsi Jambi terdiri atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari SiLPA Tahun lalu, penerimaan kembali penyertaan modal, penerimaan kembali piutang dan penerimaan hutang. Sedangkan sisi pengeluaran pembiayaan terdiri dari SiLPA Tahun berkenaan, pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal/investasi. Selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto dan selisih antara penerimaan daerah dengan belanja daerah merupakan surplus/defisit belanja.

Tabel 2-36 Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| NO | Uraian                           | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | Rata-rata<br>Pertumbuhan |
|----|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|    |                                  | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (%)                      |
| 1. | Realisasi<br>Pendapatan Daerah   | 4.176.315.760.183 | 4.401.754.558.279 | 4.335.678.330.489 | 4.623.218.413.285 | 4.732.466.084.399 | 2,53                     |
|    | Dikurangi realisasi:             |                   |                   |                   |                   |                   |                          |
| 2. | Belanja Daerah                   | 4.585.971.756.628 | 4.804.809.609.170 | 5.048.952.520.090 | 5.175.212.402.247 | 4.597.652.753.214 | 0,05                     |
| 3. | Pengeluaran<br>Pembiayaan Daerah | 12.500.000.000    | -                 | 27.206.531.182    | 10.134.000.000    | 30.160.204.158    | 0                        |
|    | Defisit riil                     | (422.155.996.445) | (403.055.050.891) | (740.480.720.783) | (562.127.988.962) | 104.653.127.027   | -175,66                  |

Sumber: BPKPD Provins Jambi, 2025, Data diolah.

Defisit riil anggaran Provinsi Jambi selama tahun 2020 hingga 2023 konsisten mengalami defisit hingga mencapai sebesar 562,12 miliar rupiah di tahun 2023. Pada tahun 2024, anggaran mengalami surplus yang mencapai sebesar 104,65 miliar rupiah.

**Tabel 2-37 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

| No. | Uraian                                                            | Proporsi dari total defisit riil |      |      |      |      |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|
|     |                                                                   | 2020                             | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|     |                                                                   | (%)                              | (%)  | (%)  | (%)  | (%)  |
| 1.  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya | 1,00                             | 1,00 | 0,93 | 1,12 | 0,80 |
| 2.  | Pencairan Dana Cadangan                                           | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 3.  | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan                  | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 4.  | Penerimaan Pinjaman Daerah                                        | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 5.  | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                      | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 6.  | Penerimaan Piutang Daerah                                         | 0                                | 0    | 0    | 0    | 0    |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025

Selisih dari penerimaan pembangunan dengan pengeluaran pembiayaan adalah pembiayaan netto. Hasil memperlihatkan bahwa pembiayaan APBD Provinsi Jambi selama tahun 2020-2024 sangat tergantung pada Silpa baik Silpa tahun lalu maupun tahun berkenaan. Oleh karena itu kedepan perlu dikembangkan sumber pembiayaan pembangunan melalui penyertaan modal pada BUMD, pembentukan dana cadangan ataupun investasi pada sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan, sehingga sumber pembiayaan pembangunan menjadi lebih beragam.

**2.6.3 Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan merupakan salah satu bagian penting dari kerangka keuangan yang memiliki hubungan erat dengan kapasitas pemerintah dalam membiayai belanja daerah. Penyusunan kerangka pendanaan bertujuan untuk mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam proses perencanaan kinerja pemerintah daerah dalam suatu periode, sehingga tercapai sinkronisasi dan keselarasan antara target-target

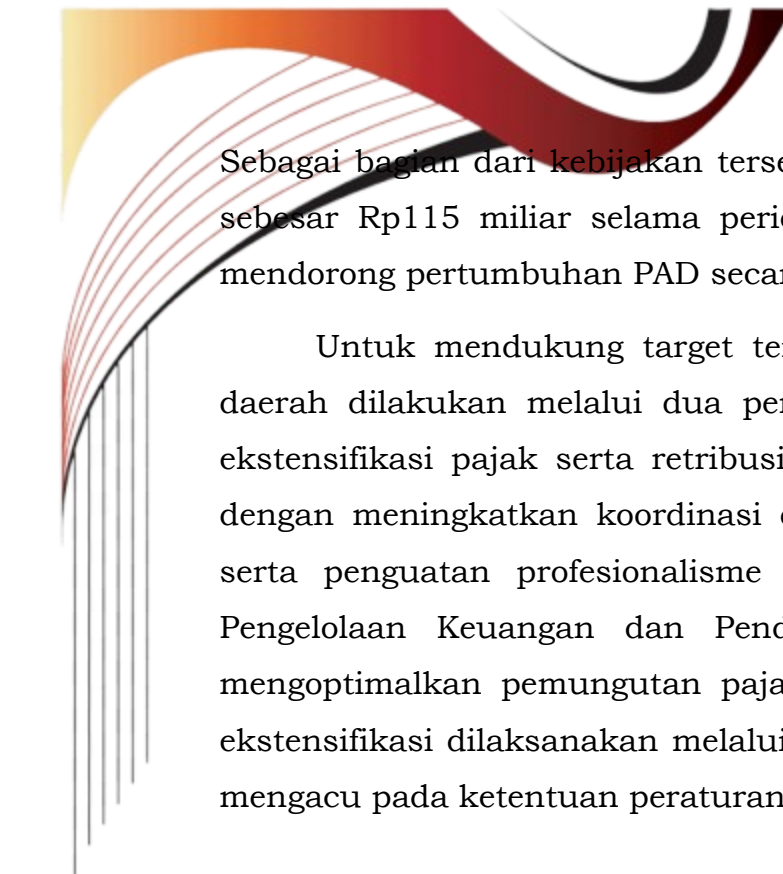
pembangunan daerah dengan kemampuan keuangan yang dimiliki. Selain itu, analisis terhadap kerangka pendanaan dilakukan untuk menghitung kapasitas keuangan riil daerah yang dapat dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan jangka menengah daerah

#### **2.7.1.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah, aspek pendapatan daerah memegang peranan yang sangat krusial. Pengelolaan keuangan daerah tidak dapat dilaksanakan secara optimal tanpa didahului oleh identifikasi dan pengukuran sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Oleh karena itu, penyusunan pendapatan daerah harus menjadi langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan, yang kemudian diikuti dengan tahapan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi terhadap seluruh komponen pendapatan, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, maupun Dana Bagi Hasil Provinsi, perlu dilakukan secara terencana dan berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran. Sejalan dengan itu, rencana pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Provinsi Jambi Tahun 2026–2030 disusun berdasarkan estimasi yang terukur dan rasional, dengan memperhatikan potensi riil dari masing-masing sumber pendapatan. Adapun sumber utama pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kontribusi terbesar masih berasal dari bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk dana transfer. Sementara itu, penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2030, meskipun proporsinya belum menjadi yang dominan. Kondisi ini mencerminkan bahwa pembiayaan pembangunan di Provinsi Jambi hingga saat ini masih sangat bergantung pada alokasi dari Pemerintah Pusat, khususnya untuk belanja pegawai yang sebagian besar ditopang melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Seiring dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan arah kebijakan untuk meningkatkan kapasitas pendapatan daerah, khususnya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).



Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, direncanakan peningkatan investasi sebesar Rp115 miliar selama periode lima tahun, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PAD secara berkelanjutan.

Untuk mendukung target tersebut, strategi peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Strategi intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dan sinergi bersama instansi pemungut, serta penguatan profesionalisme dan kompetensi aparatur pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi, guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi. Sementara itu, strategi ekstensifikasi dilaksanakan melalui perluasan basis pemungutan yang tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Tabel 2-38 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi Tahun 2026-2030

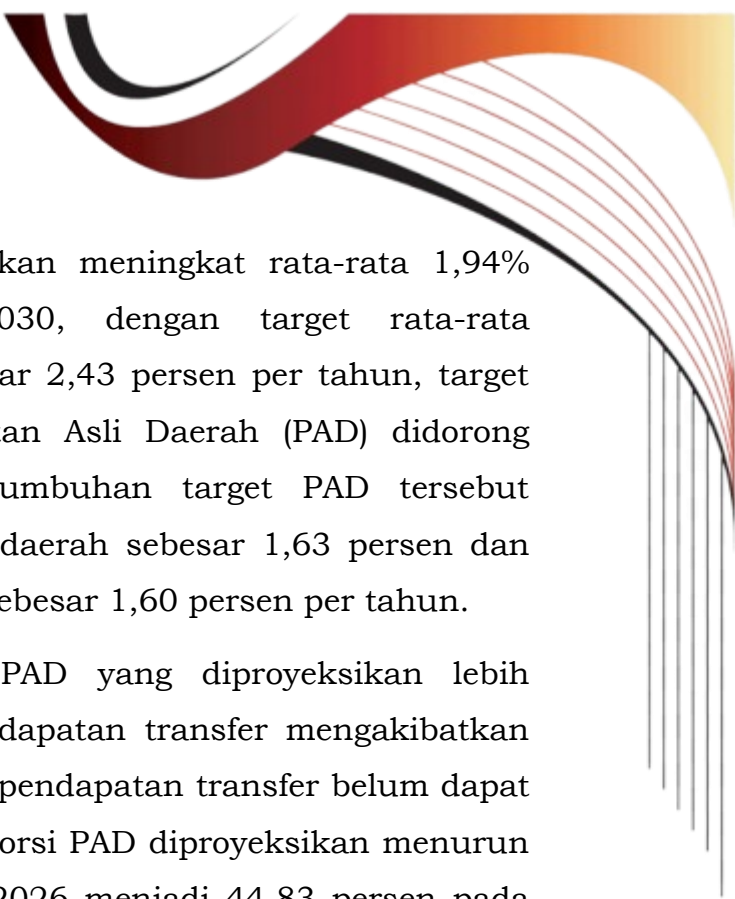
| No.    | Uraian                                            | Baseline 2024     | Proyeksi          |                   |                   |                   |                   | Rata-rata<br>Pertumbuhan (%) |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|        |                                                   |                   | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |                              |
|        |                                                   |                   | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              |                              |
| 1      | PENDAPATAN                                        | 4.732.466.084.399 | 4.463.169.552.167 | 4.521.629.605.743 | 4.652.499.551.321 | 4.781.780.845.668 | 4.913.877.487.090 | 1,94                         |
| 1.1.   | Pendapatan Asli Daerah                            | 2.095.941.407.210 | 2.044.276.611.767 | 2.065.129.905.751 | 2.111.473.004.005 | 2.157.250.131.954 | 2.202.939.853.536 | 1,51                         |
| 1.1.1. | Pajak daerah                                      | 1.839.108.467.508 | 1.683.672.147.921 | 1.700.543.089.336 | 1.742.574.187.969 | 1.783.958.076.305 | 1.825.171.693.481 | 1,63                         |
| 1.1.2. | Retribusi daerah                                  | 14.250.945.752    | 199.117.628.465   | 203.099.981.034   | 207.161.980.655   | 211.305.220.268   | 215.531.324.673   | 1,6                          |
| 1.1.3. | Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan | 35.478.131.502    | 125.359.863.220   | 125.359.863.220   | 125.359.863.220   | 125.359.863.220   | 125.359.863.220   | 0                            |
| 1.1.4. | Lain-lain PAD yang sah                            | 207.103.862.448   | 36.126.972.161    | 36.126.972.161    | 36.376.972.161    | 36.626.972.161    | 36.876.972.161    | 0,41                         |
| 1.2.   | Pendapatan Transfer                               | 2.613.755.920.792 | 2.402.397.940.400 | 2.454.699.699.992 | 2.539.208.547.316 | 2.622.694.533.714 | 2.709.083.091.754 | 2,43                         |
| 1.2.1. | Pendapatan Transfer Pemerintah                    |                   | 2.402.397.940.400 | 2.454.699.699.992 | 2.539.208.547.316 | 2.622.694.533.714 | 2.709.083.091.754 | 2,43                         |

| No.   | Uraian                                | Baseline 2024     | Proyeksi          |                   |                   |                   |                   | Rata-rata<br>Pertumbuhan (%) |
|-------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
|       |                                       |                   | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              | 2030              |                              |
|       |                                       |                   | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              | (Rp)              |                              |
|       | Pusat                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                              |
| 1.2.. | Dana Insentif Daerah                  |                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0                            |
| 1.3   | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  | 22.768.756.398    | 16.495.000.000,00 | 1.800.000.000     | 1.818.000.000     | 1.836.180.000     | 1.854.541.800     | -35,41                       |
| 1.3.1 | Hibah                                 | 21.121.700.781    | 16.495.000.000,00 | 1.800.000.000,00  | 1.818.000.000,00  | 1.836.180.000,00  | 1.854.541.800,00  | -35,41                       |
| 1.3.2 | Bantuan Keuangan dari Prov/Pemerintah | 44.353.468        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | 0                            |
| 2     | BELANJA                               | 4.597.652.753.214 | 4.513.022.450.088 | 4.556.482.503.664 | 4.687.352.449.243 | 4.836.633.743.589 | 4.948.730.385.011 | 1,86                         |
| 2.1   | Belanja Operasi                       | 2.833.572.488.663 | 2.438.519.936.109 | 2.360.574.916.489 | 2.377.140.665.655 | 2.671.521.592.125 | 2.484.165.808.046 | 0,37                         |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai                       | 1.605.144.672.135 | 1.640.173.184.643 | 1.645.093.704.197 | 1.652.496.625.866 | 1.669.021.592.125 | 1.685.711.808.046 | 0,55                         |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa               | 1.017.010.009.757 | 694.346.751.466   | 611.981.212.292   | 621.144.039.789   | 500.000.000.000   | 694.954.000.000   | 0,02                         |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi                       | 3.296.278.000     | 500.000.000       | 500.000.000       | 500.000.000       | 500.000.000       | 500.000.000       | 0,00                         |
| 2.1.4 | Belanja Hibah                         | 207.371.528.771   | 100.000.000.000   | 100.000.000.000   | 100.000.000.000   | 500.000.000.000   | 100.000.000.000   | 0,00                         |

| No.        | Uraian                          | Baseline 2024          | Proyeksi                 |                          |                          |                          |                          | Rata-rata<br>Pertumbuhan (%) |
|------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|
|            |                                 |                        | 2026                     | 2027                     | 2028                     | 2029                     | 2030                     |                              |
|            |                                 |                        | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                     | (Rp)                     |                              |
| 2.1.5      | Belanja Bantuan Sosial          | 750.000.000            | 3.500.000.000            | 3.000.000.000            | 3.000.000.000            | 2.000.000.000            | 3.000.000.000            | (3,04)                       |
| <b>2.2</b> | <b>Belanja Modal</b>            | <b>969.771.429.676</b> | <b>1.141.344.603.535</b> | <b>1.097.545.824.994</b> | <b>1.191.778.825.553</b> | <b>1.098.258.098.683</b> | <b>1.379.434.635.551</b> | <b>3,86</b>                  |
| <b>2.3</b> | <b>Belanja Tidak Terduga</b>    | -                      | <b>25.000.000.000</b>    | <b>25.000.000.000</b>    | <b>25.000.000.000</b>    | <b>25.000.000.000</b>    | <b>25.000.000.000</b>    | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.4</b> | <b>Belanja Transfer</b>         | <b>794.308.834.875</b> | <b>908.157.910.444</b>   | <b>1.073.361.762.181</b> | <b>1.093.432.958.035</b> | <b>1.041.854.052.782</b> | <b>1.060.129.941.414</b> | <b>3,14</b>                  |
| 2.4.1      | Belanja Bagi Hasil              | <b>739.643.062.875</b> | 729.203.910.444          | 894.407.762.181          | 914.478.958.035          | 862.900.052.782          | 881.175.941.414          | <b>3,86</b>                  |
| 2.4.2      | Belanja Bantuan Keuangan        | <b>54.665.772.000</b>  | 178.954.000.000          | 178.954.000.000          | 178.954.000.000          | 178.954.000.000          | 178.954.000.000          | <b>0,00</b>                  |
|            | Surplus (defisit)               | 104.653.127.027        | (49.852.897.921)         | (34.852.897.921)         | (34.852.897.921)         | (54.852.897.921)         | (34.852.897.921)         | <b>(6,91)</b>                |
| <b>3</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>               | <b>53.522.386.751</b>  | <b>49.852.897.921</b>    | <b>34.852.897.921</b>    | <b>34.852.897.921</b>    | <b>54.852.897.921</b>    | <b>34.852.897.921</b>    | <b>-6,91</b>                 |
| 3.1        | Penerimaan Pembiayaan           | 83.682.590.909         | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | <b>0</b>                     |
| 3.1.1      | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya |                        | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | 65.000.000.000           | <b>0</b>                     |
| 3.1.2      | Penerimaan Pinjaman             |                        | -                        | -                        | -                        | -                        | -                        | <b>0</b>                     |

| No.                                                  | Uraian                                          | Baseline 2024  | Proyeksi       |                |                |                |                | Rata-rata<br>Pertumbuhan (%) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|                                                      |                                                 |                | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                              |
|                                                      |                                                 |                | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)           | (Rp)           |                              |
|                                                      | Daerah                                          |                |                |                |                |                |                |                              |
| 3.1.3                                                | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman           |                | -              | -              | -              | -              | -              | 0                            |
| 3.2                                                  | Pengeluaran Pembiayaan                          | 30.160.204.158 | 15.147.102.079 | 30.147.102.079 | 30.147.102.079 | 10.147.102.079 | 30.147.102.079 | 14,76                        |
| 3.2.1                                                | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo |                | 147.102.079    | 147.102.079    | 147.102.079    | 147.102.079    | 147.102.079    | 0                            |
| 3.2.2                                                | Penyertaan Modal (Investasi) Pemda              |                | 15.000.000.000 | 30.000.000.000 | 30.000.000.000 | 10.000.000.000 | 30.000.000.000 | 14,87                        |
| <b>SISA LEBIH<br/>PEMBIAYAAN TAHUN<br/>BERKENAAN</b> |                                                 |                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                            |

Sumber: Hasil Proyeksi BPKPD dan Analisa Bappeda, 2025

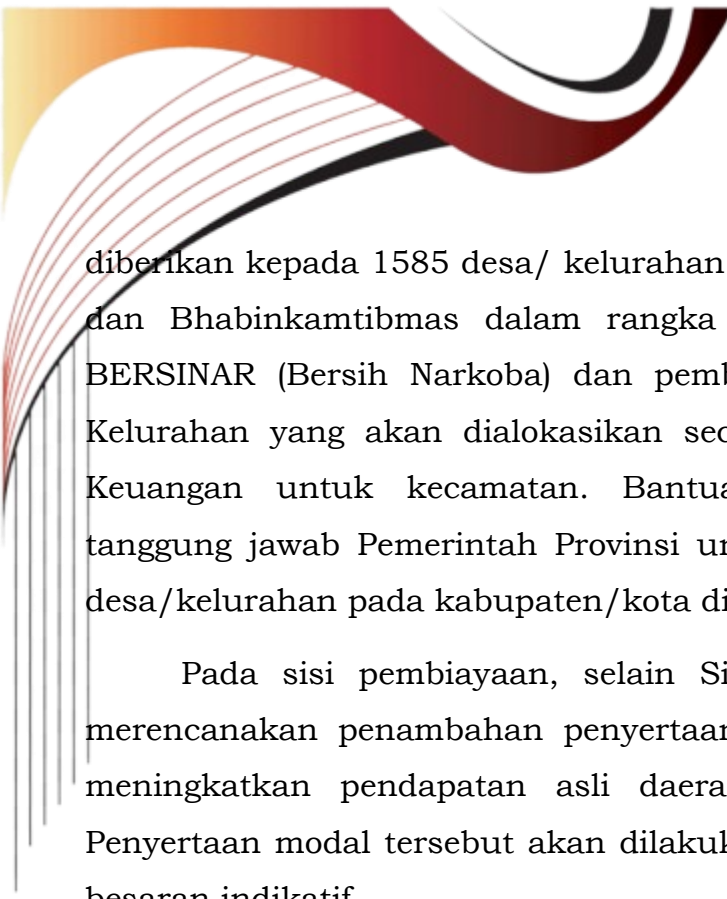


Pendapatan daerah ditargetkan akan meningkat rata-rata 1,94% tahun dalam kurun waktu 2026-2030, dengan target rata-rata pertumbuhan pendapatan transfer sebesar 2,43 persen per tahun, target rata-rata pertumbuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) didorong sebesar 1,51 persen per tahun. Pertumbuhan target PAD tersebut didukung pertumbuhan rata-rata pajak daerah sebesar 1,63 persen dan pertumbuhan rata-rata retribusi daerah sebesar 1,60 persen per tahun.

Dengan pertumbuhan rata-rata PAD yang diproyeksikan lebih rendah dari pertumbuhan rata-rata pendapatan transfer mengakibatkan ketergantungan Provinsi Jambi terhadap pendapatan transfer belum dapat berkurang hingga 5 tahun kedepan. Proporsi PAD diproyeksikan menurun dari 45,80 persen pada rencana tahun 2026 menjadi 44,83 persen pada tahun 2030 atau turun 0,97 persen. Sedangkan proporsi pendapatan transfer diproyeksikan naik dari target 53,83 persen tahun 2026 menjadi 55,13 persen pada tahun 2030 atau meningkat sebesar 1,30 persen.

Kontribusi rencana anggaran belanja dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,86 persen. Peningkatan ini didorong oleh belanja operasi yang diproyeksikan tumbuh rata-rata 0,37 persen, yang salah satunya didukung oleh pertumbuhan rata-rata belanja pegawai hanya 0,55 persen. Pertumbuhan belanja pegawai yang tidak terlalu besar ini dalam rangka memenuhi kewajiban daerah untuk mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30 persen paling lambat tahun 2027. Sementara pertumbuhan rata-rata belanja modal sebesar 3,86 persen serta rata-rata pertumbuhan belanja transfer sebesar 3,14 persen selama kurun waktu 2026-2030. Melalui proporsi belanja modal yang cukup, maka diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur pelayanan dasar di Provinsi Jambi pada periode RPJMD ini.

Sementara pada belanja bantuan keuangan direncanakan untuk penunjang pelaksanaan program PRO JAMBI setiap tahunnya untuk



diberikan kepada 1585 desa/ kelurahan, kecamatan serta insentif Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam rangka mendukung pembentukan Desa BERSINAR (Bersih Narkoba) dan pemberantasan Judi online di Desa/ Kelurahan yang akan dialokasikan secara proporsional dalam Bantuan Keuangan untuk kecamatan. Bantuan keuangan ini menunjukkan tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk mendorong pembangunan di desa/kelurahan pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Pada sisi pembiayaan, selain SiLPA, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penambahan penyertaan modal/ investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan bertahap setiap tahun dengan besaran indikatif.

#### **2.7.1.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Prinsip pengelolaan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Pada bagian ini akan dikemukakan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dari penghitungan kerangka pendanaan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2-39 Rencana Anggaran Belanja Wajib dan Mengikat Provinsi Jambi Tahun 2026-2030

| No | Uraian                                                                                                   | 2025<br>(Rp)             | Tingkat<br>pertumb<br>uhan (%) | Proyeksi                 |                          |                          |                          |                          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                                                                                                          |                          |                                | 2026<br>(Rp)             | 2027<br>(Rp)             | 2028<br>(Rp)             | 2029<br>(Rp)             | 2030<br>(Rp)             |
| 1  | Belanja Pegawai                                                                                          | 1.843.726.203.467        | 0,02                           | 1.948.726.203.467        | 2.046.162.513.640        | 2.107.547.389.050        | 2.128.622.862.940        | 2.192.481.548.828        |
| 2  | Belanja Bunga                                                                                            | 0                        | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 3  | Belanja bagi hasil                                                                                       | 729.203.910.444          | 0,04                           | 729.203.910.444          | 894.407.762.181          | 914.478.958.035          | 862.900.052.782          | 881.175.941.414          |
| 4  | Belanja PRO JAMBI                                                                                        | 0                        | 0                              | 478.954.000.000          | 478.954.000.000          | 478.954.000.000          | 478.954.000.000          | 478.954.000.000          |
| 5  | Pengeluaran<br>Pembiayaan                                                                                | 15.147.102.079           | 0,15                           | 15.147.102.079           | 30.147.102.079           | 30.147.102.079           | 10.147.102.079           | 30.147.102.079           |
| a  | Pembentukan Dana<br>Cadangan                                                                             | 0                        | 0                              | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| b  | Pembayaran pokok<br>utang                                                                                | 147.102.079              | 0                              | 147.102.079              | 147.102.079              | 147.102.079              | 147.102.079              | 147.102.079              |
| c  | Penyertaan Modal                                                                                         | 15.000.000.000           | 0,15                           | 15.000.000.000           | 30.000.000.000           | 30.000.000.000           | 10.000.000.000           | 30.000.000.000           |
|    | <b>TOTAL BELANJA<br/>WAJIB DAN<br/>PENGELUARAN<br/>YANG WAJIB<br/>MENGIKAT SERTA<br/>PRIORITAS UTAMA</b> | <b>2.588.077.215.990</b> | <b>0,02</b>                    | <b>3.172.031.215.990</b> | <b>3.449.671.377.900</b> | <b>3.531.127.449.163</b> | <b>3.480.624.017.801</b> | <b>3.582.758.592.322</b> |

Sumber: BPKPD Provinsi Jambi, 2025.



Rencana anggaran belanja wajib Provinsi Jambi pada tahun 2026 ditargetkan akan mencapai sebesar Rp3.172.031.215.990,- dan direncanakan tumbuh rata-rata 0,02 persen hingga menjadi Rp3.582.758.592.322,- pada tahun 2030. Belanja pegawai akan menjadi salah satu komponen belanja yang memiliki nilai yang besar yaitu pada tahun 2026 akan mencapai sebesar Rp1.948.726.203.467,- dan terus meningkat hingga mencapai Rp2.192.481.548.828,- di tahun 2030.

**Tabel 2-40 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030**

| No. | Uraian                                                                  | Proyeksi          |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|     |                                                                         | 2026<br>(Rp)      | 2027<br>(Rp)      | 2028<br>(Rp)      | 2029<br>(Rp)      | 2030<br>(Rp)      |
| 1.  | Pendapatan                                                              | 4.176.315.760.183 | 4.401.754.558.279 | 4.335.678.330.489 | 4.623.218.413.285 | 4.732.466.084.399 |
| 2.  | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)                                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.  | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran                                    | 49.852.897.921    | 34.852.897.921    | 34.852.897.921    | 54.852.897.921    | 34.852.897.921    |
|     | Total penerimaan                                                        | 4.226.168.658.104 | 4.436.607.456.200 | 4.370.531.228.410 | 4.678.071.311.206 | 4.767.318.982.320 |
|     | Dikurangi:                                                              | 3.187.178.318.069 | 3.479.818.479.979 | 3.561.274.551.242 | 3.490.771.119.880 | 3.612.905.694.401 |
| 4.  | Belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama | 3.172.031.215.990 | 3.449.671.377.900 | 3.531.127.449.163 | 3.480.624.017.801 | 3.582.758.592.322 |
| 5.  | Pengeluaran Pembiayaan                                                  | 15.147.102.079    | 30.147.102.079    | 30.147.102.079    | 10.147.102.079    | 30.147.102.079    |
|     | Kapasitas riil kemampuan keuangan                                       | 1.038.990.340.035 | 956.788.976.221   | 809.256.677.168   | 1.187.300.191.326 | 1.154.413.287.919 |

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jambi, 2025

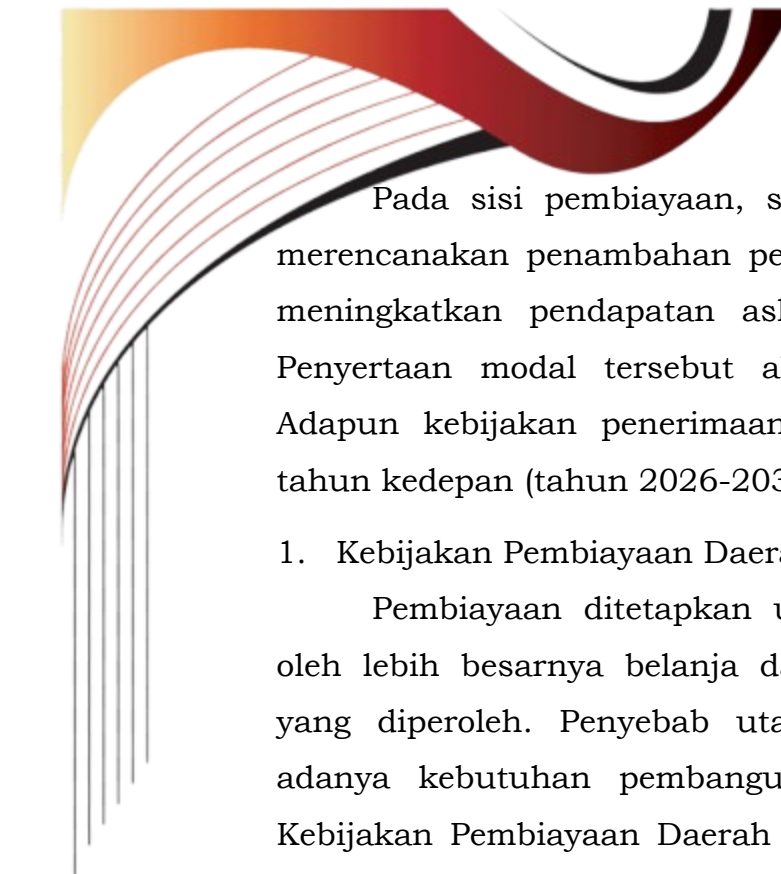
Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama tersebut, maka didapatkan realisasi kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi pada tahun 2026 adalah sebesar Rp1.038.990.340.035,- dengan rencana pertumbuhan rata- rata minus 0,02 persen hingga menjadi Rp1.154.413.287.919,- pada tahun 2030.

**Tabel 2-41 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2026 – 2030**

| No | Uraian                            | Proyeksi          |                 |                 |                   |                   |
|----|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
|    |                                   | 2026<br>(Rp)      | 2027<br>(Rp)    | 2028<br>(Rp)    | 2029<br>(Rp)      | 2030<br>(Rp)      |
|    | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 1.038.990.340.035 | 956.788.976.221 | 809.256.677.168 | 1.187.300.191.326 | 1.154.413.287.919 |
|    |                                   |                   |                 |                 |                   |                   |
|    | Prioritas I                       | 832.791.584.711   | 708.958.227.843 | 757.372.102.158 | 653.656.827.867   | 872.664.894.768   |
|    | Prioritas II                      | 206.198.755.324   | 247.830.748.378 | 51.884.575.010  | 533.643.363.459   | 281.748.393.152   |

Sumber: Hasil analisis Bappeda Provinsi Jambi, 2025

Kapasitas riil kemampuan keuangan Provinsi Jambi direncanakan untuk mendanai pembangunan di Provinsi Jambi dengan proporsi belanja prioritas I pada tahun 2026 akan mencapai sebesar Rp832.791.584.711,- yang diantaranya untuk membiayai pembangunan infrastruktur.



Pada sisi pembiayaan, selain SiLPA, Pemerintah Provinsi Jambi merencanakan penambahan penyertaan modal/ investasi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di masa yang akan datang. Penyertaan modal tersebut akan dilakukan bertahap setiap tahun. Adapun kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada 5 tahun kedepan (tahun 2026-2030) adalah sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

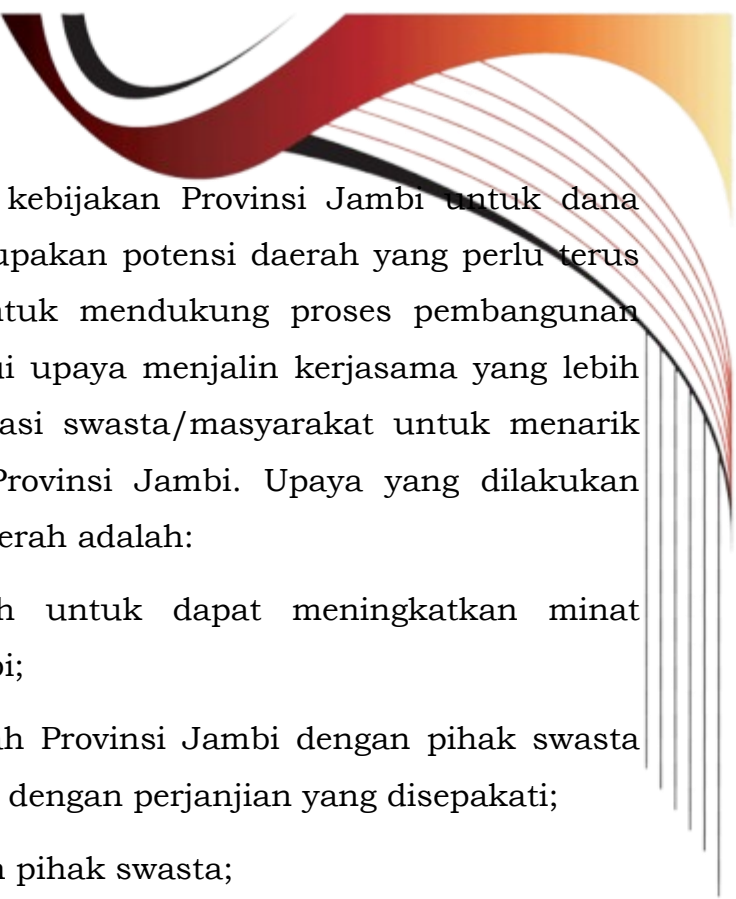
Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

#### 2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA); pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman daerah; penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Adapun Kebijakan pengeluaran pembiayaan Provinsi Jambi pada tahun 2026-2030 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD, atau pada Bank Jambi.
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.
3. Restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan bidang usaha BUMD.



Selain itu, terhadap arah kebijakan Provinsi Jambi untuk dana masyarakat dan mitra yang merupakan potensi daerah yang perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Provinsi Jambi diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar ke Provinsi Jambi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah:

1. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Provinsi Jambi;
2. Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan pihak swasta atau dengan pemerintah lain dengan perjanjian yang disepakati;
3. Kerjasama antara BUMD dan pihak swasta;
4. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana investasi ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor tanaman pangan, kehutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan emudian pengembangan industri hilir dan pengolahan yang berbasis pertanian dan kelautan, perkebunan, listrik, dan industri manufaktur;
5. Mendorong peningkatan investasi langsung dari negara lain yaitu melalui skema FDI (foreign direct investment).
6. Mendorong investasi swasta melalui skema investasi fasilitas PMA dan PMDN.
7. Mendorong investasi masyarakat yaitu investasi non fasilitas yang banyak dilakukan oleh masyarakat lokal dan masyarakat menengah kebawah.

## **2.7. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah**

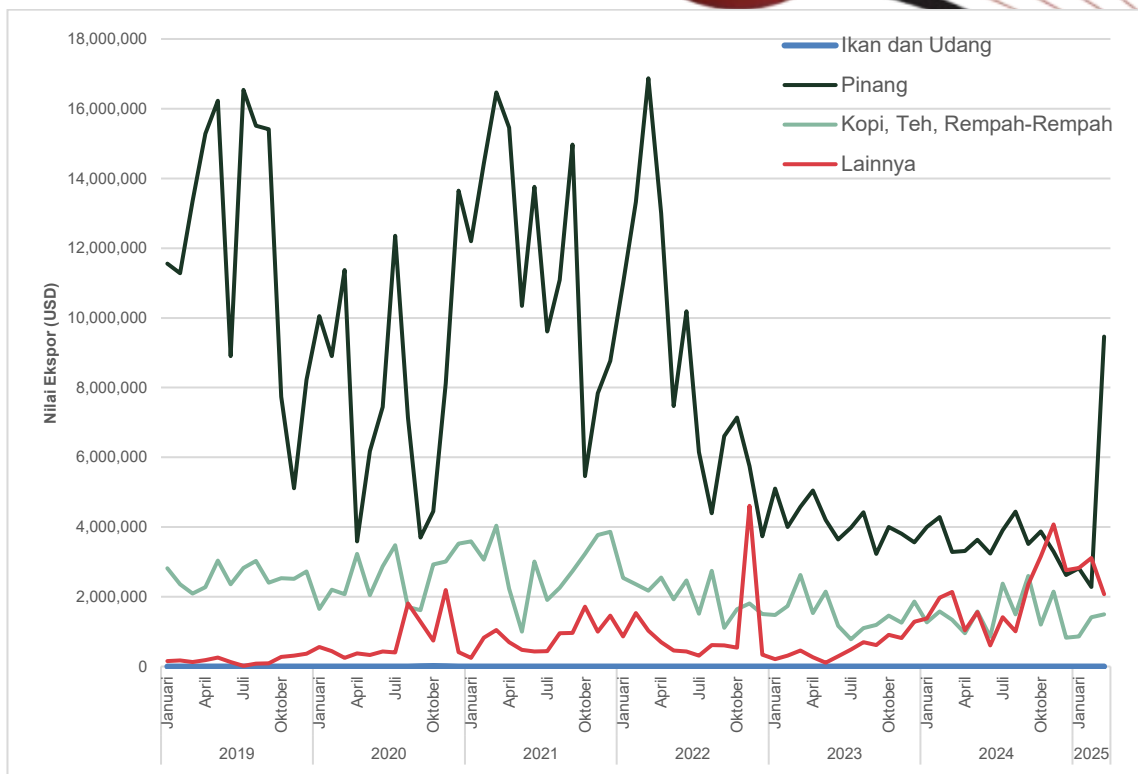
Permasalahan pembangunan Provinsi Jambi dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi permasalahan sesuai data gambaran umum dan Laporan KLHS RPJMD 2025–2029, serta penjarangan aspirasi masyarakat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jambi. Permasalahan tersebut kemudian disandingkan dengan temuan KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029, serta isu lingkungan dinamis di tingkat global, nasional, dan daerah, untuk menghasilkan rumusan isu strategis yang menjadi salah satu dasar utama dalam penetapan kinerja RPJMD Provinsi Jambi 2025–2029.

### 2.7.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Mengacu capaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Jambi selama periode sebelumnya, beberapa permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 2.7.1.1 Volatilitas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Akibat Fluktuasi Harga serta Produksi Komoditas Unggulan

Periode 2019–2024 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berfluktuasi dan konsisten di bawah angka nasional, kecuali pada masa pandemi 2020 (–0,51% versus nasional –2,07%). Setelah kontraksi terdalam pada 2020, ekonomi Jambi pulih ke 3,71% (2021) dan mencapai puncak 5,12% (2022), kemudian melambat menjadi 4,67% (2023) dan 4,51% (2024), sedangkan LPE nasional stabil di kisaran 5%. Sementara itu, inflasi Jambi juga cenderung tidak stabil (1,4% pada tahun 2019, melonjak ke 6,35% pada tahun 2022, lalu turun ke 1,43% pada tahun 2024) dibandingkan nasional yang berkisar antara 1,57–5,51%. Perbedaan tren ini menandakan kerentanan Jambi terhadap guncangan eksternal dan dinamika domestik. Secara eksternal, ekonomi Jambi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas primer (sawit, karet, batu bara) di pasar internasional, serta perlambatan ekonomi mitra dagang utama. Disrupsi rantai pasok global dan tekanan inflasi akibat kenaikan harga energi turut mendorong volatilitas. Selain itu, tren digitalisasi dan adaptasi teknologi di sektor riil masih berlangsung lambat, sehingga potensi pertumbuhan nilai tambah belum optimal.



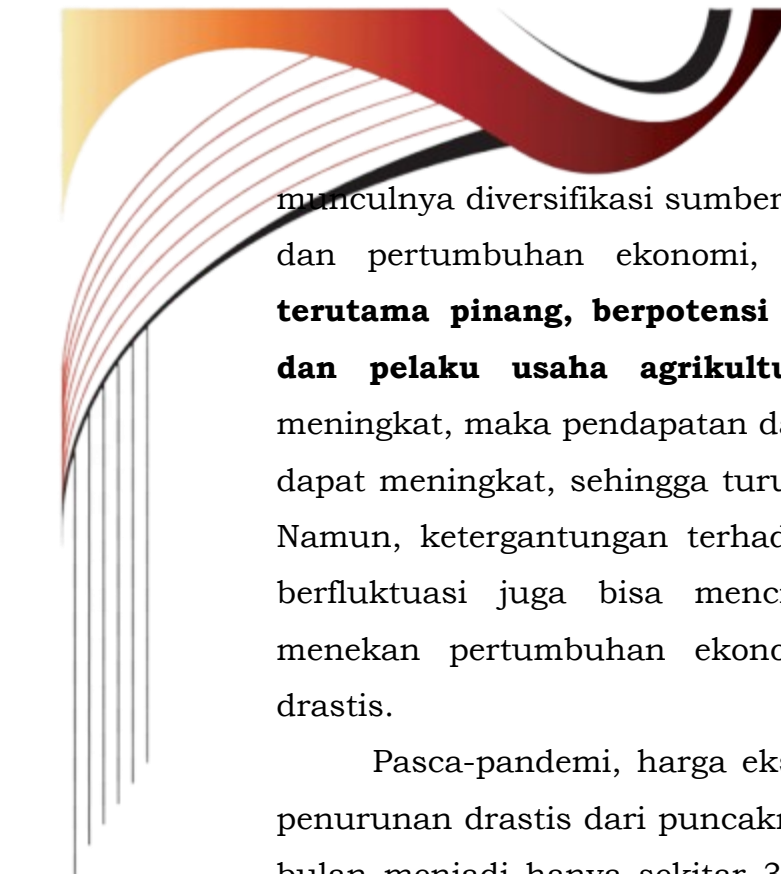
Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

**Gambar 2-79 Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Utama Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025**

Pada sektor primer (pertanian, perkebunan, dan perikanan), berdasarkan empat kelompok komoditas utama dari tahun 2019 hingga Maret 2025 (Ikan dan Udang, Pinang, Kopi, Teh, dan Rempah-rempah, serta komoditas lainnya), terlihat bahwa komoditas pinang menjadi penopang utama nilai ekspor sektor pertanian dengan kontribusi nilai yang jauh lebih besar dibandingkan komoditas lain, meskipun nilainya sangat fluktuatif. Fluktuasi tersebut cukup signifikan, namun dengan deviasi bulanan yang cenderung menurun sejak akhir 2022, menunjukkan stabilisasi nilai ekspor. Sebaliknya, komoditas seperti kopi, teh, dan rempah-rempah, serta ikan dan udang, menunjukkan nilai ekspor yang relatif lebih kecil namun stabil, meskipun terdapat beberapa lonjakan.

Jika dibandingkan antara periode sebelum COVID-19 (2019–awal 2020) dan sesudahnya, terlihat adanya penurunan dan ketidakstabilan nilai ekspor pinang yang signifikan selama tahun 2020 akibat terganggunya rantai pasok dan permintaan global saat pandemi. Namun, pada 2021 hingga pertengahan 2023, terjadi pemulihan yang cukup baik, meski tidak sepenuhnya stabil. Di sisi lain, peningkatan nilai ekspor "komoditas lainnya" setelah 2022 menunjukkan mulai

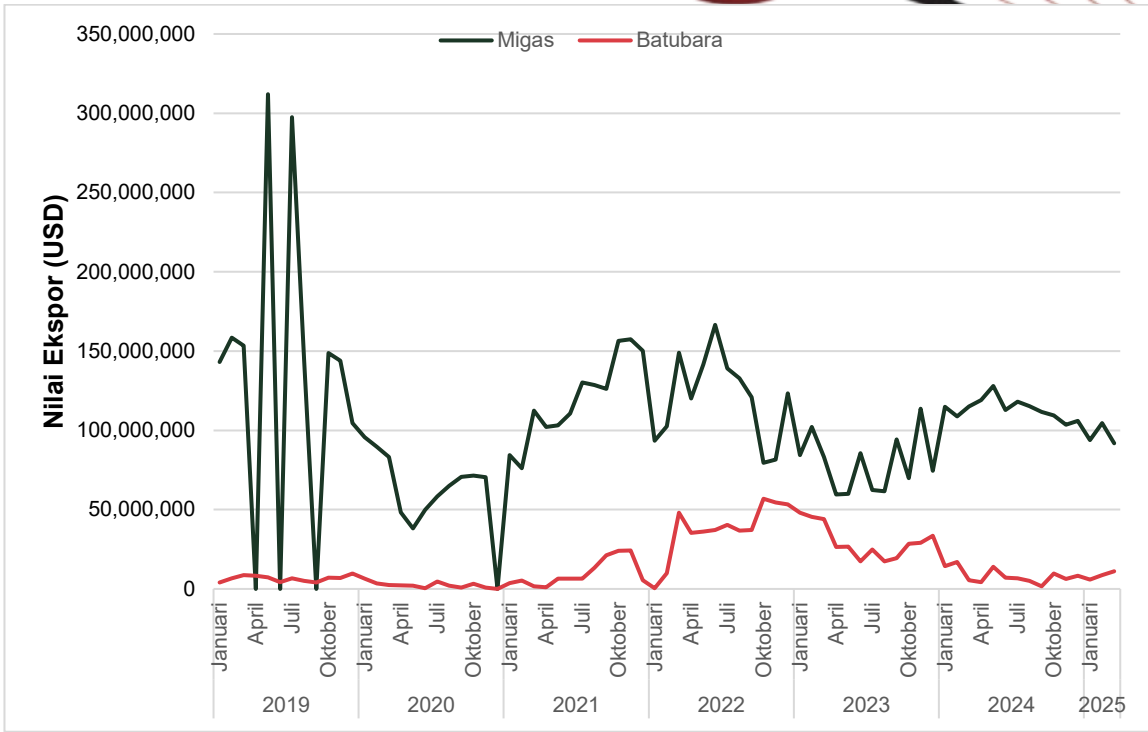




munculnya diversifikasi sumber ekspor sektor pertanian. Terkait inflasi dan pertumbuhan ekonomi, **fluktuasi harga ekspor pertanian, terutama pinang, berpotensi berdampak pada pendapatan petani dan pelaku usaha agrikultur di daerah.** Ketika harga ekspor meningkat, maka pendapatan daerah dan rumah tangga pertanian juga dapat meningkat, sehingga turut menekan inflasi dari sisi penawaran. Namun, ketergantungan terhadap komoditas tertentu yang harganya berfluktuasi juga bisa menciptakan ketidakpastian dan berisiko menekan pertumbuhan ekonomi daerah jika harga jatuh secara drastis.

Pasca-pandemi, harga ekspor pinang Provinsi Jambi mengalami penurunan drastis dari puncaknya yang kerap di atas 16 juta USD per bulan menjadi hanya sekitar 3–4 juta USD (Juni 2024, BPS Provinsi Jambi tahun 2025). Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebutuhan pasar India yang melemah dan struktur rantai pasok yang panjang, di mana pinang Jambi dikirim melalui negara ketiga sebelum mencapai konsumen akhir. Akibatnya, petani hanya menerima kurang dari 10% harga dunia (di bawah Rp 6.500/kg), walaupun kualitasnya diakui setara pinang premium global. Kelebihan pasokan lokal tanpa saluran distribusi langsung juga memperburuk dampak depresiasi harga, sehingga banyak petani mulai beralih ke tanaman lain seperti kelapa sawit untuk mengejar stabilitas pendapatan. Penurunan nilai ekspor pinang ini berimplikasi ganda pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi Jambi. Pendapatan ekspor komoditas primer yang menyusut menekan daya beli masyarakat agraris, mengurangi konsumsi domestik di pedesaan, dan memperlambat pemulihan pasca-COVID-19. Selain itu, volatilitas harga pinang turut memengaruhi stabilitas ekonomi makro, karena sektor pertanian/perkebunan masih menyumbang hampir sepertiga PDRB pertanian Jambi.

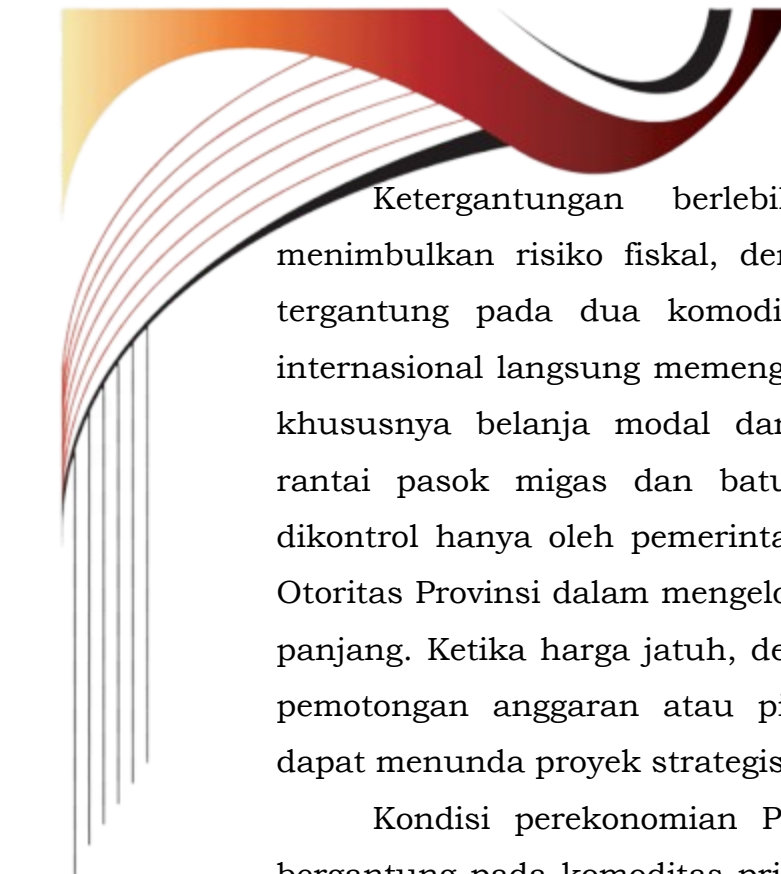




Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2025

**Gambar 2-80 Fluktuasi Nilai Ekspor (USD) Komoditas Pertambangan Provinsi Jambi Tahun 2019 – 2025**

Pada sektor pertambangan, nilai ekspor migas Provinsi Jambi jauh melampaui komoditas lain yaitu di atas 100 juta USD per bulan sejak 2021. Sementara itu, ekspor batu bara hanya memiliki total juta hingga puluhan juta USD. Sebelum pandemi, fluktuasi migas sangat tajam (melonjak ke 310 juta USD pada pertengahan 2019 yang kemudian diikuti penurunan drastis), dipicu oleh perubahan kuota lifting nasional, harga minyak mentah dunia yang bergejolak, dan pemeliharaan lapangan yang menurunkan produksi. Setelah pandemi, volatilitas ekspor migas mereda, dengan nilai ekspor yang stabil di kisaran 80–160 juta USD per bulan. Kondisi yang mulai stabil ini diperkirakan dipengaruhi oleh kontrak jangka panjang dan mekanisme lindung nilai (*hedging*) yang mulai diterapkan oleh pemerintah nasional dan provinsi. Di saat bersamaan, sektor batu bara mencatat lonjakan sementara pada awal 2022, akibat krisis energi Eropa yang mendorong harga Newcastle Index ke rekor tertinggi, meskipun kembali menurun setelah permintaan global menurun. Pola ini memperlihatkan bahwa meski batu bara sempat menjadi penyumbang pendapatan tambahan, sifatnya yang sementara dan terpengaruh kebijakan pembatasan ekspor menjadikan komoditas pertambangan kurang dapat diandalkan sebagai pilar utama ekonomi Provinsi Jambi.



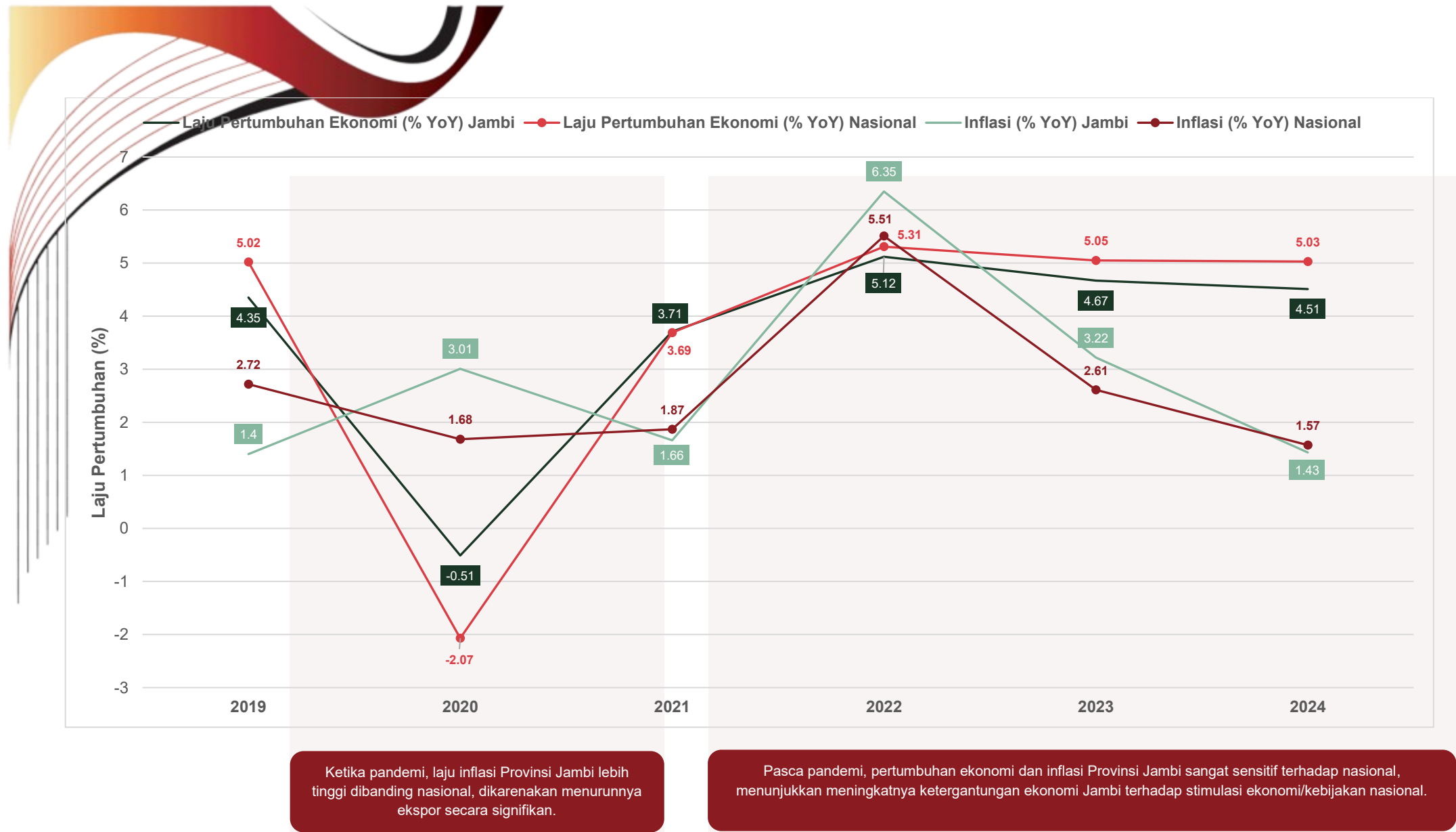
Ketergantungan berlebih pada migas dan batu bara menimbulkan risiko fiskal, dengan pendapatan daerah yang sangat tergantung pada dua komoditas primer sehingga fluktuasi harga internasional langsung memengaruhi kemampuan belanja pemerintah, khususnya belanja modal dan program pembangunan. Selain itu, rantai pasok migas dan batu bara yang panjang dan terkadang dikontrol hanya oleh pemerintah pusat menimbulkan tantangan bagi Otoritas Provinsi dalam mengelola dan merencanakan anggaran jangka panjang. Ketika harga jatuh, defisit pendapatan harus ditutup dengan pemotongan anggaran atau pinjaman daerah, yang pada akhirnya dapat menunda proyek strategis daerah.

Kondisi perekonomian Provinsi Jambi saat ini masih sangat bergantung pada komoditas primer seperti migas dan batu bara, yang minim proses hilirisasi dan memiliki rantai nilai pendek. Kurangnya industri pengolahan migas menjadi produk bernilai tambah seperti petrokimia maupun gasifikasi menyebabkan potensi ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal. Adapun sektor batu bara masih terbatas pada ekspor bahan mentah tanpa pemrosesan lanjut seperti coal-to-liquid, sehingga manfaat ekonomi yang diterima oleh Provinsi Jambi relatif kecil dibanding potensi sumber daya yang dimiliki. Selain itu, ketergantungan pada pelabuhan di luar provinsi dan lemahnya infrastruktur logistik menghambat kelancaran ekspor langsung, meningkatkan biaya distribusi, serta membatasi daya saing produk ekspor asal Provinsi Jambi di pasar global. Ketidaksiapan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Jambi masih rentan terhadap guncangan eksternal dan belum mampu menciptakan pertumbuhan yang inklusif serta berkelanjutan.

Di tingkat domestik, struktur fiskal Jambi menghadapi tantangan serius. Rasio pajak daerah terhadap PDRB masih rendah, sementara alokasi belanja modal dan transfer ke daerah belum sepenuhnya diarahkan ke proyek produktif. Belanja rutin yang besar membatasi ruang fiskal untuk stimulus infrastruktur dan dukungan UMKM, sedangkan kedua sektor tersebut sangat penting untuk memperkuat fondasi pertumbuhan yang inklusif dan *resilient*. Dari sisi inflasi, ketergantungan pasokan pangan pada luar daerah dan terbatasnya infrastruktur logistik turut memicu lonjakan harga kelompok makanan, minuman, dan tembakau, yang merupakan



kontributor utama inflasi Jambi. Selain itu, terdapat indikasi bahwa perubahan iklim turut menyebabkan musim tanam tidak menentu, sehingga memperburuk pasokan dan daya tahan harga pangan lokal.

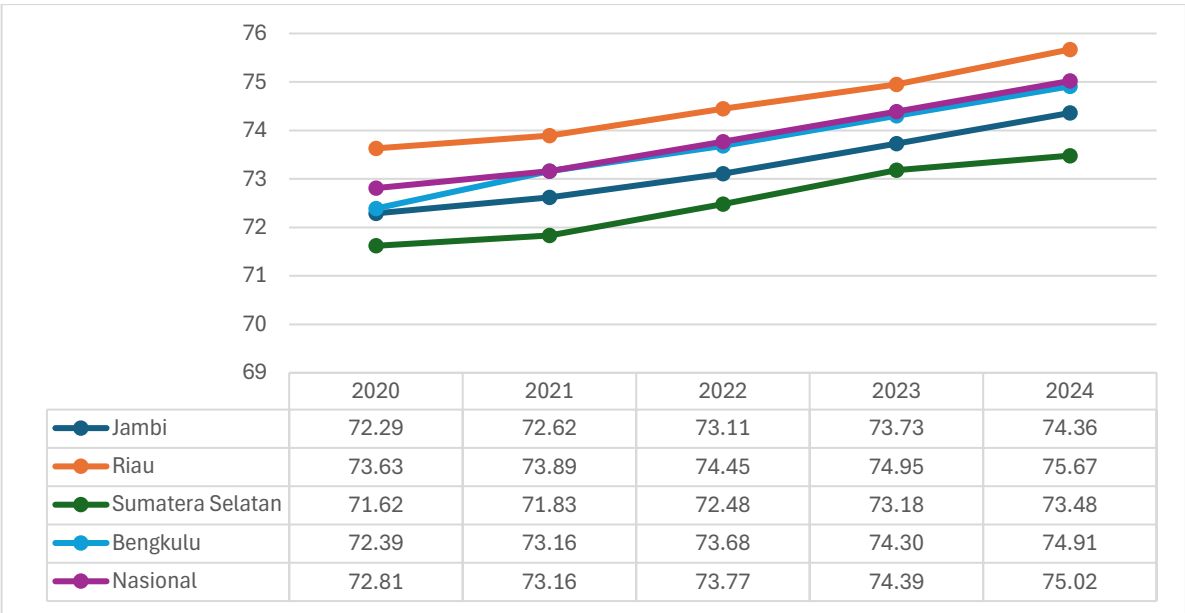


**Gambar 2-81 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Laju Inflasi Provinsi Jambi terhadap Nasional, Tahun 2019 - 2024**

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga cenderung fluktuatif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Kelompok makanan, minuman dan tembakau merupakan kelompok pengeluaran yang paling sering menyumbang inflasi di Provinsi Jambi. Hal ini turut dipengaruhi oleh pasokan bahan makanan Provinsi Jambi yang masih bergantung dengan daerah lain serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan musim panen tidak menentu.

2.7.1.2 **Belum Meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian IPM Provinsi Jambi masih di bawah beberapa provinsi lain seperti Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu serta masih di bawah capaian nasional. Capaian ini menunjukkan bahwa Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

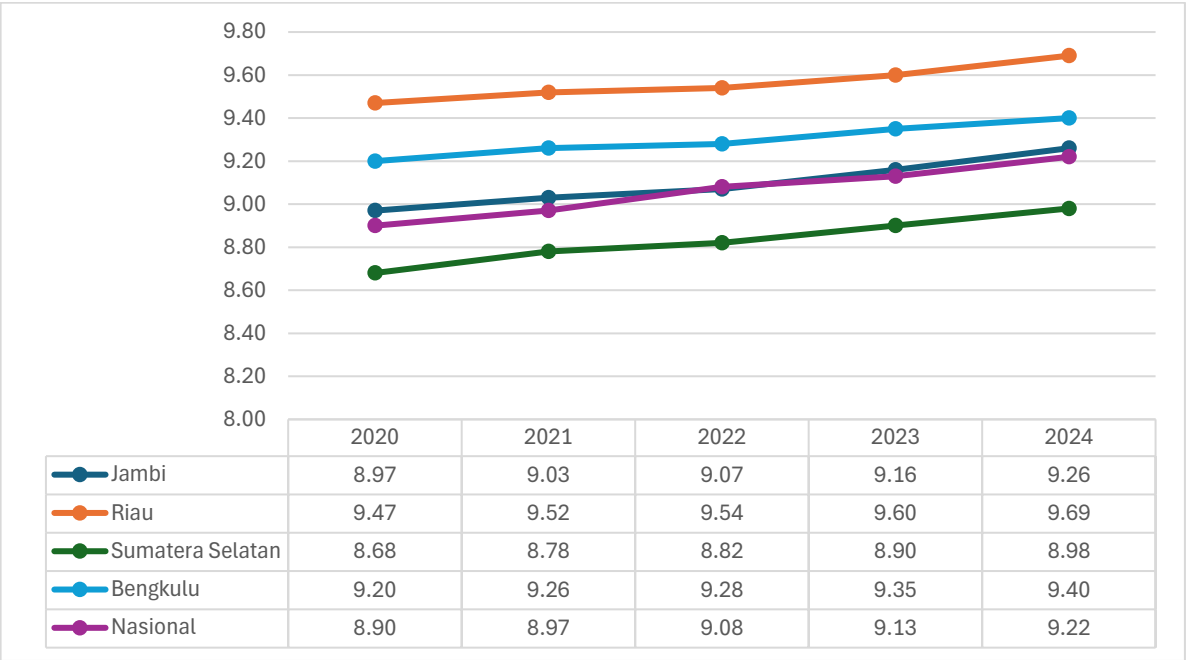


Sumber: BPS Indonesia, 2025.

**Gambar 2-82 Perbandingan IPM Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024**

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS Provinsi Jambi hingga tahun 2024 mencapai 9,26 tahun dan hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas IX atau kelas 3 SMP. Meskipun capaian RLS Provinsi Jambi lebih baik dari capaian RLS nasional, namun jika dibandingkan dengan provinsi lainnya seperti

Provinsi Riau dan Provinsi Bengkulu, capaian RLS Provinsi Jambi masih berada di bawahnya. Hal ini menggambarkan bahwa perbaikan dalam bidang pendidikan masih perlu ditingkatkan.



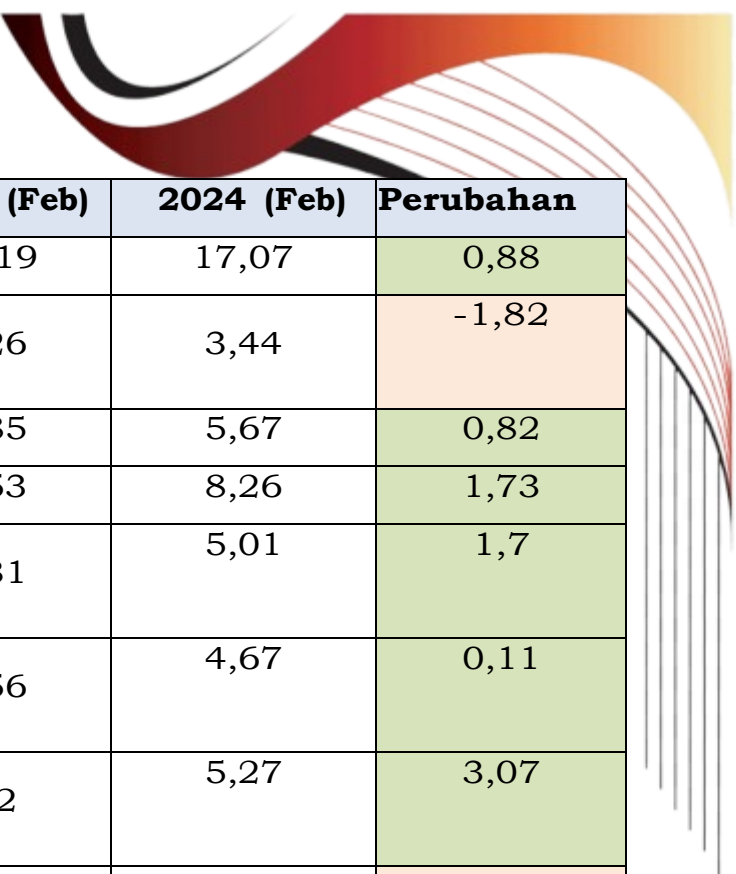
Sumber: BPS Indonesia, 2025.

**Gambar 2-83 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk umur >15 tahun Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024**

Kondisi tersebut memberikan dampak terhadap sektor ketenagakerjaan, khususnya dalam hal keterbatasan akses masyarakat Provinsi Jambi terhadap lapangan kerja formal yang umumnya menawarkan tingkat pendapatan lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Hingga tahun 2024, sebagian besar penduduk Provinsi Jambi masih bekerja di sektor informal, terutama di bidang pertanian dan jasa. Meskipun terjadi penurunan persentase pekerja informal dibandingkan tahun 2019, dominasi sektor ini masih cukup signifikan. Selain itu, masih terdapat fenomena pengangguran terselubung, yang ditunjukkan oleh tingginya proporsi tenaga kerja tidak dibayar pada usaha berskala mikro dan kecil milik keluarga atau kerabat, khususnya di sektor pertanian dan jasa.

**Tabel 2-42 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Jambi Tahun 2019 dan 2024**

| Lapangan Usaha | 2019 (Feb) | 2024 (Feb) | Perubahan |
|----------------|------------|------------|-----------|
| Pertanian      | 46,47      | 40,72      | -5,75     |

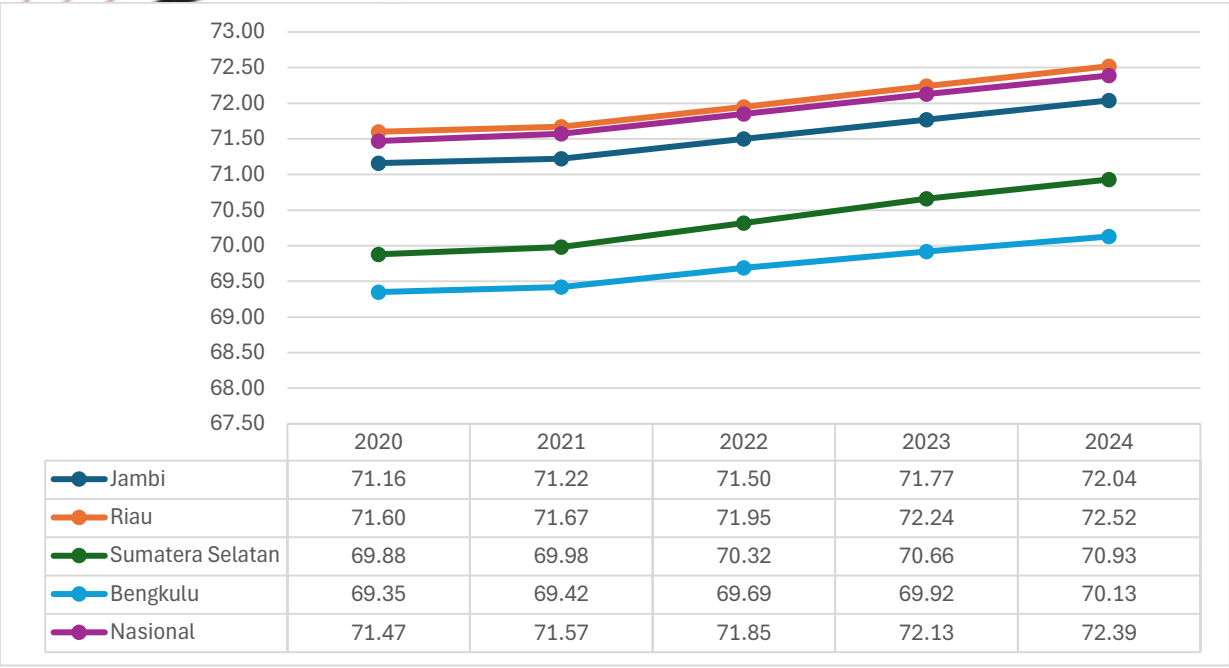


| Lapangan Usaha               | 2019 (Feb) | 2024 (Feb) | Perubahan |
|------------------------------|------------|------------|-----------|
| Perdagangan                  | 16,19      | 17,07      | 0,88      |
| Administrasi Pemerintahan    | 5,26       | 3,44       | -1,82     |
| Jasa Pendidikan              | 4,85       | 5,67       | 0,82      |
| Industri Pengolahan          | 6,53       | 8,26       | 1,73      |
| Konstruksi & Real Estate     | 3,31       | 5,01       | 1,7       |
| Akomodasi & Makan Minum      | 4,56       | 4,67       | 0,11      |
| Pertambangan Dan Penggalian  | 2,2        | 5,27       | 3,07      |
| Transportasi & Pergudangan   | 2,93       | 2,21       | -0,72     |
| Jasa Lainnya                 | 3,39       | 3,15       | -0,24     |
| Jasa Kesehatan & Keg. Sosial | 1,55       | 1,46       | -0,09     |
| Jasa Keuangan Asuransi       | 0,88       | 0,94       | 0,06      |
| Jasa Perusahaan              | 0,9        | 1,15       | 0,25      |
| Listrik, Gas Dan Air         | 0,47       | 0,13       | -0,34     |
| Informasi & Komunikasi       | 0,49       | 0,8        | 0,31      |

Sumber: BPS, 2024.

Belum optimalnya kualitas SDM juga berkaitan dengan revitalisasi SMK. Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif, peralatan praktik, dan tenaga pengajar yang mampu mengoperasikan peralatan tersebut. Selain itu, jurusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan kerja (kurangnya *link and match*) serta dominasi pembelajaran teori membuat lulusan kurang siap bersaing dan sulit terserap di dunia kerja.





Sumber: BPS Indonesia, 2025.

**Gambar 2-84 Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024**

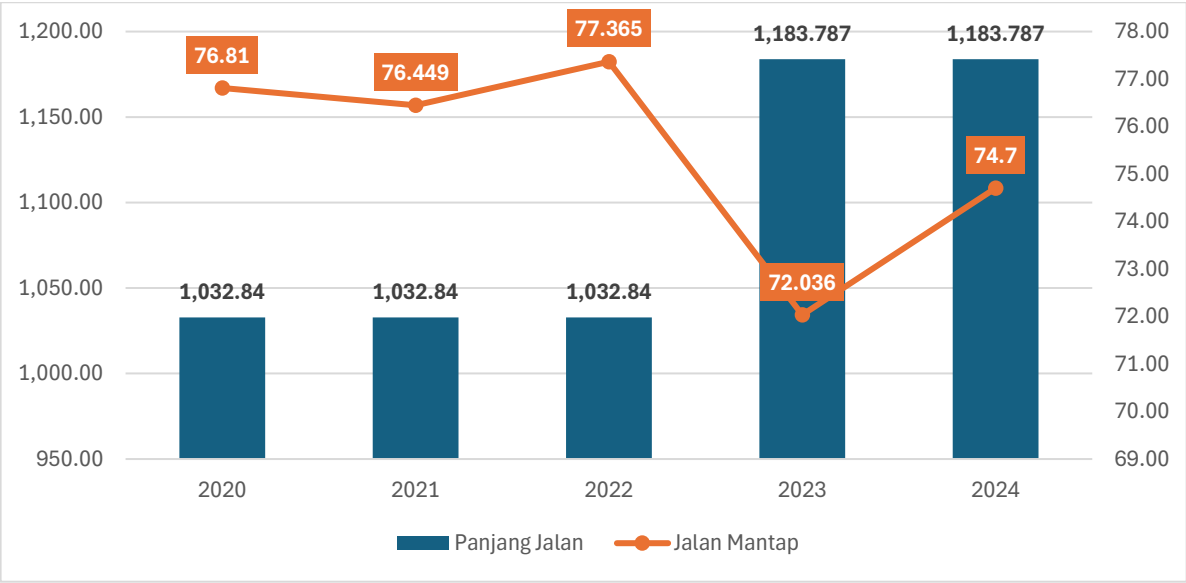
Rendahnya tingkat pendidikan di Provinsi Jambi berdampak langsung pada keterbatasan akses masyarakat terhadap lapangan usaha formal yang menawarkan penghasilan relatif tinggi, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk memperoleh aspek pendukung kesejahteraan lain (termasuk layanan kesehatan). Beberapa indikator pembangunan daerah terkait kesehatan juga menunjukkan beberapa tantangan, dengan Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Jambi meningkat dari 71,16 tahun pada 2020 menjadi 72,04 tahun pada 2024, namun masih berada di bawah rata-rata nasional sebesar 74,15 tahun dan capaian Provinsi Riau yang mencapai 74,41 tahun pada periode yang sama. Selain itu, angka kematian ibu (AKI) di Jambi tercatat 177 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kematian bayi (AKB) 17 per 1.000 kelahiran hidup, dan angka kematian anak usia 1–4 tahun sebesar 2,99 per 1.000 anak, yang menunjukkan masih tingginya risiko kesehatan ibu dan anak akibat rendahnya akses ke fasilitas kesehatan berkualitas.

Di samping itu, prevalensi perilaku merokok masyarakat Provinsi Jambi yang cukup tinggi juga memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Data Riskesdas dan BPS 2023 menunjukkan bahwa 28,67% penduduk usia 15 tahun ke atas di Jambi merokok setiap hari, bahkan rata-rata perokok menghabiskan 128,17 batang rokok per minggu. Kebiasaan ini meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular seperti

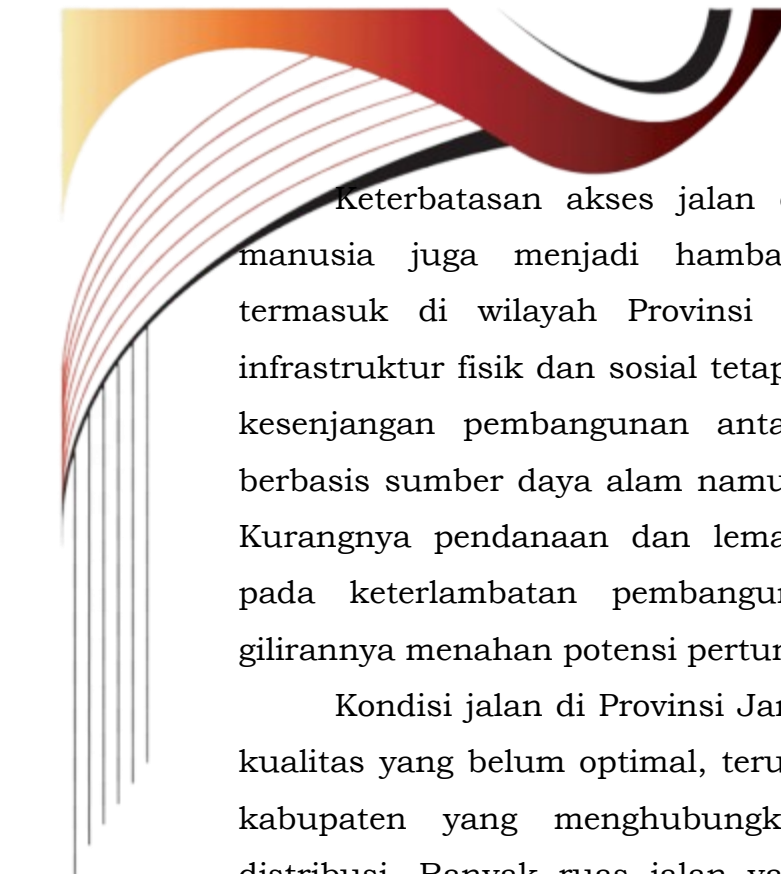
penyakit kardiovaskular dan kanker, sehingga menambah beban sistem kesehatan dan memperpanjang kesenjangan kualitas SDM.

**2.7.1.3 Kesenjangan Layanan Dasar dan Infrastruktur**

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah menunjukkan pemulihan. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian. Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu.



Sumber: Dinas PUPR Prov. Jambi, Tahun 2025  
**Gambar 2-85 Panjang Jalan Provinsi Jambi Dalam Kondisi Mantap Tahun 2020-2024**

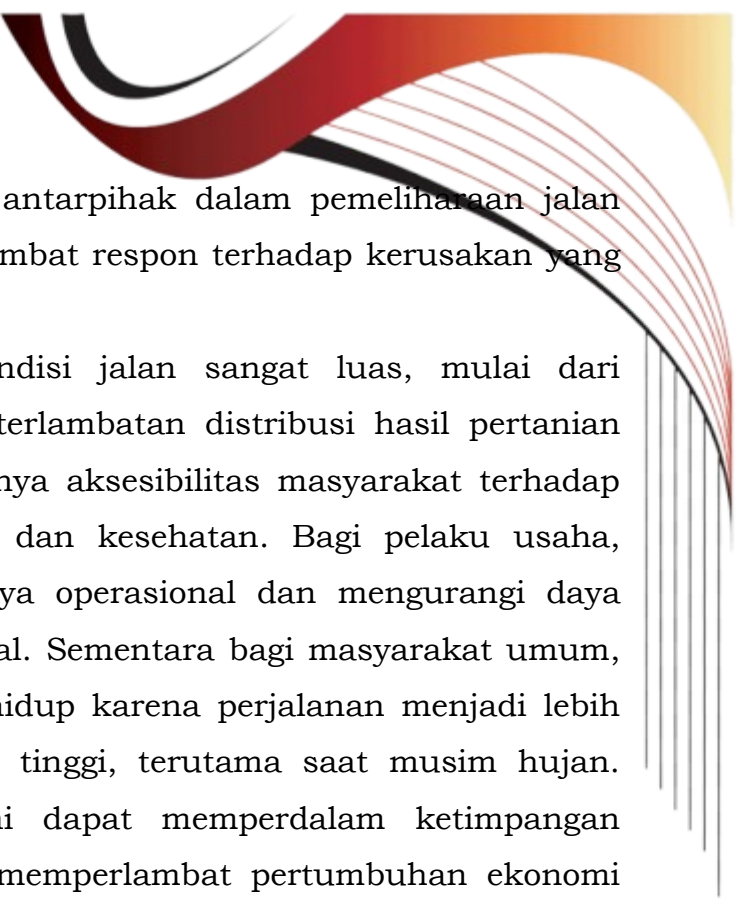


Keterbatasan akses jalan dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan dalam pembangunan, termasuk di wilayah Provinsi Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur fisik dan sosial tetap menjadi elemen vital yang menentukan kesenjangan pembangunan antarwilayah, khususnya di daerah yang berbasis sumber daya alam namun kurang didukung fasilitas penunjang. Kurangnya pendanaan dan lemahnya tata kelola berdampak langsung pada keterlambatan pembangunan infrastruktur dasar, yang pada gilirannya menahan potensi pertumbuhan ekonomi daerah.

Kondisi jalan di Provinsi Jambi hingga saat ini masih menunjukkan kualitas yang belum optimal, terutama pada ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten yang menghubungkan wilayah produksi dengan pusat distribusi. Banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan berat seperti berlubang, permukaan bergelombang, hingga kerusakan struktur akibat genangan air. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi di daerah terpencil, tetapi juga di koridor-koridor logistik utama, mencerminkan permasalahan struktural dalam pemeliharaan infrastruktur transportasi. Ketidakmantapan jalan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam kelancaran arus barang dan jasa, sekaligus menciptakan beban ekonomi tambahan bagi masyarakat.

Salah satu penyebab utama kerusakan jalan adalah tingginya intensitas curah hujan di wilayah Jambi yang tidak diimbangi dengan sistem drainase yang memadai. Genangan air yang kerap terjadi mempercepat degradasi lapisan aspal dan pondasi jalan. Selain itu, beban kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas jalan turut memperparah kondisi fisik infrastruktur. Dalam beberapa kasus, keterlambatan perbaikan juga disebabkan oleh keterbatasan material konstruksi di lokasi proyek serta ketergantungan pada proses pengadaan yang lama, sehingga kerusakan terus memburuk sebelum ada penanganan.

Di sisi lain, keterbatasan anggaran dan rendahnya kapasitas pelaksanaan teknis turut menjadi faktor penghambat perbaikan jalan secara menyeluruh. Anggaran infrastruktur yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan riil perbaikan dan pemeliharaan jalan secara berkala. Selain itu, distribusi alokasi dana cenderung terfokus pada proyek-proyek besar atau simbolik, sementara jalan-jalan penghubung desa dan sentra produksi perkebunan dibiarkan dalam kondisi rusak dalam jangka waktu

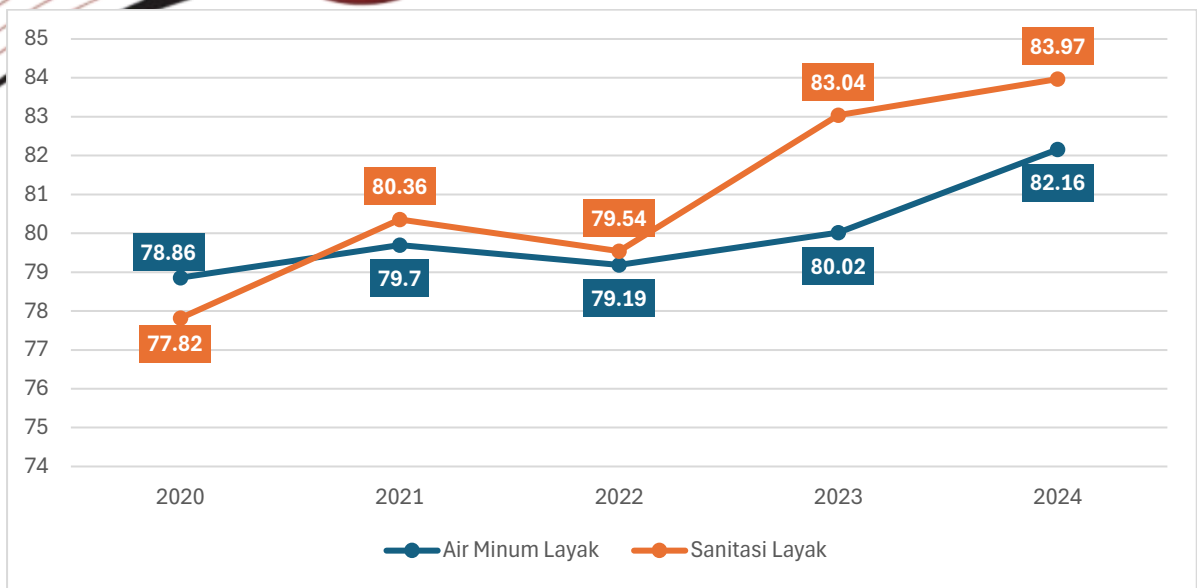


yang lama. Kurangnya koordinasi antarpihak dalam pemeliharaan jalan juga menjadi faktor yang memperlambat respon terhadap kerusakan yang ada.

Dampak dari buruknya kondisi jalan sangat luas, mulai dari peningkatan biaya logistik dan keterlambatan distribusi hasil pertanian dan perkebunan, hingga menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Bagi pelaku usaha, kerusakan jalan memperbesar biaya operasional dan mengurangi daya saing produk lokal di pasar nasional. Sementara bagi masyarakat umum, kondisi ini menurunkan kualitas hidup karena perjalanan menjadi lebih mahal, lebih lambat, dan berisiko tinggi, terutama saat musim hujan. Akumulasi dari permasalahan ini dapat memperdalam ketimpangan pembangunan antarwilayah serta memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat. Akses air minum layak di Provinsi Jambi memang menunjukkan tren peningkatan, tetapi capaian 79,19% pada tahun 2022 masih jauh dari ideal dan memperlihatkan disparitas antarkabupaten/kota: Kota Jambi mencapai 95,30%, sedangkan Merangin hanya 51,26%. Demikian pula akses sanitasi layak, meski meningkat dari 77,82% (2020) menjadi 79,54% (2022), beberapa wilayah seperti Tanjung Jabung Timur hanya mencapai 69,75%. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga di daerah terpencil atau perdesaan belum menikmati layanan dasar yang memadai.



Sumber: Dinas PUPR Provinsi Jambi, 2025

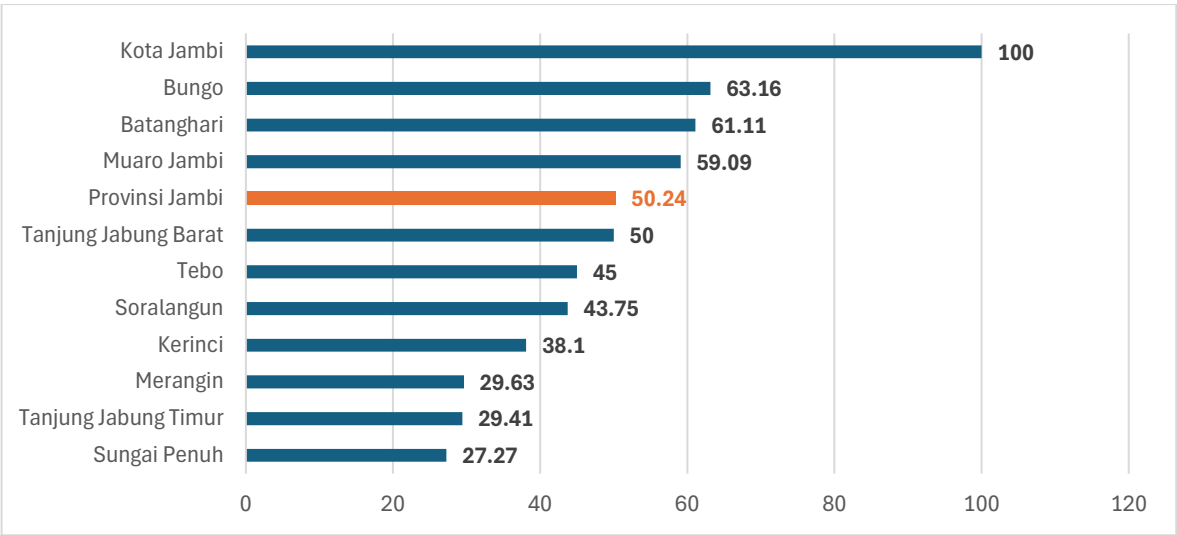
**Gambar 2-86 Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Terhadap Air Minum Layak Dan Sanitasi Layak Provinsi Jambi Tahun 2020-2024**

Permasalahan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur dan jaringan distribusi air bersih karena terdapat banyak desa belum terkoneksi dengan sistem perpipaan PAM dan mengandalkan sumber air permukaan atau sumur dangkal yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, kapasitas instalasi pengolahan air minum di PDAM regional belum mencukupi kebutuhan, sementara dana perbaikan dan penggantian pipa tua sering tertunda akibat prosedur pengadaan yang kompleks. Pada sektor sanitasi, rendahnya budaya penggunaan jamban sehat dan kurangnya fasilitas pengelolaan limbah domestik (terutama sistem septik tank terpadu) memperburuk kualitas lingkungan permukiman.

Dampak keterbatasan ini amat serius bagi kesehatan Masyarakat karena dapat menyebabkan tingginya insiden penyakit diare dan infeksi saluran pernapasan akut di daerah berakses rendah berkorelasi dengan kurangnya air bersih dan sanitasi. Anak-anak di wilayah dengan akses sanitasi di bawah rata-rata provinsi juga menunjukkan angka stunting yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa sanitasi yang buruk turut memperburuk status gizi. Selain itu, beban biaya untuk membeli air kemasan ataupun pengobatan penyakit menular menambah tekanan ekonomi rumah tangga miskin.

Kelemahan pada tata kelola dan partisipasi Masyarakat dapat menjadi penghambat dalam pemeliharaan berkelanjutan. Meskipun program seperti PAMSIMAS telah diimplementasikan di beberapa desa, evaluasi menunjukkan masih banyak kendala dalam perencanaan lokasi,

pelibatan warga, serta pemeliharaan sarana setelah pembangunan. Akibatnya, beberapa instalasi air dan sanitasi baru tidak berfungsi optimal setelah masa garansi habis, sehingga perlahan kembali ke kondisi semula. Kondisi tersebut menegaskan bahwa tanpa penataan kelembagaan dan sistem pengelolaan yang kuat, peningkatan indikator akses air minum dan sanitasi layak sulit dipertahankan.

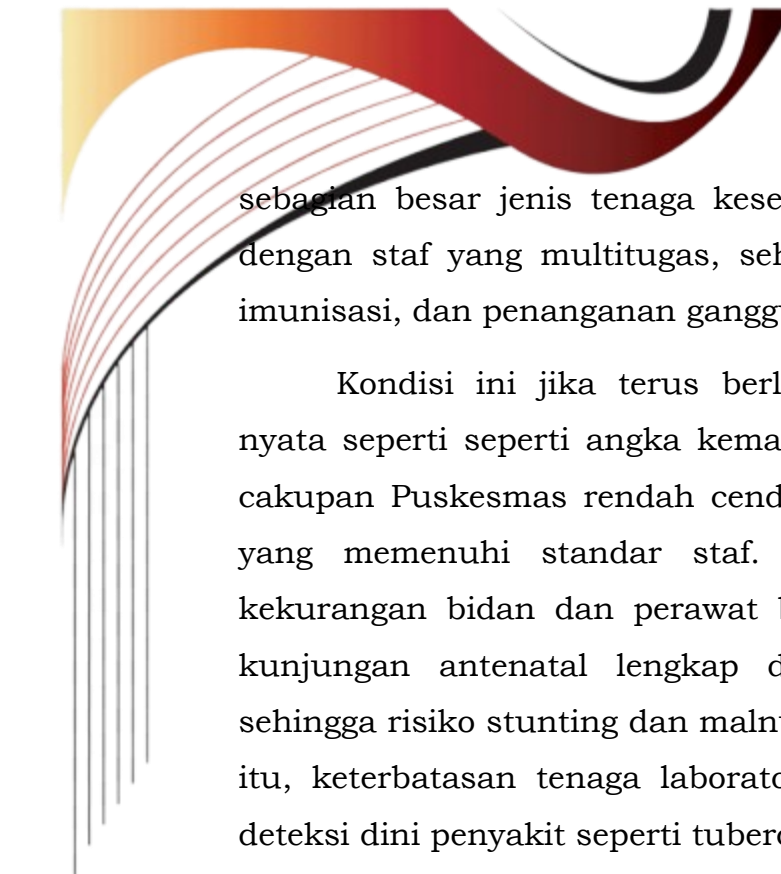


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi 2024  
**Gambar 2-87 Persentase Puskesmas Dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi**

Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa rata-rata cakupan Puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar nasional baru mencapai 50,24% pada tahun 2024. Sebaran tenaga kesehatan ini sangat timpang antarkabupaten/kota: di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, cakupannya masing-masing 100% dan 63,16%, sementara di kabupaten perbatasan seperti Merangin (29,63%), Tanjung Jabung Timur (29,41%), dan Sungai Penuh (27,27%) masih jauh di bawah standar . Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh sulitnya merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah terpencil, rendahnya insentif dan tunjangan, serta fasilitas penunjang yang belum memadai.

Ketersediaan tenaga kesehatan, terutama dokter umum, perawat, bidan, serta tenaga gizi dan sanitasi, sangat penting untuk kelancaran layanan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular. WHO merekomendasikan rasio minimal 1 dokter per 1.000 penduduk dan 2,5 tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan) per 1.000 penduduk untuk menjamin cakupan layanan yang optimal. Di Provinsi Jambi, kekurangan





sebagian besar jenis tenaga kesehatan ini memaksa Puskesmas bekerja dengan staf yang multitugas, sehingga kualitas skrining, konseling gizi, imunisasi, dan penanganan gangguan kesehatan ibu-anak tertekan.

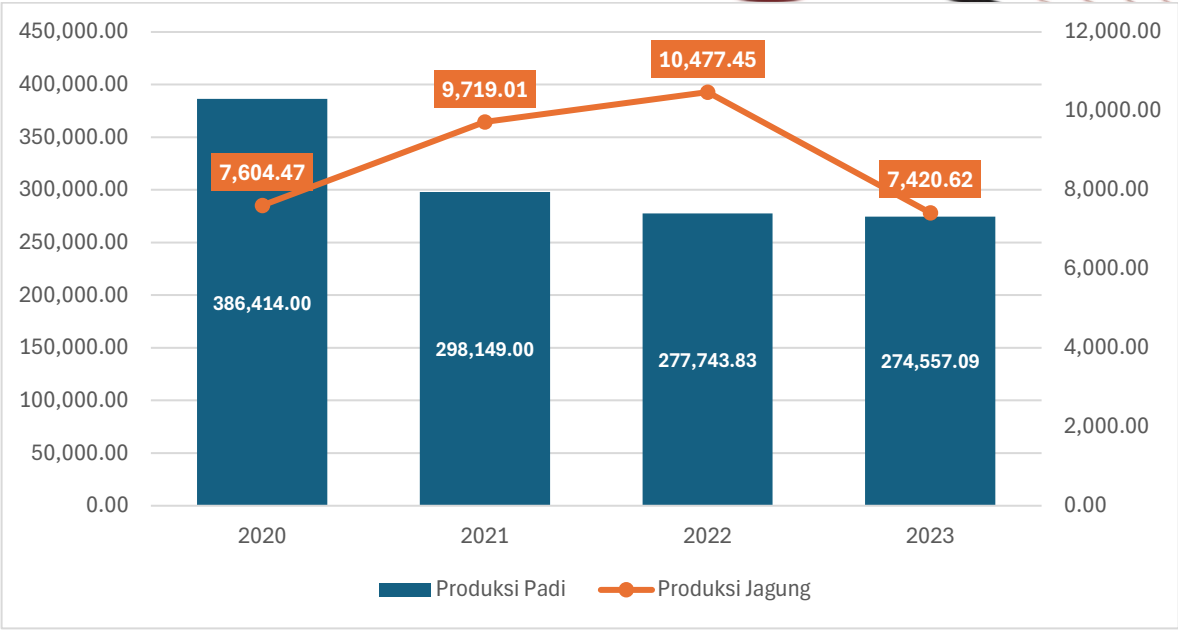
Kondisi ini jika terus berlanjut akan memberikan dampak yang nyata seperti seperti angka kematian ibu dan bayi di kabupaten dengan cakupan Puskesmas rendah cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah yang memenuhi standar staf. Penelitian juga menunjukkan bahwa kekurangan bidan dan perawat berkontribusi pada rendahnya cakupan kunjungan antenatal lengkap dan pemeriksaan pertumbuhan balita, sehingga risiko stunting dan malnutrisi anak dapat meningkat. Di samping itu, keterbatasan tenaga laboratorium dan sanitasi juga mempengaruhi deteksi dini penyakit seperti tuberculosis dan diare.

Ketidakseimbangan distribusi SDM kesehatan ini semakin diperparah oleh beban kerja yang tinggi di Puskesmas wilayah terpencil, memicu kelelahan dan *turnover* pada tenaga kesehatan. Tanpa intervensi strategis—seperti skema insentif khusus, fasilitas hunian yang layak, dan program pemagangan tenaga kesehatan—kabupaten/kota dengan cakupan sangat rendah akan terus mengalami kesulitan menjaga mutu layanan. Akibatnya, kesenjangan akses dan hasil kesehatan antardaerah di Provinsi Jambi berpotensi melebar, menghambat capaian target pembangunan kesehatan daerah.

#### **2.7.1.4 Penurunan Produktivitas Sektor Unggulan**

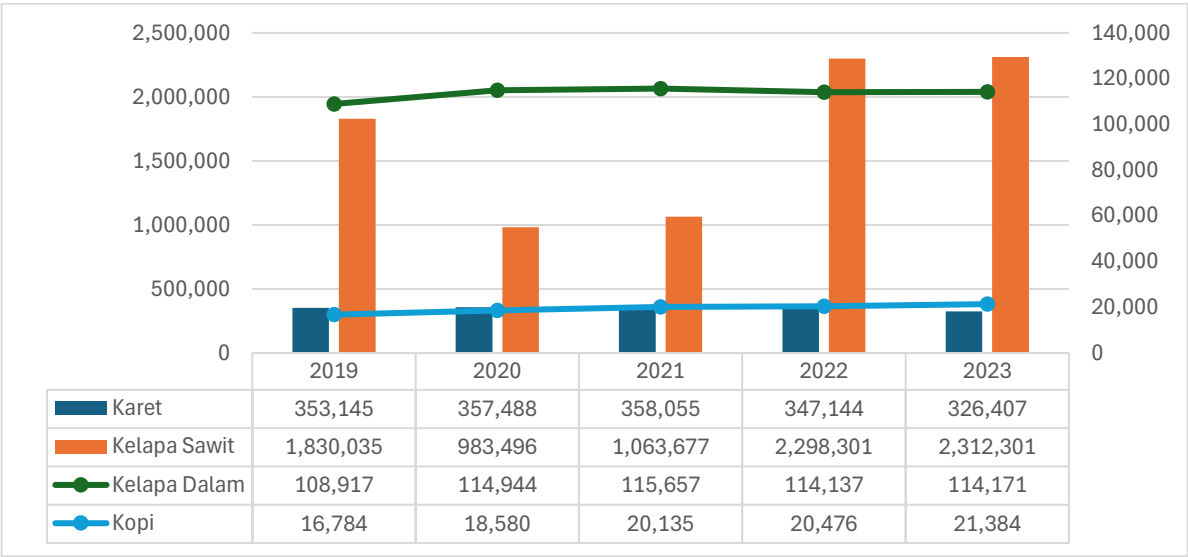
Produksi tanaman padi di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan selama tahun 2018 – 2022, yang dimulai di tahun 2019 akibat musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak terjadi gagal panen, serta terjadi penurunan luas panen akibat alih fungsi lahan. Penurunan produksi juga terjadi pada tanaman jagung dan kedelai. Perlu kebijakan yang mendukung terwujudnya ke daulatan pangan melalui perbaikan sistem pengairan, penyuluhan dan bantuan teknis kepada petani, sehingga kerugian akibat bencana pertanian dapat diminimalisir.





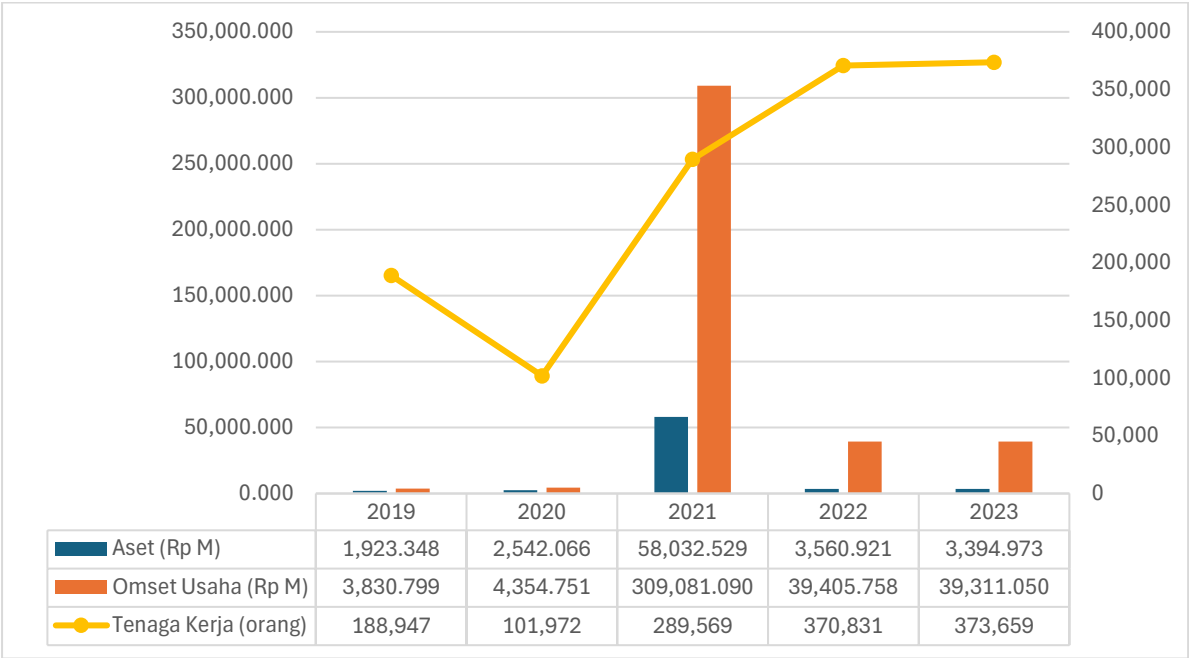
Sumber: Dinas TPHP Provinsi Jambi, 2024  
Gambar 2-88 Produksi Padi dan Jagung Provinsi Jambi Tahun 2020 – 2023

Sektor perkebunan masih belum memperlihatkan kinerja yang baik pada tahun 2019 – 2023. Hal ini terlihat pada produksi komoditi unggulan perkebunan yang berfluktuatif setiap tahun dan cenderung stagnan dan hanya kinerja komoditas sawit yang cukup baik dibanding komoditi lainnya. Hal ini disebabkan oleh umur tanaman yang mulai tua sehingga produksi menurun. Upaya perluasan lahan telah dilakukan untuk komoditi-komoditi tersebut, sehingga diharapkan beberapa tahun lagi produksi komoditas unggulan ini kembali membaik.



Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, 2024  
Gambar 2-89 Produksi Komoditas Perkebunan Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

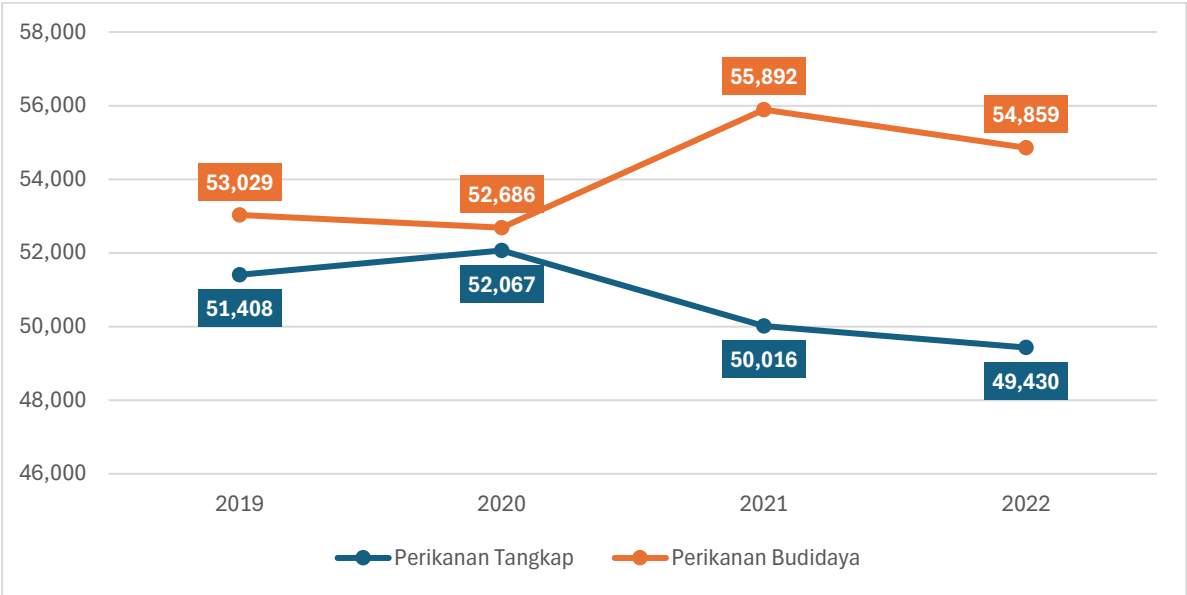
Pada sisi usaha yang dilihat dari aspek aset, omzet usaha, maupun penyerapan tenaga kerja, menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama tahun 2019 hingga 2023. Puncak kinerja terjadi pada tahun 2021 yaitu pada nilai aset yang melonjak dari Rp2.542,066 miliar di 2020 menjadi Rp58.032,529 miliar diikuti oleh lonjakan omzet usaha dari Rp 4.354,751 miliar menjadi Rp 309.081,090 miliar. Peningkatan ini juga berdampak pada peningkatan tenaga kerja dari 101.972 orang di 2020 menjadi 289.569 orang pada 2021. Namun, setelah tahun 2021, nilai aset dan omzet usaha mengalami normalisasi. Pada tahun 2022 dan 2023, aset tercatat stabil di kisaran Rp 3.394 – 3.560 miliar, sementara omzet usaha berada di angka Rp 39.311 – 39.405 miliar. Sementara itu, jumlah tenaga kerja terus menunjukkan tren positif dengan peningkatan konsisten hingga mencapai 373.659 orang di tahun 2023. Masih belum optimalnya kesinambungan pertumbuhan aset dan omzet usaha setelah tahun 2021 serta perlunya penguatan ketahanan ketenagakerjaan, menjadi salah satu permasalahan pembangunan daerah yang harus diatasi untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah dan perluasan kesempatan kerja di Provinsi Jambi.



Sumber: Dinas KUKM Provinsi Jambi, 2024.  
Gambar 2-90 Perkembangan Aset, Omzet Usaha dan Serapan Tenaga Kerja  
UMKM Provinsi Jambi Tahun 2019-2023

Perkembangan produksi perikanan tahun 2019–2022 menunjukkan kecenderungan menurun. Dari tabel dan grafik terlihat produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 53.029 ton dan mengalami penurunan

di tahun 2020 menjadi 52.686 ton. Kemudian produksi mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 sebesar 55.892 ton, namun kembali menurun pada tahun 2022 menjadi 54.859 ton. Hal tersebut disebabkan karena kondisi alam, terutama cuaca ekstrem yang melanda perairan laut, sehingga menyebabkan ketersediaan ikan yang ada di perairan laut semakin berkurang.



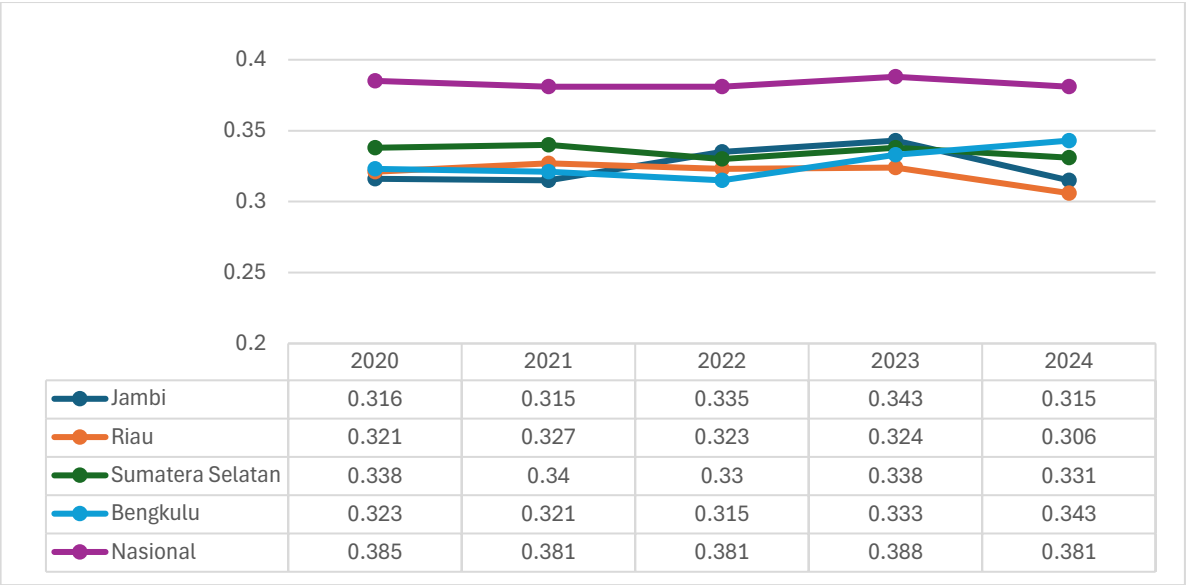
Sumber: DKP Provinsi Jambi, 2024.  
Gambar 2-91 Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Provinsi Jambi Tahun 2019-2022

Demikian juga dengan produksi perikanan tangkap, perkembangan produksi perikanan budidaya pada periode 2019-2022 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2020 sebanyak 52.067 ton menjadi 49.430 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena adanya aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) sehingga menyebabkan kematian ikan menjadi tinggi akibat aktivitas tersebut. Kualitas air Sungai Batanghari yang turut tercemar mengakibatkan tingginya tingkat kematian ikan hingga 40 persen.

**2.7.1.5 Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan**

Salah satu permasalahan strategis yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini adalah ketimpangan antarwilayah dan ketidakmerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini tercermin dari data Gini Ratio Provinsi Jambi yang dalam lima tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif dan belum stabil. Pada tahun 2020, nilai Gini Ratio Provinsi Jambi berada pada angka 0,316, kemudian sedikit menurun ke 0,315 di tahun 2021. Namun pada tahun 2022, ketimpangan meningkat tajam hingga 0,335 dan kembali naik menjadi 0,343 di tahun 2023. Pada 2024, nilai tersebut menurun ke

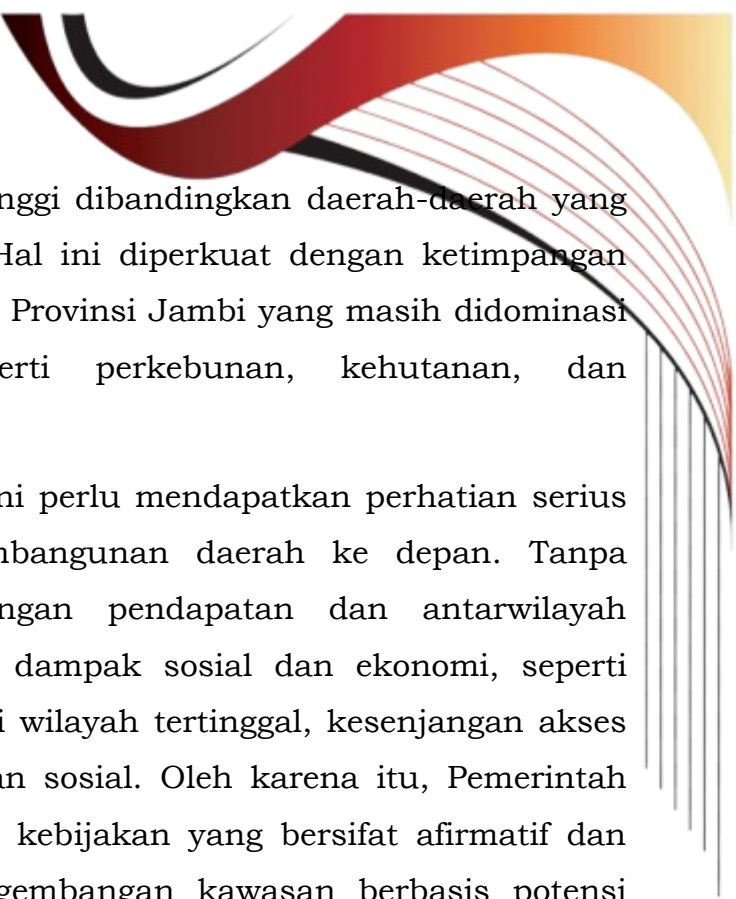
0,315. Meskipun posisi terakhir menunjukkan penurunan, tren fluktuatif ini mencerminkan kondisi ketimpangan yang masih belum stabil dan berpotensi menjadi hambatan dalam pencapaian kesejahteraan yang merata di wilayah Provinsi Jambi.



Sumber: BPS Indonesia, 2025.  
Gambar 2-92 Indeks Gini Provinsi Jambi dengan Provinsi Lainnya dan Nasional Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga di Sumatera, angka Gini Ratio Provinsi Jambi relatif lebih rendah daripada Provinsi Sumatera Selatan (0,331 di 2024) namun lebih tinggi dari Provinsi Riau (0,306 di 2024). Sementara Provinsi Bengkulu justru menunjukkan tren peningkatan ketimpangan dari 0,315 pada tahun 2022 menjadi 0,343 di tahun 2024. Secara nasional, Gini Ratio berada pada kisaran 0,381 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Jambi masih berada di bawah angka nasional, kondisi ketimpangan yang berfluktuasi ini perlu menjadi perhatian, terutama karena menunjukkan adanya potensi ketimpangan antarwilayah maupun antar kelompok pendapatan di dalam daerah.

Ketimpangan ini tidak hanya terlihat dalam aspek pendapatan antarpenduduk, tetapi juga antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Provinsi Jambi. Berdasarkan daerah tinggal, Gini Ratio tahun 2024 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,353 dan 0,279. Wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam dan infrastruktur ekonomi yang lebih baik cenderung menikmati



tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang minim akses dan fasilitas dasar. Hal ini diperkuat dengan ketimpangan kontribusi ekonomi antarwilayah di Provinsi Jambi yang masih didominasi oleh sektor-sektor primer seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan di wilayah tertentu.

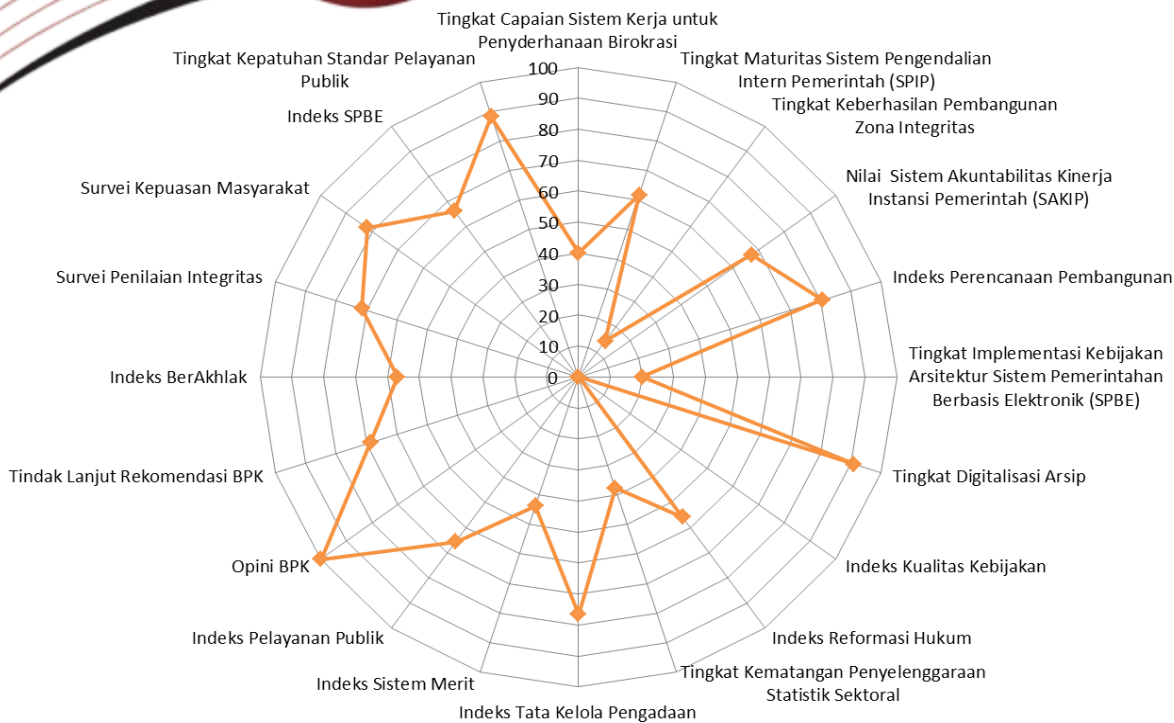
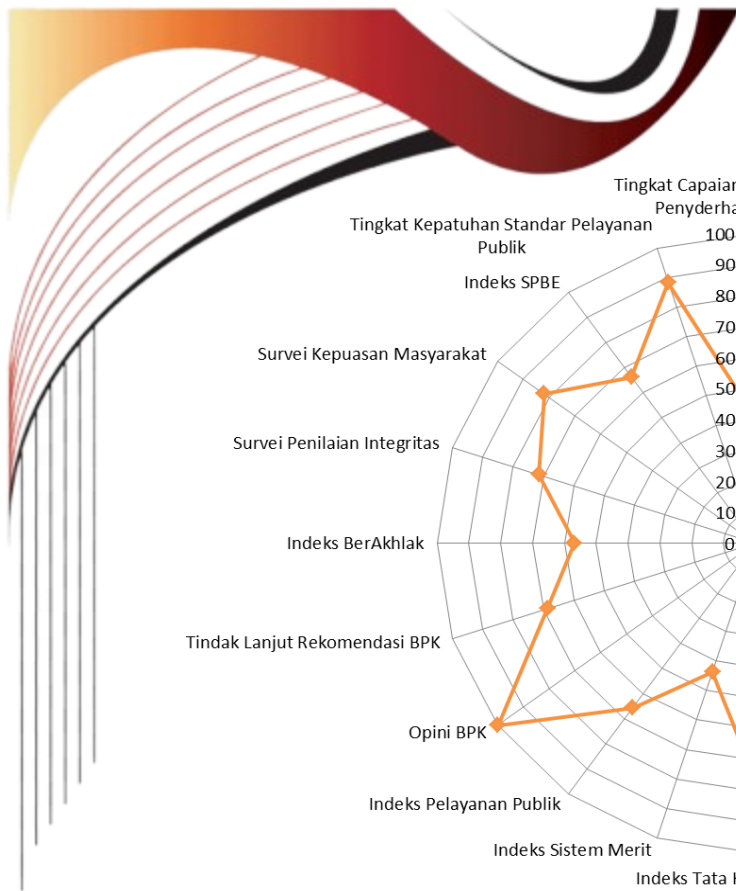
Permasalahan ketimpangan ini perlu mendapatkan perhatian serius dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah ke depan. Tanpa intervensi yang efektif, ketimpangan pendapatan dan antarwilayah berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya angka kemiskinan di wilayah tertinggal, kesenjangan akses layanan dasar, serta ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jambi perlu merumuskan kebijakan yang bersifat afirmatif dan berbasis wilayah, mendorong pengembangan kawasan berbasis potensi lokal, serta memastikan pemerataan akses terhadap infrastruktur dasar dan pelayanan publik di seluruh wilayah provinsi.

#### **2.7.1.6 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal**

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan permasalahan pembangunan yang mengemuka maka saat ini masih terdapat masalah yang dihadapi oleh Provinsi Jambi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

*Dari 20 indikator yang dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana pada Sumber: Kemenpan RB, 2024*

**Gambar 2-93** gambar di bawah, separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian. Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, indeks sistem merit, dan indeks berahlak. Untuk itu kedepan pencapaian indikator-indikator ini harus menjadi perhatian, disamping terus meningkatkan capaian indikator lainnya.



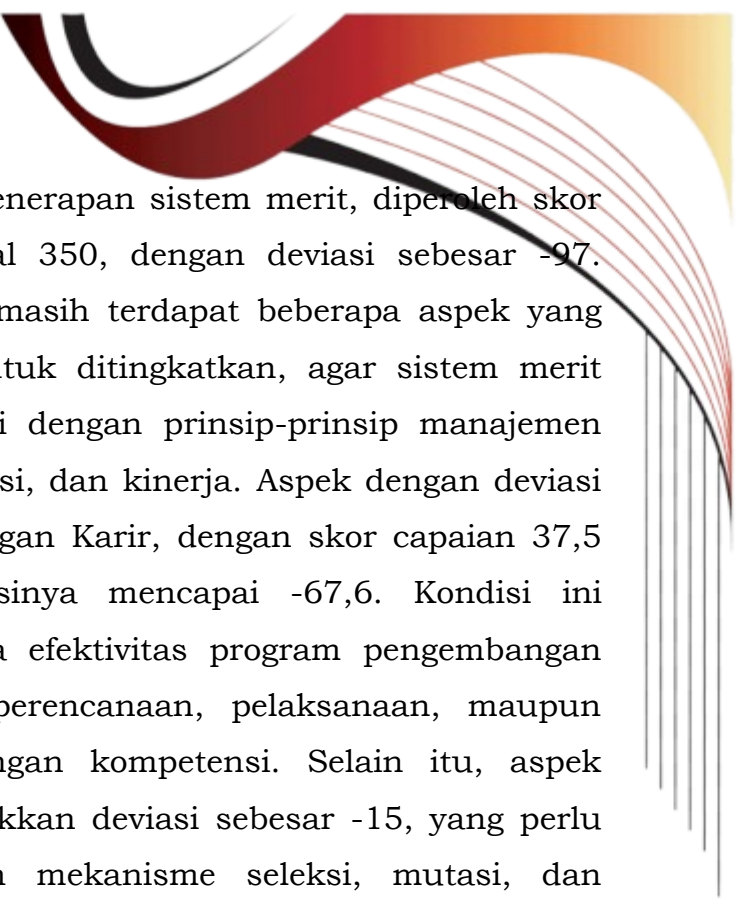
Sumber: Kemenpan RB, 2024  
Gambar 2-93 Capaian Indikator-Indikator Penerapan Reformasi Birokasi Provinsi Jambi Tahun 2024

Tabel 2-43 Deviasi capaian Aspek sistem Merit dibanding Target Ideal

| NO                        | ASPEK SISTEM MERIT                   | BOBOT ASPEK | TARGET IDEAL (SKOR 350) | SKOR CAPAIAN SAAT INI | DEVIASI |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|---------|
| 1                         | Perencanaan Kebutuhan                | 10          | 35.00                   | 37.50                 | 2.5     |
| 2                         | Pengadaan Kebutuhan                  | 10          | 35.00                   | 34                    | -1      |
| 3                         | Pengembangan Karir                   | 30          | 105.00                  | 37.50                 | -67.6   |
| 4                         | Promosi dan Mutasi                   | 10          | 35.00                   | 20                    | -15     |
| 5                         | Manajemen Kinerja                    | 20          | 70.00                   | 60                    | -10     |
| 6                         | Penggajian, Penghargaan dan Disiplin | 10          | 35.00                   | 35                    | 0       |
| 7                         | Perlindungan dan Pelayanan           | 4           | 14.00                   | 14                    | 0       |
| 8                         | Sistem Informasi                     | 6           | 21.00                   | 15                    | -6      |
| JUMLAH (TARGET & CAPAIAN) |                                      | 100         | 350                     | 253                   | -97     |

Sumber: BKD, 2024





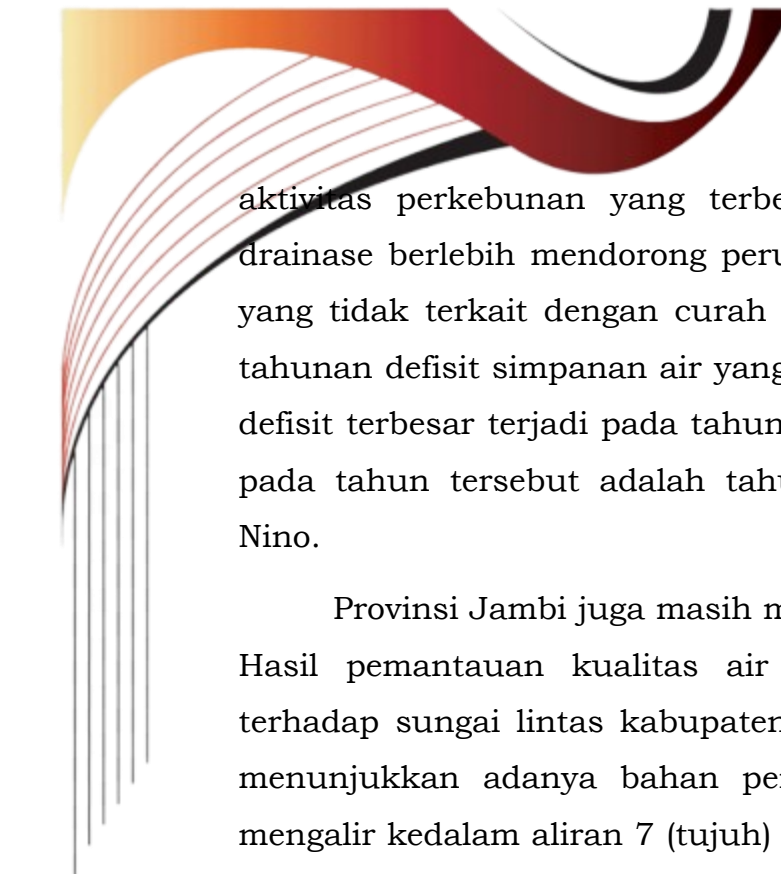
Berdasarkan hasil capaian penerapan sistem merit, diperoleh skor total sebesar 253 dari target ideal 350, dengan deviasi sebesar -97. Capaian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perhatian khusus untuk ditingkatkan, agar sistem merit dapat berjalan optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Aspek dengan deviasi tertinggi terdapat pada Pengembangan Karir, dengan skor capaian 37,5 dari target 105, sehingga deviasinya mencapai -67,6. Kondisi ini mengindikasikan masih rendahnya efektivitas program pengembangan karir pegawai, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian kegiatan pengembangan kompetensi. Selain itu, aspek Promosi dan Mutasi juga menunjukkan deviasi sebesar -15, yang perlu ditindaklanjuti melalui penguatan mekanisme seleksi, mutasi, dan promosi berbasis kompetensi dan kinerja.

Aspek Manajemen Kinerja tercatat memiliki deviasi -10, meskipun skornya telah mencapai 60 dari target 70. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja sudah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu, aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin serta Perlindungan dan Pelayanan telah mencapai target sepenuhnya dengan deviasi 0, menandakan pengelolaan di kedua aspek ini sudah sesuai standar yang ditetapkan. Adapun aspek Sistem Informasi masih mencatat deviasi -6, yang perlu ditingkatkan khususnya dalam hal penguatan sistem informasi kepegawaian yang mendukung proses manajemen ASN secara digital, akurat, dan terintegrasi.

#### **2.7.1.7 Degradasi Lingkungan**

Provinsi Jambi sudah mengalami kehilangan air baik di bagian Jambi sebelah barat (dataran lebih tinggi) dan di bagian Jambi sebelah timur (dataran lebih rendah). Gambaran kehilangan air ini menunjukkan bahwa daerah Timur Jambi yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan sebagian Kabupaten Batanghari mengalami kehilangan air terbesar (secara kumulatif berkisar antara 2.356-2.687 Km<sup>3</sup>). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kehilangan air di daerah ini tidak berhubungan dengan pola curah hujan yang terjadi pada wilayah tersebut. Maka disimpulkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi (dugaan: anthropogenik) – wilayah tersebut didominasi oleh lahan gambut dengan



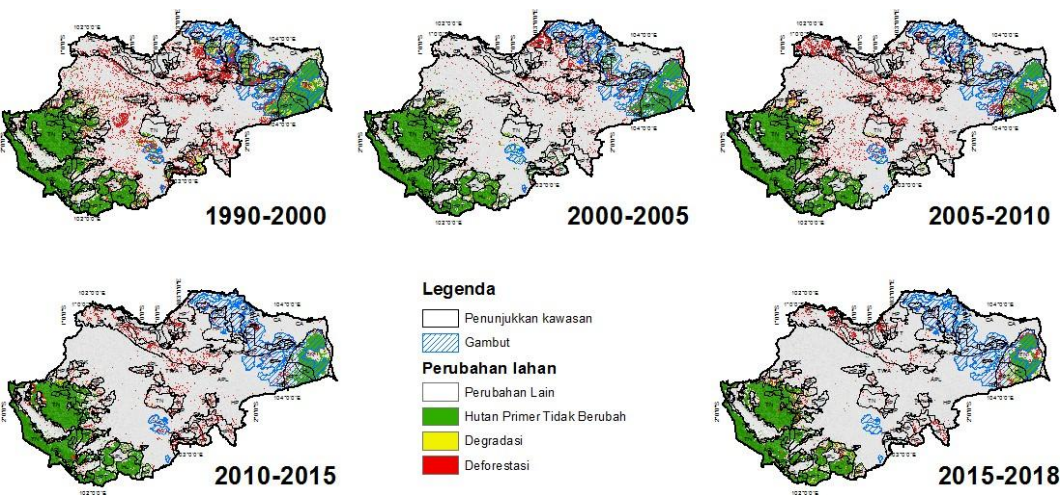


aktivitas perkebunan yang terbentuk pada wilayah tersebut seperti drainase berlebih mendorong perubahan total perubahan simpanan air yang tidak terkait dengan curah hujan. Hal ini didukung dengan pola tahunan defisit simpanan air yang tidak menunjukkan pola khas, tetapi defisit terbesar terjadi pada tahun 2014 diikuti tahun 2019, yang mana pada tahun tersebut adalah tahun-tahun yang berkaitan dengan El-Nino.

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan kualitas air. Hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di Provinsi Jambi terhadap sungai lintas kabupaten/kota maupun sungai lintas provinsi menunjukkan adanya bahan pencemar dari berbagai aktivitas yang mengalir kedalam aliran 7 (tujuh) sungai di wilayah Provinsi Jambi yang belum dikelola dengan baik. Berdasarkan jenisnya, diketahui bahwa aktivitas pertanian, pertambangan dan industri pengolahan (salah satunya adalah pabrik CPO) dan domestik (rumah tangga) menjadi sumber pencemaran kualitas air sungai- sungai tersebut. Kondisi ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (water catchment area) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan. Kondisi ini juga mengindikasikan bahwa tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Provinsi Jambi juga relatif masih rendah.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kerapatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.



Sumber: GGP, 2019.  
Gambar 2-94 Deforestasi Dan Degradasi Hutan Yang Terjadi Tahun 1990 – 2018

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, di mana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagi intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

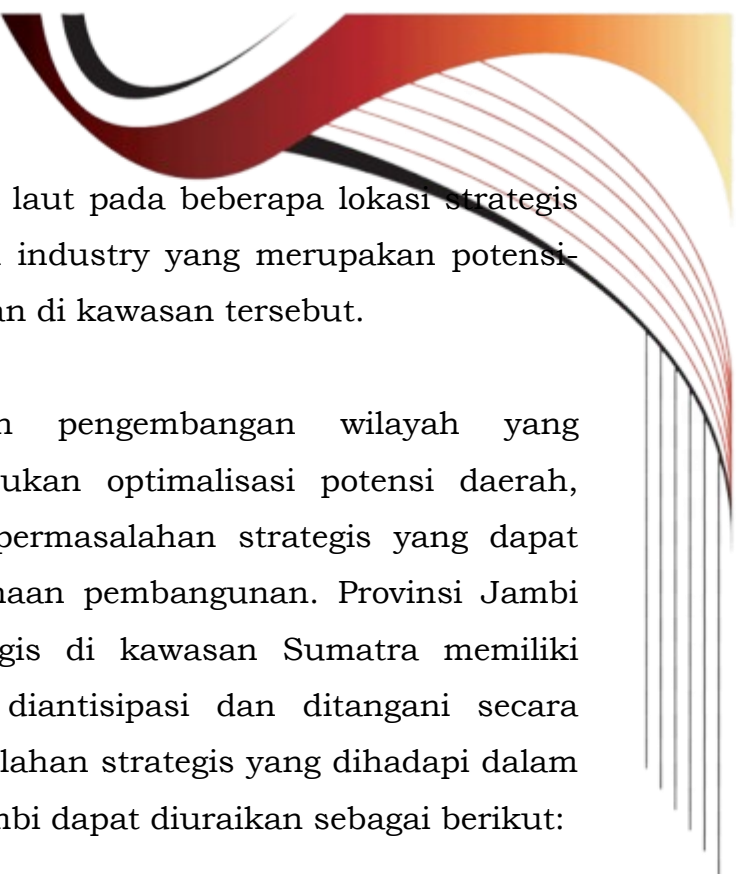
### 2.7.2 Penyelerasan terhadap RTRW

Pengembangan wilayah merupakan salah satu aspek strategis dalam perencanaan tata ruang, yang bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antarwilayah serta pemerataan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Potensi yang dimiliki oleh daerah, seperti potensi sumber daya alam, posisi geografis strategis, serta kekayaan budaya dan sosial ekonomi, dapat menjadi modal utama dalam mendorong pengembangan wilayah.

### 2.7.2.1 Potensi

Dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing, diperlukan pemetaan potensi wilayah secara komprehensif sebagai dasar dalam perumusan arah kebijakan pengembangan wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi, serta keunggulan masing-masing yang apabila dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Provinsi Jambi sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatera memiliki berbagai potensi unggulan yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan daerah. Adapun potensi-potensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu provinsi secara geografis mempunyai letak yang sangat strategis yang didukung oleh sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai, seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Sultan Thaha, Pelabuhan Kuala Tungkal dan Muara Sabak. Provinsi Jambi juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR) segitiga pertumbuhan IMT-GT, dengan letak geografis tersebut selayaknya disikapi melalui penataan ruang wilayah dalam rangka pemanfaatan pertumbuhan kawasan.
2. Mempunyai potensi budaya yang beragam yang menjadi asset berharga untuk memperkaya khasanah seni dan budaya di Provinsi Jambi khususnya dan di Indonesia umumnya. Hal ini ditunjang oleh kondisi topografi Provinsi Jambi yang terdiri dari kawasan pantai, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan sehingga memiliki potensi bagi pengembangan kegiatan pariwisata.
3. Karakteristik alam Provinsi Jambi dan sumberdaya manusia menjadi potensi keunggulan komparatif untuk pengembangan kegiatan pertanian beberapa komoditi unggulan, perikanan dan kelautan, pariwisata, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan bahan baku lokal dan kerajinan.
4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jambi dengan garis pantai yang panjang (sebagai sumberdaya alam) menyimpan sejumlah potensi pengembangan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan pembangunan lainnya. Kegiatan perikanan tangkap dan budidaya perairan pantai, pariwisata, pertambangan minyak dan gas



serta pengembangan pelabuhan laut pada beberapa lokasi strategis bisa didukung dengan kawasan industri yang merupakan potensi-potensi yang dapat dikembangkan di kawasan tersebut.

#### **2.7.2.2 Permasalahan**

Dalam upaya mewujudkan pengembangan wilayah yang berkelanjutan, tidak hanya diperlukan optimalisasi potensi daerah, tetapi juga pengelolaan berbagai permasalahan strategis yang dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan. Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah strategis di kawasan Sumatra memiliki sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dan ditangani secara terpadu. Adapun beberapa permasalahan strategis yang dihadapi dalam pengembangan wilayah Provinsi Jambi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumberdaya lahan terkait dengan fisiografi perbukitan dan pegunungan membutuhkan kehati-hatian agar tidak menimbulkan bencana alam, khususnya di kawasan-kawasan tertentu di Provinsi Jambi yang rawan terhadap bahaya bencana letusan gunung api, gempa bumi, longsor dan banjir.
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam yang potensial di Provinsi Jambi karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti eksploitasi bahan tambang batubara dan lainnya.
3. Pusat-pusat pertumbuhan yang ada belum mampu memicu perkembangan wilayah di sekitarnya (hinterland) dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana prasarana lainnya.
4. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal, seperti dijumpai pemanfaatan ruang non kehutanan di kawasan hutan serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.
5. Besarnya potensi kepariwisataan di Provinsi Jambi belum didukung oleh keterpaduan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana, serta kesiapan masyarakat setempat dalam menerima kunjungan wisatawan.

#### **2.7.3 Isu Strategis**

Pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan fondasi awal untuk mewujudkan transformasi di Provinsi Jambi dalam rangka mencapai Visi Jambi yang maju, sejahtera dan berkelanjutan pada tahun 2045. Upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah tersebut akan menghadapi isu dan tantangan yang penuh ketidakpastian dan dinamis. Oleh karena itu perlu



mitigasi agar isu dan tantangan tersebut menjadi peluang untuk mencapai sasaran jangka menengah yang diinginkan.

2.7.3.1 Isu Global

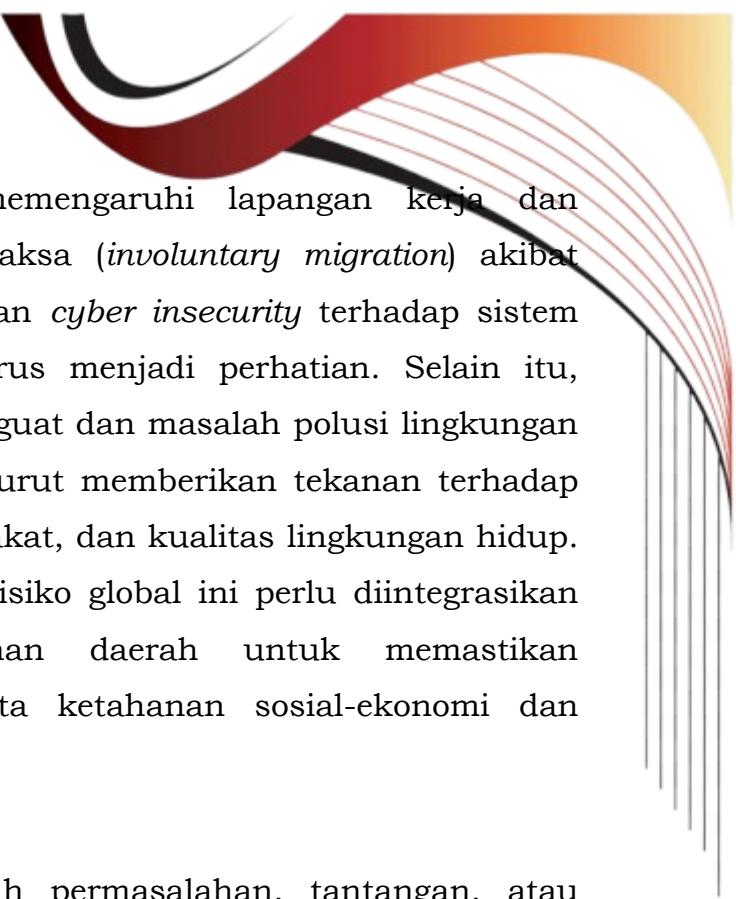
Isu-isu strategis internasional merujuk pada peristiwa penting yang memiliki dampak luas di tingkat global atau antarnegara, yang perlu diidentifikasi dan dianalisis dalam menyusun isu strategis di daerah. Kajian terhadap isu-isu global ini bertujuan untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah agar lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dunia. Provinsi Jambi berupaya untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global yang terjadi, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan nasional.

Risiko Global Jangka Menengah



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, 2024  
Gambar 2-95 Risiko Global Jangka Menengah

Berdasarkan *World Economic Forum Global Risk Report 2024*, terdapat sejumlah risiko global jangka menengah yang diperkirakan akan menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan. Risiko tersebut mencakup cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim, serta perubahan kritikal terhadap ekosistem yang berdampak pada keseimbangan lingkungan. Selain itu, ancaman hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*) dan krisis sumber daya alam seperti air, energi, dan pangan diperkirakan akan menjadi tantangan serius di masa depan. Di sisi sosial dan teknologi, penyebaran misinformasi dan disinformasi berpotensi memecah belah masyarakat, sementara dampak buruk teknologi kecerdasan buatan

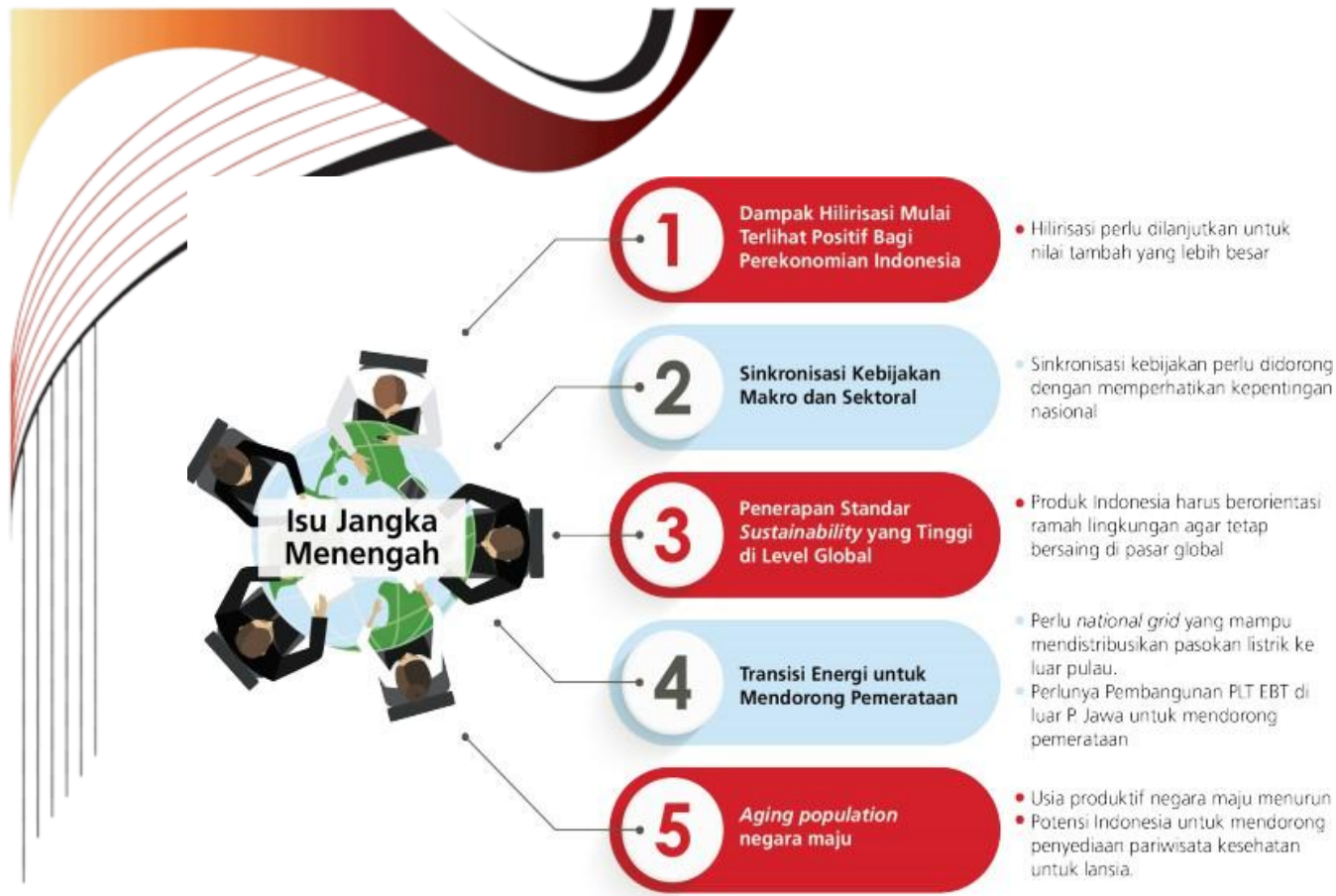


(*Artificial Intellegent/AI*) dapat memengaruhi lapangan kerja dan keamanan data. Risiko migrasi paksa (*involuntary migration*) akibat konflik dan bencana, serta ancaman *cyber insecurity* terhadap sistem digital dan infrastruktur juga harus menjadi perhatian. Selain itu, polarisasi sosial yang semakin menguat dan masalah polusi lingkungan yang terus meningkat, diprediksi turut memberikan tekanan terhadap stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan kualitas lingkungan hidup. Oleh karena itu, seluruh potensi risiko global ini perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan kesiapsiagaan, keberlanjutan, serta ketahanan sosial-ekonomi dan lingkungan di masa mendatang.

#### **2.7.3.2 Isu Nasional**

Isu strategis nasional adalah permasalahan, tantangan, atau kondisi penting yang memiliki dampak luas dan signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Isu strategis nasional bersifat lintas sektoral dan memerlukan perhatian serta penanganan prioritas secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan agar dapat menjadi potensi untuk mendukung pembangunan nasional.

Dalam kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah, identifikasi terhadap isu-isu strategis jangka menengah menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa isu strategis yang diperkirakan akan memengaruhi arah kebijakan nasional maupun daerah dalam beberapa tahun ke depan. Mengacu pada isu-isu jangka menengah nasional, Provinsi Jambi sebagai bagian dari konstelasi wilayah Koridor Sumatra perlu menyelaraskan arah pembangunan berdasarkan isu strategis nasional, guna memastikan sinergi antara pembangunan daerah dan pembangunan nasional.



Sumber: RPJMN 2025-2029, 2024

**Gambar 2-96 Isu Strategis Jangka Menengah Nasional**

2.7.3.2.1 Dampak Positif Hilirisasi Untuk Nilai Tambah Yang Lebih Besar.

Pelaksanaan hilirisasi di sektor primer, seperti pengolahan sumber daya mineral dan kelapa sawit, telah menunjukkan timbal balik melalui peningkatan nilai tambah produk nasional. Di koridor Pulau Sumatra, khususnya di Provinsi Jambi, pembangunan pabrik pengolahan bijih timah dan minyak sawit mentah (CPO) telah menyerap tenaga kerja lokal serta menambah devisa melalui ekspor produk turunan. Dalam jangka menengah, penerusan kebijakan hilirisasi akan memperkuat ekosistem industri regional, meningkatkan serapan tenaga kerja terampil, dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku mentah. Namun, salah satu faktor penghambat upaya hilirisasi di koridor Sumatra adalah belum tersedianya infrastruktur pendukung, mulai dari akses jalan tol Lintas Sumatra hingga fasilitas pelabuhan di Teluk Bayur dan Pelabuhan Kuala Tanjung yang masih perlu percepatan. Dalam konteks pengembangan hilirisasi di Provinsi Jambi, sinergi pembangunan infrastruktur ini akan membuka peluang bagi investor untuk menanamkan modal di sektor hilirisasi, memperkuat klaster industri lokal, dan memastikan distribusi produk bernilai tambah ke pasar domestik maupun internasional secara lebih efisien.



#### 2.7.3.2.2 Sinkronisasi Kebijakan Makro Dan Sektoral

Sinkronisasi kebijakan makro-ekonomi dan sektoral di tingkat nasional perlu diacu dalam rencana pembangunan wilayah koridor Pulau Sumatra. Untuk Provinsi Jambi, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal provinsi seperti insentif investasi dan pemungutan pajak daerah dengan kebijakan moneter serta kebijakan perdagangan nasional. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan skema kemudahan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat tidak kontradiktif dengan regulasi daerah, sehingga iklim usaha di Sumatra dan Provinsi Jambi semakin kondusif. Dalam konteks isu jangka menengah, koordinasi lintas-lembaga di Pulau Sumatra masih perlu diperkuat melalui forum-forum seperti Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Regional dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Daerah. Bagi Provinsi Jambi, partisipasi aktif dalam kerangka Sinergi Strategis Sumatra akan memastikan kebijakan pembangunan di sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata, didorong sesuai visi nasional tanpa mengabaikan karakteristik lokal serta potensi sumber daya setempat.

#### 2.7.3.2.3 Penerapan Standar Sustainability Yang Tinggi Di Level Global

Tuntutan pasar internasional terhadap sertifikasi keberlanjutan, seperti RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) dan EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool), menuntut produsen di koridor Sumatra untuk menerapkan praktik ramah lingkungan. Di Provinsi Jambi, pelaku industri kelapa sawit dan karet tengah mengadopsi sistem tata kelola berkelanjutan (Good Agricultural Practices/GAP) serta memperkuat program restorasi lahan gambut. Dalam jangka menengah, perbaikan kualitas lingkungan hidup ini bukan hanya meningkatkan akses pasar ekspor, tetapi juga mengurangi risiko konflik sosial dan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, pengembangan ekonomi hijau di Sumatra dapat diperkuat melalui insentif fiskal bagi industri yang menerapkan teknologi rendah karbon, serta peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi lokal. Provinsi Jambi, sebagai bagian koridor Sumatra, masih perlu memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi petani plasma dan industri pengolahan agar memenuhi standar global. Dengan demikian, poros ekonomi di Sumatra dapat tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

#### 2.7.3.2.4 Transisi Energi Untuk Mendorong Pemerataan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional telah mengamanatkan perluasan National Electricity Grid (N-national) ke Pulau Sumatra sebagai upaya pemerataan energi. Untuk Provinsi Jambi, pembenahan jaringan transmisi antar-provinsi di Sumatra bagian tengah akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, mengurangi defisit daya, dan menurunkan biaya energi bagi industri lokal. Dalam jangka menengah, konektivitas grid ini juga memungkinkan penyerapan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di wilayah Tapanuli atau Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai Batanghari ke provinsi lain di Sumatra. Lebih lanjut, percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Terbarukan (PLT EBT), terutama PLTS terapung di waduk dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) di areal kebun kelapa sawit, merupakan fokus percepatan di Koridor Sumatra. Untuk Provinsi Jambi, potensi EBT dapat dioptimalkan melalui skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta, sekaligus mendukung tujuan nasional transisi energi rendah karbon.

#### 2.7.3.2.5 Aging Population Negara Maju

Fenomena penurunan proporsi usia produktif di negara-negara maju membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengembangkan pariwisata kesehatan (*health tourism*). Koridor Pulau Sumatra, termasuk Jambi, memiliki modal alam berupa pemandian air panas, hutan tropis, dan pusat spa tradisional berbasis rempah. Dalam jangka menengah, pengembangan destinasi pariwisata kesehatan dapat difokuskan pada penyediaan layanan medis komplementer, seperti terapi herbal dan rehabilitasi lansia, yang terintegrasi dengan paket wisata budaya lokal. Untuk mewujudkan potensi ini, Provinsi Jambi perlu meningkatkan kapasitas infrastruktur kesehatan dan akomodasi yang ramah lansia, serta menjalin kerja sama dengan jaringan rumah sakit dan klinik internasional. Selain itu, program pelatihan bahasa asing bagi tenaga hospitality dan tenaga medis akan memperkuat citra Sumatra sebagai destinasi pariwisata kesehatan kelas dunia. Dengan demikian, sektor pariwisata di Jambi dan koridor Sumatra dapat tumbuh diversifikasi, sekaligus menyerap devisa dan memperluas lapangan kerja.

#### 2.7.3.3 Isu Pembangunan Daerah

Isu strategis Provinsi Jambi tidak bisa terlepas dari risiko global dan isu jangka menengah nasional sebagaimana terlihat pada **Sumber:** Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029, 2024

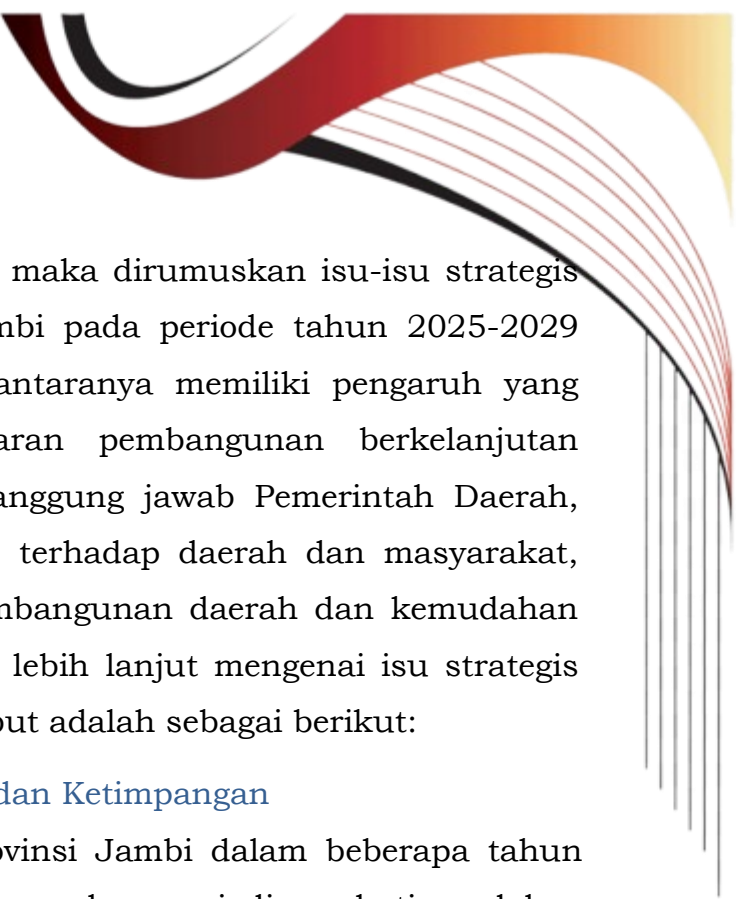
Gambar 2-95 dan **Sumber:** RPJMN 2025-2029, 2024

Gambar 2-96. Selain itu, isu strategis tersebut juga berhubungan langsung dengan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan.

**Tabel 2-44 Identifikasi Isu Strategis Pembangunan Daerah Provinsi Jambi**

| POTENSI DAERAH                                                     | PERMASALAHAN                                                                                         | ISU KLHS                       | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                          |                                                                      | ISU STRATEGIS DAERAH                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                                      |                                | GLOBAL                                          | NASIONAL                                                             |                                                |
| Komoditas ekspor unggulan (kelapa sawit, karet, pinang, kopi)      | Volatilitas Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Akibat Fluktuasi Harga serta Produksi Komoditas Unggulan | Keterbatasan Infrastruktur     | <i>Biodiversity loss</i> dan Gangguan Ekosistem | Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia | Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan          |
| Produktivitas sektor pertambangan                                  |                                                                                                      |                                |                                                 |                                                                      |                                                |
| Hilirisasi produk perkebunan dan pengembangan agroindustri         | Penurunan Produktivitas Sektor Unggulan                                                              | Kerentanan Bencana             |                                                 |                                                                      | Rantai Nilai Komoditas Unggulan Provinsi Jambi |
| Produktivitas sektor perikanan tangkap                             |                                                                                                      |                                |                                                 |                                                                      |                                                |
| Pengembangan SDM di sektor usaha dan industri                      | Belum Meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia                                                         | Tingginya Tingkat Kemiskinan   | <i>Involuntary Migration</i>                    | <i>Aging Population</i> Negara Maju                                  | Kualitas Sumber Daya Manusia                   |
| Ekspansi lapangan pekerjaan baru melalui pelatihan dan sertifikasi |                                                                                                      |                                |                                                 |                                                                      |                                                |
| Digitalisasi layanan publik dan integrasi data sistem pemerintaha  | Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal                                                          | Tata Kelola yang belum Optimal | Polarisasi Sosial                               | Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral                            | Tata Kelola Pemerintahan                       |
|                                                                    |                                                                                                      |                                | <i>Cyber Insecurity</i>                         |                                                                      |                                                |
|                                                                    |                                                                                                      |                                | Dampak                                          |                                                                      |                                                |

| POTENSI DAERAH                                                                                                                                                                               | PERMASALAHAN                                | ISU KLHS                     | ISU LINGKUNGAN DINAMIS                |                                                                     | ISU STRATEGIS DAERAH                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              |                                             |                              | GLOBAL                                | NASIONAL                                                            |                                       |
| (SPBE)                                                                                                                                                                                       |                                             |                              | Buruk Teknologi AI                    |                                                                     |                                       |
| Pengembangan konektivitas antarwilayah yang berada di jalur utama perdagangan antarwilayah di Sumatera dan Indonesia                                                                         | Ketimpangan Antar Wilayah dan Pendapatan    | Tingginya Tingkat Kemiskinan | Misinformasi dan Disinformasi         | Transisi energi untuk Mendorong Pemerataan                          | Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan |
| Pengembangan pusat distribusi dan logistik antarwilayah dari letak geografis dan akses pelabuhan Muara Sabak sebagai pelabuhan ekspor-impor komoditas unggulan dan perdagangan internasional |                                             |                              |                                       |                                                                     |                                       |
| Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi layak di daerah terpencil                                                                 | Kesenjangan Layanan Dasar dan Infrastruktur | Keterbatasan Infrastruktur   |                                       | Penerapan Standar <i>Sustainability</i> yang Tinggi di Level Global | Kualitas Sumber Daya Manusia          |
| Sektor kehutanan, lahan gambut, sungai, dan sumber air sebagai penyokong jasa lingkungan dan ekosistem                                                                                       | Degradasi Lingkungan                        | Degradasi Lingkungan         | Cuaca Ekstrem                         | Penerapan Standar <i>Sustainability</i> yang Tinggi di Level Global | Degradasi Lingkungan                  |
|                                                                                                                                                                                              |                                             |                              | Perubahan Kritisal terhadap Ekosistem |                                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |                                             | Kerentanan Bencana           | Krisis Sumber Daya Alam               |                                                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                              |                                             |                              | Polusi                                |                                                                     |                                       |



Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan isu-isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2025-2029 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan berkelanjutan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai isu strategis pembangunan Provinsi Jambi tersebut adalah sebagai berikut:

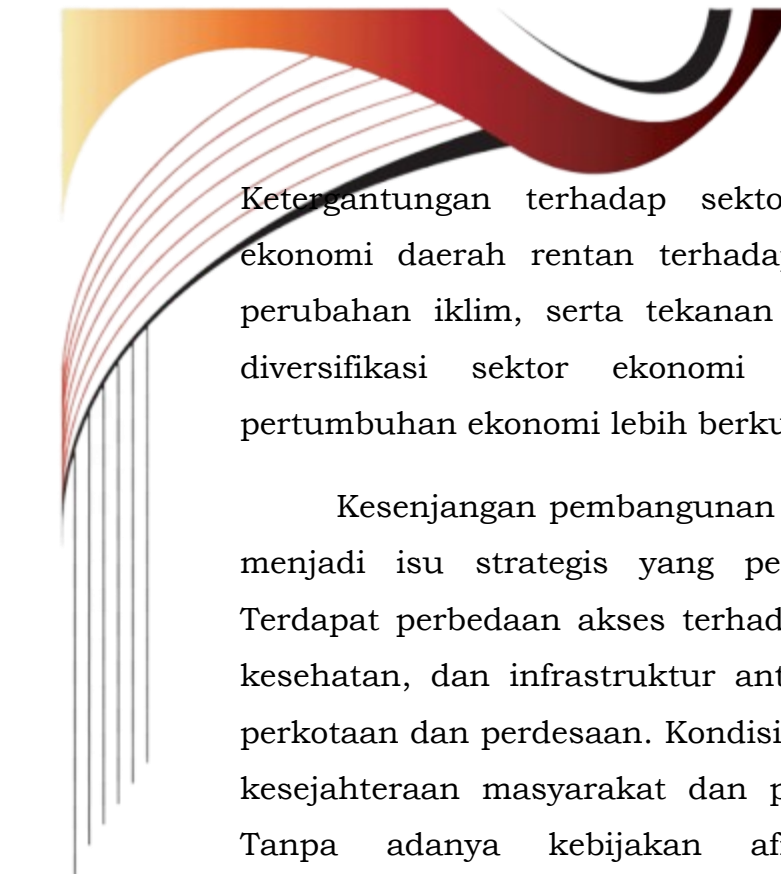
#### 2.7.3.3.1 Produktivitas Ekonomi dan Ketimpangan

Produktivitas ekonomi di Provinsi Jambi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi daerah ini tercatat sebesar 4,66 persen, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 5,13 persen. Tren ini berlanjut pada tahun 2024, di mana pertumbuhan ekonomi kembali turun menjadi 4,51 persen. Meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif, perlambatan yang terjadi menunjukkan adanya tantangan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan stabilitas ekonomi secara berkelanjutan, khususnya di sektor-sektor strategis daerah.

Sejalan dengan kondisi tersebut, ketimpangan pendapatan masyarakat yang diukur melalui Indeks Gini (Gini Ratio) juga mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai. Pada Maret 2023, Indeks Gini Provinsi Jambi tercatat sebesar 0,343, meningkat dari 0,335 pada September 2022. Meskipun terjadi perbaikan di Maret 2024 menjadi 0,321, ketidakstabilan angka ini merefleksikan bahwa pemerataan hasil pembangunan belum sepenuhnya tercapai. Ketimpangan distribusi pendapatan yang masih terjadi ini dapat berdampak terhadap penguatan daya beli masyarakat, tingkat kesejahteraan, dan produktivitas ekonomi dalam jangka menengah hingga panjang.

Struktur perekonomian Provinsi Jambi masih didominasi oleh sektor-sektor primer, khususnya pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang berkontribusi sebesar 33,93 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024.





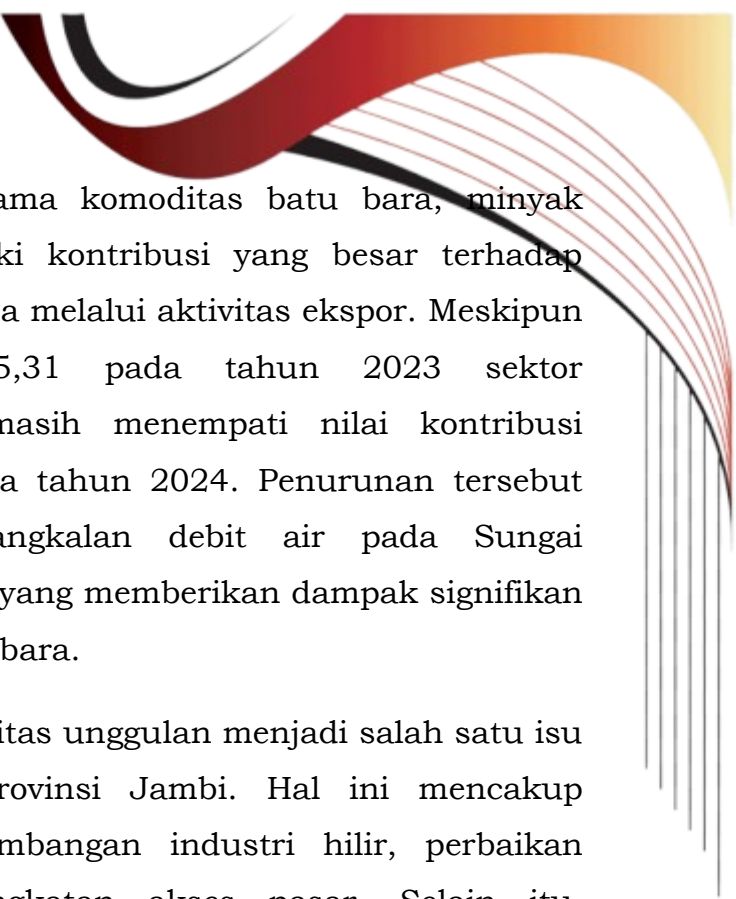
Ketergantungan terhadap sektor primer menyebabkan ketahanan ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, perubahan iklim, serta tekanan eksternal lainnya. Oleh karena itu, diversifikasi sektor ekonomi menjadi tantangan penting agar pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas, stabil, dan inklusif.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Jambi masih menjadi isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian serius. Terdapat perbedaan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Kondisi ini turut mempengaruhi ketimpangan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas ekonomi secara umum. Tanpa adanya kebijakan afirmatif dan strategi pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, ketimpangan ini berpotensi melebar dan menjadi hambatan bagi upaya pencapaian target-target pembangunan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dirumuskan sejumlah strategi prioritas, di antaranya adalah mendorong diversifikasi sektor ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor industri pengolahan, pariwisata, dan jasa berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan vokasional. Selain itu, penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, serta kebijakan perlindungan sosial yang lebih efektif bagi kelompok rentan, diharapkan dapat mempersempit ketimpangan distribusi pendapatan dan mendorong produktivitas ekonomi secara merata di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

#### 2.7.3.3.2 Rantai nilai komoditas unggulan Provinsi Jambi

Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi yang signifikan dalam sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, yang tercermin dalam kontribusi sektor terhadap PDRB Provinsi Jambi. Komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi dan pinang memainkan peran penting dalam perekonomian regional. Komoditas kelapa sawit sebagai sub-sektor perkebunan dengan volume produksi tertinggi mencapai 2.496,3 ribu ton, menjadikannya komoditas dengan kontribusi 17,8% terhadap PDRB Provinsi Jambi.



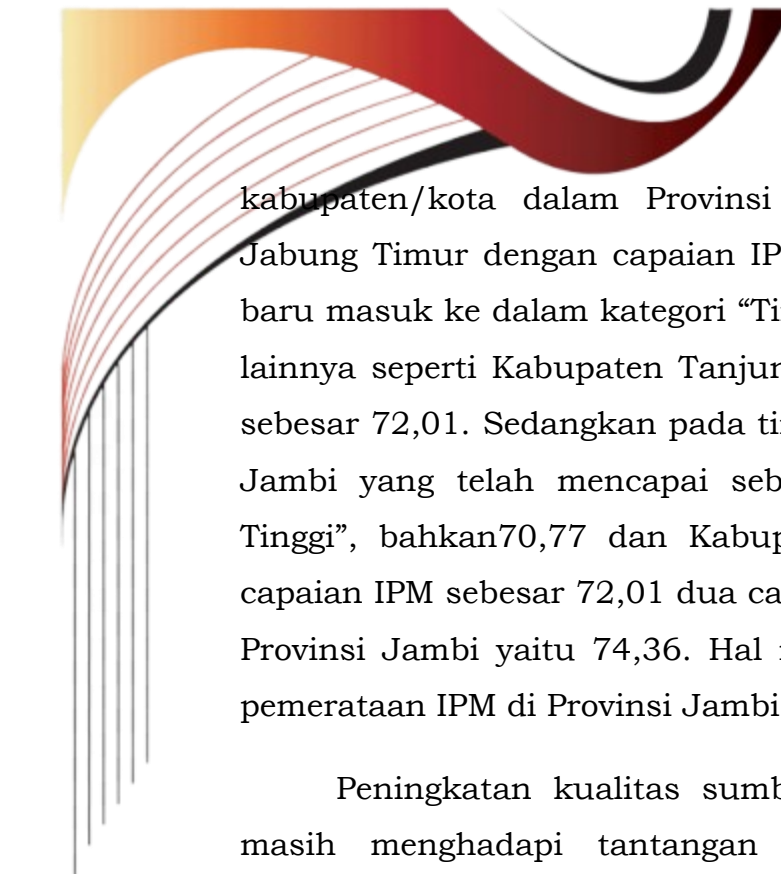
Sektor pertambangan, terutama komoditas batu bara, minyak bumi dan gas alam juga memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan Provinsi Jambi terutama melalui aktivitas ekspor. Meskipun mengalami penurunan dari 15,31 pada tahun 2023 sektor pertambangan dan penggalan masih menempati nilai kontribusi terbesar kedua sebesar 13,41 pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan dampak dari pendangkalan debit air pada Sungai Batanghari akibat musim kemarau yang memberikan dampak signifikan terhadap distribusi komoditas batu bara.

Penguatan rantai nilai komoditas unggulan menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan Provinsi Jambi. Hal ini mencakup peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, perbaikan infrastruktur logistik, dan peningkatan akses pasar. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pelaku dalam rantai nilai, serta penerapan praktik pertanian yang berkelanjutan. Optimalisasi rantai nilai komoditas unggulan di Provinsi Jambi masih belum sepenuhnya tercapai. Komoditas strategis seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan pinang masih didominasi oleh penjualan dalam bentuk bahan mentah, yang berdampak pada rendahnya daya saing daerah dan kesejahteraan petani. Selain itu, infrastruktur pendukung, teknologi pengolahan, serta kapasitas kelembagaan pelaku usaha, khususnya UMKM dan koperasi, masih perlu diperkuat untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan rantai pasok. Secara umum, belum terbangunnya sistem rantai nilai yang terintegrasi dan berkelanjutan menyebabkan potensi ekonomi dari komoditas unggulan Provinsi Jambi belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### 2.7.3.3.3 Kualitas Sumber Daya Manusia

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi masih menjadi tantangan utama dalam mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi menunjukkan tren peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun demikian, capaian IPM pada tahun 2024 masih terdapat ketimpangan antar wilayah



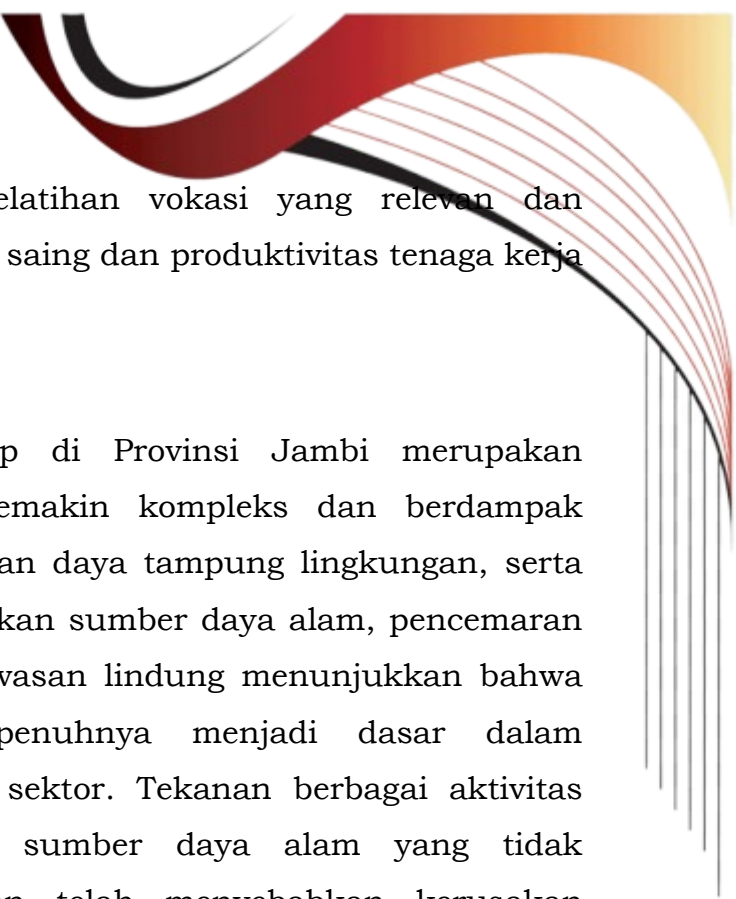


kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan capaian IPM sebesar 70,77 dan capaian IPM ini baru masuk ke dalam kategori “Tinggi” dibandingkan dengan kabupaten lainnya seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah mencapai sebesar 72,01. Sedangkan pada tingkat kota, terdapat capaian IPM Kota Jambi yang telah mencapai sebesar 81,77 dengan kategori “Sangat Tinggi”, bahkan 70,77 dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan capaian IPM sebesar 72,01 dua capaian IPM tersebut berada di atas IPM Provinsi Jambi yaitu 74,36. Hal ini perlu disikapi untuk mewujudkan pemerataan IPM di Provinsi Jambi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam aspek pendidikan dan ketenagakerjaan. Meskipun terdapat tren positif dalam indikator pendidikan, ketimpangan antarwilayah dan rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja masih menjadi permasalahan utama. Data dari BPS menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah (RLS) di Provinsi Jambi meningkat dari 8,97 tahun pada tahun 2020 menjadi 9,26 tahun pada tahun 2024. Namun, peningkatan ini belum merata di seluruh kabupaten/kota, yang berdampak pada ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antarwilayah.

Di sektor ketenagakerjaan, komposisi tenaga kerja Provinsi Jambi masih didominasi oleh pekerja sektor informal dan berpendidikan rendah. Pada tahun 2024, dari total angkatan kerja sebanyak 1.919.342 orang, sebanyak 1.833.267 orang bekerja, dengan sebagian besar berada di sektor informal. Rendahnya akses terhadap pelatihan vokasi dan keterampilan kerja praktis, serta minimnya pusat pelatihan kerja yang terstandar, menyebabkan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024 menunjukkan nilai 4,53 yang menurun 0,06 dari tahun 2023 yang menunjukkan nilai 4,59. Penurunan ini menunjukkan bahwa masih dibutuhkan upaya yang lebih intensif untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, berdaya saing dan sesuai dengan kebutuhan industri. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi strategis yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Upaya peningkatan mutu pendidikan harus diiringi

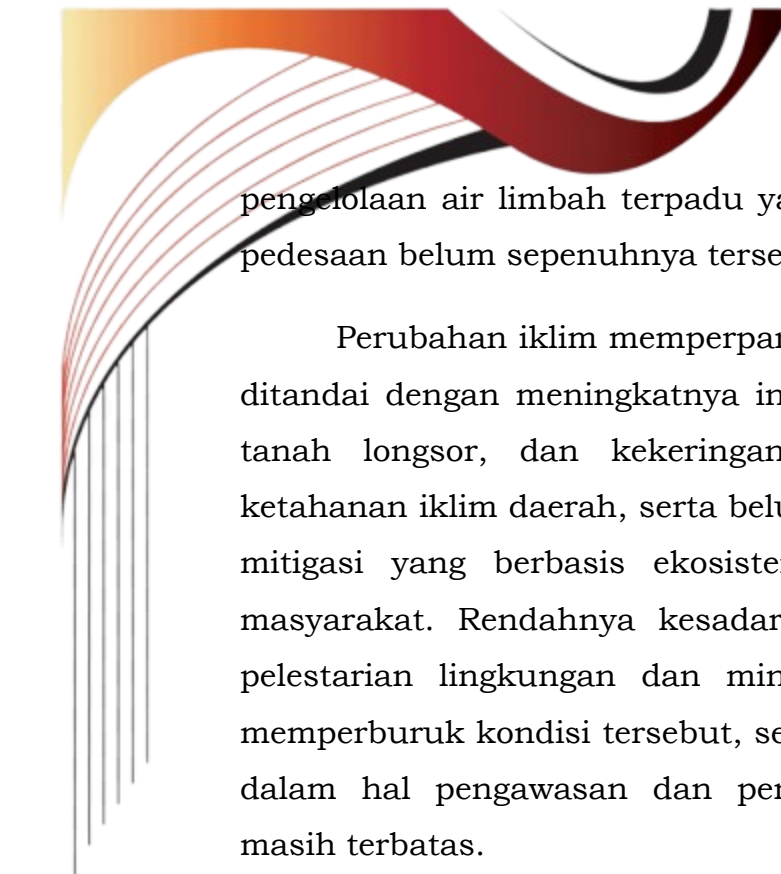


dengan pengembangan sistem pelatihan vokasi yang relevan dan aksesibel, guna meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jambi.

#### 2.7.3.3.4 Degradasi lingkungan

Degradasi lingkungan hidup di Provinsi Jambi merupakan tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan berdampak langsung terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat. Kerusakan sumber daya alam, pencemaran lingkungan, dan berkurangnya kawasan lindung menunjukkan bahwa aspek keberlanjutan belum sepenuhnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan lintas sektor. Tekanan berbagai aktivitas pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan prinsip kelestarian telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Alih fungsi lahan hutan menjadi kawasan perkebunan, pertanian, dan permukiman menyebabkan deforestasi, berkurangnya tutupan hutan, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Kegiatan penebangan liar, pembukaan lahan tanpa izin, serta lemahnya pengawasan terhadap perizinan semakin mempercepat laju degradasi kawasan hutan, termasuk kawasan hutan lindung dan konservasi. Selain itu, Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang sering terjadi pada musim kemarau menimbulkan kerusakan ekosistem, polusi udara lintas wilayah, serta gangguan kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat.

Ekosistem gambut di Provinsi Jambi yang bersifat rentan juga mengalami kerusakan akibat pembukaan lahan dan sistem drainase yang tidak terkendali, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), khususnya DAS Batanghari sebagai tulang punggung hidrologis wilayah, turut mengalami degradasi serius akibat sedimentasi, pencemaran air, dan aktivitas pertambangan tanpa pengelolaan lingkungan yang memadai. Pencemaran lingkungan semakin meningkat dari berbagai sumber, baik limbah domestik, limbah industri, maupun limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang belum sepenuhnya dikelola dengan sistem pengolahan sesuai dengan standar lingkungan yang berlaku. Kualitas air sungai mengalami penurunan yang berkelanjutan, sementara sistem



pengelolaan air limbah terpadu yang mencakup wilayah perkotaan dan pedesaan belum sepenuhnya tersedia.

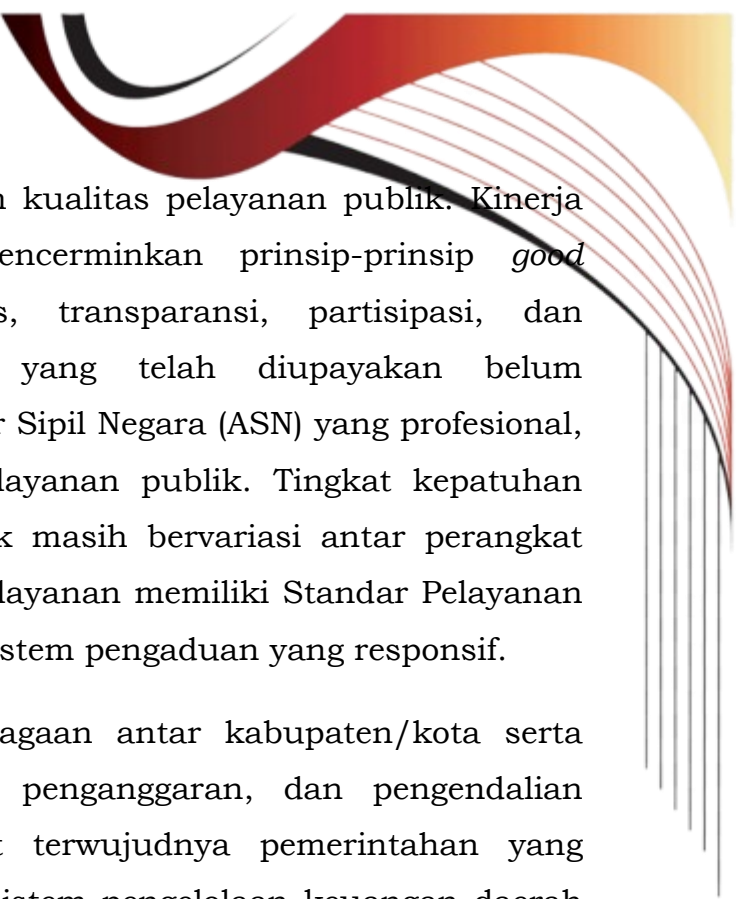
Perubahan iklim memperparah kondisi lingkungan yang ada, yang ditandai dengan meningkatnya intensitas bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Hal ini menunjukkan lemahnya ketahanan iklim daerah, serta belum optimalnya kebijakan adaptasi dan mitigasi yang berbasis ekosistem dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan dan minimnya edukasi lingkungan semakin memperburuk kondisi tersebut, sementara kapasitas pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan juga masih terbatas.

Permasalahan-permasalahan tersebut tercermin dalam fluktuasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2021) serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi (2023), IKLH Provinsi Jambi mengalami perubahan dari tahun 2019 sebesar 68,06, meningkat menjadi 70,87 pada tahun 2020, kemudian menurun menjadi 69,04 pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 70,32 pada tahun 2022, namun kembali menurun menjadi 68,15 pada tahun 2023. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan pada beberapa tahun, upaya perbaikan kualitas lingkungan belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Degradasi lingkungan hidup merupakan isu strategis yang mendesak untuk ditangani secara lintas sektor, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya pelestarian lingkungan hidup di Provinsi Jambi memerlukan penguatan tata kelola lingkungan, peningkatan efektivitas pengawasan, pemulihan ekosistem yang kritis, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai modal dasar bagi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

#### 2.7.3.3.5 Tata kelola pemerintahan

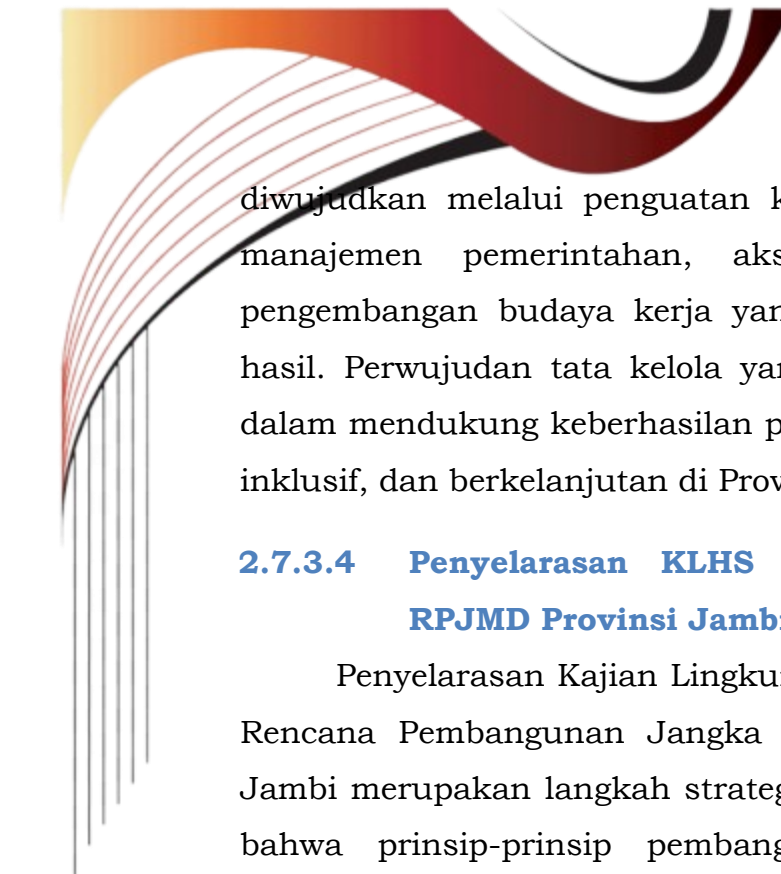
Tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak terhadap efektivitas



penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Kinerja birokrasi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip *good governance*, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efektivitas. Reformasi birokrasi yang telah diupayakan belum sepenuhnya menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik masih bervariasi antar perangkat daerah, dan belum seluruh unit pelayanan memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terukur serta sistem pengaduan yang responsif.

Disparitas kapasitas kelembagaan antar kabupaten/kota serta lemahnya integrasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan turut menghambat terwujudnya pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Selain itu, sistem pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi belanja, efektivitas alokasi anggaran berbasis kinerja, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2023, capaian indeks SPBE Provinsi Jambi mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai angka 3,31. Kenaikan ini menandakan adanya perbaikan dalam tata kelola layanan digital pemerintahan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kebijakan layanan elektronik yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kenaikan tersebut berbanding terbalik dengan Indeks Pelayanan Publik yang terus mengalami penurunan dari tahun 2022 dengan nilai 89,62 menjadi 88,41 pada tahun 2023 dan kembali mengalami penurunan menjadi 65,62 pada tahun 2024. Penurunan Indeks Pelayanan Publik ini mengindikasikan perlunya penguatan dalam implementasi kebijakan pelayanan publik yang adaptif, berintegritas, serta berbasis kebutuhan masyarakat.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintah daerah perlu diperkuat melalui sistem pengawasan internal yang lebih efektif, peningkatan integritas aparatur, serta penguatan budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan dan etika publik. Tingkat kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan juga perlu terus dibangun melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, cepat, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis yang krusial untuk



diwujudkan melalui penguatan kapasitas birokrasi, perbaikan sistem manajemen pemerintahan, akselerasi digitalisasi layanan, serta pengembangan budaya kerja yang bersih, melayani, dan berorientasi hasil. Perwujudan tata kelola yang baik akan menjadi fondasi utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.

#### **2.7.3.4 Penyelarasan KLHS RPJMD Provinsi Jambi terhadap RPJMD Provinsi Jambi**

Penyelarasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara efektif terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, RPJMD tidak hanya menjadi instrumen perencanaan pembangunan jangka menengah, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya alam.

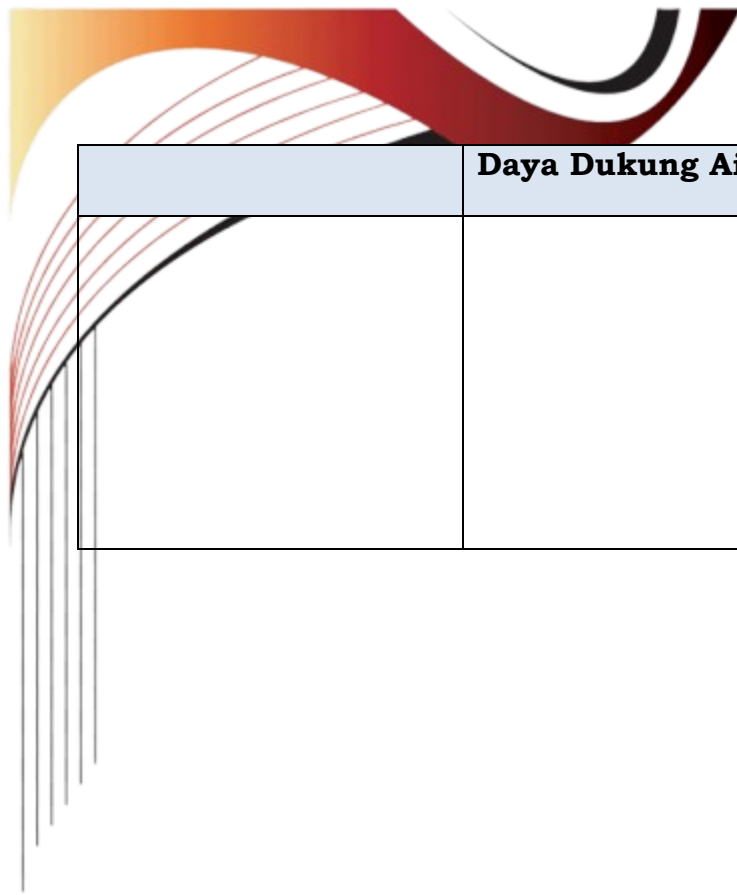
Tabel 2-45 Matriks Penelaahan Integrasi KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 ke RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029

|                    | Daya Dukung Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hal    | Daya Dukung Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hal    | Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hal     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Laporan KLHS RPJMD | Ketersediaan Air di Provinsi Jambi pada tahun 2023 sebesar 57.037.404.911,36 m3 sedangkan total kebutuhan air pada tahun 2023 adalah sebesar 17.598.569.327,95 m3 .Berdasarkan data tersebut diketahui selisih ketersediaan dan kebutuhan air sebesar 39.438.835.583,41 m3 maka status daya dukung air di Provinsi Jambi belum terlampaui pada tahun 2023. Berdasarkan Data Kajian Daya Dukung Air di Provinsi Jambi tahun 2022 (SK 146 TH 2023), daerah dengan tingkat jasa penyedia air yang rendah hingga sangat rendah umumnya berada di dataran rendah, terutama di tiga kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan sebagian Muaro Jambi. Wilayah-wilayah ini | III-31 | Berdasarkan Kajian Daya Dukung Pangan di Provinsi Jambi Tahun 2022, DDDT penyedia pangan terbagi statusnya menjadi status surplus, seimbang, dan defisit. Di Provinsi Jambi status daya dukung luasan lahan didominasi oleh lahan seimbang (2.814.699,40 ha). Sebagian besar daya dukung pangan berada pada lahan dengan status defisit (2.041.136,22 ha). Sedangkan sebagian kecil berada pada status surplus (51.560,1 ha) | III-34 | Di provinsi Jambi terdapat 20 Kinerja layanan atau jasa ekosistem, yang diukur berdasarkan overlay peta jasa ekosistem dengan peta wilayah provinsi Jambi. Dari 20 jasa ekosistem tersebut, pada KLHS RPJMD Tahun 2025-2029 ini difokuskan jasa penyediaan pangan, jasa penyediaan air bersih, dan jasa keanekaragaman hayati. | III-107 |

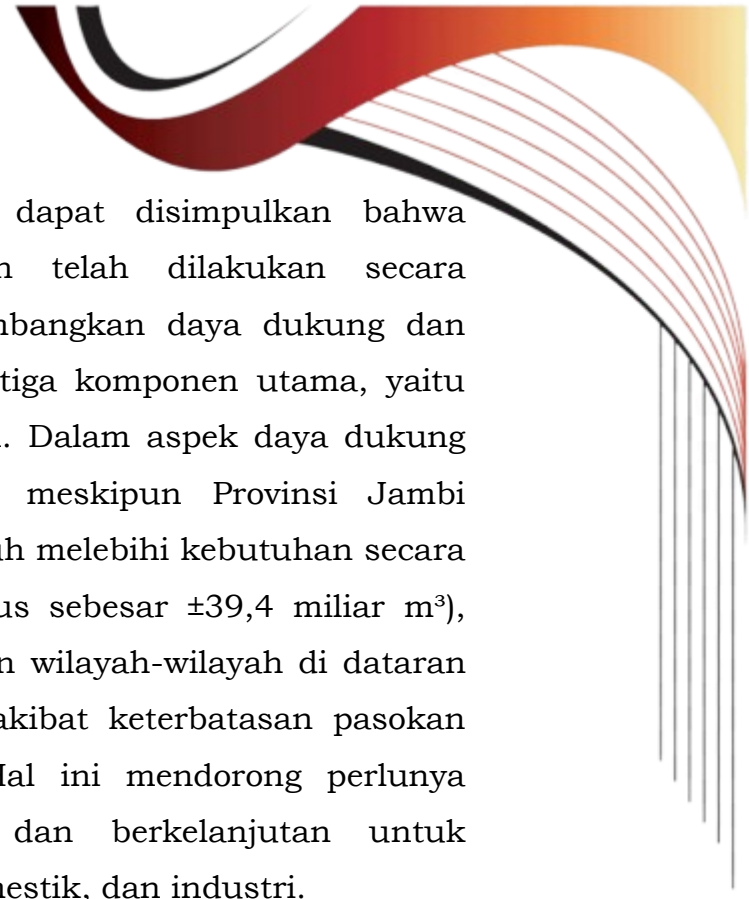


|               | Daya Dukung Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hal | Daya Dukung Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hal | Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hal |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | didominasi oleh lahan gambut, sehingga permasalahan ketersediaan air bersih masih menjadi tantangan.                                                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|               | Daya Dukung Air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hal | Daya Dukung Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hal | Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hal |
| Dokumen RPJMD | Neraca air yang dihitung berdasarkan data curah hujan dan geohidologi menunjukan beberapa wilayah dengan kebutuhan air yang lebih besar daripada ketersediaannya (defisit) sehingga memerlukan pengolahan sumber daya air yang lebih efisien dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung kebutuhan pertanian, domestik, dan industri. |     | Provinsi Jambi memiliki struktur wilayah yang ditandai oleh beragam karakteristik penggunaan lahan yang mencerminkan potensi dan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, termasuk ketersediaan pangan. Dari total luas wilayah Provinsi Jambi, yaitu sebesar 4.907.395,72 hektar, sebagian besar lahan termasuk dalam kategori daya dukung seimbang, yaitu seluas 2.814.699,40 hektar. Artinya, lahan pada kawasan tersebut secara umum mampu |     | <p>Kawasan strategis di Provinsi Jambi dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi, dengan arah pengembangan untuk penyediaan infrastruktur regional pendukung kegiatan ekonomi; penyediaan sarana, prasarana dan utilitas; dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dengan arah pengembangan pemanfaatan sumber</p> |     |

|  | Daya Dukung Air | Hal | Daya Dukung Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hal | Jasa Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hal |
|--|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |                 |     | memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayahnya secara relatif seimbang antara kapasitas produksi dengan konsumsi. Namun demikian, tantangan nyata terlihat dari masih luasnya kawasan yang berada dalam status defisit, yaitu sebesar 2.041.136,22 hektar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada area tersebut, kemampuan lahan dalam menghasilkan pangan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan pangan, Sementara itu, hanya sebagian kecil wilayah yang tergolong dalam status surplus, yakni 51.560,1 hektar, yang mencerminkan |     | <p>daya energi non-fosil dan pengembangan teknonlogi.</p> <p>Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, dengan pengembangan kawasan taman nasional sebagai wilayah konservasi.</p> <p>Kawasan strategis untuk kepentingan sosial budaya.</p> |     |



|  | Daya Dukung Air | Hal | Daya Dukung Pangan                                                                     | Hal | Jasa Lingkungan | Hal |
|--|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|
|  |                 |     | adanya kelebihan kapasitas produksi pangan dibandingkan kebutuhan di wilayah tersebut. |     |                 |     |



Berdasarkan Tabel 2-45, dapat disimpulkan bahwa penyelarasan aspek lingkungan telah dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan pada tiga komponen utama, yaitu air, pangan, dan jasa lingkungan. Dalam aspek daya dukung air, data menunjukkan bahwa meskipun Provinsi Jambi memiliki ketersediaan air yang jauh melebihi kebutuhan secara agregat pada tahun 2023 (surplus sebesar  $\pm 39,4$  miliar  $m^3$ ), distribusinya tidak merata dengan wilayah-wilayah di dataran yang rendah mengalami defisit akibat keterbatasan pasokan dan dominasi lahan gambut. Hal ini mendorong perlunya pengelolaan air yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung sektor pertanian, domestik, dan industri.

Pada aspek daya dukung pangan, luas lahan dengan status seimbang mendominasi ( $\pm 2,8$  juta ha), tetapi terdapat tantangan signifikan berupa lahan dengan status defisit yang mencapai lebih dari 2 juta ha, menandakan perlunya intervensi melalui pemanfaatan lahan yang adaptif, peningkatan produktivitas, serta penerapan teknologi pertanian yang ramah lingkungan. Sementara itu, dalam aspek jasa lingkungan, KLHS telah mengidentifikasi 20 jenis layanan ekosistem yang tersebar di seluruh wilayah provinsi dan menjadi dasar bagi perencanaan ruang dan pembangunan wilayah. RPJMD merespons hal ini melalui strategi pengembangan kawasan strategis yang memperhatikan penyediaan infrastruktur ekonomi, pemanfaatan energi terbarukan, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, baik dari sisi ekologis maupun sosial budaya.

Penyelarasan gambaran umum dalam dokumen RPJMD dengan hasil KLHS menjadi sangat penting mengingat bahwa pembangunan yang tidak disertai pemahaman terhadap batas daya dukung dan daya tampung lingkungan berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang lebih luas. Oleh karena itu, keselarasan antara gambaran umum pembangunan daerah dengan kondisi faktual lingkungan merupakan landasan utama dalam memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan yang

diambil bersifat responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Penyelarasan ini juga memperkuat integrasi antara perencanaan sektoral dan tata ruang, sehingga program-program prioritas tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berimbang.

2.7.3.4.2 Integrasi Isu Strategis

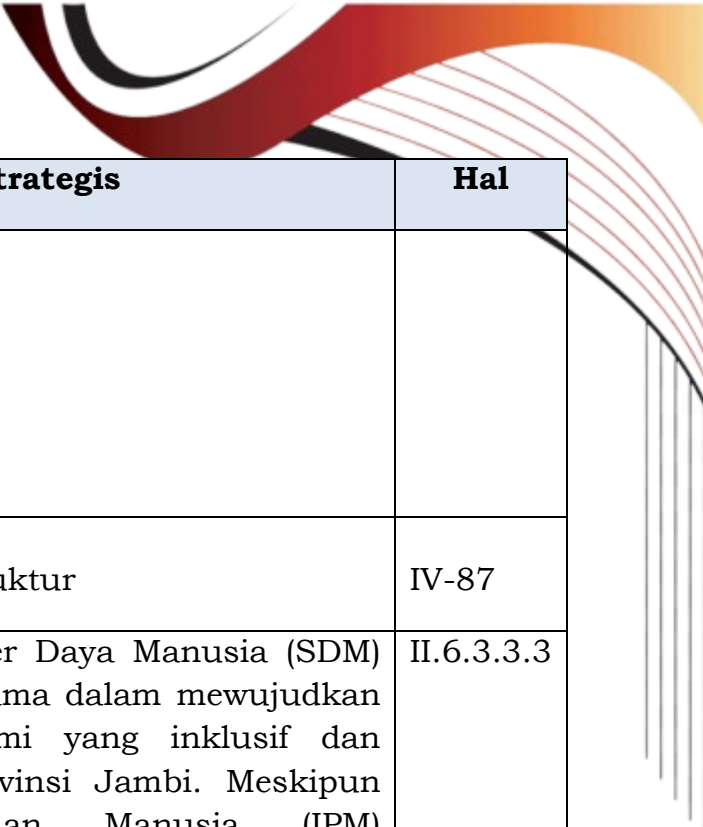
Integrasi isu strategis dilakukan dengan merujuk pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kualitas dan kuantitas sumber daya alam, perubahan iklim, kerentanan bencana, serta ketimpangan sosial-ekonomi. Isu-isu ini telah dipadukan dalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan program prioritas daerah, sehingga pembangunan yang dirancang tidak hanya bersifat responsif terhadap kebutuhan pembangunan ekonomi, tetapi juga adaptif terhadap risiko lingkungan dan sosial. Proses integrasi ini turut memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup yang bijak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan dan masyarakat terdampak.

**Tabel 2-46 Matriks Penelaahan Isu Strategis**

|                    | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hal        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Laporan KLHS RPJMD | Degradasi Lingkungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV-72      |
| Dokumen RPJMD      | Provinsi Jambi menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang kompleks, meliputi kehilangan air, penurunan kualitas air, degradasi ekosistem pesisir, serta kebakaran hutan dan lahan. Kehilangan air yang signifikan terjadi baik di wilayah barat maupun timur, dengan akumulasi terbesar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muaro Jambi, dan sebagian Kabupaten Batanghari, yang tidak berkaitan langsung dengan curah hujan, melainkan diduga kuat dipengaruhi oleh aktivitas antropogenik seperti perkebunan di lahan gambut dan sistem | II.6.3.3.4 |

|                    | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hal        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    | <p>drainase yang berlebihan. Selain itu, kualitas air sungai di Jambi mengalami penurunan akibat pencemaran dari aktivitas pertanian, pertambangan, industri pengolahan seperti pabrik CPO, serta limbah domestik, yang mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan dan rendahnya efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Wilayah pesisir, khususnya ekosistem mangrove, juga mengalami penurunan luasan, kerapatan vegetasi, dan keanekaragaman hayati, yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan masyarakat pesisir, termasuk nelayan yang sebagian besar tergolong masyarakat miskin. Di sisi lain, kebakaran hutan dan lahan, terutama di kawasan gambut, masih terjadi dan menyebabkan kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara, degradasi kesuburan tanah, serta peningkatan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim.</p> |            |
| Laporan KLHS RPJMD | Kerentanan Bencana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IV-83      |
| Dokumen RPJMD      | <p>Provinsi Jambi memiliki potensi ekonomi besar di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta pertambangan, dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kopi, dan pinang. Kelapa sawit menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 17,8%. Sektor pertambangan, khususnya batu bara, minyak bumi, dan gas alam, juga berperan penting meskipun mengalami penurunan kontribusi akibat gangguan distribusi oleh musim kemarau. Namun, penguatan rantai nilai komoditas unggulan masih menjadi tantangan. Sebagian besar produk dijual dalam bentuk mentah, dengan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas pelaku usaha yang masih terbatas. Kurangnya integrasi dan keberlanjutan dalam sistem rantai nilai menyebabkan potensi ekonomi Jambi belum termanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan</p>                                     | II.6.3.3.2 |





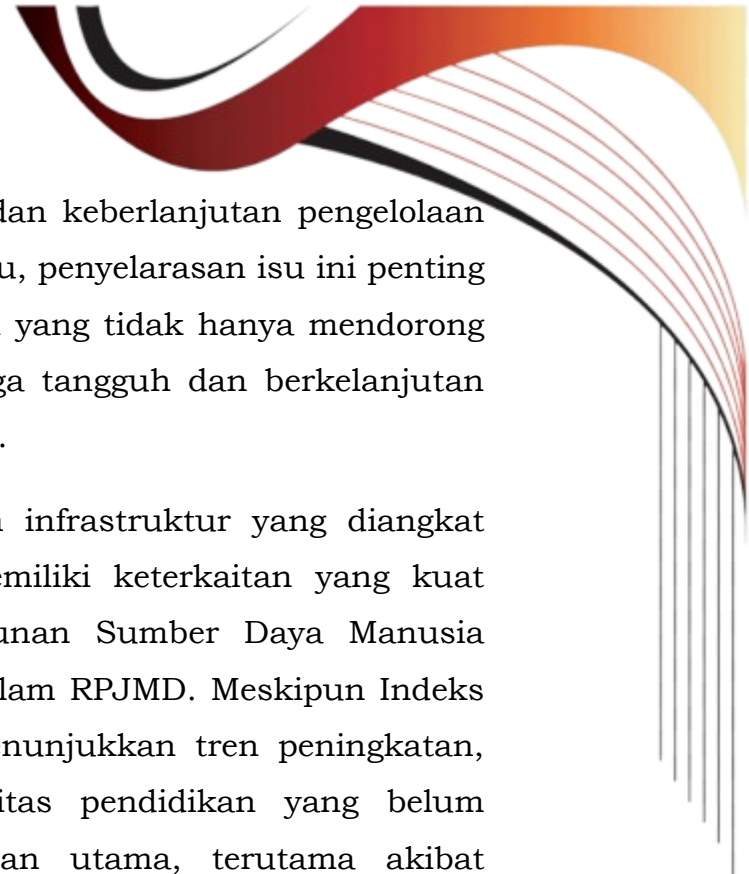
|                    | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hal        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    | masyarakat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| Laporan KLHS RPJMD | Keterbatasan Infrastruktur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IV-87      |
| Dokumen RPJMD      | Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, masih terdapat ketimpangan antar wilayah, terutama antara kota dan kabupaten. Kualitas pendidikan yang belum merata serta rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja menjadi tantangan utama. Rata-rata lama sekolah meningkat, namun belum signifikan di seluruh daerah. Di sektor ketenagakerjaan, tenaga kerja masih didominasi oleh sektor informal dan berpendidikan rendah, dengan keterbatasan akses terhadap pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 4,53% pada tahun 2024, upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM masih diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi strategis yang terintegrasi antara sektor pendidikan dan ketenagakerjaan melalui peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan pelatihan vokasi yang relevan dan mudah diakses. | II.6.3.3.3 |
| Laporan KLHS RPJMD | Tata Kelola yang belum Optimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IV-92      |
| Dokumen RPJMD      | Tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan signifikan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi belum sepenuhnya menghasilkan ASN yang profesional dan berorientasi pelayanan, sementara kepatuhan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II.6.3.3.5 |

|                    | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hal        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                    | <p>terhadap standar pelayanan publik masih belum merata. Disparitas kapasitas kelembagaan antar daerah dan lemahnya integrasi perencanaan, penganggaran, serta pengendalian pembangunan turut menghambat efisiensi dan akuntabilitas pemerintahan. Meskipun capaian indeks SPBE meningkat menjadi 3,31 pada tahun 2023, Indeks Pelayanan Publik justru mengalami penurunan signifikan, mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pelayanan yang lebih adaptif dan responsif. Pengelolaan keuangan daerah juga masih menghadapi kendala dalam efisiensi belanja dan optimalisasi PAD. Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan melalui pengawasan internal yang kuat dan budaya kerja yang berintegritas. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan menjadi isu strategis melalui peningkatan kapasitas birokrasi, akselerasi digitalisasi, dan pengembangan budaya kerja yang bersih dan melayani, guna mewujudkan pemerintahan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.</p> |            |
| Laporan KLHS RPJMD | Tingginya Tingkat Kemiskinan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IV-93      |
| Dokumen RPJMD      | <p>Produktivitas ekonomi Provinsi Jambi menunjukkan perlambatan dalam dua tahun terakhir, dengan pertumbuhan ekonomi menurun dari 5,13% pada 2022 menjadi 4,66% pada 2023, dan kembali turun menjadi 4,51% pada 2024. Ketimpangan pendapatan juga masih menjadi tantangan, tercermin dari fluktuasi Indeks Gini yang meskipun membaik di 2024 menjadi 0,321, tetap mencerminkan distribusi hasil pembangunan yang belum merata. Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer menjadikan ketahanan ekonomi rentan terhadap gangguan eksternal. Selain itu, kesenjangan antarwilayah dalam akses layanan dasar turut memperbesar ketimpangan kesejahteraan. Oleh karena itu, strategi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | II.6.3.3.1 |

|  | Isu Strategis                                                                                                                                                                                                                                                     | Hal |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  | pembangunan ke depan perlu difokuskan pada diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, dan perlindungan sosial yang menysasar kelompok rentan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan. |     |

Berdasarkan Tabel 2-46, isu strategis yang tercantum menunjukkan adanya keselarasan dan keterkaitan yang erat, khususnya dalam hal degradasi lingkungan. KLHS mengidentifikasi degradasi lingkungan sebagai isu yang berdampak terhadap keberlanjutan pembangunan daerah. Isu ini kemudian diperdalam dalam dokumen RPJMD yang menjabarkan secara komprehensif berbagai persoalan lingkungan, seperti kehilangan air, penurunan kualitas air, kerusakan ekosistem pesisir, pencemaran akibat aktivitas industri, serta kebakaran hutan dan lahan. Keterkaitan antara KLHS dan RPJMD terlihat dari kesamaan fokus terhadap faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan, baik yang bersifat alami maupun disebabkan oleh kelalaian manusia. Aktivitas seperti perluasan lahan perkebunan, pertambangan, pengolahan limbah, dan konversi lahan menjadi sorotan dalam kedua dokumen, dengan penekanan pada dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

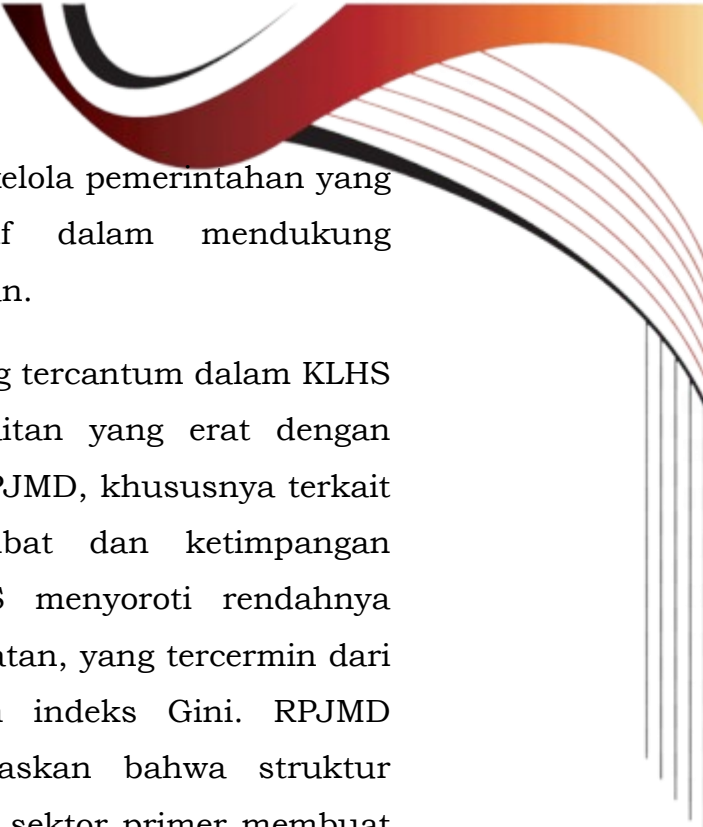
Isu strategis terkait kerentanan bencana yang termuat dalam KLHS dan RPJMD Provinsi Jambi menunjukkan keterkaitan yang erat, khususnya terhadap keberlanjutan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. KLHS menyoroti tingginya ketergantungan Jambi pada sektor-sektor yang rentan terhadap bencana, sementara RPJMD menegaskan bahwa kontribusi besar sektor seperti kelapa sawit terhadap PDRB sangat rentan terganggu oleh musim kemarau dan gangguan distribusi. Keduanya menggarisbawahi tantangan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, kapasitas pelaku usaha, serta



kurangnya integrasi rantai nilai dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, penyelarasan isu ini penting untuk memastikan pembangunan yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tangguh dan berkelanjutan dalam menghadapi risiko bencana.

Isu mengenai Keterbatasan infrastruktur yang diangkat dalam KLHS Provinsi Jambi memiliki keterkaitan yang kuat dengan permasalahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagaimana dijelaskan dalam RPJMD. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, ketimpangan wilayah dan kualitas pendidikan yang belum merata masih menjadi tantangan utama, terutama akibat rendahnya relevansi pendidikan terhadap kebutuhan pasar kerja. Hal ini diperburuk oleh dominasi sektor informal dalam ketenagakerjaan dan minimnya akses terhadap pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Keterbatasan infrastruktur, baik fisik maupun nonfisik, menjadi faktor penghambat utama dalam pemerataan layanan pendidikan dan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, penyelarasan isu strategis antara KLHS dan RPJMD sangat penting untuk memperkuat sinergi pembangunan SDM melalui peningkatan infrastruktur yang mendukung pendidikan, pelatihan, serta akses kerja yang berkualitas dan inklusif.

Isu strategis berikutnya juga menjadi fokus dalam KLHS yaitu mengenai tata kelola yang belum optimal memiliki keselarasan kuat dengan permasalahan yang diuraikan dalam RPJMD, terutama terkait efektivitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan. KLHS menyoroti lemahnya kinerja birokrasi dan disparitas pelayanan antarwilayah, sementara RPJMD mempertegas tantangan tersebut melalui data penurunan Indeks Pelayanan Publik dan hambatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kedua dokumen menekankan pentingnya reformasi birokrasi, integrasi perencanaan, serta akselerasi digitalisasi dan penguatan budaya kerja bersih dan profesional sebagai respons terhadap rendahnya efisiensi dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, penyelarasan isu ini



menjadi penting guna mendorong tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan responsif dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tingginya tingkat kemiskinan yang tercantum dalam KLHS Provinsi Jambi menunjukkan keterkaitan yang erat dengan permasalahan yang diuraikan dalam RPJMD, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi yang melambat dan ketimpangan distribusi hasil pembangunan. KLHS menyoroti rendahnya produktivitas dan ketimpangan pendapatan, yang tercermin dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan indeks Gini. RPJMD memperkuat hal ini dengan menjelaskan bahwa struktur ekonomi Jambi yang masih didominasi sektor primer membuat ketahanan ekonomi rentan terhadap gangguan eksternal, serta memperlebar kesenjangan antarwilayah dalam akses layanan dasar. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan isu strategis melalui diversifikasi sektor ekonomi, peningkatan kualitas SDM, penguatan infrastruktur, dan perlindungan sosial yang tepat sasaran, guna menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata dan berkelanjutan.

Penyelarasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga mempertimbangkan kapasitas lingkungan, ketahanan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Isu-isu seperti degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana, keterbatasan infrastruktur, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya tata kelola pemerintahan, serta tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan, mencerminkan adanya tantangan multidimensi yang saling berkaitan. Oleh karena itu, integrasi isu-isu strategis ini dalam RPJMD menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan menekankan penguatan tata kelola, perlindungan lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## **BAB III**

### **VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **3.1 Visi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka menengah Provinsi Jambi adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, disamping RPJMN. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini merupakan tahap pertama dari RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045. Dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2025 – 2029, yaitu :

**“Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan  
Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT”**

**Jambi MANTAP :** Suatu kondisi masyarakat Jambi yang maju dan Pemerintah Provinsi Jambi yang amanah dan profesional, dengan kondisi wilayah yang aman, nyaman dan tertib, sehingga tercipta tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah.



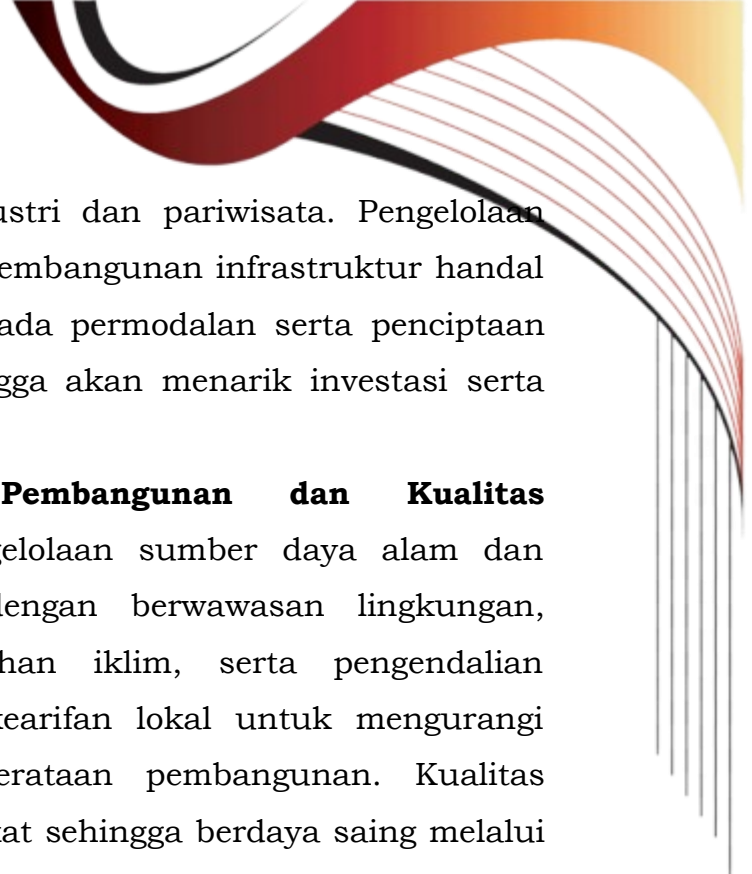
**Berdaya saing :** Optimalnya pemanfaatan potensi daerah untuk mendorong perekonomian dan kemajuan daerah. Stabilitas ekonomi makro terwujud dengan dukungan infrastruktur yang handal dan ekosistem inovasi yang baik. Demikian pula kondisi akses yang luas bagi masyarakat untuk mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan turut meningkatkan skala ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja.

**Berkelanjutan :** Terciptanya kondisi pembangunan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Pembangunan dilakukan secara holistik dan inklusif dengan memanfaatkan sumberdaya secara bijak, mendukung inovasi hijau, serta masyarakat berpartisipasi aktif dalam menciptakan masa depan yang lebih sehat, adil dan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

### 3.2 Misi

Pasal 166 ayat (3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyebutkan bahwa visi dan misi pembangunan 5 (lima) tahunan (RPJMD) sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah yang telah disampaikan dalam masa kampanye. Adapun ketiga misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. **Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien**, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung *e-government* yang terintegrasi.
2. **Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata**, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi,



yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan.

3. **Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia**, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

### 3.3 Tujuan dan Sasaran

#### 3.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu dan menyelaraskan dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045, maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1 **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif.**

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, adaptif dan demokratis diartikan sebagai pemerintahan yang efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab, melibatkan seluasnya-luasnya peran masyarakat dalam proses pembangunan serta adaptif dengan perubahan zaman. Ukuran yang digunakan untuk mengetahui berjalan atau tidak tata kelola yang pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi.

## **2 Meningkatkan daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah**

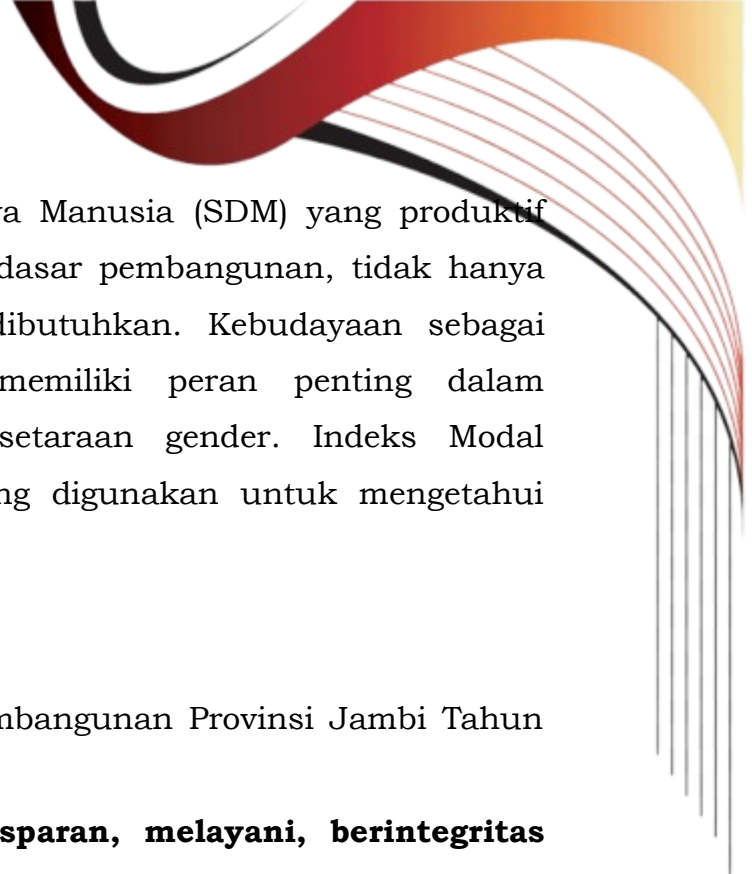
Daya saing daerah merupakan refleksi dari kemajuan dan produktivitas daerah tersebut. Daya saing daerah ditentukan oleh kemampuannya dalam meningkatkan produktivitas pada tiga lini, yaitu produktivitas dalam faktor produksi, produktivitas yang didorong oleh efisien dan produktivitas yang didorong oleh inovasi. Sektor-sektor dalam bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata adalah sektor unggulan Provinsi Jambi yang dapat ditingkatkan produktivitasnya dengan dukungan infrastruktur yang handal, akses permodalan dan pasar serta ekosistem inovasi yang baik. Ukuran yang digunakan untuk melihat peningkatan daya saing daerah ini adalah Indeks Daya Saing Daerah.

## **3 Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial**

Perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca telah menjadi ancaman serius yang memerlukan tindakan segera. Sistem perekonomian rendah karbon merupakan platform pengembangan baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan emisi GRK yang rendah. Melalui penerapan sistem perekonomian yang rendah karbon, diantaranya dengan pemanfaatan teknologi bersih dan praktik berkelanjutan pada berbagai sektor maka akan mengefisienkan penggunaan energi konvensional sehingga secara jangka panjang manfaat yang akan diterima jauh lebih besar dibanding biaya yang harus dikeluarkan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan inklusi secara sosial. Indikator yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan tujuan ini adalah Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru.

## **4 Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berbudaya, dan berkesetaraan gender.**

Akses terhadap pendidikan dan kesehatan pada dasarnya merupakan hak dasar dari seluruh masyarakat. Melalui pemenuhan hak dasar



tersebut akan tercipta Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan berdaya saing. Sebagai modal dasar pembangunan, tidak hanya pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan. Kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan, demikian pula kesetaraan gender. Indeks Modal Manusia merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tujuan ini tercapai.

### **3.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah**

Berdasarkan tujuan, maka sasaran pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

#### **1. Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital**

Birokrasi yang melayani, berintegritas dan berbasis digital menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi digital, serta jujur dan bertanggung jawab dengan hasil kinerja yang terukur. Selain itu, sebagai wujud transparansi, masyarakat diberikan ruang untuk mendapatkan informasi pembangunan dalam berbagai platform yang adaptif. Hal ini ditandai dengan peningkatan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, peningkatan indeks integritas nasional Provinsi Jambi, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), peningkatan indeks pelayanan publik, dan Indeks Keterbukaan Informasi

#### **2. Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah**

Penyediaan Infrastruktur yang handal pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah dalam pemenuhannya, sehingga sebagai salah satu upaya melaksanakan kewajiban tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jambi menjadikannya sebagai salah satu sasaran dalam RPJMD ini. Adapun indikator-indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio konektivitas dan Indeks daya saing infrastruktur.

### **3. Terwujudnya Transformasi Digital di Provinsi Jambi**

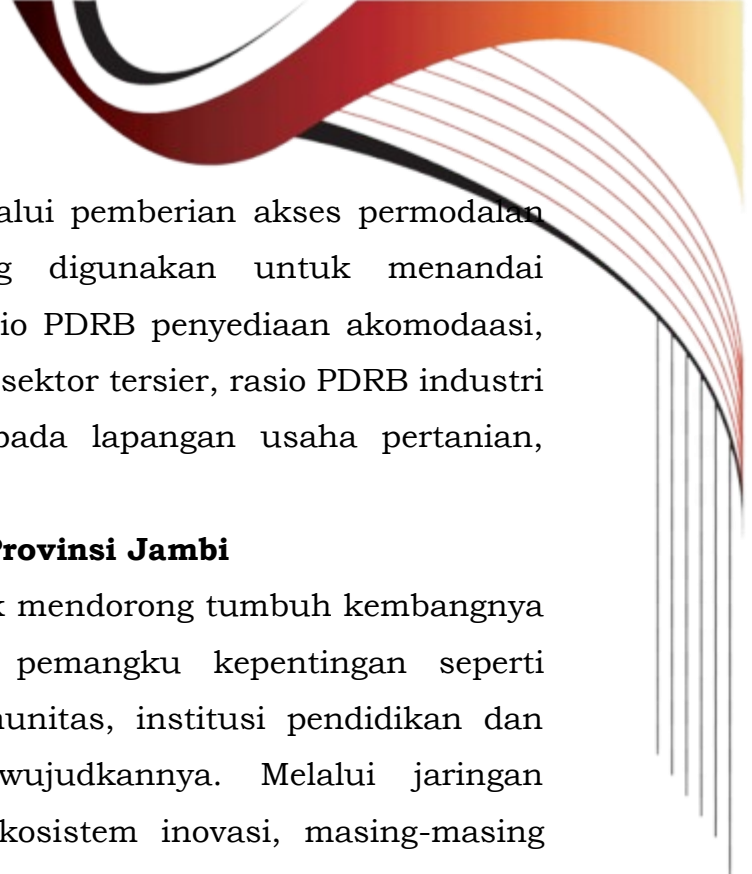
Transformasi digital merupakan perubahan yang memanfaatkan teknologi digital untuk merancang ulang proses-proses tradisional sehingga bisa menjadi lebih efisien dan efektif. Transformasi digital tidak hanya mereplikasi proses atau layanan yang ada menjadi bentuk digital, namun juga mengubah proses tersebut menjadi lebih baik. Terwujudnya transformasi digital di Provinsi Jambi ditandai oleh indikator Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi, Tingkat inklusi keuangan Provinsi, serta Indeks Pembangunan teknologi Informasi dan Komunikasi.

### **4. Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi**

Upaya yang akan dilakukan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi di Provinsi Jambi adalah dengan mengendalikan inflasi, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan pekerjaan, swasembada pangan, serta meningkatkan investasi di daerah. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah inflasi, rasio kapasitas fiskal daerah, pertumbuhan ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, indeks ketahanan pangan, ICOR dan PDRB perkapita.

### **5. Meningkatnya produktivitas bidang pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata**

Skala ekonomi masyarakat dan daerah didorong dengan meningkatkan nilai tambah lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong industrialisasi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Tidak hanya mendorong sektor sekunder, sektor pariwisata dan sektor tersier lainnya juga akan didorong agar mengalami peningkatan nilai tambah. Sektor pariwisata di Provinsi Jambi memiliki potensi yang cukup besar, namun belum memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu sektor ini perlu didorong lebih baik karena dapat memberikan dampak ikutan yang besar terhadap perkembangan industri kecil dan menengah yang ada di Provinsi Jambi. Untuk itu, UMKM yang ada di Provinsi Jambi akan



didorong untuk lebih produktif melalui pemberian akses permodalan yang lebih luas. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rasio PDRB penyediaan akomodasi, makan dan minum; distribusi PDRB sektor tersier, rasio PDRB industri pengolahan, pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.

#### **6. Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi**

Ekosistem inovasi dibutuhkan untuk mendorong tumbuh kembangnya inovasi di Provinsi Jambi. Para pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, korporasi, komunitas, institusi pendidikan dan lain-lain akan berkolaborasi mewujudkannya. Melalui jaringan informasi yang terbentuk dalam ekosistem inovasi, masing-masing pemangku kepentingan dapat berbagi informasi dan sumber daya yang dapat membantu satu sama lain mengatasi permasalahan yang ada. Keberhasilan ekosistem inovasi di Provinsi Jambi akan ditandai oleh indikator meningkatnya realisasi investasi, meningkatnya indeks inovasi daerah dan pengeluaran IPTEK dan Inovasi (Persen APBD).

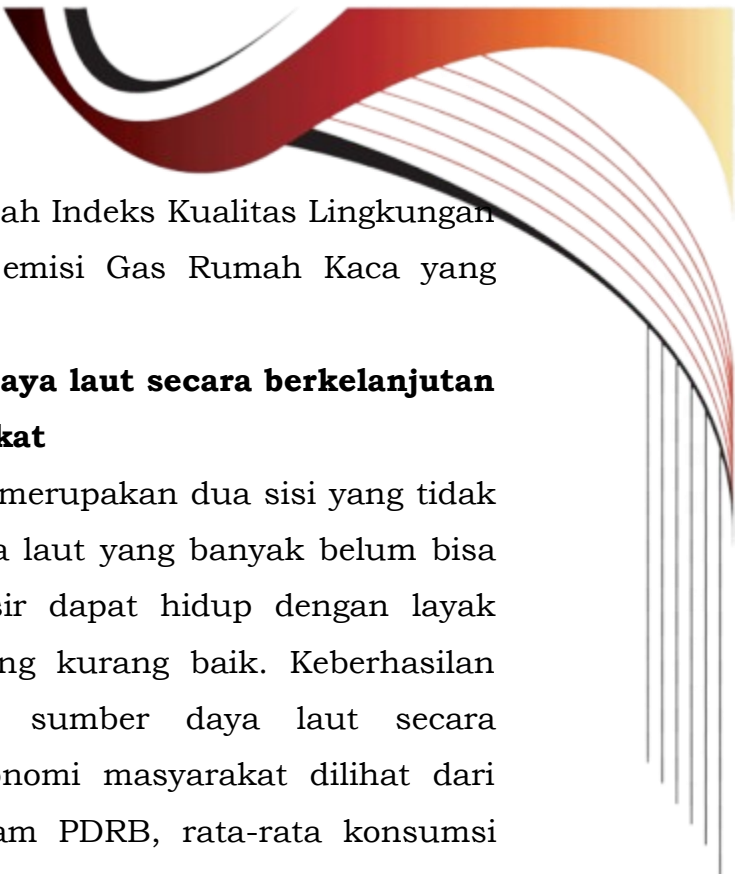
#### **7. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat**

Pembangunan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya mengacu pada tujuan sila kelima Pancasila dan Pasal 27 dan Pasal 34 UUD 1945 yang mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi adalah penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatnya indeks produktivitas tenaga kerja.

#### **8. Meningkatnya kualitas lingkungan**

Dengan mengusung pembangunan yang rendah karbon di Provinsi Jambi, maka pembangunan yang dilakukan akan diupayakan menggunakan praktek-praktek baik, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga bahkan ditingkatkan. Indikator yang digunakan untuk





menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang semakin meningkat dan emisi Gas Rumah Kaca yang semakin menurun.

9. **Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat**

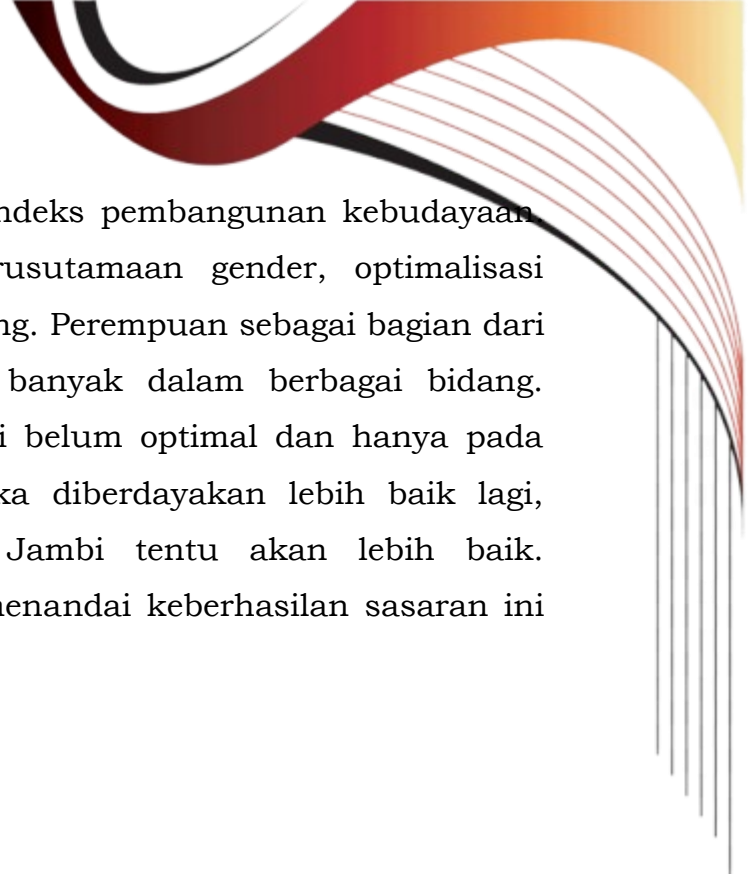
Pesisir dan sumber daya kelautan merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Namun sumber daya laut yang banyak belum bisa menjamin penduduk di wilayah pesisir dapat hidup dengan layak karena pemanfaatan sumber daya yang kurang baik. Keberhasilan sasaran meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat dilihat dari indikator peran sektor perikanan dalam PDRB, rata-rata konsumsi kalori ikan perkapita perhari dan persentase penduduk miskin ekstrim di wilayah pesisir.

10. **Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan usia harapan hidup dan prevalensi stunting menjadi salah satu sasaran yang ingin dicapai, karena kesehatan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

11. **Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender**

Selain kesehatan, pendidikan juga menjadi salah satu syarat dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang produktif dan berdaya saing. Untuk itu perlu dibuka akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga Provinsi Jambi akan semakin berdaya saing. Adapun indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah rata-rata lama sekolah. Selain itu, kebudayaan sebagai pembentuk sikap mental juga memiliki peran penting dalam pembangunan. Kearifan lokal yang dimiliki oleh Provinsi Jambi harus dipertahankan sebagai ciri khas daerah serta sebagai alat perekat bangsa. Oleh karena itu sumber daya manusia yang berkebudayaan menjadi salah satu sasaran yang akan dicapai dalam



RPJMD ini, yang ditandai dengan indeks pembangunan kebudayaan. Sementara sebagai bentuk pengarusutamaan gender, optimalisasi peran perempuan perlu terus didorong. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat, perlu berperan lebih banyak dalam berbagai bidang. Peran perempuan di Provinsi Jambi belum optimal dan hanya pada bidang-bidang tertentu, padahal jika diberdayakan lebih baik lagi, maka pembangunan di Provinsi Jambi tentu akan lebih baik. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah Indeks Ketimpangan Gender.

Tabel 3-1  
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Jambi

Visi: Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT

| Misi                                                                                                   | Tujuan                                                                      | Indikator Tujuan           | Sasaran                                                                             | Indikator Sasaran                                              | Kondisi Awal (2024) | Target Capaian |            |            |            |           |           | Kondisi Akhir |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
|                                                                                                        |                                                                             |                            |                                                                                     |                                                                |                     | 2025           | 2026       | 2027       | 2028       | 2029      | 2030      |               |
| Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien                                          | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan adaptif | Indeks Reformasi Birokrasi |                                                                                     |                                                                | BB (78,88)          | BB (79,00)     | BB (79,5)  | A (80,01)  | A (81,0)   | A (82,0)  | A (83,0)  | A (83,0)      |
|                                                                                                        |                                                                             |                            | Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital | Nilai AKIP                                                     | B (68,42)           | B (69,2)       | BB (70,50) | BB (71,50) | BB (73,01) | BB (74,6) | BB (76,5) | BB (76,5)     |
|                                                                                                        |                                                                             |                            |                                                                                     | Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas (SPI)) | 65,36               | 73,97          | 73,99      | 74,55      | 75,7       | 77        | 77,75     | 77,75         |
|                                                                                                        |                                                                             |                            |                                                                                     | Indeks SPBE                                                    | 3,05                | 3,85           | 4,0        | 4,20       | 4,41       | 4,81      | 4,85      | 4,85          |
|                                                                                                        |                                                                             |                            |                                                                                     | Indeks Pelayanan Publik                                        | 3,67*               | 3,33           | 3,35       | 3,39       | 3,42       | 3,45      | 3,50      | 3,50          |
|                                                                                                        |                                                                             |                            |                                                                                     | Indeks Keterbukaan Informasi                                   | 79,3 (sedang)       | 79,5           | 80,01      | 80,8       | 81,3       | 81,9      | 82,25     | 82,25         |
| Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata | Meningkatnya daya saing daerah dengan mengoptimalkan sektor unggulan daerah | Indeks Daya Saing Daerah   |                                                                                     |                                                                | 3,38                | 3,42           | 3,47       | 3,58       | 3,76       | 3,85      | 3,99      | 3,99          |
|                                                                                                        |                                                                             |                            | Meningkatnya daya saing infrastruktur dan konektivitas antar wilayah                | Rasio Konektivitas                                             | 0.5874              | 0,588          | 0,59       | 0,6        | 0,61       | 0,62      | 0,63      | 0,63          |
|                                                                                                        |                                                                             |                            |                                                                                     | Indeks Daya Saing Infrastruktur                                | 2,38                | 2,5            | 2,56       | 2,62       | 2,67       | 2,73      | 2,79      | 2,79          |
|                                                                                                        |                                                                             |                            | Terwujudnya Transformasi digital di Provinsi                                        | Indeks Transformasi Digital Nasional                           | 42,3**              | 50,80          | 51,23      | 51,67      | 52,10      | 52,53     | 52,65     | 52,65         |



| Misi | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran                                            | Indikator Sasaran                                     | Kondisi Awal (2024) | Target Capaian |             |             |            |           |             | Kondisi Akhir |
|------|--------|------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|---------------|
|      |        |                  |                                                    |                                                       |                     | 2025           | 2026        | 2027        | 2028       | 2029      | 2030        |               |
|      |        |                  | Jambi                                              | Provinsi Jambi                                        |                     |                |             |             |            |           |             |               |
|      |        |                  |                                                    | Tingkat inklusi keuangan Provinsi                     | 85*                 | 91,35          | 91,86       | 92,5        | 93,1       | 93,72     | 94,25       | 94,25         |
|      |        |                  |                                                    | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | 5,92*               | 5,9            | 6,1         | 6,27        | 6,5        | 6,8       | 6,85        | 6,85          |
|      |        |                  | Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi | Inflasi                                               | 1,43                | 3,1-3,7        | 3,0-3,7     | 2,9-3,7     | 2,5-3,7    | 1,6-3,7   | 1,5-3,5     | 1,5-3,5       |
|      |        |                  |                                                    | Rasio kapasitas fiskal daerah                         | 1,542 (rendah)      | 1,550          | 1,625       | 1,657       | 1,691      | 1,725     | 1,795       | 1,795         |
|      |        |                  |                                                    | Pertumbuhan Ekonomi                                   | 4,51                | 4,8-5,2        | 4,80 - 5,40 | 4,95 - 5,50 | 5,10 - 5,6 | 6,25-7,0  | 5,25-5,50   | 5,25-5,50     |
|      |        |                  |                                                    | Tingkat Pengangguran Terbuka                          | 4,48                | 4,27-4,38      | 4,20-4,35   | 3,89-4,31   | 3,55-4,20  | 2,78-4,07 | 2,65 - 4,00 | 2,65 - 4,00   |
|      |        |                  |                                                    | Indeks Ketahanan Pangan                               | 74,94               | 75,10          | 76,94       | 77,5        | 78,5       | 79,50     | 80,50       | 80,50         |
|      |        |                  |                                                    | Incremental Capital Output Ratio (ICOR)               | 5,55                | 5,50           | 5,05        | 4,83        | 4,75       | 4,50      | 4,32        | 4,32          |
|      |        |                  |                                                    | PDRB Perkapita (juta rupiah perkapita per tahun)      | 86,72               | 92,2           | 96,53       | 108,48      | 123,05     | 132,70    | 140,68      | 140,68        |

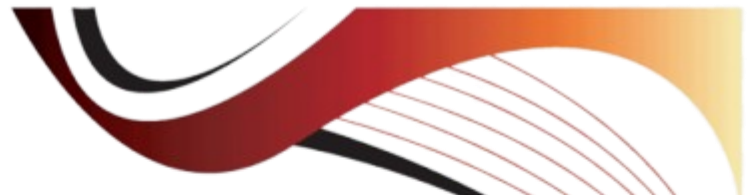


| Misi                                                                   | Tujuan                                                                                    | Indikator Tujuan     | Sasaran                                                                           | Indikator Sasaran                                                       | Kondisi Awal (2024) | Target Capaian |               |               |               |             |             | Kondisi Akhir |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                                                                        |                                                                                           |                      |                                                                                   |                                                                         |                     | 2025           | 2026          | 2027          | 2028          | 2029        | 2030        |               |
|                                                                        |                                                                                           |                      | Meningkatnya Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata | Rasio PDRB penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum                        | 1,10                | 1,21           | 1,22          | 1,23          | 1,24          | 1,26        | 1,27        | 1,27          |
|                                                                        |                                                                                           |                      |                                                                                   | Distribusi PDRB sektor tersier                                          | 35,28               | 35,29          | 35,30         | 35,34         | 35,40         | 35,45       | 35,5        | 35,5          |
|                                                                        |                                                                                           |                      |                                                                                   | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                          | 9,77                | 9,78-10,1      | 9,8 -10,1     | 9,85 -10,1    | 9,9 -10,1     | 9,99-10,1   | 9,99-10,1   | 9,99-10,1     |
|                                                                        |                                                                                           |                      |                                                                                   | Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan | 4,25                | 5,5            | 5,60          | 6,00          | 7,01          | 8,10        | 8,10        | 8,1           |
|                                                                        |                                                                                           |                      | Terciptanya ekosistem inovasi di Provinsi Jambi                                   | Indeks Inovasi Daerah                                                   | 58,59               | 58,75          | 58,89         | 59            | 59,25         | 60,1        | 61          | 61            |
| Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia | Terwujudnya sistem perekonomian yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, | Indeks Ekonomi Hijau |                                                                                   |                                                                         | 57,92**             | 61,39          | 63,65         | 65,54         | 66,46         | 68,55       | 68,60       | 68,60         |
|                                                                        |                                                                                           |                      | Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat                                             | Tingkat Kemiskinan                                                      | 7,1                 | 6,3-6,8        | 6,25 - 6,76   | 5,9 - 6,5     | 4,98-5,75     | 3,66-4,66   | 3,65-4,63   | 3,65-4,63     |
|                                                                        |                                                                                           |                      | Menurunnya ketimpangan pendapatan                                                 | Rasio Gini                                                              | 0,321               | 0,337-0,341    | 0,330 – 0,337 | 0,318 – 0,325 | 0,314 - 0,318 | 0,311-0,315 | 0,311-0,315 | 0,311-0,315   |



| Misi | Tujuan                                                          | Indikator Tujuan     | Sasaran                                                                                             | Indikator Sasaran                                                          | Kondisi Awal (2024) | Target Capaian |       |       |        |       |       | Kondisi Akhir |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|-------|--------|-------|-------|---------------|
|      |                                                                 |                      |                                                                                                     |                                                                            |                     | 2025           | 2026  | 2027  | 2028   | 2029  | 2030  |               |
|      | dan inklusif secara sosial                                      |                      | Meningkatnya kualitas lingkungan                                                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                           | 68,15*              | 73,71          | 73,92 | 74,13 | 74,34  | 74,56 | 74,77 | 74,77         |
|      |                                                                 |                      |                                                                                                     | Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)                              | 77,27*              | 78,5           | 80,76 | 83,58 | 86,14  | 86,55 | 88,70 | 88,70         |
|      |                                                                 | Indeks Ekonomi Biru  |                                                                                                     |                                                                            | 14,03*              | 15,26          | 15,35 | 16,26 | 17,27  | 18,29 | 19,01 | 19,01         |
|      |                                                                 |                      | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat | Distribusi sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%) | 2,16                | 2,16           | 2,17  | 2,175 | 2,18   | 2,19  | 2,2   | 2,2           |
|      |                                                                 |                      |                                                                                                     | Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari            | 55,63               | 56,0           | 57,52 | 59,48 | 60, 45 | 62,37 | 64,25 | 64,25         |
|      |                                                                 |                      |                                                                                                     | Persentase Penduduk miskin ekstrim di wilayah Pesisir (%)                  | 4,19                | 4,05           | 3,84  | 3,50  | 3,16   | 2,81  | 2,46  | 2,46          |
|      |                                                                 | Indeks Modal Manusia |                                                                                                     |                                                                            | 0,54*               | 0,56           | 0,56  | 0,57  | 0,58   | 0,59  | 0,6   | 0,6           |
|      |                                                                 |                      | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                           | Usia Harapan Hidup                                                         | 74,06               | 74,14          | 74,25 | 74,50 | 74,94  | 75,18 | 75,45 | 75,45         |
|      |                                                                 |                      |                                                                                                     | Prevalensi Stunting                                                        | 13,5                | 11,9           | 11,5  | 11    | 10.25  | 9.3   | 9.1   | 9.1           |
|      | Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan |                      |                                                                                                     |                                                                            |                     |                |       |       |        |       |       |               |





| Misi | Tujuan               | Indikator Tujuan | Sasaran                                                                        | Indikator Sasaran                                     | Kondisi Awal (2024) | Target Capaian |             |             |             |            |           | Kondisi Akhir |
|------|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------------|
|      |                      |                  |                                                                                |                                                       |                     | 2025           | 2026        | 2027        | 2028        | 2029       | 2030      |               |
|      | berkesetaraan gender |                  | Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan masyarakat serta pengarusutamaan gender | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun | 8,9                 | 9,38-9,4       | 9,5         | 9,60        | 9,76        | 9,86-9,89  | 9,93      | 9,93          |
|      |                      |                  |                                                                                | Indeks Pembangunan Kebudayaan                         | 58,92*              | 60,15-60,23    | 60,73-60,85 | 61.29-61.44 | 61,83-62.02 | 62,38-62,6 | 62,7-63,0 | 62,7-63,0     |
|      |                      |                  |                                                                                | Indeks Ketimpangan Gender                             | 0,528               | 0,514          | 0,504       | 0,489       | 0,469       | 0,467      | 0,465     | 0,465         |



Sasaran-sasaran di atas diharapkan dapat meningkatkan daya saing Provinsi Jambi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan oleh peningkatan pada indikator makro Provinsi Jambi.

Tabel 3-2 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029

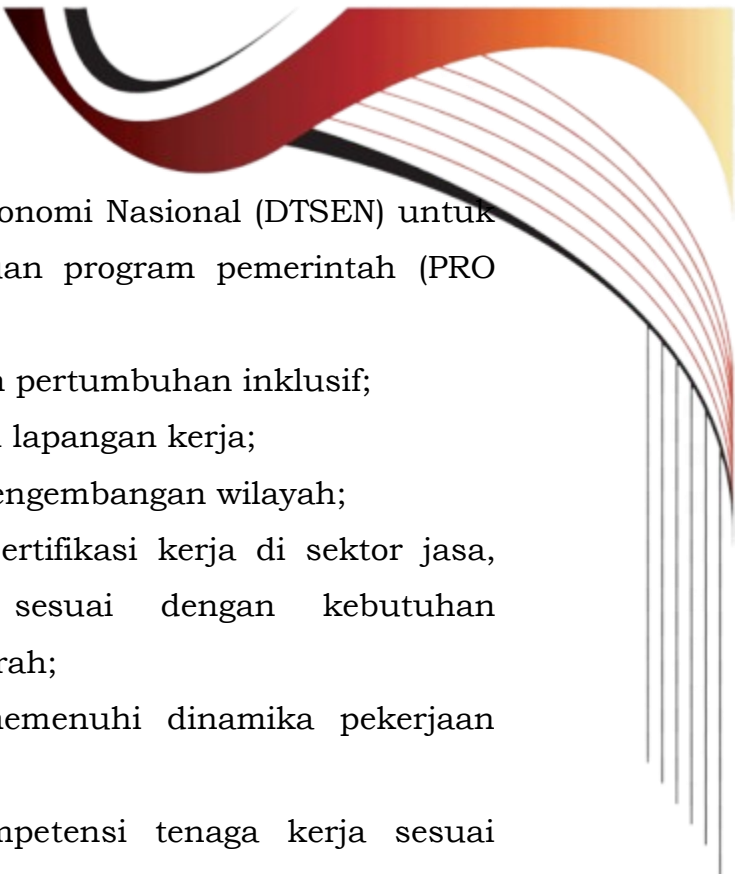
| No | Indikator Pembangunan              | Target RPJMN untuk Provinsi Jambi |               |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|    |                                    | 2025                              | 2029          |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)       | 4,8                               | 7,0           |
| 2  | PDRB Per Kapita (Rp.juta)          | 92,2                              | 132,7         |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi (%)       | 1,5                               | 1,4           |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%)             | 6,30 – 6,80                       | 3,66 – 4,66   |
| 5  | Rasio Gini                         | 0,337 – 0,341                     | 0,311 – 0,315 |
| 6  | Indeks Modal Manusia               | 0,56                              | 0,59          |
| 7  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 78,5                              | 86,55         |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 73,71                             | 74,56         |
| 9  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 4,27 – 4,38                       | 2,78 – 4,07   |

Sumber: RPJMN 2025-2029

Strategi mendorong pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi dan berkelanjutan yaitu:

1. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan;
2. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan perkebunan;
3. Industrialisasi (hilirisasi) padat karya, berorientasi ekspor dan berkelanjutan;
4. Mengoptimalkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. Mendorong ekonomi biru dan ekonomi hijau;
6. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
7. Transformasi digital;
8. Investasi;
9. Belanja pemerintah untuk produktivitas.

Strategi penurunan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan adalah sebagai berikut:

- 
1. Pemanfaatan Data terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk penentuan sasaran penerima bantuan program pemerintah (PRO JAMBI dan bantuan lainnya)
  2. Menjaga stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan inklusif;
  3. Penguatan wirausaha dan penciptaan lapangan kerja;
  4. Penguatan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah;
  5. Memperluas pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja di sektor jasa, manufaktur dan digital yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan potensi unggulan daerah;
  6. Reskilling dan upskilling untuk memenuhi dinamika pekerjaan baru;
  7. Pemagangan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja;
  8. Penciptaan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja fleksibel, responsif gender dan inklusif;
  9. Jaminan perlindungan sosial kesehatan bagi masyarakat miskin dan dan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Sedangkan strategi peningkatan Indeks Modal Manusia adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan stunting;
2. Pencegahan dan deteksi dini penyakit serta pembudayaan hidup sehat;
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
4. Peningkatan akses layanan pendidikan;
5. Penguatan pengelolaan pendidikan dan tenaga kependidikan berkualitas.

Berpedoman pada sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN serta memperhatikan strategi yang akan dilakukan, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan penyelarasan terhadap sasaran tersebut sehingga tercipta sinergi dan keselarasan perencanaan antara pusat dan daerah.

Tabel 3-3 Sasaran Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2030

| No | Indikator Pembangunan              | Target RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 |               |               |              |             |             |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|    |                                    | 2025                                        | 2026          | 2027          | 2028         | 2029        | 2030        |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)       | 4,70                                        | 4,80 - 5,40   | 4,95 - 5,50   | 5,10 - 5,6   | 5,23 - 7,0  | 5,25 - 5,50 |
| 2  | PDRB Per Kapita (Rp.juta)          | 92,2                                        | 96,53         | 108,48        | 123,05       | 132,70      | 140,68      |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi (%)       | 1,5                                         | 1,4           | 1,4           | 1,4          | 1,4         | 1,4         |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%)             | 6,30 – 6,80                                 | 6,25 - 6,76   | 5,9 - 6,5     | 4,98-5,75    | 3,66-4,66   | 3,65-4,63   |
| 5  | Rasio Gini                         | 0,337-0,341                                 | 0,330 – 0,337 | 0,318 – 0,325 | 0,314 -0,318 | 0,311-0,315 | 0,311-0,315 |
| 6  | Indeks Modal Manusia               | 0,55                                        | 0,56          | 0,57          | 0,58         | 0,59        | 0,6         |
| 7  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 78,5                                        | 80,76         | 83,58         | 86,14        | 86,55       | 88,70       |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 73,71                                       | 73,92         | 74,13         | 74,34        | 74,56       | 74,77       |
| 9  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 4,27 – 4,38                                 | 4,20-4,40     | 3,89-4,31     | 3,55-4,20    | 2,78-4,07   | 2,65 - 4,00 |

Sumber: RPJMN Tahun 2025-2029 dan Analisis KEMD Bappeda Prov. Jambi, 2025

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah.

Strategi yang dibuat pada hakekatnya tidak berdiri sendiri namun berhubungan dengan strategi pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional merupakan akumulasi dari pembangunan – pembangunan di daerah. Strategi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 adalah strategi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi yang mendukung strategi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025 - 2029.

Arah kebijakan merupakan rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3-4 Arah Kebijakan Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                                                                                                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                      | Arah kebijakan                                                                                                                                                                   | Ket |
| Misi 1 :<br>Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien                                 | Meningkatkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)                                                                                                  |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah serta pengembangan gerakan pemberantasan korupsi                                                    |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian                                                                                   |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan pengawasan, pembinaan kinerja dan penerapan disiplin disertai reward dan punishment yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan disiplin dan etika birokrasi |     |

| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan<br>Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                         | Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                            | Ket |
|                                                                                                              | Meningkatkan budaya hukum secara terintegrasi melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                              | Menyelesaikan penataan batas wilayah provinsi                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                              | penegakan hukum terhadap pelanggaran PERDA secara tegas, profesional, dan adil dengan penguatan kelembagaan dan personil PPNS dengan peningkatan jumlah dan kualitas PPNS daerah                                                          |     |
|                                                                                                              | Meningkatkan kinerja birokrasi melalui perbaikan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi digital, transparansi serta regulasi, pengawasan, penegakan aturan dan peningkatan tunjangan daerah                                                |     |
|                                                                                                              | Menerapkan budaya kerja inovatif                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                              | Peningkatan kapasitas ASN dan PPPK                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                              | Meningkatkan perencanaan, pengelolaan keuangan dan pengawasan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi                                                                                                         |     |
|                                                                                                              | Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasis <i>e-government</i>                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                              | meningkatkan efektivitas penerapan manajemen SPBE, seperti pengelolaan data, aset dan infrastruktur TIK, dan peningkatan kualitas SDM pengelola SPBE                                                                                      |     |
|                                                                                                              | Meningkatkan efektivitas penerapan tata kelola SPBE, mulai dari tingkat kematangan arsitektur SPBE hingga konektivitasnya terhadap jaringan intra, sistem penghubung layanan dan kebijakan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) |     |
|                                                                                                              | meningkatkan kualitas sarana komunikasi berbasis digital yang memadai untuk diseminasi informasi yang efisien dan menjangkau publik lebih luas serta mudah diakses oleh seluruh segmen masyarakat                                         |     |
|                                                                                                              | Adopsi TIK dalam pemerintahan dan pelayanan publik                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                              | Menerapkan pelayanan publik berbasis digital yang cepat, prima dan terjangkau                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                              | menerapkan manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, dan manajemen TIK dalam rangka meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)                                                                   |     |
|                                                                                                              | Meningkatkan kompetensi SDM SPBE dan manajemen pengetahuan mengenai SPBE                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                              | Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik, musrenbang dan forum penyusunan kebijakan lainnya                                                                                                                  |     |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"          |                                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                               | Arah kebijakan                                                                                                                                                                           | Ket |
|                                                                                                                    | Memberikan wadah/ saluran pengaduan bagi masyarakat, yaitu Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) (Himpunan Aspirasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat)                                     |     |
|                                                                                                                    | Peningkatan peran da'i dalam pembangunan                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                                    | Menginformasikan tahapan pembangunan yang telah atau sedang dilaksanakan (perencanaan, pelaksanaan, hasil) kepada masyarakat melalui website resmi pemerintah sesuai aturan yang berlaku |     |
| Misi 2 :<br>Memantapkan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata | Fasilitasi dan peningkatan kualitas prasarana transportasi darat, laut dan udara                                                                                                         |     |
|                                                                                                                    | Pembangunan Fly Over di Kota Jambi                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                    | Meningkatkan sarana prasarana air minum perdesaan dan perkotaan                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                    | Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi dan pembangunan jembatan Batang Hari 3 dan Jembatan Sungai Rambut                                                                                                             |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus batubara                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi dan Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung                                                                                    |     |
|                                                                                                                    | Mendorong percepatan pembangunan railways yang melewati Provisi Jambi                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi peningkatan status jalan kabupaten dalam status mantap menjadi jalan provinsi dan jalan provinsi menjadi jalan nasional                                                       |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi peningkatan infrastruktur penunjang Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal, Talang Duku, Muara Sabak, Mendahara, dan Nipah Panjang                                                     |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi percepatan pengembangan Bandar Udara Muaro Bungo dan Depati Parbo                                                                                                             |     |
|                                                                                                                    | Mengembangkan dan meningkatkan Bandar Udara Sultan Thaha Syaifuddin menjadi bandara internasional                                                                                        |     |
|                                                                                                                    | Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi                                                                                                      |     |
|                                                                                                                    | Mendorong percepatan pembangunan dan pengembangan energi listrik bersumber energi baru terbarukan                                                                                        |     |
|                                                                                                                    | Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum                                                                                                                                     |     |

| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                                                                                                                                            |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                      | Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                             | Ket |
|                                                                                                           | Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi pengembangan dan penataan kawasan perkotaan                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi akses terhadap jaringan internet                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                           | Melakukan digitalisasi UMKM dan usaha industri rumah tangga, pariwisata dan ekonomi kreatif                                                                                                                                |     |
|                                                                                                           | Penerapan kebijakan untuk penyederhaan proses perizinan dalam penggelaran infrastruktur digital oleh penyedia telekomunikasi di daerah                                                                                     |     |
|                                                                                                           | Penyediaan akses internet gratis (wifi) di fasilitas umum (kantor pemerintahan, sekolah, RS)                                                                                                                               |     |
|                                                                                                           | Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan internal untuk mengembangkan keterampilan technopreneur bagi para pelaku usaha lokal                                                                                              |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi adopsi teknologi digital bagi para pelaku usaha, termasuk UMKM                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                           | Mendorong pengembangan riset dan inovasi melalui penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, Lembaga riset, maupun industri                                                                                              |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi pembinaan <i>startup</i> digital lokal.                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                           | Penerapan kebijakan pemerintah daerah untuk mempermudah penanaman modal bagi para pelaku usaha lokal maupun startup.                                                                                                       |     |
|                                                                                                           | Penyelenggaraan pelatihan keterampilan digital tingkat dasar dan tingkat menengah bagi masyarakat                                                                                                                          |     |
|                                                                                                           | Penyediaan akses internet dan sarana TIK lainnya untuk mendukung proses pembelajaran digital di sekolah menengah                                                                                                           |     |
|                                                                                                           | Memperbanyak kerja sama dengan lembaga pendidikan yang menawarkan program khusus dalam bidang TIK, akademi teknologi dalam rangka mencetak talentaseperti sekolah vokasi maupun digital yang berkualitas dan berdaya saing |     |
|                                                                                                           | Penguatan keuangan syariah (klaster jasa keuangan syariah, klaster keuangan sosial syariah dan klaster infrastruktur ekosistem syariah)                                                                                    |     |
|                                                                                                           | Penguatan Dana sosial Syariah                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                           | Pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan inovatif melalui bantuan modal kerja UMKM/Industri Rumah Tangga/ Start Up Milenial                                                                                                  |     |

| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                                                                          |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                      | Arah kebijakan                                                                                                                                           | Ket |
|                                                                                                           | Mensinergikan usaha BUMD dengan UMKM dalam hal produksi dan pemasaran                                                                                    |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi pembentukan BUMD pangan dan pengelolaan migas                                                                                                 |     |
|                                                                                                           | Penguatan kelembagaan koperasi dan pusat pemasaran produk-produk UMKM Provinsi Jambi                                                                     |     |
|                                                                                                           | Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah                                                                                                                     |     |
|                                                                                                           | Mempercepat proses perizinan BBNKB bagi kendaraan yang bernomor polisi luar daerah                                                                       |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan sinergitas antar daerah dalam penerapan opsen pajak                                                                                         |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja                                                                                              |     |
|                                                                                                           | pemberian <i>life skill</i> bagi angkatan kerja milenial/Gen Z                                                                                           |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi pengembangan intelektualitas pemuda dan potensi-potensi kepemudaan lainnya                                                                    |     |
|                                                                                                           | Mendorong pembangunan sarana pelabuhan ekspor dan wilayah zonasi ekonomi untuk kawasan Ujung Jabung                                                      |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi akses perbankan bagi UMKM                                                                                                                     |     |
|                                                                                                           | Mendorong percepatan pengembangan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi dan geopark Merangin sebagai destinasi wisata dunia                          |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi penyelenggaraan event seni budaya berskala nasional/internasional dengan melibatkan kabupaten/kota                                            |     |
|                                                                                                           | Revitalisasi dan fasilitasi objek wisata unggulan di kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi                                                                 |     |
|                                                                                                           | mengembangkan objek dan destinasi tujuan wisata berbasis masyarakat lokal                                                                                |     |
|                                                                                                           | Membangun ekowisata berbasis jasa lingkungan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung kawasan                                                |     |
|                                                                                                           | Mengembangkan kawasan pariwisata percandian Muaro Jambi, geopark Merangin dan geopark Kerinci sebagai destinasi wisata dunia                             |     |
|                                                                                                           | Mengembangkan kawasan Sentusa (Sengeti-Tungkal-Sabak)                                                                                                    |     |
|                                                                                                           | Penguatan industri halal, UMKM Halal, Ekspor Halal dan Ekosistem Halal (klaster industri dan produk halal; serta klaster bisnis dan kewirausahaan halal) |     |

| <b>VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT"</b> |                                                                                                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Misi</b>                                                                                                      | <b>Arah kebijakan</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Ket</b> |
|                                                                                                                  | Peremajaan sawit rakyat, karet rakyat dan kelapa dalam rakyat                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                  | Mendorong pengembangan komoditas perkebunan unggulan daerah                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                  | Pengadaan sarana prasarana pertanian serta bantuan bibit ternak bagi keluarga miskin                                                                                                                         |            |
|                                                                                                                  | Peningkatan produktivitas pertanian melalui praktek pertanian yang baik, pemberdayaan dan peningkatan kualitas produk                                                                                        |            |
|                                                                                                                  | Membangun database petani menurut komoditas yang diusahakan                                                                                                                                                  |            |
|                                                                                                                  | Meningkatkan SDM pertanian dan peningkatan penguasaan pemanfaatan teknologi tepat guna                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                  | Revitalisasi pertanian, peternakan dan perkebunan                                                                                                                                                            |            |
|                                                                                                                  | Fasilitasi percepatan pengembangan industri hilir CPO, karet dan kelapa dalam                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                  | Menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri hijau ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui dukungan fiskal maupun non fiskal                                                             |            |
|                                                                                                                  | Penetapan dan penerapan regulasi yang mendukung inovasi daerah                                                                                                                                               |            |
|                                                                                                                  | Penerapan budaya kerja inovatif kepada SDM Aparatur                                                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                  | Peningkatan alokasi anggaran riset dan inovasi daerah secara efektif dan efisien                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                  | Memberikan ruang kepada generasi muda untuk berinovasi                                                                                                                                                       |            |
|                                                                                                                  | Tata kelola SDM yang mengarah kreatif dan inovatif                                                                                                                                                           |            |
|                                                                                                                  | Mendorong peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkolaborasi dalam menghasilkan inovasi                                                                                                      |            |
| <b>Misi 3 :<br/>Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>                       | Perlindungan sosial yang integratif, adaptif dan inklusif melalui subsidi jaminan kesehatan melalui BPJS bagi masyarakat miskin serta BPJS ketenagakerjaan bagi masyarakat miskin ekstrim dan pekerja rentan |            |
|                                                                                                                  | Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Tenaga Kerja Rentan seperti Sopir Angkot, Ojek Online dan Pangkalan, Penarik becak dan Kusir Delman serta Seniman dan Budayawan                           |            |
|                                                                                                                  | Meningkatkan UMP yang seimbang antara pekerja dan dunia usaha                                                                                                                                                |            |
|                                                                                                                  | Mendorong perusahaan untuk melakukan upskilling dan re-skilling karyawan secara berkala                                                                                                                      |            |
|                                                                                                                  | Bedah rumah untuk masyarakat miskin                                                                                                                                                                          |            |

| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                      | Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ket |
|                                                                                                           | Bantuan bagi Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, dan Tuna Sosial                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan kualitas dan kelestarian sungai                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|                                                                                                           | Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Sub Daerah Aliran Sungai Batanghari Hulu dan Sub Daerah Aliran Sungai Batang Tebo, serta peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muara Enim, Formasi Air Benakat, dan Formasi Sinamar; |     |
|                                                                                                           | Merestorasi lahan-lahan yang terancam dan kritis                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                           | Pemulihan fungsi ekologis pada lahan gambut (pembasahan, rehabilitasi dan revegetasi), serta pengembangan ekonomi masyarakat lokal pada wilayah gambut secara terintegrasi                                                                                                                       |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air wilayah barat                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                           | Memanfaatkan lahan dengan teknologi ramah lingkungan                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                           | Mengembangkan kelembagaan rehabilitasi hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat setempat                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan penggunaan energi bersih ( <i>clean energy</i> ) melalui pengembangan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di perkotaan dan perdesaan                                                                                                                                             |     |
|                                                                                                           | Menerapkan <i>Good mining practices</i> pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)                                                                                                                                                                                                                   |     |
|                                                                                                           | Mendorong Geoheritage Kerinci-Sungai Penuh menjadi Geopark Nasional Kerinci-Sungai Penuh                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi percepatan pembangunan pusat logistik bencana Sumatera                                                                                                                                                                                                                                |     |
|                                                                                                           | Fasilitasi pengelolaan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) terpadu melalui pendampingan dan perbaikan kelembagaan                                                                                                                                                                               |     |
|                                                                                                           | Pengelolaan dan rehabilitasi mangrove, estuaria dan teluk                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                           | Pemberdayaan masyarakat pesisir                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
|                                                                                                           | Peningkatan produksi perikanan tangkap                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                           | Pemanfaatan ruang laut sesuai dengan RTRW                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                           | Peningkatan pengolahan hasil perikanan                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                           | Menggalakan program Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN)                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
|                                                                                                           | Bantuan Gizi bagi Ibu Hamil, Balita dan                                                                                                                                                                                                                                                          |     |



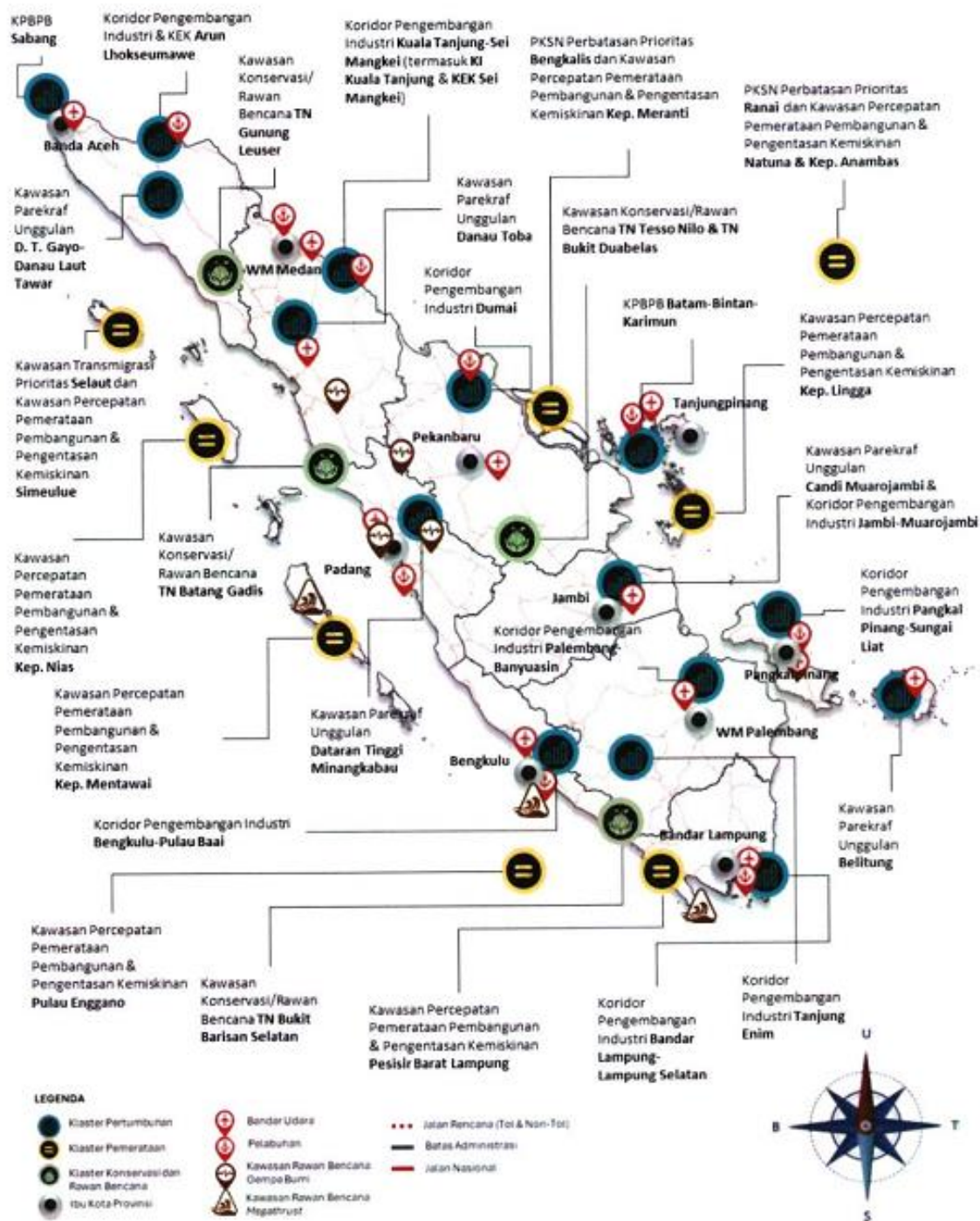
| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                      | Arah kebijakan                                                                                                                                  | Ket |
|                                                                                                           | Remaja                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                           | Menggalakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat                                                                                                      |     |
|                                                                                                           | Penguatan kapasitas dan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting                                                                                 |     |
|                                                                                                           | Penguatan kapasitas tim pembina dan kader Pos pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam melaksanakan 6 (enam) Standar Pelayanan Minimal                |     |
|                                                                                                           | Peningkatan cakupan air bersih dan sanitasi layak                                                                                               |     |
|                                                                                                           | Pemerataan kualitas layanan kesehatan                                                                                                           |     |
|                                                                                                           | Penerapan sanitasi total berbasis masyarakat                                                                                                    |     |
|                                                                                                           | Peningkatan kolaborasi penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan                                                                   |     |
|                                                                                                           | Sosialisasi dan advokasi Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif dalam rangka mendukung Wajib Belajar 13 Tahun |     |
|                                                                                                           | Bantuan Pendidikan bagi Siswa/i SMA/SMK/SLB Kurang Mampu dan Beasiswa S1 ,S2 dan S3 bagi Putra Putri Jambi Berprestasi dan Kurang Mampu         |     |
|                                                                                                           | Pendidikan Vokasi Secara Kemitraan dengan Lembaga/Dunia Usaha Baik Dalam dan Luar Negeri                                                        |     |
|                                                                                                           | Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)                                                                                   |     |
|                                                                                                           | Membentuk Desa BERSINAR (Desa Bersih Narkoba)                                                                                                   |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan kualitas dan kuantitas festival dan lomba budaya daerah                                                                            |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan peran lembaga adat daerah dalam melestarikan adat budaya daerah                                                                    |     |
|                                                                                                           | Pengembangan kurikulum muatan lokal sejarah Jambi dan hukum adat                                                                                |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan aksi afirmasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum,ketenagakerjaan, sosial, politik,lingkungan hidup dan ekonomi        |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)                                                                                            |     |
|                                                                                                           | Peningkatan Usaha ekonomi produktif bagi perempuan rawan sosial ekonomi                                                                         |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan peran pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga           |     |
|                                                                                                           | Meningkatkan gerakan masyarakat dan media anti pornografi dan pornoaksi                                                                         |     |





| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan<br>Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Misi                                                                                                         | Arah kebijakan                                                                                 | Ket |
|                                                                                                              | Meningkatkan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak                |     |
|                                                                                                              | Meningkatkan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan dan perumahan) |     |
|                                                                                                              | Fasilitasi pendirian Sekolah Rakyat                                                            |     |

3.4.1 Kebijakan Kewilayahan Provinsi Jambi



Sumber : RPJMN, 2025  
Gambar 3-1 Highlight Lokasi Prioritas Pembangunan 2025-2029 Wilayah Sumatera

Pembangunan kewilayahan nasional seperti yang tertuang pada RPJMN Tahun 2025-2029 diarahkan untuk terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia – Kawasan Timur Indonesia, yang diwujudkan melalui

pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Pada tahun 2025-2029, wilayah Sumatera diarahkan menjadi mata rantai utama biodiversity dan kemaritiman berdaya saing dan berkelanjutan dengan highlight lokasi prioritas pembangunan sebagaimana gambar di atas.



Sumber : RPJMN, 2025

Gambar 3-2 Peta Pengembangan Wilayah Provinsi Jambi pada RPJMN 2025-2029

Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memantapkan pertumbuhan pembangunan yang berkeadilan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, politik, serta budaya dengan mempertimbangkan



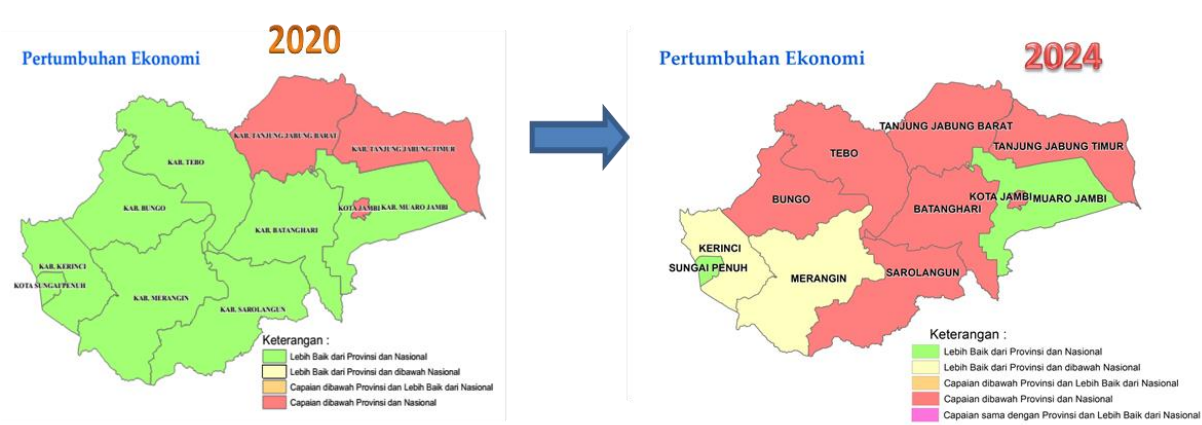
potensi dan keragaman daya dukung serta daya tampung lingkungan. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh masing-masing kabupaten/kota, perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-5      Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024

| KABUPATEN/KOTA       | PERTUMBUHAN EKONOMI |      |       |      |        |
|----------------------|---------------------|------|-------|------|--------|
|                      | 2020                | 2021 | 2022  | 2023 | 2024** |
| Kerinci              | 3,69                | 4,16 | 4,43  | 5,73 | 4,57   |
| Merangin             | 0,78                | 5,09 | 5,72  | 5,28 | 4,55   |
| Sarolangun           | -0,26               | 6,61 | 6,73  | 4,02 | 3,70   |
| Batang Hari          | -0,27               | 4,74 | 12,27 | 3,70 | 2,99   |
| Muaro Jambi          | 0,27                | 4,08 | 7,97  | 6,28 | 6,17   |
| Tanjung Jabung Timur | -3,87               | 0,13 | 0,57  | 2,17 | 4,73   |
| Tanjung Jabung Barat | -0,64               | 1,36 | 2,56  | 3,51 | 4,45   |
| Tebo                 | -0,04               | 4,32 | 6,30  | 4,50 | 3,97   |
| Bungo                | -0,40               | 5,12 | 4,73  | 4,66 | 3,30   |
| Kota Jambi           | -3,28               | 3,94 | 5,36  | 6,61 | 4,98   |
| Kota Sungai Penuh    | -0,14               | 3,67 | 4,45  | 4,92 | 5,10   |

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Bila dilihat dari data *time serries* pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota berfluktuatif, dan telah menunjukkan pemulihan ekonomi setelah Covid-19 Tahun 2020 yang lalu. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2024 adalah Kabupaten Muaro Jambi, diikuti oleh Kabupaten Kerinci dan Kota Jambi. Persebaran perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dengan Provinsi dan Nasional tahun 2020 dan 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3-3      Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan 2024

Gambar di atas memperlihatkan bahwa kecepatan pemulihan ekonomi di tiap wilayah tidak sama. Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun yang pertumbuhan ekonominya lebih baik dari Provinsi Jambi dan Nasional pada Tahun 2020, justru pertumbuhannya di bawah capaian Provinsi Jambi dan nasional pada Tahun 2024. Hal ini merupakan implikasi dari perlambatan pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang merupakan sektor unggulan kabupaten-kabupaten tersebut.

Bila dilihat dari kontribusi Kabupaten/kota terhadap PDRB Provinsi Jambi, yang memiliki kontribusi terbesar adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kontribusi dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut terutama berasal dari sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu dari sub kategori pertambangan migas yang menjadi unggulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, kontributor terbesar kedua adalah Kota Jambi yang merupakan Ibu Kota Provinsi, Sementara untuk kontributor terkecil adalah Kota Sungai Penuh, dengan kontribusi yang cenderung menurun sejak Tahun 2020.

Tabel 3-6      Perkembangan Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| KABUPATEN/KOTA       | KONTRIBUSI PDRB KAB/KOTA THD PDRB<br>PROVINSI JAMBI |       |       |       |       |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2020                                                | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Kerinci              | 5,03                                                | 4,84  | 4,43  | 4,59  | 4,64  |
| Merangin             | 7,55                                                | 7,67  | 7,36  | 7,71  | 8,02  |
| Sarolangun           | 6,98                                                | 7,13  | 7,53  | 7,36  | 7,15  |
| Batanghari           | 7,91                                                | 8,06  | 8,82  | 8,71  | 8,24  |
| Muaro Jambi          | 11,8                                                | 11,89 | 11,96 | 12,28 | 12,75 |
| Tanjung Jabung Timur | 9,39                                                | 9,38  | 9,29  | 8,58  | 8,60  |
| Tanjung Jabung Barat | 17,88                                               | 18,02 | 18,17 | 17,40 | 17,56 |
| Tebo                 | 7,1                                                 | 7,27  | 7,15  | 7,25  | 7,53  |
| Bungo                | 8,36                                                | 8,64  | 9,04  | 8,98  | 8,62  |
| Kota Jambi           | 14,35                                               | 13,68 | 13,11 | 13,89 | 13,66 |
| Kota Sungai Penuh    | 3,64                                                | 3,42  | 3,15  | 3,24  | 3,24  |

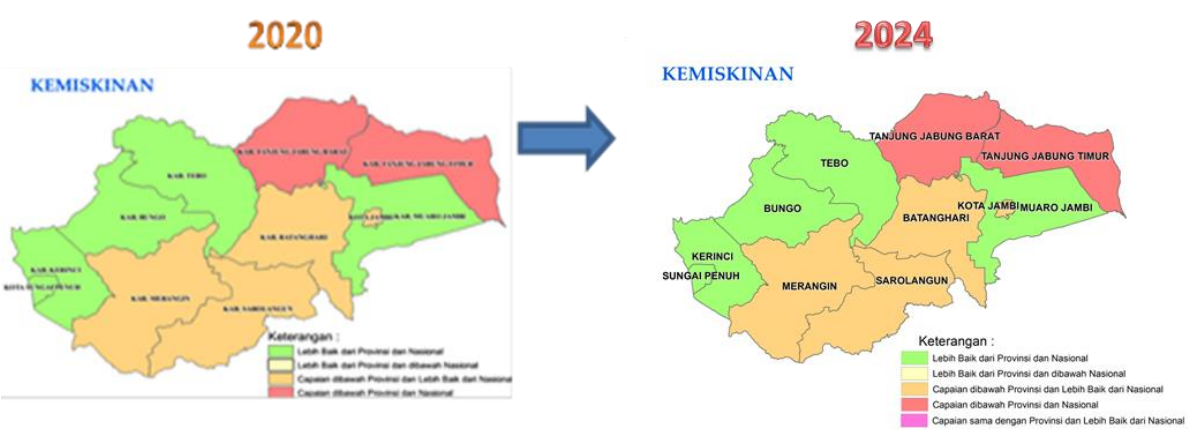
Sumber : Jambi Dalam angka 2025,2025

Tabel 3-7      Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| KABUPATEN/KOTA       | PERSENTASE PENDUDUK MISKIN |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2020                       | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Kerinci              | 7,30                       | 7,71  | 7,57  | 7,54  | 6,93  |
| Merangin             | 8,63                       | 9,11  | 8,70  | 8,90  | 8,40  |
| Sarolangun           | 8,42                       | 8,87  | 8,48  | 8,54  | 8,36  |
| Batang Hari          | 9,65                       | 10,05 | 9,63  | 9,45  | 8,63  |
| Muaro Jambi          | 3,83                       | 4,53  | 4,47  | 4,43  | 3,65  |
| Tanjung Jabung Timur | 10,95                      | 11,39 | 10,91 | 10,85 | 10,14 |
| Tanjung Jabung Barat | 10,29                      | 10,75 | 10,00 | 9,79  | 9,54  |
| Tebo                 | 6,26                       | 6,68  | 6,34  | 6,46  | 6,12  |
| Bungo                | 5,8                        | 6,23  | 5,38  | 5,29  | 5,06  |
| Kota Jambi           | 8,27                       | 9,02  | 8,33  | 8,24  | 7,73  |
| Kota Sungai Penuh    | 3,03                       | 3,41  | 2,97  | 3,00  | 2,92  |

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025

Bila dilihat dari persentase penduduk miskin kabupaten/kota dari tahun 2020 – 2024 pada tabel diatas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki persentase penduduk miskin yang paling besar, namun jika dilihat dari jumlah maka penduduk miskin terbanyak berada pada Kota Jambi, diikuti oleh Kabupaten Merangin dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk persentase penduduk miskin yang paling kecil adalah Kota Sungai Penuh yaitu sebesar 2,92 persen, dan persentase ini terus menunjukkan penurunan sejak meningkat pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19.



Gambar 3-4      Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024



Bila dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 11 Kabupaten/kota di Provinsi Jambi, pada tahun 2020 Kota Jambi memiliki TPT tertinggi disusul oleh Kabupaten Bungo. Kedua kabupaten/kota tersebut didominasi oleh sektor jasa, dimana dampak pandemi Covid-19 belum hilang sepenuhnya pada sektor ini. Namun demikian, pada dasarnya TPT pada kedua kabupaten/kota tersebut telah turun dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3-8      Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| KABUPATEN/KOTA       | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%) |       |      |      |      |
|----------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|
|                      | 2020                             | 2021  | 2022 | 2023 | 2024 |
| Kerinci              | 2,43                             | 2,32  | 2,63 | 2,48 | 2,51 |
| Merangin             | 4,86                             | 4,83  | 4,69 | 4,35 | 4,18 |
| Sarolangun           | 5,71                             | 5,52  | 5,22 | 5,09 | 5,03 |
| Batanghari           | 4,42                             | 4,26  | 3,53 | 3,85 | 4,49 |
| Muaro Jambi          | 5,43                             | 5,59  | 5,35 | 5,40 | 5,27 |
| Tanjung Jabung Timur | 1,41                             | 1,56  | 1,32 | 1,67 | 2,06 |
| Tanjung Jabung Barat | 2,16                             | 2,53  | 2,88 | 2,95 | 3,20 |
| Tebo                 | 2,95                             | 2,83  | 1,38 | 1,71 | 2,50 |
| Bungo                | 5,94                             | 5,86  | 5,50 | 5,23 | 4,67 |
| Kota Jambi           | 10,49                            | 10,66 | 8,95 | 8,27 | 7,38 |
| Kota Sungai Penuh    | 5,56                             | 3,00  | 2,49 | 3,80 | 4,30 |

Sumber : Jambi Dalam Angka 2025, 2025



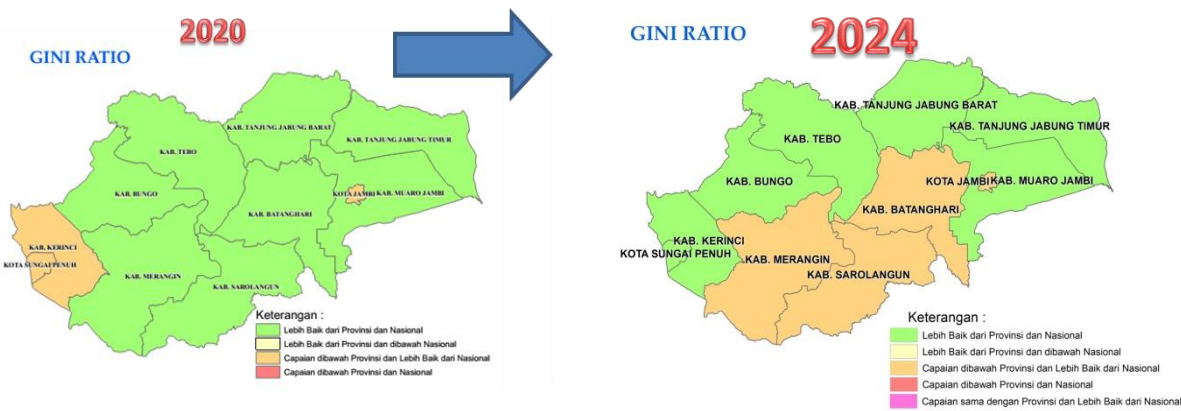
Gambar 3-5      Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Koefisien Gini (Gini Rasio) menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tabel 3-9      Perkembangan Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| KABUPATEN/KOTA       | GINI RASIO |      |      |      |       |
|----------------------|------------|------|------|------|-------|
|                      | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| Kerinci              | 0,28       | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,30  |
| Merangin             | 0,32       | 0,29 | 0,35 | 0,36 | 0,36  |
| Sarolangun           | 0,31       | 0,32 | 0,30 | 0,38 | 0,38  |
| Batanghari           | 0,32       | 0,31 | 0,29 | 0,36 | 0,36  |
| Muaro Jambi          | 0,28       | 0,32 | 0,27 | 0,34 | 0,34  |
| Tanjung Jabung Timur | 0,25       | 0,25 | 0,27 | 0,31 | 0,31  |
| Tanjung Jabung Barat | 0,28       | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,32  |
| Tebo                 | 0,30       | 0,30 | 0,30 | 0,24 | 0,24  |
| Bungo                | 0,31       | 0,30 | 0,32 | 0,28 | 0,28  |
| Kota Jambi           | 0,34       | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,37  |
| Kota Sungai Penuh    | 0,31       | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,31  |

Sumber : BPS, 2025  
Ket: \* data terakhir 2023



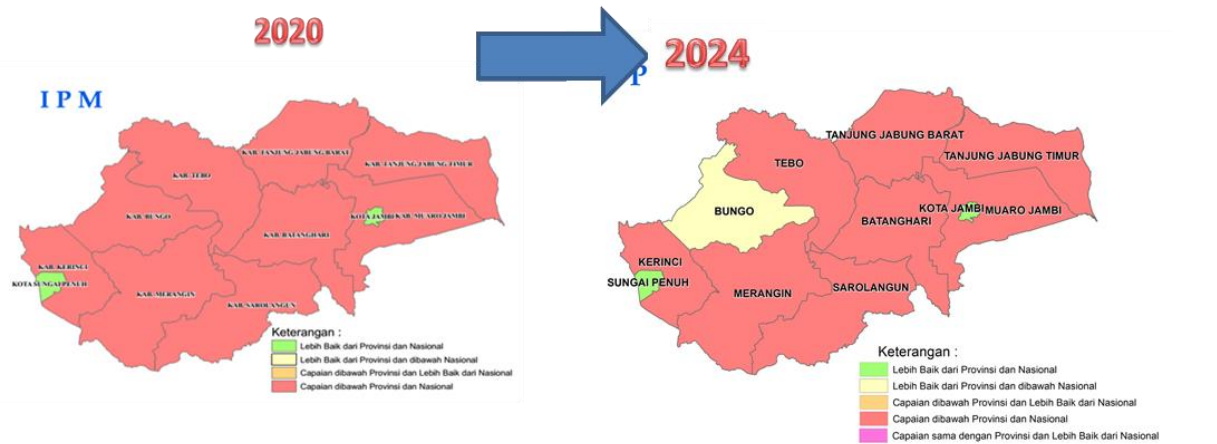
Gambar 3-6      Rasio Gini Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024

Perkembangan Gini Rasio di setiap kabupaten/kota masih terjaga pada angka yang relatif rendah, terutama Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo. Rata-rata Gini Ratio Kabupaten/ kota menunjukkan peningkatan yang berarti ketimpangan pendapatan yang semakin lebar, kecuali kedua kabupaten tersebut.

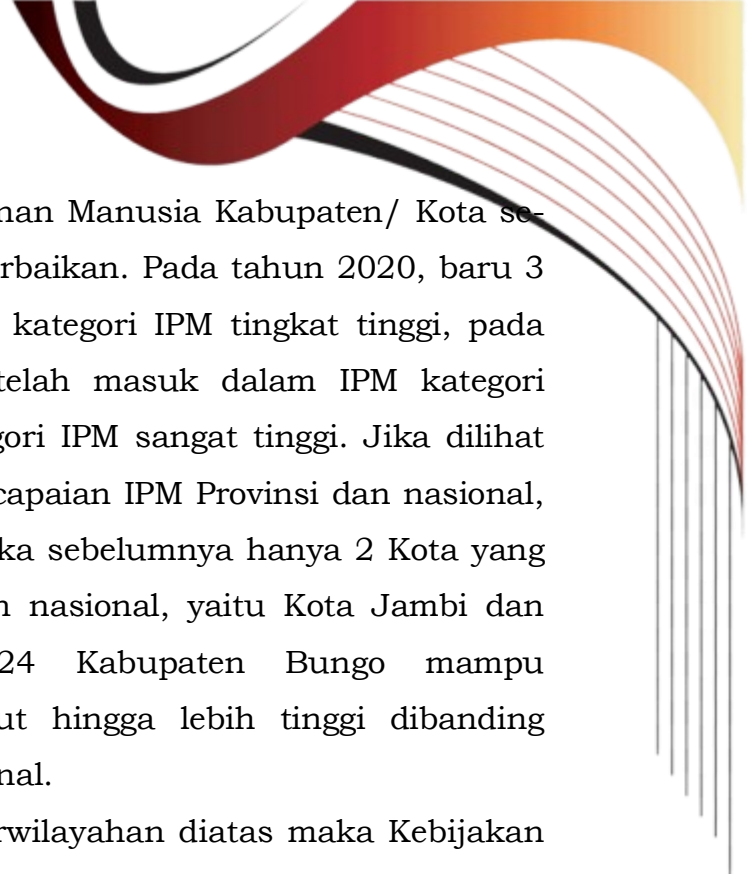
Tabel 3-10    Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Jambi Tahun 2020-2024

| KABUPATEN/KOTA       | INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA |       |       |       |       |
|----------------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                      | 2020                       | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| Kerinci              | 71,21                      | 71,45 | 71,99 | 73,77 | 74,33 |
| Merangin             | 69,19                      | 69,53 | 69,98 | 71,81 | 72,65 |
| Sarolangun           | 69,86                      | 70,25 | 70,89 | 73,05 | 73,76 |
| Batanghari           | 69,84                      | 70,11 | 70,51 | 72,50 | 73,12 |
| Muaro Jambi          | 69,18                      | 69,55 | 70,18 | 72,26 | 73,11 |
| Tanjung Jabung Timur | 64,43                      | 64,91 | 65,77 | 69,85 | 70,77 |
| Tanjung Jabung Barat | 67,54                      | 68,16 | 68,79 | 71,44 | 72,01 |
| Tebo                 | 69,14                      | 69,35 | 69,78 | 71,99 | 72,67 |
| Bungo                | 69,92                      | 70,15 | 70,55 | 73,57 | 74,44 |
| Kota Jambi           | 78,37                      | 79,12 | 79,58 | 80,93 | 81,77 |
| Kota Sungai Penuh    | 75,42                      | 75,70 | 76,17 | 77,20 | 77,93 |

Sumber : BPS Provinsi Jambi 2025,2025



Gambar 3-7    IPM Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi dibanding Provinsi Jambi dan Nasional Tahun 2020 dan Tahun 2024



Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota se- Provinsi Jambi terus memperlihatkan perbaikan. Pada tahun 2020, baru 3 kabupaten/ kota yang termasuk dalam kategori IPM tingkat tinggi, pada tahun 2024 seluruh kabupaten/kota telah masuk dalam IPM kategori tinggi, bahkan Kota Jambi masuk kategori IPM sangat tinggi. Jika dilihat secara spasial dengan membandingkan capaian IPM Provinsi dan nasional, terdapat perubahan dari tahun 2020. Jika sebelumnya hanya 2 Kota yang capaiannya lebih baik dari provinsi dan nasional, yaitu Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh, maka pada 2024 Kabupaten Bungo mampu mengakselerasi IPM Kabupaten tersebut hingga lebih tinggi dibanding provinsi walaupun masih di bawah nasional.

Berdasarkan beberapa kondisi perwilayahan diatas maka Kebijakan pembangunan Provinsi Jambi difokuskan kepada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan turunan dari kebijakan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan keunggulan daerah dan kearifan lokal masyarakat Provinsi Jambi. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Jambi diprioritaskan pada sinergitas antara kebijakan nasional dan Provinsi Jambi dengan lebih mengutamakan penanganan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis daerah. Kemudian, **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi 2025 – 2045** juga menjadi rujukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkeadilan dengan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi dan keberpihakan kepada daerah tertinggal dan penduduk miskin. Disamping itu, juga dilakukan upaya meningkatkan pelayanan sosial ekonomi dan kesetaraan gender bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Provinsi Jambi, RPJMD ini juga mengarahkan pada pertumbuhan hijau dan biru dimana perekonomian tumbuh namun tidak menimbulkan degradasi lingkungan yang tinggi. Untuk itu, dalam menyelenggarakan pembangunan daerah di Provinsi Jambi tahun 2025-2029 akan diprioritaskan pada :

1. Reformasi birokrasi
2. Digitalisasi pelayanan publik

3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah
4. Pengembangan Kawasan dan Infrastruktur Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, (Kawasan Ujung Jabung, KCBN Muara Jambi, KSPN Danau Kerinci dan Geopark Merangin)
5. Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi
6. Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah
7. Pengembangan Wilayah Strategis SENTUSA (Sengeti – Tungkal -Sabak) sebagai Kawasan Cepat Tumbuh
8. Fasilitasi Percepatan Ketahanan Energi Mendukung Kawasan Strategis
9. Percepatan Pengembangan sistem logistik transportasi daerah (Percepatan Jalan Khusus Batu Bara, Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma Jambi-Batang Hari-Kota Jambi} dan Jalan Layang Simpang 4 Pal X)
10. Penguatan Sistem Kesehatan Primer dan Peningkatan Kualitas Pendidikan
11. PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)
12. Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission



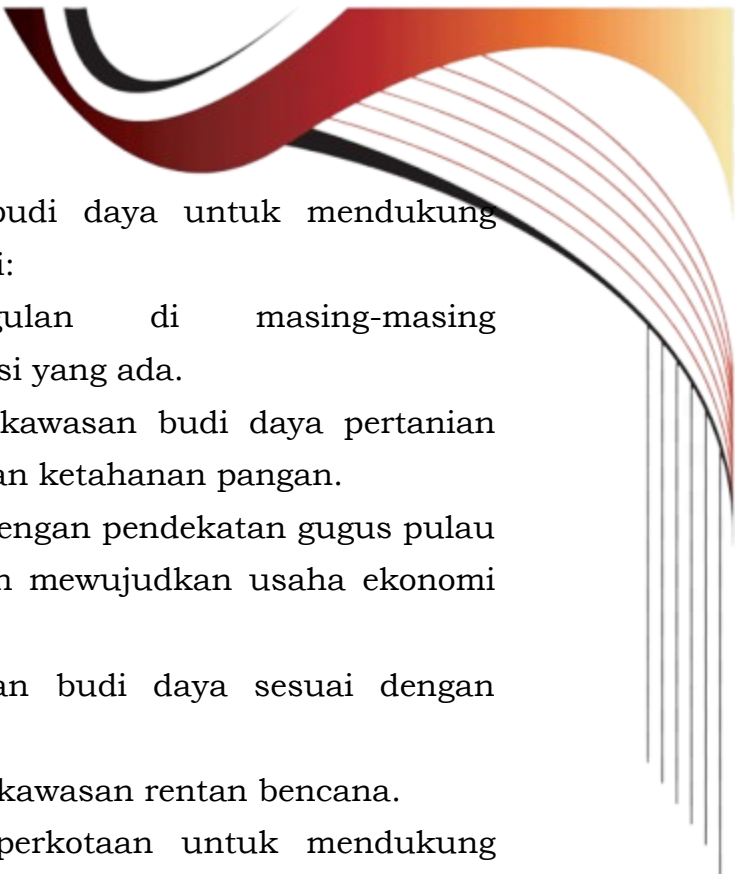
Gambar 3-8 Penahapan Pembangunan

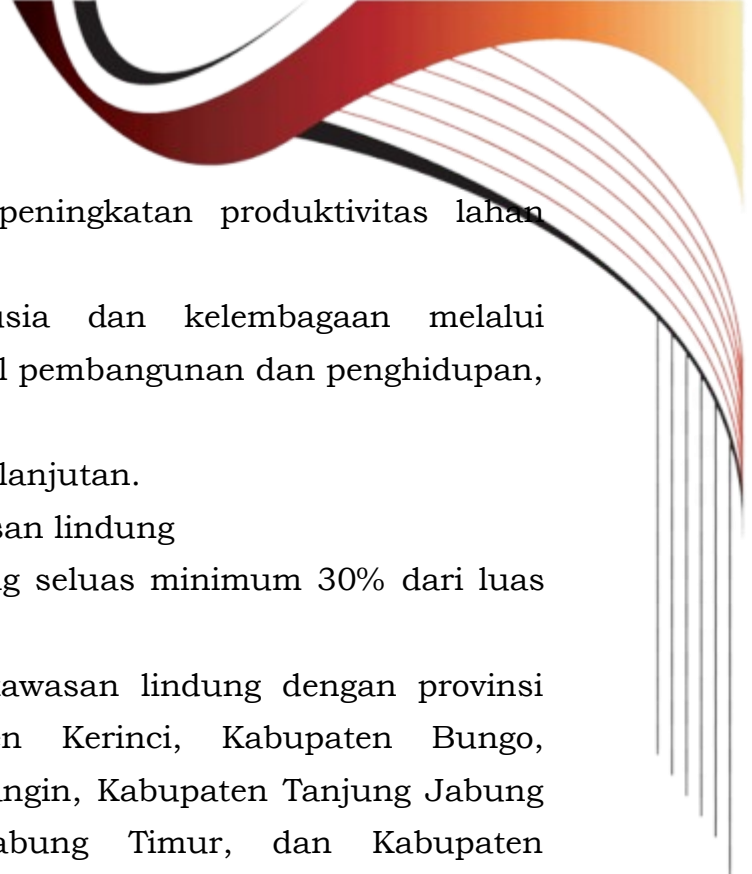


Selain itu, pembangunan di Provinsi Jambi juga diarahkan sesuai dengan potensi dan fungsi ruangnya. Oleh karena itu, sebagaimana telah diarahkan dalam **RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jambi** yang dituangkan dalam kajian spasial, meliputi:

- 1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur Provinsi Jambi, melalui:
  - a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan pengembangan kawasan ekonomi melalui konektivitas antar wilayah dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.
  - b. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
  - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi.
  - d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah Barat, Tengah dan Timur melalui pengolahan produk perkebunan, pertambangan dan perikanan.
- 2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, melalui:
  - a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
  - b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan pertanian dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
  - c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
  - meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
  - meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.



- 
- 3 Optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, melalui:
    - a. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
    - b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
    - c. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
    - d. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
    - e. Pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana.
  - 4 Pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui:
    - a. Pemantapan PKN Kawasan Perkotaan Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
    - b. Pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Muara Bulian, dan Perkotaan Muara Sabak sesuai arahan RTRWN.
    - c. Pemantapan PKL yang terdiri dari Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Siulak, Perkotaan Batang Sangir, Perkotaan Sanggaran Agung, Perkotaan Bangko, Perkotaan Sungai Manau, Perkotaan Pasar Masurai, Perkotaan Rantau Panjang, Perkotaan Pasar Pamenang, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Wirotho Agung, Perkotaan Sungai Bengkal, Perkotaan Sengeti, Perkotaan Pijoan, Perkotaan Sebapo, Perkotaan Marga, Perkotaan Sungai Gelam, Perkotaan Pauh, Perkotaan Pekan Gedang, Perkotaan Singkut, Perkotaan Rantau Kelayang, Perkotaan Embacang Gedang, Perkotaan Tuo Limbur, Perkotaan Rantau Ikil, Perkotaan Simpang Sungai Rengas, Perkotaan Muara Tembesi, Perkotaan Muara Jangga, Perkotaan Merlung, Perkotaan Tebing Tinggi, Perkotaan Serdang Jaya, Perkotaan Mendahara, Perkotaan Nipah Panjang, dan Perkotaan Pandan Jaya.
  - 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, melalui:

- 
- a. Penatagunaan, pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan.
  - b. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta pemanfaatan jasa lingkungan.
  - c. Konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan lindung
  - e. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah daerah.
  - f. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
  - g. Menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca.
- 6 Peningkatan kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, melalui:
- a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah daerah
  - b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun
  - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/ Tentara Nasional Indonesia

Arahan pengembangan wilayah untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, yang didasarkan pertimbangan sektor andalan, sektor potensial/unggulan dan kendala pengembangan yang ada maka di arahkan sebagai berikut :

- 1 Kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo mempunyai peranan dan fungsi untuk perkebunan; peternakan dan

- perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
- 2 Kabupaten Batanghari mempunyai peranan dan fungsi untuk perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pertanian; pariwisata; pertambangan dan kawasan konservasi.
  - 3 Kabupaten Muaro Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk penyangga ibukota Provinsi; perdagangan dan jasa regional; industri pengolahan; perkebunan; peternakan dan perikanan; pariwisata; pertambangan dan perumahan skala besar.
  - 4 Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan.
  - 5 Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai peranan dan fungsi untuk Perdagangan dan jasa regional; Industri pengolahan ; Perkebunan; Peternakan dan perikanan; Pertanian; Pertambangan; Pelabuhan laut; Perikanan dan kelautan; dan kawasan konservasi.
  - 6 Kota Sungai Penuh mempunyai peranan dan fungsi untuk Pelayanan Pariwisata; Pendidikan; dan kawasan konservasi.
  - 7 Kota Jambi mempunyai peranan dan fungsi untuk Pemerintahan Provinsi; Perdagangan dan jasa regional; pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa; Industri; transportasi; pendidikan tinggi; dan perumahan skala besar.

Berdasarkan arahan pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029, RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045, serta dokumen perencanaan sektoral lainnya, maka highlight kebijakan kewilayahan beserta lokasi prioritas pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

| Lokasi<br>Prioritas                 | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                |                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Pusat                                                                                                        | Provinsi                                                                  |
| Kawasan Perkotaan Jambi dan Kawasan | - Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jambi,antara lain melalui:<br>• Penyusunan masterplan penataan | - Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jambi, antara lain melalui: |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                                                                                          | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pariwisata dan<br>Ekonomi Kreatif<br>Unggulan Candi<br>Muaro Jambi<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Jambi</li> <li>Kab. Muaro Jambi</li> </ul> | kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau</li> <li>Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan</li> <li>Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Jambi (PHTC)</li> <li>Pengembangan SPAM Regional Jambi</li> <li>Pembangunan jalan tol Betung-Tempino-Jambi</li> <li>Peningkatan 6A pada kawasan pariwisata Candi Muaro Jambi (Revitalisasi kawasan purbakala Situs Percandian Muaro Jambi dan Peningkatan Jalan Nasional akses Situs Percandian Muaro Jambi</li> <li>Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/kota, khususnya pada RSUD Raden Mattaher (PHTC)</li> <li>Preservasi jalan ruas Jambi-Sengeti-Kuala Tungkal, Jambi-Muarabulian, dan Jambi-Muara Sabak</li> <li>Peningkatan ketahanan banjir perkotaan Jambi</li> <li>Pengembangan koridor industri rintisan Jambi-Muaro Jambi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kolaborasi pengendalian banjir di Kota Jambi</li> <li>Kolaborasi optimalisasi potensi Danau Sipin</li> <li>Penyediaan Ruang Terbuka Hijau</li> <li>Penataan Permukiman kumuh terpadu</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan peran RSUD Rd. Mattaher sebagai RS layanan prioritas utama untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkulosis, diabetes melitus, dan penyakit infeksi emerging; serta layanan prioritas madya untuk gastroenterologi.</li> <li>Penguatan peran RS. Jiwa Kolonel Inf. H.M. Syukur sebagai rumah sakit layanan prioritas utama untuk kesehatan jiwa.</li> <li>Mendorong RSUD H. Abdul Manaf sebagai rumah sakit layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, dan penyakit infeksi emerging.</li> <li>Bedah rumah (Pro Jambi)</li> <li>Preservasi Jalan Lingkar</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hilirisasi sawit, terutama untuk produk-produk hilirisasi dasar kelapa, yaitu VCO, tepung kelapa, dan arang tempurung, serta produk hilirisasi lanjutan kelapa krimer nabati, santan instan dan karbon aktif</li> <li>- Hilirisasi lanjutan batubara, terutama untuk produk-produk yang mendukung industri lainnya seperti briket, kokas, karbon aktif, syngas, metanol, DME</li> <li>- Penguatan pendidikan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/pengembangan/peningkatan Balai Latihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Perkotaan Jambi dan Jalan Perkotaan Jambi</li> <li>- Pembangunan Fly Over Tugu Juang, Mayang</li> <li>- Fasilitas Pengembangan Ring Road Baru {Majeneke-Jambi-Batang Hari-Kota Jambi}</li> <li>- Fasilitas pembangunan Jalan Layang Simpang 4 Pal X</li> <li>- Pembangunan Griya UMKM terpadu</li> <li>- Rehabilitasi GOR Kota Baru</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat pada Kawasan Candi Muaro Jambi</li> <li>- Memperkuat pengembangan Desa Wisata di Kawasan candi Muaro Jambi</li> <li>- Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM</li> <li>- Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, klaster keuangan sosial syariah, klaster infrastruktur ekosistem syariah.</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas                                  | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kawasan<br>Perkotaan<br>Bangko<br>• Kab.<br>Merangin | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bangko, antara lain melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu</li> <li>▪ Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau</li> <li>▪ Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan</li> <li>▪ Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan SPAM Perkotaan Bangko</li> <li>- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/kota, khususnya pada RSUD Kolonel Abundjani (PHTC)</li> <li>- Preservasi jalan ruas Bangko-Muara Bungo-Muaratebo, Bangko-Sarolangun-Rupit, Bangko-Sungai Penuh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas jalan Provinsi pada kawasan Perkotaan Bangko</li> <li>- Fasilitasi pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah regional</li> <li>- Fasilitasi Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan menengah/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan</li> <li>- Fasilitasi penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan sesuai kewenangan</li> <li>- Mendorong penguatan peran RSUD Kolonel Abundjani Bangko sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkolosis, dan kesehatan jiwa.</li> <li>- Bedah rumah (Pro</li> </ul> |



| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                               | Jambi)<br><ul style="list-style-type: none"><li>- Perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air</li><li>- Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan</li><li>- Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, dan klaster keuangan sosial syariah</li></ul> |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                                         | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kawasan<br>Perkotaan<br>Sungai Penuh<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Kota Sungai Penuh</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Sungai Penuh, antara lain melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu</li> <li>• Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau</li> <li>• Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan</li> <li>• Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan</li> </ul> </li> <li>- Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Sungai Penuh (PHTC)</li> <li>- Pengembangan SPAM Regional Sungai Penuh-Kerinci</li> <li>- Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/kota, khususnya pada RSUD Mayjen H.A. Thalib (PHTC)</li> <li>- Pengembangan kota agropolitan Sungai Penuh</li> <li>- Preservasi jalan ruas Sungai Penuh-Padang Aro, Sungai Penuh-Bangko, Sungai Penuh-Tapan-Muko muko</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan pembangunan TPA Regional Sungai Penuh-Kerinci</li> <li>- Peningkatan kualitas jalan kewenangan Provinsi di wilayah Kota Sei. Penuh</li> <li>- Kolaborasi pengendalian banjir</li> <li>- Bedah rumah (Pro Jambi)</li> <li>- Penataan permukiman kumuh terpadu</li> <li>- Fasilitasi Geoheritage Kerinci-Sungai Penuh menjadi Geopark Nasional Kerinci-Sungai Penuh</li> <li>- Perlindungan pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan resapan air</li> <li>- Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan</li> <li>- Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, dan klaster keuangan sosial syariah</li> </ul> |
| Kawasan<br>Perkotaan                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Muara Bungo, antara lain</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kualitas jalan kewenangan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Lokasi<br>Prioritas                                          | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Muara Bungo                                                  | melalui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Provinsi di wilayah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Bungo</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu</li> <li>Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau</li> <li>Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan</li> <li>Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Bungo</li> <li>Mendorong penguatan peran RSUD H. Hanafie sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, diabetes melitus, dan penyakit infeksi emerging dan kesehatan jiwa.</li> <li>Bedah rumah (Pro Jambi)</li> <li>Penataan permukiman kumuh terpadu</li> <li>Digitalisasi pemasaran produk-produk UMKM dan fasilitasi akses perbankan</li> <li>Pengembangan klaster industri dan produk halal, klaster bisnis dan kewirausahaan halal, klaster jasa keuangan syariah, klaster keuangan sosial syariah, klaster infrastruktur ekosistem syariah.</li> </ul> |
| Kawasan<br>Pertumbuhan                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong Kabupaten untuk melakukan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Lokasi<br>Prioritas                  | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Pusat                                         | Provinsi                                                                        |
| Baru SENTUSA                         |                                               | percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan prioritas:       |
| - Kab. Ma<br>Jambi                   |                                               | - RTRW Kab. Ma. Jambi                                                           |
| - Kab.<br>Tanjung<br>Jabung<br>Barat |                                               | - RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur                                                |
| - Kab.<br>Tanjung<br>Jabung<br>Timur |                                               | - RDTR Muara Sabak                                                              |
|                                      |                                               | - RDTR Kawasan Pelabuhan Ujung Jabung                                           |
|                                      |                                               | - RDTR Kawasan Nipah Panjang                                                    |
|                                      |                                               | - RDTR Tungkal Ilir                                                             |
|                                      |                                               | - RDTR Perkotaan Merlung                                                        |
|                                      |                                               | - RDTR Perkotaan Muara Papalik                                                  |
|                                      |                                               | - RDTR Perkotaan Sengeti                                                        |
|                                      |                                               | Pengembangan konektivitas baru:                                                 |
|                                      |                                               | - Rehabilitasi jalan Ds Simpang/Berbak-simp. Jembatan Muara Sabak               |
|                                      |                                               | - Peningkatan jalan Parit 10 Senyerang Simp.3 Tebing tInggi-Simpang Kuala Dasal |
|                                      |                                               | - Peningkatan jalan Berbak-Ujung Jabung                                         |
|                                      |                                               | - Peningkatan Produktivitas komoditi tanaman pangan                             |
|                                      |                                               | • Pengendalian pemanfaatan ruang KP2B                                           |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</li> <li>• Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</li> <li>• Pengelolaan Sumberdaya Air</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan produktivitas komoditi perkebunan kelapa dan pinang: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan</li> <li>- Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan pabrik es batu</li> <li>- Pemberdayaan UMKM dan pengembangan UKM</li> <li>- Pengembangan iklim penanaman modal</li> <li>- Pengembangan pariwisata Candi Muaro Jambi (WPP Maro Sebo-Taman Rajo)</li> <li>- Pemenuhan standar akreditasi SMK jurusan kelautan dan perkapalan</li> <li>- Percepatan Pelabuhan Ujung Jabung</li> <li>- Mendorong penguatan peran RSUD Ahmad Ripin</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                                                                                                     | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                         |                                               | <p>sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkolosis, penyakit infeksi emerging, dan kesehatan jiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong Penguatan peran RSUD KH. Daud Arif sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kesehatan ibu dan anak, tuberkolosis, dan kesehatan jiwa</li> <li>- Mendorong penguatan peran RSUD Nurdin Hamzah sebagai RS layanan prioritas madya untuk layanan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu dan anak</li> </ul> |
| <p>Kawasan swasembada pangan Wilayah Tengah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Batang Hari</li> <li>- Kab. Muaro Jambi</li> <li>- Kab. Bungo</li> </ul> |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi: D.I Batang Uleh</li> <li>- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)</li> <li>- Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Kab. Tebo         |                                               | <p>pengembangan kawasan peternakan)</p> <p>- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura</p> <p>- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura</p> <p>- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/ pestisida/pakan organik</p> <p>- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/ pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan;</p> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |                                               | <p>peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen</p> <p>- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/ gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama</p> <p>- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya</p> |

| Lokasi<br>Prioritas                      | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provinsi                                                                                          |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.                                                  |
| Kawasan Swasembada Pangan Tanjung Jabung | - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I.R Parit Pudir, D.I.R Pematang Lumut                                                                                                                                                                             | - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, yaitu pada: |
| • Kab. Tanjung Jabung Barat              | - Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                                                                                      | ▪ D.I Sei Suban                                                                                   |
| • Kab. Tanjung Jabung Timur              | - Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)                                                                                                                                                                                                                                                           | ▪ D.I.R Sungai Ayam                                                                               |
|                                          | - Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)                                                                                                                                                                                                                   | ▪ D.I.R Senyerang                                                                                 |
|                                          | - Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura                                                                                                                                                                                                                                                         | ▪ D.I.R Teluk Ketapang                                                                            |
|                                          | - Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura                                                                                                                                                                       | ▪ D.I.R Teluk Nilau                                                                               |
|                                          | - Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik | ▪ D.I.R Koto Kandis                                                                               |
|                                          | - Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur                                | ▪ D.I.R Nipah Panjang I-II                                                                        |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▪ D.I.R Rantau Rasau                                                                              |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▪ D.I.R Simpang Datuk                                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▪ D.I.R Simpang Puding                                                                            |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ▪ D.I.R. Sei Raya                                                                                 |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Peningkatan Produktivitas komoditi tanaman pangan :                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Pengendalian pemanfaatan ruang KP2B                                                             |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan                         |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian                                                    |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Provinsi                                                                                                                                                                                                                       |
|                     | <p>konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen</p> <p>- Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama</p> <p>- Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian</p> <p>- Pembangunan Jembatan Sungai Rambut</p> | <p>- Pengelolaan Sumberdaya Air</p> <p>- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak</p> |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                                                                                                                             | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kawasan swasembada air dan energi :<br>• Kab. Tanjung Jabung Barat<br>• Kab. Ma. Jambi<br>• Kab. Batang Hari<br>• Kab. Bungo<br>• Kab. Tebo<br>• Kab. Sarolangun<br>• Kab. Tanjung Jabung Timur | - Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Batanghari, terutama ada sub-DAS Batanghari Hulu dan Sub-Das batang Tebo<br>- Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muaraenim, Formasi Air Benakat dan Formasi Sinamar<br>- Pengembangan gasifikasi batubara<br>- Pembangunan PLTU Mulut Tambang<br>- Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Aurduri-Muara Enim- Bukit Asam<br>- Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 500 kV Aurduri-PLTU MT Jambi 1 dan 2<br>- Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Bangko-PLTU MT Jambi 1 dan 2<br>- Perencanaan dan persiapan pembangunan jalur kereta api logistik Sarolangun, Muaratembesi-Muarabulian-Jambi-Muara Sabak<br>- Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak | - Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan<br>- Fasilitasi Pengembangan gasifikasi batubara<br>- Mendorong Pembangunan PLTU Mulut Tambang<br>- Mendorong percepatan pembangunan jalur kereta api logistik Sarolangun, Muaratembesi – Muarabulian – Jambi – Muara Sabak |
| Kawasan swasembada pangan, air dan energi Bukit Barisan Tengah<br>• Kab. Kerinci<br>• Kab, Merangin<br>• Kota Sei Penuh                                                                         | - Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada catchment area WS Batanghari, terutama ada sub-DAS Batang Merangin - Tembesi<br>- Peningkatan cadangan dan produktivitas batubara pada Formasi Muaraenim, Formasi Air Benakat dan Formasi Sinamar<br>- Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Kerinci dan Sub-Das Batang Merangin-Tembesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - Konservasi Sumberdaya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan<br>- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi: D.I Tanduk<br>- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)<br>- Peningkatan produktivitas peternakan/pangan                                                  |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revitalisasi Danau Kerinci</li> <li>- Pembangunan Bendungan Merangin dan PLTA Bendungan Merangin</li> <li>- Pembangunan infrastruktur PLTA Merangin</li> <li>- Pembangunan infrastruktur PLTP Sungai Penuh</li> <li>- Pembangunan PLTS apung Danau Kerinci</li> <li>- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Sei Batang Sangkir dan D.I Sei. Siulak Deras</li> <li>- Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah</li> <li>- Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)</li> <li>- Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura</li> <li>- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik</li> <li>- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)</li> <li>- Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan dan hortikultura</li> <li>- Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik</li> <li>- Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan</li> </ul> |



| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     | produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen                                                                                                                                                                                                                                | perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen                                                                                                                                                                              |
|                     | - Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses layanan resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama | - Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dan pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen poktan/gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan korporasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asuransi usaha tani; peningkatan infrastruktur logistik dan perluasan akses |
|                     | - Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                  | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | layanan resi gudang;<br>pengelolaan dan<br>pengendalian<br>penyerapan hasil panen<br>komoditas pangan<br>utama<br>- Penguatan ekosistem<br>dan lansekap ekonomi<br>hijau, antara lain<br>perdagangan karbon,<br>offsetting, dan pajak<br>karbon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kawasan<br>Komoditas<br>Unggulan<br>Sawit, pinang<br>dan Kelapa<br>Tanjung<br>Jabung | - Peningkatan produktivitas perkebunan<br>dan kualitas produksi (sawit dan kelapa)<br>- Pengembangan dan perlindungan<br>kawasan pertanian komoditas prioritas<br>industri (sawit dan kelapa)<br>- Penyediaan sarana dan prasarana<br>pendukung produksi pertanian (sawit<br>dan kelapa) | - Peningkatan produktivitas<br>perkebunan dan kualitas<br>produksi (sawit, pinang<br>dan kelapa)<br>- Pengembangan dan<br>perlindungan kawasan<br>pertanian komoditas<br>prioritas industri (sawit,<br>pinang dan kelapa)<br>- Penyediaan sarana dan<br>prasarana pendukung<br>produksi pertanian (sawit,<br>pinang dan kelapa)<br>- Pengendalian OPT dan DPI<br>pada komoditas produksi<br>industri (sawit dan kelapa)<br>- Pembangunan dan<br>pengelolaan tampungan<br>air, serta penyediaan air<br>berkelanjutan untuk<br>pertanian sawit dan kelapa |
| • Kab.<br>Tanjung<br>Jabung<br>Barat<br>• Kab.<br>Tanjung<br>Jabung<br>Timur         | - Pengendalian OPT dan DPI pada<br>komoditas produksi industri (sawit dan<br>kelapa)<br>- Pembangunan dan pengelolaan<br>tampungan air, serta penyediaan air<br>berkelanjutan untuk pertanian sawit<br>dan kelapa                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kawasan<br>Komoditas<br>Unggulan Sawit                                               | - Peningkatan produktivitas perkebunan<br>dan kualitas produksi (sawit dan karet)<br>- Pengembangan dan perlindungan                                                                                                                                                                     | - Peremajaan sawit<br>rakyat dan karet<br>rakyat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                                                                               | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| dan Karet<br>Cekungan<br>Batanghari<br>• Kab. Ma.<br>Jambi<br>• Kab. Bungo<br>• Kab. Tebo<br>• Kab. Batang<br>Hari<br>Serta Kabupaten<br>Merangin | <p>kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet)</p> <p>- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet)</p> <p>- Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet)</p> <p>- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet</p> <p>- Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura</p> | <p>- Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit dan karet)</p> <p>- Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (sawit dan karet)</p> <p>- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit dan karet)</p> <p>- Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit dan karet)</p> <p>- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit dan karet</p> <p>- Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri dan silvopastura</p> <p>- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</p> |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                                           | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                      |                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | Pusat                                                                                                              | Provinsi                                                                                                                |
|                                                                                                               |                                                                                                                    | - Pembangunan/ peningkatan Ruas Jalan Betung Bedarah – Pintas – Tebo/Bungo                                              |
| Kawasan Konservasi dan rawan Bencana TN Bukit dua belas, TN Bukit Tiga Puluh, TN Berbak dan TN Kerinci Seblat | - Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi                    | - Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi                                  |
| • TN Bukit Dua Belas: Kab. Batang Hari dan Kab. Tebo                                                          | - Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan                                       | - Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumberdaya genetik      |
| • TN Bukit Tiga Puluh: Kab. Tebo, Kab. Tanjung Jabung Barat                                                   | - Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi                             | - Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri                                                             |
| • TN Berbak: Kab. Tanjung Jabung Timur dan Kab. Muaro Jambi                                                   | - Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumberdaya genetik | - Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi                                                                             |
| • TN kerinci Seblat: Kab. Kerinci, Kab. Bungo, Kab. Merangin, dan Kota                                        | - Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri                                                        | - Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana                                                                    |
|                                                                                                               | - Perlindungan dan pengamanan hutan                                                                                | - Mendorong percepatan jalur evakuasi bencana melalui TNKS (Kerinci – Bungo dan Kerinci-Merangin)                       |
|                                                                                                               | - Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi                                                                        | - Mendorong Kab. Bungo sebagai pusat logistik kebencanaan Sumatera                                                      |
|                                                                                                               | - Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana                                           | - Pengembangan kawasan perdesaan Mina-Agro-Wisata Kabupaten Tebo dan Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi |
|                                                                                                               | - Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana                                                               |                                                                                                                         |
|                                                                                                               | - Pengembangan kawasan perdesaan mina-agro-wisata VII Koto Ilir (Kab. Tebo)                                        |                                                                                                                         |

| Lokasi<br>Prioritas          | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                    |
| Sungai penuh                 |                                               |                                                                                                             |
| Kawasan Pariwisata Unggulan: | -                                             | -                                                                                                           |
| • Kab. Kerinci,              |                                               | Pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata dengan menerapkan SAPTA PESONA                             |
| • Kota Sei.Penuh             |                                               | - Memperkuat pengembangan Desa Wisata                                                                       |
| • Kab. Merangin              |                                               | - Pengembangan kawasan Geopark Merangin menjadi destinasi wisata dunia                                      |
| • Kab. Muaro Jambi           |                                               | - Fasilitasi Geoheritage Kerinci-Sungai Penuh menjadi Geopark Nasional Kerinci-Sungai Penuh                 |
|                              |                                               | - Peningkatan sarana prasarana (akomodasi, transportasi, <i>travel pattern</i> )                            |
|                              |                                               | - Memperluas pangsa pasar internasional, salah satunya melalui keanggotaan <i>Asean Tourism Forum (ATF)</i> |
|                              |                                               | - Pengelolaan wisata minat khusus yang lebih baik                                                           |
|                              |                                               | - Penataan area/ zona komersial destinasi wisata                                                            |
|                              |                                               | - Pengembangan wisata halal                                                                                 |
| Kawasan                      |                                               | - Peningkatan                                                                                               |

| Lokasi<br>Prioritas                                                                                                                                        | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | Pusat                                                                                                                   | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Unggulan<br>Komoditas<br>Kopi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Kerinci</li> <li>Kota Sei. Penuh</li> <li>Kab. Merangin</li> </ul>              |                                                                                                                         | produktivitas<br>perkebunan dan<br>kualitas produksi kopi <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri kopi</li> <li>- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi kopi</li> <li>- Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (kopi)</li> <li>- Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian kopi</li> <li>- Penyediaan bibit dan varietas unggul kopi yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.</li> <li>- Hilirisasi kopi</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kab. Ma. Jambi</li> <li>Kab. Bungo</li> <li>Kab. Sarolangun</li> <li>Kab. Tebo</li> <li>Kab. Batang Hari</li> </ul> | - Indikasi Daerah Prioritas intervensi Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC) | - Dukungan daerah terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Bantuan Pangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Provinsi Jambi                                                                                                                                             | - Pemberian makan bergizi di sekolah,                                                                                   | - Perluasan upaya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     | <p>madrasah dan dayah/pesantren serta pemberian makan bergizi untuk ibu hamil, ibu menyusui dan balita</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan Wajib Belajar 13 tahun, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan layanan PAUD</li> <li>• Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas</li> <li>• Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran</li> <li>• Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah</li> <li>• Revitalisasi pendidikan non formal</li> <li>• Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas</li> </ul> </li> <li>- Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penurunan kematian ibu dan anak</li> <li>• Pencegahan dan penurunan stunting</li> <li>• Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif dan lansia serta KB dan Kespro</li> <li>• Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis</li> </ul> </li> <li>- Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penuntasan TBC</li> <li>• Pengendalian penyakit menular lainnya</li> <li>• Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa</li> <li>• Pembudayaan hidup sehta dan</li> </ul> </li> </ul> | <p>promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal</li> <li>- Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan</li> <li>- Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya</li> <li>- Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas</li> <li>- Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting</li> <li>- Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | <p>pengendalian faktor resiko PTM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlindungan sosial adaptif dan inklusif, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan</li> <li>• Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional</li> </ul> </li> <li>- Penguatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan</li> <li>• Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan</li> <li>• Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan</li> <li>• Penguatan penyelenggaraan PUG di proses pembangunan</li> </ul> </li> <li>- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan</li> <li>• Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR</li> </ul> </li> <li>- Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan</li> <li>• Penerapan jaringan cerdas untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi</li> </ul> </li> </ul> | <p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan</li> <li>- Percepatan wajib belajar 13 tahun, salah satunya melalui Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas dengan layanan holistik integratif</li> <li>- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi (Pro Jambi)</li> <li>- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah</li> <li>- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik</li> <li>Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time</li> <li>Perluasan penggunaan kendaraan listrik</li> <li>Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Perluasan infrastruktur digital</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital</li> <li>Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok</li> <li>Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:</li> <li>Penguatan tata kelola pemerintahan digital</li> <li>Penguatan infrastruktur pemerintahan digital</li> <li>Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN</li> <li>Digitalisasi layanan publik prioritas</li> <li>Pengembangan ekosistem layanan publik digital</li> </ul> </li> <li>- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan melayu Jambi, antara lain melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Perlindungan dan pelestarian warisan budaya</li> <li>Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan budaya</li> <li>Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan</li> </ul> </li> </ul> | <p>sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan Kelembagaan, Destinasi dan Promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis Teknologi Infomasi</li> <li>- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.</li> <li>- Penguatan pengelolaan jalan provinsi</li> <li>- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.</li> <li>- Peningkatan keragaman wisata, penguatan kelembagaan, destinasi dan promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis teknologi infomasi</li> <li>- Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital,</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | <p>masyarakat hukum adat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penguatan ekonomi syariah, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan industri halal</li> <li>• Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional</li> <li>• Penciptaan ekosistem UMKM Halal</li> <li>• Penguatan keuangan syariah</li> <li>• Penguatan dana sosial syariah</li> </ul> </li> <li>- Memperkuat reformasi hukum, terutama di Jambi, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)</li> <li>• Penanggulangan judi dan penyelundupan</li> <li>• Pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba (P4GN)</li> </ul> </li> </ul> | <p>serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM</li> <li>- Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.</li> <li>- penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)</li> <li>- Penguatan pelatihan re-skilling dan up-skilling serta integrasi soft skills dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi</li> <li>- Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan</li> <li>- Percepatan penyediaan informasi pasar kerja</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                               | <p>yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis</li> <li>- menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor</li> <li>- Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah</li> <li>- Peningkatan potensi pemuda dalam pengembangan teknologi, kemajuan kebudayaan, peningkatan inovasi dan kreatifitas</li> <li>- Penetapan upah Provinsi berbasis produktivitas dan berkeadilan</li> <li>- Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar</li> <li>- Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat,</li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |                                               | <p>laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembentukan Desa BERSINAR (Bersih Narkoba)</li> <li>- Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan</li> <li>• Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR</li> </ul> </li> <li>- Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, antara lain melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan</li> <li>• Penerapan jaringan cerdas untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi</li> <li>• Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik</li> </ul> </li> </ul> |



| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real time</li> <li>• Perluasan penggunaan kendaraan listrik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perluasan infrastruktur digital</li> <li>• Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital</li> </ul> </li> <li>- Pengembangan dan transformasi pemerintahan digital, antara lain melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan tata kelola pemerintahan digital</li> <li>• Penguatan infrastruktur pemerintahan digital</li> <li>• Pengembangan kompetensi dan budaya digital ASN</li> <li>• Digitalisasi layanan publik prioritas</li> <li>• Pengembangan ekosistem layanan publik digital</li> </ul> </li> <li>- Pelestarian dan pemajuan kebudayaan melayu Jambi, antara lain melalui:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan dan pelestarian warisan</li> </ul> </li> </ul> |

| Lokasi<br>Prioritas | highlight Indikasi Intervensi/ Arah kebijakan |                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Pusat                                         | Provinsi                                                                                                                                                                                                               |
|                     |                                               | budaya <ul style="list-style-type: none"> <li>Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan budaya</li> <li>Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat</li> </ul> |

Dalam upaya percepatan pengurangan ketimpangan pembangunan dan penurunan kemiskinan ada beberapa upaya yang akan dilakukan selama tahun 2025-2029, yaitu:

- Quick Wins PROgram JAringan Majukan JamBI (PRO JAMBI), yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menu yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta berupa bantuan keuangan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Desa untuk menu yang bukan kewenangan Pemerintah Provinsi. Adapun menu yang dimaksud adalah sebagai berikut:
  - Pro Jambi Cerdas, berupa bantuan biaya pendidikan (perlengkapan sekolah)/beasiswa bagi siswa SMA/SMK dan SLB dari keluarga kurang mampu, serta beasiswa S1, S2, dan S3 untuk umum. Selain itu juga terdapat pula menu pendidikan vokasi secara kemitraan dengan Lembaga/ Dunia Usaha baik dalam maupun luar negeri. Adapun skema pemberian bantuan biaya pendidikan/ beasiswa direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3-11 Target Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa

| Tingkat Pendidikan | Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa |      |      |      |      |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                    | 2025*                                                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| SMA                | 2700                                                       | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| SMK                | 1600                                                       | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |

| Tingkat Pendidikan | Rencana Jumlah Penerima Bantuan Biaya Pendidikan/ Beasiswa |      |      |      |      |      |
|--------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                    | 2025*                                                      | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| SLB                | 500                                                        | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |
| S1                 | 300                                                        | 425  | 425  | 425  | 425  | 425  |
| S2                 | 52                                                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| S3                 | 102                                                        | 25   | 25   | 25   | 25   | 25   |

Selain bantuan biaya pendidikan/beasiswa yang diberikan satu kali selama pendidikan dengan skema di atas, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan memberikan beasiswa kepada mahasiswa selama masa perkuliahan maksimal 4 tahun.

- b. Pro Jambi Sehat, berupa subsidi BPJS kesehatan bagi keluarga miskin, bantuan gizi bagi ibu hamil, balita dan remaja, serta gerakan masyarakat hidup sehat. Adapun skema subsidi BPJS bidang Kesehatan untuk keluarga miskin yang belum ditanggung oleh pusat dan kabupaten/kota direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3-12 Target Bantuan BPJS Kesehatan Untuk Keluarga Miskin

| Uraian                                                                                                                            | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah kepesertaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang ditanggung oleh pemerintah Provinsi Jambi (jiwa) | 100.000 | 102.000 | 104.000 | 106.000 | 108.000 |

- c. Pro Jambi Tangguh, berupa bedah rumah; bantuan modal kerja bagi UMKM/Industri Rumah Tangga/start up/milenial; bantuan sarana prasarana pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan kehutanan bagi keluarga miskin; bantuan operasional lembaga adat; dan peningkatan *life skill* milenial/Gen Z siap kerja; job fair (bursa kerja) mantap berdaya saing; jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Tenaga Kerja Rentan seperti sopir angkot, ojek online dan pangkalan, penarik becak dan kusir delman, serta seniman dan budayawan; kredit murah 2% bagi petani, nelayan dan pedagang

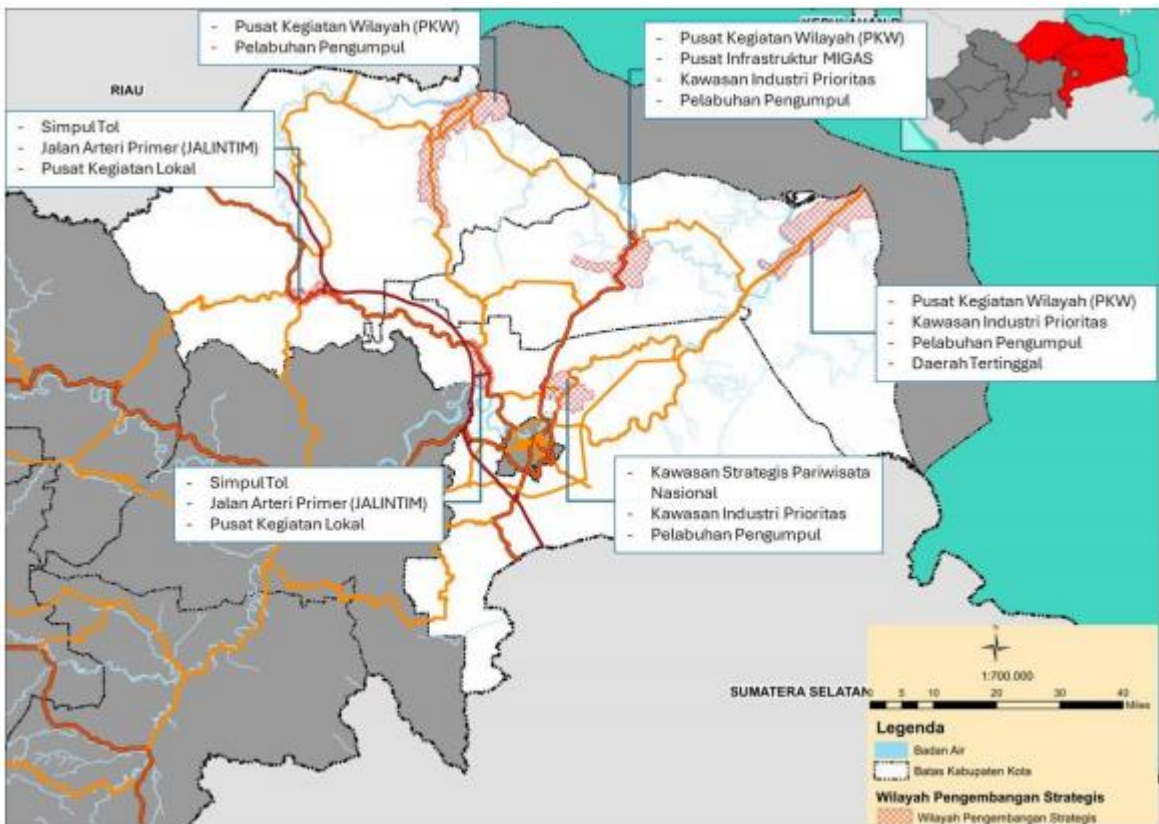
pasar tradisional. Pendanaan pada Jambi Tangguh ini tidak hanya pada APBD, namun juga dapat dari APBN atau sumber pendanaan lain yang tidak mengikat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Adapun skema bedah rumah dan bantuan permodalan direncanakan sebagai berikut:

Tabel 3-13 Target Bedah Rumah dan Bantuan Modal UKMM/UMKM/ Industri Rumah Tangga/Start Up/Milenial

| Uraian                                                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Bedah Rumah                                                   | 550  | 550  | 550  | 550  | 550  |
| Bantuan modal kerja bagi UMKM/ Industri Rumah Tangga/start up | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

- d. Jambi Agamis, berupa honorarium bagi pegawai syara’, guru ngaji dan Madrasah Diniyah takmiliyah serta pondok pesantren; honorarium da’i kecamatan; bantuan biaya umroh gratis bagi guru ngaji, havidz qur’an dan pegawai syara’ berprestasi; program satu desa satu havidz alqur’an.
  - e. Jambi responsif, berupa bantuan bagi disabilitas, anak terlantar, lansia, dan tuna sosial; insentif Babinsa/ Babinkamtibmas; membentuk Desa BERSINAR (Desa Bersih Narkoba) dan Saluran Lapor Wak Dul (Wo Haris dan Pak Dul) yang menghimpun aspirasi dan layanan pengaduan masyarakat.
2. **Meningkatkan konektivitas** , diantaranya:
- a. Percepatan pembangunan akses menuju Ujung Jabung dan Pelabuhan Ujung Jabung.
  - b. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol pada ruas yang melewati Provinsi Jambi.
  - c. Pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan kewenangan Provinsi.
  - d. Peningkatan Jalan Kabupaten/Kota yang memiliki nilai strategis terhadap aktivitas perekonomian Provinsi Jambi
  - e. Mendorong pembangunan jaringan kereta api di Provinsi Jambi
3. **Membangun pusat-pusat pertumbuhan**

- a. Meningkatkan Peran dan fungsi PKN Perkotaan Jambi, Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Bangko dan Perkotaan Muara Bungo
- b. Meningkatkan Peran dan fungsi PKW dan PKL serta Kawasan strategis Pantai Timur Jambi.
- c. Pengembangan Kawasan SENTUSA (Sengeti – Tungkal – Sabak)
- d. Mendorong Pengembangan Kawasan Industri Kemingking.
- e. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah
- f. Pengembangan kawasan-kawasan yang telah ditetapkan menjadi lokasi prioritas untuk diintervensi pada periode tahun 2025-2029.



Gambar 3-9 Pengembangan Kawasan Sentusa (Sengeti – Tungkal – Sabak)

Bila pembangunan kabupaten/ kota dilaksanakan sesuai dengan arahan pembangunan ruang tersebut, diharapkan akan memperkecil kesenjangan antar kabupaten/ kota, meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan mampu mengakselerasi pembangunan di Provinsi Jambi. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jambi memberikan target minimal pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran dan indeks gini pada

seluruh kabupaten/ kota se Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2025 – 2029 guna mendukung target Provinsi dan nasional. Secara rinci target minimal tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 3-14 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

| Kab/ Kota         | Pertumbuhan Ekonomi (Persen) |      |
|-------------------|------------------------------|------|
|                   | Rata-rata 2025 - 2029        | 2029 |
| Kab. Kerinci      | 4,65                         | 5,38 |
| Kab. Merangin     | 4,92                         | 6,60 |
| Kab. Sarolangun   | 5,03                         | 7,30 |
| Kab. Batang Hari  | 4,87                         | 6,61 |
| Kab. Muaro Jambi  | 5,15                         | 7,50 |
| Kab. Tanjab Timur | 4,97                         | 7,00 |
| Kab. Tanjab Barat | 4,99                         | 7,18 |
| Kab. T e b o      | 4,95                         | 7,15 |
| Kab. Bungo        | 4,97                         | 7,12 |
| Kota Jambi        | 4,99                         | 7,16 |
| Kota Sungai Penuh | 4,84                         | 6,34 |

Tabel 3-15 Sasaran Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

| Kab/ Kota         | Tingkat Kemiskinan (Persen) |             |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
|                   | 2025                        | 2029        |
| Kab. Kerinci      | 6,13 – 6,62                 | 2,56 – 3,26 |
| Kab. Merangin     | 7,38 – 7,96                 | 6,39 – 8,14 |
| Kab. Sarolangun   | 7,34 – 7,92                 | 3,52 - 4,48 |
| Kab. Batang Hari  | 7,59 – 8,19                 | 4,57 – 5,82 |
| Kab. Muaro Jambi  | 3,20 – 3,46                 | 2,52 – 2,31 |
| Kab. Tanjab Timur | 8,94 – 9,65                 | 2,93 – 3,73 |
| Kab. Tanjab Barat | 8,37 – 9,04                 | 4,89 – 6,23 |
| Kab. T e b o      | 5,38 – 5,81                 | 4,72 – 5,01 |
| Kab. Bungo        | 4,45 – 4,80                 | 2,60 – 3,31 |



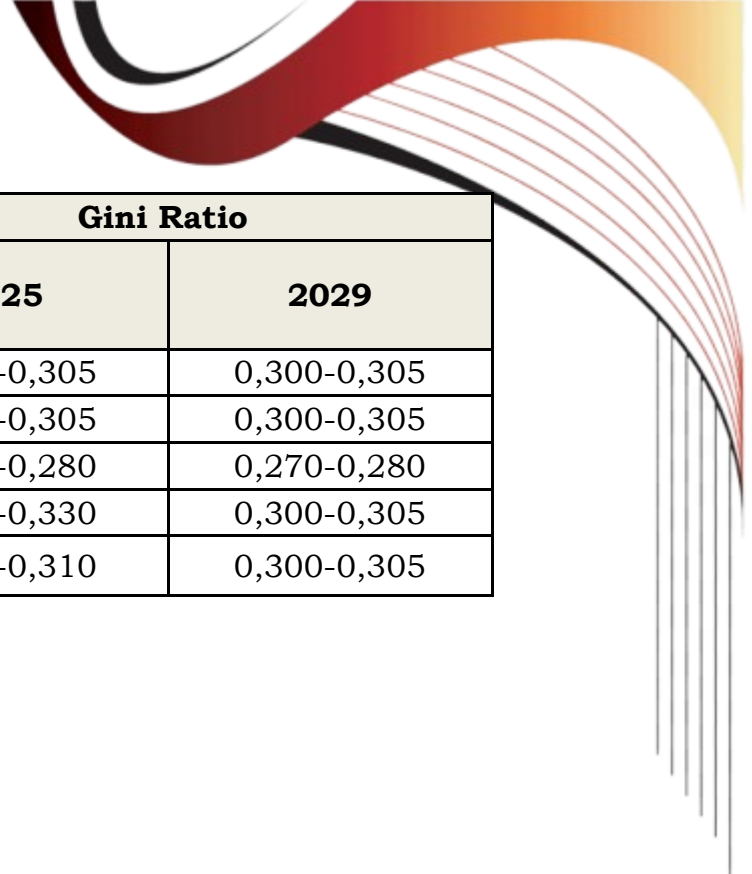
| Kab/ Kota         | Tingkat Kemiskinan (Persen) |             |
|-------------------|-----------------------------|-------------|
|                   | 2025                        | 2029        |
| Kota Jambi        | 6,80 – 7,34                 | 3,99 – 5,08 |
| Kota Sungai Penuh | 2,57 – 2,77                 | 1,51 – 1,92 |

Tabel 3-16 Sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

| Kab/ Kota         | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) |             |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|
|                   | 2025                                  | 2029        |
| Kab. Kerinci      | 2,39 – 2,45                           | 1,56 – 2,28 |
| Kab. Merangin     | 3,98 – 4,08                           | 2,59 – 3,79 |
| Kab. Sarolangun   | 4,79 – 4,91                           | 3,12 – 4,57 |
| Kab. Batang Hari  | 4,28 – 4,39                           | 2,78 – 4,08 |
| Kab. Muaro Jambi  | 5,02 – 5,15                           | 3,27 – 4,78 |
| Kab. Tanjab Timur | 1,96 – 2,01                           | 1,28 – 1,87 |
| Kab. Tanjab Barat | 3,05 – 3,13                           | 1,98 – 2,91 |
| Kab. Tebo         | 2,38 – 2,44                           | 1,55 – 2,27 |
| Kab. Bungo        | 4,45 – 4,56                           | 2,90 – 4,24 |
| Kota Jambi        | 7,03 – 7,21                           | 4,58 – 6,70 |
| Kota Sungai Penuh | 4,10 – 4,20                           | 2,67 – 3,90 |

Tabel 3-17 Sasaran Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

| Kab/ Kota         | Gini Ratio  |             |
|-------------------|-------------|-------------|
|                   | 2025        | 2029        |
| Kab. Kerinci      | 0,280-0,290 | 0,280-0,290 |
| Kab. Merangin     | 0,300-0,345 | 0,300-0,320 |
| Kab. Sarolangun   | 0,350-0,360 | 0,330-0,325 |
| Kab. Batang Hari  | 0,330-0,340 | 0,322-0,325 |
| Kab. Muaro Jambi  | 0,322-0,325 | 0,310-0,315 |
| Kab. Tanjab Timur | 0,310-0,315 | 0,300-0,305 |



| Kab/ Kota         | Gini Ratio  |             |
|-------------------|-------------|-------------|
|                   | 2025        | 2029        |
| Kab. Tanjab Barat | 0,300-0,305 | 0,300-0,305 |
| Kab. T e b o      | 0,300-0,305 | 0,300-0,305 |
| Kab. Bungo        | 0,270-0,280 | 0,270-0,280 |
| Kota Jambi        | 0,320-0,330 | 0,300-0,305 |
| Kota Sungai Penuh | 0,300-0,310 | 0,300-0,305 |

Tabel 3-18 Program Prioritas RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2029

| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                  |                                                             |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN                                                                                     | SASARAN                                                                                            | OUTCOME                                                                                                                                     | INDIKATOR                                        | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                          | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH            |
| (1)                                                                                                       | (2)                                                                                        | (3)                                                                                                | (4)                                                                                                                                         | (5)                                              | (6)                                                         | (7)                                    |
| Memantapkan<br>Tata Kelola<br>Pemerintahan<br>yang Efektif dan<br>Efisien                                 | Terwujudnya tata<br>kelola<br>pemerintahan yang<br>akuntabel,<br>transparan dan<br>adaptif | Terwujudnya<br>birokrasi yang<br>transparan,<br>melayani,<br>berintegritas dan<br>berbasis digital | Meningkatnya<br>akuntabilitas<br>kinerja<br>Pemerintah<br>melalui<br>penerapan SPBE<br>berintegritas<br>dengan<br>pelayanan publik<br>prima | Indeks<br>Reformasi<br>Birokrasi                 |                                                             |                                        |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                             | - Predikat AKIP                                  | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI | Reformasi birokrasi                    |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                             | - Indeks Survei<br>Penilaian<br>Integritas (SPI) | PROGRAM PENATAAN<br>ORGANISASI                              | Digitalisasi pelayanan<br>publik       |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                             | - Indeks SPBE                                    | PROGRAM PENGELOLAAN<br>ARSIP                                | Peningkatan Kapasitas<br>Fiskal Daerah |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                             | - Indeks<br>Pelayanan<br>Publik                  | PROGRAM PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK DAERAH                  |                                        |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                             | - Indeks<br>Keterbukaan<br>Informasi             | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA                 |                                        |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                            | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                           | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA     |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                            |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM                       |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                                    |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                               |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                            | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                           | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN TUGAS DAN<br>FUNGSI DPRD      |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN KOMUNIKASI<br>PUBLIK     |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL                                      |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENDAFTARAN<br>PENDUDUK                               |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>INFORMASI ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PROFIL KEPENDUDUKAN                    |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                            |                                                 |                                            |                             |                                                                            |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN                                                                                     | SASARAN                                         | OUTCOME                                    | INDIKATOR                   | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                         | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                |
| (1)                                                                                                       | (2)                                                                                        | (3)                                             | (4)                                        | (5)                         | (6)                                                                        | (7)                                                        |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                 |                                            |                             | PROGRAM PELAYANAN<br>PENGHUBUNG                                            |                                                            |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                 |                                            |                             | PROGRAM PERENCANAAN,<br>PENGENDALIAN DAN<br>EVALUASI PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                                                            |
|                                                                                                           |                                                                                            |                                                 |                                            |                             | PROGRAM KOORDINASI DAN<br>SINKRONISASI PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH   |                                                            |
| Memantapkan<br>Daya Saing<br>Daerah dan<br>Produktivitas<br>Bidang<br>Pertanian,<br>Perdagangan,          | Meningkatnya daya<br>saing daerah<br>dengan<br>mengoptimalkan<br>sektor unggulan<br>daerah |                                                 |                                            | Indeks Daya<br>Saing Daerah |                                                                            |                                                            |
|                                                                                                           |                                                                                            | Meningkatnya<br>daya saing<br>infrastruktur dan | Terpenuhinya<br>kebutuhan<br>infrastruktur | Rasio<br>Konektivitas       | PROGRAM PENGADAAN<br>TANAH UNTUK KEPENTINGAN<br>UMUM                       | Percepatan<br>Pengembangan sistem<br>logistik transportasi |





| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                               |                                                     |                                       |                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                       | OUTCOME                                             | INDIKATOR                             | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                                                                                                                                    |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                           | (4)                                                 | (5)                                   | (6)                                                                               | (7)                                                                                                                                                                            |
| Industri dan<br>Pariwisata                                                                                |        | konektivitas<br>antar wilayah | konektivitas dan<br>infrastruktur<br>handal lainnya | Indeks Daya<br>Saing<br>Infrastruktur | PROGRAM PENYELESAIAN<br>GANTI KERUGIAN DAN<br>SANTUNAN TANAH UNTUK<br>PEMBANGUNAN | daerah (Percepatan<br>Jalan Khusus Batu<br>Bara, Fasilitasi<br>Pengembangan Ring<br>Road Baru {Ma Jambi-<br>Batang Hari-Kota<br>Jambi} dan Jalan<br>Layang Simpang 4 Pal<br>X) |
|                                                                                                           |        |                               |                                                     |                                       | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>PENATAAN RUANG                                      |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           |        |                               |                                                     |                                       | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PELAYARAN                                                  |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           |        |                               |                                                     |                                       | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PERKERETAAPIAN                                             |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           |        |                               |                                                     |                                       | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN LALU<br>LINTAS DAN ANGKUTAN<br>JALAN (LLAJ)            |                                                                                                                                                                                |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                                             |                                                                                    |                                                             |                                                                        |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                                                     | OUTCOME                                                                            | INDIKATOR                                                   | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                     | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH      |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                                                         | (4)                                                                                | (5)                                                         | (6)                                                                    | (7)                              |
|                                                                                                           |        |                                                             |                                                                                    |                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN<br>DAN PENGEMBANGAN SISTEM<br>DRAINASE             |                                  |
|                                                                                                           |        |                                                             |                                                                                    |                                                             | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN JALAN                                       |                                  |
|                                                                                                           |        |                                                             |                                                                                    |                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN<br>DAN PENGEMBANGAN SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR MINUM |                                  |
|                                                                                                           |        |                                                             |                                                                                    |                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN<br>ENERGI TERBARUKAN                               |                                  |
|                                                                                                           |        |                                                             |                                                                                    |                                                             | PROGRAM PENGELOLAAN<br>KETENAGALISTRIKAN                               |                                  |
|                                                                                                           |        | Terwujudnya<br>Transformasi<br>digital di Provinsi<br>Jambi | Meningkatnya<br>efektivitas dan<br>efisiensi proses<br>bisnis dan<br>produktivitas | - Indeks<br>Transformasi<br>Digital<br>Nasional<br>Provinsi | PROGRAM PENGELOLAAN<br>APLIKASI INFORMATIKA                            | Digitalisasi pelayanan<br>publik |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                                    |                                |                                                                                                         |                                                        |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                                            | OUTCOME                        | INDIKATOR                                                                                               | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                     | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                                                          |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                                                | (4)                            | (5)                                                                                                     | (6)                                                    | (7)                                                                                                  |
|                                                                                                           |        |                                                    |                                | Jambi<br>- Tingkat inklusi keuangan Provinsi<br>- Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL | Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi |
|                                                                                                           |        | Terwujudnya Transformasi ekonomi di Provinsi Jambi | Stabilnya ekonomi makro daerah | - Inflasi                                                                                               | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah                   |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR                       | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                                         | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                                                                                                                       |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                             | (6)                                                                                                        | (7)                                                                                                                                                               |
|                                                                                                           |        |         |         | - Rasio kapasitas fiskal daerah | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | Pengembangan Wilayah Strategis SENTUSA (Sengeti – Tungkal –Sabak) sebagai Kawasan Cepat Tumbuh                                                                    |
|                                                                                                           |        |         |         | - Pertumbuhan Ekonomi           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                                          | Fasilitasi Percepatan Ketahanan Energi Mendukung Kawasan Strategis                                                                                                |
|                                                                                                           |        |         |         | - Tingkat Pengangguran Terbuka  | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                                            | Percepatan Pengembangan sistem logistik transportasi daerah (Percepatan Jalan Khusus Batu Bara, Fasilitasi Pengembangan Ring Road Baru {Ma Jambi-Batang Hari-Kota |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR                                                                                                                                                                              | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                  | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH              |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                                                                                                                                    | (6)                                                                 | (7)                                      |
|                                                                                                           |        |         |         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Indeks Ketahanan Pangan</li><li>- Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</li><li>- PDRB Perkapita (juta rupiah perkapita per tahun)</li></ul> |                                                                     | Jambi} dan Jalan Layang Simpang 4 Pal X) |
|                                                                                                           |        |         |         |                                                                                                                                                                                        | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING |                                          |
|                                                                                                           |        |         |         |                                                                                                                                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                               |                                          |
|                                                                                                           |        |         |         |                                                                                                                                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                 |                                          |
|                                                                                                           |        |         |         |                                                                                                                                                                                        | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                                |                                          |
|                                                                                                           |        |         |         |                                                                                                                                                                                        | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL       |                                          |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                      | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                     | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>IKLIM PENANAMAN MODAL           |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN PENANAMAN<br>MODAL  |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                      |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PELAYANAN<br>PENANAMAN MODAL                    |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>MINERAL DAN BATUBARA             |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>MINERAL DAN BATUBARA             |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENINGKATAN<br>SARANA DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>JASA KONSTRUKSI                 |                             |





| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                       | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                                                      | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PERENCANAAN<br>TENAGA KERJA                                                      |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM HUBUNGAN<br>INDUSTRIAL                                                           |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PELATIHAN KERJA<br>DAN PRODUKTIVITAS TENAGA<br>KERJA                             |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENEMPATAN<br>TENAGA KERJA                                                       |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGAWASAN<br>KETENAGAKERJAAN                                                    |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA AIR (SDA)                                             |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>SUMBER DAYA EKONOMI<br>UNTUK KEDAULATAN DAN<br>KEMANDIRIAN PANGAN |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                              |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                                                                                             | OUTCOME                                                                                         | INDIKATOR                                                    | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                         | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                                                                                                                                                                    |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                                                                                                 | (4)                                                                                             | (5)                                                          | (6)                                                                        | (7)                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                           |        |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                              | PROGRAM PENINGKATAN<br>DIVERSIFIKASI DAN<br>KETAHANAN PANGAN<br>MASYARAKAT |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           |        |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                              | PROGRAM PENANGANAN<br>KERAWANAN PANGAN                                     |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           |        |                                                                                                     |                                                                                                 |                                                              | PROGRAM PENGAWASAN<br>KEAMANAN PANGAN                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                           |        | Meningkatnya<br>Produktivitas<br>Bidang<br>Pertanian,<br>Perdagangan,<br>Industri dan<br>Pariwisata | Meningkatnya<br>nilai tambah<br>sektor Pertanian,<br>Perdagangan,<br>Industri dan<br>Pariwisata | Rasio PDRB<br>penyediaan<br>Akomodasi,<br>Makan dan<br>Minum | PROGRAM PENGENDALIAN<br>DAN PENANGGULANGAN<br>BENCANA PERTANIAN            | Pengembangan<br>Kawasan dan<br>Infrastruktur Sektor<br>Pertanian,<br>Perdagangan, Industri<br>dan Pariwisata,<br>(Kawasan Ujung<br>Jabung, KCBN Muara<br>Jambi, KSPN Danau<br>Kerinci dan Geopark<br>Merangin) |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |                                                                         |                                                                                                    |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR                                                               | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                                 | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                                                          |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                                                                     | (6)                                                                                                | (7)                                                                                                  |
|                                                                                                           |        |         |         | Distribusi PDRB sektor tersier                                          | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       | Pengembangan Ekosistem Start Up, Inovasi Teknologi dan Transformasi Digital Produk UMKM dan Koperasi |
|                                                                                                           |        |         |         | Rasio PDRB Industri Pengolahan                                          | PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL | Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian Mendukung Lumbung Pangan Desa dan Daerah                   |
|                                                                                                           |        |         |         | Pertumbuhan PDRB pada lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Pengembangan Wilayah Strategis SENTUSA (Sengeti - Tungkal -Sabak) sebagai Kawasan Cepat Tumbuh       |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                            |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                         | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                        | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENINGKATAN<br>DAYA TARIK DESTINASI<br>PARIWISATA  |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN GEDUNG                        |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA          |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGENDALIAN<br>IZIN USAHA INDUSTRI                |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PERENCANAAN<br>DAN PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI         |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN<br>PENGEMBANGAN SARANA<br>PERTANIAN |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                                         |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                      | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                                     | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                                            |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                                       |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                             |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                                       |                                |                          |                                                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                                               | OUTCOME                        | INDIKATOR                | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                  |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                                                   | (4)                            | (5)                      | (6)                                                                               | (7)                                                          |
|                                                                                                           |        |                                                       |                                |                          | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>DAN PERLINDUNGAN<br>KOPERASI                              |                                                              |
|                                                                                                           |        |                                                       |                                |                          | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>USAHA MENENGAH, USAHA<br>KECIL, DAN USAHA MIKRO<br>(UMKM) |                                                              |
|                                                                                                           |        |                                                       |                                |                          | PROGRAM PENDIDIKAN DAN<br>LATIHAN PERKOPERASIAN                                   |                                                              |
|                                                                                                           |        |                                                       |                                |                          | PROGRAM PENGAWASAN DAN<br>PEMERIKSAAN KOPERASI                                    |                                                              |
|                                                                                                           |        |                                                       |                                |                          | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>UMKM                                                      |                                                              |
|                                                                                                           |        |                                                       |                                |                          | PROGRAM PENILAIAN<br>KESEHATAN KSP/USP<br>KOPERASI                                |                                                              |
|                                                                                                           |        |                                                       |                                |                          | PROGRAM PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN                                            |                                                              |
|                                                                                                           |        | Terciptanya<br>ekosistem inovasi<br>di Provinsi Jambi | Meningkatnya<br>inovasi daerah | Indeks Inovasi<br>Daerah |                                                                                   | Pengembangan<br>Ekosistem Start Up,<br>Inovasi Teknologi dan |





| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                                                                              |                                             |                                                        |                         |                                            |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN                                                                                                                                       | SASARAN                                     | OUTCOME                                                | INDIKATOR               | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)         | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                         |
| (1)                                                                                                       | (2)                                                                                                                                          | (3)                                         | (4)                                                    | (5)                     | (6)                                        | (7)                                                 |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                             |                                                        |                         | PROGRAM RISET DAN INOVASI<br>DAERAH        | Transformasi Digital<br>Produk UMKM dan<br>Koperasi |
| Memantapkan<br>Keberlanjutan<br>Pembangunan<br>dan Kualitas<br>Sumber Daya<br>Manusia                     | Terwujudnya<br>sistem<br>perekonomian yang<br>rendah karbon,<br>efisien dalam<br>penggunaan<br>sumber daya, dan<br>inklusif secara<br>sosial |                                             |                                                        | Indeks Ekonomi<br>Hijau |                                            |                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | Meningkatnya<br>Kesejahteraan<br>masyarakat | Meningkatnya<br>kemampuan<br>pengeluaran<br>masyarakat | Tingkat<br>Kemiskinan   | PROGRAM PEMBERDAYAAN<br>SOSIAL             | PRO-JAMBI (Program<br>Jaringan Majukan<br>Jambi)    |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              | Menurunnya<br>ketimpangan<br>pendapatan     | Meningkatnya<br>pemerataan<br>pendapatan<br>masyarakat | Rasio Gini              | PROGRAM KESEJAHTERAAN<br>RAKYAT            |                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                             |                                                        |                         | PROGRAM PERLINDUNGAN<br>DAN JAMINAN SOSIAL |                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                             |                                                        |                         | PROGRAM REHABILITASI<br>SOSIAL             |                                                     |
|                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                             |                                                        |                         | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>PERMUKIMAN         |                                                     |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                  |                                                |                                    |                                                               |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                          | OUTCOME                                        | INDIKATOR                          | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                            | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                  |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                              | (4)                                            | (5)                                | (6)                                                           | (7)                                          |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                |                                              |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                    |                                              |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |                                              |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN          |                                              |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI                      |                                              |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                     |                                              |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI                      |                                              |
|                                                                                                           |        |                                  |                                                |                                    | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                 |                                              |
|                                                                                                           |        | Meningkatnya kualitas lingkungan | Menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca dan | - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP                 | Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME                                | INDIKATOR                                       | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                                                                                                                                                                                                                        | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)                                    | (5)                                             | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | - Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) | PROGRAM PENANGANAN BENCANA<br>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA<br>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN<br>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP<br>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                                                                                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                                                                     | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                                                                                                    | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENINGKATAN<br>PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN<br>PENYULUHAN LINGKUNGAN<br>HIDUP UNTUK MASYARAKAT                                    |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PERENCANAAN<br>LINGKUNGAN HIDUP                                                                                                |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PEMBINAAN DAN<br>PENGAWASAN TERHADAP IZIN<br>LINGKUNGAN DAN IZIN<br>PERLINDUNGAN DAN<br>PENGELOLAAN LINGKUNGAN<br>HIDUP (PPLH) |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGAKUAN<br>KEBERADAAN MASYARAKAT<br>HUKUM ADAT (MHA),<br>KEARIFAN LOKAL DAN HAK<br>MHA YANG TERKAIT DENGAN<br>PPLH           |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                                                                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                                                   | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                                                                                  | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGENDALIAN<br>BAHAN BERBAHAYA DAN<br>BERACUN (B3) DAN LIMBAH<br>BAHAN BERBAHAYA DAN<br>BERACUN (LIMBAH B3) |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGAMAN HAYATI<br>(KEHATI)                                                             |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>SISTEM DAN PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN REGIONAL                                               |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                                                                                   |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM KONSERVASI<br>SUMBER DAYA ALAM HAYATI<br>DAN EKOSISTEMNYA                                                    |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |                     |                                                                                              |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR           | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                           | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)                 | (6)                                                                                          | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |                     | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |                     | PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)                                               |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |                     | PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN                                                                    |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |                     | PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN                                                        |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |                     | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT          |                             |
|                                                                                                           |        |         |         | Indeks Ekonomi Biru |                                                                                              |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                                                                                     |                                           |                                                                         |                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                                                                                             | OUTCOME                                   | INDIKATOR                                                               | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                          | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                                                                                                 | (4)                                       | (5)                                                                     | (6)                                                         | (7)                                        |
|                                                                                                           |        | Meningkatnya pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk peningkatan ekonomi masyarakat | Meningkatnya nilai tambah sektor kelautan | - Peran sektor perikanan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)(%) | PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi) |
|                                                                                                           |        |                                                                                                     |                                           | - Rata-rata konsumsi kalori ikan per kapita (puluh kkal) per hari       | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP                       |                                            |
|                                                                                                           |        |                                                                                                     |                                           | - Persentase Penduduk Pesisir yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan (%)  | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN       |                                            |





| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |                                                                                      |                                           |                                                                                                 |                      |                                                              |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN                                                                               | SASARAN                                   | OUTCOME                                                                                         | INDIKATOR            | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                           | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                                             |
| (1)                                                                                                       | (2)                                                                                  | (3)                                       | (4)                                                                                             | (5)                  | (6)                                                          | (7)                                                                     |
|                                                                                                           | Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berbudaya dan berkesetaraan gender |                                           |                                                                                                 |                      | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN             |                                                                         |
|                                                                                                           |                                                                                      |                                           |                                                                                                 | Indeks Modal Manusia |                                                              |                                                                         |
|                                                                                                           |                                                                                      | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatnya peluang harapan hidup masyarakat dengan perkembangan tumbuh kembang anak yang baik | Usia Harapan Hidup   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN             | - Penguatan Sistem Kesehatan Primer dan Peningkatan Kualitas Pendidikan |
|                                                                                                           |                                                                                      |                                           |                                                                                                 | Prevalensi Stunting  | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | - PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi)                            |
|                                                                                                           |                                                                                      |                                           |                                                                                                 |                      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    |                                                                         |
|                                                                                                           |                                                                                      |                                           |                                                                                                 |                      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                |                                                                         |
|                                                                                                           |                                                                                      |                                           |                                                                                                 |                      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH       |                                                                         |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                        |                                           |                          |                                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                                | OUTCOME                                   | INDIKATOR                | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                          | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH                |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                                    | (4)                                       | (5)                      | (6)                                                                         | (7)                                        |
|                                                                                                           |        |                                        |                                           |                          | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 |                                            |
|                                                                                                           |        |                                        |                                           |                          | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 |                                            |
|                                                                                                           |        |                                        |                                           |                          | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                            |
|                                                                                                           |        |                                        |                                           |                          | PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN                                      |                                            |
|                                                                                                           |        |                                        |                                           |                          | PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                |                                            |
|                                                                                                           |        |                                        |                                           |                          | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    |                                            |
|                                                                                                           |        | Meningkatnya pendidikan dan kebudayaan | Meningkatnya karakter Sumber Daya Manusia | - Rata-rata lama sekolah | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | PRO-JAMBI (Program Jaringan Majukan Jambi) |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |                                                |         |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN                                        | OUTCOME | INDIKATOR                                                                          | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)                                            | (4)     | (5)                                                                                | (6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (7)                         |
|                                                                                                           |        | masyarakat serta<br>pengarusutamaa<br>n gender |         | - Indeks<br>Pembanguna<br>n<br>Kebudayaan<br><br>- Indeks<br>Ketimpangan<br>Gender | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN<br><br>PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KURIKULUM<br><br>PROGRAM PENGENDALIAN<br>PERIZINAN PENDIDIKAN<br><br>PROGRAM PENGEMBANGAN<br>BAHASA DAN SASTRA<br><br>PROGRAM PEMENUHAN HAK<br>ANAK (PHA)<br><br>PERSENTASE KEGIATAN<br>KEPRAMUKAAN YANG<br>TERFASILITASI<br><br>PROGRAM PELESTARIAN DAN<br>PENGELOLAAN CAGAR<br>BUDAYA |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                                    |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                                 | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                                | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PEMBINAAN<br>SEJARAH                                       |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>PERMUSEUMAN                                 |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                                 |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGEMBANGAN<br>KESENIAN TRADISIONAL                       |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PEMBINAAN<br>PERPUSTAKAAN                                  |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PELESTARIAN<br>KOLEKSI NASIONAL DAN<br>NASKAH KUNO         |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM<br>PENGARUSUTAMAAN GENDER<br>DAN PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN |                             |



| VISI : Terwujudnya Jambi Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT" |        |         |         |           |                                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MISI                                                                                                      | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | INDIKATOR | PROGRAM PRIORITAS<br>(NOMENKLATUR)                    | PROGRAM<br>PRIORITAS DAERAH |
| (1)                                                                                                       | (2)    | (3)     | (4)     | (5)       | (6)                                                   | (7)                         |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENGELOLAAN<br>SISTEM DATA GENDER DAN<br>ANAK |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PENINGKATAN<br>KUALITAS KELUARGA              |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PERLINDUNGAN<br>KHUSUS ANAK                   |                             |
|                                                                                                           |        |         |         |           | PROGRAM PERLINDUNGAN<br>PEREMPUAN                     |                             |



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Arsitektur perencanaan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, hal yang sama juga berlaku dalam penyusunan program. Dalam hal program tersebut merupakan program strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding operasional, demikian pula dalam hal penganggarnya. Adapun kinerja program merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah untuk mencapainya.

Tabel 4-1   Indikasi Rencana Program yang disertai Kebutuhan Pendanaan  
Provinsi Jambi

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                             |                      |                      |      | 2026                            |                      | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                                            |
|                                                                             |                      |                      |      | TARGET                          | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                            |
| (01)                                                                        | (02)                 | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)                 | (07)   | (08)                 | (09)   | (10)                 | (11)   | (12)                 | (13)   | (14)                 | (15)                                       |
| 1,01 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PENDIDIKAN                       |                      |                      |      |                                 | 3,652,569,491,540,00 |        | 3,822,569,491,540,00 |        | 3,822,569,491,540,00 |        | 3,822,569,491,540,00 |        | 3,822,569,491,540,00 |                                            |
| 1,01,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                      |                      |      |                                 | 2,432,630,203,540,00 |        | 2,602,630,203,540,00 |        | 2,602,630,203,540,00 |        | 2,602,630,203,540,00 |        | 2,602,630,203,540,00 |                                            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                    | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                         |                      |       | 2026                            |                      | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                                            |
|                                                                |                                                                                                                         |                      |       | TARGET                          | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                            |
| (01)                                                           | (02)                                                                                                                    | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)                 | (07)   | (08)                 | (09)   | (10)                 | (11)   | (12)                 | (13)   | (14)                 | (15)                                       |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                                                               | 92,92                | 93    | 94                              | 2,432,630,203,540,00 | 95     | 2,602,630,203,540,00 | 96     | 2,602,630,203,540,00 | 97     | 2,602,630,203,540,00 | 98     | 2,602,630,203,540,00 | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                                                | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                                     | 72,95                | 75    | 78                              |                      | 80     |                      | 82     |                      | 83     |                      | 84     |                      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                                                | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                                                       | 95,8                 | 96    | 96,5                            |                      | 97     |                      | 97,5   |                      | 98     |                      | 99     |                      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
| 1,01,02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                       |                                                                                                                         |                      |       |                                 | 1,215,439,288,000,00 |        | 1,215,439,288,000,00 |        | 1,215,439,288,000,00 |        | 1,215,439,288,000,00 |        | 1,215,439,288,000,00 |                                            |
| Terwujudnya Pengelolaan Yang Berkualitas                       | Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)                     | 71,97                | 72,31 | 72,65                           | 1,215,439,288,000,00 | 72,99  | 1,215,439,288,000,00 | 73,33  | 1,215,439,288,000,00 | 73,67  | 1,215,439,288,000,00 | 74,01  | 1,215,439,288,000,00 | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                                                | Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (%) | 59,78                | 67,82 | 75,87                           |                      | 76,96  |                      | 78,05  |                      | 79,14  |                      | 80,23  |                      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                                                | Tingkat Penyerapan Lulusan SMK (%)                                                                                      | 81,6                 | 83,66 | 85,72                           |                      | 87,77  |                      | 89,83  |                      | 91,89  |                      | 93,95  |                      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------------------------------|
|                                         |                                                                          |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                            |
|                                         |                                                                          |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                            |
| (01)                                    | (02)                                                                     | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                       |
|                                         | Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK (%)       | 74,48                | 75,02 | 75,94                           |      | 76,86  |      | 77,78  |      | 78,7   |      | 80     |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)   | 70,1                 | 70,7  | 71,3                            |      | 71,9   |      | 72,5   |      | 73,1   |      | 73,7   |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)   | 64,73                | 66,03 | 67,33                           |      | 68,63  |      | 69,93  |      | 71,23  |      | 72,53  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)  | 60,42                | 62,02 | 63,62                           |      | 65,22  |      | 66,82  |      | 68,42  |      | 70,02  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 55,53                | 56,03 | 56,53                           |      | 57,03  |      | 57,53  |      | 58,03  |      | 58,53  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------------------------------|
|                                         |                                                                          |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                            |
|                                         |                                                                          |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                            |
| (01)                                    | (02)                                                                     | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                       |
|                                         | Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 57,69                | 58,19 | 58,69                           |      | 59,19  |      | 59,69  |      | 60,19  |      | 60,69  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)   | 60,05                | 61,65 | 63,25                           |      | 64,85  |      | 66,45  |      | 68,05  |      | 69,65  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)   | 56,19                | 58,39 | 60,59                           |      | 62,79  |      | 64,99  |      | 67,19  |      | 69,39  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)  | 54,07                | 54,67 | 55,27                           |      | 55,87  |      | 56,47  |      | 57,07  |      | 57,67  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 53,55                | 53,8  | 54,05                           |      | 54,3   |      | 54,55  |      | 54,8   |      | 55,05  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------------------------------|
|                                         |                                                                          |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                            |
|                                         |                                                                          |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                            |
| (01)                                    | (02)                                                                     | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                       |
|                                         | Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai) | 57,91                | 58,41 | 58,91                           |      | 59,41  |      | 59,91  |      | 60,41  |      | 60,91  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Iklm Inklusivitas SMA (Nilai)                                            | 58,85                | 60,35 | 61,85                           |      | 63,35  |      | 64,85  |      | 66,35  |      | 67,85  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Iklm Inklusivitas SMK (Nilai)                                            | 55,33                | 57,63 | 59,93                           |      | 62,23  |      | 64,53  |      | 66,83  |      | 69,13  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Iklm Inklusivitas SDLB (Nilai)                                           | 64,31                | 65,61 | 66,91                           |      | 68,21  |      | 69,51  |      | 70,81  |      | 72,11  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |
|                                         | Iklm inklusivitas SMPLB (Nilai)                                          | 62,62                | 64,02 | 65,42                           |      | 66,82  |      | 68,22  |      | 69,62  |      | 71,02  |      | 1,01,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pendidikan  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME               | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------------------------------------|
|                                         |                                    |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                               |
|                                         |                                    |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                               |
| (01)                                    | (02)                               | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                          |
|                                         | Iklm inklusivitas<br>SMALB (Nilai) | 63,18                | 64,78 | 66,38                           |      | 67,98  |      | 69,58  |      | 71,18  |      | 72,78  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas Pendidikan |
|                                         | Iklm keamanan<br>SMA (Nilai)       | 70,95                | 80,05 | 81,25                           |      | 82,45  |      | 83,65  |      | 84,85  |      | 86,05  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas Pendidikan |
|                                         | Iklm keamanan<br>SMK (Nilai)       | 67,46                | 68,66 | 69,86                           |      | 71,06  |      | 72,26  |      | 73,46  |      | 74,66  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas Pendidikan |
|                                         | Iklm keamanan<br>SDLB (Nilai)      | 74,38                | 74,88 | 75,38                           |      | 75,88  |      | 76,38  |      | 76,88  |      | 77,38  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas Pendidikan |
|                                         | Iklm keamanan<br>SMPLB (Nilai)     | 64,08                | 65,28 | 66,48                           |      | 67,68  |      | 68,88  |      | 70,08  |      | 71,28  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas Pendidikan |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                          |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                  |
|                                         |                                                                                                                          |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                  |
| (01)                                    | (02)                                                                                                                     | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                             |
|                                         | Iklm keamanan<br>SMALB (Nilai)                                                                                           | 69,18                | 70,48 | 71,78                           |      | 73,08  |      | 74,39  |      | 75,68  |      | 76,98  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                         | Iklm kebinekaan<br>SMA (Nilai)                                                                                           | 71,08                | 72,08 | 73,08                           |      | 74,08  |      | 75,08  |      | 76,08  |      | 77,08  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                         | Iklm kebinekaan<br>SMK (Nilai)                                                                                           | 68,65                | 69,95 | 71,25                           |      | 72,55  |      | 73,85  |      | 75,15  |      | 76,45  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                         | Iklm kebinekaan<br>SDLB (Nilai)                                                                                          | 65,23                | 66,23 | 67,23                           |      | 68,23  |      | 69,23  |      | 70,23  |      | 71,23  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                         | Iklm kebinekaan<br>SMPLB (Nilai)                                                                                         | 66,62                | 68,42 | 70,22                           |      | 72,02  |      | 73,82  |      | 75,62  |      | 77,42  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                         | Iklm kebinekaan<br>SMALB (Nilai)                                                                                         | 68,82                | 70,82 | 72,82                           |      | 74,82  |      | 76,82  |      | 78,82  |      | 80,82  |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                         | Persentase<br>pemanfaatan<br>teknologi,<br>informasi dan<br>komunikasi<br>Pendidikan (TIKP)<br>oleh satuan<br>pendidikan |                      |       | 100                             |      | 100    |      | 100    |      | 100    |      | 100    |      | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                       |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                  |
|                                                                            |                                                                                                       |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                  |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                                  | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                             |
| 1,01,03 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KURIKULUM                             |                                                                                                       |                      |      |                                 | 2,930,000,000,00 |        | 2,930,000,000,00 |        | 2,930,000,000,00 |        | 2,930,000,000,00 |        | 2,930,000,000,00 |                                                  |
| Terakomodirnya<br>muatan lokal dalam<br>kurikulum sekolah                  | Persentase<br>Satuan<br>Pendidikan yang<br>Mengembangkan<br>Kurikulum<br>Muatan Lokal<br>(Persentase) | 100                  | 100  | 100                             | 2,930,000,000,00 | 100    | 2,930,000,000,00 | 100    | 2,930,000,000,00 | 100    | 2,930,000,000,00 | 100    | 2,930,000,000,00 | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
| 1,01,04 - PROGRAM<br>PENDIDIK DAN<br>TENAGA<br>KEPENDIDIKAN                |                                                                                                       |                      |      |                                 | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |                                                  |
| Meningkatnya mutu<br>dan distribusi<br>pendidik dan tenaga<br>kependidikan | Indeks Distribusi<br>Guru SLB<br>(Indeks)                                                             | 1                    | 1    | 1                               | 600,000,000,00   | 1      | 600,000,000,00   | 1      | 600,000,000,00   | 1      | 600,000,000,00   | 1      | 600,000,000,00   | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                            | Indeks Distribusi<br>Guru SMA<br>(Indeks)                                                             | 0,67                 | 0,7  | 0,72                            |                  | 0,74   |                  | 0,76   |                  | 0,78   |                  | 0,8    |                  | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                            | Indeks Distribusi<br>Guru SMK<br>(Indeks)                                                             | 0,81                 | 0,81 | 0,82                            |                  | 0,83   |                  | 0,84   |                  | 0,84   |                  | 0,85   |                  | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
|                                                                            | Persentase Guru<br>yang Memiliki<br>Sertifikat<br>Pendidik<br>(Persentase)                            | 71                   | 71   | 72                              |                  | 73     |                  | 74     |                  | 75     |                  | 75     |                  | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                      | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                           |                      |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                      | 2030   |                      |                                                  |
|                                                                             |                                                                                                           |                      |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                                  |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                                      | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)                 | (13)   | (14)                 | (15)                                             |
| 1,01,05 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PERIZINAN<br>PENDIDIKAN                |                                                                                                           |                      |      |                                 | 370,000,000,00     |        | 370,000,000,00     |        | 370,000,000,00     |        | 370,000,000,00       |        | 370,000,000,00       |                                                  |
| Meningkatnya<br>kualitas dan<br>distribusi institusi<br>pendidikan          | Persentase<br>Usulan Izin<br>Satuan<br>Pendidikan yang<br>Diterbitkan/<br>Diperbarui<br>(Persentase)      | 100                  | 100  | 100                             | 370,000,000,00     | 100    | 370,000,000,00     | 100    | 370,000,000,00     | 100    | 370,000,000,00       | 100    | 370,000,000,00       | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
| 1,01,06 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>BAHASA DAN<br>SASTRA                   |                                                                                                           |                      |      |                                 | 600,000,000,00     |        | 600,000,000,00     |        | 600,000,000,00     |        | 600,000,000,00       |        | 600,000,000,00       |                                                  |
| terlestarikannya<br>bahasa dan sastra<br>daerah                             | Persentase<br>Satuan<br>Pendidikan<br>Pengaprisiasi<br>Bahasa dan<br>Sastra<br>Kewenangan<br>Provinsi (%) | 20                   | 30   | 40                              | 600,000,000,00     | 60     | 600,000,000,00     | 70     | 600,000,000,00     | 90     | 600,000,000,00       | 100    | 600,000,000,00       | 1,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pendidikan |
| 1,02 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KESEHATAN                        |                                                                                                           |                      |      |                                 | 874,752,517,057,38 |        | 946,774,025,615,32 |        | 970,966,825,065,65 |        | 1,028,642,501,919,62 |        | 1,090,217,874,129,58 |                                                  |
| 1,02,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                                                           |                      |      |                                 | 633,349,831,957,38 |        | 662,376,319,309,32 |        | 701,829,293,593,65 |        | 743,887,674,299,62   |        | 788,741,557,039,58   |                                                  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |        |                 |        |                 |        |                 |        |                 | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                               |                      |       | 2026                            |                 | 2027   |                 | 2028   |                 | 2029   |                 | 2030   |                 |                                                                                                          |
|                                                                       |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            | TARGET | PAGU            |                                                                                                          |
| (01)                                                                  | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)            | (07)   | (08)            | (09)   | (10)            | (11)   | (12)            | (13)   | (14)            | (15)                                                                                                     |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yg prima dan<br>akuntabel | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 82,6                 | 82,7  | 82,8                            | 55,469,539,38   | 82,9   | 63,513,143,32   | 83     | 69,991,677,65   | 83,1   | 77,758,029,62   | 83,2   | 79,921,417,58   | 1,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kesehatan                                                          |
|                                                                       | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 88,4                 | 89    | 89,5                            |                 | 90     |                 | 90,5   |                 | 91     |                 | 91,5   |                 | 1,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kesehatan                                                          |
|                                                                       | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 16                   | 70,01 | 75                              |                 | 80     |                 | 85     |                 | 90     |                 | 92     |                 | 1,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kesehatan                                                          |
|                                                                       | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 35                   | 70    | 75                              | 377.747.240.959 | 78     | 386.750.468.718 | 82     | 394.327.883.431 | 85     | 402.238.757.412 | 90     | 410.516.751.391 | 1,02,0,00,0,00,02<br>,0000 - RSUD<br>Rd, Mattaher                                                        |
|                                                                       | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 86,36                | 86,5  | 86,66                           |                 | 86,96  |                 | 87,26  |                 | 87,56  |                 | 87,86  |                 | 1,02,0,00,0,00,02<br>,0000 - RSUD<br>Rd, Mattaher                                                        |
|                                                                       | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 70,75                | 71    | 71,25                           |                 | 71,75  |                 | 72,25  |                 | 72,75  |                 | 73,25  |                 | 1,02,0,00,0,00,02<br>,0000 - RSUD<br>Rd, Mattaher                                                        |
|                                                                       | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 70,24                | 71    | 72,5                            | 255.547.121.449 | 73     | 275.562.337.438 | 73,5   | 307.431.418.475 | 74     | 341.571.158.848 | 75     | 378.144.884.221 | 1,02,0,00,0,00,03<br>,0000 - Rumah<br>Sakit Jiwa<br>Daerah Kolonel<br>Infanteri H,<br>Muhammad<br>Syukur |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                 |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-----------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                   |                      |       | 2026                            |                 | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                   |                      |       | TARGET                          | PAGU            | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                                                       |
| (01)                                                                                  | (02)                                                              | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)            | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                                                  |
|                                                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 85                   | 85,5  | 86                              |                 | 87     |                    | 87,5   |                    | 88     |                    | 88,5   |                    | 1,02,0,00,0,00,03,0000 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H, Muhammad Syukur |
|                                                                                       | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 90                   | 90,25 | 90,8                            |                 | 91     |                    | 91,5   |                    | 92     |                    | 92,5   |                    | 1,02,0,00,0,00,03,0000 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H, Muhammad Syukur |
| 1,02,02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT |                                                                   |                      |       |                                 | 189.346.126.000 |        | 276,810,243,000,00 |        | 261,175,222,500,00 |        | 276,360,139,700,00 |        | 292,512,613,670,00 |                                                                                       |
| Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat                             | Angka kematian bayi                                               | 20                   | 13    | 12                              | 330.000.000     | 12     | 390.000.000        | 11     | 410.000.000        | 10     | 440.000.000        | 10     | 460.000.000        | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |
|                                                                                       | Angka kematian neonatal                                           | 164                  | 6     | 5                               | 335.000.000     | 5      | 360.000.000        | 5      | 405.500.000        | 5      | 425.000.000        | 5      | 445.000.000        | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |
|                                                                                       | Cakupan kunjungan nifas (KF) lengkap sesuai standar               | 87                   | 35    | 35                              | 85.000.000      | 55     | 90.000.000         | 70     | 95.000.000         | 88     | 103.000.000        | 90     | 106.000.000        | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |
|                                                                                       | Persentase ibu hamil yang mendapatkan skrining pre-eclampsia      | 82                   | 82    | 83                              | 190.000.000     | 84     | 200.000.000        | 85     | 210.500.000        | 87     | 225.000.000        | 89     | 235.000.000        | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |
|                                                                                       | Prevalensi wasting (gizi kurang dan gizi buruk) pada balita       | 7                    | 7     | 6                               | 750.000.000     | 6      | 1.000.000.000      | 6      | 1.250.000.000      | 6      | 1.500.000.000      | 6      | 1.750.000.000      | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                 |                      |       | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                            |
|                                         |                                                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                            |
| (01)                                    | (02)                                                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)          | (07)   | (08)          | (09)   | (10)          | (11)   | (12)          | (13)   | (14)          | (15)                                       |
|                                         | Persentase ibu hamil KEK                                                                                        | 10                   | 9     | 9                               | 320.000.000   | 8      | 340.000.000   | 8      | 350.000.000   | 8      | 360.000.000   | 7      | 370.000.000   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Kab/Kota yang memenuhi syarat kualitas lingkungan                                                    | NA                   | 9,09  | 18,18                           | 1.012.000.000 | 27,27  | 1.118.200.000 | 36,36  | 1.243.230.000 | 45,45  | 1.348.512.000 | 54,55  | 1.434.720.000 | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase depresi yang mendapatkan layanan                                                                     | N/A                  | 5     | 7                               | 400.000.000   | 9      | 450.000.000   | 11     | 500.000.000   | 13     | 550.000.000   | 15     | 600.000.000   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase orang dengan gangguan penggunaan NAPZA yang mendapatkan layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL | N/A                  | 5     | 7                               | 200.000.000   | 9      | 200.000.000   | 11     | 200.000.000   | 13     | 200.000.000   | 15     | 200.000.000   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Cakupan imunisasi bayi lengkap                                                                                  | 84                   | 85    | 87                              | 384.476.000   | 89     | 418.668.000   | 91     | 456.280.000   | 93     | 497.652.000   | 95     | 547.417.200   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Hipertensi dalam pengendalian                                                                        | 0,30                 | 5     | 10                              | 150.000.000   | 15     | 200.000.000   | 20     | 250.000.000   | 25     | 300.000.000   | 30     | 300.000.000   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | % Diabetes dalam pengendalian                                                                                   | N/A                  | 5     | 10                              | 150.000.000   | 15     | 200.000.000   | 20     | 250.000.000   | 25     | 300.000.000   | 30     | 350.000.000   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase merokok pada penduduk usia 10-21 tahun                                                               | NA                   | 12    | 12                              | 300.000.000   | 12     | 300.000.000   | 12     | 300.000.000   | 12     | 300.000.000   | 12     | 300.000.000   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Kab/kota yang memiliki proporsi obesitas <23,4%                                                      | 14,60                | 14,60 | 14,60                           | 150.000.000   | 14,60  | 150.000.000   | 14,60  | 150.000.000   | 14,60  | 150.000.000   | 14,60  | 150.000.000   | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------|
|                                         |                                                                     |                      |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                            |
|                                         |                                                                     |                      |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                            |
| (01)                                    | (02)                                                                | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                       |
|                                         | Cakupan Penemuan Kasus TBC (Notifikasi Kasus TBC)                   | 64                   | 65    | 70                              | 110.000.000    | 75     | 165.000.000    | 80     | 247.500.000    | 85     | 371.250.000    | 90     | 556.875.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Insiden HIV / Persentase ODHIV on ART yang di obati                 | 64                   | 65    | 70                              | 350.000.000    | 75     | 375.000.000    | 80     | 425.000.000    | 85     | 450.000.000    | 90     | 475.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Kab/Kota dengan eliminasi malaria                        | 72,73                | 72,73 | 72,73                           | 350.000.000    | 81,82  | 375.000.000    | 81,82  | 425.000.000    | 90,91  | 450.000.000    | 90,91  | 475.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Proporsi kasus kusta baru tanpa disabilitas                         | 70                   | 71    | 72                              | 75.000.000     | 73     | 100.000.000    | 74     | 125.000.000    | 75     | 150.000.000    | 76     | 175.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Kab/Kota eliminasi rabies                                | 81,82                | 81,82 | 90,91                           | 75.000.000     | 90,91  | 100.000.000    | 100,00 | 125.000.000    | 100,00 | 150.000.000    | 100,00 | 175.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Penurunan Angka kematian Dengue                                     | 0                    | 1     | 0                               | 75.000.000     | 0      | 100.000.000    | 0      | 125.000.000    | 0      | 150.000.000    | 0      | 175.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Indeks Pencapaian SPM Bidang Kesehatan                              | 90                   | 91    | 92                              | 4.963.250.000  | 93     | 5.472.575.000  | 94     | 6.019.832.500  | 95     | 6.629.767.700  | 96     | 7.292.744.470  | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Cakupan kepesertaan aktif JKN                                       | 69                   | 80    | 81                              | 77.914.400.000 | 82     | 78.872.000.000 | 83     | 79.829.600.000 | 84     | 80.787.200.000 | 85     | 81.744.800.000 | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Cakupan penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)                   | N/A                  | 36    | 46                              | 500.000.000    | 55     | 500.000.000    | 61     | 500.000.000    | 70     | 500.000.000    | 80     | 500.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Kabupaten/Kota dengan Fasilitas Kesehatan Sesuai Standar | 100                  | 100   | 100                             | 430.000.000    | 100    | 470.000.000    | 100    | 520.000.000    | 100    | 550.000.000    | 100    | 580.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                   |                      |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                            |
|                                         |                                                                                                   |                      |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                            |
| (01)                                    | (02)                                                                                              | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                       |
|                                         | Persentase Fasyankes yang terakreditasi paripurna                                                 | 32,69                | 32,69 | 32,69                           | 748.000.000    | 32,69  | 840.800.000    | 40,87  | 958.880.000    | 45,67  | 1.042.768.000  | 45,67  | 1.062.768.000  | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Faskes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar                                      | 80,00                | 82,00 | 84,00                           | 5.940.000.000  | 86,00  | 6.534.000.000  | 88,00  | 7.187.400.000  | 90,00  | 7.906.140.000  | 90,00  | 8.696.754.000  | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase labkesmas tingkat 3 yang dikembangkan sesuai standar                                   | 84,78                | 85    | 85                              | 8.150.000.000  | 85     | 9.215.000.000  | 85     | 10.340.500.000 | 90     | 11.517.050.000 | 95     | 12.775.755.000 | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Tingkat Kepuasan Pasien terhadap layanan kesehatan                                                | 84,62                | 85    | 86                              | 8.250.000.000  | 87     | 39.325.000.000 | 88     | 10.465.500.000 | 89     | 11.647.050.000 | 90     | 12.925.755.000 | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Lanjut Usia yang Mandiri                                                               | 75                   | 76    | 77                              | 250.000.000    | 79     | 250.000.000    | 81     | 250.000.000    | 83     | 250.000.000    | 85     | 250.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase Kab/Kota yang memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa/ kelurahan sesuai standar | N/A                  | 9,1   | 18,2                            | 200.000.000    | 27,3   | 200.000.000    | 36,4   | 200.000.000    | 45,5   | 200.000.000    | 54,5   | 200.000.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase sistem informasi data Kesehatan yang telah terintegrasi dalam SIKN                     | 75                   | 78    | 80                              | 250.000.000    | 85     | 275.000.000    | 90     | 302.500.000    | 95     | 332.750.000    | 100    | 366.025.000    | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                         | Persentase ketercapaian INM (Indikator Nasional Mutu) di Rumah Sakit (%)                          | 53,84                | 58,33 | 61,53                           | 75.959.000.000 | 69,23  | 79.757.000.000 | 76,92  | 83.745.000.000 | 84,61  | 87.932.000.000 | 92,3   | 92.329.000.000 | 1,02,0,00,0,00,02,0000 - RSUD Rd, Mattaher |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                     | INDIKATOR OUTCOME                                                        | BASELINE 2024 | 2025        | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |             |                  |             |                  |             |                  |             |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                          |               |             | 2026                            |                   | 2027        |                  | 2028        |                  | 2029        |                  | 2030        |                  |                                                                                       |
|                                                                       |                                                                          |               |             | TARGET                          | PAGU              | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             | TARGET      | PAGU             |                                                                                       |
| (01)                                                                  | (02)                                                                     | (03)          | (04)        | (05)                            | (06)              | (07)        | (08)             | (09)        | (10)             | (11)        | (12)             | (13)        | (14)             | (15)                                                                                  |
|                                                                       | Persentase ketercapaian INM (Indikator Nasional Mutu) di Rumah Sakit (%) | 85            | 86          | 86,5                            | 44.061.000.000,00 | 87          | 48.467.000.000   | 88          | 53.313.000.000   | 89          | 58.645.000.000   | 92,3        | 64.509.000.000   | 1,02,0,00,0,00,03,0000 - Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H, Muhammad Syukur |
| 1,02,03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN |                                                                          |               |             |                                 | 4.210.559.100     |             | 4.389.963.306    |             | 4.523.683.972    |             | 4.670.981.920    |             | 4.897.726.920    |                                                                                       |
| Meningkatnya Mutu dan Distribusi Tenaga Kesehatan                     | Rasio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan terhadap populasi                | 6,6 : 1,000   | 6,6 : 1,000 | 6,6 : 1,000                     | 705.192.050       | 6,6 : 1,000 | 797.856.653      | 6,6 : 1,000 | 842.179.486      | 6,6 : 1,000 | 888.040.960      | 6,6 : 1,000 | 984.625.960      | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |
|                                                                       | Pesentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar                           | 8,17          | 13,46       | 18,75                           | 135.000.000       | 24          | 121.000.000      | 29          | 109.350.000      | 35          | 99.415.000       | 40          | 95.000.000       | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |
|                                                                       | Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar          | 97            | 90          | 91                              | 123.292.050       | 92          | 129.456.653      | 93          | 135.929.486      | 94          | 152.725.960      | 95          | 192.725.960      | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan                                              |
|                                                                       | Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan                   | 64,77         | 67,77       | 70,77                           | 3.247.075.000     | 74          | 3.341.650.000    | 77          | 3.436.225.000    | 80          | 3.530.800.000    | 83          | 3.625.375.000    |                                                                                       |
| 1,02,04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN |                                                                          |               |             |                                 | 1,050,000,000,00  |             | 1,102,500,000,00 |             | 1,157,625,000,00 |             | 1,215,506,000,00 |             | 1,337,056,500,00 |                                                                                       |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                               | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                           |                                                                                                    |                      |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                      | 2030   |                      |                                            |
|                                                                                           |                                                                                                    |                      |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                            |
| (01)                                                                                      | (02)                                                                                               | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)                 | (13)   | (14)                 | (15)                                       |
| Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman | Persentase Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alkes, PKRT yang memenuhi persyaratan perizinan | 100                  | 100   | 100                             | 1.050.000.000      | 100    | 1.102.500.000      | 100    | 1.157.625.000      | 100    | 1.215.506.000        | 100    | 1.337.056.500        | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
| 1,02,05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                                |                                                                                                    |                      |       |                                 | 2,240,000,000,00   |        | 1,545,000,000,00   |        | 1,677,000,000,00   |        | 1,847,200,000,00     |        | 2,006,920,000,00     |                                            |
| Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan                            | Persentase Kab/Kota mencapai target STBM                                                           | 18,18                | 18,18 | 18,18                           | 200.000.000        | 18,18  | 225.000.000        | 27,27  | 225.000.000        | 36,36  | 250.000.000          | 45,45  | 250.000.000          | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
|                                                                                           | Proporsi Penduduk dengan Aktivitas Fisik Cukup                                                     | N/A                  | 15,00 | 65                              | 2.040.000.000      | 68     | 1.320.000.000      | 71     | 1.452.000.000      | 74     | 1.597.200.000        | 77     | 1.756.920.000        | 1,02,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kesehatan   |
| 1,03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |                                                                                                    |                      |       |                                 | 770.094.000.000,00 |        | 966,301,000,000,00 |        | 995,019,600,000,00 |        | 1,033,141,000,000,00 |        | 1,238,343,000,000,00 |                                            |
| 1,03,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                           |                                                                                                    |                      |       |                                 | 45,258,000,000,00  |        | 50,799,000,000,00  |        | 60,001,000,000,00  |        | 65,534,000,000,00    |        | 70,876,000,000,00    |                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                      | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                           |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                |
|                                                                                                         |                                                                                                                           |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                |
| (01)                                                                                                    | (02)                                                                                                                      | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                           |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel                                          | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                                                         | 15,2                 | 70,01 | 71,01                           | 45,258,000,000,00 | 72,01  | 50,799,000,000,00 | 73,01  | 60,001,000,000,00 | 74,01  | 65,534,000,000,00 | 75     | 70,876,000,000,00 | 1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
|                                                                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                                                                 | 91                   | 91,9  | 92,1                            |                   | 92,2   |                   | 92,3   |                   | 92,4   |                   | 92,5   |                   | 1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
|                                                                                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                                       | 72                   | 75    | 76                              |                   | 77     |                   | 78     |                   | 78,5   |                   | 79     |                   | 1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
| 1,03,02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                                     |                                                                                                                           |                      |       |                                 | 70,136,000,000,00 |        | 66,324,000,000,00 |        | 62,313,000,000,00 |        | 57,547,000,000,00 |        | 89,840,000,000,00 |                                                |
| meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi | Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.                                                | 64,51                | 65,78 | 66,35                           | 68.309.000.000    | 67,69  | 68.435.000.000    | 68,82  | 70.333.000.000    | 70,14  | 75.528.000.000    | 71,93  | 87.069.000.000    | 1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
|                                                                                                         | Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir di WS Kewenangan Provinsi yang dilindungi dengan Infrastruktur Sumber Daya Air | 4                    | 4     | 17,48                           | 41.827.000.000    | 38,76  | 41.889.000.000    | 52,30  | 41.980.000.000    | 76,54  | 42.019.000.000    | 82,86  | 62.771.000.000    | 1,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                             | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                                                                  |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                   |                                                      |
|                                                                                              |                                                                                                                                  |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                                                      |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                                                                             | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)              | (15)                                                 |
| 1,03,03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM<br>PENYEDIAAN AIR<br>MINUM |                                                                                                                                  |                      |       |                                 | 5,000,000,000,00 |        | 5,000,000,000,00 |        | 5,000,000,000,00 |        | 5,000,000,000,00 |        | 5,000,000,000,00  |                                                      |
| meningkatnya akses<br>masyarakat<br>terhadap sistem<br>penyediaan air<br>minum               | Persentase<br>rumah tangga<br>dengan akses<br>berkelanjutan<br>terhadap air<br>minum<br>Perpipaan,<br>perkotaan dan<br>perdesaan | 80                   | 80    | 40                              | 5.000.000.000    | 42     | 5.000.000.000    | 44     | 5.000.000.000    | 46     | 5.000.000.000    | 48     | 5.000.000.000     | 1,03,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum |
| 1,03,04 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM DAN<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN<br>REGIONAL    |                                                                                                                                  |                      |       |                                 | 500,000,000,00   |        | 200,000,000,00   |        | 1,200,000,000,00 |        | 1,000,000,000,00 |        | 90,000,000,000,00 |                                                      |
| Meningkatnya<br>layanan<br>persampahan<br>regional                                           | Persentase<br>Ketersediaan<br>TPA/TPST/SPAL<br>Regional                                                                          | 0                    | 0     | 10                              | 500.000.000      | 20     | 200.000.000      | 40     | 1.200.000.000    | 60     | 1.000.000.000    | 80     | 90.000.000.000    | 1,03,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum |
| 1,03,05 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM AIR<br>LIMBAH              |                                                                                                                                  |                      |       |                                 | 500,000,000,00   |        | 200,000,000,00   |        | 1,200,000,000,00 |        | 1,000,000,000,00 |        | 20,000,000,000,00 |                                                      |
| Meningkatnya akses<br>masyarakat<br>terhadap sistem<br>pengelolaan air<br>limbah             | Persentase<br>Rumah Tangga<br>yang menempati<br>Hunian dengan<br>Akses Sanitasi<br>(Air Limbah<br>Domestik Layak )               | 66,21                | 68,84 | 70                              | 500.000.000      | 71     | 200.000.000      | 73     | 1.200.000.000    | 74     | 1.000.000.000    | 75     | 20.000.000.000    | 1,03,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB           |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                                                            |                      |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                      |
|                                                                            |                                                                                                                            |                      |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                      |
| (01)                                                                       | (02)                                                                                                                       | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                 |
| 1,03,06 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>DAN<br>PENGEMBANGAN<br>SISTEM DRAINASE |                                                                                                                            |                      |      |                                 | 300,000,000,00     |        | 300,000,000,00     |        | 7,164,000,000,00   |        | 25,860,000,000,00  |        | 16,087,000,000,00  |                                                      |
| Meningkatnya<br>kualitas sistem<br>drainase perkotaan                      | Persentase<br>Sistem Drainase<br>Perkotaan yang<br>direhabilitasi                                                          | 0                    | 0    | 5                               | 300.000.000        | 10     | 300.000.000        | 40     | 7.164.000.000      | 70     | 25.860.000.000     | 100    | 16.087.000.000     | 1,03,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum |
| 1,03,07 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERMUKIMAN                            |                                                                                                                            |                      |      |                                 | 1,000,000,000,00   |        | 1,000,000,000,00   |        | 1,000,000,000,00   |        | 1,000,000,000,00   |        | 1,000,000,000,00   |                                                      |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>infrastruktur<br>permukiman                    | Persentase<br>Peningkatan<br>Ketersediaan<br>TPS/TPA/TPS3R<br>/TPST/SPAM di<br>Kawasan<br>Strategis Provinsi               | 2                    | 10   | 10                              | 1.000.000.000      | 20     | 1.000.000.000      | 30     | 1.000.000.000      | 40     | 1.000.000.000      | 50     | 1.000.000.000      | 1,03,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum |
| 1,03,08 - PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN<br>GEDUNG                        |                                                                                                                            |                      |      |                                 | 100,000,000,000,00 |        | 100,000,000,000,00 |        | 100,000,000,000,00 |        | 100,000,000,000,00 |        | 100,000,000,000,00 |                                                      |
| Meningkatnya<br>kualitas bangunan<br>gedung                                | Persentase<br>Bangunan<br>Gedung Strategis<br>Untuk<br>Kepentingan<br>Strategis Provinsi<br>yang dipelihara<br>dan dirawat | 2                    | 3    | 42,11                           | 100.000.000.000    | 55,26  | 100.000.000.000    | 71,05  | 100.000.000.000    | 84,21  | 100.000.000.000    | 100    | 100.000.000.000    | 1,03,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pekerjaan Umum |
| 1,03,09 - PROGRAM<br>PENATAAN<br>BANGUNAN DAN<br>LINGKUNGANNYA             |                                                                                                                            |                      |      |                                 | 50,000,000,000,00  |        | 50,000,000,000,00  |        | 50,000,000,000,00  |        | 50,000,000,000,00  |        | 50,000,000,000,00  |                                                      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                            |                      |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                               |
|                                                            |                                                                                            |                      |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                               |
| (01)                                                       | (02)                                                                                       | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                          |
| Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata          | Persentase Bangunan Gedung di Kawasan Strategis Provinsi yang dipelihara dan dirawat       | 2                    | 3    | 42,11                           | 50.000.000.000     | 55,26  | 50.000.000.000     | 71,05  | 50.000.000.000     | 84,21  | 50.000.000.000     | 100    | 50.000.000.000     | 1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
| 1,03,10 - PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN                   |                                                                                            |                      |      |                                 | 483,400,000,000,00 |        | 678,228,000,000,00 |        | 692,641,600,000,00 |        | 711,450,000,000,00 |        | 780,540,000,000,00 |                                               |
| Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman | Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)                                               | 74,7                 | 74,7 | 74,98                           | 483,400,000,000,00 | 75,56  | 678,228,000,000,00 | 76,14  | 692,641,600,000,00 | 76,85  | 711,450,000,000,00 | 77,35  | 780,540,000,000,00 | 1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
| 1,03,11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI             |                                                                                            |                      |      |                                 | 10,000,000,000,00  |        | 10,250,000,000,00  |        | 10,500,000,000,00  |        | 10,750,000,000,00  |        | 11,000,000,000,00  |                                               |
| Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi                  | Persentase Tenaga kerja konstruksi tingkat ahli yang bersertifikasi                        | 100                  | 100  | 20                              | 9.000.000.000      | 40     | 9.250.000.000      | 60     | 9.500.000.000      | 80     | 9.750.000.000      | 100    | 10.000.000.000     | 1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
|                                                            | Persentase Pekerjaan Konstruksi yang di kendalikan                                         | NA                   | 10   | 20                              | 1.000.000.000      | 40     | 1.000.000.000      | 60     | 1.000.000.000      | 80     | 1.000.000.000      | 100    | 1.000.000.000      | 1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |
| 1,03,12 - PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG          |                                                                                            |                      |      |                                 | 4,000,000,000,00   |        | 4,000,000,000,00   |        | 4,000,000,000,00   |        | 4,000,000,000,00   |        | 4,000,000,000,00   |                                               |
| Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang       | Nilai Hasil TURBINLAK Serta kinerja Fungsi dan Manfaat Pada Penyelenggaraan Penataan Ruang | 0,00                 | 0,00 | 60                              | 4.000.000.000      | 64     | 4.000.000.000      | 69     | 4.000.000.000      | 75     | 4.000.000.000      | 81     | 4.000.000.000      | 1,03,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Pekerjaan Umum |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                               |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                             |
|                                                                                   |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                             |
| (01)                                                                              | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                        |
| 1,04 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERUMAHAN DAN<br>KAWASAN<br>PERMUKIMAN |                                                                               |                      |       |                                 | 46,593,000,000,00 |        | 58,900,000,000,00 |        | 57,233,000,000,00 |        | 51,329,000,000,00 |        | 58,979,000,000,00 |                                                                                             |
| 1,04,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI       |                                                                               |                      |       |                                 | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |                                                                                             |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel           | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 15,2                 | 70,01 | 71,01                           | 1,000,000,000,00  | 72,01  | 1,000,000,000,00  | 73,01  | 1,000,000,000,00  | 74,01  | 1,000,000,000,00  | 75     | 1,000,000,000,00  | 1,04,2,10,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
|                                                                                   | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 91                   | 91,9  | 92,1                            |                   | 92,2   |                   | 92,3   |                   | 92,4   |                   | 92,5   |                   | 1,04,2,10,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
|                                                                                   | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 72                   | 75    | 76                              |                   | 77     |                   | 78     |                   | 78,5   |                   | 79     |                   | 1,04,2,10,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perumahan,<br>Kawasan<br>Permukiman dan<br>Pertanahan |
| 1,04,02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>PERUMAHAN                                    |                                                                               |                      |       |                                 | 15.000.000.000    |        | 15.000.000.000    |        | 15.000.000.000    |        | 15.000.000.000    |        | 15.000.000.000    |                                                                                             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                    | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                                                                                         |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                             |
|                                                                                                               |                                                                                         |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                             |
| (01)                                                                                                          | (02)                                                                                    | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                        |
| Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan terkena relokasi akibat program pemerintah | Persentase Rumah Korban Bencana Alam / Rumah Terkena Program Pemerintah Yang Tertangani | 100                  | 100   | 20                              | 15.000.000.000    | 40     | 15.000.000.000    | 60     | 15.000.000.000    | 80     | 15.000.000.000    | 100    | 15.000.000.000    | 1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1,04,03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                                                                          |                                                                                         |                      |       |                                 | 19,593,000,000,00 |        | 26,900,000,000,00 |        | 20,233,000,000,00 |        | 9,329,000,000,00  |        | 11,979,000,000,00 |                                                                             |
| Meningkatnya kualitas kawasan permukiman                                                                      | Persentase Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh                                    | 1,25                 | 10,41 | 20,53                           | 19.593.000.000    | 49,36  | 26.900.000.000    | 70,11  | 20.233.000.000    | 89,49  | 9.329.000.000     | 100    | 11.979.000.000    | 1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1,04,05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)                                       |                                                                                         |                      |       |                                 | 25,000,000,000,00 |        | 30,000,000,000,00 |        | 35,000,000,000,00 |        | 40,000,000,000,00 |        | 45,000,000,000,00 |                                                                             |
| Meningkatnya penyediaan PSU permukiman                                                                        | Persentase Permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)   | 30                   | 30    | 33,33                           | 25.000.000.000    | 50     | 30.000.000.000    | 66,67  | 35.000.000.000    | 83,33  | 40.000.000.000    | 100    | 45.000.000.000    | 1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 1,05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT              |                                                                                         |                      |       |                                 | 62,732,678,022,00 |        | 68,130,477,985,00 |        | 76,928,333,954,00 |        | 78,494,738,617,00 |        | 84,073,256,993,00 |                                                                             |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                               |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                        |
|                                                                             |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                        |
| (01)                                                                        | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                   |
| 1,05,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                               |                      |       |                                 | 42,076,959,067,00 |        | 44,979,468,180,00 |        | 51,048,270,249,00 |        | 49,669,620,912,00 |        | 52,432,257,538,00 |                                                                        |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel     | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 87,8                 | 87,85 | 87,9                            | 42,076,959,067,00 | 88,6   | 44,979,468,180,00 | 88,7   | 51,048,270,249,00 | 88,9   | 49,669,620,912,00 | 89     | 52,432,257,538,00 | 1,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Satuan Polisi<br>Pamong Praja    |
|                                                                             | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 96,6                 | 96,65 | 96,75                           |                   | 96,8   |                   | 96,9   |                   | 97     |                   | 97,61  |                   | 1,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Satuan Polisi<br>Pamong Praja    |
|                                                                             | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 65,15                | 70,01 | 71                              |                   | 73     |                   | 75     |                   | 78     |                   | 80,5   |                   | 1,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Satuan Polisi<br>Pamong Praja    |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 84                   | 84,5  | 85                              |                   | 86     |                   | 88     |                   | 89     |                   | 90     |                   | 1,05,0,00,0,00,02<br>,0000 - Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
|                                                                             | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 70,6                 | 71    | 72                              |                   | 74     |                   | 76     |                   | 78     |                   | 80     |                   | 1,05,0,00,0,00,02<br>,0000 - Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
|                                                                             | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 96,4                 | 96,5  | 96,6                            |                   | 96,7   |                   | 96,8   |                   | 96,9   |                   | 97     |                   | 1,05,0,00,0,00,02<br>,0000 - Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                             | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                                                                  |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                        |
|                                                                                         |                                                                                                  |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                        |
| (01)                                                                                    | (02)                                                                                             | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                   |
| 1,05,02 - PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN<br>UMUM              |                                                                                                  |                      |      |                                 | 5,918,773,850,00  |        | 6,339,925,200,00  |        | 6,970,171,600,00  |        | 7,809,932,600,00  |        | 8,294,680,100,00  |                                                                        |
| Meningkatnya<br>ketenteraman dan<br>ketertiban umum                                     | Persentase Perda<br>dan Perkada yang<br>ditegakkan (%)                                           | 100                  | 100  | 100                             | 5,918,773,750,00  | 100    | 6,339,925,100,00  | 100    | 6,970,171,500,00  | 100    | 7,809,932,500,00  | 100    | 8,294,680,000,00  | 1,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Satuan Polisi<br>Pamong Praja    |
|                                                                                         | Persentase<br>Penyelenggaraan<br>Tibumtranmas<br>(Persentase)                                    | 100                  | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.05.0.00.0.00.01<br>,0000 - Dinas<br>Satuan Polisi<br>Pamong Praja    |
|                                                                                         | Persentase<br>cakupan<br>perlindungan<br>masyarakat                                              | 100                  | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 1.05.0.00.0.00.01<br>,0000 - Dinas<br>Satuan Polisi<br>Pamong Praja    |
| 1,05,03 - PROGRAM<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA                                          |                                                                                                  |                      |      |                                 | 12,800,000,005,00 |        | 14,800,000,005,00 |        | 16,800,000,005,00 |        | 18,800,000,005,00 |        | 21,000,000,005,00 |                                                                        |
| Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>pencegahan dan<br>kesiapsiagaan<br>terhadap bencana | Persentase<br>Cakupan<br>Penyebaran<br>Informasi dan<br>Edukasi Rawan<br>Bencana<br>(Persentase) | 100                  | 100  | 100                             | 3.000.000.000     | 100    | 3.500.000.000     | 100    | 4.000.000.000     | 100    | 4.500.000.000     | 100    | 5.000.000.000     | 1,05,0,00,0,00,02<br>,0000 - Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |
| Meningkatnya<br>penanganan<br>bencana pada saat<br>tanggap darurat                      | Persentase<br>penanganan<br>tanggap bencana<br>darurat (%)                                       | 100                  | 100  | 100                             | 7.800.000.000     | 100    | 8.800.000.000     | 100    | 9.800.000.000     | 100    | 10.800.000.000    | 100    | 11.800.000.000    | 1,05,0,00,0,00,02<br>,0000 - Badan<br>Penanggulangan<br>Bencana Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                   | INDIKATOR OUTCOME                                                 | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                                                                   |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                          |
|                                                                                                     |                                                                   |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                          |
| (01)                                                                                                | (02)                                                              | (03)          | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                     |
| Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana                                             | Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)                  | 100           | 100  | 100                             | 1.000.000.000     | 100    | 1.500.000.000     | 100    | 2.000.000.000     | 100    | 2.500.000.000     | 100    | 3.000.000.000     | 1,05,0,00,0,00,02,0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah             |
| 1,05,04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN |                                                                   |               |      |                                 | 1,936,945,100,00  |        | 2,011,084,600,00  |        | 2,109,892,100,00  |        | 2,215,185,100,00  |        | 2,346,319,350,00  |                                                                          |
| Meningkatnya kesiapsiagaan pencegahan bahaya kebakaran di daerah rawan kebakaran                    | Indeks Penyelenggaraan Kebakaran (Indeks)                         | 0             | 0    | 60                              | 1,936,945,000,00  | 65     | 2,011,084,500,00  | 70     | 2,109,892,000,00  | 75     | 2,215,185,000,00  | 80     | 2,346,319,250,00  | 1,05,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Satuan Polisi Pamong Praja                |
| 1,06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL                                                            |                                                                   |               |      |                                 | 30,662,069,600,00 |        | 31,622,686,331,00 |        | 32,559,169,600,00 |        | 33,531,169,600,00 |        | 34,563,294,600,00 |                                                                          |
| 1,06,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                     |                                                                   |               |      |                                 | 17,950,000,000,00 |        | 18,055,000,000,00 |        | 18,110,000,000,00 |        | 18,190,000,000,00 |        | 18,270,000,000,00 |                                                                          |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel                                      | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 80            | 80   | 80                              | 17,950,000,000,00 | 80     | 18,055,000,000,00 | 80     | 18,110,000,000,00 | 80     | 18,190,000,000,00 | 80     | 18,270,000,000,00 | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                          |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                            |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030                                                                     |                  |                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                                                                                            |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                                                   | PAGU             |                                                                          |
| (01)                                    | (02)                                                                                                                                                                                                       | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)                                                                     | (14)             | (15)                                                                     |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                                                                                                                                                  | 80                   | 80   | 80                              |                  | 80     |                  | 80     |                  | 80     |                  | 80                                                                       |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                                                                                                                        | 70                   | 70   | 70                              |                  | 70     |                  | 70     |                  | 80     |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                                                                          |
| 1,06,02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   |                                                                                                                                                                                                            |                      |      |                                 | 1,875,000,000,00 |        | 1,930,016,731,00 |        | 2,000,000,000,00 |        | 2,200,000,000,00 |                                                                          | 2,260,000,000,00 |                                                                          |
| Meningkatnya Pemberdayaan Sosial        | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (Persentase) | 100                  | 100  | 100                             | 1,875,000,000,00 | 100    | 1,930,016,731,00 | 100    | 2,000,000,000,00 | 100    | 2,200,000,000,00 | 100                                                                      | 2,260,000,000,00 | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                         | Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (Persentase)                                                                   | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                                                                          |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                               | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                          |
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                          |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                               | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                                                     |
|                                                                                            | Persentase<br>Pekerja Sosial/<br>Tenaga<br>Kesejahteraan<br>Sosial yang<br>Melaksanakan<br>Pelayanan Sosial<br>di Dalam Panti<br>Rehabilitasi<br>Sosial bagi<br>Pemerlu<br>Pelayanan<br>Kesejahteraan<br>Sosial (PPKS)<br>Lainnya di luar<br>HIV/AIDS dan<br>NAPZA<br>(Persentase) | 100                  | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 1,06,2,12,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Sosial,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                            | Persentase<br>peningkatan<br>Kualitas<br>Pemberdayaan<br>Potensi dan<br>Sumber<br>Kesejahteraan<br>Sosial dalam<br>Penyelenggaraan<br>Program Kessos<br>(Predikat)                                                                                                                 | 100                  | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 100    |                | 1,06,2,12,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Sosial,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
| 1,06,03 - PROGRAM<br>PENANGANAN<br>WARGA NEGARA<br>MIGRAN KORBAN<br>TINDAK<br>KEKERASAN    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |      |                                 | 250,000,000,00 |        | 275,000,000,00 |        | 280,000,000,00 |        | 300,000,000,00 |        | 300,000,000,00 |                                                                                          |
| Meningkatnya<br>Layanan<br>Penanganan Warga<br>Negara Migran<br>Korban Tindak<br>Kekerasan | Persentase<br>Warga Negara<br>Migran Korban<br>Tindak<br>Kekerasana yang<br>di fasilitasi<br>(Angka)                                                                                                                                                                               | 96,6                 | 96,6 | 97,5                            | 250,000,000,00 | 97,8   | 275,000,000,00 | 97,9   | 280,000,000,00 | 98     | 300,000,000,00 | 100    | 300,000,000,00 | 1,06,2,12,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Sosial,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                                                   |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                          |
|                                         |                                                                                                                                   |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                          |
| (01)                                    | (02)                                                                                                                              | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                     |
|                                         | Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)                                               | 96,6                 | 96,6  | 97,5                            |                  | 97,8   |                  | 97,9   |                  | 98     |                  | 100    |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1,06,04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   |                                                                                                                                   |                      |       |                                 | 7,277,069,600,00 |        | 7,687,669,600,00 |        | 8,214,169,600,00 |        | 8,486,169,600,00 |        | 9,053,294,600,00 |                                                                          |
| Meningkatnya Rehabilitasi Sosial        | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)                                                      | 100                  | 100   | 100                             | 7,277,069,600,00 | 100    | 7,687,669,600,00 | 100    | 8,214,169,600,00 | 100    | 8,486,169,600,00 | 100    | 9,053,294,600,00 | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                         | Persentase gelandang dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)                                                           | 12,5                 | 15,6  | 15,6                            |                  | 15,6   |                  | 20,83  |                  | 20,83  |                  | 20,83  |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                         | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)                                               | 100                  | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                         | Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%) | 13,25                | 22,09 | 22,09                           |                  | 22,09  |                  | 22,09  |                  | 22,09  |                  | 22,09  |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                           | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                          |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                   |                                                                                                |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030                                                                     |                  |                                                                          |
|                                                   |                                                                                                |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                                                   | PAGU             |                                                                          |
| (01)                                              | (02)                                                                                           | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)                                                                     | (14)             | (15)                                                                     |
|                                                   | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase) | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100                                                                      |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| 1,06,05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |                                                                                                |                      |      |                                 | 2,100,000,000,00 |        | 2,200,000,000,00 |        | 2,250,000,000,00 |        | 2,305,000,000,00 |                                                                          | 2,330,000,000,00 |                                                                          |
| Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial      | Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi                              | 0,2                  | 0,22 | 0,25                            | 2,100,000,000,00 | 0,27   | 2,200,000,000,00 | 0,3    | 2,250,000,000,00 | 0,32   | 2,305,000,000,00 | 0,35                                                                     | 2,330,000,000,00 | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                   | Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar                                     | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                                                                          |
| 1,06,06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA              |                                                                                                |                      |      |                                 | 510,000,000,00   |        | 675,000,000,00   |        | 805,000,000,00   |        | 1,025,000,000,00 |                                                                          | 1,200,000,000,00 |                                                                          |
| Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Korban Bencana Sesuai SPM                                       | 96,4                 | 96,4 | 96,4                            | 510,000,000,00   | 96,6   | 675,000,000,00   | 96,8   | 805,000,000,00   | 97     | 1,025,000,000,00 | 97                                                                       | 1,200,000,000,00 | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                     |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                          |
|                                                                             |                                                                                     |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                          |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                     |
| 1,06,07 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>TAMAN MAKAM<br>PAHLAWAN                 |                                                                                     |                      |       |                                 | 700,000,000,00    |        | 800,000,000,00    |        | 900,000,000,00    |        | 1,025,000,000,00  |        | 1,150,000,000,00  |                                                                                          |
| Meningkatnya tata<br>kelola Taman<br>Makam Pahlawan                         | Persentase taman<br>makam pahlawan<br>nasional yang<br>terkelola dengan<br>baik (%) | 100                  | 100   | 100                             | 700,000,000,00    | 100    | 800,000,000,00    | 100    | 900,000,000,00    | 100    | 1,025,000,000,00  | 100    | 1,150,000,000,00  | 1,06,2,12,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Sosial,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
| 2,07 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG TENAGA<br>KERJA                     |                                                                                     |                      |       |                                 | 32,021,100,000,00 |        | 33,351,200,000,00 |        | 34,681,300,000,00 |        | 36,011,400,000,00 |        | 37,341,500,000,00 |                                                                                          |
| 2,07,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                                     |                      |       |                                 | 22,000,000,000,00 |        | 23,000,000,000,00 |        | 24,000,000,000,00 |        | 25,000,000,000,00 |        | 26,000,000,000,00 |                                                                                          |
| Terwujudnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik Yang Prima<br>dan Akuntabel     | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD )             | 22,4                 | 70,01 | 75                              | 22,000,000,000,00 | 77     | 23,000,000,000,00 | 79     | 24,000,000,000,00 | 80     | 25,000,000,000,00 | 81     | 26,000,000,000,00 | 2,07,3,32,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi                   |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                                     | 84,91                | 84,91 | 85                              |                   | 85,5   |                   | 85,7   |                   | 85,9   |                   | 86     |                   | 2,07,3,32,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi                   |
|                                                                             | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                           | 70,6                 | 72    | 72,5                            |                   | 74     |                   | 76     |                   | 78     |                   | 80,01  |                   | 2,07,3,32,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Tenaga Kerja dan<br>Transmigrasi                   |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                | INDIKATOR OUTCOME                                                               | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                 |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                              |
|                                                                  |                                                                                 |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                              |
| (01)                                                             | (02)                                                                            | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                         |
| 2,07,02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                       |                                                                                 |               |       |                                 | 120,000,000,00   |        | 130,000,000,00   |        | 140,000,000,00   |        | 150,000,000,00   |        | 160,000,000,00   |                                                              |
| Meningkatnya pengelolaan Informasi Tenaga Kerja                  | Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja (%)                | 27,27         | 27,27 | 45,4                            | 120,000,000,00   | 54,5   | 130,000,000,00   | 72,7   | 140,000,000,00   | 90,9   | 150,000,000,00   | 100    | 160,000,000,00   | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2,07,03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA |                                                                                 |               |       |                                 | 7,000,000,000,00 |        | 7,100,000,000,00 |        | 7,200,000,000,00 |        | 7,300,000,000,00 |        | 7,400,000,000,00 |                                                              |
| Meningkatnya produktivitas tenaga kerja                          | Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%) | 5,44          | 5,44  | 5,5                             | 7,000,000,000,00 | 5,6    | 7,100,000,000,00 | 5,7    | 7,200,000,000,00 | 5,8    | 7,300,000,000,00 | 5,9    | 7,400,000,000,00 | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2,07,04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                        |                                                                                 |               |       |                                 | 1,000,000,000,00 |        | 1,100,000,000,00 |        | 1,200,000,000,00 |        | 1,300,000,000,00 |        | 1,400,000,000,00 |                                                              |
| Meningkatnya penempatan tenaga kerja                             | Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)           | 34,9          | 34,95 | 35                              | 1,000,000,000,00 | 35,1   | 1,100,000,000,00 | 35,2   | 1,200,000,000,00 | 35,3   | 1,300,000,000,00 | 35,4   | 1,400,000,000,00 | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 2,07,05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL                            |                                                                                 |               |       |                                 | 800,000,000,00   |        | 820,000,000,00   |        | 840,000,000,00   |        | 860,000,000,00   |        | 880,000,000,00   |                                                              |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                              | INDIKATOR OUTCOME                                                          | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                                            |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                    |
|                                                                                |                                                                            |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                    |
| (01)                                                                           | (02)                                                                       | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                               |
| Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi                                | Persentase peningkatan kelembagaan keternagakerjaan                        | 9,4           | 9,5   | 9,6                             | 400,000,000,00    | 9,7    | 410,000,000,00    | 9,8    | 420,000,000,00    | 9,9    | 430,000,000,00    | 10     | 440,000,000,00    | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                       |
| 2,07,06 - PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAA N                                  |                                                                            |               |       |                                 | 1,100,000,000,00  |        | 1,200.000,000,00  |        | 1,300,000,000,00  |        | 1,400,000,000,00  |        | 1,500,000,000,00  |                                                                                                    |
| Terlindunginya hak-hak pekerja                                                 | Persentase peningkatan kepatuhan terhadap norma-norma tenaga kerja (Angka) | 98,6          | 98,6  | 98,7                            | 1,100,000,000,00  | 98,8   | 1,200.000,000,00  | 98,9   | 1,300,000,000,00  | 99     | 1,400,000,000,00  | 99,1   | 1,500,000,000,00  | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                       |
| 2,08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK |                                                                            |               |       |                                 | 23,625,000,000,00 |        | 24,745,000,000,00 |        | 26,798,000,000,00 |        | 27,270,600,000,00 |        | 31,550,460,000,00 |                                                                                                    |
| 2,08,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                |                                                                            |               |       |                                 | 12,000,000,000,00 |        | 12,710,000,000,00 |        | 14,397,000,000,00 |        | 14,397,000,000,00 |        | 18,397,000,000,00 |                                                                                                    |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel                 | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)          | 16,54         | 70,01 | 70,25                           | 12,000,000,000,00 | 70,5   | 12,710,000,000,00 | 71     | 14,397,000,000,00 | 71,25  | 14,397,000,000,00 | 71,75  | 18,397,000,000,00 | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                               | INDIKATOR OUTCOME                                                                        | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                          |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                    |
|                                                                                                 |                                                                                          |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                    |
| (01)                                                                                            | (02)                                                                                     | (03)          | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                                               |
|                                                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (Predikat)                                                    | 75            | 80   | 82                              |                  | 83     |                  | 85     |                  | 88     |                  | 88     |                  | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|                                                                                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                      | 76,25         | 77   | 77,75                           |                  | 78,5   |                  | 79,25  |                  | 80     |                  | 80,75  |                  | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 2,08,02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                            |                                                                                          |               |      |                                 | 5,125,000,000,00 |        | 5,210,000,000,00 |        | 5,301,000,000,00 |        | 5,398,600,000,00 |        | 5,503,460,000,00 |                                                                                                    |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)                                  | 51,17         | 52,6 | 54,8                            | 5,125,000,000,00 | 55,35  | 5,210,000,000,00 | 55,8   | 5,301,000,000,00 | 56,46  | 5,398,600,000,00 | 56,75  | 5,503,460,000,00 | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 2,08,03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                        |                                                                                          |               |      |                                 | 2,725,000,000,00 |        | 2,725,000,000,00 |        | 2,725,000,000,00 |        | 2,725,000,000,00 |        | 2,725,000,000,00 |                                                                                                    |
| Menurunnya kekerasan terhadap perempuan                                                         | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%) | 100           | 100  | 100                             | 2,725,000,000,00 | 100    | 2,725,000,000,00 | 100    | 2,725,000,000,00 | 100    | 2,725,000,000,00 | 100    | 2,725,000,000,00 | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                                      | INDIKATOR OUTCOME                                                                                | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                                                                                                  |               |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                    |
|                                                                                                                        |                                                                                                  |               |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                    |
| (01)                                                                                                                   | (02)                                                                                             | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                                               |
| 2,08,04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                        |                                                                                                  |               |       |                                 | 1,325,000,000,00 |        | 1,325,000,000,00 |        | 1,325,000,000,00 |        | 1,525,000,000,00 |        | 1,525,000,000,00 |                                                                                                    |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak | Persentase pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar | NA            | 100   | 100                             | 1,325,000,000,00 | 100    | 1,325,000,000,00 | 100    | 1,325,000,000,00 | 100    | 1,525,000,000,00 | 100    | 1,525,000,000,00 | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 2,08,05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                              |                                                                                                  |               |       |                                 | 300,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |                                                                                                    |
| Tersedianya sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,          | Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak (%)                                           | 100           | 100   | 100                             | 300,000,000,00   | 100    | 300,000,000,00   | 100    | 300,000,000,00   | 100    | 300,000,000,00   | 100    | 300,000,000,00   | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 2,08,06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                             |                                                                                                  |               |       |                                 | 1,100,000,000,00 |        | 1,200,000,000,00 |        | 1,350,000,000,00 |        | 1,350,000,000,00 |        | 1,350,000,000,00 |                                                                                                    |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                               | Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)                                                                 | 61,08         | 61,13 | 61,18                           | 1.100.000.000    | 61,23  | 1.200.000.000    | 61,28  | 1.350.000.000    | 61,33  | 1.350.000.000    | 61,38  | 1.350.000.000    | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                       |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                          |
| (01)                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                  | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                   | Persentase<br>Kabupaten/Kota<br>Layak Anak (%)                                                        | 80                   | 85    | 90                              |                   | 95     |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 2,08,2,13,2,14,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak dan<br>Pengendalian<br>Penduduk |
| 2,08,07 - PROGRAM<br>PERLINDUNGAN<br>KHUSUS ANAK                                                                                                                  |                                                                                                       |                      |       |                                 | 1,050,000,000,00  |        | 1,275,000,000,00  |        | 1,400,000,000,00  |        | 1,575,000,000,00  |        | 1,750,000,000,00  |                                                                                                                          |
| Meningkatnya<br>pencegahan dan<br>penanganan tindak<br>kekerasan<br>eksploitasi,<br>penelantaran<br>perkawinan dan<br>perlakuan salah<br>lainnya terhadap<br>anak | Persentase anak<br>memerlukan<br>perlindungan<br>khusus yang<br>mendapatkan<br>layanan<br>komperehsif | 100                  | 100   | 100                             | 300,000,000,00    | 100    | 500,000,000,00    | 100    | 600,000,000,00    | 100    | 750,000,000,00    | 100    | 900,000,000,00    | 2,08,2,13,2,14,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak dan<br>Pengendalian<br>Penduduk |
| 2,09 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG PANGAN                                                                                                                    |                                                                                                       |                      |       |                                 | 38,500,000,000,00 |        | 42,250,000,000,00 |        | 46,000,000,000,00 |        | 49,750,000,000,00 |        | 53,500,000,000,00 |                                                                                                                          |
| 2,09,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                                                                       |                                                                                                       |                      |       |                                 | 17,500,000,000,00 |        | 19,000,000,000,00 |        | 20,500,000,000,00 |        | 22,000,000,000,00 |        | 23,500,000,000,00 |                                                                                                                          |
| Terwujudnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik Yang Prima<br>dan Akuntabel                                                                                           | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD ()                              | 15,4                 | 70,01 | 71                              | 17,500,000,000,00 | 72     | 19,000,000,000,00 | 73     | 20,500,000,000,00 | 74     | 22,000,000,000,00 | 75     | 23,500,000,000,00 | 2,09,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Ketahanan<br>Pangan                                                                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                           |                                            |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                 |
|                                                                                           |                                            |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                 |
| (01)                                                                                      | (02)                                       | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                            |
|                                                                                           | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)  | 89,9                 | 90    | 90                              |                   | 90,1   |                   | 90,2   |                   | 90,3   |                   | 90,4   |                   | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |
|                                                                                           | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)        | 65,7                 | 70    | 72                              |                   | 74     |                   | 76     |                   | 78     |                   | 80,1   |                   | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |
| 2,09,02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN |                                            |                      |       |                                 | 3,000,000,000,00  |        | 3,100,000,000,00  |        | 3,200,000,000,00  |        | 3,300,000,000,00  |        | 3,400,000,000,00  |                                                 |
| Meningkatnya pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan       | Persentase Pemenuhan Cadangan Pangan Ideal | 66,96                | 66,96 | 73,57                           | 3,000,000,000,00  | 80,18  | 3,100,000,000,00  | 86,78  | 3,200,000,000,00  | 93,29  | 3,300,000,000,00  | 100    | 3,400,000,000,00  | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |
| 2,09,03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               |                                            |                      |       |                                 | 10,000,000,000,00 |        | 11,000,000,000,00 |        | 12,000,000,000,00 |        | 13,000,000,000,00 |        | 14,000,000,000,00 |                                                 |
| Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat                                | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi          | 92,5                 | 95,5  | 95,5                            | 10,000,000,000,00 | 95,8   | 11,000,000,000,00 | 96,1   | 12,000,000,000,00 | 96,4   | 13,000,000,000,00 | 96,7   | 14,000,000,000,00 | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME          | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                    | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025      | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |           |                   |           |                   |           |                   |           |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                         |                      |           | 2026                            |                   | 2027      |                   | 2028      |                   | 2029      |                   | 2030      |                   |                                                 |
|                                                  |                                                                                         |                      |           | TARGET                          | PAGU              | TARGET    | PAGU              | TARGET    | PAGU              | TARGET    | PAGU              | TARGET    | PAGU              |                                                 |
| (01)                                             | (02)                                                                                    | (03)                 | (04)      | (05)                            | (06)              | (07)      | (08)              | (09)      | (10)              | (11)      | (12)              | (13)      | (14)              | (15)                                            |
|                                                  | Skor Pola Pangan Harapan ketersediaan                                                   | 93,64                | 93,7      | 94                              |                   | 94,5      |                   | 94,8      |                   | 95        |                   | 95,5      |                   | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |
|                                                  | inflasi Pangan bergejolak                                                               | 1,0 - 3,0            | 1,0 - 3,0 | 1,0 - 3,0                       |                   | 1,0 - 3,0 |                   | 1,0 - 3,0 |                   | 1,0 - 3,0 |                   | 1,0 - 3,0 |                   | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |
| 2,09,04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN    |                                                                                         |                      |           |                                 | 5,000,000,000,00  |           | 6,000,000,000,00  |           | 7,000,000,000,00  |           | 8,000,000,000,00  |           | 9,000,000,000,00  |                                                 |
| Meningkatnya penanganan kerawanan pangan         | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)                                               | 20,58                | 17,38     | 15,78                           | 5,000,000,000,00  | 14,18     | 6,000,000,000,00  | 12,58     | 7,000,000,000,00  | 10,98     | 8,000,000,000,00  | 9,38      | 9,000,000,000,00  | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |
| 2,09,05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN     |                                                                                         |                      |           |                                 | 3,000,000,000,00  |           | 3,150,000,000,00  |           | 3,300,000,000,00  |           | 3,450,000,000,00  |           | 3,600,000,000,00  |                                                 |
| Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan | Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase) | 86,42                | 86,5      | 86,5                            | 3,000,000,000,00  | 87        | 3,150,000,000,00  | 87,5      | 3,300,000,000,00  | 88        | 3,450,000,000,00  | 88,5      | 3,600,000,000,00  | 2,09,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Ketahanan Pangan |
| 2,10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN     |                                                                                         |                      |           |                                 | 15,000,000,000,00 |           | 16,000,000,000,00 |           | 17,000,000,000,00 |           | 18,000,000,000,00 |           | 19,000,000,000,00 |                                                 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                  | INDIKATOR OUTCOME                                                           | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                             |               |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                             |
|                                                                                    |                                                                             |               |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                             |
| (01)                                                                               | (02)                                                                        | (03)          | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                        |
| 2,10,03 - PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM                           |                                                                             |               |      |                                 | 10,000,000,000,00 |        | 10,000,000,000,00 |        | 10,000,000,000,00 |        | 10,000,000,000,00 |        | 10,000,000,000,00 |                                                                             |
| Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan umum                             | Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum                           | 0             | 0    | 33,33                           | 10.000.000.000    | 50     | 10.000.000.000    | 66,67  | 10.000.000.000    | 83,33  | 10.000.000.000    | 100    | 10.000.000.000    | 1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2,10,05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN |                                                                             |               |      |                                 | 5,000,000,000,00  |        | 6,000,000,000,00  |        | 7,000,000,000,00  |        | 8,000,000,000,00  |        | 9,000,000,000,00  |                                                                             |
| Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan      | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | 0             | 0    | 33,33                           | 5,000,000,000,00  | 50     | 6,000,000,000,00  | 66,67  | 7,000,000,000,00  | 83,33  | 8,000,000,000,00  | 100    | 9,000,000,000,00  | 1,04,2,10,0,00,01,0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan |
| 2,11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                 |                                                                             |               |      |                                 | 30,930,000,000,00 |        | 34,876,000,000,00 |        | 38,195,000,000,00 |        | 40,790,000,000,00 |        | 42,520,000,000,00 |                                                                             |
| 2,11,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                    |                                                                             |               |      |                                 | 22,000,000,000,00 |        | 23,935,000,000,00 |        | 25,775,000,000,00 |        | 27,330,000,000,00 |        | 28,550,000,000,00 |                                                                             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                             | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                  |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                 |
|                                                                        |                                                                                  |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                 |
| (01)                                                                   | (02)                                                                             | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                            |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                              | 79,85                | 79   | 79,25                           | 22,000,000,000,00 | 79,5   | 23,935,000,000,00 | 79,75  | 25,775,000,000,00 | 80     | 27,330,000,000,00 | 80,25  | 28,550,000,000,00 | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
|                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                        | 86,22                | 84   | 86,42                           |                   | 86,52  |                   | 86,62  |                   | 86,72  |                   | 86,82  |                   | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
|                                                                        | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                | 85,4                 | 85,5 | 85,6                            |                   | 85,7   |                   | 85,8   |                   | 85,9   |                   | 86     |                   | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
|                                                                        | Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Laboratorium Lingkungan | 18                   | 7,5  | 11,11                           |                   | 12     |                   | 14,04  |                   | 13,05  |                   | 2,07   |                   | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
| 2,11,02 - PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP                         |                                                                                  |                      |      |                                 | 400,000,000,00    |        | 950,000,000,00    |        | 950,000,000,00    |        | 600,000,000,00    |        | 900,000,000,00    |                                                 |
| Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP | Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti               | 100                  | 100  | 100                             | 400,000,000,00    | 100    | 950,000,000,00    | 100    | 950,000,000,00    | 100    | 600,000,000,00    | 100    | 900,000,000,00    | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                           |
|                                                                                                 |                                                                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                           |
| (01)                                                                                            | (02)                                                                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                      |
| 2,11,03 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PENCEMARAN<br>DAN/ATAU<br>KERUSAKAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP |                                                                                                                                 |                      |       |                                 | 4,050,000,000,00 |        | 4,535,000,000,00 |        | 4,825,000,000,00 |        | 5,145,000,000,00 |        | 5,415,000,000,00 |                                                           |
| Menurunnya<br>pencemaran<br>dan/atau<br>kerusakan<br>lingkungan hidup                           | Indeks Kualitas<br>Air (Indeks)                                                                                                 | 55,58                | 69,78 | 69,98                           | 4,050,000,000,00 | 70,18  | 4,535,000,000,00 | 70,38  | 4,825,000,000,00 | 70,58  | 5,145,000,000,00 | 70,58  | 5,415,000,000,00 | 2,11,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
|                                                                                                 | Indeks Kualitas<br>Udara (Indeks)                                                                                               | 92,98                | 77,71 | 78,01                           |                  | 78,31  |                  | 78,61  |                  | 78,91  |                  | 78,91  |                  | 2,11,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
|                                                                                                 | Persentase<br>penyelesaian<br>inventarisasi<br>pengendalian<br>emisi GRK,<br>mitigasi dan<br>adaptasi<br>perubahan iklim<br>(%) | 100                  | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 2,11,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
|                                                                                                 | Persentase<br>penyelesaian<br>pengujian yang<br>dilaksanakan<br>oleh laboratorium<br>lingkungan (%)                             | 100                  | 100   | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 2,11,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
| 2,11,04 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KEANEKARAGAMA<br>N HAYATI (KEHATI)                          |                                                                                                                                 |                      |       |                                 | 100,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |        | 250,000,000,00   |        | 550,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |                                                           |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                               | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                    |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                    |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                 |
| (01)                                                                                                                              | (02)                                                                               | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                            |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati                                                                           | Persentase RTH (Persentase)                                                        | 0                    | 0     | 7                               | 100,000,000,00   | 24     | 500,000,000,00   | 15     | 250,000,000,00   | 31     | 550,000,000,00   | 23     | 500,000,000,00   | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
| 2,11,05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)                |                                                                                    |                      |       |                                 | 475,000,000,00   |        | 525,000,000,00   |        | 575,000,000,00   |        | 975,000,000,00   |        | 675,000,000,00   |                                                 |
| Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)                           | Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)                                   | 0                    | 11,21 | 20                              | 475,000,000,00   | 20     | 525,000,000,00   | 20     | 575,000,000,00   | 20     | 975,000,000,00   | 20     | 675,000,000,00   | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
|                                                                                                                                   | Indeks Risiko Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 skala Provinsi Jambi (Poin) | 3,6                  | 3,6   | 3,5                             |                  |        |                  | 3,5    |                  |        |                  | 3,4    |                  |                                                 |
| 2,11,06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |                                                                                    |                      |       |                                 | 1,305,000,000,00 |        | 1,731,000,000,00 |        | 2,020,000,000,00 |        | 2,340,000,000,00 |        | 2,660,000,000,00 |                                                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                 | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                 |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                 |
| (01)                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                  | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                            |
| Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan                         | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi (%) | 70                   | 75   | 30                              | 1,305,000,000,00 | 30     | 1,731,000,000,00 | 25     | 2,020,000,000,00 | 25     | 2,340,000,000,00 | 20     | 2,660,000,000,00 | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
| 2,11,07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH |                                                                                                                                                       |                      |      |                                 | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |                                                 |
| Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH             | Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)                                                                                            | 79                   | 86   | 20                              | 500,000,000,00   | 40     | 500,000,000,00   | 60     | 500,000,000,00   | 80     | 500,000,000,00   | 100    | 500,000,000,00   | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |
| 2,11,08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                    |                                                                                                                                                       |                      |      |                                 | 450,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |                                                 |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup                                                                      | Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)                                                                     | 0                    | 0    | 100                             | 450,000,000,00   | 100    | 450,000,000,00   | 100    | 500,000,000,00   | 100    | 500,000,000,00   | 100    | 500,000,000,00   | 2,11,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Lingkungan Hidup |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                            |                      |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                           |
|                                                                                                              |                                                                                                                            |                      |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                           |
| (01)                                                                                                         | (02)                                                                                                                       | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                      |
| 2,11,09 - PROGRAM<br>PENGHARGAAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP UNTUK<br>MASYARAKAT                                  |                                                                                                                            |                      |      |                                 | 300,000,000,00 |        | 300,000,000,00 |        | 300,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |                                                           |
| Meningkatnya<br>kinerja pemangku<br>kepentingan dalam<br>perlindungan dan<br>pengelolaan<br>lingkungan hidup | Persentase<br>Partisipasi<br>Masyarakat<br>dalam<br>Perlindungan dan<br>Pengelolaan<br>Lingkungan<br>Hidup<br>(Persentase) | 0                    | 0    | 20                              | 300,000,000,00 | 20     | 300,000,000,00 | 20     | 300,000,000,00   | 20     | 300,000,000,00   | 20     | 300,000,000,00   | 2,11,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
| 2,11,10 - PROGRAM<br>PENANGANAN<br>PENGADUAN<br>LINGKUNGAN<br>HIDUP                                          |                                                                                                                            |                      |      |                                 | 600,000,000,00 |        | 600,000,000,00 |        | 700,000,000,00   |        | 700,000,000,00   |        | 620,000,000,00   |                                                           |
| Meningkatnya<br>penyelesaian<br>sengketa/kasus<br>tindak pidana<br>lingkungan hidup                          | Persentase<br>Penyelesaian<br>Sengketa/Kasus<br>Tindak Pidana<br>Lingkungan<br>Hidup<br>(Persentase)                       | 100                  | 100  | 100                             | 600,000,000,00 | 100    | 600,000,000,00 | 100    | 700,000,000,00   | 100    | 700,000,000,00   | 100    | 620,000,000,00   | 2,11,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |
| 2,11,11 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERSAMPAHAN                                                              |                                                                                                                            |                      |      |                                 | 750,000,000,00 |        | 850,000,000,00 |        | 1,800,000,000,00 |        | 1,850,000,000,00 |        | 1,900,000,000,00 |                                                           |
| Meningkatnya tata<br>kelola persampahan                                                                      | Indeks Kinerja<br>Pengelolaan<br>Sampah (IKPS)<br>(poin)                                                                   | 55                   | 55   | 55                              | 750,000,000,00 | 56     | 850,000,000,00 | 56     | 1,800,000,000,00 | 57     | 1,850,000,000,00 | 57     | 1,900,000,000,00 | 2,11,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                    |                                                                                          |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                          |
|                                                                                                    |                                                                                          |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                          |
| (01)                                                                                               | (02)                                                                                     | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                                     |
| 2,12 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>ADMINISTRASI<br>KEPENDUDUKAN<br>DAN PENCATATAN<br>SIPIL |                                                                                          |                      |      |                                 | 2,325,000,000,00 |        | 2,655,000,000,00 |        | 2,985,000,000,00 |        | 3,340,000,000,00 |        | 3,670,000,000,00 |                                                                                          |
| 2,12,02 - PROGRAM<br>PENDAFTARAN<br>PENDUDUK                                                       |                                                                                          |                      |      |                                 | 700,000,000,00   |        | 800,000,000,00   |        | 900,000,000,00   |        | 1,025,000,000,00 |        | 1,150,000,000,00 |                                                                                          |
| Meningkatnya<br>Kualitas Layanan<br>Pendaftaran<br>Penduduk                                        | Persentase<br>kepemilikan<br>Identitas<br>Kependudukan<br>Digital (IKD) (%)              | 4,9                  | 20   | 21                              | 700,000,000,00   | 22     | 800,000,000,00   | 23     | 900,000,000,00   | 24     | 1,025,000,000,00 | 25     | 1,150,000,000,00 | 1,06,2,12,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Sosial,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
|                                                                                                    | Persentase<br>Kepemilikan<br>Kartu Identitas<br>Anak (Persentase)                        | 56,31                | 60   | 65                              |                  | 70     |                  | 75     |                  | 80     |                  | 85     |                  | 1,06,2,12,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Sosial,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |
| 2,12,03 - PROGRAM<br>PENCATATAN SIPIL                                                              |                                                                                          |                      |      |                                 | 700,000,000,00   |        | 800,000,000,00   |        | 900,000,000,00   |        | 1,025,000,000,00 |        | 1,125,000,000,00 |                                                                                          |
| Meningkatnya<br>kualitas layanan<br>pencatatan sipil                                               | Persentase Akta<br>Kelahiran yang<br>Diterbitkan bagi<br>yang Melaporkan<br>(Persentase) | 98                   | 98   | 98                              | 700,000,000,00   | 98     | 800,000,000,00   | 98     | 900,000,000,00   | 98     | 1,025,000,000,00 | 98     | 1,125,000,000,00 | 1,06,2,12,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Sosial,<br>Kependudukan<br>dan Pencatatan<br>Sipil |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                  |        |                  |                                                                          |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                               |                      |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030                                                                     |                  |                                                                          |
|                                                                   |                                                                               |                      |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                                                   | PAGU             |                                                                          |
| (01)                                                              | (02)                                                                          | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)                                                                     | (14)             | (15)                                                                     |
|                                                                   | Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)   | 100                  | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                  | 100    |                  | 100                                                                      |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                   | Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100                  | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                  | 100    |                  | 100                                                                      |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                   | Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase) | 100                  | 100  | 100                             |                | 100    |                | 100    |                  | 100    |                  | 100                                                                      |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|                                                                   | Persentase Pemenuhan Pencatatan Sipil (%)                                     | 98                   | 98   | 99                              |                | 99     |                | 99     |                  | 100    |                  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                  |                                                                          |
| 2,12,04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |                                                                               |                      |      |                                 | 850,000,000,00 |        | 975,000,000,00 |        | 1,100,000,000,00 |        | 1,200,000,000,00 |                                                                          | 1,300,000,000,00 |                                                                          |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                              |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                   |                                                                                                    |
|                                                                    |                                                                              |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              |                                                                                                    |
| (01)                                                               | (02)                                                                         | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)              | (15)                                                                                               |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan                    | Persentase Informasi Kependudukan yang Diimplementasikan (Persentase)        | 100                  | 100  | 100                             | 850,000,000,00   | 100    | 975,000,000,00   | 100    | 1,100,000,000,00 | 100    | 1,200,000,000,00 | 100    | 1,300,000,000,00  | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
| 2,12,05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN                  |                                                                              |                      |      |                                 | 75,000,000,00    |        | 80,000,000,00    |        | 85,000,000,00    |        | 90,000,000,00    |        | 95,000,000,00     |                                                                                                    |
| Meningkatnya kualitas profil kependudukan                          | Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)                         | 100                  | 100  | 100                             | 75,000,000,00    | 100    | 80,000,000,00    | 100    | 85,000,000,00    | 100    | 90,000,000,00    | 100    | 95,000,000,00     | 1,06,2,12,0,00,01,0000 - Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil                           |
| 2,13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA |                                                                              |                      |      |                                 | 8,550,000,000,00 |        | 8,975,000,000,00 |        | 9,550,000,000,00 |        | 9,975,000,000,00 |        | 10,750,000,000,00 |                                                                                                    |
| 2,13,02 - PROGRAM PENATAAN DESA                                    |                                                                              |                      |      |                                 | 1,050,000,000,00 |        | 1,075,000,000,00 |        | 1,100,000,000,00 |        | 1,175,000,000,00 |        | 1,200,000,000,00  |                                                                                                    |
| Meningkatnya kualitas penataan desa                                | Persentase Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital | 14                   | 25   | 45                              | 1,050,000,000,00 | 65     | 1,075,000,000,00 | 85     | 1,100,000,000,00 | 100    | 1,175,000,000,00 | 100    | 1,200,000,000,00  | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                        | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                             |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                                          |
|                                                                                                                           |                                                                                                                             |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                                          |
| (01)                                                                                                                      | (02)                                                                                                                        | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                                                                     |
| 2,13,03 - PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KERJA SAMA DESA                                                                       |                                                                                                                             |                      |       |                                 | 750,000,000,00   |        | 750,000,000,00   |        | 750,000,000,00   |        | 750,000,000,00   |        | 750,000,000,00   |                                                                                                                          |
| Meningkatnya<br>efektivitas kerja<br>sama desa                                                                            | Persentase<br>Fasilitasi<br>Kerjasama Desa<br>(Persentase)                                                                  | 66,96                | 79,99 | 84,94                           | 750,000,000,00   | 89,96  | 750,000,000,00   | 94,98  | 750,000,000,00   | 100    | 750,000,000,00   | 100    | 750,000,000,00   | 2,08,2,13,2,14,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak dan<br>Pengendalian<br>Penduduk |
| 2,13,04 - PROGRAM<br>ADMINISTRASI<br>PEMERINTAHAN<br>DESA                                                                 |                                                                                                                             |                      |       |                                 | 4,200,000,000,00 |        | 4,500,000,000,00 |        | 5,050,000,000,00 |        | 5,100,000,000,00 |        | 5,500,000,000,00 |                                                                                                                          |
| Meningkatnya<br>kualitas pembinaan<br>dan pengawasan<br>pemerintahan desa                                                 | Persentase<br>aparatur desa<br>dan anggota BPD<br>yang<br>ditingkatkan<br>kapasitasnya                                      | 72,66                | 78,13 | 83,61                           | 4,200,000,000,00 | 89,08  | 4,500,000,000,00 | 94,55  | 5,050,000,000,00 | 100    | 5,100,000,000,00 | 100    | 5,500,000,000,00 | 2,08,2,13,2,14,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak dan<br>Pengendalian<br>Penduduk |
| 2,13,05 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>LEMBAGA<br>KEMASYARAKATAN<br>, LEMBAGA ADAT<br>DAN MASYARAKAT<br>HUKUM ADAT          |                                                                                                                             |                      |       |                                 | 2,550,000,000,00 |        | 2,650,000,000,00 |        | 2,650,000,000,00 |        | 2,950,000,000,00 |        | 3,300,000,000,00 |                                                                                                                          |
| Meningkatnya<br>kapasitas Lembaga<br>Kemasyarakatan,<br>Lembaga Adat dan<br>Masyarakat Hukum<br>Adat dalam<br>pembangunan | Persentase<br>Fasilitasi<br>Pemberdayaan<br>Lembaga Adat<br>Desa dan<br>Lembaga<br>Masyarakat<br>Hukum Adat<br>(Persentase) | 100                  | 100   | 100                             | 2,550,000,000,00 | 100    | 2,650,000,000,00 | 100    | 2,650,000,000,00 | 100    | 2,950,000,000,00 | 100    | 3,300,000,000,00 | 2,08,2,13,2,14,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak dan<br>Pengendalian<br>Penduduk |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                             | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              |                                                                                  |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                    |
|                                                                                              |                                                                                  |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                    |
| (01)                                                                                         | (02)                                                                             | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                                               |
|                                                                                              | Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase) | 72,66                | 78,13 | 83,61                           |                  | 89,08  |                  | 94,55  |                  | 100    |                  | 100    |                  | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 2,14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA               |                                                                                  |                      |       |                                 | 1,700,000,000,00 |        | 1,775,000,000,00 |        | 2,075,000,000,00 |        | 2,125,000,000,00 |        | 2,175,000,000,00 |                                                                                                    |
| 2,14,02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                      |                                                                                  |                      |       |                                 | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |                                                                                                    |
| Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk                                                    | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19) | 22,4                 | 22,1  | 22                              | 600,000,000,00   | 21,9   | 600,000,000,00   | 21,8   | 600,000,000,00   | 21,8   | 600,000,000,00   | 21,76  | 600,000,000,00   | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
| 2,14,03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                          |                                                                                  |                      |       |                                 | 800,000,000,00   |        | 850,000,000,00   |        | 1,125,000,000,00 |        | 1,150,000,000,00 |        | 1,175,000,000,00 |                                                                                                    |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR) (Persentase)     | 63                   | 67    | 67                              | 800,000,000,00   | 67     | 850,000,000,00   | 67     | 1,125,000,000,00 | 70     | 1,150,000,000,00 | 70     | 1,175,000,000,00 | 2,08,2,13,2,14,01,0000 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                                                                               |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                 |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                                                                          |
| (01)                                                                                                            | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                                                                     |
| 2,14,04 - PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>DAN PENINGKATAN<br>KELUARGA<br>SEJAHTERA (KS)                              |                                                                               |                      |       |                                 | 300,000,000,00    |        | 325,000,000,00    |        | 350,000,000,00    |        | 375,000,000,00    |        | 400,000,000,00    |                                                                                                                          |
| Meningkatnya<br>pemberdayaan dan<br>peran serta<br>masyarakat dalam<br>mewujudkan<br>Keluarga Sejahtera<br>(KS) | Indeks<br>Pembangunan<br>Keluarga<br>(iBangga) (Angka)                        | 63,66                | 65,36 | 67,06                           | 300,000,000,00    | 68,76  | 325,000,000,00    | 70,46  | 350,000,000,00    | 72,16  | 375,000,000,00    | 74     | 400,000,000,00    | 2,08,2,13,2,14,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemberdayaan<br>Perempuan,<br>Perlindungan<br>Anak dan<br>Pengendalian<br>Penduduk |
| 2,15 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERHUBUNGAN                                                          |                                                                               |                      |       |                                 | 59.264.023.000,00 |        | 57.956.227.000,00 |        | 61.753.027.000,00 |        | 63.825.785.000,00 |        | 62.108.285.000,00 |                                                                                                                          |
| 2,15,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI                                     |                                                                               |                      |       |                                 | 19.052.500.000,00 |        | 19.132.500.000,00 |        | 19.847.500.000,00 |        | 20.215.903.000,00 |        | 20.415.903.000,00 |                                                                                                                          |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel                                         | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 63,1                 | 65    | 66                              | 19.052.500.000,00 | 67     | 19.132.500.000,00 | 70     | 19.847.500.000,00 | 72     | 20.215.903.000,00 | 74     | 20.415.903.000,00 | 2,15,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perhubungan                                                                        |
|                                                                                                                 | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 73                   | 74    | 75                              |                   | 76     |                   | 77     |                   | 78     |                   | 79     |                   | 2,15,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perhubungan                                                                        |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                                       |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                            |
|                                                                          |                                                                                       |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                            |
| (01)                                                                     | (02)                                                                                  | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                       |
|                                                                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                             | 76,78                | 76,78 | 77                              |                   | 77,55  |                   | 78     |                   | 78,5   |                   | 79     |                   | 2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan |
| 2,15,02 - PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) |                                                                                       |                      |       |                                 | 33.360.398.000,00 |        | 30.070.102.000,00 |        | 31.629.402.000,00 |        | 34.578.757.000,00 |        | 33.024.757.000,00 |                                            |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat                         | Rasio Konektivitas Darat                                                              | 0,428                | 0,379 | 0,376                           | 33.360.398.000,00 | 0,389  | 30.070.102.000,00 | 0,41   | 31.629.402.000,00 | 0,413  | 34.578.757.000,00 | 0,422  | 33.024.757.000,00 | 2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan |
|                                                                          | Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase) | 37                   | 37    | 40                              |                   | 43     |                   | 46     |                   | 49     |                   | 52     |                   | 2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan |
| 2,15,03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN                                  |                                                                                       |                      |       |                                 | 6.851.125.000,00  |        | 8.753.625.000,00  |        | 10.276.125.000,00 |        | 9.031.125.000,00  |        | 8.667.625.000,00  |                                            |
| Meningkatnya kualitas layanan transportasi laut                          | Rasio Konektivitas Laut                                                               | 0                    | 0,163 | 0,161                           | 6.851.125.000,00  | 0,167  | 8.753.625.000,00  | 0,176  | 10.276.125.000,00 | 0,177  | 9.031.125.000,00  | 0,181  | 8.667.625.000,00  | 2,15,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Perhubungan |
| 2,16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA             |                                                                                       |                      |       |                                 | 44,134,000,000,00 |        | 45,883,000,000,00 |        | 49,241,000,000,00 |        | 49,009,000,000,00 |        | 51,351,000,000,00 |                                            |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                               |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                     |
|                                                                                     |                                                                                               |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                     |
| (01)                                                                                | (02)                                                                                          | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                |
| 2,16,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI         |                                                                                               |                      |      |                                 | 14,756,000,000,00 |        | 15,352,000,000,00 |        | 17,590,000,000,00 |        | 16,213,000,000,00 |        | 17,366,000,000,00 |                                                                     |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel             | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai)                 | 97,9                 | 97,9 | 98                              | 14,756,000,000,00 | 98     | 15,352,000,000,00 | 98     | 17,590,000,000,00 | 99     | 16,213,000,000,00 | 100    | 17,366,000,000,00 | 2,16,2,20,2,21,01<br>,0000 - Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika |
|                                                                                     | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                                               | 91,12                | 85   | 85                              |                   | 86     |                   | 87     |                   | 88     |                   | 89     |                   | 2,16,2,20,2,21,01<br>,0000 - Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika |
|                                                                                     | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                                     | 70,15                | 73   | 75                              |                   | 77     |                   | 78     |                   | 81     |                   | 82     |                   | 2,16,2,20,2,21,01<br>,0000 - Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika |
| 2,16,02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>INFORMASI DAN<br>KOMUNIKASI<br>PUBLIK           |                                                                                               |                      |      |                                 | 19,340,000,000,00 |        | 19,911,000,000,00 |        | 20,581,000,000,00 |        | 21,234,000,000,00 |        | 21,950,000,000,00 |                                                                     |
| Meningkatnya<br>jangkauan dan<br>kualitas komunikasi<br>publik pemerintah<br>daerah | Persentase<br>implementasi<br>strategi<br>komunikasi<br>publik di<br>Pemerintah<br>Daerah (%) | 0                    | 50   | 70                              | 19,340,000,000,00 | 75     | 19,911,000,000,00 | 80     | 20,581,000,000,00 | 85     | 21,234,000,000,00 | 90     | 21,950,000,000,00 | 2,16,2,20,2,21,01<br>,0000 - Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                      | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                           |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                           |
|                                                                       |                                                                                                           |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                           |
| (01)                                                                  | (02)                                                                                                      | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                      |
|                                                                       | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah (%) | 87,43                | 87,8 | 88                              |                   | 88,4   |                   | 88,7   |                   | 88,9   |                   | 90     |                   | 2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2,16,03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                    |                                                                                                           |                      |      |                                 | 10,038,000,000,00 |        | 10,620,000,000,00 |        | 11,070,000,000,00 |        | 11,562,000,000,00 |        | 12,035,000,000,00 |                                                           |
| Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika                | Indeks SPBE ()                                                                                            | 3,05                 | 1,7  | 1,7                             | 10,038,000,000,00 | 1,7    | 10,620,000,000,00 | 1,8    | 11,070,000,000,00 | 1,8    | 11,562,000,000,00 | 2      | 12,035,000,000,00 | 2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika |
|                                                                       | Persentase pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (%)                              | 66,7                 | 70   | 73,33                           |                   | 80     |                   | 86,66  |                   | 93,33  |                   | 96,66  |                   | 2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika |
|                                                                       | Tingkat kematangan keterpaduan layanan digital pemerintah (Level)                                         | 0                    | 1    | 1                               |                   | 1      |                   | 1      |                   | 1      |                   | 2      |                   | 2,16,2,20,2,21,01,0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika |
| 2,17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH |                                                                                                           |                      |      |                                 | 20,300,000,000,00 |        | 20,455,000,000,00 |        | 21,605,000,000,00 |        | 21,755,000,000,00 |        | 22,850,000,000,00 |                                                           |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                               | INDIKATOR OUTCOME                                                 | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                   |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                   |
|                                                                 |                                                                   |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                   |
| (01)                                                            | (02)                                                              | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                              |
| 2,17,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                   |               |       |                                 | 12,940,000,000,00 |        | 12,840,000,000,00 |        | 13,770,000,000,00 |        | 13,725,000,000,00 |        | 14,680,000,000,00 |                                                                   |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel  | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 84,1          | 84,5  | 85                              | 12,940,000,000,00 | 85,5   | 12,840,000,000,00 | 86     | 13,770,000,000,00 | 86,5   | 13,725,000,000,00 | 87     | 14,680,000,000,00 | 2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 87,17         | 89,48 | 89,8                            |                   | 90     |                   | 91     |                   | 92     |                   | 93     |                   | 2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
|                                                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 70,6          | 81,5  | 81,6                            |                   | 81,7   |                   | 81,8   |                   | 81,9   |                   | 82     |                   | 2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2,17,02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM            |                                                                   |               |       |                                 | 200,000,000,00    |        | 250,000,000,00    |        | 250,000,000,00    |        | 250,000,000,00    |        | 250,000,000,00    |                                                                   |
| Meningkatnya kualitas layanan izin usaha simpan pinjam          | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (Persentase)                    | 24,56         | 5     | 5                               | 200,000,000,00    | 5      | 250,000,000,00    | 5      | 250,000,000,00    | 5      | 250,000,000,00    | 5      | 250,000,000,00    | 2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2,17,03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI           |                                                                   |               |       |                                 | 200,000,000,00    |        | 255,000,000,00    |        | 255,000,000,00    |        | 255,000,000,00    |        | 300,000,000,00    |                                                                   |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                  | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                              |                      |       | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                   |
|                                                          |                                                                              |                      |       | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                   |
| (01)                                                     | (02)                                                                         | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)           | (13)   | (14)           | (15)                                                              |
| Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi           | Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)                  | 12,75                | 11,9  | 12,75                           | 200,000,000,00 | 12,75  | 255,000,000,00 | 12,75  | 255,000,000,00 | 12,75  | 255,000,000,00 | 12,75  | 300,000,000,00 | 2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2,17,04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI   |                                                                              |                      |       |                                 | 200,000,000,00 |        | 200,000,000,00 |        | 250,000,000,00 |        | 250,000,000,00 |        | 250,000,000,00 |                                                                   |
| Meningkatnya Kinerja Pengelolaan koperasi                | Persentase Koperasi Aktif (Persentase)                                       | 92,86                | 93,33 | 94                              | 200,000,000,00 | 95     | 200,000,000,00 | 96     | 250,000,000,00 | 97     | 250,000,000,00 | 98     | 250,000,000,00 | 2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2,17,05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   |                                                                              |                      |       |                                 | 200,000,000,00 |        | 230,000,000,00 |        | 260,000,000,00 |        | 290,000,000,00 |        | 320,000,000,00 |                                                                   |
| Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian                  | Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase) | 15,38                | 22,03 | 30,17                           | 200,000,000,00 | 35,86  | 230,000,000,00 | 41,32  | 260,000,000,00 | 48,58  | 290,000,000,00 | 55,56  | 320,000,000,00 | 2,17,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah |
| 2,17,06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI |                                                                              |                      |       |                                 | 660,000,000,00 |        | 780,000,000,00 |        | 820,000,000,00 |        | 835,000,000,00 |        | 900,000,000,00 |                                                                   |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                                                 |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                |
|                                                                                                      |                                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                |
| (01)                                                                                                 | (02)                                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                           |
| Meningkatnya<br>Produktivitas<br>Koperasi                                                            | Persentase<br>Meningkatnya<br>Koperasi yang<br>Berkualitas<br>(Persentase)                      | 19,49                | 21,49 | 27,49                           | 660,000,000,00   | 29,49  | 780,000,000,00   | 31,49  | 820,000,000,00   | 33,49  | 835,000,000,00   | 35,49  | 900,000,000,00   | 2,17,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Koperasi, Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |
| 2,17,07 - PROGRAM<br>Pemberdayaan<br>USAHA<br>MENENGAH,<br>USAHA KECIL, DAN<br>USAHA MIKRO<br>(UMKM) |                                                                                                 |                      |       |                                 | 5,550,000,000,00 |        | 5,550,000,000,00 |        | 5,550,000,000,00 |        | 5,700,000,000,00 |        | 5,700,000,000,00 |                                                                                |
| Meningkatnya<br>Kapasitas UMKM<br>yang Tangguh dan<br>Mandiri                                        | Persentase Usaha<br>Kecil yang<br>Bertransformasi<br>dari Informal ke<br>Formal<br>(Persentase) | 45                   | 45    | 60                              | 5,550,000,000,00 | 70     | 5,550,000,000,00 | 80     | 5,550,000,000,00 | 90     | 5,700,000,000,00 | 100    | 5,700,000,000,00 | 2,17,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Koperasi, Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |
|                                                                                                      | Pertumbuhan<br>Wirausaha<br>(Persentase)                                                        | 4                    | 4,1   | 4,2                             |                  | 4,3    |                  | 4,4    |                  | 4,5    |                  | 4,6    |                  | 2,17,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Koperasi, Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |
| 2,17,08 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>UMKM                                                            |                                                                                                 |                      |       |                                 | 350,000,000,00   |        | 350,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |                                                                                |
| Meningkatnya Daya<br>Saing UMKM                                                                      | Proporsi UKM<br>Menjalini<br>Kemitraan dan<br>Ekspor<br>(Persentase)                            | 28,09                | 30    | 32                              | 350,000,000,00   | 34     | 350,000,000,00   | 36     | 450,000,000,00   | 38     | 450,000,000,00   | 40     | 450,000,000,00   | 2,17,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Koperasi, Usaha<br>Kecil dan<br>Menengah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                               |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                   |
|                                                                             |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                   |
| (01)                                                                        | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                              |
| 2.18 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PENANAMAN<br>MODAL               |                                                                               |                      |       |                                 | 17,981,611,966,00 |        | 16,181,611,966,00 |        | 16,181,611,966,00 |        | 16,181,611,966,00 |        | 16,181,611,966,00 |                                                                   |
| 2,18,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                               |                      |       |                                 | 15,081,611,966,00 |        | 13,281,611,966,00 |        | 13,281,611,966,00 |        | 13,281,611,966,00 |        | 13,281,611,966,00 |                                                                   |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel     | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 73,31                | 73,5  | 73,6                            | 15,081,611,966,00 | 74     | 13,281,611,966,00 | 74,2   | 13,281,611,966,00 | 74,5   | 13,281,611,966,00 | 75     | 13,281,611,966,00 | 2,18,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan PTSP |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 90                   | 90    | 90,25                           |                   | 90,5   |                   | 91     |                   | 91,5   |                   | 92     |                   | 2,18,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan PTSP |
|                                                                             | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 41,6                 | 70,01 | 71                              |                   | 72     |                   | 73     |                   | 74     |                   | 75     |                   | 2,18,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan PTSP |
| 2.18,02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>IKLIM PENANAMAN<br>MODAL               |                                                                               |                      |       |                                 | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |                                                                   |
| meningkatnya<br>kemudahan<br>berinvestasi                                   | Persentase<br>Realisasi Total<br>terhadap Target<br>Investasi                 | 202,69               | 100   | 100                             | 500,000,000,00    | 100    | 500,000,000,00    | 100    | 500,000,000,00    | 100    | 500,000,000,00    | 100    | 500,000,000,00    | 2,18,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan PTSP |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                                                                       |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                   |
|                                                                        |                                                                                                                                       |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                   |
| (01)                                                                   | (02)                                                                                                                                  | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                              |
| 2,18,03 - PROGRAM<br>PROMOSI<br>PENANAMAN<br>MODAL                     |                                                                                                                                       |                      |      |                                 | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |                                                                   |
| meningkatnya<br>jangkauan promosi<br>penanaman modal                   | Persentase<br>Peningkatan<br>Investor yang<br>Berinvestasi                                                                            | 0                    | 2    | 2                               | 500,000,000,00    | 3      | 500,000,000,00    | 3      | 500,000,000,00    | 4      | 500,000,000,00    | 4      | 500,000,000,00    | 2,18,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan PTSP |
| 2,18,04 - PROGRAM<br>PELAYANAN<br>PENANAMAN<br>MODAL                   |                                                                                                                                       |                      |      |                                 | 900,000,000,00    |        | 900,000,000,00    |        | 900,000,000,00    |        | 900,000,000,00    |        | 900,000,000,00    |                                                                   |
| Meningkatnya<br>perizinan berusaha<br>berbasis risiko                  | Persentase<br>Pelaku Usaha<br>yang Memperoleh<br>Izin Sesuai<br>Ketentuan                                                             | 72,17                | 100  | 73                              | 900,000,000,00    | 74     | 900,000,000,00    | 75     | 900,000,000,00    | 76     | 900,000,000,00    | 77     | 900,000,000,00    | 2,18,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan PTSP |
| 2,18,05 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>PELAKSANAAN<br>PENANAMAN<br>MODAL |                                                                                                                                       |                      |      |                                 | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |        | 1,000,000,000,00  |                                                                   |
| Terkendalnya<br>pelaksanaan<br>penanaman modal                         | Persentase<br>Penyelesaian<br>Permasalahan<br>dan Hambatan<br>yang Dihadapi<br>Pelaku Usaha<br>dalam Membuka<br>Usaha<br>(Persentase) | 74                   | 100  | 100                             | 1,000,000,000,00  | 100    | 1,000,000,000,00  | 100    | 1,000,000,000,00  | 100    | 1,000,000,000,00  | 100    | 1,000,000,000,00  | 2,18,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Penanaman<br>Modal dan PTSP |
| 2,19 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KEPEMUDAAN DAN<br>OLAHRAGA  |                                                                                                                                       |                      |      |                                 | 65,953,522,373,00 |        | 67,710,882,700,00 |        | 73,378,414,680,00 |        | 89,086,785,738,00 |        | 75,280,990,800,00 |                                                                   |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                               |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                              |
|                                                                             |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                              |
| (01)                                                                        | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                         |
| 2,19,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                               |                      |       |                                 | 25,562,940,149,00 |        | 22,208,874,700,00 |        | 23,386,365,680,00 |        | 23,848,786,738,00 |        | 25,057,775,800,00 |                                                              |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel     | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 1                    | 70    | 70,5                            | 25,562,940,149,00 | 71,5   | 22,208,874,700,00 | 75     | 23,386,365,680,00 | 76     | 23,848,786,738,00 | 78     | 25,057,775,800,00 | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 85,56                | 85,56 | 86,3                            |                   | 86,6   |                   | 87     |                   | 87     |                   | 88     |                   | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |
|                                                                             | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 70,25                | 72    | 73                              |                   | 74     |                   | 75     |                   | 76     |                   | 77     |                   | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |
| 2,19,02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS DAYA<br>SAING<br>KEPEMUDAAN  |                                                                               |                      |       |                                 | 2,045,695,575,00  |        | 3,001,998,000,00  |        | 3,190,084,000,00  |        | 3,391,374,000,00  |        | 3,606,908,000,00  |                                                              |
| Meningkatnya Daya<br>Saing Kepemudaan                                       | Rasio Wirausaha<br>Pemuda<br>(Persentase)                                     | 0,064                | 0,075 | 0,081                           | 2,045,695,575,00  | 0,088  | 3,001,998,000,00  | 0,095  | 3,190,084,000,00  | 0,104  | 3,391,374,000,00  | 0,114  | 3,606,908,000,00  | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |
|                                                                             | Rasio<br>Pemberdayaan<br>Pemuda                                               | 0,008                | 0,011 | 0,012                           |                   | 0,013  |                   | 0,014  |                   | 0,015  |                   | 0,016  |                   |                                                              |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                           | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                              |
|                                                                 |                                                                                                                                |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                              |
| (01)                                                            | (02)                                                                                                                           | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                         |
| 2,19,03 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>DAYA SAING<br>KEOLAHRAGAAN |                                                                                                                                |                      |       |                                 | 34,390,582,224,00 |        | 37,650,010,000,00 |        | 41,709,465,000,00 |        | 56,499,500,000,00 |        | 41,001,828,000,00 |                                                              |
| Meningkatnya<br>pembudayaan dan<br>prestasi olah raga           | Persentase atlet<br>pelajar yang<br>memperoleh<br>medali pada<br>kejuaraan<br>olahraga pelajar<br>single event<br>nasional (%) | 52,38                | 0     | 53,33                           | 34,390,582,224,00 | 54,17  | 37,650,010,000,00 | 54,9   | 41,709,465,000,00 | 55,56  | 56,499,500,000,00 | 56,4   | 41,001,828,000,00 | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |
|                                                                 | Persentase atlet<br>yang memperoleh<br>medali pada<br>kejuaraan<br>olahraga multi<br>event nasional<br>(%)                     | 42,02                | 22,22 | 0                               |                   | 23,72  |                   | 45,21  |                   | 25,33  |                   | 0      |                   | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |
|                                                                 | Persentase<br>peningkatan<br>partisipasi pada<br>seleksi<br>pembinaan<br>SPOBDA                                                | 15,38                | 33,3  | 5                               |                   | 7,14   |                   | 8,89   |                   | 10,2   |                   | 11,1   |                   | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |
| 2,19,04 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KAPASITAS<br>KEPRAMUKAAN   |                                                                                                                                |                      |       |                                 | 3,954,304,425,00  |        | 4,850,000,000,00  |        | 5,092,500,000,00  |        | 5,347,125,000,00  |        | 5,614,479,000,00  |                                                              |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>kepramukaan                         | Tingkat<br>Partisipasi<br>Masyarakat<br>dalam<br>Kepramukaan<br>(Persentase)                                                   | 1,59                 | 1,66  | 1,72                            | 3,954,304,425,00  | 1,78   | 4,850,000,000,00  | 1,85   | 5,092,500,000,00  | 1,92   | 5,347,125,000,00  | 1,99   | 5,614,479,000,00  | 2,19,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Pemuda dan<br>Olahraga |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                             | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                     |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                  |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                     |
| (01)                                                                                                                         | (02)                                                                                                                             | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                |
| 2.20 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG STATISTIK                                                                            |                                                                                                                                  |                      |      |                                 | 540,000,000,00    |        | 569,000,000,00    |        | 613,000,000,00    |        | 657,000,000,00    |        | 699,000,000,00    |                                                                     |
| 2.20,02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAA<br>N STATISTIK<br>SEKTORAL                                                               |                                                                                                                                  |                      |      |                                 | 540,000,000,00    |        | 569,000,000,00    |        | 613,000,000,00    |        | 657,000,000,00    |        | 699,000,000,00    |                                                                     |
| Tercapainya<br>kolaborasi,<br>integrasi, dan<br>standardisasi dalam<br>penyelenggaraan<br>Sistem Statistik<br>Nasional (SSN) | Persentase<br>Perangkat<br>Daerah yang<br>menyediakan<br>data statistik<br>sektoral sesuai<br>prinsip Satu Data<br>Indonesia (%) | 80                   | 80   | 87                              | 540,000,000,00    | 90     | 569,000,000,00    | 94     | 613,000,000,00    | 97     | 657,000,000,00    | 100    | 699,000,000,00    | 2,16,2,20,2,21,01<br>,0000 - Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika |
| 2.21 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERSANDIAN                                                                        |                                                                                                                                  |                      |      |                                 | 1,017,000,000,00  |        | 1,055,500,000,00  |        | 1,095,000,000,00  |        | 1,140,000,000,00  |        | 1,180,500,000,00  |                                                                     |
| 2.21,02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAA<br>N PERSANDIAN<br>UNTUK<br>PENGAMANAN<br>INFORMASI                                      |                                                                                                                                  |                      |      |                                 | 1,017,000,000,00  |        | 1,055,500,000,00  |        | 1,095,000,000,00  |        | 1,140,000,000,00  |        | 1,180,500,000,00  |                                                                     |
| Meningkatnya<br>keamanan siber dan<br>sandi lingkungan<br>pemerintah daerah                                                  | Tingkat Kesiapan<br>Pengamanan<br>Informasi<br>Pemerintah<br>Daerah (Angka)                                                      | 58,75                | 40   | 40                              | 1,017,000,000,00  | 45     | 1,055,500,000,00  | 46     | 1,095,000,000,00  | 47     | 1,140,000,000,00  | 48     | 1,180,500,000,00  | 2,16,2,20,2,21,01<br>,0000 - Dinas<br>Komunikasi dan<br>Informatika |
| 2.22 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>KEBUDAYAAN                                                                        |                                                                                                                                  |                      |      |                                 | 26,645,600,000,00 |        | 27,738,240,000,00 |        | 28,724,696,000,00 |        | 29,741,500,000,00 |        | 30,791,150,000,00 |                                                                     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                             | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                  |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                    |
|                                                                               |                                                                                                  |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                    |
| (01)                                                                          | (02)                                                                                             | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                               |
| 2,22,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI   |                                                                                                  |                      |       |                                 | 22,105,600,000,00 |        | 22,658,240,000,00 |        | 23,224,696,000,00 |        | 23,805,000,000,00 |        | 24,400,000,000,00 |                                                                    |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel       | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai)                    | 24                   | 70,01 | 71                              | 22,105,600,000,00 | 72     | 22,658,240,000,00 | 73     | 23,224,696,000,00 | 74     | 23,805,000,000,00 | 75     | 24,400,000,000,00 | 2,22,3,26,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata |
|                                                                               | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                                                  | 85,65                | 87,35 | 88                              |                   | 88,5   |                   | 89     |                   | 89,5   |                   | 90     |                   | 2,22,3,26,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata |
|                                                                               | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                                        | 80,75                | 80,95 | 81                              |                   | 81,05  |                   | 81,4   |                   | 81,6   |                   | 82     |                   | 2,22,3,26,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata |
| 2,22,02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN                               |                                                                                                  |                      |       |                                 | 2,325,000,000,00  |        | 2,330,000,000,00  |        | 2,335,000,000,00  |        | 2,340,000,000,00  |        | 2,345,000,000,00  |                                                                    |
| Meningkatnya peran<br>serta masyarakat<br>dalam<br>pengembangan<br>kebudayaan | Persentase Cagar<br>Budaya dan<br>Warisan Budaya<br>Tak Benda yang<br>Ditetapkan<br>(Persentase) | 0                    | 25    | 30                              | 2,325,000,000,00  | 35     | 2,330,000,000,00  | 40     | 2,335,000,000,00  | 45     | 2,340,000,000,00  | 50     | 2,345,000,000,00  | 2,22,3,26,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kebudayaan dan<br>Pariwisata |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                 |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                          |
|                                                                             |                                                                                 |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                          |
| (01)                                                                        | (02)                                                                            | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                     |
|                                                                             | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)    | 1,47                 | 1,48 | 1,5                             |                  | 1,51   |                  | 1,53   |                  | 1,55   |                  | 1,57   |                  | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2,22,03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL                         |                                                                                 |                      |      |                                 | 415,000,000,00   |        | 725,000,000,00   |        | 900,000,000,00   |        | 1,075,000,000,00 |        | 1,250,000,000,00 |                                                          |
| Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional | Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase) | 20                   | 30   | 40                              | 415,000,000,00   | 50     | 725,000,000,00   | 60     | 900,000,000,00   | 70     | 1,075,000,000,00 | 80     | 1,250,000,000,00 | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2,22,04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH                                         |                                                                                 |                      |      |                                 | 150,000,000,00   |        | 200,000,000,00   |        | 250,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |        | 350,000,000,00   |                                                          |
| Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah                    | Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)     | 20                   | 21   | 22                              | 150,000,000,00   | 23     | 200,000,000,00   | 24     | 250,000,000,00   | 25     | 300,000,000,00   | 26     | 350,000,000,00   | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 2,22,05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA                  |                                                                                 |                      |      |                                 | 1,500,000,000,00 |        | 1,650,000,000,00 |        | 1,815,000,000,00 |        | 1,996,500,000,00 |        | 2,196,150,000,00 |                                                          |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                                                   |                      |        | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                              |
|                                                                        |                                                                                   |                      |        | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                              |
| (01)                                                                   | (02)                                                                              | (03)                 | (04)   | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                         |
| Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan                          | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (Persentase) | 4,76                 | 9,52   | 14,28                           | 1,500,000,000,00 | 19,04  | 1,650,000,000,00 | 23,81  | 1,815,000,000,00 | 28,57  | 1,996,500,000,00 | 33,3   | 2,196,150,000,00 | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata     |
|                                                                        | Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)                          | 0,35                 | 0,35   | 0,36                            |                  | 0,36   |                  | 0,37   |                  | 0,37   |                  | 0,38   |                  | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata     |
| 2,22,06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN                              |                                                                                   |                      |        |                                 | 150,000,000,00   |        | 175,000,000,00   |        | 200,000,000,00   |        | 225,000,000,00   |        | 250,000,000,00   |                                                              |
| Meningkatnya tata kelola museum                                        | Persentase peningkatan kunjungan ke museum (%)                                    | 11,813               | 11,813 | 2,54                            | 150,000,000,00   | 9,1    | 175,000,000,00   | 14,5   | 200,000,000,00   | 15,6   | 225,000,000,00   | 15,7   | 250,000,000,00   | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata     |
| 2,23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                         |                                                                                   |                      |        |                                 | 404,907,928,00   |        | 460,000,000,00   |        | 520,000,000,00   |        | 580,000,000,00   |        | 640,000,000,00   |                                                              |
| 2,23,02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN                               |                                                                                   |                      |        |                                 | 204,907,928,00   |        | 250,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |        | 350,000,000,00   |        | 400,000,000,00   |                                                              |
| Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Indeks)                                   | 63                   | 65,43  | 67,4                            | 204,907,928,00   | 69,4   | 250,000,000,00   | 71,4   | 300,000,000,00   | 73,4   | 350,000,000,00   | 73,4   | 400,000,000,00   | 2,23,2,24,0,00,01,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                               | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                  |        |                | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                    |                      |      | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                  | 2030   |                |                                                              |
|                                                                 |                                                                    |                      |      | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU           |                                                              |
| (01)                                                            | (02)                                                               | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)           | (07)   | (08)           | (09)   | (10)           | (11)   | (12)             | (13)   | (14)           | (15)                                                         |
|                                                                 | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)                 | 68,05                | 68,1 | 69,2                            |                | 71,2   |                | 73,2   |                | 75,2   |                  | 75,2   |                | 2,23,2,24,0,00,01,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2,23,03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO  |                                                                    |                      |      |                                 | 200,000,000,00 |        | 210,000,000,00 |        | 220,000,000,00 |        | 230,000,000,00   |        | 240,000,000,00 |                                                              |
| Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno       | Jumlah Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan (naskah) | 0                    | 0    | 1                               | 200,000,000,00 | 1      | 210,000,000,00 | 2      | 220,000,000,00 | 2      | 230,000,000,00   | 2      | 240,000,000,00 | 2,23,2,24,0,00,01,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
| 2,24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                     |                                                                    |                      |      |                                 | 636,054,022,00 |        | 709,659,424,00 |        | 797,622,366,00 |        | 6,088,843,602,00 |        | 938,423,062,00 |                                                              |
| 2,24,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                    |                      |      |                                 | 200,000,000,00 |        | 230,000,000,00 |        | 270,000,000,00 |        | 285,000,000,00   |        | 300,000,000,00 |                                                              |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel  | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)  | 95                   | 95,5 | 96                              | 200,000,000,00 | 96,5   | 230,000,000,00 | 97     | 270,000,000,00 | 97,5   | 285,000,000,00   | 98     | 300,000,000,00 | 2,23,2,24,0,00,01,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |
|                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                          | 85                   | 85   | 85,5                            |                | 86     |                | 86,5   |                | 87     |                  | 87,5   |                | 2,23,2,24,0,00,01,0000 - Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                    | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                         |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                        |
|                                                                             |                                                                                         |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                        |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                    | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                   |
|                                                                             | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                               | 70,2                 | 70,2  | 70,5                            |                   | 71     |                   | 71,2   |                   | 71,5   |                   | 71,5   |                   | 2,23,2,24,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perpustakaan<br>dan Arsip Daerah |
| 2,24,02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>ARSIP                                   |                                                                                         |                      |       |                                 | 436,054,022,00    |        | 479,659,424,00    |        | 527,622,366,00    |        | 5,803,843,602,00  |        | 638,423,062,00    |                                                                        |
| Meningkatnya tata<br>kelola arsip dinamis<br>dan statis                     | Indeks Hasil<br>Pengawasan<br>Kearsipan di<br>lingkup<br>Pemerintahan<br>Daerah (Nilai) | 90,03                | 90,25 | 90,5                            | 436,054,022,00    | 91,1   | 479,659,424,00    | 91,5   | 527,622,366,00    | 92,1   | 5,803,843,602,00  | 92,1   | 638,423,062,00    | 2,23,2,24,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perpustakaan<br>dan Arsip Daerah |
| 3,25 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG KELAUTAN<br>DAN PERIKANAN           |                                                                                         |                      |       |                                 | 74,200,000,000,00 |        | 78,868,000,000,00 |        | 82,375,000,000,00 |        | 87,012,000,000,00 |        | 89,774,000,000,00 |                                                                        |
| 3,25,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                                         |                      |       |                                 | 35,000,000,000,00 |        | 37,000,000,000,00 |        | 38,000,000,000,00 |        | 39,000,000,000,00 |        | 39,000,000,000,00 |                                                                        |
| Terwujudnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik yang prima<br>dan akuntabel     | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                                         | 86                   | 86    | 86,78                           | 35,000,000,000,00 | 87,25  | 37,000,000,000,00 | 87,95  | 38,000,000,000,00 | 88,65  | 39,000,000,000,00 | 89,2   | 39,000,000,000,00 | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan        |
|                                                                             | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai)           | 65                   | 70,01 | 71                              |                   | 72     |                   | 73     |                   | 74     |                   | 75     |                   | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan        |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |                                                                            |                      |        | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                 |
|                                                                                                                |                                                                            |                      |        | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                 |
| (01)                                                                                                           | (02)                                                                       | (03)                 | (04)   | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                            |
|                                                                                                                | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                  | 76,76                | 77     | 78,26                           |                   | 80,35  |                   | 80,85  |                   | 81,45  |                   | 82     |                   | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan |
| 3,25,02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KELAUTAN,<br>PESISIR DAN<br>PULAU-PULAU<br>KECIL                           |                                                                            |                      |        |                                 | 2,250,000,000,00  |        | 1,600,000,000,00  |        | 1,600,000,000,00  |        | 1,600,000,000,00  |        | 1,600,000,000,00  |                                                                 |
| Laut, Pesisir, dan<br>Pulau-Pulau Kecil<br>sebagai Sumber<br>Nilai Tambah<br>Ekonomi Kelautan<br>dan Perikanan | Kontribusi Sektor<br>Perikanan<br>Tangkap<br>Terhadap PDRB<br>(Persentase) | 2,16                 | 2,016  | 2,17                            | 2,250,000,000,00  | 2,18   | 1,600,000,000,00  | 2,19   | 1,600,000,000,00  | 2,2    | 1,600,000,000,00  | 2,21   | 1,600,000,000,00  | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan |
| 3,25,03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>TANGKAP                                                       |                                                                            |                      |        |                                 | 14,070,000,000,00 |        | 15,200,000,000,00 |        | 16,400,000,000,00 |        | 17,600,000,000,00 |        | 18,800,000,000,00 |                                                                 |
| Meningkatnya<br>Produksi Perikanan<br>Tangkap                                                                  | Jumlah Produksi<br>Perikanan<br>Tangkap (Ton)                              | 45.187               | 46.467 | 47.500                          | 14,070,000,000,00 | 48.300 | 15,200,000,000,00 | 49.800 | 16,400,000,000,00 | 51.200 | 17,600,000,000,00 | 52400  | 18,800,000,000,00 | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan |
| 3,25,04 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PERIKANAN<br>BUDIDAYA                                                      |                                                                            |                      |        |                                 | 11,880,000,000,00 |        | 13,068,000,000,00 |        | 14,375,000,000,00 |        | 15,812,000,000,00 |        | 17,374,000,000,00 |                                                                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025    | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |          |                   |          |                   |          |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                          |                      |         | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028     |                   | 2029     |                   | 2030     |                   |                                                                 |
|                                                                             |                                                          |                      |         | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET   | PAGU              | TARGET   | PAGU              | TARGET   | PAGU              |                                                                 |
| (01)                                                                        | (02)                                                     | (03)                 | (04)    | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)     | (10)              | (11)     | (12)              | (13)     | (14)              | (15)                                                            |
| Meningkatnya<br>Produksi Perikanan<br>Budidaya                              | Produksi<br>Perikanan<br>Budidaya (Ton)                  | 49595                | 50937,7 | 51082                           | 11,880,000,000,00 | 53125  | 13,068,000,000,00 | 55250    | 14,375,000,000,00 | 58012    | 15,812,000,000,00 | 60912    | 17,374,000,000,00 | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan |
| 3,25,05 - PROGRAM<br>PENGAWASAN<br>SUMBER DAYA<br>KELAUTAN DAN<br>PERIKANAN |                                                          |                      |         |                                 | 5,000,000,000,00  |        | 5,000,000,000,00  |          | 5,000,000,000,00  |          | 5,000,000,000,00  |          | 5,000,000,000,00  |                                                                 |
| Meningkatnya<br>Kelestarian Laut<br>dan<br>Keanekaragaman<br>Hayati         | Kawasan<br>konservasi<br>daerah yang<br>operasional (Ha) | 0                    | 11213,4 | 10.772,33                       | 5,000,000,000,00  | 5715,1 | 5,000,000,000,00  | 11244,38 | 5,000,000,000,00  | 6.221,44 | 5,000,000,000,00  | 2.711,22 | 5,000,000,000,00  | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan |
| 3,25,06 - PROGRAM<br>PENGOLAHAN DAN<br>PEMASARAN HASIL<br>PERIKANAN         |                                                          |                      |         |                                 | 6,000,000,000,00  |        | 7,000,000,000,00  |          | 7,000,000,000,00  |          | 8,000,000,000,00  |          | 8,000,000,000,00  |                                                                 |
| Meningkatnya<br>Konsumsi Ikan oleh<br>Masyarakat                            | Angka Konsumsi<br>Ikan<br>(Kg/ KAP/TH)                   | 41,5                 | 28,07   | 28,67                           | 6,000,000,000,00  | 29,27  | 7,000,000,000,00  | 29,87    | 7,000,000,000,00  | 30,47    | 8,000,000,000,00  | 31,07    | 8,000,000,000,00  | 3,25,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kelautan dan<br>Perikanan |
| 3,26 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PARIWISATA                       |                                                          |                      |         |                                 | 11,608,960,000,00 |        | 12,849,530,000,00 |          | 14,115,100,000,00 |          | 14,785,670,000,00 |          | 16,011,000,000,00 |                                                                 |
| 3,26,02 - PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>DAYA TARIK<br>DESTINASI<br>PARIWISATA   |                                                          |                      |         |                                 | 450,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |          | 550,000,000,00    |          | 600,000,000,00    |          | 650,000,000,00    |                                                                 |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                   |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                          |
|                                                                                                              |                                                                                   |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                          |
| (01)                                                                                                         | (02)                                                                              | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                     |
| Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata                                                                 | Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)                           | 49,68                | 10    | 11                              | 450,000,000,00    | 12     | 500,000,000,00    | 13     | 550,000,000,00    | 14     | 600,000,000,00    | 15     | 650,000,000,00    | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3,26,03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                                                       |                                                                                   |                      |       |                                 | 10,143,960,000,00 |        | 11,294,530,000,00 |        | 12,445,100,000,00 |        | 13,020,670,000,00 |        | 14,171,000,000,00 |                                                          |
| Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata                                                                  | Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)                    | 4                    | 25,75 | 27,25                           | 10,143,960,000,00 | 28,8   | 11,294,530,000,00 | 29,35  | 12,445,100,000,00 | 31,25  | 13,020,670,000,00 | 32     | 14,171,000,000,00 | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3,26,04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL |                                                                                   |                      |       |                                 | 765,000,000,00    |        | 790,000,000,00    |        | 830,000,000,00    |        | 850,000,000,00    |        | 865,000,000,00    |                                                          |
| Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif                                                                      | Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase) | 1,84                 | 1,84  | 1,86                            | 765,000,000,00    | 1,9    | 790,000,000,00    | 1,94   | 830,000,000,00    | 1,96   | 850,000,000,00    | 2      | 865,000,000,00    | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3,26,05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    |                                                                                   |                      |       |                                 | 250,000,000,00    |        | 265,000,000,00    |        | 290,000,000,00    |        | 315,000,000,00    |        | 325,000,000,00    |                                                          |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                          |                      |      | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                          |
|                                                                 |                                                                                          |                      |      | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                          |
| (01)                                                            | (02)                                                                                     | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                     |
| Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif       | Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase) | 0                    | 0    | 1,36                            | 250,000,000,00     | 1,37   | 265,000,000,00     | 1,38   | 290,000,000,00     | 1,39   | 315,000,000,00     | 1,4    | 325,000,000,00     | 2,22,3,26,0,00,01,0000 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 3,27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                     |                                                                                          |                      |      |                                 | 144,856,836,985,00 |        | 158,291,556,647,00 |        | 167,404,366,465,00 |        | 179,299,357,499,00 |        | 178,644,425,720,00 |                                                          |
| 3,27,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                          |                      |      |                                 | 60,112,410,601,00  |        | 64,304,151,661,00  |        | 69,563,316,827,00  |        | 74,914,898,510,00  |        | 80,724,788,361,00  |                                                          |
| Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                                | 84,72                | 88   | 88,2                            | 18,400,000,000,00  | 89     | 18,500,000,000,00  | 89,5   | 19,200,000,000,00  | 89,7   | 19,700,000,000,00  | 90     | 20,200,000,000,00  | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                |
|                                                                 | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                        | 70,2                 | 71   | 72                              |                    | 73     |                    | 74     |                    | 75     |                    | 76     |                    | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                |
|                                                                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                      | 70,45                | 75   | 75,2                            |                    | 75,5   |                    | 76     |                    | 77     |                    | 80     |                    | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                   |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                             |
|                                                                |                                                                   |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                             |
| (01)                                                           | (02)                                                              | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                        |
| Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang prima dan akuntabel | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 71,2                 | 72,5 | 74                              | 41,712,410,601,00 | 75     | 45,804,151,661,00 | 76     | 50,363,316,827,00 | 78     | 55,214,898,510,00 | 80,01  | 60,524,788,361,00 | 3,27,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 80,69                | 81   | 82                              |                   | 94     |                   | 85     |                   | 87     |                   | 88     |                   | 3,27,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                                                | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 27,6                 | 70,1 | 71,5                            |                   | 72     |                   | 73     |                   | 74     |                   | 75     |                   | 3,27,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 3,27,02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN |                                                                   |                      |      |                                 | 51,892,986,384,00 |        | 55,049,964,986,00 |        | 57,256,609,638,00 |        | 61,194,018,989,00 |        | 64,072,197,359,00 |                                                                             |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian          | Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan                    | 0,38                 | 0,38 | 0,38                            | 41,042,986,384,00 | 0,38   | 43,549,964,986,00 | 0,38   | 45,056,609,638,00 | 0,38   | 48,594,018,989,00 | 0,38   | 51,072,197,359,00 | 3,27,0,00,0,00,01 ,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |                                                                            |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                          |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030                                                                       |      |                                                                            |
|                                         |                                                                                          |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET                                                                     | PAGU |                                                                            |
| (01)                                    | (02)                                                                                     | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)                                                                       | (14) | (15)                                                                       |
|                                         | Persentase Peningkatan Produksi hortikultura                                             | 0,45                 | 0,45  | 0,45                            |      | 0,45   |      | 0,45   |      | 0,45   |      | 0,45                                                                       |      | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                         | Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan                                     | 0,60                 | 0,60  | 0,60                            |      | 0,60   |      | 0,60   |      | 0,60   |      | 0,60                                                                       |      | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                         | Persentase Peningkatan Populasi Ternak                                                   | 0,80                 | 0,80  | 0,80                            |      | 0,80   |      | 0,80   |      | 0,80   |      | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |      |                                                                            |
|                                         | Persentase Ketersediaan sarana pertanian                                                 | 40,00                | 45,00 | 50,00                           |      | 55,00  |      | 60,00  |      | 65,00  |      | 70,00                                                                      |      | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                         | Persentase Peningkatan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai standard | 17,00                | 17,00 | 17,00                           |      | 17,00  |      | 17,00  |      | 17,00  |      | 17,00                                                                      |      | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                           | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                                                |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                            |
|                                                                   |                                                                                                |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                            |
| (01)                                                              | (02)                                                                                           | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                       |
|                                                                   | Persentase Ketersediaan Benih Sumber Unggul Tanaman Pangan dan Hortikultura yang bersertifikat | 45,00                | 50,00 | 55,00                           |                   | 60,00  |                   | 65,00  |                   | 70,00  |                   | 75,00  |                   | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                                                   | Persentase Peningkatan Kelahiran Bibit Ternak Berkualitas                                      | 35,00                | 40,00 | 45,00                           |                   | 50,00  |                   | 55,00  |                   | 60,00  |                   | 65,00  |                   | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian             | Persentase ketersediaan sarana pertanian yang sesuai peruntukan Kab/Kota (%)                   | 15                   | 16    | 16                              | 10,850,000,000,00 | 17     | 11,500,000,000,00 | 19     | 12,200,000,000,00 | 21     | 12,600,000,000,00 | 23     | 13,000,000,000,00 | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
|                                                                   | Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan (%)                              | 1                    | 1,13  | 2,29                            |                   | 2,31   |                   | 2,33   |                   | 2,35   |                   | 2,38   |                   | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
| 3,27,03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN |                                                                                                |                      |       |                                 | 12,520,000,000,00 |        | 16,560,000,000,00 |        | 17,010,000,000,00 |        | 18,630,000,000,00 |        | 8,800,000,000,00  |                                                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                   |        |                   |        |                   |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                       |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                  |                                                                            |
|                                                                                   |                                                                                       |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             |                                                                            |
| (01)                                                                              | (02)                                                                                  | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)             | (15)                                                                       |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                          | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B (Ha)                        | 56                   | 58    | 61                              | 4,970,000,000,00 | 65     | 5,960,000,000,00  | 70     | 6,310,000,000,00  | 76     | 7,030,000,000,00  | 83     | 7,700,000,000,00 | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                                                                   | Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Bunbin                                       | 15,00                | 15,00 | 15,00                           |                  | 20     |                   | 20     |                   | 25     |                   | 25     |                  | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian                          | Persentase ketersediaan prasarana pertanian yang sesuai peruntukan kabupaten/kota (%) | 7                    | 7     | 8,5                             | 7,550,000,000,00 | 9      | 10,600,000,000,00 | 9,5    | 10,700,000,000,00 | 10     | 11,600,000,000,00 | 10,5   | 1,100,000,000,00 | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
|                                                                                   | Persentase peningkatan nilai tambah hasil produk perkebunan (%)                       | 3                    | 3     | 3,6                             |                  | 3,7    |                   | 3,8    |                   | 3,9    |                   | 4,2    |                  | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
| 3,27,04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER |                                                                                       |                      |       |                                 | 3,600,000,000,00 |        | 4,100,000,000,00  |        | 4,700,000,000,00  |        | 5,300,000,000,00  |        | 5,300,000,000,00 |                                                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                          |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                            |
|                                                                              |                                                                                                                          |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                            |
| (01)                                                                         | (02)                                                                                                                     | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                       |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat Veteriner | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (Dokumen)                                                   | 75                   | 76    | 77                              | 3,600,000,000,00  | 78     | 4,100,000,000,00  | 80     | 4,700,000,000,00  | 82     | 5,300,000,000,00  | 85     | 5,300,000,000,00  | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                                                              | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) | 55                   | 55    | 56                              |                   | 57     |                   | 58     |                   | 59     |                   | 60     |                   | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                                                              | Pesentase pemeriksaan sampel kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner                                          | 75,00                | 76,00 | 77,00                           |                   | 78     |                   | 80     |                   | 82     |                   | 85     |                   | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| 3,27,05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN          |                                                                                                                          |                      |       |                                 | 12,061,440,000,00 |        | 13,227,440,000,00 |        | 13,494,440,000,00 |        | 13,710,440,000,00 |        | 14,027,440,000,00 |                                                                            |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian               | Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)                                                                     | 80,74                | 81,29 | 81,94                           | 6,061,440,000,00  | 82,24  | 6,227,440,000,00  | 83,74  | 6,394,440,000,00  | 84,84  | 6,610,440,000,00  | 86,14  | 6,827,440,000,00  | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                              |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                            |
|                                                                |                                                                              |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                            |
| (01)                                                           | (02)                                                                         | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                       |
|                                                                | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian (Persentase) | 12,27                | 12,57 | 13,07                           |                  | 13,77  |                  | 14,67  |                  | 15,77  |                  | 16,97  |                  | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian | Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (Ha)           | 225                  | 425   | 425                             | 6,000,000,000,00 | 650    | 7,000,000,000,00 | 650    | 7,100,000,000,00 | 650    | 7,100,000,000,00 | 650    | 7,200,000,000,00 | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
| 3,27,06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN                    |                                                                              |                      |       |                                 | 400,000,000,00   |        | 600,000,000,00   |        | 700,000,000,00   |        | 700,000,000,00   |        | 700,000,000,00   |                                                                            |
| Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian  | Persentase perkebunan besar yang berizin usaha yang terbina dan terawasi (%) | 80                   | 81    | 82                              | 400,000,000,00   | 84     | 600,000,000,00   | 85     | 700,000,000,00   | 87     | 700,000,000,00   | 89     | 700,000,000,00   | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
| 3,27,07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN                         |                                                                              |                      |       |                                 | 4,270,000,000,00 |        | 4,450,000,000,00 |        | 4,680,000,000,00 |        | 4,850,000,000,00 |        | 5,020,000,000,00 |                                                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                           | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                            |
|                                                                 |                                                                                |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                            |
| (01)                                                            | (02)                                                                           | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                       |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian            | Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi (Persentase) | 0,1                  | 0,33 | 0,5                             | 2,270,000,000,00  | 0,8    | 2,450,000,000,00  | 1      | 2,630,000,000,00  | 1,2    | 2,800,000,000,00  | 1,3    | 2,970,000,000,00  | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
|                                                                 | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)               | 0,2                  | 0,24 | 0,59                            |                   | 0,63   |                   | 0,67   |                   | 0,77   |                   | 0,87   |                   | 3,27,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian            | Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)               | 4,08                 | 6,12 | 8,16                            | 2,000,000,000,00  | 10,2   | 2,000,000,000,00  | 12,2   | 2,050,000,000,00  | 14,28  | 2,050,000,000,00  | 16,32  | 2,050,000,000,00  | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
|                                                                 | Persentase kelembagaan petani pekebun yang dibentuk dan dibina                 | 1                    | 1,1  | 1,2                             |                   | 1,3    |                   | 1,4    |                   | 1,5    |                   | 1,6    |                   | 3,27,0,00,0,00,02,0000 - Dinas Perkebunan                                  |
| 3,28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN                     |                                                                                |                      |      |                                 | 88,608,447,815,00 |        | 86,000,000,000,00 |        | 88,240,000,000,00 |        | 90,460,000,000,00 |        | 92,700,000,000,00 |                                                                            |
| 3,28,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                |                      |      |                                 | 57,200,000,000,00 |        | 57,700,000,000,00 |        | 58,200,000,000,00 |        | 58,700,000,000,00 |        | 59,200,000,000,00 |                                                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                        | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                   |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                          |
|                                                                |                                                                   |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                          |
| (01)                                                           | (02)                                                              | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                     |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              | 57,200,000,000,00 | 74     | 57,700,000,000,00 | 76     | 58,200,000,000,00 | 78     | 58,700,000,000,00 | 80     | 59,200,000,000,00 | 3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan                 |
|                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |                   | 88     |                   | 88,5   |                   | 90     |                   | 90,5   |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan                 |
|                                                                | Nilai AKIP (Nilai)                                                | 76,42                | 76,5 | 77                              |                   | 77,5   |                   | 78     |                   | 79     |                   | 80     |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan                 |
|                                                                | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |                   | 77,5   |                   | 78     |                   | 79     |                   | 80     |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I        |
|                                                                | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 27                   | 70   | 72                              |                   | 74     |                   | 76     |                   | 78     |                   | 80     |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I        |
|                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |                   | 88     |                   | 88,5   |                   | 90     |                   | 90,5   |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I        |
|                                                                | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |                   | 77,5   |                   | 78     |                   | 79     |                   | 80     |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                   |                      |      | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                   |
|                                         |                                                                   |                      |      | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                   |
| (01)                                    | (02)                                                              | (03)                 | (04) | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                              |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III          |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III          |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI     |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI     |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI     |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                   |                      |      | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                   |
|                                         |                                                                   |                      |      | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                   |
| (01)                                    | (02)                                                              | (03)                 | (04) | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                              |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun     |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun     |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                               |                      |      | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                 |
|                                         |                                                                               |                      |      | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                 |
| (01)                                    | (02)                                                                          | (03)                 | (04) | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                            |
|                                         | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0006 - UPTD<br>KPHP Tebo Barat<br>Unit IX |
|                                         | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0006 - UPTD<br>KPHP Tebo Barat<br>Unit IX |
|                                         | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0006 - UPTD<br>KPHP Tebo Barat<br>Unit IX |
|                                         | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0007 - UPTD<br>KPHP Tebo Timur<br>Unit X  |
|                                         | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0007 - UPTD<br>KPHP Tebo Timur<br>Unit X  |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                   |                      |      | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                               |
|                                         |                                                                   |                      |      | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                               |
| (01)                                    | (02)                                                              | (03)                 | (04) | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                          |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X          |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII      |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                   |                      |      | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                               |
|                                         |                                                                   |                      |      | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                               |
| (01)                                    | (02)                                                              | (03)                 | (04) | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                                          |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII                      |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV              |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 25                   | 70   | 72                              |      | 74     |      | 76     |      | 78     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV              |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV              |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 86                   | 87   | 87,5                            |      | 88     |      | 88,5   |      | 90     |      | 90,5   |      | 3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 76,42                | 76,5 | 77                              |      | 77,5   |      | 78     |      | 79     |      | 80     |      | 3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                     |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                               |
|                                         |                                                                                                     |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                               |
| (01)                                    | (02)                                                                                                | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                          |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                                   | 25                   | 70    | 72                              |                   | 74     |                   | 76     |                   | 79     |                   | 80     |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                 | 76,42                | 76,5  | 77                              |                   | 77,5   |                   | 78     |                   | 79     |                   | 80     |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0012 - UPTD Tahura                                          |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                                   | 25                   | 70    | 72                              |                   | 74     |                   | 76     |                   | 78     |                   | 80     |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0012 - UPTD Tahura                                          |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                                           | 86                   | 87    | 87,5                            |                   | 88     |                   | 88,5   |                   | 90     |                   | 90,5   |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0012 - UPTD Tahura                                          |
| 3,28,03 - PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN     |                                                                                                     |                      |       |                                 | 24,048,962,959,00 |        | 19,000,000,000,00 |        | 20,000,000,000,00 |        | 21,000,000,000,00 |        | 22,000,000,000,00 |                                                                               |
| Meningkatnya produktivitas hasil hutan  | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           | 24,048,962,959,00 | 0,216  | 19,000,000,000,00 | 0,218  | 20,000,000,000,00 | 0,22   | 21,000,000,000,00 | 0,222  | 22,000,000,000,00 | 3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan                                      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                     |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                   |
|                                         |                                                                                                     |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                   |
| (01)                                    | (02)                                                                                                | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                              |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0001 - UPTD KPHP Kerinci Unit I                 |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0002 - UPTD KPHP Bungo Unit II dan III          |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI     |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                                     |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                  |
|                                         |                                                                                                     |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                  |
| (01)                                    | (02)                                                                                                | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                             |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX            |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X             |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII    |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII         |
|                                         | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212 | 0,214                           |      | 0,216  |      | 0,218  |      | 0,22   |      | 0,222  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                                     |                      |        | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                               |
|                                                                                                        |                                                                                                     |                      |        | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                               |
| (01)                                                                                                   | (02)                                                                                                | (03)                 | (04)   | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                          |
|                                                                                                        | Persentase kontribusi sektor kehutanan dari retribusi dan bagi hasil terhadap Pendapatan Daerah (%) | 0,21                 | 0,212  | 0,214                           |                  | 0,216  |                  | 0,218  |                  | 0,22   |                  | 0,222  |                  | 3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII |
| 3,28,04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA                                  |                                                                                                     |                      |        |                                 | 2,700,000,000,00 |        | 2,900,000,000,00 |        | 3,100,000,000,00 |        | 3,300,000,000,00 |        | 3,500,000,000,00 |                                                                               |
| Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya                                      | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya (%)            | 81,87                | 81,878 | 81,887                          | 2,700,000,000,00 | 81,896 | 2,900,000,000,00 | 81,905 | 3,100,000,000,00 | 81,914 | 3,300,000,000,00 | 81,922 | 3,500,000,000,00 | 3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan                                      |
|                                                                                                        | Persentase peningkatan luasan pemulihan dan perlindungan SDA hayati dan ekosistemnya (%)            | 81,87                | 81,878 | 81,887                          |                  | 81,896 |                  | 81,905 |                  | 81,914 |                  | 81,922 |                  | 3,28,0,00,0,00,01,0012 - UPTD Tahura                                          |
| 3,28,05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN |                                                                                                     |                      |        |                                 | 4,384,941,906,00 |        | 6,000,000,000,00 |        | 6,500,000,000,00 |        | 7,000,000,000,00 |        | 7,500,000,000,00 |                                                                               |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                   |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                    |
|                                                               |                                                                                                   |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                    |
| (01)                                                          | (02)                                                                                              | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                               |
| Meningkatnya<br>Sumber Daya<br>Manusia di bidang<br>Kehutanan | Persentase<br>Peningkatan<br>Kelas Kelompok<br>Tani Hutan<br>Menuju Madya<br>(%)                  | 18,56                | 20,45 | 23,48                           | 4,384,941,906,00 | 26,52  | 6,000,000,000,00 | 29,54  | 6,500,000,000,00 | 32,57  | 7,000,000,000,00 | 35,61  | 7,500,000,000,00 | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kehutanan                    |
|                                                               | Persentase<br>Peningkatan<br>Kelas Kelompok<br>Usaha<br>Perhutanan<br>Sosial Menuju<br>Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |                  | 10,76  |                  | 12,35  |                  | 13,94  |                  | 15,54  |                  | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Kehutanan                    |
|                                                               | Persentase<br>Peningkatan<br>Kelas Kelompok<br>Usaha<br>Perhutanan<br>Sosial Menuju<br>Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |                  | 10,76  |                  | 12,35  |                  | 13,94  |                  | 15,54  |                  | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0001 - UPTD<br>KPHP Kerinci<br>Unit I        |
|                                                               | Persentase<br>Peningkatan<br>Kelas Kelompok<br>Tani Hutan<br>Menuju Madya<br>(%)                  | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |                  | 26,52  |                  | 29,54  |                  | 32,57  |                  | 35,61  |                  | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0002 - UPTD<br>KPHP Bungo Unit<br>II dan III |
|                                                               | Persentase<br>Peningkatan<br>Kelas Kelompok<br>Usaha<br>Perhutanan<br>Sosial Menuju<br>Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |                  | 10,76  |                  | 12,35  |                  | 13,94  |                  | 15,54  |                  | 3,28,0,00,0,00,01<br>,0002 - UPTD<br>KPHP Bungo Unit<br>II dan III |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                 |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                   |
|                                         |                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                   |
| (01)                                    | (02)                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                              |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI     |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |      | 10,76  |      | 12,35  |      | 13,94  |      | 15,54  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0003 - UPTD KPHP Merangin Unit IV, V dan VI     |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |      | 10,76  |      | 12,35  |      | 13,94  |      | 15,54  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0004 - UPTD KPHP Limau Unit VII Hulu Sarolangun |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun     |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                 |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                               |
|                                         |                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                               |
| (01)                                    | (02)                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                          |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |      | 10,76  |      | 12,35  |      | 13,94  |      | 15,54  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0005 - UPTD KPHP Unit VIII Hilir Sarolangun |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX         |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |      | 10,76  |      | 12,35  |      | 13,94  |      | 15,54  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0006 - UPTD KPHP Tebo Barat Unit IX         |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X          |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |      | 10,76  |      | 12,35  |      | 13,94  |      | 15,54  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0007 - UPTD KPHP Tebo Timur Unit X          |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                 |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                  |
|                                         |                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                  |
| (01)                                    | (02)                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                             |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII    |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |      | 10,76  |      | 12,35  |      | 13,94  |      | 15,54  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0008 - UPTD KPHP Batanghari Unit XI dan XII    |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII         |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |      | 10,76  |      | 12,35  |      | 13,94  |      | 15,54  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0009 - UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII         |
|                                         | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |      | 26,52  |      | 29,54  |      | 32,57  |      | 35,61  |      | 3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                          | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                 |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                               |
|                                                                  |                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                               |
| (01)                                                             | (02)                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                          |
|                                                                  | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |                   | 10,76  |                   | 12,35  |                   | 13,94  |                   | 15,54  |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0010 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Timur Unit XIV              |
|                                                                  | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani Hutan Menuju Madya (%)               | 18,56                | 20,45 | 23,48                           |                   | 26,52  |                   | 29,54  |                   | 32,57  |                   | 35,61  |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII |
|                                                                  | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Silver (%) | 6,57                 | 7,57  | 9,16                            |                   | 10,76  |                   | 12,35  |                   | 13,94  |                   | 15,54  |                   | 3,28,0,00,0,00,01,0011 - UPTD KPHP Tanjung Jabung Barat Unit XV, XVI dan XVII |
| 3,28,06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)         |                                                                                 |                      |       |                                 | 274,542,950,00    |        | 400,000,000,00    |        | 440,000,000,00    |        | 460,000,000,00    |        | 500,000,000,00    |                                                                               |
| Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)   | Persentase Peningkatan Tutupan Lahan Kritis (%)                                 | 0,19                 | 0,27  | 0,37                            | 274,542,950,00    | 0,47   | 400,000,000,00    | 0,57   | 440,000,000,00    | 0,68   | 460,000,000,00    | 0,78   | 500,000,000,00    | 3,28,0,00,0,00,01,0000 - Dinas Kehutanan                                      |
| 3,29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL |                                                                                 |                      |       |                                 | 38,300,000,000,00 |        | 39,750,000,000,00 |        | 40,550,000,000,00 |        | 41,650,000,000,00 |        | 42,750,000,000,00 |                                                                               |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                             | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                  |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                            |
|                                                                             |                                                                                                                  |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                            |
| (01)                                                                        | (02)                                                                                                             | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                       |
| 3,29,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                                                                  |                      |       |                                 | 24,150,000,000,00 |        | 25,250,000,000,00 |        | 26,350,000,000,00 |        | 27,450,000,000,00 |        | 28,550,000,000,00 |                                                                            |
| Terwujudnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik yang prima<br>dan akuntabel     | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai)                                    | 35,02                | 70    | 72                              | 24,150,000,000,00 | 74     | 25,250,000,000,00 | 76     | 26,350,000,000,00 | 78     | 27,450,000,000,00 | 80     | 28,550,000,000,00 | 3,29,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                                                                  | 87,22                | 88,51 | 89,8                            |                   | 91,09  |                   | 92,38  |                   | 93,67  |                   | 94,96  |                   | 3,29,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral |
|                                                                             | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                                                        | 75,20                | 77,45 | 79,7                            |                   | 81,95  |                   | 84,2   |                   | 86,45  |                   | 88,7   |                   | 3,29,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral |
| 3,29,02 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>ASPEK<br>KEGEOLOGIAN                    |                                                                                                                  |                      |       |                                 | 650,000,000,00    |        | 1,000,000,000,00  |        | 700,000,000,00    |        | 700,000,000,00    |        | 700,000,000,00    |                                                                            |
| Meningkatnya tata<br>kelola kegeologian                                     | Persentase<br>pengusahaan<br>usaha air tanah<br>(kewenangan<br>provinsi) yang<br>baik dan benar,<br>(Persentase) | NA                   | 10    | 40                              | 650,000,000,00    | 50     | 1,000,000,000,00  | 60     | 700,000,000,00    | 70     | 700,000,000,00    | 80     | 700,000,000,00    | 3,29,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                        | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025    | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |         |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|---------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                                                                                                                                                             |                      |         | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028    |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                            |
|                                                               |                                                                                                                                                             |                      |         | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET  | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                            |
| (01)                                                          | (02)                                                                                                                                                        | (03)                 | (04)    | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)    | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                       |
| 3,29,03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>MINERAL DAN<br>BATUBARA   |                                                                                                                                                             |                      |         |                                 | 8,000,000,000,00 |        | 8,000,000,000,00 |         | 8,000,000,000,00 |        | 8,000,000,000,00 |        | 8,000,000,000,00 |                                                                            |
| Meningkatnya tata<br>kelola mineral dan<br>Batubara           | Presentase<br>pemegang IUP<br>yang<br>melaksanakan<br>tata kelola<br>pengusahaan<br>pertambangan<br>mineral bukan<br>logam dan<br>batuan dengan<br>baik (%) | 35,2                 | 45,5    | 65,5                            | 8,000,000,000,00 | 75,5   | 8,000,000,000,00 | 85,5    | 8,000,000,000,00 | 95     | 8,000,000,000,00 | 95     | 8,000,000,000,00 | 3,29,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral |
| 3,29,05 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>ENERGI BARU<br>TERBARUKAN |                                                                                                                                                             |                      |         |                                 | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |         | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |        | 500,000,000,00   |                                                                            |
| Meningkatnya tata<br>kelola energi baru<br>terbarukan         | Intensitas energi<br>primer                                                                                                                                 | NA                   | 111.308 | 113.405                         | 500.000.000      | 115320 | 500.000.000      | 116755  | 500.000.000      | 118513 | 500.000.000      | 119630 | 500.000.000      | 3,29,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral |
| 3,29,06 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>KETENAGALISTRIK<br>AN     |                                                                                                                                                             |                      |         |                                 | 5,000,000,000,00 |        | 5,000,000,000,00 |         | 5,000,000,000,00 |        | 5,000,000,000,00 |        | 5,000,000,000,00 |                                                                            |
| Meningkatnya<br>cakupan pelayanan<br>kelistrikan              | Konsumsi listrik<br>per kapita                                                                                                                              | 768                  | 696     | 700,52                          |                  | 991,21 |                  | 1150,07 |                  | 1181   |                  | 1190   |                  | 3,29,0,00,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Energi dan<br>Sumber Daya<br>Mineral |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                              | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                                          |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                               |
|                                                                                                      |                                                                          |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                               |
| (01)                                                                                                 | (02)                                                                     | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                          |
| 3,30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                                        |                                                                          |                      |      |                                 | 10,277,120,000,00 |        | 11,342,000,000,00 |        | 12,171,800,000,00 |        | 12,916,220,000,00 |        | 13,732,343,000,00 |                                                               |
| 3,30,02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                                               |                                                                          |                      |      |                                 | 800,000,000,00    |        | 870,000,000,00    |        | 942,000,000,00    |        | 1,016,200,000,00  |        | 1,092,820,000,00  |                                                               |
| Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha                                     | Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (Persentase)         | 85                   | 85   | 88                              | 800,000,000,00    | 89     | 870,000,000,00    | 90     | 942,000,000,00    | 91     | 1,016,200,000,00  | 92,5   | 1,092,820,000,00  | 3,30,3,31,0,00,01 ,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3,30,03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                                          |                                                                          |                      |      |                                 | 160,000,000,00    |        | 165,000,000,00    |        | 170,000,000,00    |        | 175,000,000,00    |        | 180,000,000,00    |                                                               |
| Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi | Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase) | NA                   | 100  | 100                             | 160,000,000,00    | 100    | 165,000,000,00    | 100    | 170,000,000,00    | 100    | 175,000,000,00    | 100    | 180,000,000,00    | 3,30,3,31,0,00,01 ,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3,30,04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING                        |                                                                          |                      |      |                                 | 4,410,000,000,00  |        | 4,482,000,000,00  |        | 4,674,800,000,00  |        | 4,770,020,000,00  |        | 4,984,523,000,00  |                                                               |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                         | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                              |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                              |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030                                                         |                  |                                                              |
|                                                                                                   |                                                                                                              |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                                       | PAGU             |                                                              |
| (01)                                                                                              | (02)                                                                                                         | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)                                                         | (14)             | (15)                                                         |
| Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting | Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)                          | 1,65                 | 80   | 80                              | 4,410,000,000,00 | 90     | 4,482,000,000,00 | 90     | 4,674,800,000,00 | 95     | 4,770,020,000,00 | 95                                                           | 4,984,523,000,00 | 3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3,30,05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR                                                             |                                                                                                              |                      |      |                                 | 2,200,000,000,00 |        | 2,450,000,000,00 |        | 2,700,000,000,00 |        | 2,950,000,000,00 |                                                              | 3,100,000,000,00 |                                                              |
| Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor                                                | Nilai Ekspor Barang (USD Milyar)                                                                             | 2,34                 | 2,34 | 2,49                            | 2,200,000,000,00 | 2,49   | 2,450,000,000,00 | 2,66   | 2,700,000,000,00 | 2,66   | 2,950,000,000,00 | 2,84                                                         | 3,100,000,000,00 | 3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3,30,06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                                         |                                                                                                              |                      |      |                                 | 2,242,120,000,00 |        | 2,870,000,000,00 |        | 3,140,000,000,00 |        | 3,415,000,000,00 |                                                              | 3,750,000,000,00 |                                                              |
| Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk                                                         | Persentase pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu produk di seluruh darah kabupaten/kota pada UPTD BPSMB | 100                  | 100  | 100                             | 2,242,120,000,00 | 100    | 2,870,000,000,00 | 100    | 3,140,000,000,00 | 100    | 3,415,000,000,00 | 100                                                          | 3,750,000,000,00 | 3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
|                                                                                                   | Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)                                                                 | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan |                  |                                                              |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                               |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                        |
|                                                                             |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                        |
| (01)                                                                        | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                   |
| 3,30,07 - PROGRAM<br>PENGGUNAAN DAN<br>PEMASARAN<br>PRODUK DALAM<br>NEGERI  |                                                                               |                      |       |                                 | 465,000,000,00    |        | 505,000,000,00    |        | 545,000,000,00    |        | 590,000,000,00    |        | 625,000,000,00    |                                                                        |
| Meningkatnya<br>penggunaan dan<br>pemasaran produk<br>dalam negeri          | Persentase<br>Promosi produk<br>lokal yang<br>difasilitasi/<br>dilaksanakan   | 65                   | 65    | 66                              | 465,000,000,00    | 67     | 505,000,000,00    | 70     | 545,000,000,00    | 72     | 590,000,000,00    | 75     | 625,000,000,00    | 3,30,3,31,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3,31 - URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>BIDANG<br>PERINDUSTRIAN                    |                                                                               |                      |       |                                 | 26,087,164,843,00 |        | 28,231,909,085,00 |        | 29,409,882,269,00 |        | 30,604,073,401,00 |        | 31,502,508,718,00 |                                                                        |
| 3,31,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                               |                      |       |                                 | 22,175,164,843,00 |        | 24,097,909,085,00 |        | 25,049,882,269,00 |        | 26,017,673,401,00 |        | 26,687,268,718,00 |                                                                        |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel     | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 19,08                | 70,01 | 80                              | 22,175,164,843,00 | 85     | 24,097,909,085,00 | 88     | 25,049,882,269,00 | 90     | 26,017,673,401,00 | 95     | 26,687,268,718,00 | 3,30,3,31,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perindustrian<br>dan Perdagangan |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 85                   | 85    | 86                              |                   | 86,5   |                   | 87     |                   | 87,5   |                   | 88     |                   | 3,30,3,31,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perindustrian<br>dan Perdagangan |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                 |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                        |
|                                                                              |                                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                        |
| (01)                                                                         | (02)                                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                   |
|                                                                              | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                                       | 70,15                | 70,15 | 70,16                           |                  | 70,17  |                  | 70,18  |                  | 70,19  |                  | 70,2   |                  | 3,30,3,31,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3,31,02 - PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>DAN<br>PEMBANGUNAN<br>INDUSTRI           |                                                                                                 |                      |       |                                 | 3,162,000,000,00 |        | 3,314,000,000,00 |        | 3,466,000,000,00 |        | 3,618,000,000,00 |        | 3,770,000,000,00 |                                                                        |
| Meningkatnya<br>realisasi<br>pembangunan<br>industri                         | Persentase<br>Realisasi<br>Investasi Sektor<br>Industri dan<br>Kawasan Industri<br>(Persentase) | 100                  | 100   | 100                             | 3,162,000,000,00 | 100    | 3,314,000,000,00 | 100    | 3,466,000,000,00 | 100    | 3,618,000,000,00 | 100    | 3,770,000,000,00 | 3,30,3,31,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3,31,03 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN<br>IZIN USAHA<br>INDUSTRI                  |                                                                                                 |                      |       |                                 | 300,000,000,00   |        | 370,000,000,00   |        | 444,000,000,00   |        | 518,400,000,00   |        | 595,240,000,00   |                                                                        |
| Meningkatnya<br>kualitas perizinan<br>berusaha sektor<br>perindustrian       | Persentase Izin<br>usaha industri<br>yang diterbitkan                                           | 100                  | 100   | 100                             | 300,000,000,00   | 100    | 370,000,000,00   | 100    | 444,000,000,00   | 100    | 518,400,000,00   | 100    | 595,240,000,00   | 3,30,3,31,0,00,01<br>,0000 - Dinas<br>Perindustrian<br>dan Perdagangan |
| 3,31,04 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>SISTEM INFORMASI<br>INDUSTRI<br>NASIONAL |                                                                                                 |                      |       |                                 | 450,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |        | 450,000,000,00   |                                                                        |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                      | INDIKATOR OUTCOME                                                         | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                        |                                                                           |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                              |
|                                                        |                                                                           |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                              |
| (01)                                                   | (02)                                                                      | (03)          | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                         |
| Meningkatnya pemanfaatan informasi industri            | Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini (%) | 100           | 100  | 100                             | 450,000,000,00   | 100    | 450,000,000,00   | 100    | 450,000,000,00   | 100    | 450,000,000,00   | 100    | 450,000,000,00   | 3,30,3,31,0,00,01,0000 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan |
| 3,32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI         |                                                                           |               |      |                                 | 1,404,000,000,00 |        | 1,711,000,000,00 |        | 1,904,000,000,00 |        | 2,116,000,000,00 |        | 2,230,000,000,00 |                                                              |
| 3,32,02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI     |                                                                           |               |      |                                 | 257,000,000,00   |        | 278,000,000,00   |        | 300,000,000,00   |        | 328,000,000,00   |        | 328,000,000,00   |                                                              |
| Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi                  | Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)            | 100           | 100  | 100                             | 257,000,000,00   | 100    | 278,000,000,00   | 100    | 300,000,000,00   | 100    | 328,000,000,00   | 100    | 328,000,000,00   | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3,32,03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI     |                                                                           |               |      |                                 | 619,000,000,00   |        | 775,000,000,00   |        | 877,000,000,00   |        | 929,000,000,00   |        | 977,000,000,00   |                                                              |
| Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi | Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang (Persentase)         | 18            | 20   | 20                              | 619,000,000,00   | 22     | 775,000,000,00   | 25     | 877,000,000,00   | 27     | 929,000,000,00   | 30     | 977,000,000,00   | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                   |                      |        | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                              |
|                                                                                             |                                                                                   |                      |        | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                              |
| (01)                                                                                        | (02)                                                                              | (03)                 | (04)   | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                         |
|                                                                                             | Persentase pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera (%) | 27,61%               | 27,61% | 30,00%                          |                    | 50,00% |                    | 60,00% |                    | 75,00% |                    | 85,00% |                    | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 3,32,04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI                                         |                                                                                   |                      |        |                                 | 528,000,000,00     |        | 658,000,000,00     |        | 727,000,000,00     |        | 859,000,000,00     |        | 925,000,000,00     |                                                              |
| Meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi | Persentase Transmigran yang Dibina dan Diberdayakan (Persentase)                  | 0,01                 | 0,12   | 0,016                           | 528,000,000,00     | 0,024  | 658,000,000,00     | 0,03   | 727,000,000,00     | 0,046  | 859,000,000,00     | 0,048  | 925,000,000,00     | 2,07,3,32,0,00,01,0000 - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 4,01 - SEKRETARIAT DAERAH                                                                   |                                                                                   |                      |        |                                 | 245.366.338.530,00 |        | 270.626.948.913,00 |        | 295.989.538.563,00 |        | 304.025.671.026,00 |        | 321.973.063.500,00 |                                                              |
| 4,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                             |                                                                                   |                      |        |                                 | 147.027.357.314,00 |        | 166.551.434.779,00 |        | 185.597.921.111,00 |        | 186.683.214.332,00 |        | 197.672.775.663,00 |                                                              |
| Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima dan Akuntabel                              | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                               | 71,68                | 73,01  | 74,5                            | 147.027.357.314,00 | 75,57  | 166.551.434.779,00 | 76,6   | 185.597.921.111,00 | 77,5   | 186.683.214.332,00 | 79,5   | 197.672.775.663,00 | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah                  |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                    |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                                   |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                               |
|                                         |                                                                   |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                               |
| (01)                                    | (02)                                                              | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                          |
|                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 96,6                 | 96,7  | 96,8                            |      | 96,9   |      | 97     |      | 97,1   |      | 97,2   |      | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah                   |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 84,05                | 84,1  | 84,2                            |      | 84,33  |      | 86,5   |      | 86,51  |      | 87,33  |      | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah                   |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 98,681               | 98,69 | 98,7                            |      | 98,75  |      | 98,77  |      | 98,8   |      | 98,85  |      | 4,01,0,00,0,00,01,0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 72,4                 | 73    | 74,2                            |      | 75     |      | 76,5   |      | 77     |      | 78     |      | 4,01,0,00,0,00,01,0001 - Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 84,967               | 85    | 85,05                           |      | 85,5   |      | 85,9   |      | 86     |      | 86,1   |      | 4,01,0,00,0,00,01,0002 - Biro Kesejahteraan Rakyat            |
|                                         | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 60,55                | 70,05 | 72                              |      | 73     |      | 74     |      | 75     |      | 77,5   |      | 4,01,0,00,0,00,01,0002 - Biro Kesejahteraan Rakyat            |
|                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 83,333               | 84,09 | 84,94                           |      | 85,78  |      | 86,62  |      | 87,47  |      | 88,31  |      | 4,01,0,00,0,00,01,0003 - Biro Perekonomian                    |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                         |                                                 |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                                                                  |
|                                         |                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                                                                  |
| (01)                                    | (02)                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)   | (14) | (15)                                                             |
|                                         | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)       | 70,75                | 72,3  | 73,85                           |      | 75,4   |      | 76,95  |      | 78,5   |      | 80,05  |      | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0003 - Biro<br>Perekonomian                |
|                                         | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks) | 80,406               | 80,5  | 81                              |      | 82     |      | 83     |      | 84     |      | 85     |      | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0004 - Biro<br>Administrasi<br>Pembangunan |
|                                         | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)       | 67,06                | 70,25 | 72                              |      | 73     |      | 74     |      | 75     |      | 77,5   |      | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0004 - Biro<br>Administrasi<br>Pembangunan |
|                                         | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks) | 84,444               | 85    | 85,5                            |      | 86     |      | 86,5   |      | 87     |      | 87,5   |      | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0005 - Biro<br>Umum                        |
|                                         | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)       | 74,25                | 75,25 | 76                              |      | 77     |      | 78,25  |      | 79     |      | 79,5   |      | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0005 - Biro<br>Umum                        |
|                                         | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks) | 82,947               | 83    | 84                              |      | 85     |      | 86     |      | 88     |      | 89     |      | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0006 - Biro<br>Administrasi<br>Pimpinan    |
|                                         | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)       | 71,01                | 72    | 74                              |      | 76     |      | 78     |      | 80,01  |      | 80,1   |      | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0006 - Biro<br>Administrasi<br>Pimpinan    |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME               | INDIKATOR<br>OUTCOME                      | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                       |                                           |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                         |
|                                                       |                                           |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                         |
| (01)                                                  | (02)                                      | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                    |
|                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | 85,167               | 85,5  | 86,5                            |                  | 87     |                  | 87     |                  | 87,5   |                  | 88     |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0007 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
|                                                       | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)       | 74,11                | 75    | 76                              |                  | 77     |                  | 78,25  |                  | 79     |                  | 80,01  |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0007 - Biro Pengadaan Barang dan Jasa |
|                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | 87,317               | 89    | 89,25                           |                  | 89,5   |                  | 90     |                  | 90,25  |                  | 90,5   |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0008 - Biro Hukum                     |
|                                                       | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)       | 74,8                 | 75    | 77                              |                  | 78     |                  | 79     |                  | 80     |                  | 81     |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0008 - Biro Hukum                     |
|                                                       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks) | 88,944               | 89    | 90                              |                  | 90,01  |                  | 90,05  |                  | 90,07  |                  | 90,08  |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0009 - Biro Organisasi                |
|                                                       | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)       | 80,15                | 80,16 | 80,2                            |                  | 80,21  |                  | 80,23  |                  | 80,24  |                  | 80,25  |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0009 - Biro Organisasi                |
| 4,01,02 - PROGRAM PENATAAN ORGANISASI                 |                                           |                      |       |                                 | 3,960,000,000,00 |        | 4,752,000,000,00 |        | 5,702,400,000,00 |        | 6,842,880,000,00 |        | 8,211,456,000,00 |                                                         |
| Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah | Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)     | 37                   | 37,01 | 37,18                           | 3,960,000,000,00 | 37,25  | 4,752,000,000,00 | 37,35  | 5,702,400,000,00 | 37,45  | 6,842,880,000,00 | 37,55  | 8,211,456,000,00 | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah             |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                     |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                    | 2030   |                    |                                             |
|                                                                 |                                                                     |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                             |
| (01)                                                            | (02)                                                                | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                        |
| 4,01,03 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH               |                                                                     |                      |       |                                 | 1,550,000,000,00  |        | 1,680,183,551,00  |        | 2,000,000,000,00  |        | 2,509,455,996,00   |        | 2,509,455,996,00   |                                             |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah | Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)                   | 2,9788               | 2,979 | 2,98                            | 1,550,000,000,00  | 2,985  | 1,680,183,551,00  | 2,986  | 2,000,000,000,00  | 2,987  | 2,509,455,996,00   | 3      | 2,509,455,996,00   | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |
|                                                                 | Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)                          | 61,9                 | 62    | 62,2                            |                   | 62,4   |                   | 62,6   |                   | 62,8   |                    | 63     |                    | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |
| 4,01,04 - PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT                          |                                                                     |                      |       |                                 | 86,598,975,079,00 |        | 90,928,923,833,00 |        | 95,475,370,025,00 |        | 100,249,138,526,00 |        | 105,261,595,452,00 |                                             |
| Meningkatnya kualitas kebijakan kesejahteraan rakyat            | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase) | 100                  | 100   | 100                             | 86,598,975,079,00 | 100    | 90,928,923,833,00 | 100    | 95,475,370,025,00 | 100    | 100,249,138,526,00 | 100    | 105,261,595,452,00 | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |
| 4,01,05 - PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM               |                                                                     |                      |       |                                 | 1,500,000,000,00  |        | 1,600,000,000,00  |        | 1,700,000,000,00  |        | 1,800,000,000,00   |        | 1,900,000,000,00   |                                             |
| Meningkatnya Kualitas produk hukum yang dihasilkan              | Persentase capaian rencana aksi HAM (%)                             | 100                  | 100   | 100                             | 1,500,000,000,00  | 100    | 1,600,000,000,00  | 100    | 1,700,000,000,00  | 100    | 1,800,000,000,00   | 100    | 1,900,000,000,00   | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                    | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                             |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                         |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030                                        |                  |                                             |
|                                                                           |                                                                                         |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                      | PAGU             |                                             |
| (01)                                                                      | (02)                                                                                    | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)                                        | (14)             | (15)                                        |
|                                                                           | Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang difasilitasi (%)                        | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100                                         |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |
|                                                                           | Persentase Produk Hukum yang sesuai dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi (%)  | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |                  |                                             |
| 4,01,06 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                            |                                                                                         |                      |      |                                 | 377,397,600,00   |        | 415,137,360,00   |        | 456,651,096,00   |        | 502,316,207,00   |                                             | 552,547,826,00   |                                             |
| Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pernbangunan | Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase) | 100                  | 100  | 100                             | 377,397,600,00   | 100    | 415,137,360,00   | 100    | 456,651,096,00   | 100    | 502,316,207,00   | 100                                         | 552,547,826,00   | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |
| 4,01,07 - PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA       |                                                                                         |                      |      |                                 | 2,776,608,537,00 |        | 3,054,269,390,00 |        | 3,359,696,331,00 |        | 3,695,665,965,00 |                                             | 4,065,232,563,00 |                                             |
| Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa                   | Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)                                                        | 100                  | 100  | 100                             | 2,776,608,537,00 | 100    | 3,054,269,390,00 | 100    | 3,359,696,331,00 | 100    | 3,695,665,965,00 | 100                                         | 4,065,232,563,00 | 4,01,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                    | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                    |        |                    |        |                    | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB            |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                         |                      |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                    | 2029   |                    | 2030   |                    |                                                       |
|                                                                             |                                                                         |                      |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU               |                                                       |
| (01)                                                                        | (02)                                                                    | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)               | (11)   | (12)               | (13)   | (14)               | (15)                                                  |
| 4,01,08 - PROGRAM<br>KEBIJAKAN<br>ADMINISTRASI<br>PEMBANGUNAN               |                                                                         |                      |       |                                 | 1,576,000,000,00   |        | 1,645,000,000,00   |        | 1,697,500,000,00   |        | 1,743,000,000,00   |        | 1,800,000,000,00   |                                                       |
| Meningkatnya<br>kualitas kebijakan<br>administrasi<br>pembangunan           | Efektivitas<br>Kebijakan<br>Administrasi<br>Pembangunan<br>(Persentase) | 100                  | 100   | 100                             | 1,576,000,000,00   | 100    | 1,645,000,000,00   | 100    | 1,697,500,000,00   | 100    | 1,743,000,000,00   | 100    | 1,800,000,000,00   | 4,01,0,00,0,00,01<br>,0000 -<br>Sekretariat<br>Daerah |
| 4,02 -<br>SEKRETARIAT<br>DPRD                                               |                                                                         |                      |       |                                 | 168,700,981,933,00 |        | 169,544,486,843,00 |        | 170,392,209,276,00 |        | 175,420,210,323,00 |        | 172,100,391,174,00 |                                                       |
| 4,02,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                         |                      |       |                                 | 79,643,010,102,00  |        | 80,041,225,153,00  |        | 80,441,431,278,00  |        | 85,019,678,435,00  |        | 81,247,856,626,00  |                                                       |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel     | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                               | 70                   | 71    | 72                              | 79,643,010,102,00  | 73     | 80,041,225,153,00  | 74     | 80,441,431,278,00  | 75     | 85,019,678,435,00  | 76     | 81,247,856,626,00  | 4,02,0,00,0,00,01<br>,0000 -<br>Sekretariat DPRD      |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                         | 85                   | 97,15 | 97,15                           |                    | 97,63  |                    | 98,11  |                    | 98,6   |                    | 99,09  |                    | 4,02,0,00,0,00,01<br>,0000 -<br>Sekretariat DPRD      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                   | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                           |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                   |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                      |                   |                                            |
|                                                                           |                                                                   |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                    | PAGU              |                                            |
| (01)                                                                      | (02)                                                              | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                                      | (14)              | (15)                                       |
|                                                                           | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 80                   | 80,5 | 81                              |                   | 81,5   |                   | 82     |                   | 82,5   |                   | 83                                        |                   | 4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD  |
| 4,02,02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD              |                                                                   |                      |      |                                 | 89,057,971,831,00 |        | 89,503,261,690,00 |        | 89,950,777,998,00 |        | 90,400,531,888,00 |                                           | 90,852,534,548,00 |                                            |
| Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan | Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)               | 100                  | 100  | 100                             | 89,057,971,831,00 | 100    | 89,503,261,690,00 | 100    | 89,950,777,998,00 | 100    | 90,400,531,888,00 | 100                                       | 90,852,534,548,00 | 4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD  |
|                                                                           | Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)                | 100                  | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD |                   |                                            |
|                                                                           | Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)   | 100                  | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 4,02,0,00,0,00,01,0000 - Sekretariat DPRD |                   |                                            |
| 5,01 - PERENCANAAN                                                        |                                                                   |                      |      |                                 | 32,196,863,791,00 |        | 33,867,855,485,00 |        | 35,745,618,112,00 |        | 37,139,562,732,00 |                                           | 38,811,264,408,00 |                                            |
| 5,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI           |                                                                   |                      |      |                                 | 16,294,923,190,00 |        | 16,783,770,885,00 |        | 17,387,284,012,00 |        | 17,705,902,532,00 |                                           | 18,340,079,608,00 |                                            |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                                                                            |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                                                                               |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                                                                            | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                            |
|                                                                                            |                                                                               |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU                                                                       | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                            |
| (01)                                                                                       | (02)                                                                          | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)                                                                       | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                       |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yg prima dan<br>akuntabel                      | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 81,5                 | 82   | 82,5                            | 16,294,923,190,00 | 83     | 16,783,770,885,00 | 83,5   | 17,387,284,012,00                                                          | 84     | 17,705,902,532,00 | 85     | 18,340,079,608,00 | 5,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
|                                                                                            | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 86                   | 86   | 86                              |                   | 86     |                   | 86,5   |                                                                            | 86,85  |                   | 87     |                   | 5,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |
|                                                                                            | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 92,9                 | 93   | 93,5                            | 94                | 94,5   | 95                | 96     | 5,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |        |                   |        |                   |                                                                            |
| 5,01,02 - PROGRAM<br>PERENCANAAN<br>PENGENDALIAN,<br>DAN EVALUASI<br>PEMBANGUNAN<br>DAERAH |                                                                               |                      |      |                                 | 6,017,999,901,00  |        | 6,350,144,400,00  |        | 7,125,073,700,00                                                           |        | 7,440,629,700,00  |        | 7,820,629,700,00  |                                                                            |
| Meningkatnya<br>kualitas<br>perencanaan<br>pembangunan<br>daerah                           | Persentase<br>Keselarasan<br>RPJMD dengan<br>Renstra PD<br>(Persentase)       | 97                   | 97   | 98                              | 6,017,999,901,00  | 98     | 6,350,144,400,00  | 98     | 7,125,073,700,00                                                           | 98     | 7,440,629,700,00  | 98     | 7,820,629,700,00  | 5,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Perencanaan<br>Pembangunan<br>Daerah |



| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                            | INDIKATOR OUTCOME                                                                                         | BASELINE 2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                   |        |                   |        |                   |                                                               |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                           |               |      | 2026                            |                  | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                                          |                   |                                                               |
|                                                                              |                                                                                                           |               |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                                        | PAGU              |                                                               |
| (01)                                                                         | (02)                                                                                                      | (03)          | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                                                          | (14)              | (15)                                                          |
|                                                                              | Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)                                                     | 98            | 98   | 98                              |                  | 98     |                   | 98     |                   | 98     |                   | 98                                                            |                   | 5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 5,01,03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |                                                                                                           |               |      |                                 | 9,883,940,700,00 |        | 10,733,940,200,00 |        | 11,233,260,400,00 |        | 11,993,030,500,00 |                                                               | 12,650,555,100,00 |                                                               |
| Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan                         | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)        | 100           | 100  | 100                             | 9,883,940,700,00 | 100    | 10,733,940,200,00 | 100    | 11,233,260,400,00 | 100    | 11,993,030,500,00 | 100                                                           | 12,650,555,100,00 | 5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
|                                                                              | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase) | 100           | 100  | 100                             |                  | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |                   |                                                               |
|                                                                              | Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)                 | 100           | 100  | 100                             |                  | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 5,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |                   |                                                               |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                     | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |      |  |      |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------|--|------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                               |                      |      | 2026                            |                      | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                                                                   |      |  |      |                                                                   |
|                                                                             |                                                                               |                      |      | TARGET                          | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                                                   |      |  |      |                                                                   |
| (01)                                                                        | (02)                                                                          | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)                 | (07)   | (08)                 | (09)   | (10)                 | (11)   | (12)                 | (13)   | (14)                 | (15)                                                              |      |  |      |                                                                   |
| 5,02 - KEUANGAN                                                             |                                                                               |                      |      |                                 | 1,160,928,761,165,00 |        | 1,411,651,163,755,00 |        | 1,661,347,123,645,00 |        | 1,981,772,109,092,00 |        | 2,366,041,956,529,00 |                                                                   |      |  |      |                                                                   |
| 5,02,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI |                                                                               |                      |      |                                 | 119,511,483,757,00   |        | 155,266,297,075,00   |        | 156,290,767,217,00   |        | 176,267,010,185,00   |        | 199,157,577,164,00   |                                                                   |      |  |      |                                                                   |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel     |                                                                               |                      |      |                                 | 25,995,752,774,00    |        | 33,273,394,460,00    |        | 37,524,996,099,00    |        | 42,144,918,066,00    |        | 47,362,020,666,00    | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |      |  |      |                                                                   |
| Terwujudnya<br>kualitas pelayanan<br>publik yang prima<br>dan akuntabel     | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 75,11                | 75,5 | 76                              | 93,515,730,983,00    | 78     | 121,992,902,615,00   | 80     | 118,765,771,118,00   | 81     | 134,122,092,119,00   | 81,5   | 151,795,556,498,00   | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |      |  |      |                                                                   |
|                                                                             | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 94,8                 | 94,9 | 95                              |                      |        |                      | 95,1   |                      |        |                      | 95,2   |                      |                                                                   | 95,3 |  | 95,4 | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |
|                                                                             | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 86                   | 86,2 | 86,4                            |                      |        |                      | 86,6   |                      |        |                      | 86,8   |                      |                                                                   | 87   |  | 87,2 | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                            | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                      |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|---------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                 |                      |       | 2026                            |                      | 2027   |                      | 2028   |                      | 2029   |                      | 2030   |                      |                                                         |
|                                               |                                                                                 |                      |       | TARGET                          | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 | TARGET | PAGU                 |                                                         |
| (01)                                          | (02)                                                                            | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)                 | (07)   | (08)                 | (09)   | (10)                 | (11)   | (12)                 | (13)   | (14)                 | (15)                                                    |
|                                               | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)               | 95                   | 95    | 94,9                            |                      | 95     |                      | 95,1   |                      | 95,2   |                      | 95,3   |                      | 5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah        |
|                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                       | 86                   | 86    | 86,4                            |                      | 86,6   |                      | 86,8   |                      | 87     |                      | 87,2   |                      | 5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah        |
|                                               | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                             | 75                   | 75,2  | 75,5                            |                      | 76     |                      | 76,5   |                      | 77     |                      | 77,5   |                      | 5,02,0,00,0,00,02,0000 - Badan Pendapatan Daerah        |
| 5,02,02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |                                                                                 |                      |       |                                 | 1,011,004,189,363,00 |        | 1,214,045,585,356,00 |        | 1,456,420,057,475,00 |        | 1,747,279,165,665,00 |        | 2,096,334,241,352,00 |                                                         |
| Meningkatnya tata kelola anggaran             | Persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD | 84,09                | 84,09 | 80                              | 1,007,819,670,924,00 | 30     | 1,209,745,127,220,00 | 30     | 1,451,415,919,357,00 | 30     | 1,741,423,015,271,00 | 30     | 2,089,440,741,607,00 | 5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah |
|                                               | Persentase Alokasi Infrastruktur Pelayanan Publik                               | 20,18                | 20,18 | 20,80                           |                      | 21     |                      | 21,2   |                      | 21,5   |                      | 21,8   |                      | 5,02,0,00,0,00,01,0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                    | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025   | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |                                                                   |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                               |                      |        | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030                                                              |                   |                                                                   |
|                                                            |                                                                               |                      |        | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET                                                            | PAGU              |                                                                   |
| (01)                                                       | (02)                                                                          | (03)                 | (04)   | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)                                                              | (14)              | (15)                                                              |
| Meningkatnya tata<br>kelola<br>perbendaharaan              | Pesentase<br>Realisasi<br>Anggaran Belanja<br>Urusan Wajib<br>Pelayanan Dasar | 94,57                | 94,57  | 94,65                           | 1,663,019,270,00  | 95     | 1,986,240,432,00  | 95,3   | 2,384,414,480,00  | 95,5   | 2,877,686,319,00  | 96                                                                | 3,492,806,998,00  | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |
|                                                            | Persentase<br>Penurunan SILPA                                                 | -16,17               | -16,17 | -16,17                          |                   | -16,17 |                   | -16,17 |                   | -16,17 |                   | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |                   |                                                                   |
| Meningkatnya tata<br>kelola akuntansi<br>dan pelaporan     | Persentase<br>laporan<br>keuangan tepat<br>waktu<br>(Persentase)              | 100                  | 100    | 100                             | 1,521,499,169,00  | 100    | 2,314,217,704,00  | 100    | 2,619,723,638,00  | 100    | 2,978,464,075,00  | 100                                                               | 3,400,692,747,00  | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |
| 5,02,03 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>BARANG MILIK<br>DAERAH |                                                                               |                      |        |                                 | 6,096,000,000,00  |        | 7,010,000,000,00  |        | 8,602,000,000,00  |        | 9,271,000,000,00  |                                                                   | 10,662,000,000,00 |                                                                   |
| Meningkatnya tata<br>kelola aset daerah                    | Persentase<br>Penambahan<br>Nilai Aset Tetap<br>(Persentase)                  | 16,71                | 16,71  | 16,83                           | 6,096,000,000,00  | 16,9   | 7,010,000,000,00  | 16,92  | 8,602,000,000,00  | 16,95  | 9,271,000,000,00  | 17                                                                | 10,662,000,000,00 | 5,02,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Keuangan dan<br>Aset Daerah |
| 5,02,04 - PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDAPATAN<br>DAERAH   |                                                                               |                      |        |                                 | 24,317,088,045,00 |        | 35,329,281,324,00 |        | 40,034,298,953,00 |        | 48,954,933,242,00 |                                                                   | 59,888,138,013,00 |                                                                   |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                           | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                         | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                              |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                    |
|                                                                   |                                                                              |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                    |
| (01)                                                              | (02)                                                                         | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                               |
| Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan    | Persentase Peningkatan PAD                                                   | 0,01                 | -6,66 | 4,49                            | 20,188,563,351,00 | 1,02   | 26,411,091,700,00 | 2,24   | 32,424,329,638,00 | 2,17   | 39,822,970,063,00 | 2,12   | 48,929,782,198,00 | 5,02,0,00,0,00,02 ,0000 - Badan Pendapatan Daerah  |
| Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan                    | Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (Persentase)         | 100                  | 100   | 100                             | 447,741,082,00    | 100    | 1,660,857,484,00  | 100    | 1,993,028,981,00  | 100    | 2,391,634,778,00  | 100    | 2,869,961,733,00  | 5,02,0,00,0,00,02 ,0000 - Badan Pendapatan Daerah  |
| Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital | Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (Persentase) | 75                   | 75,5  | 76                              | 3,680,783,612,00  | 76,5   | 7,257,332,140,00  | 77     | 5,616,940,334,00  | 77,5   | 6,740,328,401,00  | 100    | 8,088,394,082,00  | 5,02,0,00,0,00,02 ,0000 - Badan Pendapatan Daerah  |
| 5,03 - KEPEGAWAIAN                                                |                                                                              |                      |       |                                 | 18,825,614,703,80 |        | 22,569,281,745,34 |        | 23,142,205,503,26 |        | 24,848,770,824,52 |        | 27,193,434,033,79 |                                                    |
| 5,03,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI   |                                                                              |                      |       |                                 | 16,035,630,320,00 |        | 19,389,193,352,00 |        | 19,803,112,687,00 |        | 21,343,423,956,00 |        | 23,477,766,352,00 |                                                    |
| Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima dan Akuntabel    | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)            | 93,5                 | 93,7  | 94                              | 16,035,630,320,00 | 94,5   | 19,389,193,352,00 | 95     | 19,803,112,687,00 | 95,5   | 21,343,423,956,00 | 96     | 23,477,766,352,00 | 5,03,0,00,0,00,01 ,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                   |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                            |                      |       | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030                                              |                  |                                                   |
|                                                              |                                                                            |                      |       | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET                                            | PAGU             |                                                   |
| (01)                                                         | (02)                                                                       | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)                                              | (14)             | (15)                                              |
|                                                              | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                  | 86                   | 86,4  | 87                              |                  | 87,5   |                  | 88     |                  | 88,5   |                  | 89                                                |                  | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
|                                                              | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                        | 78,81                | 79,35 | 79,8                            |                  | 80,5   |                  | 81     |                  | 81,5   |                  | 82                                                |                  | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
| 5,03,02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH                         |                                                                            |                      |       |                                 | 2,789,984,383,80 |        | 3,180,088,393,34 |        | 3,339,092,816,26 |        | 3,505,346,868,52 |                                                   | 3,715,667,681,79 |                                                   |
| Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN dan Produktifitas ASN | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Pengadaan (%)             | 85                   | 86    | 87                              | 2,789,984,383,80 | 88     | 3,180,088,393,34 | 89     | 3,339,092,816,26 | 90     | 3,505,346,868,52 | 90                                                | 3,715,667,681,79 | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
|                                                              | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (%) | 90,75                | 91,25 | 93,75                           |                  | 93,75  |                  | 93,75  |                  | 93,75  |                  | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |                  |                                                   |
|                                                              | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Pengembangan Karir (%)    | 31,25                | 35    | 35                              |                  | 45,58  |                  | 56,92  |                  | 64,92  |                  | 72,92                                             |                  | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                     | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |                                                   |      | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|
|                                         |                                                                                          |                      |       | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030                                              |      |                                                   |
|                                         |                                                                                          |                      |       | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET                                            | PAGU |                                                   |
| (01)                                    | (02)                                                                                     | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06) | (07)   | (08) | (09)   | (10) | (11)   | (12) | (13)                                              | (14) | (15)                                              |
|                                         | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Promosi dan Mutasi (%)                  | 50                   | 66,25 | 66,25                           |      | 70     |      | 73,25  |      | 75,5   |      | 81,25                                             |      | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
|                                         | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Manajemen Kinerja (%)                   | 75                   | 75    | 75                              |      | 75     |      | 77,5   |      | 81,25  |      | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |      |                                                   |
|                                         | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Penggajian Penghargaan dan Disiplin (%) | 87,5                 | 87,5  | 87,5                            |      | 87,5   |      | 87,5   |      | 87,5   |      | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |      |                                                   |
|                                         | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (%)          | 87,5                 | 87,5  | 87,5                            |      | 87,5   |      | 87,5   |      | 87,5   |      | 87,5                                              |      | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
|                                         | Presentase Penerapan Sistem Merit ASN pada Aspek Sistem Informasi (%)                    | 62,5                 | 66,67 | 66,67                           |      | 70     |      | 73,75  |      | 77,5   |      | 81,25                                             |      | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                        | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                             |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                   |
|                                                                 |                                                             |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                   |
| (01)                                                            | (02)                                                        | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                              |
|                                                                 | Persentase Peningkatan Kualifikasi ASN (%)                  | 87,24                | 88    | 90                              |                   | 92     |                   | 94     |                   | 96     |                   | 98     |                   | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
|                                                                 | Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase) | 63,9                 | 65    | 66,25                           |                   | 70,62  |                   | 75     |                   | 79,37  |                   | 83,75  |                   | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
|                                                                 | Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)    | 81,8                 | 83,33 | 80                              |                   | 82,5   |                   | 85     |                   | 87,5   |                   | 90     |                   | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
|                                                                 | Presentase Pegawai ASN yang Disiplin (%)                    | 100                  | 100   | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 5,03,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kepegawaian Daerah |
| 5,04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                                 |                                                             |                      |       |                                 | 32,500,000,000,00 |        | 32,500,000,000,00 |        | 32,500,000,000,00 |        | 32,500,000,000,00 |        | 32,500,000,000,00 |                                                   |
| 5,04,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                             |                      |       |                                 | 24,000,000,000,00 |        | 24,000,000,000,00 |        | 24,000,000,000,00 |        | 24,000,000,000,00 |        | 24,000,000,000,00 |                                                   |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                              |                                                                               |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                              |
|                                                                                                                                                              |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                              |
| (01)                                                                                                                                                         | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                         |
| Meningkatnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik                                                                                                                 | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 73,56                | 73,6  | 75                              | 24,000,000,000,00 | 80     | 24,000,000,000,00 | 80,5   | 24,000,000,000,00 | 81     | 24,000,000,000,00 | 81,5   | 24,000,000,000,00 | 5,04,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
|                                                                                                                                                              | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 80                   | 80,5  | 81                              |                   | 81,5   |                   | 82     |                   | 82,5   |                   | 83     |                   | 5,04,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
|                                                                                                                                                              | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 35                   | 70,01 | 70,5                            |                   | 71     |                   | 71,5   |                   | 72     |                   | 72,5   |                   | 5,04,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |
| 5,04,02 - PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA<br>MANUSIA                                                                                                  |                                                                               |                      |       |                                 | 8,500,000,000,00  |        | 8,500,000,000,00  |        | 8,500,000,000,00  |        | 8,500,000,000,00  |        | 8,500,000,000,00  |                                                                              |
| Meningkatnya<br>layanan<br>pengembangan<br>kompetensi dasar,<br>kader, manajerial<br>dan fungsional,<br>kompetensi teknis,<br>sera sertifikasi<br>kompetensi | Persentase ASN<br>yang Memiliki<br>Sertifikasi<br>Kompetensi<br>(Persentase)  | 0,63                 | 0,64  | 0,7                             | 8,500,000,000,00  | 0,8    | 8,500,000,000,00  | 0,9    | 8,500,000,000,00  | 1      | 8,500,000,000,00  | 1,1    | 8,500,000,000,00  | 5,04,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Pengembangan<br>Sumber Daya<br>Manusia |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                      |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                       |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                 |
|                                                                 |                                                                                                       |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                 |
| (01)                                                            | (02)                                                                                                  | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                            |
|                                                                 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional (Persentase) | 3,78                 | 3,79 | 3,8                             |                   | 3,9    |                   | 4      |                   | 4,1    |                   | 4,2    |                   | 5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)                           | 5,37                 | 5,4  | 5,5                             |                   | 5,6    |                   | 5,7    |                   | 5,8    |                   | 6      |                   | 5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
|                                                                 | Persentase Realisasi Pendidikan dan Pelatihan yang Dilaksanakan (Persentase)                          | 100                  | 100  | 100                             |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 100    |                   | 5,04,0,00,0,00,01,0000 - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 5,05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN                              |                                                                                                       |                      |      |                                 | 29,404,850,000,00 |        | 32,816,500,000,00 |        | 33,676,450,000,00 |        | 35,361,140,000,00 |        | 38,164,390,000,00 |                                                                 |
| 5,05,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                                                       |                      |      |                                 | 14,430,250,000,00 |        | 15,159,000,000,00 |        | 15,327,250,000,00 |        | 16,801,000,000,00 |        | 17,244,250,000,00 |                                                                 |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang priima dan akuntabel | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                                     | 94,3                 | 94,5 | 94,7                            | 14,430,250,000,00 | 94,9   | 15,159,000,000,00 | 95     | 15,327,250,000,00 | 95,1   | 16,801,000,000,00 | 95,2   | 17,244,250,000,00 | 5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah         |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                            | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                       | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                         |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                         |
| (01)                                                                                                               | (02)                                                                                                                                       | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                    |
|                                                                                                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                                                                                  | 80                   | 81    | 82                              |                   | 82,5   |                   | 82,6   |                   | 82,7   |                   | 82,8   |                   | 5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah |
|                                                                                                                    | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                                                        | 67,65                | 70,01 | 70,02                           |                   | 70,03  |                   | 70,04  |                   | 70,05  |                   | 7006   |                   | 5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5,05,02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                                                               |                                                                                                                                            |                      |       |                                 | 13,724,600,000,00 |        | 16,267,500,000,00 |        | 16,819,200,000,00 |        | 16,890,140,000,00 |        | 19,110,140,000,00 |                                                         |
| Meningkatnya hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan                                                       | Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)            | 75                   | 75    | 76                              | 10,407,300,000,00 | 77     | 12,478,750,000,00 | 78     | 12,737,600,000,00 | 79     | 12,744,570,000,00 | 80     | 14,485,070,000,00 | 5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase) | 20                   | 22    | 24                              | 400,000,000,00    | 26     | 450,000,000,00    | 28     | 500,000,000,00    | 29     | 550,000,000,00    | 30     | 600,000,000,00    | 5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan    | Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan                        | 20                   | 25    | 30                              | 200,000,000,00    | 35     | 235,000,000,00    | 40     | 237,500,000,00    | 45     | 245,000,000,00    | 50     | 275,000,000,00    | 5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                   |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                   |
| (01)                                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                                | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                              |
|                                                                                                                                                                     | Daerah<br>(Persentase)                                                                                                                                                              |                      |      |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                   |
| Meningkatnya<br>fasilitasi,<br>pembinaan,<br>bimbingan teknis<br>dan supervisi terkait<br>penelitian,<br>pengembangan ,<br>pengkajian dan<br>penerapan di<br>daerah | Persentase<br>Fasilitasi,<br>Pembinaan,<br>Bimbingan<br>Teknis dan<br>Supervisi terkait<br>Penelitian,<br>Pengembangan,<br>Pengkajian dan<br>Penerapan di<br>Daerah<br>(Persentase) | 0                    | 50   | 51                              | 2,717,300,000,00 | 52     | 3,103,750,000,00 | 53     | 3,344,100,000,00 | 54     | 3,350,570,000,00 | 55     | 3,750,070,000,00 | 5,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Riset dan Inovasi<br>Daerah |
| 5,05,03 - PROGRAM<br>RISET DAN<br>INOVASI DAERAH                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                      |      |                                 | 1,250,000,000,00 |        | 1,390,000,000,00 |        | 1,530,000,000,00 |        | 1,670,000,000,00 |        | 1,810,000,000,00 |                                                                   |
| Meningkatnya<br>pemanfaatan<br>inovasi daerah<br>dalam<br>pembangunan                                                                                               | Persentase<br>Produk Inovasi<br>yang<br>Dimanfaatkan<br>(Persentase)                                                                                                                | 20                   | 25   | 30                              | 200,000,000,00   | 35     | 220,000,000,00   | 40     | 240,000,000,00   | 45     | 260,000,000,00   | 50     | 280,000,000,00   | 5,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Riset dan Inovasi<br>Daerah |
| Meningkatnya<br>kajian yang<br>termanfaatkan<br>sebagai kebijakan<br>pembangunan<br>daerah dalam<br>pengembangan<br>potensi unggulan<br>daerah                      | Persentase Kajian<br>Berbasis Bukti<br>dalam<br>Pengembangan<br>Potensi Unggulan<br>Daerah<br>(Persentase)                                                                          | 60                   | 65   | 66                              | 200,000,000,00   | 67     | 220,000,000,00   | 68     | 240,000,000,00   | 70     | 260,000,000,00   | 71     | 280,000,000,00   | 5,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Riset dan Inovasi<br>Daerah |
| Meningkatnya<br>kajian yang<br>termanfaatkan<br>sebagai kebijakan<br>pembangunan<br>daerah dalam<br>penyelesaian<br>permasalahan<br>daerah                          | Persentase Kajian<br>Berbasis Bukti<br>dalam<br>Penyelesaian<br>Permasalahan<br>Daerah<br>(Persentase)                                                                              | 0                    | 30   | 40                              | 400,000,000,00   | 45     | 450,000,000,00   | 47     | 500,000,000,00   | 48     | 550,000,000,00   | 50     | 600,000,000,00   | 5,05,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Riset dan Inovasi<br>Daerah |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME                                                                      | INDIKATOR OUTCOME                                                                                                 | BASELINE 2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                        |                                                                                                                   |               |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                         |
|                                                                                                        |                                                                                                                   |               |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                         |
| (01)                                                                                                   | (02)                                                                                                              | (03)          | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                    |
| Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah | Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase) | 0             | 50    | 60                              | 450,000,000,00    | 65     | 500,000,000,00    | 70     | 550,000,000,00    | 75     | 600,000,000,00    | 80     | 650,000,000,00    | 5,05,0,00,0,00,01,0000 - Badan Riset dan Inovasi Daerah |
| 5,07 - PENGELOLAAN PENGHUBUNG                                                                          |                                                                                                                   |               |       |                                 | 32,747,000,000,00 |        | 37,659,000,000,00 |        | 43,308,000,000,00 |        | 45,782,900,000,00 |        | 57,275,000,000,00 |                                                         |
| 5,07,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI                                        |                                                                                                                   |               |       |                                 | 29,809,000,000,00 |        | 34,280,000,000,00 |        | 39,422,000,000,00 |        | 45,336,000,000,00 |        | 52,136,000,000,00 |                                                         |
| Terwujudnya kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel                                         | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)                                                 | 8             | 70,01 | 71                              | 29,809,000,000,00 | 72     | 34,280,000,000,00 | 73     | 39,422,000,000,00 | 74     | 45,336,000,000,00 | 75     | 52,136,000,000,00 | 5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah        |
|                                                                                                        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                                                                         | 83,72         | 83,8  | 84                              |                   | 84,05  |                   | 84,1   |                   | 84,15  |                   | 84,2   |                   | 5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah        |
|                                                                                                        | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                                                                               | 70,4          | 70,7  | 70,75                           |                   | 70,8   |                   | 70,85  |                   | 70,9   |                   | 70,95  |                   | 5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah        |
| 5,07,02 - PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG                                                                 |                                                                                                                   |               |       |                                 | 2,938,000,000,00  |        | 3,379,000,000,00  |        | 3,886,000,000,00  |        | 446,900,000,00    |        | 5,139,000,000,00  |                                                         |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                         | INDIKATOR<br>OUTCOME                                              | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                   |                      |       | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                      |
|                                                                 |                                                                   |                      |       | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                      |
| (01)                                                            | (02)                                                              | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                 |
| meningkatnya pelayanan penghubung                               | Persentase pelayanan penghubung yang optimal (%)                  | 66,7                 | 71,7  | 76,7                            | 2,938,000,000,00  | 80     | 3,379,000,000,00  | 82,5   | 3,886,000,000,00  | 84     | 446,900,000,00    | 86,5   | 5,139,000,000,00  | 5,07,0,00,0,00,01,0000 - Badan Penghubung Daerah     |
| 6,01 - INSPEKTORAT DAERAH                                       |                                                                   |                      |       |                                 | 49,392,926,817,00 |        | 48,695,759,299,00 |        | 49,351,337,412,00 |        | 48,874,092,776,00 |        | 49,774,959,471,00 |                                                      |
| 6,01,01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |                                                                   |                      |       |                                 | 38,594,019,517,00 |        | 37,733,359,909,00 |        | 38,255,582,496,00 |        | 37,716,167,395,00 |        | 38,451,489,399,00 |                                                      |
| Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                 | Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)                               | 81                   | 81,7  | 82                              | 38,594,019,517,00 | 82,5   | 37,733,359,909,00 | 83     | 38,255,582,496,00 | 83,5   | 37,716,167,395,00 | 84     | 38,451,489,399,00 | 6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi |
|                                                                 | Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai) | 98,4                 | 98,45 | 98,5                            |                   | 98,55  |                   | 98,6   |                   | 98,65  |                   | 98,7   |                   | 6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi |
|                                                                 | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)                         | 83,806               | 85,3  | 85,5                            |                   | 85,6   |                   | 85,7   |                   | 86     |                   | 86,3   |                   | 6,01,0,00,0,00,01,0000 - Inspektorat Daerah Provinsi |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                             | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                      | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                     |                                                                                           |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                |
|                                                                                                                                     |                                                                                           |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                |
| (01)                                                                                                                                | (02)                                                                                      | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                           |
| 6,01,02 - PROGRAM<br>PENYELENGGARAA<br>N PENGAWASAN                                                                                 |                                                                                           |                      |      |                                 | 8,402,248,000,00 |        | 8,528,281,640,00 |        | 8,623,593,870,00 |        | 8,750,338,213,00 |        | 8,880,912,634,00 |                                                                |
| Menurunnya<br>kejadian<br>penyelewengan atau<br>penyimpangan, baik<br>yang bersifat<br>anggaran ataupun<br>proses dan<br>kewenangan | Persentase tindak<br>lanjut hasil<br>pengawasan<br>Inspektur<br>Pembantu I                | 85,6                 | 85,6 | 86                              | 8,402,248,000,00 | 86,5   | 8,528,281,640,00 | 87     | 8,623,593,870,00 | 88     | 8,750,338,213,00 | 90     | 8,880,912,634,00 | 6,01,0,00,0,00,01<br>,0000 -<br>Inspektorat<br>Daerah Provinsi |
|                                                                                                                                     | Persentase tindak<br>lanjut hasil<br>pengawasan<br>Inspektur<br>Pembantu II               | 85,6                 | 85,6 | 86                              |                  | 86,5   |                  | 87     |                  | 88     |                  | 90     |                  |                                                                |
|                                                                                                                                     | Persentase tindak<br>lanjut hasil<br>pengawasan<br>Inspektur<br>Pembantu III              | 85,6                 | 85,6 | 86                              |                  | 86,5   |                  | 87     |                  | 88     |                  | 90     |                  |                                                                |
|                                                                                                                                     | Persentase tindak<br>lanjut hasil<br>pengawasan<br>Inspektur<br>Pembantu IV               | 85,6                 | 85,6 | 86                              |                  | 86,5   |                  | 87     |                  | 88     |                  | 90     |                  |                                                                |
|                                                                                                                                     | Persentase<br>penyelenggaraan<br>pembinaan dan<br>pengawasan<br>dengan tujuan<br>tertentu | 75                   | 75   | 77                              |                  | 80     |                  | 83     |                  | 85     |                  | 100    |                  |                                                                |
|                                                                                                                                     | Persentase<br>pemantauan<br>tindak lanjut<br>hasil pengawasan                             | 80                   | 80   | 87                              |                  | 90     |                  | 95     |                  | 97     |                  | 100    |                  |                                                                |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                       | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                  | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                       |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                |
|                                                                               |                                                                                                       |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                |
| (01)                                                                          | (02)                                                                                                  | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                           |
| 6,01,03 - PROGRAM<br>PERUMUSAN<br>KEBIJAKAN,<br>PENDAMPINGAN<br>DAN ASISTENSI |                                                                                                       |                      |      |                                 | 2,396,659,300,00 |        | 2,434,117,750,00 |        | 2,472,161,046,00 |        | 2,407,587,168,00 |        | 2,442,557,438,00 |                                                                |
| Meningkatnya<br>Kualitas<br>Pendampingan &<br>Asistensi                       | Persentase hasil<br>pendampingan/a<br>sistensi Inpektur<br>Pembantu I yang<br>ditindaklanjuti         | 100                  | 100  | 100                             | 2,396,659,300,00 | 100    | 2,434,117,750,00 | 100    | 2,472,161,046,00 | 100    | 2,407,587,168,00 | 100    | 2,442,557,438,00 | 6,01,0,00,0,00,01<br>,0000 -<br>Inspektorat<br>Daerah Provinsi |
|                                                                               | Persentase hasil<br>pendampingan/a<br>sistensi Inpektur<br>Pembantu II yang<br>ditindaklanjuti        | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                                                |
|                                                                               | Persentase hasil<br>pendampingan/a<br>sistensi Inpektur<br>Pembantu III<br>yang<br>ditindaklanjuti    | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                                                |
|                                                                               | Persentase hasil<br>pendampingan/a<br>sistensi Inpektur<br>Pembantu IV<br>yang<br>ditindaklanjuti     | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                                                |
|                                                                               | Persentase hasil<br>pendampingan/a<br>sistensi Inpektur<br>Pembantu<br>Khusus yang<br>ditindaklanjuti | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                                                |
|                                                                               | Persentase<br>kebijakan bidang<br>pengawasan yang<br>ditetapkan                                       | 100                  | 100  | 100                             |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  | 100    |                  |                                                                |



| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                               | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                          | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025  | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                    |        |                    |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|---------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                               |                      |       | 2026                            |                    | 2027   |                    | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                                      |
|                                                                                       |                                                                               |                      |       | TARGET                          | PAGU               | TARGET | PAGU               | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                                      |
| (01)                                                                                  | (02)                                                                          | (03)                 | (04)  | (05)                            | (06)               | (07)   | (08)               | (09)   | (10)              | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                                 |
| 8,01 - KESATUAN<br>BANGSA DAN<br>POLITIK                                              |                                                                               |                      |       |                                 | 124,035,000,000,00 |        | 127,761,000,000,00 |        | 33,619,000,000,00 |        | 36,893,000,000,00 |        | 40,264,000,000,00 |                                                                      |
| 8,01,01 - PROGRAM<br>PENUNJANG<br>URUSAN<br>PEMERINTAHAN<br>DAERAH PROVINSI           |                                                                               |                      |       |                                 | 10,100,000,000,00  |        | 11,100,000,000,00  |        | 12,200,000,000,00 |        | 13,400,000,000,00 |        | 14,700,000,000,00 |                                                                      |
| Terwujudnya<br>Kualitas Pelayanan<br>Publik Yang Prima<br>dan Akuntabel               | Nilai AKIP<br>Perangkat<br>Daerah (Nilai)                                     | 71,75                | 72,25 | 72,5                            | 10,100,000,000,00  | 73     | 11,100,000,000,00  | 74     | 12,200,000,000,00 | 75     | 13,400,000,000,00 | 80     | 14,700,000,000,00 | 8,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Kesatuan Bangsa<br>dan Politik |
|                                                                                       | Indeks Kepuasan<br>Masyarakat (IKM)<br>(Indeks)                               | 85                   | 86    | 87                              |                    | 88     |                    | 89     |                   | 90     |                   | 91     |                   | 8,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Kesatuan Bangsa<br>dan Politik |
|                                                                                       | Hasil Monev<br>keterbukan<br>informasi Badan<br>Publik kategori<br>PD (Nilai) | 58,8                 | 70    | 71                              |                    | 72     |                    | 73     |                   | 74     |                   | 75     |                   | 8,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Kesatuan Bangsa<br>dan Politik |
| 8,01,02 - PROGRAM<br>PENGUATAN<br>IDEOLOGI<br>PANCASILA DAN<br>KARAKTER<br>KEBANGSAAN |                                                                               |                      |       |                                 | 7,600,000,000,00   |        | 8,450,000,000,00   |        | 9,200,000,000,00  |        | 10,200,000,000,00 |        | 11,240,000,000,00 |                                                                      |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                          | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                      | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                  |        |                   |        |                   | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |                                                                           |                      |      | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                  | 2029   |                   | 2030   |                   |                                                            |
|                                                                                                                                                  |                                                                           |                      |      | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                                                            |
| (01)                                                                                                                                             | (02)                                                                      | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)              | (07)   | (08)              | (09)   | (10)             | (11)   | (12)              | (13)   | (14)              | (15)                                                       |
| Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan                                                                | Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase) | 76                   | 77   | 78                              | 7,600,000,000,00  | 79     | 8,450,000,000,00  | 80     | 9,200,000,000,00 | 81     | 10,200,000,000,00 | 82     | 11,240,000,000,00 | 8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8,01,03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK |                                                                           |                      |      |                                 | 7,150,000,000,00  |        | 7,865,000,000,00  |        | 8,650,000,000,00 |        | 9,515,000,000,00  |        | 10,467,000,000,00 |                                                            |
| Meningkatnya Etika dan Budaya Politik                                                                                                            | Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)      | 100                  | 100  | 100                             | 7,150,000,000,00  | 100    | 7,865,000,000,00  | 100    | 8,650,000,000,00 | 100    | 9,515,000,000,00  | 100    | 10,467,000,000,00 | 8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 8,01,04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN                                                                          |                                                                           |                      |      |                                 | 97,000,000,000,00 |        | 98,000,000,000,00 |        | 1,100,000,000,00 |        | 1,200,000,000,00  |        | 1,250,000,000,00  |                                                            |
| Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan                                                                                                | Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)              | 90                   | 91   | 92                              | 97,000,000,000,00 | 93     | 98,000,000,000,00 | 94     | 1,100,000,000,00 | 95     | 1,200,000,000,00  | 96     | 1,250,000,000,00  | 8,01,0,00,0,00,01,0000 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM /<br>OUTCOME                                                                                                      | INDIKATOR<br>OUTCOME                                                                                                                                                                                                                                                         | BASELI<br>NE<br>2024 | 2025 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH<br>PENANGGUNG<br>JAWAB                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |      | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |      | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                      |
| (01)                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                         | (03)                 | (04) | (05)                            | (06)             | (07)   | (08)             | (09)   | (10)             | (11)   | (12)             | (13)   | (14)             | (15)                                                                 |
| 8,01,05 - PROGRAM<br>PEMBINAAN DAN<br>PENGEMBANGAN<br>KETAHANAN<br>EKONOMI, SOSIAL,<br>DAN BUDAYA                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |      |                                 | 660,000,000,00   |        | 726,000,000,00   |        | 799,000,000,00   |        | 878,000,000,00   |        | 887,000,000,00   |                                                                      |
| Meningkatnya<br>ketahanan ekonomi,<br>sosial, dan budaya<br>masyarakat                                                                       | Persentase<br>Kebijakan di<br>Bidang<br>Ketahanan<br>Ekonomi, Sosial,<br>Budaya dan<br>Fasilitasi<br>Pencegahan<br>Penyalagunaan<br>Narkotika,<br>Fasilitasi<br>Kerukunan Umat<br>Beragama dan<br>Penghayat<br>Kepercayaan di<br>Daerah yang<br>Dilaksanakan<br>(Persentase) | 75                   | 76   | 77                              | 660,000,000,00   | 78     | 726,000,000,00   | 79     | 799,000,000,00   | 80     | 878,000,000,00   | 81     | 887,000,000,00   | 8,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Kesatuan Bangsa<br>dan Politik |
| 8,01,06 - PROGRAM<br>PENINGKATAN<br>KEWASPADAAN<br>NASIONAL DAN<br>PENINGKATAN<br>KUALITAS DAN<br>FASILITASI<br>PENANGANAN<br>KONFLIK SOSIAL |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |      |                                 | 1,525,000,000,00 |        | 1,620,000,000,00 |        | 1,670,000,000,00 |        | 1,700,000,000,00 |        | 1,720,000,000,00 |                                                                      |
| Meningkatnya<br>penanganan konflik<br>sosial yang<br>diselesaikan                                                                            | Persentase<br>Konflik Sosial<br>yang<br>Diselesaikan<br>(Persentase)                                                                                                                                                                                                         | 78                   | 78,5 | 79                              | 1,525,000,000,00 | 79,5   | 1,620,000,000,00 | 80     | 1,670,000,000,00 | 80,5   | 1,700,000,000,00 | 81     | 1,720,000,000,00 | 8,01,0,00,0,00,01<br>,0000 - Badan<br>Kesatuan Bangsa<br>dan Politik |

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan rakyat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing. Penetapan indikator kinerja daerah merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program/ kegiatan. Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Pengukuran indikator hasil lebih utama menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan semua pihak. Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang kinerja di masa mendatang.

Indikator kinerja daerah pada dasarnya terlihat pada tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan keefektifan pencapaian sasaran tersebut. Indikator kinerja yang diharapkan dapat memperlihatkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja haruslah ditetapkan secara benar dan sesuai dengan kondisi nyata. Indikator kinerja pemerintah daerah tersebut digunakan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Guna mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria, berikut ini : a) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah, b) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan daerah yang diharapkan, c) Memfokuskan pada prioritas program pembangunan daerah, d) Terkait dengan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

Tabel 4-2 Target Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jambi

| No | Indikator Pembangunan              | Target RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 |               |               |              |             |             |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
|    |                                    | 2025                                        | 2026          | 2027          | 2028         | 2029        | 2030        |
| 1  | Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)       | 4,65-5,00                                   | 4,80 - 5,40   | 4,95 - 5,50   | 5,10 - 5,6   | 6,25 - 7,0  | 5,25 - 5,50 |
| 2  | PDRB Per Kapita (Rp.juta)          | 92,2                                        | 96,53         | 108,48        | 123,05       | 132,70      | 140,68      |
| 3  | Kontribusi PDRB Provinsi (%)       | 1,5                                         | 1,4           | 1,4           | 1,4          | 1,4         | 1,4         |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%)             | 6,30 – 6,80                                 | 6,25 - 6,76   | 5,9 - 6,5     | 4,98-5,75    | 3,66-4,66   | 3,65-4,63   |
| 5  | Rasio Gini                         | 0,337 – 0,341                               | 0,330 – 0,337 | 0,318 – 0,325 | 0,314 -0,318 | 0,311-0,315 | 0,311-0,315 |
| 6  | Indeks Modal Manusia               | 0,56                                        | 0,56          | 0,57          | 0,58         | 0,59        | 0,6         |
| 7  | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 78,5                                        | 80,76         | 83,58         | 86,14        | 86,55       | 88,70       |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 73,71                                       | 73,92         | 74,13         | 74,34        | 74,56       | 74,77       |
| 9  | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 4,27 – 4,38                                 | 4,20-4,35     | 3,89-4,31     | 3,55-4,20    | 2,78-4,07   | 2,65 - 4,00 |

Tabel 4-3 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Jambi

| No | Indikator Kinerja Utama                             | Kondisi Awal (2024) | Target     |           |           |          |          |          | Kondisi Akhir |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
|    |                                                     |                     | 2025       | 2026      | 2027      | 2028     | 2029     | 2030     |               |
| 1  | Indeks Reformasi Birokrasi                          | BB (78,88)          | BB (79,00) | BB (79,5) | A (80,01) | A (81,0) | A (82,0) | A (83,0) | A (83,0)      |
| 2  | Indeks Daya Saing Daerah                            | 3,38                | 3,42       | 3,47      | 3,58      | 3,76     | 3,85     | 3,99     | 3,99          |
| 3  | Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi | 42,3**              | 50,80      | 51,23     | 51,67     | 52,10    | 52,53    | 52,65    | 52,65         |

| No | Indikator Kinerja Utama                       | Kondisi Awal (2024) | Target      |             |             |            |            |             | Kondisi Akhir |
|----|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
|    |                                               |                     | 2025        | 2026        | 2027        | 2028       | 2029       | 2030        |               |
| 4  | Pertumbuhan Ekonomi                           | 4,51                | 4,65-5,00   | 4,80 - 5,40 | 4,95 - 5,50 | 5,10 - 5,6 | 6,25 - 7,0 | 5,25 - 5,50 | 5,25 - 5,50   |
| 5  | Tingkat Pengangguran Terbuka                  | 4,48                | 4,27- 4,38  | 4,20-4,37   | 3,89-4,31   | 3,55-4,20  | 2,78-4,07  | 2,65 - 4,00 | 2,65 - 4,00   |
| 6  | Indeks Ketahanan Pangan                       | 74,94               | 75,10       | 76,94       | 77,5        | 78,5       | 79,50      | 80,50       | 80,50         |
| 7  | Indeks Inovasi Daerah                         | 58,59               | 58,75       | 58,89       | 59,00       | 59,25      | 60,10      | 61          | 61            |
| 8  | Tingkat Kemiskinan                            | 7,1                 | 6,30 – 6,80 | 6,25 - 6,76 | 5,9 - 6,5   | 4,98-5,75  | 3,66-4,66  | 3,65-4,63   | 3,65-4,63     |
| 9  | Indeks Ekonomi Hijau                          | 57,92**             | 61,39       | 63,65       | 65,54       | 66,46      | 68,55      | 68,60       | 68,60         |
| 10 | Indeks Ekonomi Biru                           | 14,03*              | 15,26       | 15,35       | 16,26       | 17,27      | 18,29      | 19,01       | 19,01         |
| 11 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              | 68,15*              | 73,71       | 73,92       | 74,13       | 74,34      | 74,56      | 74,77       | 74,77         |
| 12 | Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 77,27*              | 78,5        | 80,76       | 83,58       | 86,14      | 86,55      | 88,70       | 88,70         |
| 13 | Indeks Modal Manusia                          | 0,54*               | 0,56        | 0,56        | 0,57        | 0,58       | 0,59       | 0,6         | 0,6           |

Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Tabel 8.3 berikut adalah tabel penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi .

Tabel 4-4    Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jambi

|                              | Indikator Kinerja Daerah                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|                              |                                                                           |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1                            | 2                                                                         | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI |                                                                           |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 1.1                          | Indeks Ketahanan Pangan                                                   | Indeks | 74,94                       | 75,10                       | 76,94 | 77,5  | 78,5  | 79,50 | 80,50 | 80,50                        |
| 1.2                          | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak | %      | 82,16                       | 82,25                       | 82,56 | 82,76 | 82,96 | 83,16 | 83,36 | 83,56                        |
| 1.3                          | Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi layak  | %      | 83,04                       | 83,14                       | 83,25 | 83,8  | 84    | 84,15 | 84,5  | 84,5                         |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                              | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|     |                                                                       |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1   | 2                                                                     | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 1.4 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                              | Indeks | NA                          | 0,562                       | 0,565 | 0,57  | 0,575 | 0,58  | 0,585 | 0,585                        |
| 1.5 | Kualitas Lingkungan Hidup:                                            |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
|     | a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                                   | poin   | 68,15*                      | 73,71                       | 73.92 | 74.13 | 74.34 | 74.56 | 74,77 | 74,77                        |
|     | b. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman                            | %      | NA                          | 12                          | 12,5  | 13    | 14    | 15    | 16    | 16                           |
|     | c. Pengelolaan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah          | %      | NA                          | 28                          | 30    | 35    | 40    | 45    | 47    | 47                           |
|     | d. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah | % RT   | NA                          | 34                          | 38    | 42    | 47    | 50    | 53    | 53                           |
| 1.6 | Ketahanan energi, air dan pangan                                      |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |



|     | Indikator Kinerja Daerah                                                              | Satuan        | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |         |         |         |         |         | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------------|
|     |                                                                                       |               |                             | 2025                        | 2026    | 2027    | 2028    | 2029    | 2030    |                              |
| 1   | 2                                                                                     | 3             | 4                           | 5                           | 6       | 7       | 8       | 9       | 10      | 11                           |
|     | a. Ketahanan energi                                                                   |               |                             |                             |         |         |         |         |         |                              |
|     | - Konsumsi Listrik Per Kapita                                                         | Kwh/Kapita    | 768                         | 696                         | 700,52  | 991,21  | 1150,07 | 1181    | 1190    | 1190                         |
|     | - Intensitas energi primer                                                            | SBM/Rp milyar | NA                          | 111.308                     | 113.405 | 115.320 | 116.755 | 118.513 | 119.630 | 119.630                      |
|     | b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan ( <i>prevalence of undernurishment</i> ) | %             | 10,58                       | 11,48                       | 10,45   | 9,75    | 8,98    | 7,99    | 7,84    | 7,84                         |
|     | c. Ketahanan air                                                                      |               |                             |                             |         |         |         |         |         |                              |
|     | - Kapasitas tampungan air                                                             | M3/kapita     | NA                          | 696                         | 855     | 1105    | 1325    | 1513    | 1550    | 1550                         |
| 1.7 | Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan                        | %             | NA                          | 34,66                       | 38,75   | 42,50   | 45,00   | 48,00   | 50,00   | 50,00                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah                      | Satuan    | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |                 |                 | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------|------------------------------|
|      |                                               |           |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029            | 2030            |                              |
| 1    | 2                                             | 3         | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9               | 10              | 11                           |
| 1.8  | Indeks Risiko Bencana                         | Indeks    | 138,02                      | 122,51                      | 121,14 | 120,64 | 119,24 | 118,64 - 114,86 | 118,25 – 114,50 | 118,25 – 114,50              |
| 1.9  | Persentase penurunan emisi GRK                |           |                             |                             |        |        |        |                 |                 |                              |
|      | a. Kumulatif                                  | %         | NA                          | 20,63                       | 21,45  | 22,63  | 23,74  | 25,31           | 25,56           | 25,56                        |
|      | b. Tahunan                                    | %         | NA                          | 36,51                       | 40,25  | 43,86  | 47,50  | 50,88           | 51,50           | 51,50                        |
| 1.10 | Penurunan intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) | %         | 77,27*                      | 78,5                        | 80,76  | 83,58  | 86,14  | 86,55           | 88,70           | 88,70                        |
| 1.11 | Laju Pertumbuhan Penduduk                     | %         | 1,30                        | 1,20                        | 1,15   | 1,12   | 1,10   | 1,09            | 1,08            | 1,08                         |
| 1.12 | Rasio penduduk                                | %         | 103,4                       | 103,2                       | 102,39 | 102,17 | 101,95 | 101,73          | 101,50          | 101,50                       |
| 1.13 | Kepadatan penduduk                            | Orang/km2 | 75,94                       | 76,87                       | 77,93  | 78,98  | 80,03  | 81,08           | 82,13           | 82,13                        |
| 1.14 | Persentase kepemilikan NPWP                   | %         |                             | 43,44                       | 43,49  | 44,02  | 44,31  | 44,8            | 44,9            | 44,9                         |
| 1.15 | Indeks lansia Tangguh (Indeks                 | Indeks    | 58                          | 61,25                       | 61,5   | 61,75  | 62     | 62,25           | 62,3            | 62,3                         |

|                                | Indikator Kinerja Daerah                           | Satuan                          | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |               |               |              |             |             | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------------------|
|                                |                                                    |                                 |                             | 2025                        | 2026          | 2027          | 2028         | 2029        | 2030        |                              |
| 1                              | 2                                                  | 3                               | 4                           | 5                           | 6             | 7             | 8            | 9           | 10          | 11                           |
|                                | Lansia Berdaya)                                    |                                 |                             |                             |               |               |              |             |             |                              |
| 1.16                           | Nett recent migration rate                         | Angka                           | -0,11                       | -0,52                       | -0,52         | -0,52         | -0,51        | -0,51       | -0,51       | -0,51                        |
| ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT |                                                    |                                 |                             |                             |               |               |              |             |             |                              |
| 2.1                            | Pertumbuhan ekonomi                                | %                               | 4,51                        | 4,65 – 5,00                 | 4,80 - 5,40   | 4,95 - 5,50   | 5,10 - 5,6   | 6,25 - 7,0  | 5,25 - 5,50 | 5,25 - 5,50                  |
| 2.2                            | Tingkat Kemiskinan                                 | %                               | 7,1                         | 6,30 – 6,80                 | 6,25 - 6,76   | 5,9 - 6,5     | 4,98-5,75    | 3,66-4,66   | 3,65-4,63   | 3,65-4,63                    |
| 2.3                            | PDRB Perkapita                                     | juta rupiah perkapita per tahun | 86,72                       | 92,2                        | 96,53         | 108,48        | 123,05       | 132,70      | 140,68      | 140,68                       |
| 2.4                            | Rasio Gini                                         | -                               | 0,321                       | 0,337-0,341                 | 0,330 – 0,337 | 0,318 – 0,325 | 0,314 -0,318 | 0,311-0,315 | 0,311-0,315 | 0,311-0,315                  |
| 2.5                            | Cakupan kepesertaan jaminan sosial Ketenagakerjaan | %                               | 39,52 (agustus 2024)        | 37,19                       | 40,51         | 45,09         | 48,66        | 50,61       | 52,01       | 52,01                        |
| 2.6                            | Indeks pembangunan literasi masyarakat             | Indeks                          | 63                          | 67                          | 71            | 75            | 79           | 83          | 87.00       | 87.00                        |
| 2.7                            | Indeks Modal Manusia                               | Indeks                          | 0,54*                       | 0,56                        | 0,56          | 0,57          | 0,58         | 0,59        | 0,6         | 0,6                          |

|      | Indikator Kinerja Daerah                             | Satuan                      | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |              |              | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------------------------|
|      |                                                      |                             |                             | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029         | 2030         |                              |
| 1    | 2                                                    | 3                           | 4                           | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9            | 10           | 11                           |
| 2.8  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)                     | Indeks                      | 86,8                        | 86,9                        | 87          | 87,25       | 87,5        | 87,75        | 88,25        | 88,25                        |
| 2.9  | Usia Harapan Hidup                                   | Tahun                       | 74,06                       | 74,14                       | 74,25       | 74,50       | 74,94       | 75,18        | 75,45        | 75,45                        |
| 2.10 | Angka kematian ibu (AKI)                             | Per 100.000 kelahiran hidup | 68,4                        | 130                         | 120         | 110         | 100         | 84           | 83           | 83                           |
| 2.11 | Angka Kematian Bayi (AKB)                            | Per 1.000 kelahiran hidup   | 19,60**                     | 12,62                       | 12,21       | 11,75       | 10,99       | 9,96         | 9,89         | 9,89                         |
| 2.12 | Rata-rata lama sekolah Penduduk usia diatas 15 tahun | Tahun                       | 8,9                         | 9,38-9,4                    | 9,5         | 9,60        | 9,76        | 9,86-9,89    | 9,93         | 9,93                         |
| 2.13 | Harapan Lama Sekolah                                 | Tahun                       | 13,14                       | 13,25-13,26                 | 13,30-13,31 | 13,36-13,37 | 13,42-13,43 | 13,5 – 13,51 | 13,61– 13,62 | 13,61– 13,62                 |
| 2.14 | Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian           | %                           | 11,84                       | 11,84                       | 11,85       | 11,87       | 11,90       | 11,93        | 12,0         | 12,0                         |
| 2.15 | Kasus kematian Balita (AKABA)                        | Jumlah kematian             | 5,79                        | 5,69                        | 5,59        | 5,49        | 5,39        | 5,29         | 5,29         | 304                          |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                     | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |       |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|--------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|-------|------|------|------------------------------|
|      |                                                              |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028  | 2029 | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                            | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8     | 9    | 10   | 11                           |
| 2.16 | Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita   | %      | 17,1                        | 11,9                        | 11,5 | 11,0 | 10,25 | 9,3  | 9,1  | 9,1                          |
| 2.17 | Prevalensi wasting pada balita                               | %      | 6,60                        | 6,50                        | 6,40 | 6,30 | 6,20  | 6,10 | 6,0  | 6,0                          |
| 2.18 | Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)                |        |                             |                             |      |      |       |      |      |                              |
|      | a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)  | %      | 64                          | 85                          | 85   | 85   | 85    | 85   | 85   | 85                           |
|      | b. Angka keberhasilan pengobatan TBC (Treatment succes rate) | %      | 87                          | 95                          | 95   | 95   | 95    | 95   | 95   | 95                           |
| 2.19 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)           | %      | 92,30                       | 98,6                        | 98,7 | 98,8 | 98,9  | 99   | 100  | 100                          |

| 1    | Indikator Kinerja Daerah                                                                                     | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
|      |                                                                                                              |        |                             | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                              |
| 1    | 2                                                                                                            | 3      | 4                           | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                           |
| 2.20 | hasil pembelajaran:                                                                                          |        |                             |                             |             |             |             |             |             |                              |
|      | - persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:    |        |                             |                             |             |             |             |             |             |                              |
|      | a) literasi membaca                                                                                          | %      | NA                          | 9,09-9,09                   | 9,09-9,09   | 9,09-18,18  | 9,09-18,18  | 18,18-27,27 | 27,27-36,36 | 27,27-36,36                  |
|      | b) numerasi                                                                                                  | %      | NA                          | 0,00-9,09                   | 0,00-9,09   | 0,00-9,09   | 9,09-18,18  | 9,09-18,18  | 18,18-27,27 | 18,18-27,27                  |
|      | - persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: |        |                             |                             |             |             |             |             |             |                              |
|      | a) literasi membaca                                                                                          | %      | NA                          | 39,64-42,14                 | 40,80-43,25 | 41,91-44,99 | 43,00-46,20 | 44,92-47,42 | 45,25-48,75 | 45,25-48,75                  |
|      | b) numerasi                                                                                                  | %      | NA                          | 34,30-36,80                 | 35,30-37,80 | 36,30-38,80 | 37,30-39,80 | 38,30-40,80 | 39,00-41,25 | 39,00-41,25                  |
| 2.21 | Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi                                                                    | %      | 32,0                        | 33,94                       | 35,24       | 36,55       | 37,85       | 39,15       | 40,0        | 40,0                         |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                                | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                         |        |                             | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                              |
| 1    | 2                                                                                                                                                                       | 3      | 4                           | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                           |
| 2.22 | Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi                                                                                        | %      | NA                          | 10,21                       | 10,21-10,30 | 10,21-10,40 | 10,21-10,50 | 10,21-10,58 | 10,25-10,60 | 10,25-10,60                  |
| 2.23 | Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)                                                           | %      | NA                          | 70,9                        | 72,0        | 73,20       | 74,90       | 76,46       | 77,50       | 77,50                        |
| 2.24 | Persentase penduduk bersertifikat keahlian                                                                                                                              | %      |                             | 11,84                       | 11,85       | 11,87       | 11,9        | 11,93       | 11,94       | 11,94                        |
| 2.25 | Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan | orang  | NA                          | 3600                        | 3700        | 3850        | 4000        | 4200        | 4200        | 4200                         |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                            | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |       |      |       |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------|-------|------|-------|------|------------------------------|
|      |                                                                                     |          |                             | 2025                        | 2026 | 2027  | 2028 | 2029  | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                   | 3        | 4                           | 5                           | 6    | 7     | 8    | 9     | 10   | 11                           |
| 2.26 | Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi | unit     | NA                          | 7                           | 8    | 9     | 10   | 12    | 12   | 12                           |
| 2.27 | Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)                 | %        | NA                          | 27                          | 28,5 | 30,02 | 32,3 | 34,75 | 34,9 | 34,9                         |
| 2.28 | Persentase hipertensi dalam pengendalian                                            | %        | 5                           | 10                          | 15   | 20    | 25   | 30    | 35   | 35                           |
| 2.29 | Persentase imunisasi dasar lengkap pada usia 12-23 bulan                            | %        | 64,24                       | 80                          | 90   | 90    | 90   | 90    | 90   | 90                           |
| 2.30 | Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria                               | Kab/kota | 8                           | 8                           | 9    | 10    | 10   | 10    | 11   | 11                           |
| 2.31 | Persentase usaha kecil obat tradisional (UKOT) yang memenuhi ketentuan              | %        | 100%                        | 100%                        | 100% | 100%  | 100% | 100%  | 100% | 100%                         |



|      | Indikator Kinerja Daerah                                                        | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |             |             | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------|
|      |                                                                                 |        |                             | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029        | 2030        |                              |
| 1    | 2                                                                               | 3      | 4                           | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11                           |
|      | perizinan                                                                       |        |                             |                             |             |             |             |             |             |                              |
| 2.32 | Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)                      | %      | 100%                        | 100%                        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                         |
| 2.33 | Persentase pedagang besar farmasi (PBF) cabag yang memenuhi ketentuan perizinan | %      | 100%                        | 100%                        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%        | 100%                         |
| 2.34 | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                    | %      | 4,48                        | 4,27- 4,38                  | 4,20-4,37   | 3,89-4,31   | 3,55-4,20   | 2,78-4,07   | 2,65 - 4,00 | 2,65 - 4,00                  |
| 2.35 | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal                                       | %      | NA                          | 43                          | 45          | 47          | 49          | 51,4        | 52          | 52                           |
| 2.36 | Persentase pekerja informal                                                     | %      |                             | 54,57                       | 54,52       | 54          | 53,75       | 53,3        | 53,2        | 53,2                         |
| 2.37 | Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan                                    | %      | 51,17                       | 52,60-54,52                 | 52,80-54,80 | 53,00-55,35 | 53,22-55,80 | 53,58-56,46 | 53,75-56,75 | 53,75-56,75                  |
| 2.38 | Indeks kerukunan                                                                | Indeks | 69,24                       | 69,25-69,50                 | 69,36-69,55 | 69,45-69,75 | 69,70-69,98 | 70,00-70,45 | 70,58-71,54 | 70,58-71,54                  |

|                         | Indikator Kinerja Daerah                        | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |             |             |             |            |           | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-------------------------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------------------------|
|                         |                                                 |        |                             | 2025                        | 2026        | 2027        | 2028        | 2029       | 2030      |                              |
| 1                       | 2                                               | 3      | 4                           | 5                           | 6           | 7           | 8           | 9          | 10        | 11                           |
|                         | Umat Beragama                                   |        |                             |                             |             |             |             |            |           |                              |
| 2.39                    | Indeks Pembangunan Kebudayaan                   | Indeks | 58,92*                      | 60,15-60,23                 | 60,73-60,85 | 61.29-61.44 | 61,83-62.02 | 62,38-62,6 | 62,7-63,0 | 62,7-63,0                    |
| 2.40                    | Indeks perlindungan anak (IPA)                  | indeks | 76.12                       | 80,00                       | 84.24       | 88.62       | 93.23       | 93.23      | 93.23     | 93.23                        |
| 2.41                    | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga            | Indeks | NA                          | 77,23                       | 77,80       | 78,35       | 78,90       | 79,46      | 79,83     | 79,83                        |
| 2.42                    | Indeks Ketimpangan Gender(IKG)                  | Indeks | 0,528                       | 0,514                       | 0.504       | 0.489       | 0.469       | 0.467      | 0.465     | 0.465                        |
| 2.43                    | Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki remaja | Indeks | 84,70                       | 85,20                       | 85,70       | 86,20       | 86,70       | 87,20      | 88,0      | 88,0                         |
| 2.44                    | Indeks Pembangunan Gender(IPG)                  | Indeks | 89.29                       | 89,40                       | 89.59       | 89.60       | 89.61       | 89.62      | 89.63     | 89.63                        |
| ASPEK DAYA SAING DAERAH |                                                 |        |                             |                             |             |             |             |            |           |                              |
| 3.1                     | Nilai Tukar Petani                              | -      | 156,1                       | 156,7                       | 157,4       | 158,4       | 160,4       | 162,4      | 164,4     | 164,4                        |

|     | Indikator Kinerja Daerah                             | Satuan     | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|     |                                                      |            |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1   | 2                                                    | 3          | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 3.2 | Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita | %          | 47,46                       | 48,01                       | 48,52 | 48,84 | 48,98 | 49,30 | 49,38 | 49,38                        |
| 3.3 | Rasio ketergantungan                                 | -          | 31,06                       | 45,40                       | 45,42 | 45,62 | 45,83 | 46,06 | 46,30 | 46,30                        |
| 3.4 | Rasio PDRB Industri Pengolahan                       | -          | 9,77                        | 10,1                        | 10,1  | 10,0  | 10,0  | 9,99  | 9,99  | 9,99                         |
| 3.5 | Rasio PDRB penyediaan akomodasi Makan dan Minum      | %          | 1,10                        | 1,21                        | 1,22  | 1,23  | 1,24  | 1,26  | 1,27  | 1,27                         |
| 3.6 | Jumlah tamu wisatawan mancanegara                    | Ribu orang | NA                          | 5,66                        | 5,90  | 5,45  | 6,02  | 6,80  | 6,91  | 6,91                         |
| 3.7 | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (UKM)       | %          | NA                          | 2,87                        | 2,93  | 2,99  | 3,02  | 3,08  | 3,09  | 3,09                         |
| 3.8 | Rasio kewirausahaan                                  | -          | NA                          | 5,35                        | 5,40  | 5,47  | 5,59  | 5,75  | 5,84  | 5,84                         |
| 3.9 | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB            | %          | NA                          | 0,71                        | 0,72  | 0,74  | 0,76  | 0,78  | 0,79  | 0,79                         |

|      | Indikator Kinerja Daerah                              | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                       |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                     | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 3.10 | Return on Asset (ROA) BUMD                            | %      | NA                          | 3,37                        | 3,42  | 3,47  | 3,50  | 3,54  | 3,56  | 3,56                         |
| 3.11 | Indeks Inovasi Daerah                                 | Indeks | 58,59                       | 58,75                       | 58,89 | 59,00 | 59,25 | 60,1  | 61    | 61                           |
| 3.12 | Indeks Ekonomi Hijau                                  | Indeks | 57,92**                     | 61,39                       | 63,65 | 65,54 | 66,46 | 68,55 | 68,60 | 68,60                        |
| 3.13 | Indeks Ekonomi Biru                                   | Indeks | 14,03*                      | 15,26                       | 15,35 | 16,26 | 17,27 | 18,29 | 19,01 | 19,01                        |
| 3.14 | Porsi EBT Dalam Bauran Energi                         | %      | 24                          | 30,62                       | 33,41 | 36,2  | 39    | 42,07 | 44,58 | 44,58                        |
| 3.15 | Indeks Transformasi Digital Nasional Provinsi Jambi   | Indeks | 42,3**                      | 50,80                       | 51,23 | 51,67 | 52,10 | 52,63 | 52,65 | 52,65                        |
| 3.16 | Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Indeks | 5,92*                       | 5,9                         | 6,1   | 6,27  | 6,5   | 6,8   | 6,85  | 6,85                         |
| 3.17 | Rasio pajak daerah terhadap PDRB                      |        | 0,57                        | 1,2                         | 1,24  | 1,29  | 1,33  | 1,38  | 1,425 | 1,425                        |
| 3.18 | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB                          | %      | NA                          | 16,32                       | 17,0  | 18,0  | 19,0  | 19,79 | 20,0  | 20,0                         |
| 3.19 | Aset Dana                                             | %      | NA                          | 0,08                        | 0,082 | 0,085 | 0,088 | 0,09  | 0,092 | 0,092                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |              |           | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------------------------------|
|      |                                                                                  |        |                             | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029         | 2030      |                              |
| 1    | 2                                                                                | 3      | 4                           | 5                           | 6         | 7         | 8         | 9            | 10        | 11                           |
|      | Pensiun/PDRB                                                                     |        |                             |                             |           |           |           |              |           |                              |
| 3.20 | Nilai transaksi saham per kapita per provinsi                                    | Rupiah | NA                          | 4.219.124,01                | 5.300.125 | 6.355.400 | 7.453.500 | 8.542.116,56 | 8.900.250 | 8.900.250                    |
| 3.21 | Total Kredit/PDRB                                                                | %      | NA                          | 18,0                        | 18,7      | 19,3      | 20,0      | 21,3         | 21,5      | 21,5                         |
| 3.22 | Tingkat inklusi keuangan Provinsi                                                | %      | 85*                         | 91,35                       | 91,86     | 92,50     | 93,10     | 93,72        | 94,25     | 94,25                        |
| 3.23 | Pembentukan Modal tetap Bruto                                                    | %      | 21,69                       | 19,1                        | 18,79     | 18,48     | 18,17     | 17,86        | 17,55     | 17,55                        |
| 3.24 | Ekspor Barang dan Jasa                                                           | %      | 29,27                       | 17,9                        | 18,11     | 18,32     | 18,53     | 18,74        | 18,95     | 18,95                        |
| 3.25 | Indeks Daya Saing Infrastruktur                                                  | Indeks | 2,38                        | 2,5                         | 2,56      | 2,62      | 2,67      | 2,73         | 2,79      | 2,79                         |
| 3.26 | Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan | %      | 66,21                       | 68,84                       | 70,39     | 71,95     | 73,51     | 75,07        | 76,63     | 76,63                        |
| 3.27 | Persentase Desa Mandiri                                                          | %      | 9,97                        | 26,10                       | 26,91     | 27,51     | 27,99     | 28,01        | 28,50     | 28,50                        |
| 3.28 | Tingkat Inflasi                                                                  | %      | 1,43                        | 3,1-3,7                     | 3,0-3,7   | 2,9-3,7   | 2,5-3,7   | 1,6-3,7      | 1,5-3,5   | 1,5-3,5                      |

|                      | Indikator Kinerja Daerah                                   | Satuan    | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|                      |                                                            |           |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                              |
| 1                    | 2                                                          | 3         | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                           |
| 3.29                 | Pertumbuhan PDRB Sektor pertanian, perikanan dan kehutanan | %         | 4,25                        | 5,5                         | 5,60   | 6,00   | 7,01   | 8,10   | 8,10   | 8,1                          |
| 3.30                 | Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi     | Koefisien | NA                          | 10,1                        | 10,0   | 9,8    | 9,7    | 9,5    | 9,5    | 9,5                          |
| 3.31                 | Aset Perbankan Syariah/PDRB                                | %         | 2,46                        | 2,63                        | 2,92   | 3,24   | 3,65   | 4,11   | 4,25   | 4,25                         |
| 3.32                 | Indeks Zakat Nasional                                      | indeks    | 0,5                         | 0,53                        | 0,56   | 0,59   | 0,62   | 0,65   | 0,68   | 0,68                         |
| 3.33                 | Jumlah produk tersertifikasi halal Provinsi                | Produk    | 13.367                      | 17.257                      | 17.321 | 17.378 | 17.429 | 17.458 | 17.486 | 17.486                       |
| ASPEK PELAYANAN UMUM |                                                            |           |                             |                             |        |        |        |        |        |                              |
| 4.1                  | Indeks Reformasi Hukum                                     | Indeks    | NA                          | 41,15                       | 42,42  | 43,69  | 44,96  | 46,23  | 47,5   | 47,5                         |
| 4.2                  | Indeks SPBE                                                | Indeks    | 3,05                        | 3,85                        | 4,0    | 4,20   | 4,41   | 4,63   | 4,85   | 4,85                         |

|                         | Indikator Kinerja Daerah                                                        | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |            |             |             |             |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|------------------------------|
|                         |                                                                                 |        |                             | 2025                        | 2026       | 2027        | 2028        | 2029        | 2030   |                              |
| 1                       | 2                                                                               | 3      | 4                           | 5                           | 6          | 7           | 8           | 9           | 10     | 11                           |
| 4.3                     | Indeks Pelayanan Publik                                                         | Indeks | B (3,67)                    | 3,33                        | 3,35       | 3,39        | 3,42        | 3,45        | 3,50   | 3,50                         |
| 4.4                     | Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas (SPI))                  | Indeks | 65,36                       | 73,97                       | 73,99      | 74,55       | 75,7        | 77          | 77,75  | 77,75                        |
| 4.5                     | Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan                                    | %      | 100                         | 100                         | 100        | 100         | 100         | 100         | 100    | 100                          |
| 4.6                     | Indeks Demokrasi Indonesia                                                      | %      | 74,47                       | 77,72-80,97                 | 77,90-81,0 | 78,01-81,25 | 78,25-81,46 | 78,43-81,68 | 85     | 85                           |
| 4.7                     | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya | %      | 65,56                       | 65,56                       | 66,43      | 67,31       | 68,17       | 69,04       | 69,905 | 69,905                       |
| 4.8                     | Indeks Daya Saing Daerah                                                        | Indeks | 3,38                        | 3,42                        | 3,47       | 3,58        | 3,76        | 3,85        | 3,99   | 3,99                         |
| INDIKATOR KINERJA KUNCI |                                                                                 |        |                             |                             |            |             |             |             |        |                              |

|                              | Indikator Kinerja Daerah                                                                                           | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|                              |                                                                                                                    |        |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                              |
| 1                            | 2                                                                                                                  | 3      | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                           |
| Fokus Pelayanan Urusan Wajib |                                                                                                                    |        |                             |                             |        |        |        |        |        |                              |
| 1                            | Kesehatan                                                                                                          |        |                             |                             |        |        |        |        |        |                              |
|                              | Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar                                                  | %      | 74,0                        | 75,0                        | 78,0   | 82,0   | 86,0   | 91,0   | 95,0   | 95,0                         |
| 1.1                          | Persentase RS terakreditasi paripurna                                                                              | %      | 70,45                       | 71,50                       | 72,72  | 79,54  | 81,81  | 84,09  | 86,36  | 86,36                        |
| 1.2                          | Persentase FKTP yang terakreditasi minimal Utama                                                                   | %      | 87,98%                      |                             | 91,35% | 93,75% | 96,15% | 98,56% | 99,04% | 99,04%                       |
| 1.3                          | Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana | %      | 100%                        | 100%                        | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         |



|     | Indikator Kinerja Daerah                                                                                     | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|     |                                                                                                              |        |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                              |
| 1   | 2                                                                                                            | 3      | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                           |
| 1.4 | Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan beresiko pada situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | %      | 100%                        | 100%                        | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         |
| 1.5 | Persentase Fasyankes yang terakreditasi paripurna                                                            | %      | 32,69                       | 32,69                       | 32,69  | 32,69  | 40,87  | 45,67  | 45,67  | 60%                          |
| 1.6 | Rasio daya tampung rumah sakit rujukan                                                                       | Rasio  | 1,26                        |                             | 1,27   | 1,28   | 1,29   | 1,3    | 1,31   | 1,32                         |
| 1.7 | Rasio Puskesmas per Kecamatan                                                                                | Rasio  | 98,61                       |                             | 98,61  | 99,31  | 99,31  | 100    | 100    | 100                          |
| 1.8 | Persentase fasyankes dengan ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin                                      | Jumlah | 100                         | 100                         | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100                          |
| 2   | Pendidikan                                                                                                   |        |                             |                             |        |        |        |        |        |                              |
| 2.1 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam                                  | %      | 71,97%                      | 72,31                       | 72,65% | 72,99% | 73,33% | 73,67% | 74,01% | 74,01%                       |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                                                                            | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|     |                                                                                                                     |        |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                              |
| 1   | 2                                                                                                                   | 3      | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                           |
|     | pendidikan menengah                                                                                                 |        |                             |                             |        |        |        |        |        |                              |
| 2.2 | Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun Penyandang Disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus | %      | 59,78%                      | 67,82                       | 75,87% | 76,96% | 78,05% | 79,14% | 80,23% | 80,23%                       |
| 2.3 | Rata-rata kompetensi literasi SMA berdasarkan asesmen nasional                                                      | nilai  | 70,1                        | 70,70                       | 71,3   | 71,9   | 72,5   | 73,1   | 73,7   | 73,7                         |
| 2.4 | Rata-rata kompetensi numerasi SMA berdasarkan asesmen nasional                                                      | nilai  | 60,05                       | 61,65                       | 63,25  | 64,85  | 66,45  | 68,05  | 69,65  | 69,65                        |
| 2.5 | Rata-rata kompetensi literasi SMK berdasarkan asesmen nasional                                                      | nilai  | 64,73                       | 66,03                       | 67,33  | 68,63  | 69,93  | 71,23  | 72,53  | 72,53                        |
| 2.6 | Rata-rata kompetensi numerasi SMK                                                                                   | nilai  | 56,19                       | 58,39                       | 60,59  | 62,79  | 64,99  | 67,19  | 69,39  | 69,39                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                                  |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                                | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
|      | berdasarkan asesmen nasional                                     |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 2.7  | Rata-rata kompetensi literasi SDLB berdasarkan asesmen nasional  | nilai  | 60,42                       | 62,02                       | 63,62 | 65,22 | 66,82 | 68,42 | 70,02 | 70,02                        |
| 2.8  | Rata-rata kompetensi literasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional | nilai  | 55,53                       | 56,03                       | 56,53 | 57,03 | 57,53 | 58,03 | 58,53 | 58,53                        |
| 2.9  | Rata-rata kompetensi literasi SMALB berdasarkan asesmen nasional | nilai  | 57,69                       | 58,19                       | 58,69 | 59,19 | 59,69 | 60,19 | 60,69 | 60,69                        |
| 2.10 | Rata-rata kompetensi numerasi SDLB berdasarkan asesmen nasional  | nilai  | 54,07                       | 54,67                       | 55,27 | 55,87 | 56,47 | 57,07 | 57,67 | 57,67                        |
| 2.11 | Rata-rata kompetensi numerasi SMPLB berdasarkan asesmen nasional | nilai  | 53,65                       | 53,80                       | 54,05 | 54,3  | 54,55 | 54,8  | 55,05 | 55,05                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                         | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|      |                                                                  |        |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                              |
| 1    | 2                                                                | 3      | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                           |
| 2.12 | Rata-rata kompetensi numerasi SMALB berdasarkan asesmen nasional | nilai  | 57,91                       | 58,41                       | 58,91  | 59,41  | 59,91  | 60,41  | 60,91  | 60,91                        |
| 2.13 | Tingkat penyerapan lulusan SMK                                   | %      | 81,60%                      | 83,66                       | 85,72% | 87,77% | 89,83% | 91,89% | 93,95% | 93,95%                       |
| 2.14 | Tingkat kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK   | %      | 74,48                       | 75,02                       | 75,94% | 76,86% | 77,78% | 78,70% | 80,00% | 80,00%                       |
| 2.15 | Iklim keamanan SMA                                               | nilai  | 70,95                       | 80,05                       | 81,25  | 82,45  | 83,65  | 84,85  | 86,05  | 86,05                        |
| 2.16 | Iklim keamanan SMK                                               | nilai  | 67,46                       | 68,66                       | 69,86  | 71,06  | 72,26  | 73,46  | 74,66  | 74,66                        |
| 2.17 | Iklim keamanan SDLB                                              | nilai  | 74,38                       | 74,88                       | 75,38  | 75,88  | 76,38  | 76,88  | 77,38  | 77,38                        |
| 2.18 | Iklim keamanan SMPLB                                             | nilai  | 64,08                       | 65,28                       | 66,48  | 67,68  | 68,88  | 70,08  | 71,28  | 71,28                        |
| 2.19 | Iklim keamanan SMALB                                             | nilai  | 69,18                       | 70,48                       | 71,78  | 73,08  | 74,38  | 75,68  | 76,98  | 76,98                        |
| 2.20 | Iklim kebinekaan SMA                                             | nilai  | 71,08                       | 72,08                       | 73,08  | 74,08  | 75,08  | 76,08  | 77,08  | 77,08                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|--------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                          |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                        | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 2.21 | Iklm kebinekaan SMK      | nilai  | 68,65                       | 69,95                       | 71,25 | 72,55 | 73,85 | 75,15 | 76,45 | 76,45                        |
| 2.22 | Iklm kebinekaan SDLB     | nilai  | 65,23                       | 66,23                       | 67,23 | 68,23 | 69,23 | 70,23 | 71,23 | 71,23                        |
| 2.23 | Iklm kebinekaan SMPLB    | nilai  | 66,62                       | 68,42                       | 70,22 | 72,02 | 73,82 | 75,62 | 77,42 | 77,42                        |
| 2.24 | Iklm kebinekaan SMALB    | nilai  | 68,82                       | 70,82                       | 72,82 | 74,82 | 76,82 | 78,82 | 80,82 | 80,82                        |
| 2.25 | Iklm inklusivitas SMA    | nilai  | 58,85                       | 60,35                       | 61,85 | 63,35 | 64,85 | 66,35 | 67,85 | 67,85                        |
| 2.26 | Iklm inklusivitas SMK    | nilai  | 55,33                       | 57,63                       | 59,93 | 62,23 | 64,53 | 66,83 | 69,13 | 69,13                        |
| 2.27 | Iklm inklusivitas SDLB   | nilai  | 64,31                       | 65,61                       | 66,91 | 68,21 | 69,51 | 70,81 | 72,11 | 72,11                        |
| 2.28 | Iklm inklusivitas SMPLB  | nilai  | 62,62                       | 64,02                       | 65,42 | 66,82 | 68,22 | 69,62 | 71,02 | 71,02                        |
| 2.29 | Iklm inklusivitas SMALB  | nilai  | 63,18                       | 64,78                       | 66,38 | 67,98 | 69,58 | 71,18 | 72,78 | 72,78                        |
| 3    | Sosial                   |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |

| 1   | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                           | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                    |         |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1   | 2                                                                                                                                  | 3       | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 3.1 | Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan                                               | KPM     | 1025                        | 500                         | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 2500                         |
| 3.2 | SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi                                                  | Orang   | 1337                        | 550                         | 550  | 550  | 500  | 500  | 578  | 4015                         |
| 3.3 | Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi | Lembaga | 25                          | 30                          | 35   | 35   | 35   | 40   | 48   | 193                          |
| 3.4 | Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan                                     | %       | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                                          | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|     |                                                                                   |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1   | 2                                                                                 | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 3.5 | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya | %      | 7,93                        | 7,93                        | 7,93  | 7,93  | 7,93  | 7,93  | 7,93  | 7,93                         |
| 3.6 | Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya            | %      | 21,49                       | 21,49                       | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49 | 21,49                        |
| 3.7 | Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                   | %      | 2,19                        | 2,19                        | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19                         |
| 3.8 | Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya             | %      | 1,1                         | 1,1                         | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1                          |
| 3.9 | Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya                   | %      | 100                         | 100                         | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                          |
| 4   | Trantibum dan Perlindungan Masyarakat                                             |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                                                  | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |      |       |      |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|------|-------|------|-------|------------------------------|
|     |                                                                                           |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027 | 2028  | 2029 | 2030  |                              |
| 1   | 2                                                                                         | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7    | 8     | 9    | 10    | 11                           |
| 4.1 | Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan                                     | %      | 100                         | 100                         | 100   | 100  | 100   | 100  | 100   | 100                          |
| 4.2 | Persentase penanganan pra bencana                                                         | %      | 100                         | 100                         | 100   | 100  | 100   | 100  | 100   | 100                          |
| 4.3 | Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana                                | %      | 100                         | 100                         | 100   | 100  | 100   | 100  | 100   | 100                          |
| 4.4 | Persentase pendampingan penanganan pasca bencana                                          | %      | 100                         | 100                         | 100   | 100  | 100   | 100  | 100   | 100                          |
| 5   | <i>PU dan Penataan Ruang</i>                                                              |        |                             |                             |       |      |       |      |       |                              |
| 5.1 | Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi | Ha     | 62,49                       | 63,5                        | 67,14 | 68,4 | 68,8  | 69   | 69,85 | 69,85                        |
| 5.2 | Persentase kondisi mantap jalan provinsi                                                  | %      | 74,7                        | 74,9                        | 75,2  | 76,8 | 77,15 | 78,4 | 79,5  | 79,5                         |



|     | Indikator Kinerja Daerah                                                                       | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|     |                                                                                                |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1   | 2                                                                                              | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 5.3 | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi                    | Orang  | 160                         | 160                         | 160  | 160  | 160  | 160  | 160  | 160                          |
| 5.4 | Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi | Orang  | 50                          | 50                          | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50                           |
| 5.5 | Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi                                     | %      | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |
| 5.6 | Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi                                             | %      | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |
| 5.7 | Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi                                   | %      | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                               | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|      |                                                                                                        |         |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                                      | 3       | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 5.8  | Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi                                               | %       | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |
| 5.9  | Jumlah materi teknis RTRW Kabupaten/kota yang diberikan rekomendasi dalam rangka persetujuan substansi | Dokumen | 7                           | -                           | 3    | 1    | -    | -    | -    | 11                           |
| 5.10 | Jumlah rancangan Perda RTRW kabupaten/kota yang dilakukan evaluasi dalam rangka penetapan Perda        | Dokumen | 2                           | -                           | 3    | 1    | -    | -    | -    | 4                            |
| 5.11 | Jumlah kasus pelanggaran pemanfaatan ruang yang dikenakan sanksi administratif                         | Kasus   | -                           | -                           | 1    | 1    | 1    | -    | -    | 3                            |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                           | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           |             | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                    |         |                             | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030        |                              |
| 1    | 2                                                                                                                                                  | 3       | 4                           | 5                           | 6         | 7         | 8         | 9         | 10          | 11                           |
| 5.12 | Jumlah laporan kebutuhan PPNS penataan ruang di daerah                                                                                             | Dokumen | -                           | -                           | 1         | 1         | 1         | 1         | 1           | 1                            |
| 6    | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                                                                                                            |         |                             |                             |           |           |           |           |             |                              |
| 6.1  | Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni                                                                            | %       | 100                         | 100                         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100         | 100                          |
| 6.2  | Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | %       | 100                         | 100                         | 100       | 100       | 100       | 100       | 100         | 100                          |
| 7    | Tenaga Kerja                                                                                                                                       |         |                             |                             |           |           |           |           |             |                              |
| 7.1  | Tingkat Pengangguran Terbuka                                                                                                                       | %       | 4,48                        | 4,27- 4,38                  | 4,20-4,37 | 3,89-4,31 | 3,55-4,20 | 2,78-4,07 | 2,65 - 4,00 | 2,65 - 4,00                  |

| 1   | Indikator Kinerja Daerah                                                    | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|     |                                                                             |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1   | 2                                                                           | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 7.2 | Persentase peningkatan kepesertaan BPJS naker                               | %      | 41                          | 41                          | 42   | 43    | 44    | 45    | 46    | 46                           |
| 7.3 | Persentase peningkatan kelembagaan ketenagakerjaan                          | %      | 15,76                       | 15,76                       | 15,8 | 15,82 | 15,84 | 15,86 | 15,88 | 15,88                        |
| 7.4 | Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya                              | orang  | 1350                        | 1350                        | 1400 | 1450  | 1500  | 1550  | 1600  | 1600                         |
| 7.5 | Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri                        | orang  | 2027                        | 2027                        | 3000 | 3500  | 4000  | 4500  | 5000  | 5000                         |
| 7.6 | Persentase perusahaan yang diawasi dari jumlah perusahaan dalam WLKP online | %      | 68                          | 68                          | 69   | 70    | 71    | 72    | 73    | 73                           |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                    | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|     |                                                                                                                                                             |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1   | 2                                                                                                                                                           | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 7.7 | Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, bipartit, Struktur skala upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan) | %      | 98,6                        | 98,6                        | 98,7 | 98,8 | 98,9 | 99   | 99,1 | 99,1                         |
| 8   | <i>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>                                                                                                         |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |
| 8.1 | Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif                                                                        | %      | 100%                        | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                         |
| 8.2 | Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya                                                                                                                      | nilai  | 700                         | 700                         | 701  | 720  | 750  | 780  | 800  | 800                          |
| 8.3 | Persentase Anggaran Responsif Gender                                                                                                                        | %      | 55                          | 57                          | 60   | 70   | 80   | 85   | 90   | 90                           |
| 8.4 | Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan                                                                                                           | %      | 100%                        | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                         |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                   | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------|
|      |                                                                            |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                          | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   | 11                           |
|      | layanan komprehensif                                                       |        |                             |                             |       |       |       |       |      |                              |
| 9    | <i>Pangan</i>                                                              |        |                             |                             |       |       |       |       |      |                              |
| 9.1  | Persentase pemenuhan cadangan pangan ideal                                 | %      | 66,96                       | 66,96                       | 73,57 | 80,18 | 86,78 | 93,29 | 100  | 100                          |
| 9.2  | Skor PPH                                                                   | %      | 93,1*                       | 93,4                        | 93,7  | 94,0  | 94,3  | 94,6  | 95,0 | 95,0                         |
| 9.3  | Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan                                      | %      | 20,58                       | 17,38                       | 15,78 | 14,18 | 12,58 | 10,98 | 9,38 | 9,38                         |
| 9.4  | Persentase Pangan Segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan | %      | 86,42                       | 86,5                        | 86,5  | 87    | 87,5  | 88    | 88,5 | 88,5                         |
| 10   | <i>Pertanahan</i>                                                          |        |                             |                             |       |       |       |       |      |                              |
| 10.1 | Persentase Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan                               | %      | 0                           | 0                           | 33,33 | 50    | 66,67 | 83,33 | 100  | 100                          |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                    | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                                             |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                                           | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
|      | Umum                                                                        |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 10.2 | Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan | %      | 0                           | 0                           | 33,33 | 50    | 66,67 | 83,33 | 100   | 100                          |
| 11   | Lingkungan Hidup                                                            |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 11.1 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                    | Indeks | 0,538                       | 0,556                       | 0,589 | 0,612 | 0,624 | 0,632 | 0,640 | 0,640                        |
| 11.2 | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah                                           | Indeks | 0                           | 25                          | 50    | 50.5  | 51    | 51.5  | 52    | 52                           |
| 12   | Administrasi Kependudukan dan Capil                                         |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 12.1 | Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)                 | %      | 100%                        | 100%                        | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                         |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                                    | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|      |                                                                                                             |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                                           | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 12.2 | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan | %      | 100%                        | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                         |
| 12.3 | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraianannya dilaporkan | %      | 100%                        | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                         |
| 12.4 | Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan                                    | %      | 100%                        | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                         |
| 12.5 | Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun                            | %      | 98%                         | 98%                         | 99%  | 99%  | 99%  | 99%  | 100% | 100%                         |



|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                                            | Satuan  | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                                                                                     |         |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                                                                                   | 3       | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 12.6 | Persentase Kartu Indetitas Anak (KIA) yang diterbitkan                                                              | %       | 100%                        | 100%                        | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%                         |
| 12.7 | Jumlah data profil kependudukan yang disusun                                                                        | Dokumen | 2                           | 2                           | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 14                           |
| 13   | <i>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</i>                                                                             |         |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 13.1 | Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek                                                                         | Desa    | 149                         | 149                         | 149   | 185   | 222   | 324   | 427   | 427                          |
| 13.2 | Jumlah BPD yang Mengimplementasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif | BPD     | 1.414                       | 1.414                       | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414                        |
| 13.3 | Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes                             | orang   | 5,137                       | 1.979                       | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.979 | 1.982 | 7,119                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                                        |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                                      | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 13.4 | Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintah Desa Berbasis Digital | Desa   | 1.414                       | 1.414                       | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414 | 1.414                        |
| 13.5 | Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa             | Desa   | 989                         | 1.131                       | 1.131 | 1.201 | 1.272 | 1.343 | 1.414 | 1414                         |
| 13.6 | Persentase Kemiskinan di Perdesaan                                     | %      | 6,08%                       | 5,88%                       | 5,88% | 5,68% | 5,48% | 5,28% | 5,08% | 5.08%                        |
| 13.7 | Persentase BUM Desa Maju                                               | %      | 0,31                        | 1,91                        | 1,91  | 3     | 7     | 12    | 17    | 17                           |
| 14   | Pengendalian Penduduk dan KB                                           |        |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 14.1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                  | indeks | 63,66                       | 65,36                       | 67,06 | 68,76 | 70,46 | 72,16 | 74,00 | 74,00                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                         | Satuan                            | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                                                  |                                   |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                                                | 3                                 | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 14.2 | Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility rate/ASFR 15-19) | Kelahiran per 1000WUS 15-19 tahun | 22,40                       | 22,10                       | 22,00 | 21,90 | 21,80 | 21,80 | 21,76 | 21,76                        |
| 14.3 | Angka kelahiran total (TFR 15-49 tahun)                                          | Rata-rata anak per wanita         | 2,25                        | 2,22                        | 2,21  | 2,2   | 2,19  | 2,19  | 2,19  | 2,19                         |
| 14.4 | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                | Indeks                            | 66,48                       | 68,48                       | 70,48 | 72,48 | 74,48 | 76,48 | 77,21 | 77.21                        |
| 14.5 | Persentase kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern               | %                                 | 89,30                       | 89,80                       | 90,20 | 90,60 | 91,10 | 91,50 | 91,60 | 91,60                        |
| 14,6 | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                    | %                                 | 13,10                       | 7,82                        | 7,55  | 7,34  | 7,13  | 6,92  | 6,85  | 6,85                         |
| 15   | Perhubungan                                                                      |                                   |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 15.1 | On time Performance                                                              | %                                 | 93                          | 93                          | 94    | 95    | 96    | 97    | 98    | 98                           |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                      | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|      |                                                                                               |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                             | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
|      | Layanan transportasi                                                                          |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |
| 15.2 | Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi                                               | Rasio  | 0.5874                      | 0,588                       | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.63                         |
| 15.3 | Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Provinsi | %      | 75                          | 75                          | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 80                           |
| 15.4 | Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen keselamatan              | Unit   | 27                          | 27                          | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33                           |
| 15.5 | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi                      | Rasio  | 76,78                       | 76,8                        | 76,9 | 77   | 78   | 79   | 80   | 80                           |
| 16   | Komunikasi dan Informasi                                                                      |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |
| 16.1 | Indeks Komunikasi Pembangunan dan                                                             | Indeks | NA                          | 71                          | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 76                           |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                        |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                                                                                      | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   | 11                           |
|      | Informasi Publik                                                                                                                                       |        |                             |                             |       |       |       |       |      |                              |
| 16.2 | Indeks SPBE                                                                                                                                            | Indeks | 3,05                        | 3,85                        | 4,0   | 4,20  | 4,41  | 4,81  | 4,85 | 4,85                         |
| 16.3 | Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas                 | %      | 1                           | 1                           | 1.1   | 1.2   | 1.3   | 1.4   | 1.5  | 1.5                          |
| 16.4 | Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Provinsi yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas | %      | 50                          | 55                          | 60    | 70    | 80    | 90    | 95   | 95                           |
| 16.5 | Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik                                                                    | %      | 91.12                       | 91.12                       | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 91.12 | 92   | 92                           |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                                                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                        |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                                                                                                                      | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
|      | pemerintah daerah                                                                                                                                                                      |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |
| 16.6 | Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan                                                                                                  | %      | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |
| 16.7 | Persentase ASN Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas | %      | 50                          | 55                          | 60   | 65   | 70   | 75   | 80   | 85                           |
| 16.8 | Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang difasilitasi untuk peningkatan kapasitas SDM oleh Dinas Kominfo Provinsi (misal mengikuti Festival                                | %      | 57.89                       | 63                          | 69   | 72   | 75   | 78   | 81   | 81                           |

|       | Indikator Kinerja Daerah                                                                | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|       |                                                                                         |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1     | 2                                                                                       | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
|       | KIM,Bintek,pelatihan )                                                                  |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |
| 16.9  | Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda                                 | %      | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |
| 16.10 | Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas | %      | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |
| 16.11 | Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah      | %      | 100                         | 100                         | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100                          |
| 16.12 | Persentase Kabupaten/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah        | %      | 0                           | 18,18                       | 30   | 50   | 70   | 80   | 100  | 100                          |

|       | Indikator Kinerja Daerah                                                                                                            | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------------|
|       |                                                                                                                                     |        |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030 |                              |
| 1     | 2                                                                                                                                   | 3      | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10   | 11                           |
| 16.13 | Persentase Perangkat Daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi yang mendapatkan sosialisasi program Provinsi Cerdas (Smart Province) | %      | 2.95                        | 50                          | 75    | 80    | 85    | 90    | 95   | 95                           |
| 16.14 | Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah                                               | %      | 62.5                        | 64                          | 66    | 69    | 72    | 75    | 78   | 78                           |
| 16.15 | Persentase area publik yang memanfaatkan akses internet A yang disediakan oleh Dinas                                                | %      | 0                           | 20                          | 40    | 50    | 60    | 70    | 80   | 80                           |
| 16.16 | Nilai Pemerintah Indeks Transformasi Digital                                                                                        | nilai  | NA                          | 54,05                       | 54,95 | 55,85 | 56,75 | 57,65 | 58,5 | 58,5                         |
| 17    | Koperasi dan UKM                                                                                                                    |        |                             |                             |       |       |       |       |      |                              |



|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                         | Satuan      | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                                                                  |             |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                                                                | 3           | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 17.1 | Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi                                                                | %           | 24,56                       | 25,5                        | 26,5  | 28.5  | 30.5  | 33    | 35    | 35                           |
| 17.2 | Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal                                  | %           | 24,96                       | 26,5                        | 28,82 | 32,69 | 36,55 | 40,41 | 44,28 | 44,28                        |
| 17.3 | Pertumbuhan Wirausaha                                                                            | %           | 4                           | 4                           | 4.1   | 4.2   | 4.3   | 4.4   | 4.5   | 4.5                          |
| 18   | Penanaman Modal                                                                                  |             |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 17.1 | Realisasi PMDN                                                                                   | Rp. Trilyun | 9,94                        | 9,99                        | 10,14 | 10,34 | 10,55 | 10,87 | 11,19 | 11,19                        |
| 17.2 | Realisasi PMA                                                                                    | Rp. Trilyun | 1,63                        | 1,64                        | 1,66  | 1,70  | 1,73  | 1,74  | 1,79  | 1,79                         |
| 19   | Kepemudaan dan Olahraga                                                                          |             |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 19.1 | Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosialisasi Kemasyarakatan | %           | 0.486                       | 0,598                       | 0.728 | 0.736 | 0.743 | 0.75  | 0.758 | 0.758                        |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                    | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |       |       |       |       |       | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|
|      |                                                                                             |          |                             | 2025                        | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  |                              |
| 1    | 2                                                                                           | 3        | 4                           | 5                           | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11                           |
| 19.2 | Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan                                        | %        | 0.016                       | 0,019                       | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.031 | 0.136                        |
| 19.3 | Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri                                   | %        | 0.004                       | 0.004                       | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.025                        |
| 19.4 | Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir                                | kegiatan | 11                          | 11                          | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11                           |
| 20   | Statistik                                                                                   |          |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 20.1 | Indeks Pembangunan Statistik (IPS)                                                          | Indeks   | 2,6                         | 2,75                        | 3,0   | 3,5   | 4     | 4,5   | 5     | 5                            |
| 21   | Persandian                                                                                  |          |                             |                             |       |       |       |       |       |                              |
| 21.1 | Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi | orang    | 1                           | 1                           | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 8                            |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                 | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|      |                                                                                          |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                        | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 20.2 | Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi                          | orang  | 1                           | 1                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                            |
| 20.3 | Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah                 | %      | 36,38%                      | 60%                         | 65%  | 70%  | 72%  | 74%  | 75%  | 75%                          |
| 20.4 | Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)       | Orang  | 2                           | 1                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 5                            |
| 22   | Kebudayaan                                                                               |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |
| 22.1 | Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni | %      | 28                          | 29                          | 31   | 34   | 37   | 40   | 43   | 43                           |

|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                                | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|      |                                                                                                         |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1    | 2                                                                                                       | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 22.2 | Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang mengunjungi peninggalan sejarah                           | %      | 2,7                         | 2,8                         | 3,1  | 3,5  | 3,9  | 4,3  | 4,7  | 4,7                          |
| 22.3 | Persentase penduduk usia 10 tahun keatas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni | %      | 4,6                         | 4,7                         | 4,9  | 5,2  | 5,5  | 5,8  | 6,1  | 6,1                          |
| 22.4 | Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat                                              | %      | 19                          | 19,5                        | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 24                           |
| 22.5 | Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan                                  | %      | 8                           | 5                           | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 33                           |
| 22.6 | Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung                           | unit   | 4,6                         | 4,7                         | 4,9  | 5,2  | 5,5  | 5,8  | 6,1  | 6,1                          |

|                                       | Indikator Kinerja Daerah                                       | Satuan     | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |           |          |           |          |          | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|------------------------------|
|                                       |                                                                |            |                             | 2025                        | 2026      | 2027     | 2028      | 2029     | 2030     |                              |
| 1                                     | 2                                                              | 3          | 4                           | 5                           | 6         | 7        | 8         | 9        | 10       | 11                           |
|                                       | kegiatan seni                                                  |            |                             |                             |           |          |           |          |          |                              |
| 23                                    | <i>Perpustakaan</i>                                            |            |                             |                             |           |          |           |          |          |                              |
| 23.1                                  | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat                     | Nilai      | 71.3                        | 73,0                        | 79.3      | 79.5     | 79.8      | 80.1     | 80.40    | 80.40                        |
| 24                                    | <i>Kearsipan</i>                                               |            |                             |                             |           |          |           |          |          |                              |
| 24.1                                  | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintah Daerah | Indeks     | 90,03 (A)                   | 90,2                        | 90.5      | 91.1     | 91.5      | 92.1     | 93.80    | 93.80                        |
| <b>Fokus Pelayanan Urusan Pilihan</b> |                                                                |            |                             |                             |           |          |           |          |          |                              |
| 1                                     | <i>Kelautan dan Perikanan</i>                                  |            |                             |                             |           |          |           |          |          |                              |
| 1.1                                   | Luasan Kawasan konservasi                                      | Ha         | 0                           | 11.213,36                   | 10.772,33 | 5.715,13 | 11.244,38 | 6.221,44 | 5.711,22 | 39.664,90 Ha                 |
| 1.2                                   | Produksi Perikanan Tangkap                                     | Ton        | 45.187                      | 46.467                      | 47.500    | 48.300   | 49.800    | 51.200   | 52.400   | 52.400                       |
| 1.3                                   | Produksi Perikanan Budidaya                                    | Ton        | 49595                       | 50.937,7                    | 51.082    | 53.125   | 55.250    | 58.012   | 60.912   | 60.912                       |
| 1.4                                   | Angka Konsumsi Ikan                                            | kg/kap/thn | 41,5                        | 28,07                       | 28,67     | 29,27    | 29,87     | 30,47    | 31,07    | 31,07                        |

| 1   | Indikator Kinerja Daerah                          | Satuan                | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           |           | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|     |                                                   |                       |                             | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                              |
| 1   | 2                                                 | 3                     | 4                           | 5                           | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11                           |
| 1.5 | Kontribusi Sektor Perikanan Tangkap Terhadap PDRB | %                     | 2,16                        | 2,016                       | 2,17      | 2,18      | 2,19      | 2,20      | 2,21      | 2,21                         |
| 2   | Pariwisata                                        |                       |                             |                             |           |           |           |           |           |                              |
| 2.1 | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB        | %                     | 1,10                        | 1,21                        | 1,22      | 1,23      | 1,24      | 1,26      | 1,27      | 1,27                         |
| 2.2 | Jumlah pergerakan wisatawan nusantara             | orang                 | 4.595.145                   | 4.595.145                   | 4.955.905 | 5.526.719 | 6.097.532 | 6.668.346 | 7,239,160 | 7,239,160                    |
| 3   | Pertanian                                         |                       |                             |                             |           |           |           |           |           |                              |
| 3.1 | Produksi Padi                                     | Ton GKG               | 281.022                     | 282.427                     | 283.839   | 285.258   | 286.685   | 288.118   | 289.559   | 289.559                      |
| 3.2 | Produksi Jagung                                   | Ton pipil kering (PK) | 18.825                      | 10.557                      | 10.584    | 10.610    | 10.637    | 10.663    | 10.690    | 10.690                       |
| 3.3 | Populai ternak:                                   |                       |                             |                             |           |           |           |           |           |                              |
|     | - Populasi Sapi                                   | Ekor                  | 106.511                     | 107.576                     | 108.652   | 109.738   | 110.836   | 111.944   | 113.064   | 113.064                      |
|     | - Populasi Kambing                                | Ekor                  | 114.564                     | 115.137                     | 115.713   | 116.291   | 116.873   | 117.457   | 118.044   | 118.044                      |
| 3.4 | Produksi Daging:                                  |                       |                             |                             |           |           |           |           |           |                              |

|      | Indikator Kinerja Daerah                        | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |           |           |           |           |           | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|-------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|      |                                                 |        |                             | 2025                        | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                              |
| 1    | 2                                               | 3      | 4                           | 5                           | 6         | 7         | 8         | 9         | 10        | 11                           |
|      | - sapi                                          | Ton    | 4.380                       | 4.407                       | 4.437     | 4.469     | 4.500     | 4.531     | 4.563     | 4.563                        |
|      | - kambing                                       | Ton    | 490                         | 496                         | 500       | 503       | 507       | 510       | 514       | 514                          |
|      | - Ayam                                          | Ton    | 1,39                        | 57.540                      | 57.827    | 58.116    | 58.406    | 58.698    | 58.992    | 58.992                       |
| 3.5  | Produksi Telur                                  | Ton    | 40.440                      | 40.522                      | 40.603    | 40.684    | 40.765    | 40.847    | 40.929    | 40.929                       |
| 3.6  | Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai       | Kw     | 1.642.414                   | 1.726.573                   | 1.738.659 | 1.750.829 | 1.763.085 | 1.775.427 | 1.787.855 | 1.787.855                    |
| 3.7  | Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah      | Kw     | 124.12                      | 123.122                     | 123.369   | 123.615   | 123.863   | 124.110   | 124.359   | 124.359                      |
| 3.8  | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa | TON    | 115778                      | 115778                      | 118693    | 120178    | 121682    | 123205    | 124746    | 124746                       |
| 3.9  | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao  | TON    | 716                         | 716                         | 716       | 713       | 711       | 709       | 706       | 706                          |
| 3.10 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi   | TON    | 20587                       | 20587                       | 23518     | 25380     | 27584     | 30207     | 33341     | 33341                        |

| 1    | Indikator Kinerja Daerah                                                                     | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|      |                                                                                              |        |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                              |
| 1    | 2                                                                                            | 3      | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                           |
| 3.11 | Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet                                               | TON    | 334829                      | 334829                      | 333742 | 333200 | 332659 | 332118 | 331579 | 331579                       |
| 3.12 | Tingkat pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis                                        | %      | 75,00                       | 76,00                       | 77,00  | 78,00  | 80,00  | 82,00  | 85,00  | 85,00                        |
| 3.13 | Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT | %      | 53,76                       | 54,06                       | 54,56  | 55,36  | 56,36  | 57,66  | 58,52  | 58,52                        |
| 3.14 | Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT       | %      | 83,74                       | 84,14                       | 84,84  | 85,84  | 87,14  | 88,64  | 90,15  | 90,15                        |
| 3.15 | Luas Areal Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (Ha)                           | HA     | 225                         | 425                         | 425    | 650    | 650    | 650    | 650    | 650                          |



|      | Indikator Kinerja Daerah                                                                          | Satuan            | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |                |                |                |                |                | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|
|      |                                                                                                   |                   |                             | 2025                        | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |                              |
| 1    | 2                                                                                                 | 3                 | 4                           | 5                           | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             | 11                           |
| 3.16 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura            | %                 | 13,95                       | 14,55                       | 15,05          | 15,75          | 16,55          | 16,70          | 14,55          | 14,55                        |
| 3.17 | Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan                  | %                 | 12,26                       | 12,56                       | 13,06          | 13,76          | 14,66          | 15,66          | 15,83          | 15,83                        |
| 4    | <i>Kehutanan</i>                                                                                  |                   |                             |                             |                |                |                |                |                |                              |
| 4.1  | Nilai transaksi ekonomi Perhutanan Sosial                                                         | <i>Rp. Milyar</i> | 269.504.315,75              | 300.000.000                 | 300.000.000    | 300.000.000    | 300.000.000    | 300.000.000    | 300.000.000    | 300.000.000                  |
| 4.2  | Nilai transaksi ekonomi KTII                                                                      | <i>Rp.Milyar</i>  | 10.462.277.300              | 12.000.000.000              | 12.000.000.000 | 13.000.000.000 | 14.000.000.000 | 15.000.000.000 | 16.000.000.000 | 16.000.000.000               |
| 4.3  | Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan | <i>Ha</i>         | 217.229,20                  | 220.000                     | 220.000        | 222.000        | 224.000        | 226.000        | 228.000        | 228.000                      |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                                                                          | Satuan            | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |          |           |           |           |           | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|     |                                                                                                                   |                   |                             | 2025                        | 2026     | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |                              |
| 1   | 2                                                                                                                 | 3                 | 4                           | 5                           | 6        | 7         | 8         | 9         | 10        | 11                           |
| 4.4 | Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi                                                                          | Ha                | 3.875,10                    | 200                         | 200      | 200       | 200       | 200       | 200       | 4.875,10                     |
| 4.5 | Luas rehabilitasi hutan dan lahan dengan pemanfaatan bibit oleh masyarakat dan penanaman oleh stakeholder lainnya | Ha                | 61                          | 100                         | 100      | 100       | 100       | 100       | 100       | 3.633                        |
| 5   | ESDM                                                                                                              |                   |                             |                             |          |           |           |           |           |                              |
| 5.1 | Rasio Elektrifikasi                                                                                               | %                 | 99,99%                      | 99,991%                     | 99,992%  | 99,993%   | 99,994%   | 99,995%   | 99,996%   | 99,996%                      |
| 5.2 | Intesitas Energi Primer                                                                                           | SBM/Miliar rupiah | NA                          | 111.308                     | 113.405  | 115.320   | 116.755   | 118.513   | 119.630   | 119.630                      |
| 6   | Perdagangan                                                                                                       |                   |                             |                             |          |           |           |           |           |                              |
| 6.1 | Nilai ekspor barang                                                                                               | Milyar rupiah     | NA                          | 51.647,11                   | 57.083,2 | 63.111,36 | 69.858,34 | 77.351,56 | 80.753,25 | 80.753,25                    |
| 6.2 | Nilai pembelian perdagangan antar wilayah di Provinsi                                                             | Trilyun rupiah    | NA                          | 8,87                        | 9,51     | 10,19     | 10,77     | 11,04     | 11,35     | 11,35                        |
| 7   | Perindustrian                                                                                                     |                   |                             |                             |          |           |           |           |           |                              |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                                | Satuan     | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |        |        |        |        |        | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|
|     |                                                                         |            |                             | 2025                        | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |                              |
| 1   | 2                                                                       | 3          | 4                           | 5                           | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11                           |
| 7.1 | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas         | %          | 5.52                        | 5.52                        | 5.56   | 5.58   | 6.00   | 6.02   | 6.05   | 6.05                         |
| 7.2 | Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB | %          | 9.97                        | 9.97                        | 10.18  | 10.29  | 10.40  | 10.51  | 10.62  | 10.62                        |
| 7.3 | Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas                 | Orang      | 78.085                      | 78.085                      | 78.889 | 79.702 | 80.523 | 81.352 | 82.190 | 82.190                       |
| 7.4 | Nilai Inventasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas                    | Rp.Triliun | 0,700                       | 0,700                       | 0,944  | 1,189  | 1,434  | 1,678  | 1,923  | 1,923                        |
| 7.5 | Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas                        | USD Miliar | 0.793                       | 0.793                       | 0.813  | 0.833  | 0.863  | 0.900  | 1.000  | 1.000                        |
| 8   | Transmigrasi                                                            |            |                             |                             |        |        |        |        |        |                              |

|                                                   | Indikator Kinerja Daerah                                                      | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |          |          |          |          |          | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------|
|                                                   |                                                                               |        |                             | 2025                        | 2026     | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     |                              |
| 1                                                 | 2                                                                             | 3      | 4                           | 5                           | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       | 11                           |
| 8.1                                               | Jumlah kawasan Pemukiman Transmigrasi yang berkualitas                        | lokasi | 1 lokasi                    | 1 lokasi                    | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 6 lokasi                     |
| 8.2                                               | Persentase Pemukiman dan kawasan serta masyarakat transmigrasi yang sejahtera | %      | 27.61                       | 28,50                       | 30.25    | 35.50    | 40.75    | 55.95    | 75.25    | 75.25                        |
| 8.3                                               | Jumlah areal yang dicadangkan untuk lokasi Transmigrasi yang clear dan Clean  | lokasi | 1 lokasi                    | 1 lokasi                    | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 1 lokasi | 6 lokasi                     |
| <b>Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan</b> |                                                                               |        |                             |                             |          |          |          |          |          |                              |
| 1                                                 | <i>Perencanaan</i>                                                            |        |                             |                             |          |          |          |          |          |                              |
| 1.1                                               | Konsistensi program RPJMD kedalam RKPD                                        | %      | 100                         | 100                         | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100                          |
| 1.2                                               | Konsistensi program RKPD dalam APBD                                           | %      | 100                         | 100                         | 100      | 100      | 100      | 100      | 100      | 100                          |
| 2                                                 | <i>Keuangan</i>                                                               |        |                             |                             |          |          |          |          |          |                              |

| 1   | Indikator Kinerja Daerah                                               | Satuan | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|     |                                                                        |        |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1   | 2                                                                      | 3      | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 2.1 | Opini BPK                                                              | -      | WTP                         | WTP                         | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  | WTP                          |
| 2.2 | Persentase SilPA terhadap LRA                                          | %      | 1.34                        | 1                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                            |
| 2.3 | Persentase SilPA terhadap APBD                                         | %      | 1.3                         | 1                           | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1                            |
| 2.4 | Persentase belanja pendidikan                                          | %      | 27.31                       | 20                          | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20                           |
| 2.5 | Persentase belanja kesehatan                                           | %      | 11.92                       | 10                          | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10                           |
| 3   | Kepegawaian dan Diklat                                                 |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |
| 3.1 | Persentase peningkatan kualifikasi ASN                                 | %      | 87,24                       | 88                          | 90   | 92   | 94   | 96   | 98   | 98                           |
| 3.2 | Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi (Diklat 20 JP) | %      | 1,19                        | 1,19                        | 1,19 | 1,22 | 1,24 | 1,34 | 1,34 | 1,34                         |
| 4   | Penelitian dan Pengembangan                                            |        |                             |                             |      |      |      |      |      |                              |

| 1   | Indikator Kinerja Daerah                                                                                | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |       |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|-------|------|------------------------------|
|     |                                                                                                         |          |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029  | 2030 |                              |
| 1   | 2                                                                                                       | 3        | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9     | 10   | 11                           |
| 4.1 | Persentase hasil riset dan teknologi yang diaplikasikan stakeholders                                    | %        | 100                         | 75                          | 75   | 75   | 75   | 75    | 75   | 75                           |
| 5   | Pengawasan                                                                                              |          |                             |                             |      |      |      |       |      |                              |
| 5.1 | Persentase tindak lanjut temuan Inspektorat Tahun Anggaran n-1                                          | %        | 85                          | 85,6                        | 85,7 | 86   | 86,5 | 86,75 | 87   | 87                           |
| 5.2 | Persentase Tindak Lanjut temuan BPK Tahun Anggaran n-1                                                  | %        | 73                          | 73                          | 75   | 76   | 77   | 78    | 78,1 | 78,1                         |
| 6   | Kesatuan Bangsa dan Politik                                                                             |          |                             |                             |      |      |      |       |      |                              |
| 6.1 | Indeks Kinerja Ormas                                                                                    | Nilai    | -                           | 75                          | 80   | 81   | 85   | 85    | 85   | 85                           |
| 6.2 | Jumlah Prov/Kab/kota yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif | Kab/Kota | 11                          | 11                          | 11   | 11   | 11   | 11    | 11   | 11                           |

|     | Indikator Kinerja Daerah                                                           | Satuan   | Kondisi Kinerja Awal (2024) | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi Kinerja Akhir (2030) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------|
|     |                                                                                    |          |                             | 2025                        | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |                              |
| 1   | 2                                                                                  | 3        | 4                           | 5                           | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                           |
| 6.3 | Indeks Kewaspadaan Nasional                                                        | Nilai    | -                           | 75                          | 80   | 82   | 84   | 85   | 85   | 85                           |
| 6.4 | Jumlah Prov/Kab/kota yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan | Kab/Kota | 11                          | 11                          | 11   | 11   | 11   | 11   | 11   | 11                           |

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional. RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 akan menjadi pendorong membangun gerakan bersama untuk mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di bawah Ridho Allah SWT.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan pembangunan selama lima (5) tahun, dalam hal ini tahun 2025-2029. Dalam penerapan RPJMD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama lima tahun untuk mewujudkan Visi.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJMD beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama lima (5) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMD ini.

#### **5.1 Kaidah Pelaksanaan**

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah





dilantik yaitu pada tanggal 20 Februari 2025. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dalam rencana kerja tahunan dengan mewujudkan program-program melalui penajaman pada kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka memperjelas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi, maka diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1 Seluruh pemangku kepentingan mempunyai beban dan tanggung jawab serta diharapkan berperan serta dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun.
- 2 Setiap Perangkat Daerah Provinsi Jambi berkewajiban untuk menyusun Renstra yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Bagi Perangkat Daerah yang baru terbentuk setelah dilakukan pembahasan dan ditetapkannya Perda RPJMD ini, akan dilakukan penyesuaian dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- 3 Untuk menjalankan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, maka dalam periode tahunan dilakukan tahapan sebagai berikut:
  - a) Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah.
  - b) Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang kabupaten serta penjangkaran aspirasi masyarakat (Jaring Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.
  - c) Rancangan Akhir RKPD disempurnakan setelah dilaksanakan Musrenbang Provinsi dengan mengacu pada hasil dari forum Perangkat Daerah.

- 4 Dokumen RPJMD dan RKPD merupakan dokumen yang dijadikan bahan penyusunan RAPBD, terdiri dari program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD Provinsi Jambi. Apabila terdapat program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, termasuk pendanaannya, maka akan diatur lebih lanjut dalam perubahan Peraturan Daerah.
- 5 Dokumen RPJMD merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah, dan dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra Perangkat Daerah.
- 6 Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2029, perlu dilaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam rangka menganalisa terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD ini. Untuk melihat konsistensi pelaksanaan perencanaan dalam dokumen RPJMD ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, maka Bappeda Provinsi Jambi, berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dimaksud.

#### **5.1.1. Manajemen Resiko pembangunan**

##### **Kerangka Pengendalian**

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian berkala dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

##### **a. Pengendalian perencanaan**

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan. Pengendalian jangka menengah mencakup:

- Penjabaran RPJPD Provinsi dalam RPJMD Provinsi, maupun penjabaran RPJMD Provinsi dalam RPJMD Kabupaten/ kota dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- Penetapan indikator keberhasilan
- Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

Pengendalian tahunan mencakup:

- penjabaran RPJMD Provinsi dalam RKPD Provinsi dan penjabaran RKPD Provinsi dalam RKPD Kabupaten/Kota serta Renja Perangkat Daerah
- Penetapan indikator keberhasilan
- Kesiapan *readiness criteria* prioritas pembangunan
- Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

#### b. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup:

- Monitoring kegiatan
- Monitoring mitigasi risiko pembangunan
- Evaluasi pencapaian sasaran pembangunan
- Evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan.

#### 5.1.2. Kerangka Regulasi

Pengendalian pembangunan daerah harus didukung oleh tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Selain itu dibutuhkan pula kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif, serta mampu mengoordinasi pengendalian lintas Perangkat Daerah dan lintas pemerintahan.

## 5.2 Pedoman Transisi



Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan pada saat penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, maka RPJMD ini menjadi pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030, dan selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Provinsi Jambi Tahun 2030. Mengacu pada Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan RKPD bagi provinsi yang belum memiliki RPJMD adalah berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi periode berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional. RKPD yang disusun tersebut selanjutnya menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.